



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

RENCANA AKSI DAERAH SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
Provinsi Kalimantan Timur

Tahun
2019 – 2023





GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 79 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA AKSI TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk pencapaian sasaran Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Daerah, Gubernur menyusun Rencana Aksi Daerah Pembangunan Berkelanjutan (RAD TPB) 5 (lima) tahunan bersama Bupati/Walikota di wilayahnya masing-masing dengan melibatkan Organisasi Masyarakat, Filantropi, Pelaku Usaha, akademisi, dan pihak terkait lainnya, sesuai ketentuan Pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / *Sustainable Development*;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2019-2023 di Provinsi Kalimantan Timur;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / *Sustainable Development* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2018 tentang Koordinasi Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 583);
6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 15);
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019-2023.

Pasal 1

Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat RAD TPB/SDGs merupakan pedoman dalam melaksanakan TPB/SDGs untuk transformasi peradaban global yang lebih adil, damai, sejahtera dan berkelanjutan pada Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023 dalam bentuk arah kebijakan, program serta kegiatan.

Pasal 2

Dokumen RAD TPB/SDGs sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Dokumen RAD TPB/SDGs sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah dan Organisasi Non Pemerintah seperti Organisasi Masyarakat, Filantropi, Pelaku Usaha, Akademisi dan Pihak terkait lainnya untuk melaksanakan dan mengevaluasi RAD TPB/SDGs.

Pasal 4

- (1) Sasaran dan Indikator TPB/SDGs Provinsi Kalimantan Timur dapat dilakukan kaji ulang berdasarkan evaluasi dan rekomendasi Tim Pengarah atas masukan dari Tim Pelaksana.
- (2) Kaji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur bersama dengan Instansi Teknis terkait.
- (3) Susunan Tim Pengarah dan Tim Pelaksana sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD TPB/SDGs.
- (2) Tata cara pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD TPB/SDGs sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 31 Desember 2019

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 31 Desember 2019

Pt. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

MUHAMMAD SA'BANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 80.

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2018	TARGET TAHUNAN				INDIKATIF ALOKASI	INSTANSI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022		
Pengelolaan Data PMKS Miskin Penerimaan Program Penanggulangan Kemiskinan			264.600.000	750.000.000					
Pelatihan Tenaga Kerja Bagi Gakin			269.680.000	260.700.000					
Pengelolaan Data Penerima Bantuan Iuran (PBI)			39.905.000						
Peningkatan Kualitas Rumah tidak Layak Huni (DAK Reguler TA)			1.657.000.000	1.528.000.000					
Pembinaan Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)			-	30.000.000					

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
 KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

ISRAN NOOR



NIP. 196205271985031006

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 79
TAHUN 2019 TENTANG RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR TAHUN 2019-2023

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR MATRIK.....	ix

BAB I. PENDAHULUAN 1

1.1. Keselarasan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah	1
1.2 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Menyempurnakan Tujuan Pembangunan Millenium	9
1.3. Komitmen Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	9
1.4. Prinsip-prinsip Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	9
1.5. Pembiayaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	10
1.6. Metodologi Penyusunan Rencana Aksi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	10
1.7. Sistematika Rencana Aksi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	11

BAB II. KONDISI PENCAPAIAN DAN TANTANGAN PELAKSANAAN TUJUAN
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN 12

2.1. Mengakhiri Segala Bentuk Kemiskinan Dimanapun	12
2.1.1. Mengurangi Kemiskinan di Semua Dimensi.....	12
2.1.2. Sistem Perlindungan Sosial.	14
2.1.3. Akses Pelayanan Dasar.	16
2.2. Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, Serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan ...	17
2.2.1. Menghilangkan Kelaparan.	17
2.2.2. Menghilangkan Kekurangan Gizi.....	18
2.2.3. Mengagendakan Produktivitas Pertanian & Menjamin Sistem Produksi Pangan Berkelanjutan.	19
2.3. Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia.....	21
2.3.1. Mengurangi Angka Kematian Ibu.....	21
2.3.2. Mengurangi Angka Kematian Bayi.....	22
2.3.3. Mengakhiri Epidemii Penyakit Menular	22
2.3.4. Mengakhiri Kematian Akibat Penyakit Tidak Menular.....	23
2.3.5. Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif	23
2.3.6. Akses Layanan Kesehatan Seksual dan Reproduksi.....	24
2.3.7. Mencapai Cakupan Kesehatan Universal	24
2.3.8. Meningkatkan Pemerataan Distribusi Tenaga Kesehatan, Obat dan Vaksin	25

2.4.	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata Serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	26
2.4.1.	Partisipasi Pendidikan Penduduk	26
2.4.2.	Disparitas Pendidikan antara Perempuan dan Laki-laki.....	29
2.4.3.	Kemampuan Siswa.....	30
2.4.4.	Kualitas Guru, Dosen dan Tenaga Pendidikan.....	31
2.5.	Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	32
2.5.1.	Kebijakan dan Perundang-Undangan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	33
2.5.2.	Penghapusan Segala Bentuk Kekerasan terhadap perempuan	34
2.5.3.	Menjamin Partisipasi Penuh dan Efektif serta Kesempatan yang Sama Bagi Perempuan untuk Memimpin	35
2.6.	Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi Layak.....	36
2.6.1.	Menjamin Penyediaan Sanitasi Layak dan Terjangkau.....	36
2.6.2.	Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi Layak	36
2.6.3.	Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.....	37
2.6.4.	Peningkatan Sistem Pengelolaan Lumpur Tinja	37
2.6.5.	Peningkatan Kualitas Air Sungai dan Danau sebagai Air Baku	38
2.6.6.	Jumlah DAS yang dilindungi mata airnya dan dipulihkan kesehatannya	39
2.6.7.	Melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air	40
2.7.	Menjamin Akses Energi Yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan, dan Modern.....	40
2.7.1.	Kebutuhan Energi Daerah.....	40
2.7.2.	Produksi dan Penggunaan Energi	43
2.7.3.	Energi Baru dan Terbarukan (EBT)	44
2.8.	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	44
2.8.1.	Perkembangan Ekonomi Makro	44
2.8.2.	Penciptaan Lapangan Kerja yang Layak dan Produktif.....	44
2.8.3.	Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah	45
2.8.4.	Peningkatan Pariwisata	46
2.8.5.	Kapasitas lembaga keuangan domestik	50
2.9.	Membangun Infrastruktur Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, Serta Mendorong Inovasi.....	50
2.9.1.	Pembangunan Infrastruktur	50
2.9.2.	Promosi Industrialisasi Inklusif dan Berkelanjutan.....	52
2.9.3.	Penguatan Akses Industri dan Perusahaan skala Kecil	53
2.9.4.	Penurunan Emisi GRK pada Industri.....	53
2.9.5.	Akses terhadap Teknologi Informasi dan Komunikasi	54
2.10.	Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antar Negara	54
2.10.1.	Kesenjangan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.	54
2.10.2.	Jumlah Desa Tertinggal.....	55
2.10.3.	Rata-Rata Pertumbuhan Ekonomi di Daerah	56
2.10.4.	Kepesertaan Aktif Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	57
2.11.	Kota dan Pemukiman Berkelanjutan	58
2.11.1.	Proporsi Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Layak dan Terjangkau	58
2.12.	Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan.....	58
2.13.	Penanganan Perubahan Iklim dan Penanggulangan Kebencanaan	59
2.13.1.	Jumlah peserta proper yang mencapai minimal Peringkat BIRU	59

2.13.2. Timbulan sampah yang di Daur Ulang	60
2.13.3. Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan (SML) merupakan salah satu upaya penerapan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan.....	61
2.13.4. Dokumen Strategi Pengurangan Resiko Bencana (PRB) tingkat Kabupaten/Kota	61
2.13.5. Dokumen Pelaporan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	62
2.14. Pelestarian dan Pemanfaatan Ekosistem Lautan	62
2.14.1. Jumlah Kawasan/Konservasi Perairan di Daerah	62
2.14.2. Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan	64
2.14.3. Jumlah peningkatan akses pendanaan usaha nelayan	65
2.14.4. Jumlah nelayan yang terlindungi.....	65
2.15. Pelestarian dan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan	66
2.15.1. Kinerja Tata Kelola Kehutanan	66
2.15.2. Proporsi Tutupan Hutan dan Lahan terhadap Luas Lahan Keseluruhan.....	67
2.15.3. Pengelolaan Semua Jenis Hutan Secara Berkelanjutan, Menghentikan Deforestasi, Merestorasi Hutan yang Terdegradasi dan Meningkatkan Secara Signifikan Aforestasi dan Reforestasi.....	68
2.15.4. Pemulihan Kawasan Terdegradasi	69
2.15.5. Pencegahan Kehilangan Keanekaragaman Hayati	70
2.16. Menciptakan Perdamaian, Menyediakan Akses Keadilan, dan Membangun Kelembagaan yang Tangguh.....	71
2.16.1. Mengurangi segala bentuk kekerasan.....	71
2.16.2. Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua.....	72
2.16.3. Membangun Kelembagaan yang Tangguh	72
2.17. Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global	73
2.17.1. Memperkuat Mobilisasi Sumber Daya Domestik	73
2.17.2. Infrastruktur Teknologi Informasi.....	73
2.17.3. Meningkatkan ekspor non-migas	74
2.17.4. Ketersediaan Data	75

BAB III. TARGET DAN ARAH KEBIJAKAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN..... 77

3.1. Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan	77
3.2. Tujuan 2 Tanpa Kelaparan.....	80
3.3. Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera	83
3.4. Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas	88
3.5. Tujuan 5 Kesetaraan Gender.....	93
3.6. Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak	96
3.7. Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau	100
3.8. Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	101
3.9. Tujuan 9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur.....	104
3.10. Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan.....	107
3.11. Tujuan 11 Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan	108
3.12. Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab....	111
3.13. Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim.....	112
3.14. Tujuan 14 Ekosistem Lautan	113
3.15. Tujuan 15 Ekosistem Daratan.....	114
3.16. Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh.....	116

3.17. Tujuan 17 Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan.....	119
BAB IV. PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN	122
4.1. Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi	122
4.1.1. Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Rencana Aksi Daerah	122
4.1.2. Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Rencana Aksi Pihak Non-Pemerintah.....	123
4.2. Jadwal Pemantauan dan Evaluasi Pencapaian TPB	124
4.3. Publikasi Hasil Pemantauan dan Evaluasi.....	125
BAB V. PENUTUP	126
5.1. Prinsip Pelaksanaan TPB	126
5.2. Penguatan Pelaksanaan TPB	126
5.2.1. Pengembangan Penggunaan Teknologi Informasi.....	126
5.2.2. Kemitraan Multipihak	126
5.2.3. Penguatan Koordinasi	127
5.2.4. Peningkatan Kapasitas.	127
5.2.5. Pendanaan.	127
5.2.6. Pemberian Penghargaan Kepada Para Pihak.....	127
5.2.7. Penguatan Strategi Komunikasi.....	127
5.3. Pemutakhiran Dokumen.	128

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Kesesuaian Antara RPJMD dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.....	2
Tabel 2.	Tingkat Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kaltim....	11
Tabel 3.	Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota.....	12
Tabel 4.	Garis Kemiskinan Provinsi Kaltim	12
Tabel 5.	Persentase Komoditi Makanan terhadap Garis Kemiskinan Makanan Tahun 2018.....	13
Tabel 6.	Persentase Penduduk yang Memiliki Jaminan Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Jaminan di Provinsi Kaltim, Tahun 2018	14
Tabel 7.	Akses Pelayanan Kesehatan (kelompok penduduk 40% terbawah.	15
Tabel 8.	Angka Partisipasi Murni (APM) Kelompok penduduk 40% terbawah Provinsi Kaltim Tahun 2015-2017	15
Tabel 9.	Konsumsi Kalori, Skor PPH dan Konsumsi Protein per Kapita per Hari, 2012-2018	16
Tabel 10.	Kecukupan Gizi di Provinsi Kaltim	17
Tabel 11.	Luas Panen Padi di Kalimantan Timur	18
Tabel 12.	Nilai Tambah Pertanian dibagi Jumlah Tenaga Kerja di Sektor Pertanian.....	19
Tabel 13.	Capaian Produksi Daging dan Telur Provinsi Kaltim.....	19
Tabel 14.	Angka Kematian Ibu Per-100.000 Kelahiran Hidup di Provinsi Kaltim.....	20
Tabel 15.	Jumlah Kematian Bayi di Provinsi Kaltim	20
Tabel 16.	Indikator Penyakit Menular di Provinsi Kaltim	21
Tabel 17.	Indikator Penyakit Tidak Menular di Provinsi Kaltim	21
Tabel 18.	Prevelensi penyalahgunaan narkoba	22
Tabel 19.	Jumlah Peserta KB Aktif Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018.....	22
Tabel 20.	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan di Provinsi Kaltim	23
Tabel 21.	Sebaran Tenaga Kesehatan di Provinsi Kaltim.....	23
Tabel 22.	Ketersediaan Obat dan Vaksin di Puskesmas di Provinsi Kaltim...	24
Tabel 23.	Angka Partisipasi Kasar (APK) Provinsi Kaltim Tahun 2014-2018.	25
Tabel 24.	Angka Melek Huruf Provinsi Kaltim Tahun 2014-2018	26
Tabel 25.	Persentase Penduduk Umur 5 Tahun ke Atas menurut Jenis Kelamin dan Status Pendidikan Tahun 2018	27
Tabel 26.	Persentase Penduduk Umur 7-24 Tahun menurut Jenis Kelamin & Status Pendidikan Tahun 2018.....	27
Tabel 27.	Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas menurut Kabupaten/Kota dan Ijazah/STTB Tertinggi yang dimiliki tahun 2018	29
Tabel 28.	Jumlah Guru Menurut Tingkat Pendidikan dan Kabupaten/Kota Provinsi Kaltim,	29
Tabel 29.	Persentase Guru SD/SMP/SMA/SMK dengan kualifikasi minimal S1/D4.....	30
Tabel 30.	Persentase Anggota DPRD Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota Tahun 2018	33
Tabel 31.	Persentase Perempuan di lembaga Eksekutif.....	33
Tabel 32.	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kaltim, 2014-2018.....	34

Tabel 33.	Persentase Rumah Tangga menurut Kabupaten/Kota dan Tempat Pembuangan Akhir Tinja	35
Tabel 34.	Indeks Kualitas Air Sungai Provinsi Kaltim Tahun 2017-2018.....	35
Tabel 35.	Daerah Aliran Sungai di Kaltim.....	36
Tabel 36.	Capaian Pengelolaan Daerah Aliran Sungai di Kaltim.....	36
Tabel 37.	Luas lahan kritis yang direhabilitasi	37
Tabel 38.	Pelayanan Energi Listrik Kepada Masyarakat di Kaltim.....	38
Tabel 39.	Penggunaan Energi di Kaltim	38
Tabel 40.	Kapasitas Pembangkit dan Produksi Tenaga Listrik di Kaltim	39
Tabel 41.	Penggunaan Energi Listrik di Kaltim	40
Tabel 42.	Produksi Energi Baru Terbaharukan di Kaltim.....	40
Tabel 43.	PDRB ADHB, ADHK, PDRB Per Kapita	40
Tabel 44.	Jumlah tenaga kerja utama, dan tingkat pengangguran.....	41
Tabel 45.	Jumlah UMKM dan Proporsi Kredit UMKM	42
Tabel 46.	Jumlah Wisatawan dan Obyek Wisata	42
Tabel 47.	Rekapitulasi Objek Wisata Kaltim	43
Tabel 48.	Kawasan Destinasi Pariwisata Nasional, Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional, dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (PP RI No. 50/2011)	44
Tabel 49.	Kontribusi Pariwisata terhadap PDB	45
Tabel 50.	Lembaga Keuangan Domestik di Kaltim	46
Tabel 51.	Panjang jalan berdasarkan jenis dan kualitas jalan.....	46
Tabel 52.	Jumlah dan kapasitas pelabuhan penumpang, pelabuhan industri.....	47
Tabel 53.	Jumlah penumpang, pesawat	47
Tabel 54.	Nilai Tambah Sektor Industri dan Proporsi Tenaga Kerja pada Sektor Industri	48
Tabel 55.	Perkembangan IKM menurut Kabupaten/Kota di Kaltim Tahun 2017	49
Tabel 56.	Emisi Gas Rumah Kaca pada Industri di Kaltim.....	49
Tabel 57.	Akses terhadap Teknologi Informasi di Kaltim.....	49
Tabel 58.	Indeks Gini Provinsi Kaltim.....	50
Tabel 59.	Indeks Gini Kabupaten/Kota di Kaltim	50
Tabel 60.	Jumlah Desa Tertinggal Kabupaten di Kaltim Tahun 2017.....	51
Tabel 61.	Jumlah Desa Tertinggal, Berkembang dan Mandiri di Kaltim	51
Tabel 62.	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Kaltim .	52
Tabel 63.	Produksi Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten/Kota di Provinsi Kaltim	52
Tabel 64.	Jumlah Peserta Program Jaminan Sosial Bidang ketenagakerjaan di Kaltim	53
Tabel 65.	Status kepemilikan rumah, jenis bangunan rumah, dan jamban ..	53
Tabel 66.	Jumlah Kejadian Bencana di Kaltim tahun 2013-2018	54
Tabel 67.	Indeks Risiko Bencana Kabupaten/Kota di Kaltim	54
Tabel 68.	Peringkat Penilaian PROPER di Kaltim	55
Tabel 69.	Data timbulan sampah Provinsi Kaltim	56
Tabel 70.	Timbulan Sampah Penduduk di Kabupaten/Kota Provinsi Kaltim	56
Tabel 71.	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha	59
Tabel 72.	Bantuan bagi nelayan/pembudidaya	60
Tabel 73.	Jumlah nelayan di Provinsi Kaltim.....	60
Tabel 74.	Jumlah Asuransi Nelayan di Provinsi Kaltim	60
Tabel 75.	Jumlah Nelayan yang Terlindungi di Kalimantan Tim	61
Tabel 76.	Luas Fungsi Kawasan Hutan	62

Tabel 77.	Perizinan Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan di Provinsi Kaltim	62
Tabel 78.	Kawasan Konservasi di Provinsi Kaltim.....	62
Tabel 79.	Luas lahan kritis yang direhabilitasi.....	63
Tabel 80.	Luas Lahan Kritis di Kabupaten/Kota Provinsi Kaltim.....	64
Tabel 81.	Tindak kejahatan dan Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak di Provinsi Kaltim.....	66
Tabel 82.	Penyelesaian kasus di pengadilan	66
Tabel 83.	Indeks Demokrasi	67
Tabel 84.	Pendapatan Provinsi Kaltim.....	67
Tabel 85.	Komunikasi dan Informasi Provinsi Kaltim	67
Tabel 86.	Nilai dan Laju Pertumbuhan Ekspor Non Migas Provinsi Kaltim Tahun 2014-2018	68
Tabel 87.	Tabel Presentase konsumen yang menggunakan data statistik Tahun 2016-2018	70
Tabel 88.	Target Pencapaian Indikator Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan	71
Tabel 89.	Target Pencapaian Indikator Tujuan 2 Tanpa Kelaparan.....	75
Tabel 90.	Target Pencapaian Indikator Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera.....	77
Tabel 91.	Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas	82
Tabel 92.	Target Pencapaian Indikator Tujuan 5 Kestaraan Gender	86
Tabel 93.	Target Pencapaian Indikator Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak.....	89
Tabel 94.	Target Pencapaian Indikator Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau.....	93
Tabel 95.	Target Pencapaian Indikator Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	95
Tabel 96.	Target Pencapaian Indikator Tujuan 9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur.....	97
Tabel 97.	Target Pencapaian Indikator Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan	99
Tabel 98.	Target Pencapaian Indikator Tujuan 11. Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan	101
Tabel 99.	Target Pencapaian Indikator Tujuan 12. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab.....	103
Tabel 100.	Target Pencapaian Indikator Tujuan 13. Penanganan Perubahan Iklim	104
Tabel 101.	Target Pencapaian Indikator Tujuan 14 Ekosistem Laut.....	105
Tabel 102.	Target Pencapaian Indikator Tujuan 15. Ekosistem Daratan ...	106
Tabel 103.	Target Pencapaian Indikator Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yg Tangguh	107
Tabel 104.	Target Pencapaian Indikator Tujuan 17 Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan.....	110
Tabel 105.	Jadwal Pemantauan dan Pelaporan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	116

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Kaltim..	11
Gambar 2.	Jumlah Kepesertaan Sistem Perlindungan Kesehatan.....	14
Gambar 3.	Angka Partisipasi Kasar Tingkat Pendidikan SD/Sederajat sampai dengan Pendidikan Tinggi di Kaltim, 2014-2018.....	25
Gambar 4.	Angka Partisipasi Murni di Kaltim tahun 2014-2018	26
Gambar 5.	Rata-Rata Lama Sekolah Menurut Jenis Kelamin di Kaltim tahun 2013-2018	28
Gambar 6.	Indeks Pemberdayaan Gender dan Indeks Pembangunan Gender Kaltim, 2014-2018	31
Gambar 7.	Jumlah Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak Provinsi Kaltim Tahun 2014-2018	32
Gambar 8.	Bauran Energi Berdasarkan sumber energi di Provinsi Kaltim Tahun 2015	37
Gambar 9.	Bauran Energi Berdasarkan sumber energi di Provinsi Kaltim Tahun 2014-2018	38
Gambar 10.	Jumlah Kunjungan Wisata di Kaltim	45
Gambar 11.	Indeks Gini Provinsi Kaltim	51
Gambar 12.	Peta Indeks Risiko Bencana Multi Ancaman Provinsi Kaltim (INARisk BNPB, 2019)	55
Gambar 13.	Peta Penetapan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Kepulauan Derawan dan Perairan sekitarnya di Kabupaten Berau Provinsi Kaltim	58
Gambar 14.	Peta Kawasan Konservasi Perairan dan Pesisir Beras Basah Kota Bontang	58
Gambar 15.	Klasifikasi Lahan Kritis di Provinsi Kaltim	64
Gambar 16.	Jumlah Kriminalitas dan Kasus Kekerasan Perempuan Anak..	66
Gambar 17.	Permohonan Informasi Publik yang bisa dipenuhi Badan Publik di Kaltim (Komisi Informasi Kaltim, 2017).....	69
Gambar 18.	Alur informasi untuk pemantauan Rencana Aksi TPB	113
Gambar 19.	Alur Informasi Monitoring Organisasi non-Pemerintah... ..	115

DAFTAR MATRIK

Matrik 1.	Program Dan Kegiatan Pemerintah Provinsi Kaltim.....	129
Matrik 2.	Program Dan Kegiatan Non Pemerintah.....	183
Matrik 3.	Program Dan Kegiatan Pemerintah Kab/Kota.....	284

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Keselarasan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Agenda pembangunan Provinsi Kalimantan Timur dimuat di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kaltim tahun 2019-2023, yang telah disahkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Kaltim (Perda Kaltim) Nomor 2 tahun 2019. RPJMD Kaltim merupakan rencana pembangunan tahap keempat dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kaltim tahun 2005-2025 (Perda Kaltim Nomor 15 tahun 2008).

Visi RPJPD Provinsi Kaltim 2005-2025 adalah “Terwujudnya Masyarakat yang Adil dan Sejahtera dalam Pembangunan Berkelanjutan”, dengan didukung melalui misi:

1. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia Kalimantan Timur yang mandiri, berdaya saing tinggi dan berakhlak mulia.
2. Mewujudkan struktur ekonomi yang handal dengan partisipasi masyarakat yang seluas-luasnya.
3. Mewujudkan pelayanan dasar bagi masyarakat secara merata dan proporsional.
4. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan yang partisipatif berbasis penegakan hukum.
5. Mewujudkan pembangunan yang terpadu dan serasi dengan pendekatan pengembangan wilayah berbasis ekonomi dan ekologi.

RPJMD Provinsi Kaltim Tahun 2019-2023 mengusung Visi Pembangunan yaitu “Berani untuk Kalimantan Timur Berdaulat”, yang mengandung makna bahwa Pemerintahan Kaltim memiliki tekad, komitmen dan keberanian menjalankan kewenangan secara otonom dalam mengatur dan mengelola potensi sumber daya alamnya, untuk mewujudkan masyarakat Kaltim yang mandiri, berdaya saing dan sejahtera. Visi Pembangunan Kaltim tersebut dicapai melalui 5 (lima) misi, yaitu:

1. Berdaulat dalam pembangunan sumber daya manusia yang berakhlak mulia dan berdaya saing, terutama perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas;
2. Berdaulat dalam pemberdayaan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan;
3. Berdaulat dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur kewilayahan;
4. Berdaulat dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan;
5. Berdaulat dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik.

Indonesia merupakan salah satu negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berperan aktif dalam penentuan sasaran Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) sebagaimana tertuang dalam dokumen *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*. Komitmen Pemerintah Indonesia dalam mendukung pencapaian TPB tersebut telah diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Presiden Republik Indonesia juga telah menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, yang juga memuat sasaran TPB tahun 2017-2019.

TPB terdiri dari 17 Tujuan dan 169 Target yang tercakup dalam dimensi sosial, ekonomi dan lingkungan serta hukum dan tata kelola. Seluruh tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tanpa kemiskinan – Mengentaskan segala bentuk kemiskinan di seluruh tempat.
2. Tanpa kelaparan – Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan perbaikan nutrisi, serta menggalakkan pertanian yang berkelanjutan.
3. Kehidupan sehat dan sejahtera – menggalakkan hidup sehat dan mendukung kesejahteraan untuk semua usia.
4. Pendidikan berkualitas – Memastikan pendidikan berkualitas yang layak dan inklusif serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang.
5. Kesetaraan gender – Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan.
6. Air bersih dan sanitasi layak – Menjamin akses atas air dan sanitasi untuk semua.
7. Energi bersih dan terjangkau – Memastikan akses pada energi yang terjangkau, bisa diandalkan, berkelanjutan dan modern untuk semua.
8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi – Mempromosikan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan inklusif, lapangan pekerjaan yang layak untuk semua.
9. Industri, inovasi dan infrastruktur – Membangun infrastruktur kuat, mempromosikan industrialisasi berkelanjutan, dan mendorong inovasi.
10. Berkurangnya kesenjangan – Mengurangi kesenjangan di dalam dan di antara negara-negara.
11. Kota dan komunitas berkelanjutan – Membuat perkotaan menjadi inklusif, aman, kuat, dan berkelanjutan.
12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab – Memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan.
13. Penanganan perubahan iklim – Mengambil langkah penting untuk melawan perubahan iklim dan dampaknya.
14. Ekosistem laut – Perlindungan dan penggunaan samudera, laut dan sumber daya kelautan secara berkelanjutan.
15. Ekosistem darat – Mengelola hutan secara berkelanjutan, melawan perubahan lahan menjadi gurun, menghentikan dan merehabilitasi kerusakan lahan, menghentikan kepunahan keanekaragaman hayati.
16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh – Mendorong masyarakat adil, damai, dan inklusif.
17. Kemitraan untuk mencapai tujuan – Menghidupkan kembali kemitraan global demi pembangunan berkelanjutan.

Berdasarkan Misi RPJMD Provinsi Kaltim 2019-2023, maka dapat dilihat kesesuaian RPJMD dan TPB pada tabel berikut:

Tabel 1. Kesesuaian Antara RPJMD dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Misi dan Tujuan RPJMD	Program Prioritas	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
Misi 1. Berdaulat dalam pembangunan sumber daya manusia yang berakhlak mulia dan berdaya saing, terutama perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas		
Tujuan 1. Mewujudkan Masyarakat yang berakhlak mulia dan berdaya saing	Sasaran 1 : Meningkatnya pengamalan nilai-nilai budaya dan keagamaan	T 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh

Misi dan Tujuan RPJMD	Program Prioritas	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
	di Masyarakat	T 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan
	Program Pendidikan Politik Masyarakat	
	Program Pengembangan Nilai-Nilai Keagamaan	
	Program Pengembangan Nilai Budaya	
	Sasaran 2 : Meningkatnya taraf pendidikan masyarakat	T 4. Pendidikan berkualitas
	Program Pengembangan Sekolah Kejuruan	
	Program Pendidikan Menengah Atas	
	Program Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	
	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	
	Program Peningkatan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Masyarakat	
	Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Pendidikan	
	Pendidikan Jarak Jauh (<i>Distance Learning System</i>)	
	Pendidikan Luar Biasa	
	Peningkatan Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Anak	
	Program Peningkatan Layanan, Otomasi dan Kerjasama Perpustakaan	
	Sasaran 3 : Meningkatnya kesehatan dan gizi masyarakat	T 1. Tanpa kemiskinan . T 2. Tanpa kelaparan T 3. Kehidupan sehat dan sejahtera
	Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan	
	Program Upaya Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit	
	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	
	Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Kesehatan	
Tujuan 2 : Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat	Sasaran 4 : Meningkatnya partisipasi	T 1. Tanpa kemiskinan .

Misi dan Tujuan RPJMD	Program Prioritas	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
	aktif perempuan dalam pembangunan	T 2. Tanpa kelaparan
	Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Pemberdayaan Perempuan	T 5. Kesetaraan gender
	Program Penguatan Kelembagaan Perlindungan Perempuan Dan Anak	T 10. Berkurangnya kesenjangan
	Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Kesejahteraan Sosial	
	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	
	Sasaran 5 : Meningkatnya kewirausahaan dan prestasi pemuda	T 3. Kehidupan sehat dan sejahtera
	Program Peningkatan Prestasi Olahraga	
	Sasaran 6 : Meningkatnya daya saing tenaga kerja	T 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi
	Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	
	Program Pengembangan Kewirausahaan Kompetitif	
Misi 2. Berdaulat dalam pemberdayaan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan		
Tujuan 3 : Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan	Sasaran 7 : Meningkatnya usaha ekonomi koperasi dan UKM	T 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi
	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	
	Sasaran 8 : Meningkatnya keberdayaan Masyarakat Perdesaan	T 10. Berkurangnya kesenjangan
	Program Pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	T 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab
	Program Pembangunan Desa dan Kawasan	T 13. Penanganan perubahan iklim .
	Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan	

Misi dan Tujuan RPJMD	Program Prioritas	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
	Kelurahan	
	Program Kampung Iklim+	
	Sasaran 9 : Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap ekonomi daerah	T 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi
	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	
Tujuan 4 : Mewujudkan kemandirian ekonomi yang berkelanjutan	Sasaran 10 : Meningkatnya kontribusi sektor perindustrian dalam perekonomian daerah	T 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi T 9. Industri, inovasi dan infrastruktur
	Program Peningkatan dan Pengembangan Industri	
	Sasaran 11 : Meningkatnya realisasi investasi	T 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi
	Program Kemudahan Layanan dan Percepatan Proses Perizinan	T 9. Industri, inovasi dan infrastruktur
	Program Pengendalian Pelaksanaan Investasi	T 10. Berkurangnya kesenjangan
	Sasaran 12 : Meningkatnya kontribusi sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura terhadap ekonomi daerah	T 2. Tanpa kelaparan T 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab
	Program Peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan	
	Program peningkatan produksi dan nilai tambah hortikultura	
	Sasaran 13 : Meningkatnya kontribusi sektor peternakan terhadap ekonomi daerah	T 2. Tanpa kelaparan T 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab
	Program Pengembangan Usaha Peternakan	
	Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Peternakan	
	Sasaran 14 : Meningkatnya kontribusi sektor perkebunan terhadap ekonomi daerah	T 2. Tanpa kelaparan T 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi
	Program Peningkatan Produksi Perkebunan	T 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab
	Program Pembinaan dan	

Misi dan Tujuan RPJMD	Program Prioritas	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
	Pengawasan Usaha Perkebunan	T 13. Penanganan perubahan iklim
	Program Peningkatan Mutu dan Pemasaran Hasil Perkebunan	T 15. Ekosistem darat
	Program Mitigasi Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Perkebunan	
	Sasaran 15 : Meningkatnya kontribusi sektor perikanan terhadap ekonomi daerah	T 2. Tanpa kelaparan T 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi
	Program Pengembangan Produksi Budidaya dan Penguatan Daya Saing Produk Perikanan	T 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab
	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	T 13. Penanganan perubahan iklim
	Program Peningkatan Penyediaan Benih Ikan dan Udang Unggulan	T 14. Ekosistem laut
	Program Pengelolaan Ruang Laut	T 15. Ekosistem darat
	Sasaran 16 : Meningkatnya kontribusi sektor kehutanan terhadap ekonomi daerah	T 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi
	Program Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan	T 13. Penanganan perubahan iklim .
	Program Perlindungan dan KSDAE	T 15. Ekosistem darat
	Program Pengelolaan DAS dan RHL	
	Program Penyuluhan, pemberayaan masyarakat hutan dan perhutanan sosial	
	Sasaran 17 : Meningkatnya pendanaan pembangunan daerah	T 10. Berkurangnya kesenjangan
	Program Perencanaan dan pengembangan Sumber Pendapatan Daerah	T 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan
Misi 3. Berdaulat dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur kewilayahan		
Tujuan 5 : Meningkatkan Pemerataan Pelayanan Infrastruktur Dasar	Sasaran 18 : Meningkatnya aksesibilitas wilayah	T 9. Industri, inovasi dan infrastruktur
	Program Pembangunan Prasarana Pelayaran	T 11. Kota dan komunitas berkelanjutan –

Misi dan Tujuan RPJMD	Program Prioritas	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
		Membuat perkotaan menjadi inklusif, aman, kuat, dan berkelanjutan.
	Sasaran 19 : Meningkatnya konektivitas antar kawasan	T 9. Industri, inovasi dan infrastruktur T 10. Berkurangnya kesenjangan
	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	T 11. Kota dan komunitas berkelanjutan – Membuat perkotaan menjadi inklusif, aman, kuat, dan berkelanjutan.
	Sasaran 20 : Meningkatnya fungsi pelayanan infrastruktur sumber daya air	T 6. Air bersih dan sanitasi layak T 9. Industri, inovasi dan infrastruktur
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	
	Program Pembangunan Infrastruktur Keciaptakaryaan	
	Sasaran 21 : Menurunnya kawasan kumuh	T 1. Tanpa kemiskinan
	Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	
	Sasaran 22 : Meningkatnya kinerja penyelenggaraan penataan ruang	T 9. Industri, inovasi dan infrastruktur T 10. Berkurangnya kesenjangan
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	T 13. Penanganan perubahan iklim
	Sasaran 23 : Terpenuhinya kebutuhan energi daerah	T 7. Energi bersih dan terjangkau
	Program Diversifikasi & Konservasi Energi	
	Program Pengembangan Ketenagalistrikan	
Misi 4. Berdaulat dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan		
Tujuan 6 : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Sasaran 24 : Menurunnya emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	T 13. Penanganan perubahan iklim
	Program Tata Lingkungan	
	Program Pengendalian	

Misi dan Tujuan RPJMD	Program Prioritas	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
	Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	
	Sasaran 25 : Meningkatnya Ketangguhan Menghadapi Bencana	T 11. Kota dan komunitas berkelanjutan T 13. Penanganan perubahan iklim
	Program Pencegahan dan kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Daerah	
	Program Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana	
Misi 5. Berdaulat dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik.		
Tujuan 7 : Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik	Sasaran 26 : Terwujudnya Birokrasi yang efektif dan efisien	T 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh T 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan
	Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja	
	Program Penguatan Kelembagaan	
	Program Pengendalian Rencana Pembangunan Daerah	
	Sasaran 27 : Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	T 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh T 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan
	Program Peningkatan Pelayanan Publik	
	Program Tata Laksana Pemerintahan	
	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	
	Sasaran 28 : Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel	T 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh T 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan
	Pencegahan KKN	
	Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	

1.2. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Menyempurnakan Tujuan Pembangunan Millenium

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs) dicanangkan bersama oleh negara-negara lintas pemerintahan pada resolusi PBB yang diterbitkan pada 21 Oktober 2015 sebagai ambisi pembangunan bersama hingga tahun 2030. TPB merupakan kelanjutan atau pengganti dari Tujuan Pembangunan Milenium/*Millenium Development Goals* (MDGs) yang ditandatangani oleh pemimpin-pemimpin dari 189 negara sebagai Deklarasi Milenium di markas besar PBB pada tahun 2000 dan tidak berlaku lagi sejak akhir 2015. Mulai tahun 2016, TPB secara resmi menggantikan Tujuan Pembangunan Millennium, berisi seperangkat tujuan transformatif yang disepakati dan berlaku bagi seluruh bangsa tanpa terkecuali.

Dibandingkan MDGs, cakupan tujuan dalam TPB lebih luas. Jika MDGs hanya terdiri 8 tujuan kesejahteraan. Keseluruhan tujuan SDGs mencakup 3 dimensi tujuan baik ekonomi, sosial, dan lingkungan secara lebih komprehensif dan universal, sedangkan MDGs, di sisi lain dinilai banyak kalangan lebih mengedepankan aspek sosial-ekonomi (7 item) dibanding satu tujuan terkait lingkungan. Perubahan mendasar lainnya yang dibawa TPB adalah prinsip “*no one left behind*”, tidak ada seorang pun yang ditinggalkan”. hal ini mengartikan bahwa pembangunan dalam agenda TPB harus memberi manfaat bagi semua lapisan kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok masyarakat yang rentan. Selain itu pula, arah tujuan pembangunan berkelanjutan juga mengandung prinsip yang menekankan kesetaraan antar negara dan antar warga negara. Pelaksanaan SDGs berlaku secara universal untuk negara-negara anggota PBB, baik negara maju, miskin, dan negara berkembang.

1.3. Komitmen Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Pemprov Kaltim telah membentuk Tim Koordinasi Daerah Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan melalui Keputusan Gubernur Kaltim No. 050/K.362/2019 tanggal 31 Mei 2019 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Daerah Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* Provinsi Kaltim Tahun 2019-2023. Susunan Tim Koordinasi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Kaltim terdiri dari Tim Pengarah, Tim Pelaksana, Kelompok Kerja yang dibagi menjadi 3 pilar Pembangunan, dan Sekretariat.

Sekretariat TPB Provinsi Kaltim adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Kaltim.

1.4. Prinsip-prinsip Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Tiga prinsip pelaksanaan TPB mencakup hal-hal mendasar dalam kehidupan masyarakat, yaitu:

- a. *Universality* yang dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi, menghormati hak individu, perdamaian, dan kemitraan.
- b. *Integration*, yang dilaksanakan secara terintegrasi pada semua dimensi sosial, ekonomi dan lingkungan yang saling terkait.
- c. *no-one left behind* atau kegiatan yang dilaksanakan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan.

1.5. Pembiayaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Provinsi Kaltim berkomitmen dalam pelaksanaan TPB dan mengupayakan seoptimal mungkin berbagai sumber pembiayaan untuk pendanaan pelaksanaan TPB. Adapun sumber-sumber pembiayaan tersebut berasal dari:

- a) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kaltim (APBD Provinsi Kaltim). Pembiayaan dengan menggunakan Dana APBD Provinsi Kaltim dapat dilihat di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kaltim (RPJMD Kaltim), Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah di lingkungan Provinsi Kaltim, serta Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kaltim setiap tahun berjalan, yang telah diintegrasikan untuk mendukung pencapaian TPB di Provinsi Kaltim.
- b) Sumber Pembiayaan Non-Pemerintah dan Masyarakat. Mitra pembangunan (Organisasi Non Pemerintah, Organisasi Masyarakat, dan Lembaga Kerjasama Internasional) di Kaltim melakukan koordinasi dan integrasi program-program masing-masing organisasi, dalam upaya pencapaian TPB di Kaltim. Sumber-sumber pendanaan dari organisasi keagamaan, seperti Muhammadiyah, Nadhatul Ulama Kaltim, serta lembaga serupa dalam keagamaan, juga dikoordinasikan agar mendukung pencapaian TPB di Kaltim.
- c) Sumber Pembiayaan Swasta. Pembiayaan dari swasta dikoordinasikan melalui Forum Corporate Responsibility Perusahaan.

1.6. Metodologi Penyusunan Rencana Aksi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Tahapan Penyusunan Rencana Aksi (Renaksi) TPB dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, yang melalui proses sebagai berikut:

- 1) Langkah 1: Menetapkan tim pelaksana dan kelompok kerja (Pokja) yang didasarkan atas Keputusan Gubernur terkait Tim Koordinasi Daerah Pelaksanaan TPB Kaltim;
- 2) Langkah 2: Melakukan sidang pleno pertama untuk membahas tahapan dan tata cara penyusunan Renaksi TPB;
- 3) Langkah 3: Masing-masing pokja yaitu pokja pilar pembangunan sosial, pilar pembangunan ekonomi, pilar pembangunan lingkungan, pilar pembangunan hukum dan tata kelola, menyusun Renaksi TPB, dengan tahapan:
 - a. Melakukan analisis situasi dan tantangan pelaksanaan TPB
 - b. Melakukan perumusan kebijakan, target, program, kegiatan dan indikator terkait dengan pencapaian TPB Mengidentifikasi alokasi pagu indikatif, sumber pendanaan dan instansi pelaksana
 - c. Merumuskan sistem monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan TPB
- 4) Langkah 4: Melaksanakan pembahasan draf Rencana Aksi TPB (narasi dan matrik) masing-masing Pokja;
- 5) Langkah 5: Melaksanakan Pleno penyempurnaan Draft Final Renaksi TPB berdasarkan masukan hasil pembahasan dari masing-masing Pokja;

- 6) Langkah 6 : Melakukan Konsultasi Publik kepada seluruh pemangku kepentingan
- 7) Langkah 7: Pengesahan Renaksi TPB oleh Gubernur.
- 8) Langkah 8: Melakukan Sosialisasi dan fasilitasi Renaksi TPB kepada seluruh pemangku kepentingan.

1.7. Sistematika Rencana Aksi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Dokumen Renaksi TPB Kaltim ini terdiri dari 5 (lima) bagian (bab), yaitu:

- a. Bab I merupakan pendahuluan yang menjelaskan kesejarahan TPB dengan RPJMD, komitmen pelaksanaan, pembiayaan, metodologi penyusunan rencana aksi dan sistematika rencana aksi
- b. Bab II berisikan penjelasan kondisi pencapaian dan tantangan pelaksanaan TPB dari setiap tujuan di dalam TPB.
- c. Bab III berisikan target dan arah kebijakan TPB berdasarkan masing-masing tujuan dalam TPB
- d. Bab IV merupakan bagian Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan, yang berisikan mekanisme pemantauan dan evaluasi, jadwal pemantauan dan evaluasi pencapaian TPB tahun 2019-2023, dan publikasi hasil pemantauan dan evaluasi.
- e. Bab V merupakan bagian penutup yang berisi tentang kaidah pelaksanaan TPB, serta upaya dan proses yang dilakukan dalam penyusunan RAD. Bab ini juga menerangkan tentang kesempatan kaji ulang dari dokumen RAD TPB.

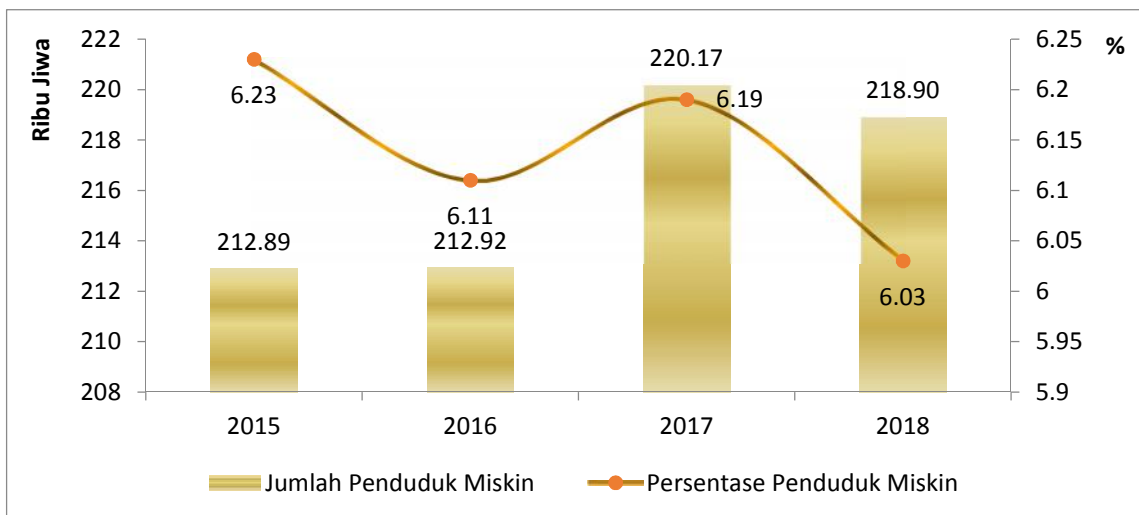
Dokumen Rencana Aksi ini juga memuat 2 (dua) lampiran, yaitu Matriks Program/Kegiatan Pemerintah dan Matriks Program/Kegiatan Non Pemerintah. Matriks Program/Kegiatan Pemerintah berisikan Program, Kegiatan, Target Kegiatan, Indikasi Anggaran, sumber pendanaan, dan instansi pelaksana yang dilaksanakan oleh pemerintah. Matriks Program/Kegiatan Non Pemerintah berisi Program, Kegiatan, Target Kegiatan, Indikasi Anggaran, sumber pendanaan, instansi pelaksana, serta lokasi yang menjelaskan tentang tempat kegiatan dilaksanakan (sesuai dengan wilayah administrasi pelaksanaan kegiatan misalnya nama Provinsi, Kabupaten/Kota) yang dilaksanakan oleh organisasi non pemerintah.

BAB II. KONDISI PENCAPAIAN DAN TANTANGAN PELAKSANAAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

2.1. Mengakhiri Segala Bentuk Kemiskinan Dimanapun

2.1.1. Mengurangi Kemiskinan di Semua Dimensi.

Selama periode tahun 2013-2017, tingkat kemiskinan Kaltim berfluktuasi dan cenderung meningkat, yang dipengaruhi oleh migrasi penduduk miskin dari luar daerah. Jumlah penduduk miskin di Kaltim pada tahun 2018 sebesar 218.900 (6,03 persen). Dibandingkan dengan penduduk miskin pada tahun 2017 sebesar 220.170 (6,19 persen), berarti jumlah penduduk miskin turun sebanyak 1.270 orang atau secara persentase turun sebesar 0,16 persen (BPS, angka Maret).



Gambar 1. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Kaltim

Jika dilihat menurut kabupaten/kota, pada tahun 2018 tingkat kemiskinan tertinggi terdapat di Kabupaten Mahakam Ulu sebesar 11,62 persen, Kabupaten Kutai Timur sebesar 9,22 persen, Kabupaten Kutai Barat sebesar 9,15 persen dan Kabupaten Paser sebesar 9,03 persen. Sedangkan tingkat kemiskinan terendah tercatat di Kota Balikpapan hanya sebesar 2,64 persen. Penduduk miskin pada tahun 2018 terbanyak berada di Kabupaten Kutai Kertanegara sebanyak 56.560, Kota Samarinda sebanyak 39.230 dan Kutai Timur sebanyak 33.020 orang.

Tabel 2. Tingkat Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kaltim

No	Kab/Kota	2014	2015	2016	2017	2018
1	Paser	7,87	8,64	8,68	9,28	9,03
2	Kutai Barat	7,53	8,13	8,65	8,72	9,15
3	Kutai Kartanegara	7,43	7,58	7,63	7,57	7,41
4	Kutai Timur	9,1	9,55	9,16	9,29	9,22
5	Berau	4,76	5,11	5,37	5,41	5,04
6	Penajam Paser Utara	7,56	7,62	7,49	7,63	7,40
7	Balikpapan	2,46	2,78	2,81	2,82	2,64
8	Samarinda	4,56	5,25	4,72	4,77	4,59
9	Bontang	5,1	5,74	5,18	5,16	4,67
10	Mahakam Ulu	-	9,9	10,65	11,29	11,62
11	Kaltim	6,42	6,23	6,11	6,19	6,03

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kaltim

Tabel 3. Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota

No	Kab/Kota	2014	2015	2016	2017	2018
1	Paser	20.340	22.510	23.170	25.300	25.140
2	Kutai Barat	12.920	11.820	12.650	12.800	13.490
3	Kutai Kartanegara	52.530	54.100	55.820	56.570	56.560
4	Kutai Timur	28.300	30.320	30.170	31.950	33.020
5	Berau	9.770	10.760	11.470	11.860	11.330
6	Penajam Paser Utara	11.580	11.700	11.660	12.000	11.760
7	Balikpapan	15.020	17.100	17.550	17.860	17.010
8	Samarinda	36.650	42.800	38.950	40.010	39.230
9	Bontang	8.210	9.100	8.600	8.750	8.100
10	Mahakam Ulu	-	2.670	2.880	3.070	3.250
11	Kaltim	253.600	212.890	212.920	220.170	218.900

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kaltim

Besar kecilnya jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh Garis Kemiskinan, karena penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan. Selama Maret 2015 – Maret 2018, Garis Kemiskinan naik sebesar 21,32 persen, yaitu dari Rp 473.710,- per kapita per bulan pada Maret 2015 menjadi Rp. 574.704,- per kapita per bulan pada Maret 2018. Dengan memperhatikan komponen Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM), terlihat bahwa peranan komoditi makanan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan).

Tabel 4. Garis Kemiskinan Provinsi Kaltim

Periode	Garis Kemiskinan			Jumlah Penduduk Miskin	Persentase Penduduk Miskin
	Makanan	Non Makanan	Total		
Maret 2014				253.600	6,42
Maret 2015	336.356	137.353	473.710	212.890	6,23
Maret 2016	363.918	147.287	511.205	212.920	6,11
Maret 2017	389.152	158.943	548.094	220.170	6,19
Maret 2018	405.108	169.596	574.704	218.900	6,03

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kaltim Tahun 2018

Komoditi makanan mempunyai andil terbesar dalam pembentuk garis kemiskinan makanan di Kaltim, di mana pada bulan Maret 2018 antara daerah perkotaan dan pedesaan terdapat kemiripan pola. Dari enam komoditi penyumbang garis kemiskinan makanan terbesar di pedesaan dan di perkotaan,

tiga komoditi terbesarnya terdapat persamaan, yaitu beras, rokok kretek filter, dan telur ayam ras.

Tabel 5. Persentase Komoditi Makanan terhadap Garis Kemiskinan Makanan Tahun 2018

No	Perkotaan		Perdesaan	
	Komoditi	%	Komoditi	%
1	Beras	25,26	Beras	26,87
2	Rokok Kretek Filter	16,11	Rokok Kretek Filter	16,94
3	Telur ayam ras	6,59	Telur ayam ras	5,64
4	Daging ayam ras	5,96	Mie Instan	4,28
5	Mie Instan	4,46	Gula Pasir	4,27
6	Gula Pasir	3,34	Daging Ayam Ras	4,20
7	Tongkol/Tuna/Cakalang	3,04	Tongkol/Tuna/Cakalang	2,73
8	Kue basah	2,54	Kue Basah	2,63
9	Tempe	2,49	Bawang merah	2,44
10	Tahu	2,26	Tempe	2,43
11	Bawang Merah	2,23	Tahu	2,30
12	Kopi Bubuk & Kopi Instan (Sachet)	2,01	Bandeng	2,08
13	Susu Bubuk	2,00	Cabe Rawit	2,02
14	Susu Kental Manis	1,96	Roti	1,98
15	Roti	1,66	Susu Kental Manis	1,96

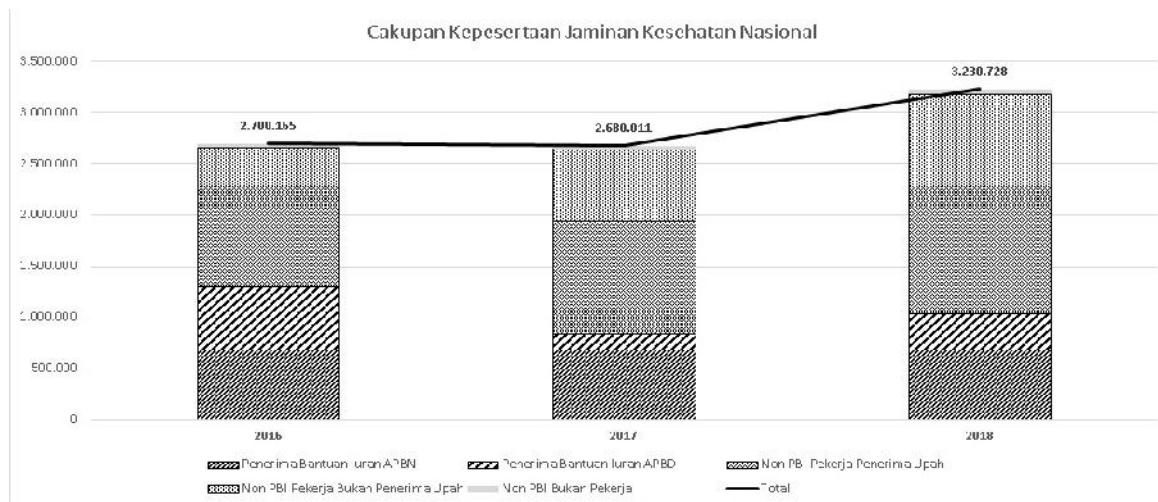
Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kaltim Tahun 2018

Penanggulangan kemiskinan di Kaltim dihadapkan pada sulitnya menurunkan angka kemiskinan, di mana hal ini perlu menjadi perhatian terutama bagi tim penanggulan kemiskinan di Kaltim, serta perlunya untuk melihat sebaran penduduk miskin secara faktual untuk menemukan kebijakan yang tepat guna mengangkat derajat kesejahteraan masyarakat Kaltim, terutama dalam menggali potensi ekonomi masyarakat di kawasan penduduk miskin.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin juga perlu di stimulasi dengan hadirnya pemerintah dalam pengembangan potensi wilayah sekitarnya, didukung dengan upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) untuk menambah keahlian masyarakat miskin, sehingga mampu meningkatkan produktivitasnya, serta menciptakan peluang usaha untuk menambah penghasilannya.

2.1.2. Sistem Perlindungan Sosial.

Proporsi peserta jaminan kesehatan Kaltim periode tahun 2016 hingga 2018 memiliki tren meningkat. Jumlah peserta jaminan kesehatan selama periode tersebut berturut-turut yaitu, 1,85 juta (2016) dan 2,04 juta (2017) dan 3,2 juta (2018). Berdasarkan data tersebut, terjadi penurunan pada tahun 2016 yaitu sebesar 178.798 orang dari tahun sebelumnya. Penurunan ini disebabkan oleh banyaknya pemutusan hubungan kerja, sehingga banyak karyawan kehilangan kepesertaannya secara otomatis karena tidak membayar iuran bulanan.



Gambar 2. Jumlah Kepesertaan Sistem Perlindungan Kesehatan

Tabel 6. Persentase Penduduk yang Memiliki Jaminan Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Jaminan di Provinsi Kaltim, Tahun 2018

	BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI)	BPJS Kesehatan Non-Penerima Bantuan Iuran (Non-PBI)	Jamkesda	Asuransi Swasta	Perusahaan/Kantor
Paser	27,04	23,90	1,04	0,55	7,06
Kutai Barat	31,29	14,24	26,40	0,83	4,63
Kutai Kartanegara	16,21	39,79	0,37	0,34	6,95
Kutai Timur	17,19	33,19	0,71	6,89	17,27
Berau	18,56	29,49	0,73	2	3,39
Penajam Paser Utara	40,52	32,24	3,79	0,90	4,06
Mahakam Ulu	63,60	9,79	0,38	0,34	0,47
Balikpapan	16,32	60,57	0,32	2,48	10,37
Samarinda	14,88	50,89	3,25	1,93	5,36
Bontang	30,66	36,63	13,82	0,88	17,96
Kaltim	19,72	41,82	2,99	0,93	8,24

Sumber : BPS Kaltim, 2019

Jumlah kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat di Kaltim pada tahun 2018 mencapai 78% dari total jumlah penduduk sebanyak 3,5 juta jiwa (BPS Kaltim, 2018) atau sebesar 2,73 juta jiwa. Dengan capaian tersebut pada tahun 2018 terjadi peningkatan jumlah kepesertaan jaminan kesehatan nasional sebesar 430 ribu peserta atau terjadi peningkatan sebesar 15,7%. Sementara itu, jika diambil persentase rata-rata peningkatan kepesertaan selama periode 2014 s/d 2018 peningkatannya berada pada angka 12,26% per tahun. Persentase peningkatan tersebut jauh di atas tingkat pertumbuhan penduduk rata-rata Kaltim. Dengan demikian, dengan kinerja seperti yang dilakukan saat ini target capaian tersebut bisa dicapai. Namun demikian, tantangan besar yang harus dihadapi adalah terkait dengan keterjangkauan beberapa wilayah yang berada pada kawasan tertinggal, terdepan dan terluar (3T) (KLHS RPJMD, 2019).

2.1.3. Akses Pelayanan Dasar.

Penguatan upaya kesehatan dasar (*primary health care*) yang berkualitas merupakan salah satu arah kebijakan dalam pembangunan nasional. Walaupun demikian, akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar masih belum menjangkau daerah tertinggal, terpencil dan kepulauan.

Pada akses pelayanan kesehatan yaitu persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan setiap tahunnya cenderung meningkat. Pada tahun 2015 sebesar 71,59% dan mengalami peningkatan pada tahun berikutnya, hingga mencapai 81,24% pada tahun 2016.

Aksesibilitas penduduk terhadap kebutuhan dasar perumahan mengalami peningkatan. Pada aspek pemenuhan kebutuhan sumber air minum layak meningkat menjadi 70,86%. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan pada tahun 2016 sebesar 29,14%. Disisi lain akses terhadap sanitasi layak juga mengalami peningkatan dari 15,18 % pada tahun 2015 menjadi sebesar 85,80 % pada tahun 2017. Kedua indikator aksesibilitas kebutuhan perumahan yang memadai menunjukkan kecenderungan yang positif.

Tabel 7. Akses Pelayanan Kesehatan (kelompok penduduk 40% terbawah

INDIKATOR	2014	2015	2016
Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan (kelompok penduduk 40% terbawah)	71,59	78,8	81,34
Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap (kelompok penduduk 40% terbawah)	74,09	58,55	44,84
Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin. (kelompok penduduk 40% terbawah)	66,01	62,24	65,08
Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak. (kelompok penduduk 40% terbawah)	66,44	66,7	71,71
Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak. (kelompok penduduk 40% terbawah)	91,03	91,53	92,03
Persentase rumah tangga kumuh perkotaan. (kelompok penduduk 40% terbawah)	91,03	91,53	92,03

Sumber: BPS Provinsi Kaltim

Angka partisipasi murni Provinsi Kaltim pada kelompok penduduk 40% terbawah untuk tingkat SMP/MTS dan SMA/SMK/MA cenderung meningkat sejak tahun 2015, sedangkan tingkat partisipasi murni jenjang sekolah dasar atau yang sederajat cenderung menurun.

Tabel 8. Angka Partisipasi Murni (APM) Kelompok penduduk 40% terbawah Provinsi Kaltim Tahun 2015-2017

Jenjang	2015	2016	2017
Angka Partisipasi Murni SD/MI/Paket A	97,99	97,02	96,61
Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Paket B	77,79	76,91	81,70
Angka Partisipasi Murni SMA/SMK/MA/Paket C	58,65	60,56	63,17

Sumber: BPS Provinsi Kaltim

2.2. Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, Serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan

2.2.1. Menghilangkan Kelaparan.

Asupan energi harian di Provinsi Kaltim pada tahun 2018 adalah 1.923,30 Kkal/orang/hari. Hal ini berarti lebih rendah dari Angka Kecukupan Gizi (AKG) Nasional, yaitu 2.150 Kkal/orang/hari. Sedangkan rata-rata asupan protein harian di Provinsi Kaltim adalah sebesar 60,70 gram/orang/hari, yang berarti telah melebihi AKG Nasional, yaitu sebesar 52 gram/orang/hari. Sebagai pangan pokok yang umum dikonsumsi padi-padian dan umbi-umbian telah menyediakan 50,85 persen dari asupan kalori harian. Kelompok pangan penyumbang energi terbesar selanjutnya adalah pangan hewani (13,35 persen) serta minyak dan lemak (9,64 persen).

Tabel 9. Konsumsi Kalori, Skor PPH dan Konsumsi Protein per Kapita per Hari, 2012-2018

No.	JENIS BAHAN MAKANAN	Energi (Kalori/hari)							PROTEIN (gram/hari)						
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	PADI- PADIAN	1.051	1.008,00	976	976,15	1.172,50	1.188,60	1.093,20	24,20	23,30	22,60	22,60	26,20	26,50	24,56
2	UMBI-UMBIAN	30	34,00	25	24,65	36,70	39,40	56,30	0,30	0,30	0,20	0,20	0,30	0,40	0,50
3	PANGAN HEWANI	243	241,00	226	227,60	252,60	254,50	287,00	23,00	22,60	21,30	21,60	22,40	22,50	26,20
4	MINYAK DAN LEMAK	215	186,00	197	196,90	212,30	220,20	207,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	BUAH/BIJI BERLEMAK	22	17,00	14	13,50	17,20	20,10	14,80	0,30	0,30	0,20	0,20	0,20	0,30	0,20
6	KACANG-KACANGAN	39	42,00	38	39,30	44,20	45,60	50,80	3,60	3,90	3,70	3,70	4,50	4,60	5,10
7	GULA	107	109,00	99	99,30	88,80	99,60	96,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	SAYURAN DAN BUAH	82	84,00	41	81,70	82,50	82,20	88,80	3,00	3,00	3,00	3,00	2,90	2,90	2,90
9	LAIN-LAIN	27	31,00	25	26,60	31,90	32,40	28,40	1,20	1,40	1,20	1,20	1,00	1,20	1,20
	JUMLAH	1.816	1.752,00	1.641	1.685,70	1.938,70	1.982,60	1.923,30							
	% AKE	90,80	87,60	82,10	84,30	96,90	92,20	91,59							
	%AKP								55,60	54,80	52,20	52,50	57,50	58,4	60,7
	PPH	82,20	82,50	74,00	79,90	82,60	80,70	83,10							

Sumber : Diolah Dispan TPH. Prov. Kaltim, 2018

Keterangan : Angka Kecukupan Energi = 2.100 kkal/kap/hr, Angka Kecukupan Protein = 52 gr/kap/hr, Target Nasional = 90,5

Pada tahun 2018, rata-rata pola konsumsi pangan masyarakat di Provinsi Kaltim terhadap kelompok pangan padi-padian serta minyak dan lemak telah melebihi konsumsi ideal yang telah ditetapkan. Sedangkan konsumsi kelompok pangan yang masih lebih rendah dari konsumsi ideal yang ditetapkan adalah umbi-umbian, pangan hewani, buah biji berminyak, kacang-kacangan, gula serta sayur dan buah.

Kontribusi sumber energi yang berasal dari karbohidrat (kelompok pangan padi-padian, umbi-umbian, minyak dan lemak, buah/biji berminyak serta gula) telah mencapai 89,46 persen, dimana hal ini lebih dari standar Kementerian Pertanian sebesar 74 persen. Sementara sumber pembangun yang berasal dari protein (pangan hewani dan kacang-kacangan) telah mencapai 15,71 persen. Asupan sumber pembangun ini masih kurang dari standar Kementerian Pertanian sebesar 17 persen. Sumber pengatur yang berasal dari vitamin dan mineral (sayur dan buah) sebesar 4,13 persen. Standar sumber pengatur dari Kementerian Pertanian sebesar 6 persen, berarti asupan sumber pengatur masih kurang dari standar. Dari penjelasan tersebut, maka didapatkan kesimpulan bahwa pola konsumsi masyarakat di Provinsi Kaltim masih belum mencapai kondisi ideal.

Mengingat permintaan kebutuhan pangan semakin meningkat seiring peningkatan jumlah penduduk dan kebutuhan bahan baku industri pengolahan pangan di Provinsi Kaltim, maka peluang dalam menghadapi berbagai tantangan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan gizi, secara umum masih cukup terbuka peluang potensi sumberdaya alam, SDM, budaya, teknologi dan finansial yang belum dimanfaatkan secara optimal untuk menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik.

2.2.2. Menghilangkan Kekurangan Gizi

Berat badan yang rendah dapat disebabkan karena tubuh yang pendek (kronis) atau karena diare atau penyakit infeksi lain (akut). Oleh karena keseimbangan antara berat badan dengan tinggi badan sangat dipengaruhi oleh konsumsi gizi yang seimbang. Jumlah kasus gizi buruk pada tahun 2016 di setiap Kabupaten/Kota mengalami fluktuasi, di mana kabupaten Kutai Kartanegara menduduki tertinggi kasus gizi buruk sebesar 88 kasus. Oleh karena itu program dan kegiatan bidang pangan dan kesehatan harus menjadi prioritas dalam pembangunan.

Faktor makanan dan penyakit infeksi, sebagai penyebab langsung masalah gizi, keduanya saling berkaitan. Anak balita yang tidak mendapat cukup makanan bergizi seimbang memiliki daya tahan yang rendah terhadap penyakit sehingga mudah terserang infeksi. Sebaliknya penyakit infeksi seperti diare dan infeksi saluran pernapasan atas (ISPA) dapat mengakibatkan asupan gizi tidak dapat diserap tubuh dengan baik sehingga berakibat gizi buruk. Oleh karena itu, mencegah terjadinya infeksi juga dapat mengurangi kejadian gizi kurang dan gizi buruk. Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) pun terjadi akibat kurang energi kronik (KEK) pada ibu hamil, dapat meningkatkan angka kematian bayi dan anak balita. Anemia kurang zat besi pada ibu hamil dapat meningkatkan risiko kematian waktu melahirkan dan melahirkan bayi yang juga menderita anemia. Kurang vitamin A (KVA) pada bayi dan anak balita dapat menurunkan daya tahan tubuh, meningkatkan risiko kebutaan, dan meningkatkan risiko kesakitan dan kematian akibat infeksi.

Prevalensi stunting pada anak bayi di bawah lima tahun (balita) dan bayi di bawah lima tahun (balita) masih cukup tinggi, walaupun menunjukkan kecenderungan yang menurun selama periode 2017-2018. Pada tahun 2018 proporsi stunting pada anak balita adalah sebesar 29,4% menurun dari angka 30,6% (Risikesdas, 2018). Sementara itu, prevalensi balita kurus menurun cukup signifikan dari 9,6% menjadi 7,5% (Risikesdas, 2018). Salah satu faktor yang berperan penting dalam mempengaruhi status gizi balita adalah status gizi ibu hamil dan pola pemberian ASI eksklusif. Namun, prevalensi anemia pada ibu hamil menunjukkan kecenderungan yang meningkat dari 10,7% pada Tahun 2016 menjadi 15,16% pada tahun 2018. Hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran/pemahaman ibu hamil untuk mengkonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) serta kurangnya cakupan pemantauan Puskesmas/Fasilitas Kesehatan untuk memantau gizi ibu hamil. Selain itu cakupan ASI eksklusif juga berfluktuasi dari sebesar 70,96% pada Tahun 2016 meningkat menjadi 71,6% pada Tahun 2017, kemudian turun kembali menjadi 70,7% (Risikesdas 2018).

Tabel 10. Kecukupan Gizi di Provinsi Kaltim

Indikator		2014	2015	2016	2017	2018
Prevalensi	Kekurangan Gizi	17,3	19,1	19,8	19,3	14,7
<i>(underweight)</i> pada anak balita.						

Indikator	2014	2015	2016	2017	2018
Prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada anak balita.	26,1	26,6	27,1	30,6	29,4
Prevalensi malnutrisi/ <i>wasting</i> (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	12,3	11,9	9,6	9,4	7,5
Prevalensi malnutrisi/ <i>obesitas</i> (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe	7,9	5,5	4,6	4,7	9,4
Prevalensi anemia pada ibu hamil.	TAD	TAD	10,7	11,87	15,16
Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	66,21	65	70,96	71,6	70,7
Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh (i) skor Pola Pangan Harapan (PPH) dan (ii) tingkat konsumsi ikan perkapita	82,5	79	82,6	83,1	84,6

2.2.3. Mengagendakan Produktivitas Pertanian dan Menjamin Sistem Produksi Pangan Berkelanjutan.

Kebutuhan pangan khususnya komoditi-komoditi tanaman pangan sangat tinggi. Seiring dengan permintaan komoditi pangan ini perlu diikuti peningkatan produksi yang optimal. Pada rentang tahun 2014-2018 pada umumnya produksi tanaman pangan mengalami trend peningkatan. Sebagai contoh produksi Padi Gabah Kering Giling (GKG) pada Tahun 2016 sebesar 305.337 Ton GKG dan pada Tahun 2018 meningkatkan menjadi 383.958 Ton GKG. Namun disisi lain, nilai produksi GKG tahun 2018 sebesar 383.958 Ton GKG atau setara 240.895 ton beras ini masih belum memenuhi kebutuhan konsumsi beras yang sebesar 327.629 Ton beras atau hanya dapat terpenuhi 73,53% saja dari produksi lokal. Oleh karena itu masih diperlukan pemasukan stok beras dari Pulau Sulawesi, Pulau Jawa dalam rangka pemenuhan konsumsi beras di Kaltim. Selain itu pula masih dihadapkannya pula permasalahan masih belum optimalnya produktivitas padi dimana Indeks Pertanaman Padi Kaltim masih berada pada posisi 1-2 kali per Tahun serta alih fungsi lahan pertanian menjadi perkebunan dan pertambangan menjadikan luasan lahan pertanian semakin berkurang.

Tabel 11. Luas Panen Padi di Kalimantan Timur

Indikator	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018*)
Luas Panen Padi (Ha) berdasarkan :					
a Sawah + Ladang	100.262	99.209	80.343	94.393	102.383
b Sawah	71.332	69.072	54.364	71.403	72.348,5
c Bukan Lahan Sawah (Ladang)	28.930	30.137	25.979	22.990	28.034,8
Hasil per Hektar Padi (Kw) berdasarkan :					
a Sawah + Ladang	42,58	41,2	38,00	37,79	37,26
b Sawah	48,64	47,78	45,08	40,97	40,43
c Bukan Lahan Sawah (Ladang)	27,77	26,14	23,21	27,89	29,09
Produksi Padi (Ton) berdasarkan :					
a Sawah + Ladang	424.669	408.782	305.337	356.680	374.040

Indikator	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018*)
b Sawah	358.119	329.999	245.047	292.562	292.479
c Bukan Lahan Sawah (Ladang)	80.104	78.783	60.290	64.118	81.561
Luas Panen Palawija menurut Jenis Tanaman	2014	2015	2016	2017	2018
a Jagung	2.873	2.307	4.948	11.139	16.246,3
b Ubi Kayu	2.988	2.384	2.451	3.610	2.762,4
c Ubi jalar	1.217	978	693	548	883,3
d Kacang Tanah	1.189	1.018	737	530	978,7
e Kedelai	768	947	1.059	807	112,9
f Kacang Hijau	342	194	193	157	201
Hasil per Hektar Palawija menurut jenis tanaman	2014	2015	2016	2017	2018
a Jagung	26,34	36,32	44,73	33,25	60,74
b Ubi Kayu	203,95	226,37	229,95	167,84	294,17
c Ubi jalar	106,85	111,79	110,55	111,61	67,17
d Kacang Tanah	12,78	12,68	13,45	13,87	12,4
e Kedelai	14,68	16,04	14,94	13,57	10,85
f Kacang Hijau	10,73	10,88	10,83	6,05	10,78
Produksi Palawija menurut jenis tanaman :	2014	2015	2016	2017	2018
a Jagung	7.567	8.379	22.132	37.039	103.155
b Ubi Kayu	60.941	53.966	56.361	60.589	82.358
c Ubi jalar	13.004	10.933	7.661	6.116	11.350
d Kacang Tanah	1.520	1.127	991	735	1.007
e Kedelai	1.128	1.519	1.582	1.095	166
f Kacang Hijau	367	176	209	95	215

Sumber : SIDATA Kaltim

Membaiknya produktivitas tenaga kerja ini mengindikasikan setiap tenaga kerja yang terlibat pada sektor pertanian mampu menghasilkan output atau nilai tambah yang semakin besar. Hal ini tidak terlepas dari upaya yang terus menerus dilakukan Pemprov Kaltim melalui Program Prioritas yang mengarah pada upaya peningkatan produksi pertanian secara arti luas. Salah satu upaya tersebut melalui menerapkan inovasi teknologi pertanian spesifik lokasi, seperti penggunaan benih varietas unggul baru, perbaikan manajemen pemupukan dan pengairan, termasuk juga mendorong penggunaan alat mesin pertanian modern

Tabel 12. Nilai Tambah Pertanian dibagi Jumlah Tenaga Kerja di Sektor Pertanian

Indikator	2015	2016	2017	2018
Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja)	121.679.320	121.113.677	143.691.361	144.473.888

Produksi protein daging mengalami tren peningkatan dalam lima tahun terakhir, demikian halnya produksi telur. Tercatat pada Tahun 2014 produksi daging sapi

mencapai 59.707,5 Ton dan pada Tahun 2018 meningkat hingga mencapai 80.248 ton Daging. Peningkatan Produksi Daging ini menunjukkan bahwa adanya permintaan daging yang semakin meningkat setiap tahunnya sebagai akibat peningkatan produksi pendapatan dan kesejahteraan masyarakat yang berdampak pada peningkatan gizi. Namun disisi lain dalam pemenuhan daging khususnya daging sapi lokal masih ditemui kendala yakni belum mampu terpenuhinya pemenuhan daging lokal terhadap konsumsi daging sapi. Pemenuhan daging sapi lokal pada tahun 2018 baru terpenuhi 27% dari kebutuhan daging sapi lokal. Untuk menutupi kekurangan tersebut, dipenuhi dengan penyediaan daging beku.

Produksi telur juga cenderung mengalami trend peningkatan, dimana sejalan pula meningkatnya konsumsi telur. Pada Tahun 2014 tercatat produksi telur berkisar 9.286,2 ton dan pada Tahun 2018 mencapai 11.520 ton telur. Namun pemenuhan telur ini belum dapat terpenuhi secara lokal, dimana produksi telur Kaltim hanya bisa memenuhi 51,74% dari kebutuhan telur Kaltim, sehingga diperlukan penyediaan telur dari Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Pulau Jawa.

Tabel 13 Capaian Produksi Daging dan Telur Provinsi Kaltim

Indikator	2014	2015	2016	2017	2018
Produksi Daging (Ton)	59.707,5	70.066,00	71.908,50	77.786,60	80.248.3
Produksi Telur (Ton)	9.286,20	11.628,00	10.812,70	11.260	11.520

2.3. Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia

2.3.1. Mengurangi Angka Kematian Ibu

Angka kematian ibu merupakan salah satu indikator utama pembangunan kesehatan dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Kaltim. Jumlah kematian ibu mengalami penurunan pada tahun 2018, yaitu 74 orang. Kematian ibu disebabkan oleh perdarahan, tekanan darah yang tinggi saat hamil (*eklampsia*), infeksi, persalinan macet dan komplikasi keguguran. Penyebab tidak langsung kematian ibu adalah karena kondisi masyarakat seperti pendidikan, sosial, ekonomi dan budaya. Kondisi geografi serta keadaan sarana pelayanan yang kurang siap ikut memperberat permasalahan ini. Beberapa hal tersebut mengakibatkan kondisi 3 terlambat (terlambat mengambil keputusan, terlambat sampai di tempat pelayanan dan terlambat mendapatkan pertolongan yang memadai) dan 4 terlalu (terlalu tua, terlalu muda, terlalu banyak, terlalu rapat jarak kelahiran)

Tabel 13. Angka Kematian Ibu Per-100.000 Kelahiran Hidup di Provinsi Kaltim

INDIKATOR	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah Kematian Ibu	109	100	95	105	74
Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.		94,83	95,57	99,18	96,39
Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.		81,29	87,64	87,37	87,34

2.3.2. Mengurangi Angka Kematian Bayi

Penyebab langsung kematian bayi adalah Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) dan kekurangan oksigen (asfiksia). Penyebab tidak langsung kematian bayi baru lahir adalah karena kondisi masyarakat seperti pendidikan, sosial ekonomi dan budaya. Kondisi geografi serta keadaan sarana pelayanan yang kurang siap ikut memperberat tingginya angka kematian ibu maupun bayi. Jumlah Kematian Balita mengalami penurunan hingga 54 kematian. Sementara Jumlah Kematian Neonatal masih termasuk tinggi, yaitu 498 kematian dan jumlah Kematian Bayi sejumlah 608 kasus

Tabel 15. Jumlah Kematian Bayi di Provinsi Kaltim

INDIKATOR	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah kematian balita	61	65	112	82	54
Jumlah Kematian Neonatal (AKN)	151	186	157	462	498
Jumlah Kematian Bayi (AKB)	730	750	638	605	608
Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	100	90	90	100	90

2.3.3. Mengakhiri Epidemii Penyakit Menular

Beberapa insiden penyakit menular telah mengalami penurunan tetapi tetap harus diwaspadai karena dapat menimbulkan Kejadian Luar Biasa. Penyakit menular dikelompokkan dalam 2 kelompok besar berdasarkan penularannya. Kelompok penyakit menular yang ditularkan melalui binatang (Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik) yang merupakan program nasional yaitu Malaria, DBD, Rabies, Filariasis dan Kecacingan. Sedangkan kelompok menular langsung yang merupakan program nasional yaitu TBC, HIV/AIDS, Kusta, Hepatitis dan Infeksi Saluran Pernafasan Atas. Kegiatan dalam rangka mengakhiri penyakit menular di atas diantaranya melakukan advokasi sosialisasi kepada pemerintah daerah, lintas sektor dan lintas program, penjaringan atau deteksi dini penularan penyakit pada daerah yang mempunyai endemisitas yang tinggi maupun pada lokasi-lokasi khusus yang diduga terdapat penularan. Promosi kesehatan dan edukasi pada masyarakat mengenai penyakit menular dan melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pada Kabupaten/Kota. Dengan adanya kegiatan tersebut maka bisa dilihat epidemi penyakit menular yang menurun dari tahun ke tahun pada tabel berikut:

Tabel 16. Indikator Penyakit Menular di Provinsi Kaltim

INDIKATOR	2014	2015	2016	2017	2018
Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	2,43	4,38	3,88	2,23	1,72
Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.			130,43	102,17	46,08
Kejadian Malaria per 1000 orang.	0,47	0,44	0,35	0,44	0,66
Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria.	3	0	0	0	0
Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B.	0	0	1	10	10

2.3.4. Mengakhiri Kematian Akibat Penyakit Tidak Menular

Terjadi epidemiologi yang signifikan di mana penyakit tidak menular (PTM) menjadi salah satu masalah kesehatan dan penyebab kematian yang merupakan ancaman global bagi pertumbuhan ekonomi. Kecenderungan PTM terus meningkat dan telah mengancam sejak usia muda. PTM utama meliputi hipertensi, diabetes mellitus, kanker dan penyakit paru obstruktif kronik (PPOK). Jumlah kematian akibat rokok terus meningkat dari 41,75% pada tahun 1995 menjadi 59,7% di tahun 2007. Selain itu dalam survei ekonomi nasional 2006 disebutkan penduduk miskin menghabiskan 12,6% penghasilannya untuk konsumsi rokok.

Adapun hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018 untuk Provinsi Kaltim menunjukkan bahwa:

- Persentase merokok pada penduduk umur ≥ 10 tahun sebesar 25,9% menurun dibandingkan dengan Riskesdas 2013 sebesar 27,7%.
- Prevalensi Hipertensi berdasarkan pengukuran penduduk umur ≥ 18 tahun sebesar 39,3% meningkat secara signifikan dibandingkan dengan Riskesdas 2013 sebesar 29,6%.
- Proporsi obesitas pada penduduk umur ≥ 18 tahun sebesar 28,7 meningkat secara signifikan dibandingkan dengan Riskesdas 2013 sebesar 20,6%.

Penanggulangan PTM dan pengendalian konsumsi rokok (aksesi FCTC) menjadi salah satu upaya untuk mencapai TPB (dalam Tujuan 3). Masuknya isu pengendalian tembakau dan penanggulangan PTM ke dalam indikator pencapaian TPB seharusnya menjadikan program tersebut menjadi prioritas pembangunan di tingkat nasional.

Tabel 17. Indikator Penyakit Tidak Menular di Provinsi Kaltim

INDIKATOR	2014	2015	2016	2017	2018
Persentase merokok pada penduduk umur ≤ 18 tahun.	27,70				25,90
Prevalensi tekanan darah tinggi.	29,60				39,30
Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥ 18 tahun.	20,60				28,70
Angka kematian (<i>insidens rate</i>) akibat bunuh diri.					
Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.				10	10

2.3.5. Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif

Angka prevalensi penyalahgunaan narkoba cenderung menurun di Kaltim, yaitu 1,77 pada tahun 2018, sementara jumlah yang mengakses layanan rehabilitasi medis semakin meningkat, yaitu sebanyak 1.083 orang di tahun 2018. Peningkatan angka penyalahgunaan narkoba dan penggunaan alkohol yang merugikan yang mengakses layanan rehabilitasi medis dan menurunnya angka prevalensi penyalahgunaan narkoba menunjukkan bahwa ketersediaan pelayanan yang semakin meningkat, namun juga dapat menunjukkan terdapat

peningkatan jumlah kesadaran pengguna untuk memperoleh kesembuhan atau memperoleh penanganan.

Tabel 18. Prevelensi penyalahgunaan narkoba

INDIKATOR	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah penyalahguna narkoba dan pengguna alkohol yang merugikan, yang mengakses layanan rehabilitasi medis.	-	822	1392	1022	1083
Jumlah yang mengakses layanan pasca rehabilitasi.	-	82	298	163	89
Jumlah lembaga rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA yang telah dikembangkan/dibantu.	-	-	-	-	-
Prevalensi penyalahgunaan narkoba.	3,07	3,23	-	2,12	1,77

2.3.6. Akses Layanan Kesehatan Seksual dan Reproduksi

Akses layanan kesehatan seksual dan reproduksi sudah dilakukan di seluruh kabupaten/kota di Kaltim. Peserta KB terbanyak menggunakan suntikan dan pil, dengan jumlah terbanyak di Kota Samarinda dan Kota Balikpapan.

Tabel 14. Jumlah Peserta KB Aktif Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kaltim Tahun 2018

Kabupaten/Kota	IUD	MOW	MOP	Kondom	Implant	Suntikan	Pil
Paser	1.862	381	56	626	1.848	10.863	5.536
Kutai Barat	382	361	34	470	562	6.438	7.458
Kutai Kartanegara	6.823	2.026	200	2.582	7.653	46.436	38.482
Kutai Timur	2.606	803	64	1.401	3.212	26.599	8.446
Berau	1.908	957	12	642	1.830	16.135	7.935
Penajam Paser Utara	1.169	507	10	591	1.704	11.575	5.790
Mahakam Ulu	92	20	-	9	133	732	646
Balikpapan	11.277	3.018	138	3.939	4.877	29.684	17.213
Samarinda	18.720	2.058	285	2.484	6.269	37.077	35.162
Bontang	3.646	1.251	144	1.490	1.271	8.698	4.542
Kaltim	48.485	11.382	943	14.234	29.359	194.237	131.210

Sumber : BPS Kaltim, 2018

2.3.7. Mencapai Cakupan Kesehatan Universal

Sampai dengan tahun 2018, jumlah peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kaltim sekitar 2,9 juta jiwa dari 3,5 juta jiwa dan masih tersisa \pm 17% atau sebesar 600.000 jiwa masyarakat yang harus menjadi peserta JKN-KIS agar dapat memenuhi target *Universal Health Coverage* (UHC). Pencapaian Kesehatan Universal di Kaltim baru tercapai di 5 Kab/Kota yaitu Mahakam Ulu, Kutai Barat, Kutai Kartanegara, Bontang, Balikpapan. Sementara masih ada 5 Kab/Kota lainnya yang belum mencapai UHC yaitu Samarinda, Berau, Kutai Timur, Paser, PPU. Kendalanya masih ada data yang ganda, sehingga tidak tersedia data yang valid. Upaya yang sudah dilakukan adalah koordinasi dengan lintas sektor terkait seperti BPJS, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Tabel 15. Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan di Provinsi Kaltim

INDIKATOR	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.			2.913,4 40	2.680,0 11	3.083,9 09
Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) (%)			83,21	78,00	87,19

2.3.8. Meningkatkan Pemerataan Distribusi Tenaga Kesehatan, Obat dan Vaksin

Pemerataan tenaga kesehatan menjadi isu penting dalam pemenuhan tenaga kesehatan, beberapa jenis tenaga kesehatan jika dilihat dari rasio terhadap 100.000 penduduk rasionya sudah mencukupi bahkan melebihi standar seperti Dokter Spesialis Target rasio 10/100.000 capaian rasio 13/100.000, Perawat Target rasio 158/100.000 capaian rasio 218,34/100.000. Jika dilihat fasilitas pelayanan kesehatan setiap kabupaten/kota, maka tenaga kesehatan banyak terkumpul di daerah-daerah perkotaan, seperti Kota Balikpapan, Bontang, dan Samarinda.

Tantangan yang masih dihadapi adalah penyerapan tenaga kesehatan dari perguruan tinggi, redistribusi tenaga kesehatan yang masih sulit dilakukan dan belum optimal, serta dukungan Pemerintah Daerah pada program penugasan tenaga kesehatan (Nusantara Sehat), khususnya penugasan khusus yang berbasis tim dan individu yang masih dirasakan kurang, seperti: penyediaan sarana, prasarana, dan fasilitas tempat tinggal yang layak untuk menunjang pelaksanaan tugas.

Tabel 16. Sebaran Tenaga Kesehatan di Provinsi Kaltim

INDIKATOR	2014	2015	2016	2017	2018
Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.					
Kepadatan dan distribusi dokter spesialis	9,67	11,14	11,94	13,56	13,89
Kepadatan dan distribusi dokter umum	27,17	28,77	29,5	28,12	28,17
Kepadatan dan distribusi dokter gigi	6,65	7,32	8,65	8,17	8,41
Kepadatan dan distribusi perawat	184,23	185,24	187,08	216,11	218,34
Kepadatan dan distribusi perawat gigi	2,65	2,88	3,17	3,97	4,49
Kepadatan dan distribusi bidan	79,45	80,34	80,69	94,37	94,88
Kepadatan dan distribusi tenaga gizi	6,84	7,12	7,91	9,18	9,67
Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan lingkungan	5,80	5,97	6,09	7,47	7,56
Kepadatan dan distribusi tenaga ketarapian fisik					
Kepadatan dan distribusi keteknisan medis					
Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan masyarakat	6,34	6,51	6,63	10,04	10,72

Pengelolaan obat publik dan perbekalan kesehatan membutuhkan dukungan berbagai pihak, baik diselenggarakan oleh Pusat, Provinsi maupun Kab/Kota. Wujud dari dukungan tersebut dapat berupa kegiatan, anggaran dan komitmen, Anggaran yang diperlukan dapat berasal dari APBD Provinsi dan Kab/Kota, APBN dan dana DAK sub bidang pelayanan kefarmasian.

Kebijakan Obat Nasional (KONAS) Tahun 2006 menyebutkan bahwa keberadaan gudang farmasi Kab/Kota diubah namanya menjadi Instalasi Farmasi Kab/Kota (IFK). Kebijakan tersebut bersinergi dan mendukung langsung terhadap peningkatan kapasitas institusi pengelola obat di Kab/Kota. Selain itu terbitnya kebijakan mengenai pengelolaan obat terpadu (*one gate policy*) memberikan stimulasi kepada para pengelola program dan pengelola obat, untuk melakukan manajemen pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan yang baik dan benar.

Faktor geografis masih menjadi tantangan dalam pendistribusian obat dan vaksin. Masih ada sejumlah daerah yang indikator ketersediaan obat dan vaksin tidak mencapai 100%. Daerah yang ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmasnya di atas 90%, memang memiliki manajemen suplai yang lebih baik. Mulai dari perencanaan hingga pengadaan, penyimpanan dan penggunaannya sudah baik. Mengingat tantangan terbesarnya geografis karena Kaltim sangat luas maka di daerah harus ada *buffer stock*. Baik di tingkat pusat maupun daerah, bisa terjadi kekosongan obat dan vaksin. Karena itu cadangan harus ada dan kemudian diatasi dengan manajemen suplai yang baik. Berdasarkan data indikator ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas di Kaltim untuk tahun 2018 persentasenya mencapai 98,82%.

Tenaga kefarmasian sebagai salah satu tenaga kesehatan memiliki peranan penting dalam memberikan pelayanan kefarmasian di sarana pelayanan kesehatan. Ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan yang cukup dan bermutu di sarana pelayanan kesehatan sangat ditentukan oleh kemampuan tenaga kefarmasian pengelola obat di Instalasi Farmasi Provinsi dan Kab/Kota. Keberhasilan pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan di Instalasi Farmasi Provinsi dan Kab/Kota merupakan wujud dari kinerja tenaga kefarmasian pengelola obat, di samping ketersediaan sarana dan prasarana serta dukungan anggaran operasional. Selain itu, ditentukan dari kemampuan melakukan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan.

Tabel 17. Ketersediaan Obat dan Vaksin di Puskesmas di Provinsi Kaltim

INDIKATOR	2014	2015	2016	2017	2018
Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.		79,06	82,73	96,74	98,82

2.4. Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata Serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua

2.4.1. Partisipasi Pendidikan Penduduk

Angka Partisipasi Kasar adalah proporsi jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan terhadap jumlah penduduk umur sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Nilai APK yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya. Jika nilai APK mendekati atau lebih dari 100 persen menunjukkan bahwa ada penduduk yang sekolah

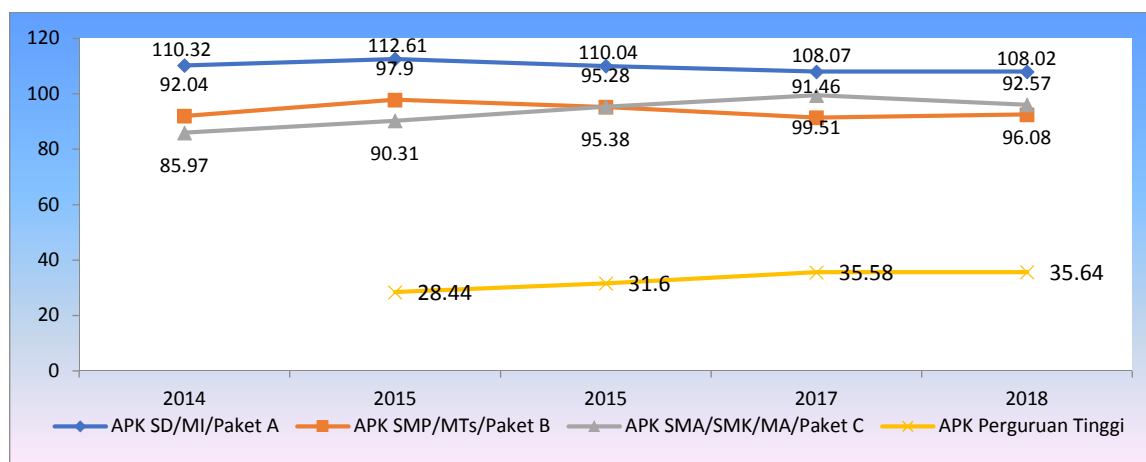
belum mencukupi umur dan atau melebihi umur yang seharusnya. Hal ini juga menunjukkan bahwa wilayah tersebut mampu menampung penduduk usia sekolah lebih dari target yang sesungguhnya. Nilai APK biasanya akan diatas nilai APS dan APM, karena APK menghitung umur diluar range umur jenjang pendidikannya. Contohnya adalah APK SD merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang sekolah di SD terhadap jumlah penduduk umur 7-12 tahun. Angka APK bisa bernilai 100 persen lebih (Pada tahun 2018, sebesar 108,02). Hal ini menandakan bahwa ada umur anak yang mengenyam bangku pendidikan di SD berada di luar range umur 7-12 tahun, bisa disebabkan oleh ada siswa yang belum cukup umur namun sudah bersekolah, atau ada yang telat sekolah atau mengalami pengulangan kelas.

Semakin bertambahnya umur maka semakin menurun juga nilai APK nya, untuk jenjang pendidikan SLTP, pada tahun 2018, Kaltim memiliki nilai sebesar 92,57 persen. Namun ada hal unik di Kaltim ini, APK untuk jenjang SLTA angkanya lebih tinggi jika dibandingkan dengan APK SLTP. APK SLTA memiliki nilai 96,08 persen. Sedangkan APK untuk tingkat Perguruan Tinggi jauh lebih kecil, yakni hanya sebesar 35,64 persen.

Tabel 23. Angka Partisipasi Kasar (APK) Provinsi Kaltim Tahun 2014-2018

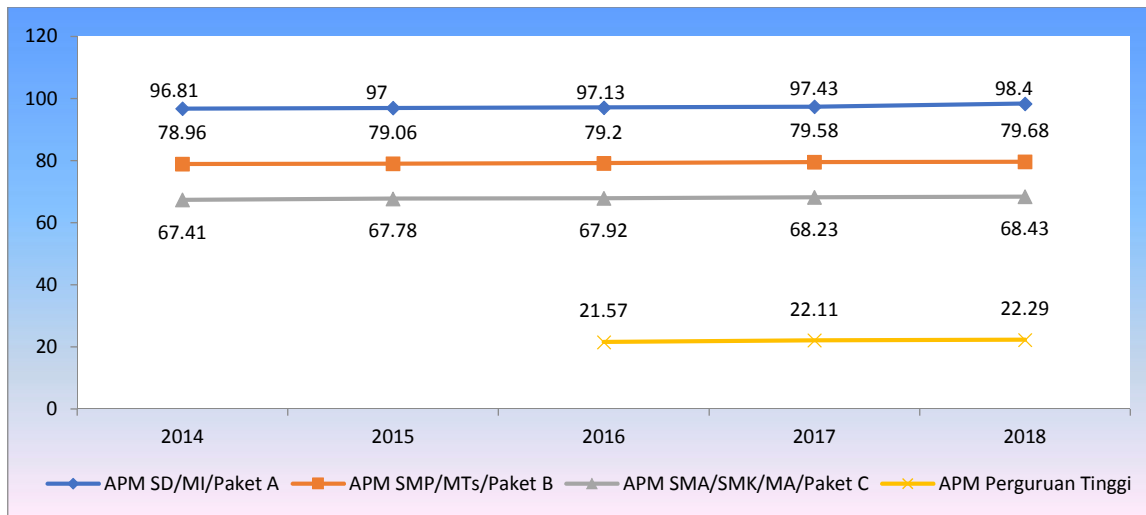
Jenjang	2014	2015	2016	2017	2018
APK SD/MI/Paket A	110,32	112,61	110,04	108,07	108,02
APK SMP/MTs/Paket B	92,04	97,9	95,28	91,46	92,57
APK SMA/SMK/MA/Paket C	85,97	90,31	95,38	99,51	96,08
APK Perguruan Tinggi		28,44	31,60	35,58	35,64

Sumber: BPS Provinsi Kaltim, 2019



Gambar 3. Angka Partisipasi Kasar Tingkat Pendidikan SD/Sederajat sampai dengan Pendidikan Tinggi di Kaltim, 2014-2018

Angka Partisipasi Murni (APM) dapat digunakan untuk melihat ketepatan umur penduduk dalam mendapatkan pendidikan. Dengan kata lain APM menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya. Jika APM = 100 berarti seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu. Sejalan dengan APS, semakin umur bertambah maka semakin menurun nilai APM nya. Hal ini terlihat di Gambar 2.4. yang menyatakan bahwa nilai dari APM jenjang SD, SLTP dan SLTA mengalami penurunan.



Gambar 4. Angka Partisipasi Murni di Kaltim tahun 2014-2018

Untuk APM, jenjang pendidikan SD di Kaltim tahun 2018 sebesar 98,4 persen. APM Kaltim untuk jenjang SLTP adalah sebesar 79,68 persen. tingkat SLTA Kaltim memiliki angka sebesar 68,43 persen. Kemudian nilai APM Perguruan Tinggi tahun 2018 merupakan yang paling rendah, yakni hanya sebesar 22,29. Nilai APM SLTP dan APM SLTA tersebut nilainya dibawah nilai APM SD, hal ini sesuai dengan umur yang semakin bertambah maka semakin menurun nilai APMnya.

Persentase kemampuan membaca dan menulis penduduk usia 15 tahun ke atas tahun 2018 di Provinsi Kaltim adalah sebesar 98,96 persen, ini menunjukkan bahwa dari 100 orang penduduk usia 15 tahun ke atas di Kaltim terdapat sekitar 98 atau 99 orang penduduk yang memiliki kemampuan membaca dan menulis atau Angka Melek Huruf (AMH). Sedangkan proporsi penduduk usia 15 tahun keatas yang masih buta huruf hanya sebesar 1,04 persen. Jika dibandingkan dengan rata-rata Nasional, angka tersebut relatif cukup bagus karena pada tingkat Nasional angka buta huruf penduduk 15 tahun ke atas pada tahun 2017 adalah sebesar 2,08 persen. Namun demikian masih dibutuhkan program pendidikan untuk dapat menghapus buta aksara di Kaltim.

Jika diirinci berdasarkan wilayah kabupaten/kota, terlihat bahwa wilayah dengan proporsi penduduk yang dapat membaca dan menulis paling tinggi adalah Kota Bontang, yaitu sebesar 99,77 persen, sementara, wilayah dengan AMH terkecil adalah Kabupaten Kutai Barat, yaitu sebesar 98,36 persen. Secara umum, AMH seluruh kabupaten/kota di Kaltim sudah lebih dari 98 persen. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Kaltim telah memiliki akses untuk dapat memperoleh pengetahuan yang cukup baik, karena sebagian besar masyarakat memiliki kemampuan untuk dapat menerima informasi melalui kemampuan membaca dan menulis. Namun masih terdapat tantangan, yaitu untuk lebih meningkatkan proporsi penduduk yang mampu membaca menulis serta melakukan pemerataan penyediaan jasa pendidikan, terutama di wilayah kabupaten yang berada di daerah perbatasan dan pedalaman.

Tabel 24 Angka Melek Huruf Provinsi Kaltim Tahun 2014-2018

Kabupaten/Kota	2014	2015	2016	2017	2018
Paser	98,08	97,65	98,41	98,49	99,13
Kutai Barat	98,37	97,62	98,22	98,49	98,36
Kutai Kartanegara	98,41	97,98	98,52	98,85	98,71

Kabupaten/Kota	2014	2015	2016	2017	2018
Kutai Timur	98,03	99,04	98,26	98,97	99,05
Berau	99,13	98,16	98,34	98,94	99,01
Penajam Paser Utara	96,65	96,86	96,71	98,21	99,15
Mahakam Ulu	-	97,98	97,13	97,33	99,49
Balikpapan	99,93	99,22	99,38	99,15	99,33
Samarinda	98,84	99,59	99,61	99,27	98,68
Bontang	99,51	99,55	99,02	99,41	99,77
Kaltim	98,59	98,69	98,82	98,96	98,96

Sumber : BPS Prov Kaltim, 2019

2.4.2. Disparitas Pendidikan antara Perempuan dan Laki-laki

Jika dirinci menurut jenis kelamin, persentase Penduduk Umur 5 Tahun ke Atas menurut Jenis Kelamin dilihat dari status pendidikannya di tahun 2018 jumlah penduduk laki-laki lebih banyak yang sudah tidak bersekolah lagi dan jumlah penduduk perempuan yang tidak/belum pernah sekolah lebih tinggi dari jumlah penduduk laki-laki. Dilihat dari tingkat partisipasi sekolah, jumlah penduduk laki-laki yang masih sekolah lebih banyak berada pada tingkat sekolah SMP dan Perguruan Tinggi dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan. Namun jika untuk level tingkat sekolah SD dan SMA, jumlah penduduk perempuan yang masih sekolah jauh lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-laki.

Tabel 25 Persentase Penduduk Umur 5 Tahun ke Atas menurut Jenis Kelamin dan Status Pendidikan Tahun 2018

Jenis Kelamin	Tidak/Belum Pernah Sekolah	Masih Sekolah				Tidak Bersekolah Lagi
		SD/MI /Paket A	SMP/MTs /Paket B	SMA/SMK /MA/Paket C	Perguruan Tinggi	
Laki-Laki	4,78	12,54	5,26	5,37	3,19	68,85
Perempuan	6,17	13,48	4,90	5,52	3,13	63,99

Sumber : BPS Prov Kaltim, 2019

Jika melihat persentase Penduduk Umur 7-24 Tahun menurut jenis kelamin dilihat dari status Pendidikannya di tahun 2018, berbeda hasilnya terhadap persentase Penduduk Umur 5 Tahun ke Atas menurut jenis kelamin dilihat dari status Pendidikannya. Pada rentang usia 7-24 tahun, terlihat jumlah penduduk yang masih sekolah pada usia tersebut didominasi oleh penduduk perempuan disemua tingkat sekolah, kecuali level SMP yang lebih banyak didominasi penduduk laki-laki. Sedangkan untuk rentang usia 7-24 tahun, diketahui bahwa penduduk laki-laki lebih besar jumlahnya dibandingkan penduduk perempuan yang tidak/belum pernah bersekolah, begitu pula hanya dengan yang sudah tidak bersekolah lagi.

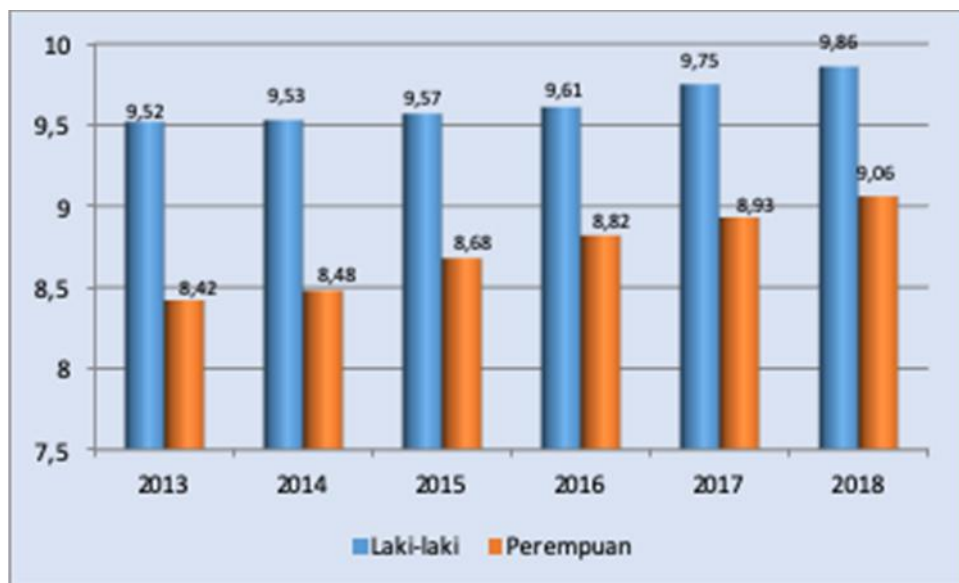
Tabel 26 Persentase Penduduk Umur 7-24 Tahun menurut Jenis Kelamin dan Status Pendidikan Tahun 2018

Jenis Kelamin	Tidak/Belum Pernah Sekolah	Masih Sekolah				Tidak Bersekolah Lagi
		SD/MI/ Paket A	SMP/MTs /Paket B	SMA/SMK/ MA/Paket C	Perguruan Tinggi	

Laki-Laki	0,47	34,72	15,76	15,91	7,66	25,48
Perempu	0,14	36,83	14,20	15,99	7,88	24,96

Sumber : BPS Prov Kaltim, 2019

Penduduk perempuan masih belum menjalani Pendidikan lebih baik di banding laki-laki, dimana angka rata-rata lama sekolah terpaut 3 tahun. Tingkat Pendidikan yang dominan dicapai oleh perempuan adalah Sekolah Dasar, sedangkan Laki-laki pada tingkat Sekolah Menengah Pertama.



Gambar 4. Rata-Rata Lama Sekolah Menurut Jenis Kelamin di Kaltim tahun 2013-2018

2.4.3. Kemampuan Siswa

Kualitas sumber daya manusia secara spesifik dapat dilihat pada tingkat pendidikan yang ditamatkan. Semakin banyak penduduk yang memiliki ijazah jenjang pendidikan yang tinggi, maka semakin bagus kualitas pendidikan di wilayah tersebut. Dan juga menandakan adanya pemerataan dalam hal pendidikan di wilayah tersebut. Pada tahun 2018 persentase penduduk usia 15 tahun ke atas di Kaltim, yang tidak memiliki ijazah ada sebesar 11,86 persen. Persentase terbesar adalah penduduk yang memiliki ijazah tertingginya adalah SMA/MA yang sekitar sepertiga dari total penduduk usia 15 tahun ke atas. Ijazah tertinggi SD dan SMP juga tidak terlalu jauh, berada di sekitar angka dua puluhan persen.

Kabupaten Mahakam Ulu menjadi kabupaten yang memiliki persentase terbesar penduduk usia 15 tahun ke atas yang tidak mempunyai ijazah, yaitu sebesar 30,65 persen dan kemudian disusul Penajam Paser Utara sebesar 18,59 persen dan Kutai Barat sebesar 18,31 persen, sedangkan yang paling kecil persentasenya adalah di Kota Samarinda yaitu sebesar 8,05 persen. Jika dilihat berdasarkan pengelompokan wilayah perkotaan dan perdesaan maka persentase penduduk yang tidak memiliki ijazah di wilayah perkotaan (Kota Balikpapan, Kota Samarinda, dan Kota Bontang) persentasenya lebih kecil jika dibandingkan dengan wilayah kabupaten di Kaltim. Begitu juga dengan jenjang SD, SMP, SMA dan Perguruan Tinggi wilayah kota memiliki persentase yang lebih unggul jika dibandingkan dengan wilayah kabupaten. Hal ini menandakan masih ada keterpusatan pendidikan di wilayah perkotaan. Wilayah perkotaan memiliki fasilitas yang lengkap sehingga cukup wajar jika kepemilikan ijazah di kota lebih

besar persentasenya. Begitu juga dengan persentase penduduk yang memiliki ijazah tertinggi Perguruan Tinggi, di kota banyak ditemukan perguruan tinggi, sedangkan di kabupaten perguruan tinggi cukup terbatas.

Tabel 27 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas menurut Kabupaten/Kota dan Ijazah/STTB Tertinggi yang dimiliki tahun 2018

Kabupaten/ Kota	Tidak Mempunyai Ijazah	SD/ MI	SMP/ MTs	SMA /MA	SMK/ MA	DI dan DII	DIII	DIV/ S1/S 2/S3
Paser	17,56	25,60	23,28	21,79	3,50	0,81	1,51	5,95
Kutai Barat	18,31	25,11	21,48	23,94	4,46	0,14	1,26	5,30
Kutai Kartanegara	11,54	28,37	23,04	26,36	3,79	0,32	1,12	5,45
Kutai Timur	13,64	24,33	21,92	22,98	7,63	0,32	1,44	7,74
Berau	17,44	21,45	19,81	25,97	3,23	0,51	2,24	9,35
Penajam Paser Utara	18,59	26,35	21,85	21,01	5,45	0,93	2,24	3,58
Mahakam Ulu	30,65	24,61	14,71	18,99	2,07	0,04	1,32	7,62
Balikpapan	8,96	13,58	19,87	29,03	13,12	0,89	4,09	10,47
Samarinda	8,05	16,94	21,63	30,21	7,97	0,93	3,06	11,22
Bontang	9,38	15,88	15,75	33,37	10,16	1,25	3,57	10,65
Kaltim	11,86	21,10	21,33	27,01	7,18	0,68	2,42	8,41

Sumber : BPS Prov Kaltim, 2019

2.4.4. Kualitas Guru, Dosen dan Tenaga Pendidikan.

Dilihat dari jumlah Guru menurut tingkat pendidikan, jumlah guru juga sejalan dengan jumlah sekolah, semakin tinggi jenjang pendidikannya maka semakin sedikit jumlah gurunya. Jumlah guru di SD/MI lebih banyak jika dibandingkan dengan jumlah guru di SMP/MTs dan juga jumlah guru SMA/SMK/MA. Jumlah guru SD/MI di Kaltim tahun 2018 sebesar 25.130 orang, jumlah guru SMP/MTs sebesar 11.863 orang dan jumlah guru SMA/SMK/MA sebesar 10.050 orang. Jumlah guru tiap kabupaten/kota pun berbeda-beda tergantung banyaknya sekolah dan banyaknya murid.

Tabel 28 Jumlah Guru Menurut Tingkat Pendidikan dan Kabupaten/Kota Provinsi Kaltim,

Kabupaten/ Kota	Guru SD	Guru MI	Guru SMP	Guru MTs	Guru SMA	Guru MA	Guru SMK	Jumlah Tenaga Pendidik
Paser	2.062	175	812	306	348	213	313	46
Kutai Barat	2.079	85	710	97	330	22	247	55
Kutai Kartanegara	5.638	372	1.920	738	881	221	723	215
Kutai Timur	2.606	89	1.007	126	372	43	410	78
Berau	1.853	94	763	107	396	23	272	114
Penajam Paser Utara	1.238	33	428	115	197	55	263	-
Mahakam Ulu	420	-	207	-	89	-	26	-
Balikpapan	2.859	299	1.306	201	590	125	831	771
Samarinda	3.850	367	1.818	614	868	185	1.34	2.462

Kabupaten/ Kota	Guru SD	Guru MI	Guru SMP	Guru MTs	Guru SMA	Guru MA	Guru SMK	Jumlah Tenaga Pendidik
							4	
Bontang	919	92	498	90	289	42	332	119
Kaltim	23.524	1.606	9.469	2.394	4.360	929	4.761	3.860

Sumber : BPS Kaltim, 2019

Kualitas SDM dan daya saing bangsa erat sekali kaitannya dengan kualitas pendidikan nasional, sementara pendidikan nasional sangat dipengaruhi oleh pembangunan pendidikan di masing-masing daerah (provinsi dan kabupaten/kota) sehingga untuk memperbaiki kondisi tersebut harus dijawab dengan meningkatkan mutu pendidikan dan profesionalisme pengelola pendidikan (tenaga kependidikan, khususnya guru).

Melihat nilai persentase Guru dengan kualifikasi minimal S1/D4 di Provinsi Kaltim, terlihat sejak tahun 2014, jumlah guru yang memiliki kualifikasi minimal S1/D4 mengalami peningkatan tajam di setiap tingkat pendidikan. Pada tahun 2018, nilai persentase terbesar guru dengan kualifikasi minimal S1/D4 berada pada tingkat SMA/SMALB sebesar 97,58 persen, kemudian disusul guru yang mengajar pada tingkat SMK sebesar 95,05 persen, guru di tingkat SMP/SMPLB sebesar 94,58 persen, dan terkecil ialah nilai persentase guru SD/SDLB sebesar 86,81 persen. Dari data ini terlihat bahwa makin tinggi tingkat pendidikan yang diampu oleh guru, makin tinggi pula jumlah guru dengan kualifikasi minimal S1/D4 yang tersedia.

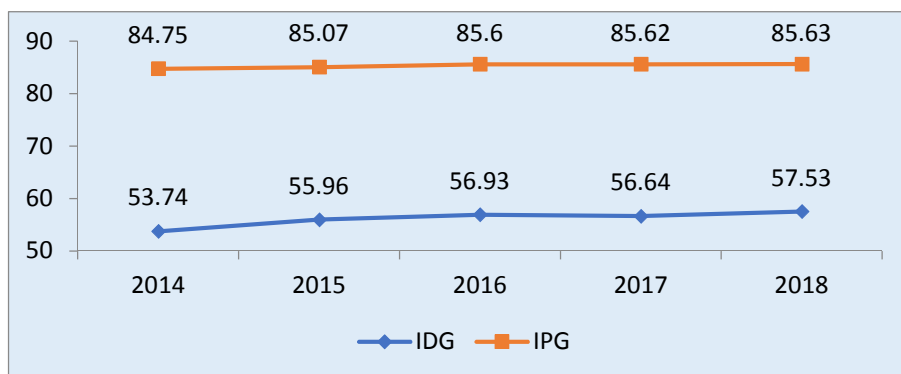
Tabel 29 Persentase Guru SD/SMP/SMA/SMK dengan kualifikasi minimal S1/D4

INDIKATOR	2014	2015	2016	2017	2018
Persentase guru SD/SDLB dengan kualifikasi minimal S1/D4	78,48	79,84	81,2	82,56	86,81
Persentase guru SMP/SMPLB dengan kualifikasi minimal S1/D4	83,2	86,48	89,76	93,04	94,58
Persentase guru SMA/SMALB dengan kualifikasi minimal S1/D4	95,15	95,83	96,51	97,19	97,58
Persentase guru SMK dengan kualifikasi minimal S1/D4	91,03	91,53	92,03	92,53	95,05

2.5. Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan
Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan indikator komposit yang kompleks dan cukup menggambarkan kesenjangan pencapaian pembangunan antara laki-laki dan perempuan, serta partisipasi aktif dalam bidang ekonomi, politik dan pengambilan keputusan. Untuk itu, jika didapatkan angka IPG atau IDG yang masih tertinggal dibandingkan dengan wilayah lainnya, pemerintah setempat diharapkan dapat mengamati dan mengidentifikasi indikator tunggal/pembentuk strategi bersama sektor terkait harus dilakukan untuk mengejar ketertinggalan IPG dan IDG dan berupaya meningkatkannya.

Sampai tahun 2016 terlihat bahwa posisi ataupun peran perempuan dalam berbagai lini pembangunan masih sangat rendah. IDG masih berada pada garis cukup, walaupun juga terjadi penurunan kondisi pada tahun 2017 dibandingkan kondisi tahun 2013. Walaupun demikian, IPG memiliki kecenderungan meningkat. IDG tertinggi di Kaltim dicapai Kabupaten Mahakam Ulu sebesar 74,12 di atas nasional, sedangkan terendah Bontang sekitar 45,55. Selain itu,

IPG Provinsi Kaltim sebesar 85,62, sedangkan capaian Indonesia tahun 2017 sebesar 90,96. IPG kabupaten dan kota di Kaltim menunjukkan Balikpapan, Samarinda, Berau, Bontang dan Penajam Paser Utara memiliki capaian IPG di atas capaian Kaltim, sisanya di bawah capaian Kaltim.



Gambar 5. Indeks Pemberdayaan Gender dan Indeks Pembangunan Gender Kaltim, 2014-2018

2.5.1. Kebijakan dan Perundang-Undangan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Kaltim sangat berkomitmen mendukung upaya pelaksanaan strategi pengarusutamaan gender (PUG). Pemprov Kaltim lanjutnya, berkomitmen dalam upaya peningkatan peran aktif perempuan dalam pembangunan. Sesuai visi RPJMD 2018-2023 menjalankan misi Berdaulat dalam pembangunan SDM yang berakhlak mulia dan berdaya saing rerutama perempuan, pemuda dan disabilitas.

Pemprov Kaltim bertekad dan berusaha keras agar pembangunan mendapat partisipasi dari seluruh lapisan masyarakat. Begitu pula dengan pembangunan perspektif gender, dimana telah dibuka peluang dan diberikan ruang terbuka luas bagi peran serta kaum perempuan untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan di Kaltim. Selain itu, Pemprov Kaltim telah mengeluarkan Perda Kaltim Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender, serta Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender melalui Peraturan Gubernur Kaltim No. 85 tahun 2012

Dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas hidup perempuan, serta mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa dan bernegara, dan untuk mendukung kebijakan implementasi dan percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Daerah, serta peningkatan komitmen pemerintah dalam penyusunan kebijakan yang responsif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki. Maka diperlukan strategi untuk mengintegrasikan kebijakan kesetaraan gender terhadap perempuan dan laki-laki dalam berbagai sektor dan bidang kehidupan.

Dalam hal ini pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan peraturan baik di tingkat pusat maupun daerah, diantaranya adalah :

- a. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah.
- c. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan

Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender Untuk Pemerintah Daerah.

- d. Surat Edaran 4 Menteri tentang Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender melalui Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (SE No. 270/M.PPN/11/2012, No. SE-33/MK.02/2012, No.050/4379A/SJ, No. SE 46/MPP-PA/11/2012).
- e. Peraturan Gubernur Kaltim Nomor 61 Tahun 2012 tentang Penerapan Pengarusutamaan Gender dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kaltim.
- f. Peraturan Daerah Provinsi Kaltim Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah.

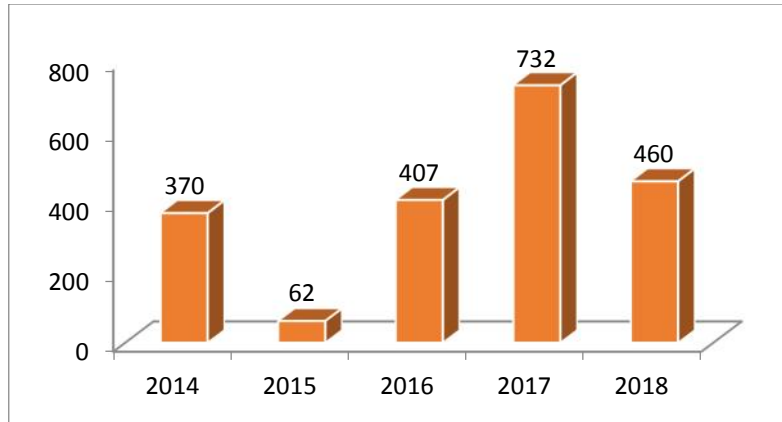
Hal-hal yang menjadi tantangan dalam pengarus utamaan gender, diantaranya adalah:

1. Data terpilah dan informasi masih menjadi kendala utama dalam analisis gender. Data terpilah nampaknya masih belum menjadi mekanisme yang terintegrasi dalam pendataan daerah. Bila permasalahan ini tidak segera diatasi, maka pelaksanaan pengarusutamaan gender tidak akan efisien, dan perencanaan serta penganggaran tanpa basis data akan menjadi kurang efektif.
2. Penguatan dasar hukum pelaksanaan PUG dan PPRG termasuk instrument yang digunakan.
3. Peran masing-masing instansi penggerak PPRG yang kurang jelas dan kurang berimbang.
4. Belum semua aparaturnya memahami isu gender dan integrasi isu gender dalam dokumen perencanaan daerah.

Kelompok kerja (Pokja PUG) yang telah terbentuk namun belum sepenuhnya melibatkan Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha, Perguruan Tinggi (Jejaring masyarakat masih lemah

2.5.2. Penghapusan Segala Bentuk Kekerasan terhadap perempuan

Pemprov Kaltim telah menyediakan prosedur pelaporan jika terjadi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anakyaitu melalui lembaga layanan DKP3A Kaltim, di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). P2TP2A Odah Etam merupakan pusat kegiatan terpadu yang menyediakan pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan di Kaltim, meliputi pelayanan informasi, konsultasi psikologis, hukum, pendampingan dan advokasi, serta pelayanan medis dan rumah aman (*shelter*) melalui rujukan secara gratis



Gambar 6. Jumlah Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak Provinsi Kaltim Tahun 2014-2018 (Sumber : sidata.kaltimprov.go.id)

Pada tahun 2017 jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak paling tinggi yaitu sebesar 732 kasus, dan menurun pada tahun 2018 sebanyak 460 kasus, lebih tinggi dibanding tahun 2016 sebesar 407 kasus.

2.5.3. Menjamin Partisipasi Penuh dan Efektif serta Kesempatan yang Sama Bagi Perempuan untuk Memimpin

Rerata perempuan yang duduk sebagai anggota DPRD di kabupaten/kota di Kaltim masih berada di bawah 30%. Prosentase terbesar ada di Kota Samarinda dan Kabupaten Mahakam Ulu, sedangkan yang terkecil ada di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kota Bontang.

Tabel 18. Persentase Anggota DPRD Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota Tahun 2018

Kabupaten/Kota	Laki-Laki	Perempuan
Paser	83,33%	16,67%
Kutai Barat	84%	16%
Kutai Kartanegara	91,11%	8,89%
Kutai Timur	85%	15%
Berau	90%	10%
Penajam Paser Utara	96%	4%
Mahakam Ulu	78,95%	21,05%
Balikpapan	82,22%	17,78%
Samarinda	77,78%	22,22%
Bontang	96%	4%

Sumber : sidata.kaltimprov.go.id

Tabel 19. Persentase Perempuan di lembaga Eksekutif

Jabatan	Jumlah	Wanita	Persentase
Eselon II	48	10	20,83%
Eselon III	240	65	27,08%
Eselon IV	678	268	39,53%

Sumber: BKD Provinsi Kaltim 2018

2.6. Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi Layak

2.6.1. Menjamin Penyediaan Sanitasi Layak dan Terjangkau

Rumah atau tempat tinggal yang layak merupakan salah satu kebutuhan dasar hidup manusia. Pembangunan perumahan yang layak huni bagi masyarakat juga harus memperhatikan akses air minum dan sanitasi layak. Selama tahun 2014-2018 persentase rumah tangga di Kaltim yang mendapatkan kriteria sanitasi layak cenderung meningkat. Namun perlu diperhatikan bahwa masih terdapat Kabupaten yang tingkat persentase Rumah Tangga yang memiliki akses sanitasi layak dibawah 50% yakni Kabupaten Mahakam Ulu.

Permasalahan dalam penyelenggaraan sanitasi adalah minimnya keberlanjutan sarana dan prasarana yang telah terbangun, semakin terbatasnya sumber air baku untuk air minum dan kurang optimalnya sinergi pembangunan air minum dan sanitasi. Minimnya keberlanjutan sarana dan prasarana disebabkan oleh belum optimalnya kesadaran dan pemberdayaan masyarakat, keterlibatan aktif pemerintah daerah baik dari aspek regulasi maupun pendanaan, serta penerapan manajemen aset. Penyediaan layanan sanitasi belum tersinergikan dengan penyediaan layanan air minum sebagai upaya pengamanan air minum untuk pemenuhan aspek 4K (Kuantitas, Kualitas, Kontinuitas dan Keterjangkauan) (Seri Analisis Pembangunan Wilayah Provinsi Kaltim, 2015).

2.6.2. Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi Layak

Akses rumah tangga terhadap sanitasi layak cenderung meningkat, walaupun pada Kabupaten Mahakam Ulu masih di bawah 50%. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih diperlukan upaya peningkatan akses sanitasi layak pada wilayah yang jauh dari perkotaan.

Tabel 20. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kaltim, 2014-2018

Kabupaten/Kota	2014	2015	2016	2017	2018
Paser	47,73	54,29	54,40	54,30	72,48
Kutai Barat	35,94	20,71	38,60	53,30	63,53
Kutai Kartanegara	76,08	59,66	61,80	53,70	63,80
Kutai Timur	62,14	42,00	54,80	72,80	80,15
Berau	80,60	68,21	73,40	59,50	81,97
Penajam Paser Utara	50,26	63,14	68,90	64,70	67,40
Mahakam Ulu	-	51,75	24,40	33,40	41,61
Balikpapan	93,82	83,43	83,60	91,20	86,00
Samarinda	96,19	87,68	93,50	87,40	92,89
Bontang	88,77	89,98	82,20	91,50	94,73
Kaltim	-	68,83	72,70	72,80	79,43

Sumber : BPS Kaltim 2019

2.6.3. Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat

Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) merupakan pendekatan dalam rangka peningkatan akses sarana kesehatan lingkungan melalui perubahan perilaku masyarakat dengan 5 (lima) Pilar STBM yang mendukung kesehatan masyarakat. Kabupaten/Kota STBM Paripurna yaitu Kabupaten/Kota yang telah mencapai Open Defecation Free(ODF) ditambah memiliki minimal 50% Desa/Kelurahan minimal 50% KK telah melaksanakan 5 Pilar STBM terdiri atas: Stop Buang Air Besar, Cuci Tangan Pakai Sabun, Pengelolaan Air Minum dan makanan rumah tangga, Pengamanan sampah rumah tangga dan Pengelolaan Limbah Cair Rumah Tangga.

PP No. 66 tahun 2014 menyebutkan STBM bagian dari kegiatan intervensi kesehatan lingkungan yaitu untuk mewujudkan perilaku masyarakat yang hygiene dan saniter yang mandiri dalam melalui pemberdayaan dengan cara pemecuan guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

Jumlah penduduk Provinsi Kaltim yang mengakses sanitasi layak pada 2018 yakni dari 1.138.395 KK, saat ini baru ada sekitar 945.068 (83,02 persen) desa yang melaksanakan STBM (pemicuan) baru 620 desa dari 1.032 desa yang baru (60,78 persen). Sedangkan kabupaten yang stop buang air besar sembarangan (ODF) baru 139 (13,63 persen) ODF desa verifikasi. Upaya promotif dan preventif dengan pendekatan STBM melalui pemberdayaan masyarakat menjadi alternatif yang cukup efektif, untuk memicu perubahan perilaku hidup bersih dan sehat mendukung pencapaian akses air minum dan sanitasi yang layak dan berkesinambungan.

2.6.4. Peningkatan Sistem Pengelolaan Lumpur Tinja

Pengelolaan sanitasi tidak hanya dititikberatkan pada pembangunan fasilitas sanitasi, namun pengelolaan sanitasi mempunyai cakupan yang luas yakni upaya preventif untuk mencegah masalah kesehatan sebagai akibat penyakit menular yang ditimbulkan oleh lingkungan yang tidak sehat (kesehatan lingkungan). Oleh karena itu kebijakan-kebijakan yang diperlukan dalam pengelolaan sanitasi juga mencakup upaya-upaya promosi kesehatan seperti peningkatan kesehatan lingkungan, penyediaan air bersih dan pengurangan

wilayah kumuh telah menjadi kegiatan prioritas dalam pembangunan kesehatan nasional.

Pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa masih terdapat Kabupaten yang tingkat penggunaan Tangki Septik/IPAL masih rendah, Salah satunya adalah pada Kabupaten Mahakam Ulu. Kondisi sistem jaringan air limbah domestik di Kabupaten Mahakam Ulu masih belum memiliki IPAL Kawasan maupun IPLT sehingga kondisi jaringan air limbah di Kabupaten Mahakam Ulu masih tergolong sangat minim. Hal ini dikarenakan Pada Kabupaten Mahakam Ulu masih minimnya sarana dan prasarana sanitasi ditambah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai sanitasi yang layak maka masyarakat masih meneruskan kebiasaan lama yang kurang baik salah satunya melakukan Buang Air Besar (BAB) di sungai (*Strategi Sanitasi Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2016*).

2.6.5. Peningkatan Kualitas Air Sungai dan Danau sebagai Air Baku

Kualitas air, utamanya air sungai sangat penting bagi kehidupan. Tercatat lebih dari 30% keperluan air rumah tangga di Kalimantan bersumber dari air sungai, dan lebih dari 4% di antaranya digunakan sebagai sumber air minum.

Tabel 21. Persentase Rumah Tangga menurut Kabupaten/Kota dan Tempat Pembuangan Akhir Tinja

Kabupaten/Kota	Tangki Septik/IPAL	Kolam/Sawah/Sungai/Danau/Laut	Lubang Tanah	Pantai/Tanah Lapang/Kebun/Lainnya
Paser	76,78	6,67	16,20	0,34
Kutai Barat	76,46	2,82	20,54	0,18
Kutai Kartanegara	72,68	7,45	19,68	0,20
Kutai Timur	83,35	2,93	10,38	0,00
Berau	87,67	8,38	3,89	0,05
Penajam Paser Utara	72,53	2,82	24,59	0,06
Mahakam Ulu	46,72	3,11	50,17	0,00
Balikpapan	85,23	7,17	2,12	3,75
Samarinda	95,75	3,25	0,65	0,13
Bontang	92,05	3,85	1,09	0,00

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kaltim 2018

Kualitas Air Sungai di Kaltim dicerminkan melalui Indeks Kualitas Air Sungai dan Danau Kaltim yaitu sebesar 79,78 pada Tahun 2018. Nilai ini cenderung meningkat dari tahun sebelumnya yakni pada skor 74 pada tahun 2017. Hal ini mencerminkan bahwa Pemerintah telah memperhatikan kelestarian lingkungan terutama pengelolaan lahan di wilayah DAS Mahakam. Namun Pemerintah masih akan terus berupaya melakukan tindakan nyata dalam pengendalian pencemaran yang dapat menekan beban polutan yang melalui penatagunaan lahan ataupun pengolahan limbah tambang dan perkebunan disekitar Daerah Aliran Sungai yang ada di Kaltim.

Tabel 22. Indeks Kualitas Air Sungai Provinsi Kaltim Tahun 2017-2018

Uraian	2017	2018
Indeks Kualitas Air	74	79,78

Uraian	2017	2018
Sungai		

Sumber : sidata.kaltimprov.go.id

2.6.6. Jumlah DAS yang dilindungi mata airnya dan dipulihkan kesehatannya Di Provinsi Kaltim terdapat 25 Daerah Aliran Sungai (DAS). Pemerintah akan terus berupaya dalam perbaikan DAS khususnya yang terdapat di Kaltim. Diharapkan dari pulihnya DAS ini dapat meningkatkan fungsi dari DAS itu sendiri yakni sebagai tempat menerima, mengumpulkan air hujan, sedimen dan unsur hara serta mengalirkannya ke laut atau danau. Sehingga kekeruhan air sungai dan banjir dapat berkurang, serta ketersediaan air baku lebih lama karena adanya embung.

Tabel 23. Daerah Aliran Sungai di Kaltim

Nama Daerah Aliran Sungai	Luas (hektare)
Adang-Kuaro	110.950,75
Batakan	7.457,71
Bengalon	388.364,04
Berau	1.677.013,97
Bontang	9.568,92
Dumaring	182.044,82
Karangan	529.052,27
Kendilo	451.147,53
Kerang-Segendang	223.933,43
Mahakam	7.729.397,91
Manggar	11.845,47
Manubar	375.732,15
Pemaluan	26.886,51
Riko	60.036,46
Samboja	71.135,64
Sangatta	262.577,88
Santan	193.245,84
Semoi	8.423,31
Sepaku	23.894,01
Tabalar	225.215,21
Telake	445.000,93
Tengin	32.055,10
Tunan	78.695,33
Wain	24.090,61
Kepulauan Derawan	3.943,17
JUMLAH	13.151.708,96

Pemprov Kaltim bersama dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota memberikan perhatian terhadap pemulihan fungsi DAS sesuai dengan kewenangannya. Sampai tahun 2018, ada 2 DAS yang dipulihkan kesehatannya dan dipelihara kesehatannya.

Tabel 24. Capaian Pengelolaan Daerah Aliran Sungai di Kaltim

INDIKATOR	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST)		1			

INDIKATOR	2014	2015	2016	2017	2018
yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).					
Luas pengembangan hutan serta peningkatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) untuk pemulihan kawasan DAS.				50	100
Jumlah DAS Prioritas yang dipulihkan kesehatannya melalui pembangunan embung, DAM pengendali, dam penahan skala kecil dan menengah.		2		1	2

2.6.7. Melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air

Upaya rehabilitasi lahan kritis telah dilakukan dengan pendanaan PSDH-Dana Reboisasi, maupun melalui program Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai. Kegiatan rehabilitasi dilakukan di dalam dan di luar kawasan hutan, yang diidentifikasi melalui Peta Lahan Kritis dan verifikasi lapangan. Kegiatan ini dilakukan melalui pembiayaan APBD maupun melalui kontribusi swasta melalui program Rehabilitasi DAS.

Tabel 25. Luas lahan kritis yang direhabilitasi

INDIKATOR	2014	2015	2016	2017	2018
Luas lahan kritis dalam KPH yang direhabilitasi.					3.07 0

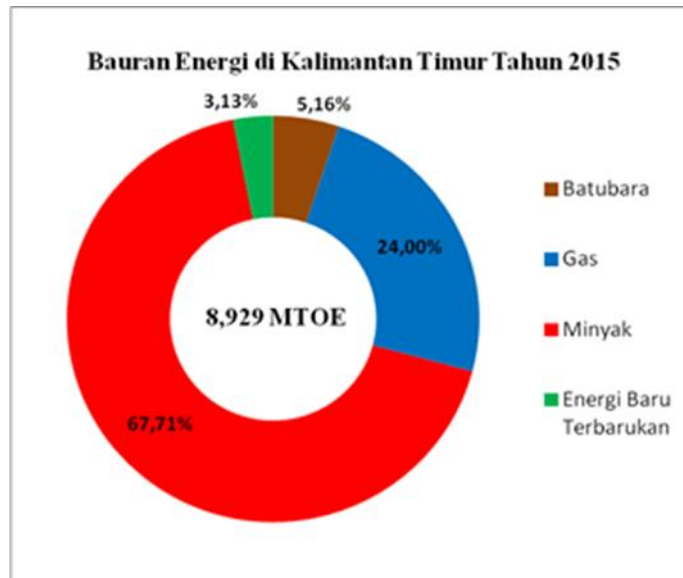
2.7. Menjamin Akses Energi Yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan, dan Modern

2.7.1. Kebutuhan Energi Daerah

Upaya pemenuhan kebutuhan energi bagi masyarakat dan kegiatan pembangunan pada semua sektor di seluruh wilayah di Provinsi Kaltim, masih menghadapi berbagai kendala yang menyebabkan ketersediaan energi siap pakai di seluruh wilayah Provinsi Kaltim. Dari semua energi yang terpakai di Kaltim pada berbagai sektor, hampir seluruhnya menggunakan energi fosil, hanya kurang dari 4% saja yang menggunakan energi terbarukan.

Total produksi gas alam dan batubara yang menjadi sumber utama energi fosil mengalami penurunan pada periode 2013-2017 masing-masing sebesar 36,5% dan 3,9%. Sementara itu, produksi minyak bumi dan LNG juga mengalami penurunan sebesar 23,7%. Hal ini disebabkan menurunnya harga pasar dunia beberapa produk pertambangan sangat berpengaruh pada produktifitas pertambangan di daerah.

Berdasarkan permodelan LEAP, bauran energi primer di Provinsi Kaltim tahun 2015 yang paling besar adalah minyak bumi yaitu 67,71% dari seluruh sumber energi yang digunakan. Selanjutnya gas bumi sebesar 24%, kemudian batubara 5,16%. Sementara itu bauran energi baru terbarukan masih relatif sangat kecil dibandingkan dengan penggunaan bahan bakar fosil di Provinsi Kaltim yaitu hanya 3,13%.

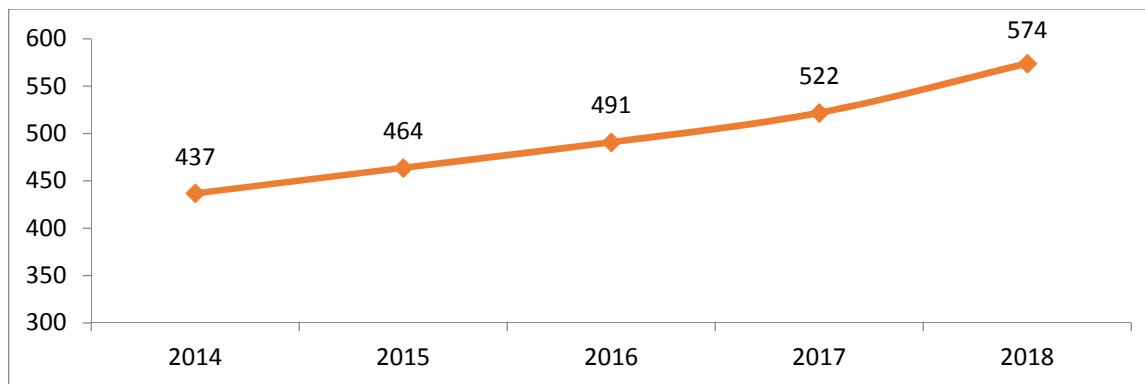


Gambar 7. Bauran Energi Berdasarkan sumber energi di Provinsi Kaltim Tahun 2015

Kondisi ketenagalistrikan di Provinsi Kaltim menunjukkan tren yang semakin membaik. Namun tetap memerlukan upaya peningkatan agar akses masyarakat terhadap ketenagalistrikan dapat berjalan dengan optimal dan merata. Dilihat dari jumlah kebutuhan daya listrik, Provinsi Kaltim mengalami kenaikan sebesar 137 MWh dari tahun 2014 (437 MWh) sampai dengan tahun 2018 (574 MWh).

Pelayanan energi listrik kepada masyarakat (rumah tangga) di Kaltim mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Jumlah Desa Provinsi Kaltim Tahun 2014 sebanyak 1.001 Desa, sebanyak 940 Desa telah memiliki listrik (Desa Berlistrik) yang bersumber dari PLN maupun Non PLN (Genset, PLTS dan lain-lain). Desa berlistrik yang bersumber dari PLN sebanyak 620 Desa dan yang bersumber dari non PLN sebanyak 320 Desa. Pada tahun 2017, desa berlistrik menjadi 974 desa berlistrik. Oleh karena itu, rasio desa berlistrik mengalami peningkatan dari tahun 2014 sebesar 93,91% menjadi 98,94% di tahun 2017.

Hal ini sejalan pula dengan rasio elektrifikasi di Kaltim yang terus mengalami peningkatan dari 75,90% di tahun 2014 menjadi 85,75% pada tahun 2018. Peningkatan rasio elektrifikasi didorong oleh infrastruktur ketenagalistrikan yang terus mengalami perbaikan. Hal ini ditandai dengan pembangunan pembangkit-pembangkit baru serta penambahan kapasitas produksi listrik yang sudah ada sehingga tercatat secara produksi listrik PT. PLN (Persero) Wilayah Kaltimtarra mengalami surplus pada tahun 2018 sebesar 200 MW.



Gambar 8. Bauran Energi Berdasarkan sumber energi di Provinsi Kaltim Tahun 2014-2018

Sumber : sidata.kaltimprov.go.id

Tabel 26. Pelayanan Energi Listrik Kepada Masyarakat di Kaltim

Tahun	Rasio Desa Berlistrik (RD)	Rasio Elektrifikasi (RE)	Pertumbuhan
2014	93,91 %	75,90 %	0,84 %
2015	96,60 %	76,59 %	0,68 %
2016	96,82 %	79,67 %	3,08 %
2017	97,01 %	84,07 %	4,40 %
2018	98,94 %	85,75 %	1,68 %

Rasio penggunaan gas rumah tangga mengalami kenaikan yang signifikan yakni sebesar 3,9014. Pada tahun 2014 rasio hanya sebesar 0,4937 dan meningkat menjadi 4,3951 pada tahun 2018. Pemanfaatan jaringan gas rumah tangga akan memberikan penghematan dibandingkan jika sebelumnya memanfaatkan LPG. Hal ini mendukung rencana pemerintah untuk terus memperluas pemanfaatan gas bumi sebagai bagian dari upaya memperkuat kemandirian energi dan mewujudkan bauran energi gas bumi daerah.

Tabel 27. Penggunaan Energi di Kaltim

INDIKATOR	2014	2015	2016	2017	2018
Rasio elektrifikasi.	75,9	76,59	79,67	84,07	85,75
Jumlah sambungan jaringan gas untuk rumah tangga*	5,052	5,052	5,052	21,052	49,062
Rasio penggunaan gas rumah tangga	0,4937	0,494	0,4924	1,9539	4,3951

Namun demikian cakupan pelayanan infrastruktur kelistrikan di Provinsi Kaltim masih belum optimal, mengingat masih rendahnya akses listrik masyarakat dan rasio elektrifikasi Kaltim masih rendah dibandingkan dengan nasional (98,3%). Tantangan dalam kualitas pelayanan energi dan ketenagalistrikan antara lain: (1) Akses dan penyebaran penduduk yang tidak merata dan faktor luas wilayah; (2) Terkendalanya pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan; dan (3) Belum optimalnya kerjasama Pemerintah, PLN dan swasta dalam pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan pada daerah/wilayah yang belum terjangkau oleh PLN.

2.7.2. Produksi dan Penggunaan Energi

Produksi energi listrik untuk kepentingan umum khususnya oleh PT. PLN (Persero) sebagai Pemegang Pemegang Izin Usaha penyediaan tenaga Listrik (IUPTL) di seluruh Indonesia bersama *Independent Power Producer* (IPP) dan *Excess Power* dari Pemegang IUPTL lainnya (PT. Kariangau Power, PT. Indo Pusaka Berau dan PT. Kaltim Daya Mandiri serta PT. Kalimantan Powerindo) dan juga *Excess Power* dari Pemegang Izin Operasi (IO) yaitu PT. Kaltim Prima Coal, PT. Sumalindo, PT. BUMI (Belimbing), PT. Mangkujenang, PT. Rea Kaltim dan PT. Daya Lestari dan PT. Hutan Hijau Mas.

Energi listrik di Kaltim diproduksi dari berbagai jenis pembangkit yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batubara, Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG), Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU), Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD), Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG), Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm) dan Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTBg) serta Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).

Pada tahun 2014 total kapasitas pembangkit listrik di Kaltim sebesar 349,63 MW dengan produksi tenaga listrik sebesar 2.815 GWh. Adanya peningkatan infrastruktur ketenagalistrikan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir sehingga kapasitas pembangkit di Kaltim meningkat secara signifikan yakni mencapai 680,61 MW di tahun 2018 dan produksi tenaga listrik mencapai 3.690 GWh.

Tabel 28. Kapasitas Pembangkit dan Produksi Tenaga Listrik di Kaltim

Tahun	Kapasitas Pembangkit (MW)	Produksi Tenaga Listrik (GWh)
2014	349,63	2.815
2015	449,63	3.107
2016	540,83	3.304
2017	670,83	3.494
2018	680,61	3.690

Pengguna energi listrik terdiri dari 4 (empat) sektor yaitu Rumah Tangga (RT), Industri (I), Usaha (U), Sosial (S), Gedung Pemerintah (P), Penerangan Jalan Umum (PJU). Dilihat dari besaran penggunaan energi listrik per sektor tahun 2018, sektor Rumah Tangga (RT) merupakan yang paling besar penggunaannya yaitu 1.986,60, diikuti sektor Usaha (U) sebesar 851,56, kemudian sektor Industri (I) sebesar 236,50. Dari total penggunaan energi listrik secara keseluruhan pada tahun 2014 sebesar 2.512,53 meningkat menjadi 3.418,33 pada tahun 2018.

Tabel 29. Penggunaan Energi Listrik di Kaltim

Tahun	RT	(I)	(U)	(S)	(P)	(PJU)	Jumlah
2014	1.516,27	148,75	602,39	96,58	94,09	54,45	2.512,53
2015	1.918,93	189,86	707,37	187,92	115,84	53,96	3.103,88
2016	1.819,59	171,92	727,35	120,22	117,01	51,21	3.007,29
2017	1.925,87	176,43	789,78	133,47	127,19	51,11	3.203,85
2018	1.986,60	236,50	851,56	148,25	140,03	55,39	3.418,33

2.7.3. Energi Baru dan Terbarukan (EBT)

Produksi energi listrik untuk kepentingan umum yang berasal dari pembangkit tenaga listrik dengan pemanfaatan energi baru terbarukan berupa Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm), Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTBg) dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). Dilihat dari data capaian produksi energi, sumber energi baru terbarukan cukup rendah yakni 0,65% di tahun 2014. Penyediaan energi untuk memenuhi kebutuhan daerah terus didorong oleh pemerintah terutama potensi sumber energi dari energi baru terbarukan. Hingga tahun 2018 capaian meningkat menjadi 1,86%.

Tabel 30. Produksi Energi Baru Terbaharukan di Kaltim

Tahun	2014	2015	2016	2017	2018
Capaian (%)	0,65	1,01	1,95	1,38	1,86

Permasalahan utama belum optimalnya pemanfaatan energi baru terbarukan adalah biaya teknologi pemanfaatan energi baru terbarukan relatif mahal/tinggi dan daerah yang belum memiliki infrastruktur energi lokasinya terletak di daerah terpencil, terluar dan tertinggal (3T). tantangan yang dihadapi dalam peningkatan pemanfaatan energi baru terbarukan antara lain : (1) Lokasi terpencil, terluar dan tertinggal, tidak memiliki akses terhadap energi; (2) Harga jual energi listrik yang berasal dari Energi Baru terbarukan masih belum kompetitif; (3) Lokasi yang memiliki potensi energi terbarukan jenis tenaga air, biogas dan biomassa terletak didaerah terpencil; dan (4) Diversifikasi bahan bakar kendaraan bermotor, dari BBM ke BBG.

2.8. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan

2.8.1. Perkembangan Ekonomi Makro

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator untuk melihat kinerja pembangunan perekonomian yang mencerminkan seluruh nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu wilayah dalam periode tertentu. PDRB juga merupakan salah satu indikator untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan khususnya Tujuan kedelapan, yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Pada tahun 2018, besaran PDRB Kaltim atas dasar harga berlaku sebesar Rp 638,12 triliun, lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp 592,28 triliun. Untuk PDRB per kapita atas dasar harga berlaku juga mengalami kenaikan sebesar 5,57 persen, dari 165,7 juta menjadi 174,9 juta di tahun 2018.

Tabel 31. PDRB ADHB, ADHK, PDRB Per Kapita

Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
PDRB ADHB (Miliar Rupiah)	527.515,26	505.105,06	508.880,24	592.279,94	638.116,90
PDRB ADHK (Miliar Rupiah)	446.029,05	440.676,36	439.003,83	452.741,91	464.823,49
PDRB Per Kapita (Ribu Rupiah)	157.400	147.405	145.343	165.652	174.882

Sumber : BPS Kaltim, 2019

2.8.2. Penciptaan Lapangan Kerja yang Layak dan Produktif.

Angkatan kerja di Kaltim tahun 2018 sebesar 1,73 juta penduduk usia kerja. Jumlah ini meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dari

sejumlah angkatan kerja tersebut proporsi penduduk yang bekerja ada sebesar 93,40 persen atau sebesar 1.618.285 orang, dan sisanya adalah pengangguran.

Dalam bidang ketenagakerjaan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menjadi indikator dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) ke 8 (delapan), yaitu terkait pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi. TPT menggambarkan angkatan kerja yang tidak terserap oleh pasar tenaga kerja. Pada tahun 2018, TPT Kaltim sebesar 6,60 persen, artinya dari 100 orang angkatan kerja ada sekitar 7 orang yang menganggur.

Beberapa permasalahan dan tantangan yang dihadapi Kaltim dalam upaya meningkatkan daya saing tenaga kerja dan mendorong penciptaan lapangan kerja yang layak dan produktif, antara lain:

1. Rendahnya kualitas tenaga kerja yang tidak sesuai dengan kebutuhan dunia kerja (*skill mismatch* dan *underqualified*);
2. Transformasi struktural pasar kerja yang mengarah pada sektor dengan produktivitas rendah;
3. Efisiensi pasar tenaga kerja yang lemah dalam kerangka daya saing global;
4. Kenaikan upah yang tidak diikuti dengan kenaikan produktivitas tenaga kerja;
5. Terbatasnya penyediaan kesempatan kerja bagi angkatan kerja usia muda;
6. Lemahnya koordinasi lintas sektor dan instansi dalam pencapaian target bersama.

Tabel 44. Jumlah tenaga kerja utama, dan tingkat pengangguran

INDIKATOR	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah Penduduk Bekerja	1.677.466	1.423.957	1.581.239	1.540.675	1.618.285
Tingkat Pengangguran Terbuka	7,54%	7,50%	7,95%	6,91%	6,60%

2.8.3. Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Untuk mewujudkan pembangunan ekonomi dibutuhkan upaya meningkatkan daya saing Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dengan mewujudkan atau memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta manajemen. Oleh karena itu pelaku usaha UKM dapat memanfaatkan dan usaha yang berkelanjutan dengan menggunakan informasi atau pengalaman yang telah diperoleh guna terciptanya kompetensi UKM.

Usaha Kecil dan Menengah juga berperan sebagai salah satu sumber penting bagi pertumbuhan ekonomi dan ekspor non migas yang secara langsung turut menciptakan peningkatan pendapatan masyarakat. Secara mikro ekonomi UKM keberadaannya sangat fluktuatif, hal ini dapat terjadi karena pergeseran sektor usaha guna mengikuti pangsa pasar yang ada atau karena memiliki struktur permodalan yang belum mapan. Kondisi tersebut menjadikan posisi UKM sangat sulit untuk diketahui perkembangannya, maka diperlukan *database by name by address*.

Berbagai keterbatasan yang dihadapi UKM, dimana salah satunya adalah keterbatasan UKM dalam mengakses pasar. Oleh karena itu, sebaiknya pengembangan dan pembinaan UKM lebih diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik, nasional dan Internasional.

Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kaltim pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 30,65 persen menjadi hanya sebanyak 314.245 unit UMKM. Mengingat besarnya kontribusi UMKM sebagai sumber ekonomi,

khususnya membuka lapangan kerja, maka diperlukan upaya yang dapat mendorong keberlanjutan UMKM. Salah satu upaya dalam mendorong UMKM adalah memastikan terwujudnya kemudahan UMKM dalam mengakses pembiayaan atau permodalan. Penyaluran kredit UMKM pada tahun 2018 menunjukkan sedikit penurunan dibanding tahun 2017. Kredit UMKM pada 2018 turun sebesar 0,62%.

Pembinaan UMKM yang dilakukan oleh pemerintah selama ini masih bersifat “Hit and Run”, dimana pemerintah memberikan pembinaan dalam bentuk pelatihan, sosialisasi dan penyuluhan. UMKM diminta untuk berpikir sendiri melakukan inovasi dan kreatif dan untuk kedepan selain dilakukan pelatihan diikuti dengan pendampingan bagi pelaku usaha yang telah mendapat pembinaan.

Secara umum, permasalahan yang dihadapi oleh UMKM adalah keterbatasan pada akses pembiayaan, rendahnya kapasitas inovasi dan teknologi, serta keterbatasan kapasitas manajemen dan teknis. Selain itu, UMKM juga menghadapi berbagai tantangan untuk meningkatkan daya saing diantaranya ialah rendahnya nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran.

Tabel 45. Jumlah UMKM dan Proporsi Kredit UMKM

Tahun	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah UMKM	446.965	446.454	453.097	453.097	314.245
Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit	25,35%	26,32%	26,36%	27,33%	26,71%

2.8.4. Peningkatan Pariwisata

Peningkatan sektor pariwisata merupakan salah satu yang akan ditingkatkan kontribusinya dalam perekonomian Kaltim dan mendukung peningkatan kesejahteraan dan pemerataan pendapatan. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu mendorong pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi, salah satunya ialah Kawasan Derawan dan sekitarnya.

Perkembangan pariwisata dalam lima tahun terakhir ditunjukkan oleh peningkatan jumlah kunjungan wisatawan rata-rata sebesar 2,24%. Hal ini juga didukung dengan peningkatan jumlah objek wisata yang sangat signifikan. Tercatat sebanyak 807 jumlah objek wisata potensial untuk dikembangkan di Kaltim. Pengembangan destinasi pariwisata di Kaltim tersebut terus diperkuat dengan percepatan pembangunan, aksesibilitas (infrastruktur konektivitas), amenities dan atraksi yang relatif masih banyak yang belum memadai.

Perkembangan sektor pariwisata secara umum masih menghadapi dua tantangan yaitu: Pertama, peningkatan kunjungan wisatawan dalam lima tahun terakhir belum diikuti oleh peningkatan pengeluaran wisatawan (peningkatan kontribusi terhadap PDRB Kaltim). Kedua, praktik pariwisata yang berorientasi pada jumlah kunjungan belum mempertimbangkan daya dukung lingkungan dan keterlibatan masyarakat setempat. Kedua tantangan ini membutuhkan strategi pengembangan destinasi wisata yang didukung oleh (i) kesiapan masyarakat secara sosial, budaya, dan ekonomi untuk dapat menerima kunjungan wisatawan dan berpartisipasi dalam penyediaan layanan wisata, serta (ii) pelestarian lingkungan melalui penerapan praktik wisata yang berkelanjutan.

Tabel 46. Jumlah Wisatawan dan Obyek Wisata

INDIKATOR	2014	2015	2016	2017	2018*)
Jumlah	3.968.026	4.320.025	5.547.435	5.979.973	3.819.947

Wisatawan					
Jumlah Objek Wisata	662	819	833	840	807

Keterangan : *) Data Sementara

Tabel 47 Rekapitulasi Objek Wisata Kaltim

No	Kabupaten /Kota	Alam	Buatan	Budaya	
1.	Samarinda	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Wisata Mahakam ▪ Air Terjun Merah 	<ul style="list-style-type: none"> Sungai Tanah 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mall Lembuswana ▪ Bigmall Samarinda ▪ Plaza Mulia Samarinda ▪ Samarinda Central Plaza ▪ Mall Samarinda Square • Lampion Garden 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Desa Wisata Pampang ▪ Kampung Tenun Samarinda • Masjid Tua
2.	Balikpapan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pantai Manggar ▪ Pantai Lamaru • -Mangrove 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pasar Sayur ▪ Penangkaran Buaya Tritip ▪ E-walk ▪ Balikpapan Plaza ▪ Pentacity Mall ▪ Transmart ▪ Balcony • -Caribbean Island Waterpark 		
3.	Bontang	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Desa Wisata Bontang Kuala ▪ Bontang Kuala Ecotourism (Sungai Belanda) ▪ Pulau Beras Basah ▪ Pulau Karang Segajah • Pulau Selangan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bontang City Carnaval ▪ Waterboom Kenari Park ▪ Mangrove Beras Basah • Mangrove BSD 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pesta Adat Erau Pelas Benua Guntung • Pesta Laut Bontang Laut 	
4.	Kutai Kartanegara	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Wisata Bukit Bengkirai ▪ Danau Semayang • Danau Melintang 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pulau Kumala ▪ Waduk Panji Sukarame ▪ Jembatan Repo-repo • -Ladang Budaya (Ladaya) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Adat Kenyah Lekaq Kidau • Erau Festival 	
5.	Kutai Timur	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hutang Wehea ▪ Taman Nasional 	<ul style="list-style-type: none"> • Taman Bersemi Rekreasi, Olahraga dan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Desa Nehes Liang Bing ▪ Desa Miau 	

No	Kabupaten /Kota	Alam	Buatan	Budaya
		Kutai ▪Goa Karst Mangkuris •-Pantai Sekerat	Kuliner	Baru •Dusun Rindang Benua
6.	Kutai Barat	▪Danau Jempang •Jantur Inar	•Taman Budaya Sendawar	▪Lamin Eheng •Lamin Tolan
7.	Paser	▪Goa Mangkulangit ▪Goa Tengkorak •Tempat Air Panas Long Kali		▪Keraton Sadurengas ▪Pesta Budaya Kembo •Pesta Budaya Pesisir
8.	PPU	▪Pantai Tanung Jumlai •Mangrove	•Penangkaran Rusa	
9.	Berau	▪Kepulauan Derawan ▪Air Terjun Kelay ▪Labuan Cermin •Teluk Sumbang		▪Keraton Sambaliung ▪Kerajaan Gunung Tabur •Irau / Bakudung Batiung
10.	Mahakam Ulu	▪Objek Wisata Sungai Alan ▪Riam Panjang ▪Riam Udang ▪Haloq ▪Bato Ten'vang ▪Wisata Wild Fishing •Sungai Tepai	▪Goa Maria Laham •Taman Budaya	▪Kampung Wisata Batu Majang •Kampung Budaya Long Tuyuq

Tabel 48. Kawasan Destinasi Pariwisata Nasional, Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional, dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (PP RI No. 50/2011)

Destinasi Pariwisata Nasional (DPN)	Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN)	Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN)
1. DPN Long Bagun-Melak dan sekitarnya	1. KPPN Long Apari dan sekitarnya 2. KPPN Long Bagun dan sekitarnya 3. KPPN Melak-Kersik Luway dan sekitarnya	1. Long Bagun dan sekitarnya
2. DPN Tenggara - Balikpapan dan	1. KPPN Kota Bangun-Isuy dan	2. Kota Bangun-Tanjung Isuy dan

Destinasi Pariwisata Nasional (DPN)	Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN)	Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN)
sekitarnya	sekitarnya 2. KPPN Tenggarong dan sekitarnya 3. KPPN Samarinda Kota dan sekitarnya 4. KPPN Bontang-Sangatta dan sekitarnya 5. KPPN Balikpapan-Samboja dan sekitarnya 6. KPPN Tanjung Redeb dan sekitarnya	sekitarnya
3. DPN Kepulauan Derawan – Kayan Mentarang dan sekitarnya	1. KPPN Derawan-Sangkalaki dan sekitarnya 2. Kayan Mentarang dan sekitarnya	3. Derawan Sangalaki dan sekitarnya

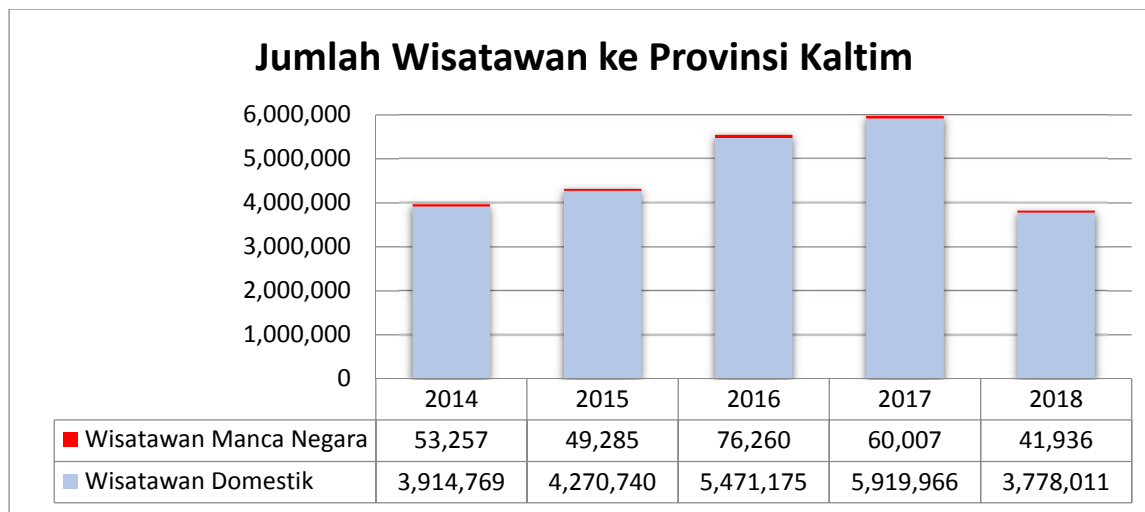
Dinas Pariwisata dalam 5 tahun terakhir telah melaksanakan beberapa program dan kegiatan dalam rangka meningkatkan ekonomi masyarakat, terutama masyarakat yang berdiam disekitar obyek wisata. Program dan Kegiatan tersebut baik dalam bentuk pembangunan sarana dan prasarana mendukung pariwisata, sosialisasi dan penyuluhan terhadap kelompok sadar wisata, pelatihan-pelatihan dan peningkatan SDM terhadap pelaku jasa dan sarana pariwisata, serta pelatihan terhadap para pelaku ekonomi kreatif dalam hal ini yang berkaitan dengan seni budaya daerah.

Kinerja kontribusi pariwisata terhadap PDB terlihat mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun memang secara persentase masih terbilang kecil. Tercatat di tahun 2018, sektor pariwisata hanya menyumbang sebesar 0,97 persen kepada PDB. Dalam perekonomian Kaltim, pariwisata dapat menjadi salah satu sector andalan untuk mewujudkan transformasi ekonomi di Kaltim yang masih bergantung pada Sumber Daya Alam. Namun, perlu kerja ekstra keras untuk mencapainya, melihat peningkatan proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDRB yang sangat kecil.

Tabel 49. Kontribusi Pariwisata terhadap PDB

INDIKATOR	2014	2015	2016	2017	2018
Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB	0,73	0,86	0,95	0,93	0,97

Jumlah kunjungan wisata, didominasi oleh wisatawan nusantara, dan terjadi fluktuasi antar tahun, dimana kunjungan tertinggi terjadi pada tahun 2016.



Gambar 9. Jumlah Kunjungan Wisata di Kaltim

Dari data di atas terlihat bahwa perlu upaya dari seluruh stakeholder dalam peningkatan jumlah wisatawan yang berkunjung di Kaltim, terutama dalam rangka menarik minat wisatawan mancanegara untuk mengunjungi Kaltim.

2.8.5. Kapasitas lembaga keuangan domestik

Jumlah layanan lembaga keuangan domestic dalam lima tahun terakhir belum meningkat signifikan. Terdapat 55 ATM per 100.000 penduduk dewasa dan 16 kantor Bank setiap 100.000 penduduk dewasa.

Tabel 50 Lembaga Keuangan Domestik di Kaltim

INDIKATOR	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah ATM per 100.000 penduduk dewasa	50	53	55	56	55
Jumlah kantor bank per 100.000 penduduk dewasa	15	16	16	16	16

2.9. Membangun Infrastruktur Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, Serta Mendorong Inovasi

2.9.1. Pembangunan Infrastruktur

Penyediaan infrastruktur Kaltim belum sepenuhnya tercapai secara maksimal. Prasarana Jaringan Jalan provinsi sepanjang 895,09 Km dengan kondisi mantap sampai tahun 2018 mencapai 52,85 %. Berdasarkan kondisi permukaan jalan yaitu kondisi baik mencapai 444,44 km, kondisi sedang mencapai 69,33 Km, kondisi rusak ringan mencapai 178,77 Km, dan kondisi rusak berat mencapai 202,55 Km. Pembangunan infrastruktur jalan Provinsi dihadapkan pada permasalahan masih rendahnya rasio panjang jalan terhadap luas wilayah, dimana angka rasionya menunjukkan 147,30 km per 1.000 km² di bawah rasio nasional, yaitu 265,47 km/1.000 km².

Tabel 51 Panjang jalan berdasarkan jenis dan kualitas jalan

INDIKATOR	2014	2015	2016	2017	2018
Panjang Jalan Provinsi berdasarkan Jenis Permukaan (Km)	1.596,38	1.588,69	1.661,59	883,70	895,09
- Aspal	1.063,45	1.022,46	1.081,02	595,10	612,12

INDIKATOR	2014	2015	2016	2017	2018
- Tanah	282,58	281,58	306,40	52,53	94,31
- Burda	185,10	182,80	117,60	-	37,58
- Rigid	65,25	101,85	156,57	236,07	151,08
Panjang Jalan Provinsi berdasarkan kondisi (Km)	1.493,68	1.493,68	1.661,59	883,68	895,09
- Baik	1.062,66	912,89	152,94	426,16	444,44
- Sedang	285,03	525,53	728,99	29,85	69,33
- Rusak	83,52	41,23	510,84	224,28	178,77
- Rusak Berat	62,47	14,03	268,82	203,39	202,55

Meskipun demikian, pembangunan infrastruktur terkait konektivitas terus dipercepat untuk meningkatkan kelancaran arus barang dan jasa antar wilayah. Jumlah penumpang kapal laut dan angkutan udara fluktuatif namun cenderung menurun, sedangkan jumlah penumpang transportasi darat menurun signifikan. Pada tahun 2014 jumlah penumpang transportasi darat sebanyak 1.821.094 orang menjadi 602.172 pada tahun 2018. Sementara itu, jumlah angkutan barang yang menggunakan transportasi darat cenderung menurun, berbeda dengan jumlah angkutan barang dengan transportasi laut yang mengalami peningkatan. Pada tahun 2014 jumlah angkutan barang sebesar 825.825.408 ton meningkat menjadi 2.399.801.887 ton pada tahun 2018. Untuk jumlah penumpang transportasi udara atau pesawat dari tahun 2014 sebanyak 7.746.765 orang meningkat menjadi 8.171.146 orang pada tahun 2018.

Tabel 32. Jumlah dan kapasitas pelabuhan penumpang, pelabuhan industri

INDIKATOR	2014	2015	2016	2017	2018
Transportasi Darat					
Jumlah Orang melalui terminal	1.821.094	1.779.384	1.970.567	1.849.432	602.172
Jumlah barang melauai terminal (Ton)	5.270.250	4.915.775	4.889.523	4.852.836	4.811.000
Transportasi Laut					
Jumlah Penumpang Angkutan Kapal Laut	831.663	403.835	453.060	505.777	515.593
Jumlah Barang yang dimuat dan di bongkar (ton)	825.825.408	2.630.374.865	2.432.833.106	2.322.471.391	2.399.801.887

Sampai dengan tahun 2018, di Kaltim terdapat 9 bandara, 14 pelabuhan, 5 pelabuhan penyeberangan, dan belum ada sarana kereta api. Bandara di Kaltim, yaitu:

- Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggian, Balikpapan
- Bandara Aji Pangeran Tumenggung Pranoto Samarinda
- Bandara Kalimantan, Berau
- Bandara Maratua, Berau
- Bandara Melalan, Sendawar Kutai Barat
- Bandara Data Dawai, Mahakam Ulu
- Bandara Muara Wahau, Kutai Timur
- Bandara NGL, Bontang
- Bandara Tanjung Bara, Sangatta Kutai Timur

Pelabuhan strategis terdapat 13 pelabuhan, yaitu:

- a. Pelabuhan Teluk Adang, Paser
- b. Pelabuhan Semayang, Balikpapan
- c. TPK. Kariangau, Balikpapan
- d. Pelabuhan Samarinda, Samarinda
- e. TPK. Palaran, Samarinda
- f. Pelabuhan Loak Tuan, Bontang
- g. Pelabuhan Tanjung Laut, Bontang
- h. Pelabuhan Kenyamukan, Sangatta Kutai Timur
- i. Pelabuhan Sangkulirang, Kutai Timur
- j. Pelabuhan Tanjung Redeb
- k. Pelabuhan Maloy, Kutai Timur
- l. Pelabuhan Buluminung, Penajam Paser Utara
- m. Pelabuhan Maloy Teluk Golok, Kutai Timur
- n. Pelabuhan Mantaritip

Pelabuhan penyeberangan, terdiri dari 6 pelabuhan penyeberangan, yaitu:

- a. Pelabuhan Penyeberangan Kariangau, Balikpapan
- b. Pelabuhan Penyeberangan Penajam, Penajam Paser Utara
- c. Pelabuhan Penyeberangan Sumber, Balikpapan
- d. Pelabuhan Penyeberangan Kampung Baru Tengah, Balikpapan
- e. Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Keramat, Sangkulirang Kutai Timur
- f. Pelabuhan Penyeberangan Saka, Peridan Kutai Timur

Tabel 33. Jumlah penumpang, pesawat

INDIKATOR	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah Penumpang	7.746.	7.834.	7.099.1	7.803.	8.171.1
Pesawat	765	861	53	106	46

2.9.2. Promosi Industrialisasi Inklusif dan Berkelanjutan

Pembangunan infrastruktur juga dibutuhkan untuk mendukung aktivitas industri pengolahan, akses pada bahan baku dan sumber daya manusia. Pengembangan kawasan industri dan sentra industri kecil dan menengah diharapkan dapat mendukung upaya hilirisasi sumber daya alam sehingga mendorong pertumbuhan dan kontribusi PDRB industri pengolahan yang lebih tinggi.

Pertumbuhan lapangan usaha industri pengolahan mengalami penurunan dari tahun 2017 sebesar 3,47% menjadi 0,52% di tahun 2018. Begitu pula dengan kontribusinya terhadap PDRB Kaltim cenderung menurun yakni 18,27% pada tahun 2018, lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 19,08%. Pada tahun 2018 nilai tambah industri pengolahan non-migas Kaltim mengalami penurunan yaitu sebesar 7,23% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yakni sebesar 7,35%. Rendahnya kontribusi Industri pengolahan non migas disebabkan tingkat produksi dan daya saing produk masih rendah. Namun demikian, laju pertumbuhan industri pengolahan non migas meningkat menjadi 4,06% pada tahun 2018.

Tabel 34. Nilai Tambah Sektor Industri dan Proporsi Tenaga Kerja pada Sektor Industri

INDIKATOR	2014	2015	2016	2017	2018
Proporsi nilai tambah sektor industri pengolahan non migas terhadap PDB dan perkapita.	6,33	7,36	7,94	7,35	7,23
Laju pertumbuhan PDB industri	2,14	6,56	3,01	2,37	4,06

2.9.3. Penguatan Akses Industri dan Perusahaan skala Kecil

Industri juga didorong untuk semakin inklusif dengan memperhatikan peran dari Industri skala Kecil dan Menengah (IKM). Industri kecil menengah masih mendominasi di Kaltim dibandingkan industri. Pada tahun 2017 tercatat jumlah industri kecil menengah mencapai 10.122 unit usaha dengan penyerapan tenaga kerja sebesar 26.495 orang. Dan nilai investasi dari industri kecil menengah mencapai Rp 15,2 Triliun lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya.

Apabila dilihat secara kewilayahan, Kota Balikpapan memiliki nilai investasi IKM paling tinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya yaitu mencapai Rp 10,8 Triliun dengan jumlah IKM 1.154 unit usaha, diikuti oleh Kota Samarinda dengan nilai investasi IKM sebesar Rp 3,7 Triliun dengan jumlah IKM hanya 233 unit usaha. Dari sisi jumlah IKM, Kabupaten Paser mendominasi dengan 2.268 unit usaha yang menyerap tenaga kerja sebesar 4.333 orang.

Sebagian besar produk pengelolaan sumber daya alam Kaltim diekspor dalam bentuk bahan mentah, integrasi proses hulu hilir dan antar sektor belum berjalan. Industri Kecil Menengah (IKM) di Kaltim masih belum berkembang dengan baik. Pengembangan IKM dihadapkan pada permasalahan belum adanya regulasi pembatasan ekspor bahan mentah, kualitas sumber daya manusia, dan daya saing produk serta iklim investasi usaha bidang industri masih belum kompetitif dan kondusif.

Tabel 35. Perkembangan IKM menurut Kabupaten/Kota di Kaltim Tahun 2017

No.	Kabupaten / Kota	Jumlah Data	Jumlah Tenaga Kerja	Nilai Investasi (Rp)
1	Samarinda	233	3.130	3.744.715.559.000
2	Balikpapan	1.154	2.244	10.878.674.370.600
3	Bontang	1.162	2.452	68.934.263.500
4	Kukar	606	1.434	12.494.600.000
5	Paser	2.268	4.333	32.274.479.000
6	Berau	902	4.599	307.771.134.000
7	Kutai Timur	1.207	2.518	106.217.816.000
8	Kutai Barat	1.401	2.572	54.347.038.000
9	PPU	851	3.168	29.137.593.000
10	Mahulu	338	45	9.556.050.000
	Total	10.122	26.495	15.244.122.903.100

2.9.4. Penurunan Emisi GRK pada Industri

Industri di Kaltim menyumbang 7,2% dari nilai emisi CO₂, yang mengalami fluktuatif dalam lima tahun terakhir. Prosentase emisi terbesar terjadi pada tahun 2016. Rasio emisi CO₂ dibandingkan nilai tambah industri sebesar 52,02%.

Tabel 56 Emisi Gas Rumah Kaca pada Industri di Kaltim

INDIKATOR	2014	2015	2016	2017	2018
Rasio Emisi CO ₂ /Emisi Gas Rumah Kaca dengan nilai tambah sektor industri manufaktur.	4,76	4,13	3,69	1,26	52,02
Persentase Perubahan Emisi CO ₂		24	56	37,51	7,2

2.9.5. Akses terhadap Teknologi Informasi dan Komunikasi

Penetrasi teknologi informasi memiliki kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun. Hanya sebagian kecil penduduk yang belum terpapar teknologi telepon genggam dan mobile broadband. Pada tahun 2014 penduduk yang terlayani mobile broadband sebesar 85,46% dan individu yang menguasai/memiliki telepon genggam sebesar 68,29%. Angka tersebut meningkat pada tahun 2018 menjadi 90,91% penduduk yang terlayani mobile broadband dan individu yang menguasai/memiliki telepon genggam menjadi 77,14%. Sementara pengguna internet meningkat signifikan dari tahun 2014 – 2018 namun capaiannya masih di bawah 60%.

Seluruh masyarakat kawasan perkotaan di Kaltim telah terakses oleh layanan jaringan komunikasi dan informasi. Sementara di kawasan perdesaan masih terdapat beberapa wilayah di Provinsi Kaltim yang belum memiliki akses telekomunikasi maupun informatika. Keterbatasan akses telekomunikasi disebabkan salah satunya adalah kondisi geografis yang sulit dijangkau terutama di kawasan pedalaman dan perbatasan. Oleh karena itu capaian persentase kabupaten daerah 3T yang dapat dijangkau layanan akses telekomunikasi dan internet sangat rendah yaitu 30%.

Tabel 57. Akses terhadap Teknologi Informasi di Kaltim

INDIKATOR	2014	2015	2016	2017	2018
Proporsi penduduk yang terlayani <i>mobile broadband</i> .	85,46	85,46	90,91	90,91	90,91
Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	68,29	74,43	74,47	77,14	77,14
Proporsi individu yang menggunakan Internet.	31,07	31,56	38,03	41,69	59,43
Persentase jaringan tulang punggung serat optik nasional yang menghubungkan Ibukota Kabupaten/Kota (IKK).	10	20	30	45	60
Tingkat penetrasi akses tetap pita lebar (<i>fixed broadband</i>) di Perkotaan dan di Perdesaan.	43,74	43,74	50,09	50,09	50,09
Persentase kabupaten 3T yang terjangkau layanan akses telekomunikasi universal dan internet.	5	10	15	20	30

Sumber Data : Kominfo dan BPS Prov. Kaltim tahun 2018

2.10. Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antar Negara

2.10.1. Kesenjangan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Indeks Koefisien Gini pada tingkat Kabupaten/Kota memiliki kecenderungan tetap dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan kecenderungan jumlah penduduk yang semakin merata setiap tahunnya, dimana angka 0 menunjukkan pemerataan sempurna dan angka 1 menunjukkan ketimpangan sempurna. Dalam RKPD 2020 salah satu sasaran prioritas pembangunan adalah Pengautan Konektivitas dan Pemerataan. Hal ini menjadi acuan untuk meningkatkan pemerataan sempurna bagi masyarakat wilayah Kaltim agar mampu bersaing

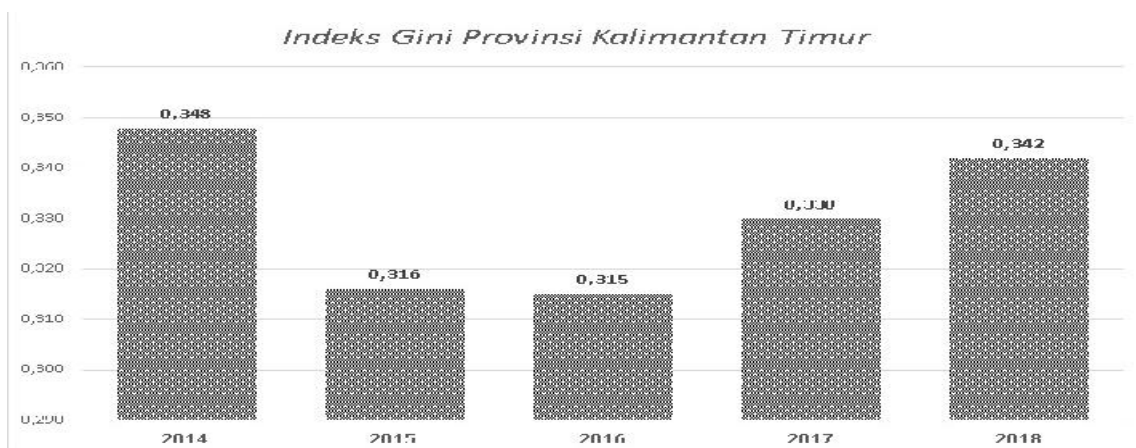
dengan wilayah lainnya. Pemerataan antar wilayah dapat dicapai dengan pembangunan infrastruktur darat dan telekomunikasi terutama pada daerah tertinggal dan kawasan perbatasan.

Tabel 36. Indeks Gini Provinsi Kaltim

Provinsi	2014	2015	2016	2017	2018
Kaltim	0,348	0,316	0,315	0,33	0,342

Tabel 59. Indeks Gini Kabupaten/Kota di Kaltim

Kabupaten/Kota	2010	2011	2012	2013	2014
Paser	0,24	0,2	0,31	0,28	0,31
Kutai Barat	0,23	0,12	0,24	0,29	0,29
Kutai Kartanegara	0,22	0,21	0,3	0,31	0,31
Kutai Timur	0,22	0,16	0,29	0,31	0,31
Berau	0,18	0,16	0,32	0,33	0,32
Penajam Paser Utara	0,23	0,22	0,31	0,33	0,33
Mahakam Ulu	-	-	-	-	-
Balikpapan	0,14	0,08	0,33	0,31	0,34
Samarinda	0,11	0,08	0,31	0,31	0,31
Bontang	0,17	0,08	0,37	0,36	0,35



Gambar 10. Indeks Gini Provinsi Kaltim

2.10.2. Jumlah Desa Tertinggal

Desa tertinggal di Kaltim berjumlah 381 desa, dengan jumlah terbanyak di Kabupaten Kutai Barat dan yang paling sedikit di Kabupaten Penajam Paser Utara.

Tabel 60. Jumlah Desa Tertinggal Kabupaten di Kaltim Tahun 2017

No.	Kabupaten	Jumlah Desa Tertinggal
1.	Paser	60
2.	Kutai Kartanegara	86
3.	Berau	49
4.	Kutai Barat	102
5.	Kutai Timur	56
6.	Penajam Paser Utara	2
7.	Mahakam Ulu	26

No.	Kabupaten	Jumlah Desa Tertinggal
	Total	381

Dari hasil Identifikasi, di Kaltim dari total 841 desa, masih terdapat 518 Desa Sangat Tertinggal dan Tertinggal, yang ditunjukkan dari skoring indeks sosial, indeks ekonomi, dan indeks lingkungan (ekologi).

Tabel 37. Jumlah Desa Tertinggal, Berkembang dan Mandiri di Kaltim

INDIKATOR	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan.	7	7	7	7	7
Jumlah desa tertinggal dan sangat tertinggal	-	688	688	518	518
Jumlah Desa Mandiri	-	-	-	2	2
Jumlah Desa Berkembang	-	140	140	289	289
Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal.					
Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal.					

2.10.3. Rata-Rata Pertumbuhan Ekonomi di Daerah

Laju Pertumbuhan Ekonomi pada tingkat Kabupaten/Kota dengan rentang tahun 2014-2018 bervariasi. Terjadi fluktuasi laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2014-2018 khususnya di Kabupaten Paser, Kabupaten Berau dan Kota Samarinda. Laju Pertumbuhan Ekonomi yang meningkat pesat di tahun 2014-2018 justru terjadi di daerah Kabupaten yakni Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Mahakam Ulu dan terjadi penurunan Laju Pertumbuhan Ekonomi di daerah Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Berau, Kabupaten PPU, Kota Bontang. Secara keseluruhan Provinsi Kaltim mengalami penurunan Laju Pertumbuhan Ekonomi pada tahun 2018 apabila dibandingkan dengan tahun 2017.

Tabel 38. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Kaltim

Kabupaten/Kota	2014	2015	2016	2017	2018
Paser	4,51	-0,89	-4,98	1,18	3,69
Kutai Barat	1,88	-1,5	-0,83	3,62	4,98
Kutai Kartanegara	-1,08	-7,17	-1,97	1,6	2,12
Kutai Timur	3,43	1,43	-1,08	3,23	2,32
Berau	8,23	5,94	-1,7	3,03	2,04
PPU	2,76	0,14	-0,47	2,44	1,24
Mahakam Ulu	4,94	3,32	3,41	4,27	5,39
Balikpapan	4,64	1,19	4,92	3,81	4,97
Samarinda	5,43	0,04	0,56	3,76	4,98
Bontang	-3,23	4,36	-1,39	0,52	-4,18
Kalimantan Timur	1,71	-1,20	-0,38	3,13	2,67

Pertumbuhan ekonomi Kaltim sampai dengan tahun 2018 tumbuh cukup signifikan. Pertumbuhan Ekonomi Kaltim naik sebesar 2,67 persen. Angka ini

lebih tinggi dibandingkan beberapa tahun sebelumnya yang rerata pertumbuhannya hanya 2 persen. Perekonomian Kaltim yang diukur Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHK) sebesar 638,12 triliun. Terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi pada Kaltim merupakan imbas dari perang dagang yang terjadi antara Amerika Serikat dan Tiongkok khususnya sepanjang tahun 2018 hingga saat ini. Selain pertumbuhan ekonomi pada lapangan usaha pengadaan listrik dan gas, juga disertai dengan pertumbuhan ekonomi di bidang penyediaan akomodasi dan makan minum yakni sebesar 9,14 persen. Namun, struktur perekonomian Kaltim masih ditopang oleh pertambangan dan penggalan sebanyak 46,53 persen.

Tabel 39. Produksi Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten/Kota di Provinsi Kaltim

Kabupaten/ Kota	2014	2015	2016	2017	2018
Paser	39.250.901,15	38.309.277,52	37.289.694,49	43.931.754,84	48.264.563,69
Kutai Barat	21.442.756,43	21.298.289,66	22.021.133,01	25.652.601,16	28.068.654,57
Kutai Kartanegara	156.723.063,82	127.151.490,82	127.869.342,84	148.028.262,47	160.596.040,73
Kutai Timur	95.030.362,22	93.539.101,79	95.186.295,59	118.301.601,49	125.512.188,22
Berau	29.366.862,56	30.077.881,90	30.814.337,31	36.507.139,67	38.977.178,28
PPU	7.589.458,89	7.452.308,72	7.681.674,05	8.480.809,07	8.850.910,32
Mahakam Ulu	1.778.452,02	1.980.622,51	2.142.118,32	2.337.192,89	2.510.510,39
Balikpapan	71.622.700,99	74.346.438,60	80.201.919,72	86.988.962,99	95.162.062,40
Samarinda	48.273.715,39	50.799.587,57	52.647.368,58	58.461.903,01	63.947.538,98
Bontang	59.055.313,39	58.600.855,04	55.239.308,65	58.797.043,05	58.873.085,32
Kaltim	527.515.256,10	505.105.062,08	508.880.236,50	592.279.940,26	638.116.899,82

2.10.4. Kepesertaan Aktif Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan

Jumlah peserta Jaminan Sosial Ketenagakerajaan

Jumlah Peserta Program Jaminan Sosial Bidang ketenagakerjaan di Kaltim setiap tahunnya mengalami peningkatan. Pada tahun 2018 peserta disektor formal sebanyak 520.496 orang naik 1,2 persen dibanding tahun 2017 yaitu sebanyak 434.452 orang. Di sektor informal jumlah peserta sebanyak 69.922 orang naik 8,26 % dibanding tahun sebelumnya. Tantangan bagi penyedia jaminan sosial bidang ketenagakerjaan adalah memperluas cakupan kepesertaan pada sektor informal yaitu dalam kelompok pekerja bukan penerima upah atau pekerja mandiri.

Tabel 40.. Jumlah Peserta Program Jaminan Sosial Bidang ketenagakerjaan di Kaltim

Sektor	2014	2015	2016	2017	2018
Formal	398.314	400.216	385.531	434.452	520.496
Informal	21.824	26.033	53.978	64.145	69.922

Sumber: BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Prov. Kaltim

2.11. Kota dan Pemukiman Berkelanjutan

Pemukiman kumuh masih menjadi masalah serius di perkotaan. Kantong-kantong pemukiman kumuh masih banyak dijumpai di beberapa titik seperti di bantaran sungai. Pemukiman kumuh erat hubungannya dengan masalah sosial. Sebagian besar masyarakat dengan tingkat ekonomi rendah yang menghuni permukiman kumuh tersebut. Penanganan masalah ini sudah sejak lama dilakukan melalui beberapa program dan kebijakan seperti Penataan Kawasan Kumuh Perkotaan.

2.11.1. Proporsi Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Layak dan Terjangkau

Sebagian besar rumah merupakan milik sendiri, dengan sebagian kecil berupa rumah sewa maupun rumah dinas. Demikian halnya fasilitas buang air besar, 91,34% telah memiliki fasilitas buang air besar sendiri, dan tersisa 2,38% yang belum memiliki fasilitas buang air besar sendiri.

Tabel 65 Status kepemilikan rumah, jenis bangunan rumah, dan jamban

INDIKATOR	2014	2015	2016	2017	2018
Persentase Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal yang ditempati		100	100	100	100
Milik Sendiri		72,69	71,12	68,87	70,31
Kontrak/Sewa		15,32	17,86	18,45	17,90
Bebas Sewa		9,23	8,02	9,21	9,67
Dinas/Lainnya		2,76	3,00	3,47	2,12
Persentase Rumah Tangga menurut Fasilitas Tempat Buang Air Besar		100	100	100	100
Ada, digunakan hanya ART sendiri		89,71	89,75	91,76	91,34
Ada, digunakan bersama ART rumah tangga lain tertentu		6,32	4,72	4,49	2,71
Ada, di MCK umum/siapapun menggunakan		1,85	2,28	1,70	3,52
Ada, ART tidak menggunakan			0,07	0,01	0,05
Tidak ada fasilitas		2,13	3,18	2,05	2,38

2.12. Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan

Di Provinsi Kaltim terdapat 3.430.788 jiwa, Rp 3.886.890.000.000,- asset fisik dan Rp 24.437.858.000.000,0 ekonomi, serta 8.289.422 hektare yang potensial terpapar bencana multi ancaman.

Tabel 41. Jumlah Kejadian Bencana di Kaltim tahun 2013-2018

Jenis bencana	Jumlah Kejadian	Korban (jiwa)				Rumah (unit)		
		Meninggal & Hilang	Luka-luka	Menderita & mengungsi	Rusak Berat	Rusak Sedang	Rusak Ringan	Terendam
BANJIR	139	13	221	367,612	96	0	269	127,667
TANAH LONGSOR	85	14	7	1,134	134	10	178	0
GELOMBANG	3	0	0	9	2	6	0	0

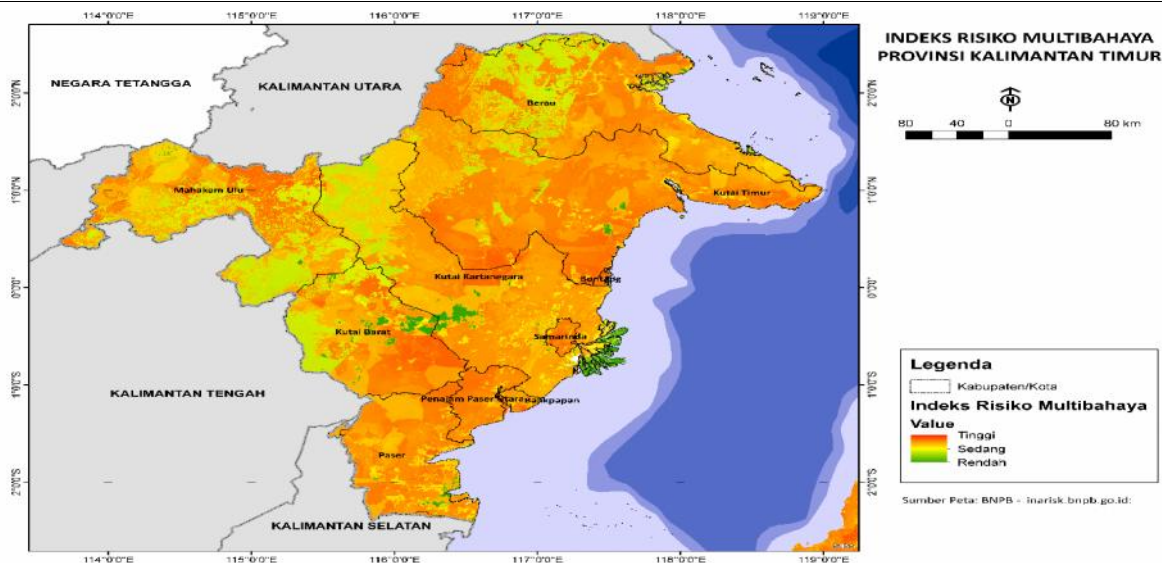
Jenis bencana	Jumlah Kejadian	Korban (jiwa)			Rumah (unit)			
		Meninggal & Hilang	Luka-luka	Menderita & mengungsi	Rusak Berat	Rusak Sedang	Rusak Ringan	Terendam
PASANG / ABRASI								
PUTING BELIUNG	38	1	8	588	159	122	586	0
KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN	161	2	2	4	0	0	0	0
JUMLAH	426	30	238	369,347	391	138	1,033	127,667

Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2019

Kabupaten/Kota Tangguh telah dilakukan di Kota Samarinda, Kota Balikpapan dan Kabupaten Kutai Kartanegara. 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Berau dan Kabupaten Mahakam Ulu sedang menyusun Kajian Risiko Bencana dan Indeks Ketahanan Daerah. Dokumen Pengurangan Risiko Bencana telah dimiliki oleh Kota Samarinda, Kota Balikpapan dan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tabel 42. Indeks Risiko Bencana Kabupaten/Kota di Kaltim

Kabupaten/Kota	Kapasitas Daerah	Indeks Risiko Bencana			
		2015	2016	2017	2018
Balikpapan	Sedang	159,20	108,14	108,14	108,14
Bontang	-				
Samarinda	Sedang	134,80	111,30	108,15	109,20
Berau	-				
Kutai Timur	-				
Kutai Kartanegara	Sedang	160,40	136,52	116,60	113,00
Kutai Barat	-				
Mahakam Ulu	-				
Penajam Paser Utara	-				
Paser	-				



Gambar 11. Peta Indeks Risiko Bencana Multi Ancaman Provinsi Kaltim (INARisk BNPB, 2019)

2.13. Penanganan Perubahan Iklim dan Penanggulangan Kebencanaan

2.13.1. Jumlah peserta proper yang mencapai minimal Peringkat BIRU

Sebanyak 222 perusahaan dan industri jasa menerima program penilaian peringkat kinerja perusahaan (Proper) tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dari Pemprov Kaltim pada tahun 2018–2019. Jumlah tersebut terdiri dari 2 perusahaan pertambangan batubara yang menerima bendera hitam, dari 48 perusahaan industri jasa yang dinilai, sebanyak 2 perusahaan menerima

bendera merah, 30 perusahaan menerima bendera biru, 13 perusahaan menerima bendera hijau dan 3 perusahaan industry dan jasa menerima bendera emas. Kemudian untuk perusahaan industry minyak kelapa sawit, dari 67 perusahaan yang dinilai, 4 perusahaan menerima bendera merah, 43 perusahaan menerima bendera biru dan 20 perusahaan menerima bendera hijau.

Perusahaan IUPHHK-HT (Hutan Tanaman) dan IUPHHK-HA (Hutan Alam) merupakan perusahaan paling sedikit dinilai, masing-masing hanya 10 perusahaan. Pada Perusahaan IUPHHK-HT (Hutan Tanaman), terdapat 7 perusahaan yang mendapat bendera biru dan 7 perusahaan yang mendapat bendera hijau. Sedangkan untuk perusahaan IUPHHK-HA (Hutan Alam), dari 10 perusahaan yang dinilai, 7 perusahaan mendapat bendera biru dan 3 perusahaan mendapat bendera hijau.

Capaian perusahaan yang mendapatkan peringkat minimal biru sebanyak 204 perusahaan (biru-hijau dan emas) sebesar 91 %.

Tabel 68. Peringkat Penilaian PROPER di Kaltim

No.	SEKTOR KEGIATAN	PERINGKAT PENILAIAN PROPER TAHUN 2018-2019					TOTAL
		HITAM	MERAH	BIRU	HIJAU	EMAS	
1	Pertambangan Batubara	2	10	44	28	3	87
2	Industri dan Jasa	0	2	30	13	3	48
3	Industri Minyak Kelapa Sawit	0	4	43	20	0	67
4	IUPHHK-HT (Hutan Tanaman)	0	0	3	7	0	10
5	IUPHHK-HA (Hutan Alam)	0	0	7	3	0	10
TOTAL		2	16	127	71	6	222

2.13.2. Timbulan sampah yang di Daur Ulang

Sampai saat ini pemerintah provinsi Kaltim tidak melakukan pengelolaan sampah secara langsung, sesuai kewenangannya hanya melakukan pembinaan, pendataan dan pengawasan pengelolaan sampah di kabupaten/kota sesuai dengan peraturan-perundangan yang berlaku. Kota Balikpapan dan Kota Samarinda telah menerapkan pengurangan penggunaan plastic satu kali pakai, melalui Peraturan Walikota.

Tabel 69. Data timbulan sampah Provinsi Kaltim

INDIKATOR	2014	2015	2016	2017	2018
Volume Produksi Sampah (m ³ /hari)	2.762,27	8.077	8.189	8.759	11.955
Volume Sampah Terangkut (m ³ /hari)	2.495,20	4.480	4.550	4.724	5.260

Namun jika melihat data yang tersaji, terlihat bahwa setiap tahun jumlah produksi sampah meningkat cukup drastis di tahun 2018, hingga mencapai 11,96 ribu m³/hari. Sedangkan kemampuan untuk mengangkut sampah yang terangkut hanya sebesar 5,26 ribu m³/hari atau hanya sebesar 44 persen sampah yang bisa diangkut per harinya. Hal ini tentunya menjadi perhatian bagi seluruh stakeholder untuk mencari solusi Bersama agar tidak semakin

menumpuk dan kemudian menjadi penyebab utama kerusakan lingkungan di Kaltim.

Lebih jauh, Jumlah timbunan sampah di Kaltim sebesar 2.315 m³ per hari atau setara 845.011 m³ per tahun. Kabupaten/kota yang memproduksi jumlah timbunan sampah terbanyak ialah Kota Samarinda, Kota Balikpapan, dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Hal ini sejalan dengan banyaknya jumlah penduduk yang ada di wilayah-wilayah tersebut atau sebesar 66,55 persen timbunan sampah yang dihasilkan di Kaltim berasal dari ketiga wilayah tersebut. Pengurangan sampah langsung dari sumbernya harus lebih dimasyarakatkan lagi, dalam rangka mengurangi sampah yang akan ditimbun di TPS. Demikian juga dengan persyaratan 3R membuat sampah yang masih bernilai ekonomis dapat dimanfaatkan kembali

Tabel 70. Timbunan Sampah Penduduk di Kabupaten/Kota Provinsi Kaltim

NO.	KABUPATEN/KOTA	LUAS WILAYAH ADM (Ha)	JUMLAH PENDUDUK ADM (ORANG)	JUMLAH TIMBULAN SAMPAH/ ORANG/ HARI (L/ORG/HR)	JUMLAH TIMBULAN SAMPAH PENDUDUK/ HARI (L/HR)	JUMLAH TIMBULAN SAMPAH PENDUDUK/ HARI (M3/HR)	JUMLAH TIMBULAN SAMPAH PENDUDUK/ TA (M3/TAHUN)
1.	Balikpapan	50.330	648.732	0,72	467.087	467,1	170.486,8
2.	Samarinda	71.740	858.931	0,7	601.252	601,3	219.457,0
3.	Berau	2.124.000	219.263	0,7	153.484	153,5	56.021,7
4.	Bontang	497.600	180.045	0,56	100.825	100,8	36.801,1
5.	Kutim	3.574.750	415.553	0,5	207.777	207,8	75.838,6
6.	Kubar	1.730.700	68.209	0,7	47.746	47,7	17.427,3
7.	Kutai Kartanegara	2.726.300	674.759	0,7	472.331	472,3	172.400,8
8.	Penajam Paser Utara	333.300	169.428	0,72	121.988	122,0	44.525,6
9.	Paser	773.100	260.815	0,5	130.408	130,4	47.598,9
10.	Mahakam Hulu	1.839.000	30.503	0,4	12.201	12,2	4.453,4
	JUMLAH	13.720.820	3.526.238	6,20	2.315.099	2.315,1	845.011,1

2.13.3. Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan (SML) merupakan salah satu upaya penerapan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan

DLH Provinsi Kaltim melakukan upaya penerapan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan melalui kegiatan Pengembangan Produksi Ramah Lingkungan. Penyebab utama kerusakan lingkungan adalah pola konsumsi dan produksi yang tidak berkelanjutan. Oleh karena itu, *Sustainable Consumption and Production* (SCP) dipandang sebagai instrumen dasar untuk mengurangi kerusakan lingkungan dan memperkuat efisiensi sumber daya. Pengelolaan sampah untuk mendukung pola konsumsi dan produksi berkelanjutan. Untuk itu diperlukan upaya tindak lanjut untuk mensinergikan pengelolaan sampah dari hulu ke hilir, peningkatan kesadaran pemerintah, pihak swasta dan masyarakat untuk menerapkan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, dan Recycle*) secara lebih luas. DLH Provinsi Kaltim melakukan upaya penerapan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan melalui kegiatan Pengembangan Produksi Ramah Lingkungan.

2.13.4. Dokumen Strategi Pengurangan Resiko Bencana (PRB) tingkat Kabupaten/Kota

Pemprov Kaltim telah menerbitkan Perda Kaltim No. 2 tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana Daerah. Selain itu, terkait pengendalian kebakaran hutan dan lahan, telah diterbitkan Perda Kaltim No. 05 tahun 2009. Rencana Penanggulangan Bencana Daerah 2013-2017 juga telah disusun melalui Pergub

Kaltim No. 53 Tahun 2013, dan sedang dalam proses pembaharuan. Untuk Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kaltim Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Penanggulangan Bencana Daerah, telah diterbitkan Pergub Kaltim No. 16 tahun 2016.

2.13.5. Dokumen Pelaporan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)

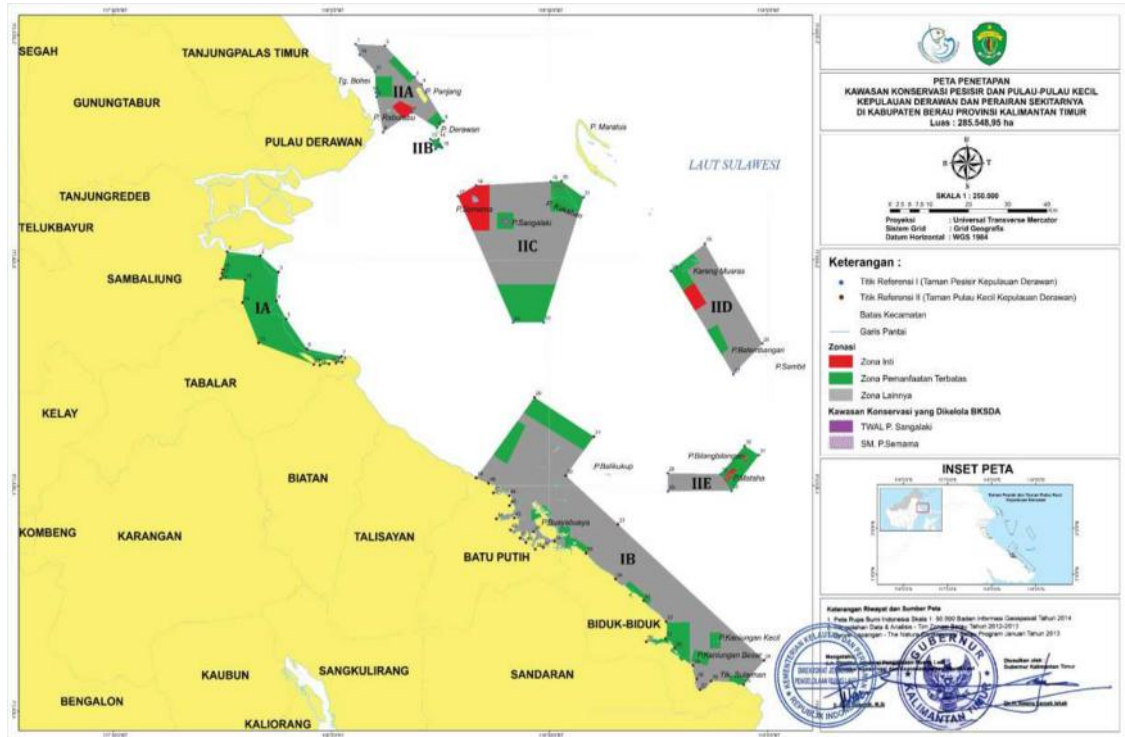
Provinsi Kaltim telah menyusun Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Kaltim, yang diterbitkan melalui Pergub Kaltim No. 54 tahun 2012 dan diperbaharui dengan Pergub Kaltim No. 39 tahun 2014, dan telah mengalami pembaharuan dokumen pada tahun 2018. Sejak tahun 2015, Pemprov Kaltim telah menyampaikan laporan pelaksanaan RAD GRK kepada Pemerintah Pusat.

2.14. Pelestarian dan Pemanfaatan Ekosistem Lautan

2.14.1. Jumlah Kawasan/Konservasi Perairan di Daerah

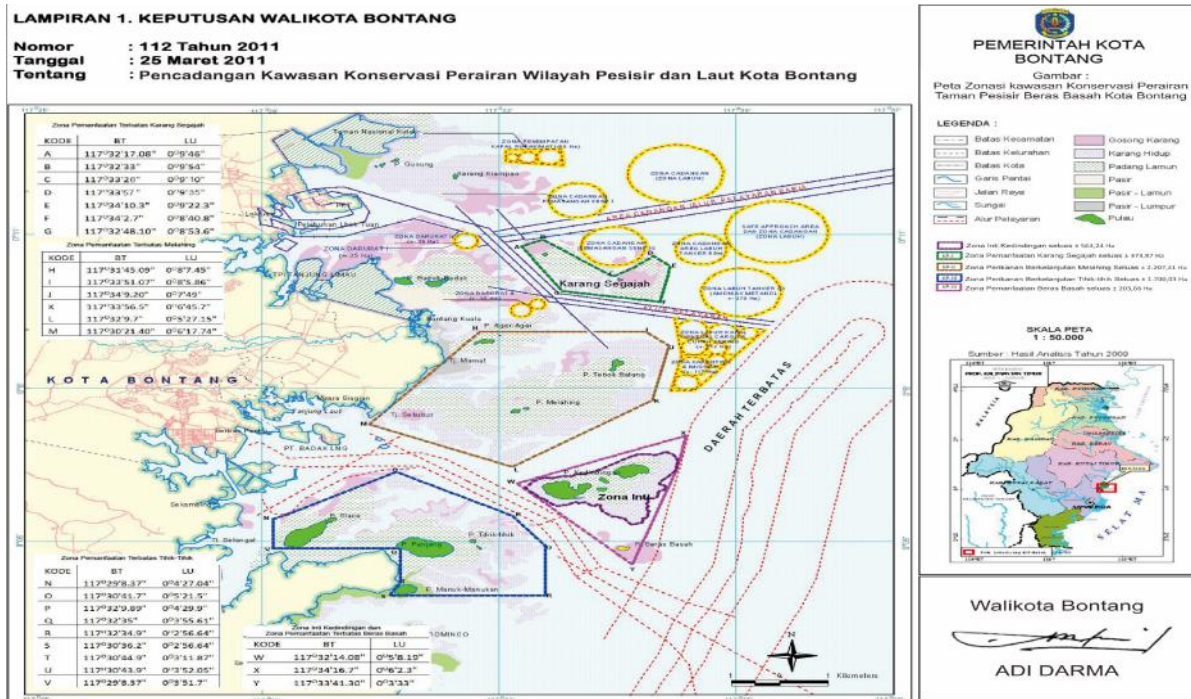
Kawasan pesisir dan laut mempunyai sumber daya alam dan ekosistem yang sangat beragam, seperti ekosistem terumbu karang, mangrove dan ekosistem pulau-pulau kecil. Keberadaan ekosistem tersebut mempunyai peranan sangat penting bagi pembangunan ekonomi pada masa sekarang dan masa depan. Selain fungsi ekonomi sebagai sumber ekonomi masyarakat pesisir, ekosistem pesisir dan laut juga mempunyai fungsi ekologis yang tidak kalah pentingnya. Dalam hal ini pencadangan dan Penetapan Kawasan konservasi perairan merupakan salah satu upaya konservasi ekosistem yang dapat dilakukan terhadap semua tipe ekosistem, yaitu terhadap satu atau beberapa tipe ekosistem penting untuk dikonservasi berdasarkan kriteria ekologis, sosial budaya dan ekonomis. Konservasi telah menjadi tuntutan dan kebutuhan yang harus dipenuhi sebagai harmonisasi atas kebutuhan ekonomi masyarakat dan keinginan untuk terus melestarikan sumberdaya yang ada bagi masa depan.

Saat ini Kaltim mempunyai dua Kawasan Konservasi Perairan yaitu Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kepulauan Derawan dan perairan Sekitarnya (KKP3K KDPS) di Kabupaten Berau seluas 285.548,95 ha yang telah ditetapkan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 87/KEPMEN-KP/2016 tentang Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kepulauan Derawan dan perairan Sekitarnya (KKP3K KDPS) di Kabupaten Berau Provinsi Kaltim, yang terdiri dari Zona Inti seluas 10.673,55 ha, Zona Pemanfaatan Terbatas seluas 80.757,47 ha dan Zona lainnya seluas 194.117,93 ha.



Gambar 12. Peta Penetapan Kawasan Kosnervasi Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Kepulauan Derawan dan Perairan sekitarnya di Kabupaten Berau Provinsi Kaltim

Kawasan Konservasi Laut lainnya adalah Kawasan Konservasi Perairan Wilayah Pesisir dan Laut Kota Bontang seluas $\pm 5.049,28$ ha. Kawasan Konservasi Perairan Wilayah Pesisir dan Laut Kota Bontang saat ini sedang dalam proses peningkatn SK pencadangan oleh Gubernur yang sebelumnya tertuang dalam SK Walikota No. 112 Tahun 2011 tentang Pencadangan Kawasan Konservasi Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagai Taman Pesisir Kota Bontang dan untuk selanjutnya akan diajukan untuk penetapan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan RI. Rincian zona pada KKP Bontang adalah: Zona Inti Kedindungan seluas $\pm 564,24$ hadan zona pemanfaatan terbatas beras basah seluas $\pm 203,66$ ha, Zona pemanfaatan Karang Segajah seluas $\pm 373,97$ ha, Zona Pemanfaatan Melahing seluas $\pm 2.207,41$ ha, dan Zona pemanfaatan Tihik-tihik seluas $\pm 1.700,03$ ha.



Gambar 13. Peta Kawasan Konservasi Perairan dan Pesisir Beras Basah Kota Bontang

2.14.2. Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan

Kedaulatan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan sebagai yang harus diwujudkan antara kementerian dan instansi pemerintah daerah, mempunyai tugas untuk mengawal perwujudan kemandirian dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya kelautan dan perikanan dengan memperkuat kemampuan nasional untuk melakukan penegakan hukum melalui kepatuhan pelaku usaha sektor perikanan demi mewujudkan kedaulatan secara ekonomi, selama 4 tahun yaitu tahun 2015 – 2018, dinas kelautan dan perikanan telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan untuk mewujudkan tercapainya kedaulatan dalam pengelolaan sumber daya perikanan yaitu melalui peningkatan kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan serta membangun sentral bisnis kelautan dan perikanan di pulau-pulau kecil dan terluar. Untuk mengukur keberhasilan sasaran tersebut, satu diantara indikator adalah persentase kepatuhan (*compliance*) pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan merupakan kepatuhan pelaku usaha dalam memanfaatkan sumber daya kelautan dan perikanan sesuai dengan perizinan dan ketentuan perundang-undangan yang ditetapkan. Capaian persentase kepatuhan tersebut diuraikan berdasarkan masing-masing kegiatan, yaitu:

- Pengawasan kapal perikanan di pelabuhan perikanan:
 Pengawasan ketaatan kapal perikanan dilakukan melalui pemeriksaan terhadap persyaratan administrasi dan kelaikan teknis kapal perikanan. Ketidaktaatan kapal sebagian besar disebabkan oleh tidak lengkapnya dokumen kapal terutama pada kapal yang izinnya diterbitkan oleh kabupaten/kota
- Pengawasan unit pengolahan ikan (UPI):
 Pengawasan dilakukan terhadap UPI skala besar dan skala kecil. Untuk skala besar dilakukan dengan memeriksa dokumen Surat Izin Usaha

Perikanan (SIUP), Tanda Daftar Usaha Perikanan (TDUP), Surat Kelayakan Pengolahan (SKP), Hazard Analysis & Critical Control Point (HACCP), Sertifikat Kesehatan/Health Certificate (HC). Untuk skala kecil dengan memeriksa dokumen perizinan yaitu TDP/TDUP atau PIRT serta pengujian terhadap produk perikanan untuk mengetahui adanya bahan tambahan berbahaya (BTB).

- c. Pengawasan distribusi hasil perikanan:
Kegiatan yang dilaksanakan adalah pengawasan distribusi hasil perikanan baik peruntukkan ekspor maupun domestik.
- d. Pengawasan usaha budidaya:
Pengawasan dilakukan terhadap usaha budidaya di perairan umum (air tawar) dan usaha budidaya air laut dan air payau. Pengawasan usaha budidaya di fokuskan pada pengawasan penggunaan pakan dan obat ikan.

Tabel 71 Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha

INDIKATOR	2014	2015	2016	2017	2018
Persentase kepatuhan pelaku usaha.	30,25	30,41	31,35	32,42	33,60

2.14.3. Jumlah peningkatan akses pendanaan usaha nelayan

Selain pemenuhan sarana dan prasarana perikanan tangkap dan budidaya serta penguatan daya saing produk perikanan, Pemerintah Provinsi Kaltim juga memberikan permodalan yang disiapkan melalui lembaga perbankan milik daerah yakni Bankaltimtara dengan Kredit Perikanan Sejahtera serta bantuan kapal guna kegiatan usaha perikanan tangkap. Hingga Tahun 2018 sebanyak 119 Nelayan/Pembudidaya Perikanan telah merasakan manfaat dari akses kredit nelayan ini.

Selain itu dalam mendukung pengembangan sub sektor perikanan, Pemerintah Provinsi Kaltim juga memberikan bantuan saranda dan prasaran perikanan kepada nelayan dan pembudidaya perikanan. Dengan bantuan tersebut diharapkan dapat menstimulasi peningkatan produksi perikanan yang berdampak pada peningkatan ekonomi daerah khususnya bagi nelayan/pembudidaya

Tabel 43. Bantuan bagi nelayan/pembudidaya

INDIKATOR	2014	2015	2016	2017	2018
Kelompok nelayan (KUB)	1.425	1.237	1.241	1.241	1.241
Jumlah kelompok nelayan yang mendapat bantuan pemerintah daerah	97	109	39	39	39
Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan)	513	776	1.133	1.152	1.152
Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan yang mendapat bantuan pemerintah	42	13	19	22	22

Sumber : SIDATA, 2019

2.14.4. Jumlah nelayan yang terlindungi.

Dalam kurun 5 Tahun ini jumlah nelayan di Kaltim cenderung menurun. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu *illegal fishing* atau penangkapan ikan ilegal yang berdampak pada penurunan hasil tangkapan ikan. Selain itu kurang diminatinya lagi bergelut pada sektor ini dikarenakan banyaknya yang beralih profesi menjadi buruh akibat nilai jual tangkapan nelayan tergolong rendah.

Sehingga kesejahteraan para nelayan masih minim. Sehingga, mereka memilih profesi lainnya yang dianggap menjanjikan.

Tabel 44. Jumlah nelayan di Provinsi Kaltim

INDIKATOR	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah Nelayan	60.077	71.556	72.121	69.237	59.040

Salah satu cara pemerintah untuk menanggulangi laju penurunan jumlah nelayan salah satunya melalui pemberian Asuransi Nelayan. Asuransi Nelayan ini bermanfaat menjaga keselamatan para nelayan selama menangkap ikan di laut. Jumlah nelayan Kab/Kota Provinsi Kaltim yang telah diasuransikan sebanyak 17.669 orang nelayan melalui APBN KKP. Pada tahun 2019, Kaltim mendapatkan bantuan premi Asuransi Nelayan sebanyak 3.300 orang di seluruh Kabupaten/Kota. Adapun jumlah asuransi yang tersebar sebagai berikut:

Tabel 45. Jumlah Asuransi Nelayan di Provinsi Kaltim

Kabupaten/Kota	Jumlah Asuransi
Berau	500
Kutai Timur	300
Bontang	350
Samarinda	200
Kutai Kartanegara	700
Balikpapan	500
Kutai Barat	100
Penajam Paser Utara	450
Paser	200
Mahulu	0
Jumlah	3.300

Namun disisi lain jumlah nelayan yang terlindungi ini mengalami penurunan yang sangat drastis pada Tahun 2018 diakibatkan banyaknya nelayan yang enggan memperpanjang asuransinya setelah program oemberian asuransi nelayan gratis, dan apabila ingin melanjutkan asuransi nelayan maka harus membayar secara mandiri. Diperlukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesadaran untuk salah satunya melalui sosialisasi Peran Asuransi Nelayan dan bantuan subsidi asuransi bagi nelayan miskin oleh pemerintah.

Tabel 46. Jumlah Nelayan yang Terlindungi di Kalimantan Tim

INDIKATOR	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah nelayan yang terlindungi	-	-	6.917	9.863	876

2.15. Pelestarian dan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan

2.15.1. Kinerja Tata Kelola Kehutanan

Kaltim memiliki peran cukup strategis untuk mengimplementasikan berbagai kebijakan dan isu strategis baik nasional maupun internasional. Hal ini tidak terlepas dari luasnya kawasan hutan di provinsi ini yang mencapai lebih dari 8 juta ha dan terpenting adalah komitmen Pemerintah Kaltim untuk mengimplementasikan konsep pembangunan ekonomi hijau yang saat ini didukung oleh pemerintah pusat dan masyarakat internasional. Bagi pemerintah

pusat, kebijakan ekonomi hijau yang diusung provinsi ini bisa menjadi sumbangan positif dalam politik internasional Indonesia yang juga berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca guna ikut serta dalam upaya pencegahan pemanasan global. Secara hukum bahkan kebijakan terkait program pembangunan hijau yakni “Kaltim Hijau” telah dituangkan pedoman pelaksanaannya melalui Pergub Kaltim No. 22 Tahun 2011.

Melihat fungsi dan penugasan lembaga-lembaga kerjasama itu, maka Dinas Kehutanan akan memiliki keleluasaan dalam melaksanakan program dan kegiatan diluar program dan kegiatan rutin dengan sumber dana APBD maupun APBN. Terkait isu konservasi, penelitian serta restorasi lingkungan dalam rangka melestarikan, merestorasi dan mengelola ekosistem dan keanekaragamam hayati Indonesia, Dinas Kehutanan dapat berkolaborasi dengan WWF Indonesia program. Terkait dengan upaya melestarikan daratan dan perairan yang menjadi sandaran semua kehidupan dengan mempromosikan nilai alam dan membantu memicu perubahan transformasional dalam konservasi dan pemanfaatan kelanjutan sumberdaya alam untuk kepentingan manusia dan alam menjadi tugas TNC Kaltim yang saat ini pun telah bekerja mendukung Program Karbon Hutan Berau, Perlindungan Karst Sangkulirang Mangkalihat, promosi Reduced Impact Logging (RIL), dan pendampingan Perhutanan Sosial. Terkait perubahan iklim, GIZ melalui program Forclime berkomitmen untuk mendukung Provinsi Kaltim dalam usaha penurunan Gas Rumah Kaca khususnya dari sektor kehutanan dan GGGI sebagai lembaga yang berkomitmen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi hijau berbasis lahan, energi terbarukan dan pengembangan kawasan ekonomi khusus. Di tingkat tapak, kerja Yayasan Bumi dan Planete Urgence yang bekerja bersama masyarakat hutan dapat disinergikan dengan program pemberdayaan masyarakat di Dinas Kehutanan.

2.15.2. Proporsi Tutupan Hutan dan Lahan terhadap Luas Lahan Keseluruhan

Hutan Kaltim, sesuai dengan Fungsi Kawasan Hutan berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kaltim Nomor 01 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kaltim Tahun 2016-2036 telah membagi luas fungsi kawasannya menjadi beberapa bagian seperti berikut ini:

Tabel 47. Luas Fungsi Kawasan Hutan

Fungsi Kawasan Hutan dan Lahan	Luas (hektare)
Kawasan Hutan Suaka Alam	438.390
Hutan Lindung	1.844.969
Hutan Produksi Terbatas	2.908.256
Hutan Produksi Tetap	3.027.099
Hutan yang di Konservasi	120.437
Areal Penggunaan Lain	4.299.785
Jumlah Total	12.638.936

Berkaitan dengan pengelolaan hutan di Kaltim tidak terlepas dengan kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu - Hutan Alam (IUPHHK - HA) dan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu - Hutan Tanaman Industri (IUPHHK - HTI). Saat ini jumlah izin yang ada beserta luas keseluruhan izin di Kaltim terdapat :

Tabel 48. Perizinan Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan di Provinsi Kaltim

Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan	Jumlah (unit)	Luas (hektare)
IUPHHK - HA	57	3.632.641
IUPHHK - HTI	42	1.590.184
IUPHHK - Restorasi Ekosistem	1	86.000
Pencadangan Areal HTR	1	4.510
Pencadangan Hutan Kemasyarakatan	1	590
Pencadangan Hutan Desa	6	16.052
Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan	83	106.319,61
Pemegang Izin Pemanfaatan Kayu sebanyak	23	
Pencadangan Hutan Kemasyarakatan	1	590

Jumlah kawasan konservasi yang memperoleh nilai indeks METT minimal 70% adalah 2 unit, yaitu BKSDA Kaltim dan TN Kutai.

Tabel 49. Kawasan Konservasi di Provinsi Kaltim

No	Fungsi	Nama KK	Provinsi	Nilai	Tahun Penetapan
1.	Taman Nasional	TN Kutai	Kaltim	78	2017
2.	Cagar Alam	CA Teluk Adang	Kaltim	71	2018

Untuk menilai efektifitas pengelolaan kawasan konservasi yang ada di Kaltim, pada tahun 2018 telah dilakukan evaluasi dan mendapatkan nilai indeks METT 70% atau lebih yang berarti pengelolaannya masuk dalam kategori baik. Tingginya keanekaragaman hayati diKaltim menuntut sebuah tempat untuk melindungi dan melestarikan keragaman tersebut, diantaranya dalam bentuk kawasan konservasi. Sampai saat ini jumlah kawasan konservasi seluruh Kaltim sebanyak 9 (sembilan) unit terdiri dari 6 (enam) unit yang dikelola oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kaltim (Cagar Alam Teluk Apar, Cagar Alam Teluk Adang, Cagar Alam Muara Kaman Sedulang, Cagar Alam Padang Luway, Suaka Margasatwa Pulau Semama dan Taman Wisata Alam Pulau Sangalaki) , 1 (satu) unit yang dikelola Balai Taman Nasional Kutai (Taman Nasional Kutai), 1 (satu) unit dikelola oleh UPTD Tahura Bukit Soeharto Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim (Taman Hutan Raya Bukit Soeharto) dan 1 (satu) unit lagi dikelola oleh UPTD Tahura Lati Petangis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser (Taman Hutan Raya Lati Petangis) . Menjaga keberadaan potensi keanekaragaman hayati dan kelestarian ekosistemnya merupakan salah satu mandat dari pengelolaan kawasan konservasi. Oleh karena itu perlu dilakukan pemantauan terhadap kondisi pengelolaannya, untuk memastikan kawasan konservasi telah dikelola sesuai dengan tujuan yang ditetapkan, dan dapat diketahui kelemahan-kelemahan yang ada.

2.15.3. Pengelolaan Semua Jenis Hutan Secara Berkelanjutan, Menghentikan Deforestasi, Merestorasi Hutan yang Terdegradasi dan Meningkatkan Secara Signifikan Aforestasi dan Reforestasi

Kawasan hutan produksi di Kaltim seluas 86.450 hektare telah memperoleh Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu – Restorasi Ekosistem (IUPHHK-RE).

Hingga pertengahan tahun 2018, telah dibentuk 20 unit Kesatuan Pengelolaan Hutan, yaitu 2 KPH Lindung dan 18 KPH Produksi. Selain itu terdapat 9 (sembilan) unit kawasan hutan konservasi, di mana 1 (satu) dikelola oleh DLH Kabupaten Paser (Taman Hutan Raya Lati Petangis), 1 (satu) unit dikelola UPTD Tahura Bukit Soeharto (Taman Hutan Raya Bukit Soeharto), 1 (satu) Taman Nasional Kutai dikelola Balai Taman Nasional Kutai (luas 192.709,55 hektar), dan 6 (enam) kawasan konservasi dikelola oleh BKSDA Kaltim (luas total 176.551,01 hektar), yaitu:

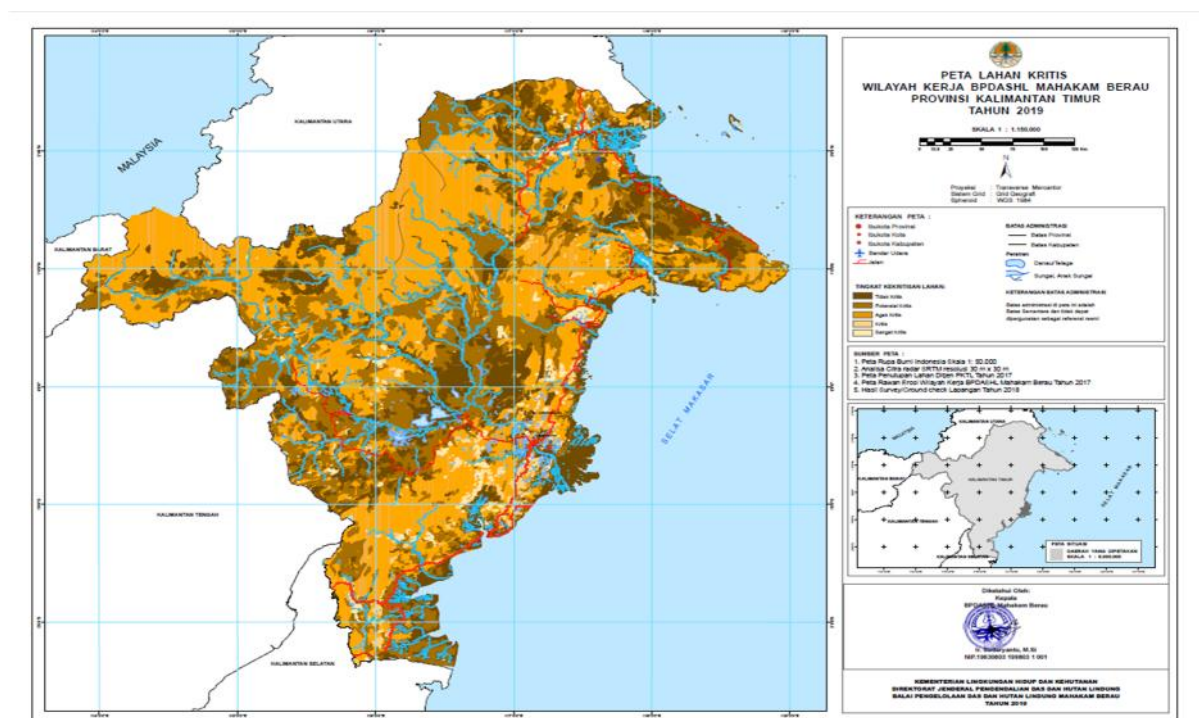
- a. Cagar Alam Teluk Apar (46.900 hektar)
- b. Cagar Alam Teluk Adang (59.665,78 hektar)
- c. Cagar Alam Muara Kaman Sedulang (64.700 hektar)
- d. Cagar Alam Padang Luway (4.785,23 hektar)
- e. Suaka Margasatwa Pulau Semama (220 hektar)
- f. Taman Wisata Alam Pulau Sangalaki (280 hektar)

2.15.4. Pemulihan Kawasan Terdegradasi

Setiap tahun dilakukan rehabilitasi sekitar 40 ribu hektare. Luas ini berfluktuasi, tergantung pada ketersediaan pendanaan. Pada tahun 2018, 13.136,17 hektare lahan yang telah direhabilitasi.

Tabel 50. Luas lahan kritis yang direhabilitasi

INDIKATOR	2014	2015	2016	2017	2018
Luas Hutan dan Lahan Kritis yang Direhabilitasi (Ha)	84.035,54	56.224,46	42.464,21	40.901,85	13.136,77



Gambar 14. Klasifikasi Lahan Kritis di Provinsi Kaltim

Sesuai dengan ketentuan pasal 15 Undang-undang nomor 37 tahun 2014 tentang konservasi tanah dan air, salah satu penggolongan kualitas lahan di Kawasan lindung dan Kawasan budidaya adalah lahan kritis. Untuk mendukung perencanaan dan penyelenggaraan pengelolaan sumber daya alam termasuk

didalamnya kegiatan reboisasi dan rehabilitasi sebagai upaya penanganan degradasi lahan

Untuk lahan Kritis paling luas berada di Kabupaten Kutai Barat dan paling sedikit berada di Kota Samarinda. Untuk kelas Potensial Kritis paling luas berada di Kabupaten Kutai Barat dan paling sedikit berada di Kota Samarinda. Untuk kelas Sangat Kritis paling luas berada di Kabupaten Kutai Kartanegara dan paling sedikit berada di Kota Balikpapan dan yang terakhir kelas tidak kritis paling luas berada di Kabupaten Kutai Kartanegara dan paling sedikit berada di Kota Samarinda.

Tabel 51. Luas Lahan Kritis di Kabupaten/Kota Provinsi Kaltim

No	Kab/Kota	Agak Kritis	Kritis	Potensial Kritis	Sangat Kritis	Tidak Kritis	Grand Total
1.	Kota Balikpapan	18.840,86	7.063,98	10.679,33	1.328,87	7.493,04	45.406,08
2.	Kota Bontang	89.052,75	14.319,15	23.006,37	9.099,66	16.447,17	151.925,10
3.	Kota Samarinda	38.797,87	3.734,39	9.179,44	2.925,09	5.846,53	60.483,32
4.	Kutai Barat	1.894.697,81	15.794,92	1.171.507,36	9.745,50	368.246,96	3.459.902,55
5.	Kutai Kartanegara	1.391.888,70	55.659,13	623.818,60	48.361,11	479.226,32	2.598.953,55
6.	Kutai Timur	1.806.966,87	25.132,14	745.615,59	26.197,81	232.733,87	2.836.646,28
7.	Paser	591.463,76	30.7980,13	323.350,13	9.197,81	128.663,29	1.083.884,15
8.	Penajam Pasir Utara	214.685,15	4.434,29	59.869,55	11.137,35	47.601,51	337.727,85
9.	Berau	1.028.716,82	33.327,59	663.543,37	11.682,39	375.182,75	2.112.452,58
	Total	7.075.110,59	190.155,38	3.630.569,74	130.104,62	1.661.441,44	12.687.381,77

2.15.5. Pencegahan Kehilangan Keanekaragaman Hayati

Provinsi Kaltim dalam rangka menjamin keanekaragaman hayati masih dihadapkan pada kendala dan tantangan faktor antropogenik seperti kebutuhan akan lahan pertanian, bahan bangunan dan sumber penghidupan masyarakat kebijakan pembangunan makro terkait infrastruktur wilayah, dan kepedulian yang minim terhadap pentingnya kawasan dengan nilai ekosistem esensial (KEE) atau nilai konservasi tinggi (NKT) menjadi faktor penghambat upaya perlindungan dan konservasi di lapangan. Namun demikian, terdapat pula peluang dan potensi yang cukup besar dalam pengendalian kerusakan, kebakaran hutan serta konservasi KEE.

Pemerintah Provinsi berupaya memastikan kondisi prima bagi KEE atau kawasan bernilai konservasi tinggi (KBKT) melalui identifikasi KEE dan KBKT, kawasan penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam (KSA/KPA), pembentukan dan pembinaan forum kolaborasi perlindungan KEE dan KBKT. Beberapa tantangan yang dihadapi dalam pencegahan kehilangan keanekaragaman hayati diantaranya adalah belum jelasnya status, kondisi, kewenangan dan perangkat daerah pengampu KEE dan KBKT.

Kawasan konservasi merupakan kewenangan Pemerintah Pusat, beberapa upaya dilakukan untuk mendorong proses deliniasi KBKT di Kaltim (KEE Karst Sangkulirang Mangkalihat, Lahan Basah Danau Mesangat – Kenohan Suwi, dan koridor satwa Wehea – Kelay) dan inisiasi pembentukan kelembagaan pengelola kawasan ekosistem esensial melalui forum-forum kolaborasi pengelolaan KEE multistakeholder dan pengembangan kawasan-kawasan ekosistem esensial lainnya terutama untuk wilayah-wilayah lahan basah seperti mangrove dan lain-lain.. Selain itu ke terdapat juga ekosistem esensial dalam bentuk Taman Kehati

yaitu Taman Keanekaragaman Hayati Desa Modang Kec. Kuaro Kab. Paser yang telah ditetapkan oleh Bupati Paser sejak tahun 2015.

Untuk memastikan pengintegrasian Nilai Ekosistem dan Keanekaragaman Hayati ke dalam Perencanaan Pembangunan, Pemerintah Provinsi Kaltim sedang menyusun Profil Keanekaragaman Hayati Provinsi Kaltim dan akan dilanjutkan dengan Penyusunan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi Kaltim.

Berkenaan dengan penegakan hukum lingkungan, Pemerintah Provinsi telah melakukan Pengawasan yang menjadi kewenangan Provinsi sebagai upaya agar tingkat ketaatan pelaksanaan dilakukan oleh pelaku industri/usaha/kegiatan di Kaltim.

Pemerintah Provinsi akan berupaya merumuskan berbagai strategi pokok perlindungan hutan dengan mendorong, memfasilitasi dan perluasan jejaring dalam rangka meningkatkan kerjasama lintas sektoral dengan instansi terkait (BPN, POLRI, Kejaksaan dan Kehakiman) serta masyarakat dalam rangka penegakan hukum dan peraturan serta pengamanan kawasan hutan, sehingga semua strategi bisa berorientasi pada kelestarian hutan dalam memberikan fungsi dan manfaat ekonomi, sosial dan ekologi.

Upaya penegakan hukum lingkungan dilaksanakan melalui kegiatan Pengawasan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup dan berbagai produk hukum pusat (Undang-undang, Keputusan Presiden, Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri) maupun produk hukum daerah (Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur) serta merumuskan berbagai strategi pokok perlindungan hutan dengan mendorong, memfasilitasi dan perluasan jejaring kerjasama lintas sektoral dengan instansi terkait (BPN, POLRI, Kejaksaan dan Kehakiman) serta masyarakat dalam rangka penegakan hukum dan peraturan serta pengamanan kawasan hutan, sehingga semua strategi bisa berorientasi pada kelestarian hutan dalam memberikan fungsi dan manfaat ekonomi, sosial dan ekologi.

2.16. Menciptakan Perdamaian, Menyediakan Akses Keadilan, dan Membangun Kelembagaan yang Tangguh

Tujuan 16 merupakan prasyarat utama dalam pencapaian seluruh tujuan dalam Pembangunan Berkelanjutan dan menciptakan masyarakat yang inklusif serta damai, terwujudnya penegakan keadilan (*Justice*) dengan menyediakan akses keadilan untuk semua, serta membangun institusi yang tangguh (*Strong institutions*). Tujuan 16 memiliki 12 (dua belas) target dengan 34 indikator TPB yang ingin dicapai pada tahun 2030. Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan

2.16.1. Mengurangi segala bentuk kekerasan

Rasa aman merupakan variable yang sangat luas karena mencakup berbagai aspek dan dimensi, mulai dari dimensi politik, hukum, pertahanan, keamanan, social dan ekonomi. Semakin tinggi angka kriminalitas menunjukkan semakin banyak tindak kejahatan pada masyarakat yang merupakan indikasi bahwa masyarakat merasa semakin tidak aman.

Jumlah kriminalitas pada tahun 2018 sebanyak 1.364, turun 1.858 kasus dari tahun 2017 dengan jumlah kasus sebanyak 3.222. Sedangkan, jumlah kasus

kekerasan perempuan dan anak pada tahun 2018 sebanyak 460 kasus, turun 272 kasus dari tahun 2017 dengan jumlah kasus sebanyak 732.

Tabel 52. Tindak kejahatan dan Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak di Provinsi Kaltim

INDIKATOR	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah Kriminalitas	3.227	4.490	3.820	3.222	1.364
Jumlah Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak	370	62	407	732	460

Sumber : Polda dan DKP3A , 2019



Gambar 15. Jumlah Kriminalitas dan Kasus Kekerasan Perempuan Anak

2.16.2. Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua

Penyelesaian tindak pidana di Kaltim cenderung membaik. Pada tahun 2014, persentase penyelesaian kasus di pengadilan sebesar 67,78%. Hingga pada tahun 2018 mencapai persentase 81%.

Tabel 82 Penyelesaian kasus di pengadilan

INDIKATOR	2014	2015	2016	2017	2018
Persentase Penyelesaian Tindak Pidana	67,78	63,99	68,81	75	81

2.16.3. Membangun Kelembagaan yang Tangguh

Pelaksanaan demokrasi di Kaltim cenderung fluktuatif, bila dilihat dari Indeks Demokrasi, maka terdapat penurunan dari tahun 2014 dari 77,77 menjadi 73,88 di tahun 2018. Terjadi peningkatan 1,02 persen dengan tahun 2017 dengan capaiannya sebesar 72,86. Indeks Demokrasi di Kaltim masuk dalam kategori indeks sedang meskipun mengalami peningkatan.

Tabel 53. Indeks Demokrasi

INDIKATOR	2014	2015	2016	2017	2018
Indeks Demokrasi	77,77	81,24	73,64	72,86	73,88

2.17. Memperkuat Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global

2.17.1. Memperkuat Mobilisasi Sumber Daya Domestik

Dalam rangka membiayai pelaksanaan pembangunan maka Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan Sumber Daya Domestik hal yang terpenting termasuk dalam melaksanakan agenda TPB, Pendapatan Daerah dari Pajak Daerah rata-rata 42,86% dalam periode 2014-2018. Rasio Penerimaan Pajak Daerah terhadap PDRB Kaltim mengalami kecenderungan fluktuasi yang stabil dengan Nilai tertinggi pada tahun 2014 sebesar 1,03% dan turun pada titik terendah tahun 2017 sebesar 0,59% hal ini disebabkan beberapa faktor seperti kondisi perekonomian yang mulai membaik sehingga berimbas daya beli masyarakat dan kesadaran membayar pajak. Dan naik kembali walaupun tidak signifikan pada tahun 2018 sebesar 0,74%.

Tabel 54. Pendapatan Provinsi Kaltim

INDIKATOR	2014	2015	2016	2017	2018
Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	2,14%	1,88%	1,57%	1,38%	1,66%
Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	1,03%	0,75%	0,62%	0,59%	0,74%
Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	59,10%	48,51%	53,01%	55,77%	92,83%

2.17.2. Infrastruktur Teknologi Informasi

Penerapan teknologi informasi di sektor perdagangan melalui sasaran yang ingin dicapai yaitu, Terwujudnya Sistem Distribusi yang Efisien melalui programnya yaitu Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri. Sedangkan kegiatannya yaitu Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan. Upaya yang dilakukan untuk mencapai hal tersebut yaitu melalui “Penyediaan Sistem Informasi Perdagangan Dalam Negeri.” Sistem ini memberikan informasi kepada masyarakat tentang harga harian bahan pokok dan penting masyarakat serta ketersediaan stok di tingkat distributor.

Adapun untuk perdagangan luar negeri, sejak tahun 2012 telah diberlakukan sistem e-SKA (ELEKTRONIK SKA) untuk penerbitan Surat Keterangan Asal Barang (SKA) atas barang yang akan diekspor ke negara tujuan.

Tabel 55. Komunikasi dan Informasi Provinsi Kaltim

INDIKATOR	2014	2015	2016	2017	2018
Persentase jaringan tulang punggung serat optik nasional yang menghubungkan Ibukota/Kota (IKK)	10%	20%	30%	45%	60%
Tingkat Penetrasi akses tetap pita lebar (fixed broadband) di Perkotaan dan pedesaan	43,74%	43,74%	50,09%	50,09%	50,09%
Proporsi penduduk terlayani mobile broadband	85,46%	85,46%	90,91%	90,91%	90,91%
Proporsi individu yang menggunakan internet	30%	31,56%	38,03%	50%	55%
Persentase Kabupaten 3T yang terjangkau layanan akses telekomunikasi universal dan internet.	5%	10%	15%	20%	35%

Sumber Data: Diskominfo Prov. Kaltim

2.17.3. Meningkatkan ekspor non-migas

Beberapa fasilitas yang telah disiapkan oleh Pemerintah Provinsi Kaltim di antaranya adalah penyiapan pelabuhan Teluk Balikpapan sebagai pelabuhan ekspor langsung. Akan tetapi fasilitas ini belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh eksportir untuk dapat mengekspor komoditinya secara langsung dari Pelabuhan Teluk Balikpapan langsung ke negara tujuan ekspor. Belum semua pelaku eksportir komoditi potensial menggunakan ekspor langsung. Masih banyak eksportir yang mengirimkan komoditinya ke luar daerah dan baru melakukan ekspornya melalui pelabuhan ekspor di luar daerah tersebut. Sehingga Kaltim kehilangan potensi pendapatan daerah dari pajak ekspor.

Hal ini tentu saja diakibatkan dari belum adanya regulasi yang mendorong atau mewajibkan untuk komoditi asal Kaltim yang diekspor, harus memanfaatkan fasilitas ekspor langsung melalui Teluk Balikpapan.

Selain itu peran aktif Pemerintah Kabupaten Kota juga sangat menentukan bagi keberhasilan kebijakan ekspor langsung ini. Pemerintah Kabupaten Kota belum memberikan dukungan dalam memanfaatkan Teluk Balikpapan sebagai Pelabuhan ekspor komoditi langsung.

Pelabuhan Teluk Balikpapan selain dikembangkan sebagai Pelabuhan Ekspor Langsung, juga mempunyai potensi untuk dijadikan sebagai pelabuhan penghubung (hub) akses komoditi dari antar pulau/provinsi potensial ke Pelabuhan Teluk Balikpapan. Beberapa daerah yang berpotensi menjadi konektivitas dengan Pelabuhan Teluk Balikpapan adalah Sulawesi, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan lain-lain. Saat ini konektivitas tersebut masih sangat terbatas karena belum adanya kebijakan dan regulasi terkait pemanfaatan pelabuhan Teluk Balikpapan sebagai hub komoditi antar daerah.

Belum berkembangnya jasa pelayanan penunjang kelancaran distribusi peti kemas di kawasan Teluk Balikpapan seperti sarana infrastruktur jalan, SPBU dan lain-lain masih terbatas. Misalnya saja akses jalan dari Samarinda menuju Pelabuhan Teluk Balikpapan masih rawan dan kurang memadai. Sehingga program pembangunan infrastruktur Samarinda Balikpapan perlu mendapatkan perhatian agar mobilisasi kontainer dari Samarinda dapat dilaksanakan lancar menuju Teluk Balikpapan.

Tabel 56. Nilai dan Laju Pertumbuhan Ekspor Non Migas Provinsi Kaltim Tahun 2014-2018

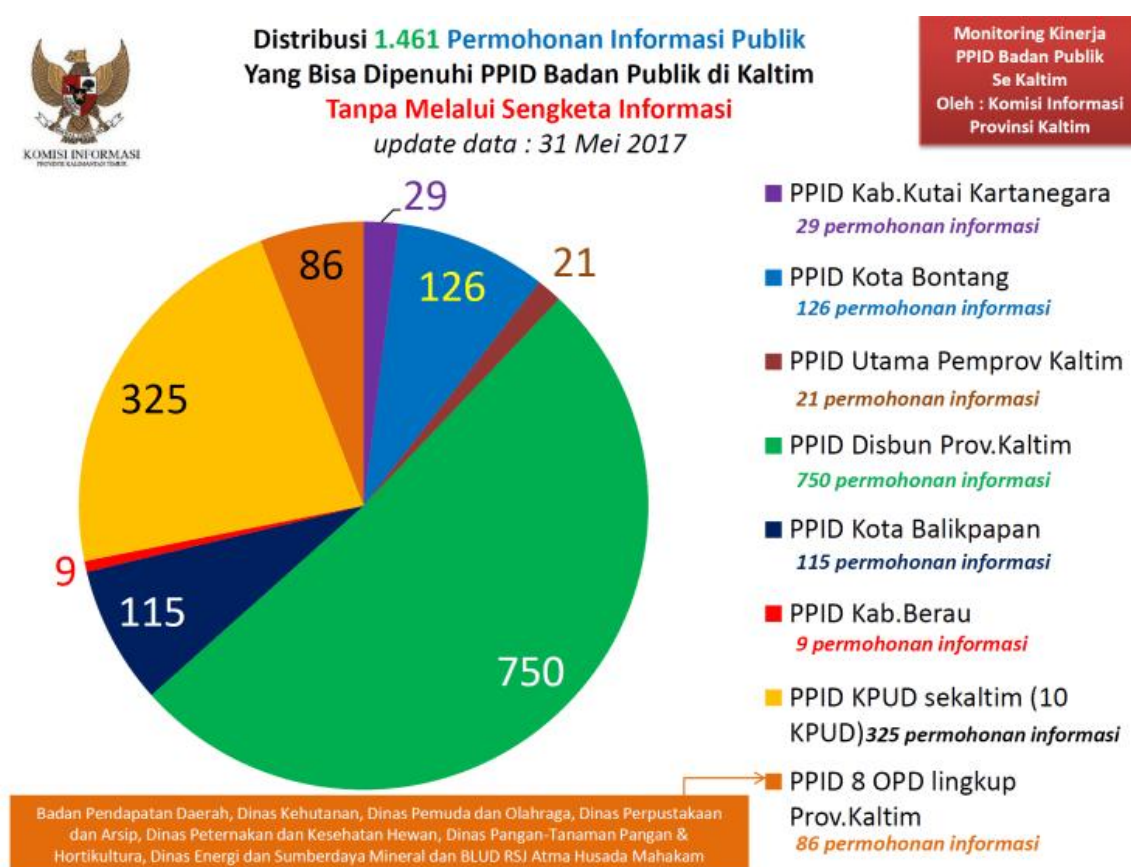
Tahun	Nilai Ekspor Non Migas (US\$ 000)	Laju Pertumbuhan
2014	13.805.898	-23,97
2015	11.069.108	-19,82
2016	10.072.707	-9,00
2017	13.230.030	31,35
2018	15.029.357	13,60

Sumber : BPS Kaltim, 2018

Perkembangan pertumbuhan nilai ekspor non migas Kaltim selama lima tahun terakhir cukup fluktuatif. Pada tahun 2017 pertumbuhan ekspor non migas mengalami perbaikan ke arah positif sebesar 31,35% dengan nilai ekspor US\$ 13,23 Miliar dibandingkan tiga tahun sebelumnya yang mengalami kontraksi. Hingga tahun 2018 pertumbuhan ekspor non migas terus positif yakni 13,60% dengan nilai ekspor mencapai US\$ 15,02 Miliar.

2.17.4. Ketersediaan Data

Provinsi Kalimantan Timur memperoleh pemeringkatan keterbukaan informasi publik Menuju informatif) pada tahun 2015 dan 2016 (skor 81,1 pada tahun 2015 dan skor 88,1 pada tahun 2016). Pada tahun 2017 dan 2018, memperoleh pemeringkatan cukup informatif (skor 73,6 pada tahun 2017). Pada tahun 2017, terdapat 1.461 permohonan informasi publik dapat diselesaikan di tingkat PPID badan publik di Kaltim yaitu di PPID Dinas Perkebunan Provinsi Kaltim, PPID Kota Bontang, PPID Kota Balikpapan, 10 PPID KPUD se kaltim (KPU Provinsi & Kabupaten/Kota se Kaltim minus KPU Kab. Mahulu), PPID utama Pemprov Kaltim, PPID Kabupaten Kutai Kartanegara, PPID Kabupaten Berau & 8 PPID OPD di lingkup Pemprov Kaltim (Badan Pendapatan Daerah, Dinas Kehutanan, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Perpustakaan dan Arsip, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Pangan-Tanaman Pangan & Hortikultura, Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral dan BLUD RSJ Atma Husada Mahakam) tanpa melalui mekanisme penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi Provinsi Kaltim (KI Kaltim, 2019).



Gambar 16. Permohonan Informasi Publik yang bisa dipenuhi Badan Publik di Kaltim (Komisi Informasi Kaltim, 2017)

Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik dari tahun 2016-2018 sebanyak 90%. Adapun konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama sebesar 82% pada 2018. Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website mengalami peningkatan sebanyak 1000 orang di tahun 2018 yakni sebesar 52.000 orang jika dilihat dari tahun 2017 yakni hanya sebesar 51.000. Presentase konsumen yang puas terhadap akses data BPS pada 2018 sebesar 85%. Sementara, presentasi konsumen yang menggunakan data BPS dalam penggunaan perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional pada 2018 mencapai 8%.

Tabel 57. Tabel Presentase konsumen yang menggunakan data statistik Tahun 2016-2018

INDIKATOR	2016	2017	2018
Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik.	90%	90%	90%
Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama.	81%	81%	82%
Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa).	0	0	0
Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website.	51.000	51.000	52.000
Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS).	82%	82%	85%
Persentase konsumen yang menggunakan data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional.	8,25%	8,35%	8%

BAB III. TARGET DAN ARAH KEBIJAKAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

3.1. Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan

Tujuan 1 TPB adalah mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di mana pun. Dalam rangka mencapai tujuan tanpa kemiskinan pada tahun 2030, ditetapkan 7 target yang diukur melalui 42 indikator. Target-target tersebut terdiri dari pemberantasan kemiskinan, penerapan perlindungan sosial, pemenuhan pelayanan dasar, mengurangi kerentanan masyarakat terhadap bencana, serta penguatan kebijakan dan mobilisasi berbagai sumber daya untuk mengakhiri kemiskinan. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan pada kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah maupun organisasi nonpemerintah.

Dalam rangka mencapai tujuan dan target Tujuan 1 TPB, RPJMD 2019–2023 diarahkan pada kebijakan utama, yaitu:

- 1) Pengembangan Fasilitas dan Pendampingan Permodalan usaha pemuda dan penyandang disabilitas
- 2) Peningkatan kapasitas kelembagaan dan keterampilan dalam pengurangan risiko bencana

Berdasarkan target dan arah kebijakan yang disusun dalam rangka pencapaian Tujuan 1 TPB, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan mencakup:

- 1) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
- 2) Program pembinaan anak terlantar
- 3) Program pembinaan panti asuhan /panti jompo
- 4) Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Kesejahteraan Sosial
- 5) Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma
- 6) Program Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana
- 7) Program Pencegahan dan kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Daerah
- 8) Program Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana
- 9) Program Penanganan dan Penanggulangan Korban Bencana
- 10) Program Pencegahan dan kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Daerah

Selain melalui program perangkat daerah, terdapat program yang dilakukan oleh organisasi nonpemerintah yang diakomodasi sebagai bagian dari upaya untuk mencapai tujuan penanggulangan kemiskinan. Program tersebut adalah: Mitra binaan desa kreatif, pembinaan pekebun kecil, perhutanan sosial, kampung iklim+, dan pengembangan rencana bisnis.

Target pencapaian indikator Tujuan 1 bisa dilihat pada tabel 88. Belum semua indikator TPB Tujuan 1 tercantum pada tabel tersebut. Program dan kegiatan pemerintah Tujuan 1 tercantum dalam Pilar Pembangunan Sosial - Matriks 1. Program dan kegiatan organisasi non-pemerintah Tujuan 1 tercantum dalam Pilar Pembangunan Sosial - Matriks 2. Program dan kegiatan organisasi pemerintah Kab/Kota sesuai RPJMD Tujuan 1 tercantum dalam Pilar Pembangunan Sosial - Matriks 3

Tabel 88. Target Pencapaian Indikator Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan

TUJUAN 1 TANPA KEMISKINAN									
Kode Indikator	Nama Indikator	SUMBER DATA	SATUAN	Baseline	TARGET				
					2019	2020	2021	2022	2023

TUJUAN 1 TANPA KEMISKINAN									
Kode Indikator	Nama Indikator	SUMBER DATA	SATUAN	Baseline	TARGET				
					2019	2020	2021	2022	2023
1.2 Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.									
1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Susenas BPS, Dinas Sosial, BKKBN	% (Kondisi Maret)	6,03	6	5,94	5,87	5,78	5,7
1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan									
1.3.1 (a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan	BPJS	%	87,98 %	98% <i>Capaian 89% Sept '19 UHC (Universal Health Coverage)</i>	100 %	100 %	100 %	100%
1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	BPJS Ketenaga kerjaan	Formal (%)	520.496 <i>(Angka Absolut)</i>	587.120	693.917	830.137	-	-
			Informal (%)	69.922	103.189	121.959	145.900	-	-
1.3.1.(c)	Jumlah penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.	BPS, Dinsos, BPJS	Orang	200	215	250	300	350	400
1.3.1.(d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.	Dinsos, Susenas	KPM (Keluarga Penerima Manfaat)	10.200	66.010 Tw 3 75.000	-	-	-	-
1.4 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan, dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro									
1.4.1 (a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan (kelompok penduduk terbawah) 40%	BPS, Dinkes	%	81,34* (2017)	100	100	100	100	100
1.4.1 (b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap (kelompok penduduk terbawah) 40%	BPS, Dinkes	%	44,84* (2017)	80	80	80	80	80

TUJUAN 1 TANPA KEMISKINAN

Kode Indikator	Nama Indikator	SUMBER DATA	SATUAN	Baseline	TARGET				
					2019	2020	2021	2022	2023
1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak. (kelompok penduduk 40% terbawah)	Susenas BPS DPU	%	71,71 (2017*)	-	-	-	-	-
1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak. (kelompok penduduk 40% terbawah)	Susenas BPS DPU	%	72,83*	-	-	-	-	-
1.4.1.(f)	Persentase rumah tangga kumuh perkotaan. (kelompok penduduk 40% terbawah)	Susenas BPS DPU	%	-	-	-	-	-	-
1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat. (kelompok penduduk 40% terbawah)	Susenas BPS DISDIK	%	96,61* (2017)	96,81	97,01	97,21	97,41	97,61
1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat. (kelompok penduduk 40% terbawah)	Susenas BPS	%	81,70*	81,90	82,1	82,3	82,5	82,7
1.4.1.(i)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/ sederajat. (kelompok penduduk 40% terbawah)	Susenas BPS	%	63,17*	63,37	63,57	63,77	63,97	64,17
1.4.1.(j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran. (kelompok penduduk 40% terbawah)	Susenas BPS <i>e-infoduk</i> DKP3A	%	92,22	-	-	-	-	-
1.4.1.(k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN. (kelompok penduduk 40% terbawah)	DESDM TNP2K	%	91,97	-	-	-	-	-
1.5 Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.									
1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	BPBD Kaltim	Jiwa	740	31	0	0	0	0
1.5.1.(a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	BPBD Kaltim	Lokasi	24	0	8	7	8	7
1.5.1.(b)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.	Dinas Sosial, BPBD, Podes	Jiwa	-	35	35	35	35	35
1.5.1.(c)	Pendampingan psikososial korban	Dinas Sosial, BPBD,	Jiwa	-	35	35	35	35	35

TUJUAN 1 TANPA KEMISKINAN									
Kode Indikator	Nama Indikator	SUMBER DATA	SATUAN	Baseline	TARGET				
					2019	2020	2021	2022	2023
	bencana sosial.	Podes							
1.5.1.(d)	Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus.	Dinas P & K, Kemenag, BPBD, Podes	Daerah	-	-	-	-	-	-
1.5.1.(e)	Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi.	BPBD Kaltim	Indeks Resiko Bencana	0	145	140	135	130	125
1.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	BPBD Kaltim	Rupiah	3.665.574.000	0	0	0	0	0
1.5.3*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	BPBD Kaltim	Dokumen	1	0	1	0	0	0
1.a Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi.									
1.a.1*	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.	BAPPEDA,	Rupiah		-	-	-	-	-
1.a.2*	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.	BAPPEDA,	Miliar Rupiah, Fungsi Pendidikan		2.269,58 (21,27%)	2.695,81 (21,93%)			

3.2. Tujuan 2 Tanpa Kelaparan

Tujuan 2 TPB adalah menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan tanpa kelaparan pada tahun 2030, ditetapkan 4 target yang diukur melalui 11 indikator. Target-target tersebut terdiri dari menghilangkan kelaparan dan kekurangan gizi, menggandakan produktivitas pertanian, menjamin pertanian pangan berkelanjutan, mengelola keragaman genetik, dan meningkatkan kapasitas produktif pertanian. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan pada kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah maupun organisasi nonpemerintah.

Arah kebijakan RPJMD 2018-2023 untuk mencapai target Tujuan 2 TPB, meliputi:

- 1) Pemerataan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan melalui pemberian tunjangan kemahalan bagi Tenaga Kesehatan yang bertugas di daerah terpencil/perbatasan (3T)
- 2) Percepatan pemenuhan standar pelayanan minimal rumah sakit
- 3) Peningkatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
- 4) Peningkatan Akses dan kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin
- 5) Perbaikan penanganan pasca panen dan pengolahan hasil tanaman pangan dan hortikultura
- 6) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Keterampilan Petani

- 7) Peningkatan pemanfaatan teknologi pengolahan produksi pertanian
- 8) Pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan pada lahan kering
- 9) Penerapan Peraturan Daerah tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B)
- 10) Peningkatan produksi bibit dan benih ternak berkualitas melalui UPSUS SIWAB

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode RPJMD 2019-2023 antara lain terkait dengan:

- 1) Program Peningkatan Ketahanan Pangan
- 2) Program Upaya Kesehatan Masyarakat
- 3) Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
- 4) Program Penganeekaragaman Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan
- 5) Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura
- 6) Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan
- 7) Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Peternakan
- 8) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan

Selain melalui program Organisasi Perangkat Daerah, terdapat program yang dilakukan oleh organisasi nonpemerintah yang diakomodasi sebagai bagian dari upaya untuk mencapai tujuan tersebut, yaitu: Pengembangan lahan pangan lokal, pembinaan pekebun, peningkatan nilai tukar petani.

Target Indikator Tujuan 2. Target pencapaian indikator Tujuan 2 bisa dilihat pada tabel 89. Belum semua indikator TPB Tujuan 2 tercantum pada tabel tersebut. Program dan kegiatan pemerintah Tujuan 2 tercantum Pilar Pembangunan Sosial - Matriks 1. Program dan kegiatan organisasi nonpemerintah Tujuan 2 tercantum dalam Pilar Pembangunan Sosial - Matriks 2. Program dan kegiatan organisasi pemerintah Kab/Kota sesuai RPJMD Tujuan 7 tercantum dalam Pilar Pembangunan Sosial - Matriks 3

Tabel 89. Target Pencapaian Indikator Tujuan 2 Tanpa Kelaparan

TUJUAN 2 TANPA KELAPARAN									
Kode Indikator	Nama Indikator	SUMBER DATA	SATUAN	Baseline	TARGET				
					2019	2020	2021	2022	2023
2.1. Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.									
2.1.1*	Prevalensi ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	Dinas Pertanian, Susenas BPS	%	-	-	-	-	-	-
2.1.1.(a)	Prevalensi Kekurangan Gizi (<i>underweight</i>) pada anak balita.	Dinas Kesehatan, Susenas BPS	%	14,7	14,2	13,7	13,2	12,7	12,2
2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan pangan.	Susenas BPS, dinas Pertanian	%	420	418	416	414	412	410
2.2.1.(a)	Proporsi penduduk dengan asupan kalori	dinas pertanian, Susenas BPS	%	-	-	-	-	-	-

TUJUAN 2 TANPA KELAPARAN									
Kode Indikator	Nama Indikator	SUMBER DATA	SATUAN	Baseline	TARGET				
					2019	2020	2021	2022	2023
	minimum di bawah 1.400 kkal/kapita/hari.	(dihitung BPS)							
2.2. Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah lima tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.									
2.2.1*	Prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada anak balita.	Dinkes	%	29,4	28,9	28,4	27,9	27,4	26,9
2.2.1.(a)	Prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.	Dinkes, BPS	%	-	-	-	-	-	-
2.2.2*	Prevalensi malnutrisi/ <i>wasting</i> (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	Dinkes, BPS	% (wasting)	7,5	7	6,5	6	5,5	5
			% (obesitas)	-	-	-	-	-	-
2.2.2.(a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil.	Dinkes BPS	%	15,16	14	13	12	11	10
2.2.2.(b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	Dinkes BPS	%	70,7	50	55	60	65	70
2.2.2.(c)	(i)Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH); dan (ii) tingkat konsumsi ikan perkapita	Dinas Pertanian	Skor	84,6	84,7	86,9	89,1	91,2	93,4
		Dinas Kelautan & Perikanan	Kg/Kapita/Tahunpita	48	50	52	54	56	58
2.3 Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan non pertanian.									
2.3.1*	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja)	Dinas Pertanian, (DISNAK, DKP, DISBUN) BPS	Rupiah/tenaga kerja	118.241,5* (2016)	-	-	-	-	-
2.5 Pada tahun 2020, mengelola keragaman genetik benih tanaman budidaya dan hewan ternak dan peliharaan dan spesies liar terkait, termasuk melalui bank benih dan tanaman yang dikelola dan dianeka-ragamkan dengan baik di tingkat nasional, regional dan internasional, serta meningkatkan akses terhadap pembagian keuntungan yang adil dan merata, hasil dari pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan.									
2.5.1*	Jumlah varietas unggul tanaman dan hewan pangan yang dilepas. (Nasional)	Dinas Peternakan	VUB Tanaman Pangan (padi, jagung, kedelai)	80.248,3	82.811,60	85.479,7	88.255,60	91.142,70	94.144,50

TUJUAN 2 TANPA KELAPARAN									
Kode Indikator	Nama Indikator	SUMBER DATA	SATUAN	Baselisme	TARGET				
					2019	2020	2021	2022	2023
			Kumulatif VUB Hewan untuk Pangan (ayam lokal petelur, ayampedaging, itik unggul, dan ternak domba komposit Sumatera)	50	100	100	120	140	150
2.5.2*	Proporsi hewan ternak dan sejenisnya, diklasifikasikan menurut tingkat risiko kepunahan: berisiko, tidak berisiko, dan risiko yang tidak diketahui.	Dinas Peternakan	Hewan Ternak	3000	10.000 (Hewan yg divaksin)	10.000	10.000	10.000	10.000

3.3. Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera

Tujuan 3 TPB adalah menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia. Untuk mencapai tujuan kehidupan sehat dan sejahtera pada tahun 2030, ditetapkan 9 target yang diukur melalui 37 indikator. Target-target tersebut terdiri dari penurunan kematian ibu dan bayi, mengurangi kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak menular, pencegahan penyalahgunaan zat, menjamin akses layanan kesehatan seksual dan reproduksi, meningkatkan cakupan kesehatan universal, penguatan pelaksanaan pengendalian tembakau (*tobacco control*), pengembangan dan penelitian vaksin dan obat, serta peningkatan pembiayaan kesehatan.

Kebijakan dalam RPJMD 2019-2023 diarahkan pada: Pemerataan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan melalui pemberian tunjangan kemahalan bagi Tenaga Kesehatan yang bertugas di daerah terpencil, Percepatan pemenuhan standar pelayanan minimal rumah sakit, Peningkatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, peningkatan kases dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat miskin.

Memperhatikan tujuan dan target serta arah kebijakan Tujuan 3 TPB, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, mencakup:

- 1) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
- 2) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
- 3) Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)
- 4) Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Kesehatan
- 5) Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
- 6) Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular
- 7) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
- 8) Program Upaya Kesehatan Masyarakat
- 9) Program Pengembangan Dan Pemberdayaan SDM Kesehatan

Target pencapaian indikator Tujuan 3 bisa dilihat pada tabel 90. Belum semua indikator TPB Tujuan 3 tercantum pada tabel tersebut. Program dan kegiatan pemerintah Tujuan 3 tercantum dalam Pilar Pembangunan Sosial - Matriks 1. Program dan kegiatan organisasi non pemerintah Tujuan 3 tercantum dalam Pilar Pembangunan Sosial - Matriks 2. Daftar indikator yang akan dikembangkan tercantum dalam Pilar Pembangunan Sosial - Matriks 3. Program dan kegiatan organisasi pemerintah Kab/Kota sesuai RPJMD Tujuan 3 tercantum dalam Pilar Pembangunan Sosial - Matriks 3

Tabel 90. Target Pencapaian Indikator Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera

TUJUAN 3 KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA									
Kode Indikator	Nama Indikator	SUMBER DATA	SATUAN	Baseline	TARGET				
					2019	2020	2021	2022	2023
3.1 Pada tahun 2039, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.									
3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).	Dinkes, SENSUS PENDUDUK, SUTAS	Jumlah kematian ibu	74	90	85	80	75	70
3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	Susenas BPS, Dinkes	%	96,44 (bps 2017)	100	100	100	100	100
3.1.2.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Susenas BPS, Dinkes, BKKBN	%	87,37 (bps 2017)	100	100	100	100	100
3.2 Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.									
3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	Dinkes	Jumlah Kematian Balita	54	77	72	67	62	57
3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	Dinkes	kematian per 100.000 kelahiran hidup	498	473	448	423	398	373
3.2.2.(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	Dinkes	kematian per 100.000 kelahiran hidup	608	581	557	533	509	484
3.2.2.(b)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	Dinkes	%	90	80	90	90	100	100
3.3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.									

TUJUAN 3 KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA									
Kode Indikator	Nama Indikator	SUMBER DATA	SATUAN	Baseline	TARGET				
					2019	2020	2021	2022	2023
3.3.1.(a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	Dinkes, Komisi Penanggulangan Aids	%	1,72	-	-	-	-	-
3.3.2.(a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	Dinkes	%	46,08	-	-	-	-	-
3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang.	Dinkes	API per 1000 penduduk	0,44 (bps 2017)	<1	<1	<1	<1	<1
3.3.3.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria.	Dinkes	Kabupaten/ Kota	0 8 (bps 2017)	0	1	2	2	2
3.3.4.(a)	Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B.	Dinkes	%	10 7 (bps 2017)	10	10	10	10	10
3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).	Dinkes	Juta Orang (Filariasis)	-	-	-	-	-	-
			Orang (Kusta)	-	-	-	-	-	-
3.3.5.(a)	Jumlah provinsi dengan eliminasi Kusta.	Dinkes	Provinsi	10	10	10	10	10	10
3.3.5.(b)	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I).	Dinkes	Kab/Kota	1	0	1	2		
3.4 Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.									
3.4.1.(a)	Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun.	Dinkes	%	25,90	24	23	22	21	20
3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.	Dinkes	%	39,30	35	34	33	32	31
3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	Dinkes	%	28,70	15,40	15,40	15,40	15,40	15,40
3.4.2*	Angka kematian (<i>insidens rate</i>) akibat bunuh diri.	Dinkes	Kematian per 100.000 penduduk	-	-	-	-	-	-
3.4.2.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang	dinkes	Kab/Kota	10	10	10	10	10	10

TUJUAN 3 KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA									
Kode Indikator	Nama Indikator	SUMBER DATA	SATUAN	Baseline	TARGET				
					2019	2020	2021	2022	2023
	menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.								
3.5 Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan.									
3.5.1(a)	Jumlah penyalahguna narkotika dan pengguna alkohol yang merugikan, yang mengakses layanan rehabilitasi medis.	BNN	orang	1083	250	250	250	250	250
3.5.1(b)	Jumlah yang mengakses layanan pasca rehabilitasi.	BNN	orang	89	120	240	240	240	240
3.5.1.(c)	Jumlah korban penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti sesuai standar pelayanan.	Dinas Sosial	orang	38	45	50	55	60	65
3.5.1.(d)	Jumlah lembaga rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA yang telah dikembangkan/ dibantu.	BNN	Lembaga	2	2	2	2	2	2
3.5.1.(e)	Prevalensi penyalahgunaan narkoba.	BNN	%	1,77	2,15	2,20	2,25	2,30	2,35
3.5.2*	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir.	Susenas BPS, POLDA	liter per kapita	-	-	-	-	-	-
3.7 Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.									
3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.	BKKBN	%	11,8* (2017)	11,42	11,04	10,66	10,28	9,9
3.7.1.(a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49	BKKBN	%	66,5* (2017)	59,50	60,30	61,10	61,10	61,90

TUJUAN 3 KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA									
Kode Indikator	Nama Indikator	SUMBER DATA	SATUAN	Baseline	TARGET				
					2019	2020	2021	2022	2023
	tahun yang berstatus kawin.								
3.7.1.(b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern).	DKP3A, BKKBN	%	20,7	21,7	22,9	24,2	25,7	26,9
3.7.2*	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (<i>Age Specific Fertility Rate/ASFR</i>).	DKP3A, BKKBN	Kelahiran per 1000 perempuan 15-19 tahun	19	18,1 1	17,2 2	16,3 2	15,4 3	14,54
3.7.2.(a)	<i>Total Fertility Rate</i> (TFR).	DKP3A, BKKBN	Jumlah anak per WUS (15-49 tahun)	2,7* (2017)	2,4	2,4	2,4	2,4	2,3
3.8 Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.									
3.8.1.(a)	<i>Unmet need</i> pelayanan kesehatan.	BPS, Dinkes	%	4,18* (2017)	-	-	-	-	
3.8.2*	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.	BPJS, Kemen-keu	Juta Penduduk	2.680.011 (2017)	3.487.807	3.891.705	4.295.603	4.990.501	5.103.399
3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	BPJS	%	87,19	98	100	100	100	100
3.9 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan kesakitan akibat bahan kimia berbahaya, serta polusi dan kontaminasi udara, air, dan tanah.									
3.9.3.(a)	Proporsi kematian akibat keracunan. (Nasional)	Sistem Registrasi Sampel	%	-	-	-	-	-	-
3.a Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat.									
3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.	Susenas BPS, Dinas Kesehatan	%	24,69* BPS 2017	100	100	100	100	100
3.b Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua.									
3.b.1.(a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	Dinkes	%	98,82	100	100	100	100	100
3.c Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil.									
3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.								
	Kepadatan dan distribusi dokter	Dinkes	dokter spesialis	13,89	11	11	11	11	12

TUJUAN 3 KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA									
Kode Indikator	Nama Indikator	SUMBER DATA	SATUAN	Baseli ne	TARGET				
					2019	2020	2021	2022	2023
	spesialis		per 1.000 penduduk						
	Kepadatan dan distribusi dokter umum	Dinkes	dokter umum per 1.000 penduduk	28,17	45	46	47	49	50
	Kepadatan dan distribusi dokter gigi	Dinkes	dokter gigi per 1.000 penduduk	8,41	13	13	13	13	14
	Kepadatan dan distribusi perawat	Dinkes	perawat per 1.000 penduduk	218,34	180	185	190	195	200
	Kepadatan dan distribusi perawat gigi	Dinkes	perawat gigi per 1.000 penduduk	4,49	18	19	20	21	21
	Kepadatan dan distribusi bidan	Dinkes	bidan per 1.000 penduduk	94,88	120	122	124	127	130
	Kepadatan dan distribusi tenaga gizi	Dinkes	tenaga gizi per 1.000 penduduk	9,67	14	15	16	17	18
	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan lingkungan	Dinkes	tenaga kesehatan per 1.000 penduduk	7,56	18	19	20	20	20
	Kepadatan dan distribusi tenaga ketrampilan fisik	Dinkes	tenaga ketrampilan fisik per 1.000 penduduk	0	5	6	6	6	6
	Kepadatan dan distribusiketknisan medis	Dinkes	tenaga kesehatan masyarakat per 1.000 penduduk	0	16	17	18	18	18
	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan masyarakat	Dinkes	tenaga keteknis-an fisik per 1.000 penduduk	10,72	12	14	16	18	18

3.4. Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas

Tujuan 4 TPB adalah menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua pada tahun 2030. Dalam rangka mencapai tujuan kehidupan sehat dan sejahtera pada tahun 2030, ditetapkan 9 target yang diukur melalui 24 indikator. Target-target tersebut terdiri dari menjamin akses terhadap pengasuhan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah, serta pendidikan kejuruan termasuk universitas yang terjangkau dan berkualitas, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, dan meningkatkan jumlah guru berkualitas.

Arah kebijakan pembangunan pendidikan dalam rangka pencapaian Tujuan 4 TPB, adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kualitas layanan Pendidikan vokasi/kejuruan selaras kebutuhan pasar kerja dan perkembangan teknologi dengan penguatan kemitraan swasta/industri

- 2) Pemenuhan standar pelayanan minimal di bidang Pendidikan melalui peningkatan sarana dan prasarana Pendidikan SMA/SMK/MA/SLB dan pengembangan SMA/SMK Negeri Terpadu (Boarding School)
- 3) Peningkatan kualitas dan tenaga kependidikan melalui pemenuhan kualifikasi Pendidikan
- 4) Mempercepat wajib belajar 12 tahun dengan keberpihakan terhadap anak keluarga miskin, disabilitas, pekerja anak dan anak tidak sekolah melalui BOSDA dan beasiswa Kaltim Tuntas
- 5) Penyediaan beasiswa Pendidikan bagi masyarakat miskin
- 6) Penyediaan sarana dan prasarana Pendidikan jarak jauh
- 7) Penyediaan sarana dan prasarana Pendidikan Luar Biasa
- 8) Pengembangan perpustakaan digital

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain:

- 1) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 2) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah
- 3) Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
- 4) Program Pendidikan Luar Biasa
- 5) Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- 6) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
- 7) Program Pendidikan Sekolah Menengah Atas
- 8) Program Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
- 9) Program Pengembangan Nilai-Nilai Keagamaan
- 10) Program Pendidikan Jarak Jauh (Distance Learning System)

Selain melalui program Organisasi Perangkat Daerah, terdapat program yang dilakukan oleh organisasi nonpemerintah yang diakomodasi sebagai bagian dari upaya untuk mencapai tujuan tersebut, yaitu: Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah dan Guru.

Target pencapaian indikator Tujuan 4 bisa dilihat pada tabel 91. Belum semua indikator TPB Tujuan 4 tercantum pada tabel tersebut. Program dan kegiatan pemerintah Tujuan 4 tercantum dalam Pilar Pembangunan Sosial - Matriks 1. Program dan kegiatan organisasi non pemerintah Tujuan 4 tercantum dalam Pilar Pembangunan Sosial - Matriks 2. Program dan kegiatan organisasi pemerintah Kab/Kota sesuai RPJMD Tujuan 4 tercantum dalam Pilar Pembangunan Sosial - Matriks 3

Tabel 58. Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas

TUJUAN 4 PENDIDIKAN BERKUALITAS									
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline	Target				
					2019	2020	2021	2022	2023
4.1 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.									
4.1.1*	Proporsi anak-anak dan remaja: (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca (Bahasa Indonesia)	Disdik	%	0	67,39	67,94	68,49	69,04	69,59
	Proporsi anak-anak dan remaja: (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang	Disdik	%	0	44,09	46,33	48,57	50,81	53,05

TUJUAN 4 PENDIDIKAN BERKUALITAS									
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline	Target				
					2019	2020	2021	2022	2023
	mencapai standar kemampuan minimum dalam: (ii) matematika.								
4.1.1.(a)	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	Disdik	%	0	82,1	83,66	84,21	84,89	85,33
4.1.1.(b)	Persentase SMP/MTS berakreditasi minimal B.	Disdik	%	0	78	79,56	80,21	80,97	81,66
4.1.1.(c)	Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B.	Disdik	%	0	64,45	65,01	65,97	66,56	66,99
4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	Disdik	%	105,39 108,07 (bps 2017)	104,69	103,12	102,35	101,22	100,54
4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.	Disdik	%	105,59 91,46 (bps 2017)	104,26	103,53	102,35	101,21	100,01
4.1.1.(f)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat.	Disdik	%	90,75 99,51 (bps 2017)	92,56	94,32	95,32	96,14	97,25
	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.	Disdik	Tahun	9,48	9,52	9,94	10,10	10,26	10,36
4.2 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.									
4.2.2.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	Disdik	%	58,26	60,21	61,55	62,14	63,52	64,11
4.3 Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas.									
4.3.1.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat.	Disdik	%	90,75	92,56	94,32	95,32	96,14	97,25
4.3.1.(b)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT).	Disdik	%	27,4	27,8	27,9	28,2	28,4	28,6
4.4 Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan.									
4.4.1*	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4.1*	Proporsi remaja (15-24) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).	Susenas, BPS	% remaja (15-24)	76,99 (bps 2017)	-	-	-	-	-
4.4.1*	Proporsi dewasa (15-59) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).	Susenas, BPS	% dewasa (15-59)	50,56 (bps 2017)	-	-	-	-	-

TUJUAN 4 PENDIDIKAN BERKUALITAS									
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline	Target				
					2019	2020	2021	2022	2023
4.5 Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.									
4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/SMK/MA/ Sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/ laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.				74,87	75,25	75,29	75,25	75,29
4.5.1*	Rasio APM SD/MI/ sederajat	Disdik	%	105,59 99,80 (bps 2017)	104,26	103,53	102,35	101,21	100,01
4.5.1*	Rasio APM SMP/MTs/ sederajat	Disdik	%	90,75 100,30 (bps 2017)	92,56	94,32	95,32	96,14	97,25
4.5.1*	Rasio APK SMA/SMK/MA/ sederajat	Disdik	%	27,4 96,60 (bps 2017)	27,8	27,9	28,2	28,4	28,6
4.5.1*	Rasio APK perempuan/ laki-laki di PT	Disdik	%	-	-	-	-	-	-
4.6 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.									
4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥ 15 tahun.	Suse nas, BPS	%	98,96	-	-	-	-	-
4.6.1.(b)	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.	Suse nas, BPS	%	99,92 (bps 2017)	-	-	-	-	-
	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun	Suse nas, BPS	%	100 99,70 (bps 2017)	-	-	-	-	-
	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-59 tahun.	Suse nas, BPS	%	-	-	-	-	-	-
1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan									
4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas,	-	-	-	-	-	-	-	-

TUJUAN 4 PENDIDIKAN BERKUALITAS									
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Sasaran	Baseline	Target				
					2019	2020	2021	2022	2023
	(e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)).								
	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik	Dinas Pendidikan	%	-	-	-	-	-	-
	Proporsi sekolah dengan akses ke: (b) internet untuk tujuan pengajaran	Dinas Pendidikan	%		52,1	53,22	53,91	54,67	55,11
	Proporsi sekolah dengan akses ke (c) komputer untuk tujuan pengajaran	Dinas Pendidikan	%	SD 0 SMP 0 SMA/S MK 0 SLB 0 Kaltim 0	SD 23,41 SMP 30,75 SMA/S MK 26,46 SLB 11,11 Kaltim 22,93	SD 46,81 SMP 42,14 SMA/S MK 49,83 SLB 22,22 Kaltim 40,25	SD 64,86 SMP 51,25 SMA/ SMK 60,82 SLB 33,33 Kaltim 52,57	SD 70,88 SMP 56,95 SMA/S MK 64,26 SLB 44,44 Kaltim 59,13	SD 76,90 SMP 95,67 SMA/S MK 74,57 SLB 11,11 Kaltim 64,56
	Proporsi sekolah dengan akses ke: (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas	Dinas Pendidikan	%	-	-	-	-	-	-
	Proporsi sekolah dengan akses ke: (e) air minum layak	Dinas Pendidikan	%	-	-	-	-	-	-
	Proporsi sekolah dengan akses ke:(f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin	Dinas Pendidikan	%	-	-	-	-	-	-
	Proporsi sekolah dengan akses ke: (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH))	Dinas Pendidikan	%	-	-	-	-	-	-
4.b Pada tahun 2020, secara signifikan memperluas secara global, jumlah beasiswa bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, negara berkembang pulau kecil, dan negara-negara Afrika, untuk mendaftar di pendidikan tinggi, termasuk pelatihan kejuruan, teknologi informasi dan komunikasi, program teknik, program rekayasa dan ilmiah, di negara maju dan negara berkembang lainnya.									
4.c Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.									
4.c.1*	Persentase guru (TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang)bersertifikat pendidik.	Disdik	%		78,17	78,76	79,35	79,86	80,47
	Persentase guru TK/TKLB yang bersertifikat pendidik.	Disdik	%		31,34	31,98	32,56	33,13	33,78
	Persentase guru SD/SDLB yang bersertifikat pendidik.	Disdik	%		87,54	88,21	88,76	88,99	89,67
	Persentase guru	Disdik	%		94,45	94,98	95,67	96,12	96,98

TUJUAN 4 PENDIDIKAN BERKUALITAS									
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline	Target				
					2019	2020	2021	2022	2023
	SMP/SMPLB yang bersertifikat pendidik.								
	Persentase guru SMA/SMALB yang bersertifikat pendidik.	Disdik	%		88,76	89,32	89,88	90,53	90,97
	Persentase guru SMK yang bersertifikat pendidik.	Disdik	%		88,76	89,32	89,88	90,53	90,97
	Persentase guru Dikmas dengan kualifikasi minimal S1/D4	Disdik	%		31,34	31,98	32,56	33,13	33,78
	Persentase guru TK/TKLB dengan kualifikasi minimal S1/D4	Disdik	%		68,67	68,13	68,87	69,44	70,87
	Persentase guru Dikdas dengan kualifikasi minimal S1/D4	Disdik	%		88,87	88,98	90,34	91,12	91,87
	Persentase guru SD/SDLB dengan kualifikasi minimal S1/D4	Disdik	%	86,81	86,81	87,19	87,57	87,95	88,33
	Persentase guru SMP/SMPLB dengan kualifikasi minimal S1/D4	Disdik	%	94,58	94,58	94,96	95,34	95,72	96,1
	Persentase guru Dikmen dengan kualifikasi minimal S1/D4	Disdik	%		95,05	95,43	95,81	96,19	96,57
	Persentase guru SMA/SMALB dengan kualifikasi minimal S1/D4	Disdik	%	97,58	97,58	97,96	98,34	98,72	99,1
	Persentase guru SMK dengan kualifikasi minimal S1/D4	Disdik	%	95,05	95,05	95,43	95,81	96,19	96,57

3.5. Tujuan 5 Kesetaraan Gender

Tujuan 5 TPB adalah mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan. Dalam rangka mencapai tujuan kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan pada tahun 2030, ditetapkan 6 target yang diukur melalui 16 indikator. Target-target tersebut terdiri dari mengakhiri segala bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap kaum perempuan, menghapus praktik berbahaya, menjamin partisipasi perempuan pada tingkat pengambilan keputusan, serta menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi.

Arah kebijakan pembangunan pendidikan dalam rangka pencapaian Tujuan 5 TPB, adalah peningkatan kesadaran keadilan gender di kalangan masyarakat.

Program dan kegiatan Rencana Aksi mendukung Tujuan 5 antara lain adalah: Program Kesetaraan Gender, dan Program Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Target pencapaian indikator Tujuan 5 bisa dilihat pada tabel 92. Belum semua indikator TPB Tujuan 5 tercantum pada tabel tersebut. Program dan kegiatan pemerintah Tujuan 5 tercantum dalam Pilar Pembangunan Sosial - Matriks 1. Program dan kegiatan organisasi nonpemerintah Tujuan 5 tercantum Pilar Pembangunan Sosial - Matriks 2. Program dan kegiatan organisasi pemerintah Kab/Kota sesuai RPJMD Tujuan 5 tercantum dalam Pilar Pembangunan Sosial - Matriks 3

Tabel 59. Target Pencapaian Indikator Tujuan 5 Kesetaraan Gender

TUJUAN 5 KESETARAAN GENDER									
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline	Target				
					2019	2020	2021	2022	2023
5.1 Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun.									
5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	DKP3A	Dokumen	3	1	1	1	1	1
5.2 Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.									
5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	BPS, DKP3A	%	0,023	-	-	-	-	-
5.2.1.(a)	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	BPS, DKP3A	%	0,034	-	-	-	-	-
5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	BPS, DKP3A	%	0,008	-	-	-	-	-
5.2.2.(a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	DKP3A	%	116,55	75	80	85	90	95
5.3 Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.									
5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin	DKP3A	% (sebelum umur 15 tahun)	1,8 (bps 2017)	-	-	-	-	-
		DKP3A	%	28,05	-	-	-	-	-

TUJUAN 5 KESETARAAN GENDER									
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline	Target				
					2019	2020	2021	2022	2023
	atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.		(sebelum umur 18 tahun)	(bps 2017)					
5.3.1.(a)	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.	DKP3A	Tahun	21,7 (bps 2017)	-	-			
5.3.1.(b)	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (<i>Age Specific Fertility Rate/ASFR</i>).	DKP3A BKKBN	kelahiran per 1000 perempuan umur 15-19 tahun	53 (bps 2017)	19	-	-	-	-
5.3.1.(c)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat.	Dinas Pendidikan	%	90,75 99,51 (bps 2017)	92,56	94,32	95,32	96,14	97,25
5.5 Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.									
5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	DKP3A	% % (pusat) % (parlemen) % (daerah)	17,32 7 6,722	20,59	20,59	20,510	20,512	20,5
5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	DKP3A	%	27	28	29	30	31	
5.6 Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan <i>Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform</i> serta dokumen-dokumen hasil revidi dari konferensi-konferensi tersebut.									
5.6.1*	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.	DKP3A	%	-	-	-	-	-	-
5.6.1.(a)	<i>Unmet need</i> KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	BKKBN	%	10,2 (bps 2017)	9,29	9,19	9,01	8,8	8,6
5.6.1.(b)	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi	BKKBN	%	100 (bps 2017)	100	100	100	100	100

TUJUAN 5 KESETARAAN GENDER									
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline	Target				
					2019	2020	2021	2022	2023
	modern.								
5.6.2*	Undang-undang atau Peraturan Pemerintah (PP) yang menjamin perempuan umur 15-49 tahun untuk mendapatkan pelayanan, informasi dan pendidikan terkait kesehatan seksual dan reproduksi.	DKP3A	Dokumen	2	-	-	-	--	-
5.b Meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan.									
5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/me miliki telepon genggam.	Susenas BPS Diskominfo	%	74,30 (bps 2017)	-	-	-	-	-

3.6. Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak

Tujuan 6 TPB adalah menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua. Dalam rangka mencapai tujuan air bersih dan sanitasi layak pada tahun 2030, ditetapkan 6 target yang diukur melalui 29 indikator. Target-target tersebut terdiri dari akses terhadap air minum layak, akses terhadap sanitasi layak, kualitas air dan limbah, serta pemanfaatan, pengelolaan dan pelestarian sumber daya air.

Kebijakan RPJMD 2019-2023 yang terkait Tujuan 6 adalah: Peningkatan infrastruktur pengolahan dan distribusi air baku, Peningkatan infrastruktur layanan air minum, Pembinaan dan pendampingan dalam penerapan sanitasi sehat.

Program dan kegiatan Rencana Aksi mendukung Tujuan 6 antara lain adalah:

- 1) Program Pembangunan Infrastruktur Keciaptakaryaan
- 2) Program Upaya Kesehatan Masyarakat
- 3) Program Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
- 4) Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBH DR)

Selain melalui program Organisasi Perangkat Daerah, terdapat program yang dilakukan oleh organisasi nonpemerintah yang diakomodasi sebagai bagian dari upaya untuk mencapai tujuan tersebut, yaitu: Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Perencanaan Pengelolaan Kawasan Strategis Provinsi.

Target pencapaian indikator Tujuan 6 bisa dilihat pada tabel 93. Belum semua indikator TPB Tujuan 6 tercantum pada tabel tersebut. Program dan kegiatan pemerintah Tujuan 6 tercantum dalam Pilar Pembangunan Lingkungan Hidup - Matriks 1. Program dan kegiatan organisasi nonpemerintah Tujuan 6 tercantum dalam Pilar Pembangunan Lingkungan Hidup - Matriks 2. Program dan kegiatan organisasi pemerintah Kab/Kota sesuai RPJMD Tujuan 6 tercantum dalam Pilar Pembangunan Lingkungan Hidup - Matriks 3

Tabel 93. Target Pencapaian Indikator Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak

TUJUAN 6. AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline	Target				
					2019	2020	2021	2022	2023
Target 6.1 Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.									
6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	Suse nas Kor BPS, Dinas PUPR	%	82,75 (bps 2017)	81,75	85,25	86,75	88,25	89,75
6.1.1.(b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	PUPR	m3/dt		7,922	8,322	8,622	8,622	8,982
6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	Suse nas KOR BPS, Dinas PUPR	%		71,33	74,83	76,33	77,83	79,33
Target 6.2 Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.									
6.2.1.(a)	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.	Suse nas KOR BPS, Dinas PUPR	%	69,02 (bps 2017)	-	-	-	-	-
6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	Suse nas KOR BPS, Dinas PUPR	%	72,36 (bps 2017)	-	-	-	-	-
6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	BPMPD, Dinkes	desa/kelurahan		-	-	-	-	-
6.2.1.(d)	Jumlah desa/kelurahan yang <i>Open Defecation</i>	BPMPD dan Dinkes	desa/kelurahan		1038	-	-	-	-

TUJUAN 6. AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK									
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline	Target				
					2019	2020	2021	2022	2023
	<i>Free (ODF)/</i> Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).								
6.2.1.(e)	Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal.	Dinas PUPR	Kabupaten/ Kota (Skala Kota)	0	0	0	0	0	0
			Kabupaten/Kota (Skala Kawasan)	0	0	0	0	1	1
			Kabupaten/ Kota (Skala Komunal)	0	0	0	0	0	0
6.2.1.(f)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	Dinas PUPR	%	0,17	0,17	0,17	0,17	0,19	0,22
Target 6.3 Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.									
6.3.1.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).	Dinas PUPR	Kab/Kota		6,00	7,00	8,00	9,00	9,00
6.3.1.(b)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.	Dinas PUPR	%	0,17	0,17	0,17	0,17	0,19	0,22
6.3.2.(a)	Kualitas air danau.	Dinas PUPR	Danau prioritas		3	3	3	3	3
6.3.2.(b)	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.	Dinas PUPR	Sungai		1	1	1	1	1
Target 6.4 Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air.									
6.4.1.(a)	Pengendalian dan	dinas LH	PM	-	-	-	-	-	-

TUJUAN 6. AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK									
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline	Target				
					2019	2020	2021	2022	2023
	penegakan hukum bagi penggunaan air tanah.								
6.4.1.(b)	Insentif penghematan air pertanian/pe rkebunan dan industri.	dinas LH	PM	-	-	-	-	-	-
Target 6.5 Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.									
6.5.1.(a)	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).	Dinas PUPR	RPDAST		1	1	1	1	1
6.5.1.(b)	Jumlah stasiun hidrologi dan klimatologi yang dilakukan <i>updating</i> dan revitalisasi.	PUPR, BMKG	stasiun		50	50	53	58	63
6.5.1.(c)	Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.	Dinas PUPR	wilayah sungai		1	1	1	1	1
6.5.1.(e)	Luas pengembangan hutan serta peningkatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) untuk pemulihan kawasan DAS.	Dinas Kehutanan	Ha	100	-	-	-	-	-
6.5.1.(f)	Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.	Dinas PUPR	Wilayah sungai		2	2	2	2	2
6.5.1.(g)	Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.	Dinas PUPR	lembaga		6	6	6	6	6
6.5.1.(h)	Jumlah DAS Prioritas yang meningkat	Dinas PUPR	DAS		0	0	0	0	0

TUJUAN 6. AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK									
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline	Target				
					2019	2020	2021	2022	2023
	jumlah mata airnya melalui konservasi sumber daya air di daerah hulu DAS serta sumur resapan.								
6.5.1.(i)	Jumlah DAS Prioritas yang dipulihkan kesehatannya melalui pembangunan embung, dam pengendali, dam penahan skala kecil dan menengah.	Dinas PUPR	DAS		2	2	2	2	2
Target 6.6 Pada tahun 2020, melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau									
6.6.1.(a)	Jumlah danau yang ditingkatkan kualitas airnya.	Dinas PUPR	Danau		3	3	3	3	3
6.6.1.(b)	Jumlah danau yang pendangkalannya kurang dari 1%.	Dinas PUPR	Danau		3	3	3	3	3
6.6.1.(c)	Jumlah danau yang menurun tingkat erosinya.	Dinas PUPR	Danau		3	3	3	3	3
6.6.1.(d)	Luas lahan kritis dalam KPH yang direhabilitasi.	Dishut	Ha	3.070	2.226	3.560	4.050	4.450	4.850
6.6.1.(e)	Jumlah DAS prioritas yang dilindungi mata airnya dan dipulihkan kesehatannya.	Dinas PUPR	DAS Prioritas		2	2	2	2	2

3.7. Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau

Tujuan 7 TPB adalah menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua lapisan masyarakat pada tahun 2030, ditetapkan 3 target yang diukur melalui 6 indikator. Target-targetnya meliputi akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern, meningkatkan pangsa energi terbarukan dalam bauran energi global dan melakukan perbaikan efisiensi energi di tingkat global.

Untuk meningkatkan ketersediaan energi, arah kebijakan dan kebijakan operasional yang tercantum dalam RPJMD 2019- 2023 meliputi: Peningkatan ketersediaan daya dan jaringan energi listrik, serta Energi Baru Terbaharukan (EBT).

Program dan kegiatan Rencana Aksi mendukung Tujuan 7 antara lain adalah:

- 1) Program Pengembangan Ketenagalistrikan
- 2) Program Diversifikasi Energi
- 3) Program Pembinaan dan Evaluasi Bidang pertambangan

Selain melalui program Organisasi Perangkat Daerah, terdapat program yang dilakukan oleh organisasi nonpemerintah yang diakomodasi sebagai bagian dari upaya untuk mencapai tujuan tersebut, yaitu: Pengembangan Energi Baru Terbaharukan dan Pengembangan Listrik Off-grids.

Target pencapaian indikator Tujuan 7 bisa dilihat pada tabel 94. Belum semua indikator TPB Tujuan 7 tercantum pada tabel tersebut. Program dan kegiatan pemerintah Tujuan 7 tercantum dalam Pilar Pembangunan Ekonomi - Matriks 1. Program dan kegiatan organisasi nonpemerintah Tujuan 7 tercantum dalam Pilar Pembangunan Ekonomi - Matriks 2. Program dan kegiatan organisasi pemerintah Kab/Kota sesuai RPJMD Tujuan 7 tercantum dalam Pilar Pembangunan Ekonomi - Matriks 3.

Tabel 94. Target Pencapaian Indikator Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau

TUJUAN 7. ENERGI BERSIH DAN TERJANGKAU									
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline	Target				
					2019	2020	2021	2022	2023
7.1 Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern.									
7.1.1*	Rasio elektrifikasi.	Dinas ESDM	%	85,75	85,5	87,5	89,5	92,00	95,00
7.1.1.(a)	Konsumsi listrik per kapita.	Dinas ESDM	kWh	-	-	-	-	-	-
7.1.2(a)	Jumlah sambungan jaringan gas untuk rumah tangga*	Dinas ESDM	SR	49,062	54,062	69,062	79,062	89,062	99,062
7.1.2.(b)	Rasio penggunaan gas rumah tangga	Dinas ESDM	%	4,3951	4,6799	5,7839	6,4124	7,0026	7,5578
7.2 Pada tahun 2030, meningkat secara substansial pangsa energi terbarukan dalam bauran energi global.									
7.2.1*	Bauran Energi Terbarukan	Dinas ESDM	%	1,86	3,38	3,36	4,13	4,63	5,13
7.3 Pada tahun 2030, melakukan perbaikan efisiensi energi di tingkat global sebanyak dua kali lipat.									
7.3.1*	Intensitas energi primer.	Dinas ESDM	SBM (Setara Barrel Minyak)	-	-	-	-	-	-

3.8. Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi

Dalam pelaksanaan TPB, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi merupakan fokus dalam Tujuan 8 yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh serta pekerjaan yang layak untuk semua. Target-target dari Tujuan 8 meliputi mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita, mencapai tingkat produktivitas ekonomi lebih tinggi, menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan (NEET), mempromosikan

pariwisata berkelanjutan, dan memperkuat lembaga keuangan. Adapun indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian 8 target Tujuan 8 berjumlah 20 sebagaimana tertera pada tabel 95.

Kebijakan Tujuan 8 TPB yang diarahkan untuk pencapaian target-target Tujuan 8 telah ditetapkan dalam RPJMD 2018-2023 meliputi kebijakan:

- 1) Pengembangan sistem perizinan yang terintegrasi berbasis teknologi informasi Pengembangan kualitas destinasi wisata berbasis masyarakat
- 2) Peningkatan efektivitas pengendalian rencana investasi
- 3) Peningkatan kapasitas kelembagaan UKM dengan menumbuhkan penggunaan teknologi informasi bagi UKM serta membangun kemitraan bisnis dengan Usaha Besar melalui inkubasi bisnis
- 4) Fasilitasi pemberian bantuan modal usaha tanpa jaminan bagi UKM dengan pola kemitraan dan pendampingan
- 5) Pengembangan kualitas destinasi wisata berbasis masyarakat
- 6) Pemanfaatan anjungan Kaltim sebagai pusat pelatihan ekonomi kreatif, etalase budaya dan promosi pariwisata kaltim
- 7) Optimalisasi peran Ekonomi Kreatif dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat

Berbagai Organisasi Perangkat Daerah memiliki program dan kegiatan yang sejalan untuk mendukung pencapaian target-target pada Tujuan 8 TPB. Berikut ini adalah program dan kegiatan sebagaimana secara lengkap tercantum pada Lampiran 1 Matriks Renaksi TPB Pilar Ekonomi Tujuan 8.

- 1) Program Kemudahan pelayanan dan percepatan proses perijinan
- 2) Program Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Koperasi dan UKM
- 3) Program pengembangan destinasi pariwisata
- 4) Program Pengembangan Industri dan Kelembagaan Pariwisata
- 5) Program Pengembangan Pemasaran dan Kerjasama Pariwisata
- 6) Program Pengembangan Karya Seni Budaya dan Pelaku Ekonomi Kreatif

Mengingat keterlibatan semua pemangku kepentingan dalam prinsip pelaksanaan TPB, organisasi nonpemerintah juga memiliki program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Tujuan 8 TPB sebagaimana termuat dalam matriks 2. Beberapa program dan kegiatan organisasi non-pemerintah tersebut, antara lain: Pembinaan seni budaya di akar rumput melalui pengabdian pada masyarakat, pengembangan dan pelestarian seni budaya, serta pengembangan desa wisata.

Target pencapaian indikator Tujuan 8 bisa dilihat pada tabel 95. Belum semua indikator TPB Tujuan 8 tercantum pada tabel tersebut. Program dan kegiatan pemerintah Tujuan 8 tercantum dalam Pilar Pembangunan Ekonomi - Matriks 1. Program dan kegiatan organisasi nonpemerintah Tujuan 8 tercantum dalam Pilar Pembangunan Ekonomi - Matriks 2. Program dan kegiatan organisasi pemerintah Kab/Kota sesuai RPJMD Tujuan 8 tercantum dalam Pilar Pembangunan Ekonomi - Matriks 3

Tabel 95 Target Pencapaian Indikator Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi

TUJUAN 8. PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI									
Kode In-dikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline	Target				
					2019	2020	2021	2022	2023
8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang									
8.1.1*	Laju pertumbuhan	BPS	%	0,6*(BPS 2018)	-	-	-	-	-

TUJUAN 8. PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI									
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline	Target				
					2019	2020	2021	2022	2023
	PDB per kapita								
8.1.1.(a)	PDB per kapita	BPS	%	174,882 *(BPS 2018)	-	-	-	-	-
8.2 Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya									
8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun	BPS, Disnaker	%		1,69	1,87	2,05	2,26	2,48
8.3 Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.									
8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor nonpertanian, berdasarkan jenis kelamin	BPS (sakernas), Disnaker	%	32,17	30,5	29	27,5	26,2	24,9
8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal	BPS (sakernas), Disnaker	%	59,91	62,9	66	69,35	72,82	76,46
8.3.1.(b)	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian	BPS (sakernas), Disnaker	%	69,02	68,32	67,64	66,97	66,30	65,63
8.3.1.(c)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan	BI, BPS, Perindag kop	%	21,31	22,51	23,71	24,91	26,11	27,31
8.5 Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.									
8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja	BPS (sakernas), Disnaker	Rupiah		31.880	33.792	35.819	37.968	40.246
8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur	BPS (sakernas), Disnaker	%	6,6	6,2	5,9	5,5	5,1	4,7
8.5.2.(a)	Persentase setengah pengangguran	BPS (sakernas), Disnaker	%	4,22	3,7	3,4	3,0	2,7	2,5
8.6 Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.									
8.6.1*	Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET)	BPS (sakernas), Disnaker	%	23,5	21,1	19	17,1	15,4	13,8
8.8 Melindungi hak-hak tenaga kerja dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi semua pekerja, termasuk pekerja migran, khususnya pekerja migran perempuan, dan mereka yang bekerja dalam pekerjaan berbahaya									
8.8.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3.	Disnakertrans		68	78	90	105	120	135
8.9 Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.									
8.9.1*	Proporsi kontribusi	Dinas Pariwisata	%	0,93	0,95	0,97	0,99	1,01	1,03

TUJUAN 8. PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI									
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline	Target				
					2019	2020	2021	2022	2023
	pariwisata terhadap PDB								
8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara	Dinas Pariwisata	Juta Orang	28.000	55.500	55.500	56.000	56.000	56.500
8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	Dinas Pariwisata	Juta Orang	1.300.000	5.500.000	6.000.000	6.500.000	7.000.000	7.500.000
8.9.1.(c)	Jumlah devisa sektor pariwisata	Dinas Pariwisata, BPS (statistik pariwisata)	Triliun Rupiah	4,962	5	5,3	5,5	5,8	6
8.9.2*	Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja	BPS (Nesparna) Pariwisata	%	5,01	5,2	5,4	5,5	5,8	6
8.10 Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.									
8.10.1*	a. Jumlah ATM per 100.000 penduduk dewasa	Bank Indonesia (SSKI)	unit	-	-	-	-	-	-
8.10.1*	b. Jumlah kantor bank per 100.000 penduduk dewasa	Bank Indonesia (SSKI)	unit	-	-	-	-	-	-
8.10.1.(a)	Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum)	BPS (podes), BI	Km	-	-	-	-	-	-
08.10.1.(b)	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit	BI (data UMKM) (Bu Sri Heri)	%	26,71	-	-	-	-	-

3.9. Tujuan 9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur

Tujuan 9 bertujuan untuk membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi, Target-target dari Tujuan 9 meliputi pengembangan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan dan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil terhadap jasa keuangan, meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri agar dapat berkelanjutan, memperkuat riset ilmiah, meningkatkan kapabilitas teknologi sektor industri, mendorong inovasi, dan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, serta mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet. Adapun indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian 6 target Tujuan 9 berjumlah 17 sebagaimana tertera pada tabel 96.

Sejalan dengan pelaksanaan RPJMD 2019-2023, kebijakan pencapaian Tujuan 9 TPB yang berkaitan dengan peningkatan fungsi pelayanan infrastruktur dasar perhubungan, penguatan konektivitas antar daerah dan kawasan, serta peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditi unggulan daerah.

Untuk membangun infrastruktur dan konektivitas, arah kebijakan RPJMD 2019-2023 yang selaras dengan tujuan TPB tersebut di antaranya:

- 1) Optimalisasi pengadaan infrastruktur perhubungan, khususnya infrastruktur pelayaran
- 2) Peningkatan keselamatan lalu lintas angkutan jalan
- 3) Peningkatan keterhubungan daerah terpencil dengan infrastruktur dan pelayanan dasar kehidupan
- 4) Peningkatan keterhubungan daerah-daerah yang memiliki pertumbuhan signifikan
- 5) Peningkatan keterhubungan sentra-sentra produksi dan daerah tertinggal dengan pusat-pusat pertumbuhan daerah.

Untuk mempromosikan industri yang inklusif dan berkelanjutan serta meningkatkan kontribusinya terhadap PDB, arah kebijakan RPJMD 2019- 2023 yang selaras dengan tujuan TPB tersebut di antaranya:

- 1) Integrasi proses hulu-hilir industri pengolahan, khususnya pertanian, migas dan pertambangan
- 2) Pengembangan industri hilir pertanian dalam arti luas
- 3) Pengembangan skala ekonomi untuk meningkatkan ekspor
- 4) Pengembangan sistem perizinan yang terintegrasi berbasis teknologi informasi
- 5) Peningkatan efektivitas pengendalian rencana investasi
- 6) Peningkatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta daya dukung dan daya tampung lingkungan
- 7) Peningkatan kualitas lingkungan hidup dengan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan

Program dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka pencapaian Tujuan 9 TPB, sebagaimana yang terlampir pada matriks, antara lain adalah:

- 1) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
- 2) Program Pengembangan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
- 3) Program Pembangunan Prasarana Transportasi Laut dan SDP
- 4) Program Pengendalian Pelaksanaan Investasi
- 5) Program Peningkatan dan Pengembangan Industri
- 6) Program Tata Lingkungan

Target pencapaian indikator Tujuan 9 bisa dilihat pada tabel 96. Belum semua indikator TPB Tujuan 9 tercantum pada tabel tersebut. Program dan kegiatan pemerintah Tujuan 9 tercantum dalam Pilar Pembangunan Ekonomi - Matriks 1. Program dan kegiatan organisasi nonpemerintah Tujuan 9 tercantum dalam Pilar Pembangunan Ekonomi - Matriks 2. Program dan kegiatan organisasi pemerintah Kab/Kota sesuai RPJMD Tujuan 9 tercantum dalam Pilar Pembangunan Ekonomi - Matriks 3

Tabel 96. Target Pencapaian Indikator Tujuan 9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur

TUJUAN 9. INDUSTRI, INOVASI DAN INFRASTRUKTUR									
KODE INDIKATOR	NAMA INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	BASE LINE	TARGET				
					2019	2020	2021	2022	2023
9.1 Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.									
9.1.1.(a)	Kondisi mantap jalan provinsi	PUPR	%	52,85	54,3	58,88	63,46	68,04	72,62
9.1.1.(b)	Panjang pembangunan jalan tol.	PUPR	Km	0	99,02	99,02	99,02	99,02	99,02
9.1.1.(c)	Panjang jalur kereta api.	PUPR	Km	-	-	-	-	-	-

TUJUAN 9. INDUSTRI, INOVASI DAN INFRASTRUKTUR									
KODE INDIKATOR	NAMA INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	BASE LINE	TARGET				
					2019	2020	2021	2022	2023
9.1.2.(a)	Jumlah bandara.	DISHUB	unit	9	9	9	9	10	11
9.1.2.(b)	Jumlah dermaga penyeberangan	DISHUB	unit	6	6	6	6	6	6
9.1.2.(c)	Jumlah pelabuhan strategis.	DISHUB	lokasi	14	14	14	14	14	14
9.2 Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.									
9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri pengolahan non migas terhadap PDB dan perkapita.	Perindag kop	%	7,23	7,50	8,21	8,50	8,96	9,10
9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB industri pengolahan non migas.	Perindag kop	%	4,06	4,1	4,8	5,2	5,4	5,8
9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri pengolahan non migas.	Perindag kop	%	7,94	7,89	8,51	9,7	10,05	10,85
9.3 Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar.									
9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.	Perindag kop	%	100	12	13	14	15	16
9.3.2*	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.	Komite Kebijakan KUR	Rp (juta) Persen	21,31 %	22,51	23,71	24,91	26,11	27,31
9.4 Pada tahun 2030, meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri agar dapat berkelanjutan, dengan peningkatan efisiensi penggunaan sumberdaya dan adopsi yang lebih baik dari teknologi dan proses industri bersih dan ramah lingkungan, yang dilaksanakan semua negara sesuai kemampuan masing-masing.									
9.4.1*	Rasio Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca dengan nilai tambah sektor industri manufaktur.	Perindag kop	%	52,02	51	50,98	49,46	48,94	47,42
9.4.1.(a)	Persentase Perubahan Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca.	DLH	%	7,2	26,3	26,9	27,7	28,5	29,3
9.5 Memperkuat riset ilmiah, meningkatkan kapabilitas teknologi sektor industri di semua negara, terutama negara-negara berkembang, termasuk pada tahun 2030, mendorong inovasi dan secara substansial meningkatkan jumlah pekerja penelitian dan pengembangan per 1 juta orang dan meningkatkan pembelanjaan publik dan swasta untuk penelitian dan pengembangan.									
9.5.1*	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB.	BALITBA (NGDA)	%	0,000 0059 (Berdasarkan PDRB ADHB 2018)	0,0000 074	0,0000 313	0,0000 470	0,0000 627	0,0000 784
9.c Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020.									
9.c.1*	Proporsi penduduk yang terlayani <i>mobile broadband</i> .	Diskom-info	%	90,91	92	95	97	98	99
9.c.1.(a)	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	Diskom-info	%	77,14	80	81	82	83	84
9.c.1.(b)	Proporsi individu	Diskom-	%	59,43	60	61	62	63	64

TUJUAN 9. INDUSTRI, INOVASI DAN INFRASTRUKTUR									
KODE INDIKATOR	NAMA INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	BASE LINE	TARGET				
					2019	2020	2021	2022	2023
	yang menggunakan Internet.	info							

3.10. Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan

Tujuan 10 yaitu “mengurangi kesenjangan intra- dan antarnegara” terdiri dari 5 target dan 14 indikator. Target-target dari Tujuan 10 meliputi mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional, memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta memfasilitasi migrasi dan mobilitas manusia yang teratur, aman, berkala dan bertanggung jawab. Adapun indikator-indikator yang digunakan tertera pada tabel 97.

Arah Kebijakan Tujuan 10 TPB, adalah:

- 1) Peningkatan kapasitas BUMDES untuk meningkatkan ekonomi desa
- 2) Optimalisasi penggunaan dana desa untuk pembangunan desa
- 3) Pembinaan kapasitas aparatur pemerintahan desa dalam membangun desa berkualitas
- 4) Penguatan ketangguhan desa dalam menghadapi bencana dan perubahan iklim.
- 5) Pengembangan Demokrasi di Daerah

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah antara lain:

- 1) Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan
- 2) Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan
- 3) Program Pembangunan Desa dan Kawasan
- 4) Program Kampung Iklim +
- 5) Program pendidikan politik masyarakat

Selain melalui program Organisasi Perangkat Daerah, terdapat program yang dilakukan oleh organisasi nonpemerintah yang diakomodasi sebagai bagian dari upaya untuk mencapai tujuan tersebut, yaitu: Penguatan Kampung Iklim+, Penguatan Rencana Tata Ruang Wilayah Desa dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa.

Target pencapaian indikator Tujuan 10 bisa dilihat pada tabel 97. Belum semua indikator TPB Tujuan 10 tercantum pada tabel tersebut. Program dan kegiatan pemerintah Tujuan 10 tercantum dalam Pilar Pembangunan Ekonomi - Matriks 1. Program dan kegiatan organisasi nonpemerintah Tujuan 10 tercantum dalam Pilar Pembangunan Ekonomi - Matriks 2. Program dan kegiatan organisasi pemerintah Kab/Kota sesuai RPJMD Tujuan 10 tercantum dalam Pilar Pembangunan Ekonomi - Matriks 3.

Tabel 60. Target Pencapaian Indikator Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan

TUJUAN 10. BERKURANGNYA KESENJANGAN									
KODE INDIKATOR	NAMA INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	BASELINE	TARGET				
					2019	2020	2021	2022	2023
10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.									
10.1.1*	Koefisien Gini.	BPS	index	0,342	0,33	0,329	0,328	0,327	0,326

TUJUAN 10. BERKURANGNYA KESENJANGAN									
KODE INDIKATOR	NAMA INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	BASELINE	TARGET				
					2019	2020	2021	2022	2023
				(September)					
10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan provinsi, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	BPS, Dinsos	% (Rp/kapita/bulan)	6,03 574.704	-	-	-	-	-
10.1.1.(b)	Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan.	DPMPD	Kab	4	4	4	4	4	4
10.1.1.(c)	Jumlah desa tertinggal	DPMPD	desa	381	503	478	448	413	368
10.1.1.(d)	Jumlah desa mandiri	DPMPD	desa	-	10	13	16	19	22
10.1.1.(e)	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal.	BPS, DPMPD Bappeda	%	3,5 ± 1	3,5 ± 1	3,5 ± 1	3,5 ± 1	3,5 ± 1	3,5 ± 1
10.1.1.(f)	Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal.	BPS, DPMPD BAPPE-DA	%	11,62	9,8	9,5	9	7	5
10.2 Pada tahun 2030, memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, difabilitas, ras, suku, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya.									
10.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.	Susenas BPS BAPPE-DA	%	-	-	-	-	-	-
10.3 Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.									
10.3.1.(a)	Aspek Kebebasan Sipil dalam Indeks Demokrasi Indonesia	Kesbang-pol	indeks	90,99	91,5	92,0	92,5	93,0	93,5
10.3.1.(d)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelanggaran pelanggaran diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	Kemenkumham	kebijakan / dokumen	-	-	-	-	-	-
10.4 Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.									
10.4.1.(a)	Persentase rencana anggaran untuk belanja fungsi perlindungan sosial pemerintah daerah	BAPPE-DA	5						
10.4.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	BPJS	Formal	520.496	587.120	693.917	830.137	-	-

3.11. Tujuan 11 Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan

Tujuan 11 TPB adalah menjadikan kota dan pemukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan. Dalam rangka mencapai tujuan kota dan permukiman yang berkelanjutan pada tahun 2030, ditetapkan 8 target yang diukur melalui 21 indikator. Target-target tersebut antara lain meliputi pembangunan kota yang terpadu, infrastruktur dan pelayanan perkotaan, serta risiko bencana dan perubahan iklim di perkotaan. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan pada kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah maupun organisasi non-pemerintah.

Kebijakan pembangunan nasional untuk Tujuan 11 TPB seperti yang tercantum di dalam RPJMD 2019-2023 meliputi:

- 1) Pemberian bantuan stimulant perumahan swadaya bagi keluarga pra sejahtera dan kawasan kumuh
- 2) Pembinaan dan pendampingan dalam penerapan sanitasi sehat
- 3) Peningkatan kapasitas kelembagaan dan keterampilan masyarakat dalam pengurangan risiko bencana
- 4) Peningkatan kualitas lingkungan hidup dengan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan

Berdasarkan arah kebijakan yang disusun dalam rangka pencapaian Tujuan 11 TPB, program yang akan dilaksanakan Organisasi Perangkat Daerah antara lain:

- 1) Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman
- 2) Program Pengembangan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
- 3) Program Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana
- 4) Program Pencegahan dan kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Daerah
- 5) Program Pengelolaan Sampah dan Limbah B3

Target pencapaian indikator Tujuan 11 bisa dilihat pada tabel 98. Belum semua indikator TPB Tujuan 11 tercantum pada tabel tersebut. Program dan kegiatan pemerintah Tujuan 11 tercantum dalam Pilar Pembangunan Lingkungan Hidup - Matriks 1. Program dan kegiatan organisasi nonpemerintah Tujuan 11 tercantum dalam Pilar Pembangunan Lingkungan Hidup - Matriks 2. Program dan kegiatan organisasi pemerintah Kab/Kota sesuai RPJMD Tujuan 11 tercantum dalam Pilar Pembangunan Lingkungan Hidup - Matriks 3.

Tabel 98. Target Pencapaian Indikator Tujuan 11. Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan

TUJUAN 11. KOTA DAN PEMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN									
KODE INDIKATOR	NAMA INDIKATOR	SUMBER DATA	SATU AN	BASELINE	TARGET				
					2019	2020	2021	2022	2023
Target 11.1 Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh									
11.1.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	PUPR (Koordinasi dengan Pusat)	%	98,11 (BPS 2017)	-	-	-	-	-
11.1.1.(b)	Jumlah kawasan perkotaan metropolitan yang terpenuhi standar pelayanan perkotaan (SPP).	PUPR (Belum masuk Metropolitan)	Kawasan perkotaan metropolitan	-	-	-	-	-	-
11.1.1.(c)	Jumlah kota sedang dan kota baru yang terpenuhi SPP.	PUPR	Kota sedang dan baru	3	3	3	3	4	5
Target 11.2 Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang difabilitas dan orang tua.									
11.2.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	DLH	%	75,9	78,5	75,6	74	73	73
11.2.1.(b)	Jumlah sistem angkutan rel yang dikembangkan di kota besar.	DISHUB	Kota besar	0	0	0	3	3	3
Target 11.3 Pada tahun 2030, memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara.									
11.3.1.(a)	Jumlah kota sedang di luar Jawa yang diarahkan sebagai pengendali (<i>buffer</i>) arus urbanisasi dan sebagai pusat	PUPR (Pusat)	Kota sedang	-	-	-	-	-	-

TUJUAN 11. KOTA DAN PEMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN									
KODE INDIKATOR	NAMA INDIKATOR	SUMBER DATA	SATU AN	BASELINE	TARGET				
					2019	2020	2021	2022	2023
	pertumbuhan utama.								
11.3.1.(b)	Jumlah Metropolitan baru di luar Jawa sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN).	PUPR (Pusat)	Metropolitan Baru	-	-	-	-	-	-
11.3.2.(a)	Rata-rata institusi yang berperan secara aktif dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Kota Berkelanjutan.	Bappeda	PM	1	2	2	2	2	2
11.3.2.(b)	Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur.	PUPR (Koordinasi SATKER)	PM	-	-	-	-	-	-
Target 11.4 Mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia.									
11.4.1.(a)	Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil.	PUPR	Kota Pusaka		1	1	1	1	1
Target 11.5 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan									
11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	BPBD	Orang	0,03	0	0	0	0	0
11.5.1.(a)	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).	BPBD (Pusat) INARIS	Indeks	165	0	0	0	0	0
11.5.1.(b)	Jumlah kota tangguh bencana yang terbentuk.	BPBD INARIS BMKG	Kota Tangguh	1	1	8	-	-	-
11.5.1.(c)	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.	BPBD	sistem peringatan dini	1	1	1	1	1	1
11.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	BPBD	Rupiah	-	-	-	-	-	-
Target 11.6 Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.									
11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	DLH	%	60,85	61	62	63	64	65
11.6.1.(b)	Jumlah kota hijau yang mengembangkan dan menerapkan <i>green waste</i> di kawasan perkotaan metropolitan.	PUPR & DLH (Pusat)	Kota hijau	0	0	0	0	0	0
Target 11.7 Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas.									
11.7.1.(a)	Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang.	PUPR	Kawasan perkotaan metropolitan/kota sedang	3	3	3	4	4	4
Target 11.b Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030.									
11.b.1*.	Proporsi pemerintah kota yang memiliki dokumen strategi pengurangan risiko bencana.	BPBD	%	10	30	40	100	100	100
11.b.2*.	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	BPBD	Dokumen	1	3	4	10	10	10

3.12. Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab

Tujuan 12 TPB adalah menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan. Dalam rangka mencapai tujuan konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab pada tahun 2030, ditetapkan 3 target yang diukur melalui 7 indikator.

Kebijakan Tujuan 12 adalah Peningkatan kualitas lingkungan hidup dengan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Program yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah adalah Program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, dan Program Pengelolaan Sampah dan Limbah B3.

Selain melalui program Organisasi Perangkat Daerah, terdapat program yang dilakukan oleh organisasi nonpemerintah yang diakomodasi sebagai bagian dari upaya untuk mencapai tujuan tersebut, yaitu: pemanfaatan POME, road map waste management, perkebunan berkelanjutan dan pengelolaan hutan produksi lestari.

Target pencapaian indikator Tujuan 12 bisa dilihat pada tabel 99. Belum semua indikator TPB Tujuan 12 tercantum pada tabel tersebut. Program dan kegiatan pemerintah Tujuan 12 tercantum dalam Pilar Pembangunan Lingkungan Hidup - Matriks 1. Program dan kegiatan organisasi nonpemerintah Tujuan 12 tercantum dalam Pilar Pembangunan Lingkungan Hidup - Matriks 2. Program dan kegiatan organisasi pemerintah Kab/Kota sesuai RPJMD Tujuan 12 tercantum dalam Pilar Pembangunan Lingkungan Hidup- Matriks 3.

Tabel 99. Target Pencapaian Indikator Tujuan 12. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab

TUJUAN 12. KONSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERTANGGUNG JAWAB									
KODE INDIKATOR	NAMA INDIKATOR	SUMBER	SATUAN	BASELINE	TARGET				
					2019	2020	2021	2022	2023
Target 12.4 Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.									
12.4.1.(a)	Jumlah peserta Proper yang mencapai minimal ranking BIRU.	DLH	peserta proper	196	180	180	180	180	180
12.4.2.(a)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	DLH	juta ton	3.867,47	11.000	12.000	13.000	14.000	14.000
Target 12.5 Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.									
12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	DLH	Juta ton	10	11	12	13	14	15
12.6.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.	DLH	perusahaan	-	-	-	-	-	-
12.7.1.(a)	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.	DLH	produk ramah lingkungan	-	-	-	-	-	-

TUJUAN 12. KONSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERTANGGUNG JAWAB									
KODE INDIKATOR	NAMA INDIKATOR	SUMBER	SATUAN	BASELINE	TARGET				
					2019	2020	2021	2022	2023
12.8.1.(a)	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.	DLH	Fasilitas Publik	-	-	-	-	-	-

3.13. Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim

Tujuan 13 TPB adalah mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim. Dalam rangka mencapai tujuan penanganan perubahan iklim pada tahun 2030, ditetapkan 2 target yang diukur melalui 4 indikator. Target-target tersebut terdiri dari pengurangan risiko bencana (PRB), pengurangan korban akibat bencana, serta adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

Kebijakan dalam rangka mendukung Tujuan 13 TPB, Pengendalian Perubahan Iklim (Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya, telah tertuang dalam RPJMD 2019-2023, diantaranya adalah: pengembangan kebun rakyat di lahan cadangan karbon rendah melalui kemitraan, pengelolaan areal perkebunan yang bernilai konservasi tinggi.

Selanjutnya, khusus untuk penanggulangan bencana, arah kebijakan dalam RPJMD 2019-2023 adalah untuk mengurangi risiko bencana dan meningkatkan ketangguhan pemerintah daerah dan masyarakat dalam menghadapi bencana. Kebijakan operasional untuk penanggulangan bencana meliputi: Peningkatan kapasitas kelembagaan dan keterampilan masyarakat dalam pengurangan risiko bencana.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), telah dipetakan program dan kegiatan terkait berdasarkan matriks bidang pembangunan, rencana strategis Organisasi Perangkat Daerah terkait, atau dokumen lain yang relevan.

Berdasarkan arah kebijakan yang disusun dalam rangka pencapaian Tujuan 13 TPB, program yang akan dilaksanakan Organisasi Perangkat Daerah antara lain:

- Program Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana
- Program Mitigasi Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Perkebunan
- Program Kebijakan Pengembangan Produksi Daerah

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi nonpemerintah melalui partisipasi pihak swasta/kalangan bisnis/filantropi/komunitas/LSM, telah dipetakan program dan kegiatan antara lain: Kampung Iklim+, sekolah hijau, perencanaan pembangunan rendah emisi, mitigasi perubahan iklim berbasis lahan, dan pembangunan rendah emisi.

Target pencapaian indikator Tujuan 13 bisa dilihat pada tabel 100. Belum semua indikator Tujuan 13 TPB tercantum pada tabel tersebut. Program dan kegiatan pemerintah Tujuan 13 tercantum dalam Pilar Pembangunan Lingkungan Hidup - Matriks 1. Program dan kegiatan organisasi nonpemerintah Tujuan 13 tercantum dalam Anak Lampiran III Pilar Pembangunan Lingkungan Hidup - Matriks 2. Program dan kegiatan organisasi pemerintah Kab/Kota sesuai RPJMD Tujuan 13 tercantum dalam Pilar Lingkungan Hidup - Matriks 3.

Tabel 61. Target Pencapaian Indikator Tujuan 13. Penanganan Perubahan Iklim

TUJUAN 13. PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM									
KODE INDIKATOR	NAMA INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	BASE LINE	TARGET				
					2019	2020	2021	2022	2023
Target 13.1 Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.									
13.1.1*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	BPBD	Dokumen	10	10	10	10	10	10
13.1.2*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	BPBD	orang	1	0,03	0	0	0	0
Target 13.2 Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional.									
13.2.1. (a)	Dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK).	DLH	Dokumen	1	1	1	1	1	1

3.14. Tujuan 14 Ekosistem Lautan

Tujuan 14 TPB adalah melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan. Dalam rangka mencapai tujuan ekosistem lautan pada tahun 2030, ditetapkan 7 target yang diukur melalui 9 indikator. Target-target tersebut terdiri dari mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan, mengatur pemanenan dan menghentikan penangkapan ikan yang berlebihan, melestarikan setidaknya 10 persen dari wilayah pesisir dan laut, melarang bentuk-bentuk subsidi perikanan tertentu yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebihan, menyediakan akses untuk nelayan skala kecil, dan meningkatkan pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan lautan dan sumber dayanya.

Tujuan 14 Ekosistem Lautan difokuskan pada dua arah kebijakan utama, yaitu: perlindungan dan pengelolaan zona konservasi kelautan dan perikanan, peningkatan kapasitas SDM pelaku usaha perikanan, dan peningkatan sarana prasarana perbenihan dan produksi perikanan.

Berdasarkan arah kebijakan yang selaras dengan pencapaian Tujuan 14 TPB, program yang akan dilaksanakan Organisasi Perangkat Daerah antara lain:

- 1) Program Pengelolaan Ruang Laut
- 2) Program Pengawasan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
- 3) Program pengembangan perikanan tangkap

Target pencapaian indikator Tujuan 14 bisa dilihat pada tabel 101. Belum semua indikator TPB Tujuan 14 tercantum pada tabel tersebut. Program dan kegiatan pemerintah Tujuan 14 tercantum dalam Pilar Pembangunan Lingkungan Hidup - Matriks 1. Program dan kegiatan organisasi nonpemerintah Tujuan 14 tercantum dalam Pilar Pembangunan Lingkungan Hidup - Matriks 2. Program dan kegiatan organisasi pemerintah Kab/Kota sesuai RPJMD Tujuan 14 tercantum dalam Pilar Lingkungan Hidup - Matriks 3.

Tabel 101. Target Pencapaian Indikator Tujuan 14 Ekosistem Laut

TUJUAN 14. EKOSISTEM LAUTAN									
KODE INDIKATOR	NAMA INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	BASE LINE	TARGET				
					2019	2020	2021	2022	2023
Target 14.2 Pada tahun 2020, mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan untuk menghindari dampak buruk yang signifikan, termasuk dengan memperkuat ketahanannya, dan melakukan restorasi untuk mewujudkan lautan yang sehat dan produktif.									
14.2.1.(a)	Tersedianya kerangka	DKP	dokumen (PP)	-	-	-	1	1	1

TUJUAN 14. EKOSISTEM LAUTAN									
KODE INDIKATOR	NAMA INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	BASE LINE	TARGET				
					2019	2020	2021	2022	2023
	kebijakan, dan instrumen terkait penataan ruang laut nasional.								
14.2.1.(b)	Terkelolanya 11 wilayah pengelolaan perikanan (WPP) secara berkelanjutan.	DKP	WPP	2	2	2	2	2	2
Target 14.4 Pada tahun 2020, secara efektif mengatur pemanenan dan menghentikan penangkapan ikan yang berlebihan, penangkapan ikan ilegal dan praktek penangkapan ikan yang merusak, serta melaksanakan rencana pengelolaan berbasis ilmu pengetahuan, untuk memulihkan persediaan ikan secara layak dalam waktu yang paling singkat yang memungkinkan, setidaknya ke tingkat yang dapat memproduksi hasil maksimum yang berkelanjutan sesuai karakteristik biologisnya.									
14.4.1*	Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman.	DKP	% (target dibagi msy)	80	80	80	80	80	80
Target 14.5 Pada tahun 2020, melestarikan setidaknya 10 persen dari wilayah pesisir dan laut, konsisten dengan hukum nasional dan internasional dan berdasarkan informasi ilmiah terbaik yang tersedia.									
14.5.1*	Jumlah luas kawasan konservasi perairan.	DKP	HA	322.948,17	290.387,38	290.387,38	290.700,33	290.700,33	322.948,17
Target 14.6 Pada tahun 2020, melarang bentuk-bentuk subsidi perikanan tertentu yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebihan, menghilangkan subsidi yang berkontribusi terhadap penangkapan ikan ilegal, yang tidak dilaporkan & tidak diatur dan menahan jenis subsidi baru, dengan mengakui bahwa perlakuan khusus dan berbeda yang tepat dan efektif untuk negara berkembang & negara kurang berkembang harus menjadi bagian integral dari negosiasi subsidi perikanan pada the World Trade Organization.									
14.6.1.(a)	Persentase kepatuhan pelaku usaha.	DKP	%	33,60	34,27	34,95	35,64	36,36	37,08
Target 14.b Menyediakan akses untuk nelayan skala kecil (small-scale artisanal fishers) terhadap sumber daya laut dan pasar									
14.b.1*	Ketersediaan kerangka hukum/ regulasi/ kebijakan/ kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil.	DKP	regulasi/ kebijakan	4	3	4	4	4	4
14.b.1.(a)	Jumlah provinsi/ Kabupaten dengan peningkatan akses pendanaan usaha nelayan.	DKP	lokasi	8	9	10	10	10	10
14.b.1 (b)	Jumlah nelayan yang terlindungi.	DKP	orang	876	3.300	3.350	3.400	3.450	3.500
Target 14.c Meningkatkan pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan lautan dan sumber dayanya dengan menerapkan hukum internasional yang tercermin dalam the United Nations Convention on the Law of the Sea, yang menyediakan kerangka hukum untuk pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan lautan dan sumber dayanya, seperti yang tercantum dalam ayat 158 dari "The future we want".									
14.c.1*	Tersedianya kerangka kebijakan dan instrumen terkait pelaksanaan UNCLOS (the United Nations Convention on the Law of the Sea).	DKP	Pergub	0	0	2	3	3	4

3.15. Tujuan 15 Ekosistem Daratan

Tujuan 15 TPB adalah melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati. Dalam rangka mencapai tujuan ekosistem daratan pada tahun 2030, ditetapkan 8 target yang diukur melalui 12 indikator.

Kebijakan pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan yang tercantum dalam RPJMD 2019-2023 terdiri dari peningkatan produksi dan produktivitas komoditas kehutanan, pemulihan kawasan hutan yang terdegradasi dan terdeforestasi, dan peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Berdasarkan arah kebijakan yang selaras dengan pencapaian Tujuan 15 TPB, program yang akan dilaksanakan perangkat daerah antara lain: Program Pengelolaan DAS dan RHL, Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBH DR).

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi nonpemerintah melalui partisipasi pihak swasta/kalangan bisnis/filantropi/komunitas/LSM, telah dipetakan program dan kegiatan antara lain: perhutanan sosial, Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Pengembangan pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu, serta Rehabilitasi dan Restorasi Hutan.

Target pencapaian indikator Tujuan 15 bisa dilihat pada tabel 102. Belum semua indikator Tujuan 15 TPB tercantum pada tabel tersebut. Program dan kegiatan pemerintah Tujuan 15 tercantum dalam Pilar Pembangunan Lingkungan Hidup - Matriks 1. Program dan kegiatan organisasi nonpemerintah Tujuan 15 tercantum dalam Pilar Pembangunan Lingkungan Hidup - Matriks 2. Program dan kegiatan organisasi pemerintah Kab/Kota sesuai RPJMD Tujuan 15 tercantum dalam Pilar Pembangunan Lingkungan Hidup - Matriks 3.

Tabel 62. Target Pencapaian Indikator Tujuan 15. Ekosistem Daratan

TUJUAN 15. EKOSISTEM DARATAN									
KODE INDIKATOR	NAMA INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	BASELINE	TARGET				
					2019	2020	2021	2022	2023
Target 15.1 Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.									
15.1.1.(a)	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.	Dishut	%	51,06	50,56	50,06	49,56	49,06	48,56
Target 15.2 Pada tahun 2020, meningkatkan pelaksanaan pengelolaan semua jenis hutan secara berkelanjutan, menghentikan deforestasi, merestorasi hutan yang terdegradasi dan meningkatkan secara signifikan forestasi dan reforestasi secara global.									
15.2.1.(a)	Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisinya.	BKSDA BNKT BKSDA BTNK	Ha	9000	10000	11000	12000	14000	14000
15.2.1.(b)	Luas usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem.	dishut	Ha	86.450	86.450	86.450	86.450	86.450	86.450
15.2.1.(c)	Jumlah kawasan konservasi yang memperoleh nilai indeks METT minimal 70%.	Dishut/BKSDA Kaltim	unit	2	3	4	5	6	7
15.2.1.(d)	Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan.	dishut	Unit	8 + 1	20 + 1	20 + 1	20 + 1	20 + 1	20 + 1
Target 15.3 Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi.									
15.3.1.(a)	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.	Dishut	Ha		0,30	0,3	0,3	0,3	0,3
Target 15.7 Melakukan tindakan cepat untuk mengakhiri perburuan dan perdagangan jenis flora dan fauna yang dilindungi serta mengatasi permintaan dan pasokan produk hidupan liar secara ilegal									
15.7.1.(b)	Jumlah penambahan spesies satwa liar dan tumbuhan alam yang dikembangbiakan pada lembaga	BKSDA	Spesies	-	2	2	2	2	2

TUJUAN 15. EKOSISTEM DARATAN									
KODE INDIKATOR	NAMA INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	BASELINE	TARGET				
					2019	2020	2021	2022	2023
	konservasi.								
Target 15.9 Mengintegrasikan nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati ke dalam perencanaan nasional dan daerah, proses pembangunan, strategi dan penganggaran.									
15.9.1.(a)	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.	Dishut BKSDA (Danang)	dokumen	1	1	1	1	1	1

3.16. Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh

Tujuan 16 merupakan tujuan yang menjadi prasyarat utama dalam pencapaian seluruh tujuan dalam Pembangunan Berkelanjutan. Tujuan 16 berupaya menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai (Peace), terwujudnya penegakan keadilan (Justice) dengan menyediakan akses keadilan untuk semua, serta membangun institusi yang tangguh (Strong institutions). Tujuan 16 memiliki 9 target dengan 34 indikator TPB yang ingin dicapai pada tahun 2030.

Dalam rangka untuk mencapai Tujuan 16 arah kebijakan berdasarkan RPJMD 2019-2023 yang selaras adalah: pengembangan demokrasi di daerah, peningkatan pengamalan nilai-nilai agama dan nilai budaya dalam kurikulum Pendidikan sebagai muatan lokal.

Target pencapaian indikator Tujuan 16 bisa dilihat pada tabel 103. Belum semua indikator Tujuan 16 TPB tercantum pada tabel tersebut. Program dan kegiatan pemerintah Tujuan 16 tercantum dalam Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola - Matriks 1. Program dan kegiatan organisasi non-pemerintah Tujuan 16 tercantum dalam Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola - Matriks 2. Program dan kegiatan organisasi pemerintah Kab/Kota sesuai RPJMD Tujuan 16 tercantum dalam Pilar Hukum dan Tata Kelola - Matriks 3.

Tabel 63. Target Pencapaian Indikator Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh

TUJUAN 16. PERDAMAIAN, KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH									
KODE INDIKATOR	NAMA INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	BASELINE	TARGET				
					2019	2020	2021	2022	2023
1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan									
16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.	Polda, Kesbangpol	kasus		0	0	0	0	0
16.1.2.(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.	Polda, Kesbangpol	kematian /100.000 penduduk	0	0	0	0	0	0
16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	Polda, Kesbangpol	%	1,39 (BPS, 2017)	0	0	0	0	0
16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.	statistik kriminal (BPS)	%	55,42	100	100	100	100	100
16.3 Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua.									

TUJUAN 16. PERDAMAIAN, KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH									
KODE INDIKATOR	NAMA INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	BASELINE	TARGET				
					2019	2020	2021	2022	2023
16.2.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.	statistik kriminal (BPS)	%	0	0	0	0	0	0
16.2.1.(b)	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.	DKP3A	%	0,046	0,040	0,038	0,036	0,034	0,032
16.2.3.(a)	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	DKP3A, BPS	%	0,009	-	-	-	-	-
1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan									
16.3.1.(a)	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.	DKP3A, BPS	%	11,07	15	20	25	30	35
16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.									
16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).	BPS	indeks	-	-	-	-	-	-
16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	BPKAD, Bappeda	%	92	-	-	-	-	-
16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota)	Biro pemerintahan	%	90	90	100	100	100	100
16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	Biro pemerintahan	%	74,89	77,50	78	78,5	79	80
16.6.1.(c)	Persentase penggunaan <i>E-procurement</i> terhadap belanja pengadaan.	Biro pemerintahan	%	63	64,95	65,5	67	70	75
16.6.1.(d)	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	Biro pemerintahan	%	-	-	-	-	-	-
16.6.2.(a)	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU	Biro pemerintahan	%	-	-	-	-	-	-

TUJUAN 16. PERDAMAIAN, KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH									
KODE INDIKATOR	NAMA INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	BASELINE	TARGET				
					2019	2020	2021	2022	2023
	Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).								
1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan									
16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	DKP3A	%		9,09	9,09	9,09	9,09	9,09
16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	BKD	%	18%	18%	18%	18%	18%	18%
16.7.2.(a)	Indeks Lembaga Demokrasi.	BPS, kesbang-pol	indeks	68,72	72,22	72,72	73,22	73,72	74,22
16.7.2.(b)	Indeks Kebebasan Sipil.	BPS, Kesbang-pol	indeks	83,33	90,99	91,49	91,99	92,49	92,99
16.7.2.(c)	Indeks Hak-hak Politik.	BPS, kesbang-pol	indeks	67,18	61,38	61,88	62,38	62,88	63,38
16.9 Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.									
16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	Susenas (BPS), DKP3A	%	93,552	95	96	97	98	98
16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	Susenas (BPS), DKP3A	%	90,3	95	97	98	99	99
16.10 Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.									
16.10.2.(a)	Tersedianya Badan Publik yang menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Kominfo	%	50 % (KIP Kaltim)	60 %	70 %	80 %	90 %	100 %
16.10.2.(b)	Persentase penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi non litigasi.	Kominfo	%	94 % (KIP Kaltim)	95 %	96 %	97 %	98 %	99 %
16.10.2.(c)	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.	Kominfo	PPID	1	1	1	1	1	1
16.b Menggalakkan dan menegakkan undang-undang dan kebijakan yang tidak diskriminatif untuk pembangunan									

TUJUAN 16. PERDAMAIAN, KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH									
KODE INDIKATOR	NAMA INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	BASELI NE	TARGET				
					2019	2020	2021	2022	2023
berkelanjutan.									
16.b.1.(a)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	Kanwil Hukum dan HAM	Kebijakan/dokumen	-	-	-	-	-	-

3.17. Tujuan 17 Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan

Tujuan 17 pada dasarnya merupakan sarana pelaksanaan (means of implementation) dan merevitalisasi kemitraan global untuk mewujudkan seluruh Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Hal ini tercermin dari TPB 17 yang memiliki target dan indikator yang cukup luas dan beragam dengan 13 target global yang di Indonesia dijabarkan ke dalam 32 indikator.

Arah kebijakan RPJMD 2019-2023 yang selaras untuk mencapai target-target Tujuan 17 adalah: peningkatan pengawasan sumber-sumber penerimaan daerah dari hasil pengelolaan sumber daya alam, peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, serta peningkatan efektifitas pengendalian rencana investasi.

Program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah adalah:

- 1) Program Koordinasi Penerimaan Bukan Pajak
- 2) Program Koordinasi Pajak Daerah
- 3) Program Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan
- 4) Program Peningkatan Sinegritas Bidang Industri dan Jasa
- 5) Program Kebijakan Peningkatan Investasi Daerah, Tata Kelola dan Kinerja BUMD

Target pencapaian indikator Tujuan 17 bisa dilihat pada tabel 104. Belum semua indikator Tujuan 17 TPB tercantum pada tabel tersebut. Program dan kegiatan pemerintah Tujuan 17 tercantum dalam Pilar Pembangunan Ekonomi - Matriks 1. Program dan kegiatan organisasi nonpemerintah Tujuan 17 tercantum dalam Pilar Pembangunan Ekonomi - Matriks 2. Program dan kegiatan organisasi pemerintah Kab/Kota sesuai RPJMD Tujuan 17 tercantum dalam Pilar Pembangunan Ekonomi - Matriks 3.

Tabel 64. Target Pencapaian Indikator Tujuan 17 Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan

TUJUAN 17. KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN									
KODE INDIKATOR	NAMA INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	BASELI NE	TARGET				
					2019	2020	2021	2022	2023
17.1 Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.									
17.1.1.*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	Bapenda	%	1,66	1,61	1,6	1,59	1,58	1,58
1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan									
17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	Bapenda	%	0,74%	0,67	0,71	0,71	0,71	0,71
17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	Bapenda	%	92,83%	41,90%	45,40%	46,47%	49,56%	49,91%
17.3 Memobilisasi tambahan sumber daya keuangan untuk negara berkembang dari berbagai macam sumber.									

TUJUAN 17. KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN									
KODE INDIKATOR	NAMA INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	BASELINE	TARGET				
					2019	2020	2021	2022	2023
17.3.2.(a)	Proporsi volume remitansi TKI (dalam US dollars) terhadap PDB.	BI	%	-	-	-	-	-	-
17.6 Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global.									
17.4.1*	Proporsi pembayaran utang dan bunga (<i>Debt Service</i>) terhadap ekspor barang dan jasa.	BI	%	-	-	-	-	-	-
Target 17.6. Meningkatkan kerjasama utara-selatan, selatan-selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasarkan kesepakatan timbal balik.									
17.6.1.(a)	Jumlah kegiatan saling berbagi pengetahuan dalam kerangka Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular		kegiatan	-	-	-	-	-	-
17.6.2.(a)	Persentase jaringan tulang punggung serat optik nasional yang menghubungkan Ibukota Kabupaten/Kota (IKK).	Diskom-info	%	60	65	70	75	80	85
17.6.2.(b)	Tingkat penetrasi akses tetap pita lebar (<i>fixed broadband</i>) di Perkotaan dan di Perdesaan.	Diskom-info	%	50,09	51	52	53	54	55
17.6.2.(c)	Proporsi penduduk terlayani <i>mobile broadband</i>	Diskom-info	%	90,91	92	95	96	97	98
17.8 Mengoperasionalkan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi.									
17.8.1*	Proporsi individu yang menggunakan internet.	Diskom-info	%	42,14	60	65	70	75	80
17.8.1.(a)	Persentase kabupaten 3T yang terjangkau layanan akses telekomunikasi universal dan internet.	Diskom-info	%	30	35	40	45	50	55
17.10 Menggalakkan sistem perdagangan multilateral yang universal, berbasis aturan, terbuka, tidak diskriminatif dan adil di bawah the World Trade Organization termasuk melalui kesimpulan dari kesepakatan di bawah Doha Development Agenda.									
17.10.1.(a)	Rata-rata tarif terbobot di negara mitra <i>Free Trade Agreement</i> (FTA) (6 negara).		rata-rata tarif terbobot	-	-	-	-	-	-
17.17 Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama.									
17.17.1.(a)	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	Biro ekonomi, BPKAD, Bappeda	Dokumen daftar proyek KPBU	-	-	-	-	-	-
17.17.1.(b)	Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek,	Biro ekonomi, BPKAD,	alokasi	-	-	-	-	-	-

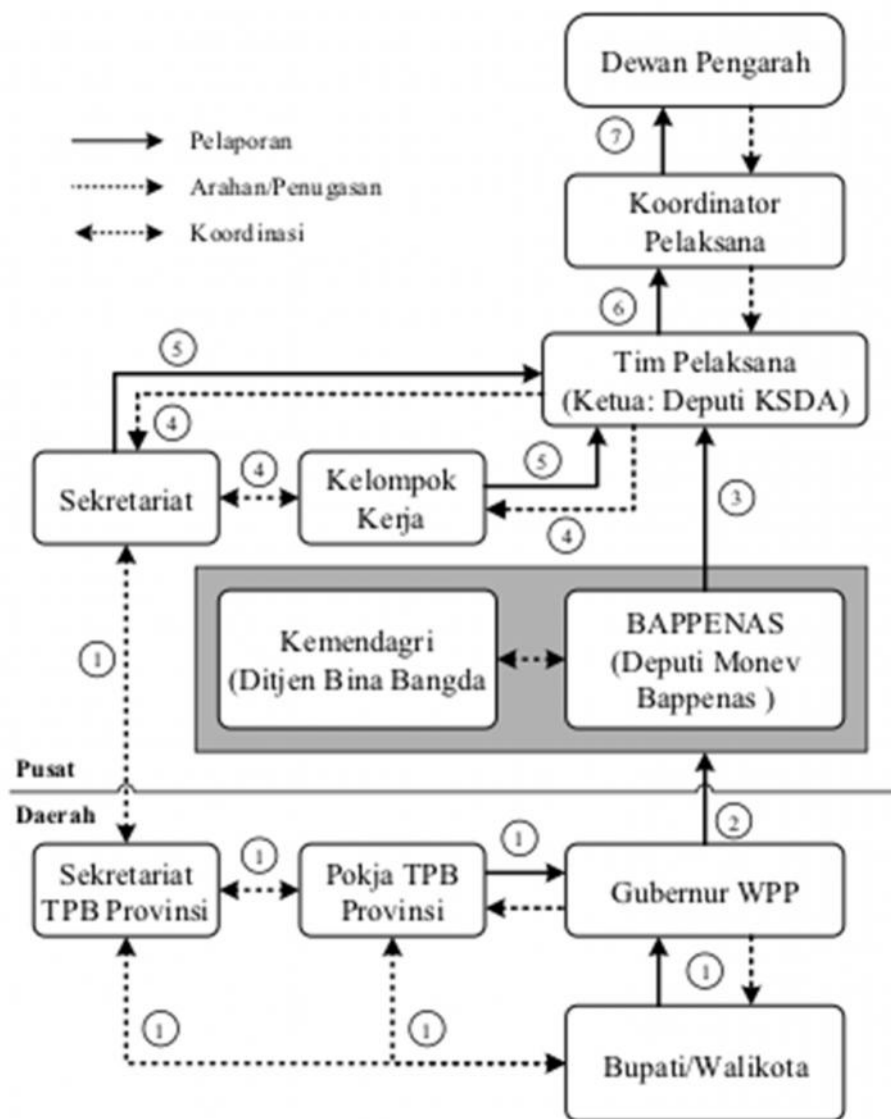
TUJUAN 17. KEMITRAAN UNTUK MENCAIPI TUJUAN									
KODE INDIKATOR	NAMA INDIKATOR	SUMBER DATA	SATUAN	BASELINE	TARGET				
					2019	2020	2021	2022	2023
	transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	Bappeda							
17.18 Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.									
17.18.1.(a)	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik.	BPS	%	90	90				
17.18.1.(b)	Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama.	BPS	%	82	82				
17.18.1.(c)	Jumlah metadana kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa).	BPS	metadana	0	5				
17.18.1.(d)	Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target.	BPS	%	-	-	-	-	-	-
17.19 Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.									
17.19.2.(b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (<i>Vital Statistics Register</i>)	DKP3A	data registrasi	1	1	1	1	1	1
17.19.2.(c)	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui <i>website</i> .	BPS	pengunjung	52.000	52.000				
17.19.2.(d)	Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS).	BPS	%	85	85				

BAB IV. PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

4.1. Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi

4.1.1. Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Rencana Aksi Daerah

Amanat penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) dalam rangka pencapaian TPB dinyatakan dalam pasal 15 ayat 1 Perpres 59/2017. Dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah, Gubernur bekerja bersama Bupati/Walikota di wilayahnya masing-masing dan melibatkan organisasi kemasyarakatan, filantropi, pelaku usaha, akademisi, dan pihak-pihak terkait lainnya. Laporan pencapaian pelaksanaan Target TPB di tingkat daerah disampaikan oleh Gubernur setiap tahun kepada Menteri PPN/BAPPENAS selaku Koordinator Pelaksana TPB dan juga kepada Menteri Dalam Negeri sesuai pasal 17 ayat 2 Perpres No. 59/2017. Gubernur Kaltim juga telah membentuk Tim Koordinasi Daerah Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals Provinsi Kaltim Tahun 2019-2023 melalui SK Gubernur Kaltim No. 050/K.362/2019.



Gambar 17. . Alur informasi untuk pemantauan Rencana Aksi TPB

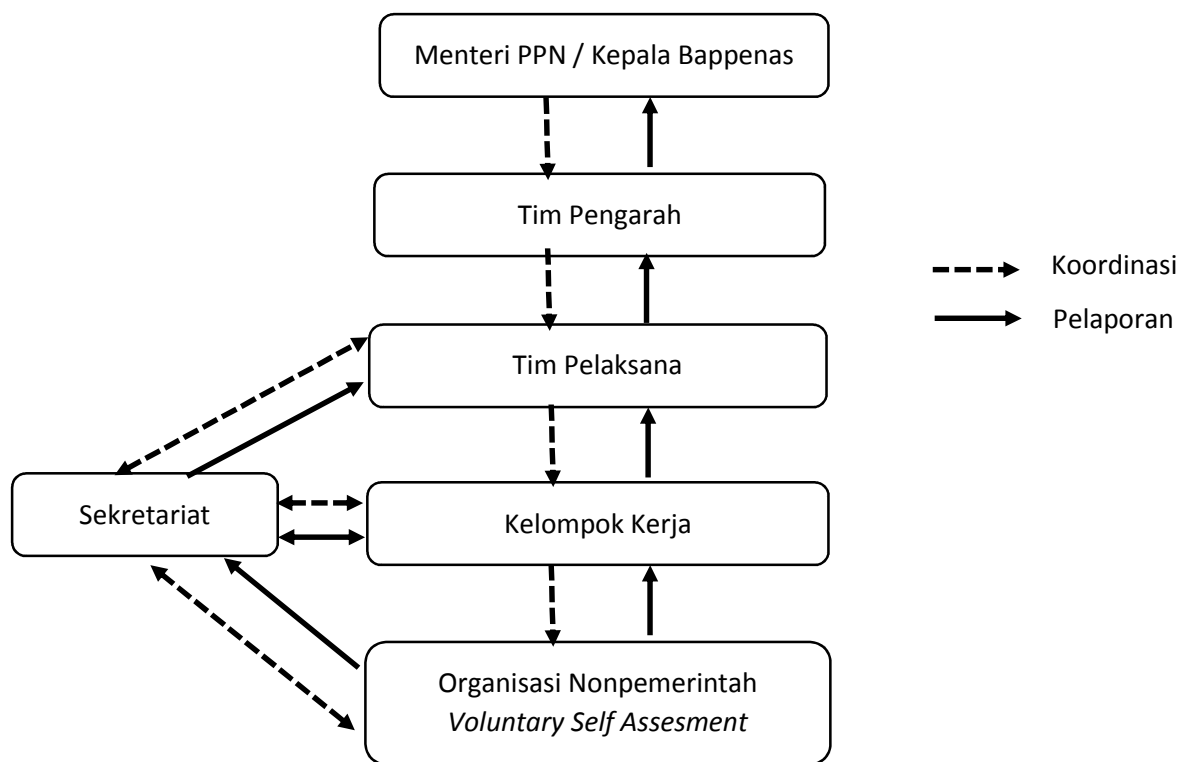
Alur pemantauan Rencana Aksi TPB mengikuti langkah-langkah (Gambar 4.1) sebagai berikut:

1. Kelompok Kerja yang dibantu Sekretariat TPB Provinsi setiap enam bulan sekali mengkoordinasikan pembahasan pencapaian RAD TPB tingkat provinsi (termasuk tingkat kabupaten, dan kota bila ada) yang memuat program dan kegiatan untuk mencapai setiap target dan indikator serta

- alokasi anggaran untuk menjalankan program/kegiatan. Kelompok Kerja yang dibantu Sekretariat TPB Provinsi melaporkan capaian RAD kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (WPP) dan ditembuskan kepada Sekretariat TPB pusat (Langkah 1).
2. Gubernur selaku WPP menyampaikan laporan kemajuan pencapaian TPB menggunakan format yang telah ditetapkan kepada Menteri PPN/BAPPENAS melalui Deputi bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Kementerian PPN/BAPPENAS, serta kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Langkah 2).
 3. Deputi bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Kementerian PPN/BAPPENAS menyerahkan laporan yang telah dikonsolidasikan kepada Tim Pelaksana melalui ketua tim pelaksana yang dalam hal ini Deputi bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/BAPPENAS (Langkah 3).
 4. Ketua Tim Pelaksana mengarahkan empat Kelompok Kerja untuk melakukan kajian atas laporan kemajuan yang disampaikan oleh Gubernur sebagai WPP dibantu oleh sekretariat SDGs (Langkah 4).
 5. Masing-masing Kelompok Kerja yang dibantu Sekretariat menyerahkan keseluruhan laporan dan hasil kajian kepada Ketua Tim Pelaksana (Langkah 5).
 6. Ketua Tim Pelaksana melaporkan hasil konsolidasi laporan dan kajian dari Pokja kepada Koordinator Pelaksana TPB Nasional (Langkah 6).
 7. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS selaku Koordinator Pelaksana melaporkan pencapaian atas pelaksanaan Target TPB tingkat daerah kepada Presiden selaku Ketua Dewan Pengarah sekali dalam (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan, sesuai pasal 17 ayat 3 Perpres 59/2017 (Langkah 7).

4.1.2. Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Rencana Aksi Pihak Non-Pemerintah

Mekanisme pemantauan dan evaluasi pihak nonpemerintah, yaitu organisasi kemasyarakatan dan media, pelaku usaha dan filantropi, serta akademisi berbeda dengan mekanisme yang dilakukan pada pemerintah. Program dan kegiatan dari pihak nonpemerintah untuk pelaksanaan pencapaian TPB bersifat sukarela (*Voluntary*), oleh karena itu mekanisme pelaporannya pun juga bersifat sukarela. Meskipun bersifat sukarela, namun pelaporan program dan kegiatan tetap harus dapat dipertanggungjawabkan. Pelaporan dilakukan melalui mekanisme “penilaian diri sukarela” (*Voluntary Self Assesment*) dengan menggunakan format laporan melalui *Self Assesment Tool* (SAT) yang disepakati.



Gambar 18. Alur Informasi Monitoring Organisasi non-Pemerintah

Alur pelaporan dalam pemantauan pihak nonpemerintah mengikuti langkah-langkah (Gambar 52) sebagai berikut:

1. Organisasi nonpemerintah melakukan *voluntary self assesment* atas program dan kegiatan yang dilaksanakan dengan menggunakan format *self assesment tool*, lalu disampaikan kepada Kelompok Kerja masing-masing pilar terkait dengan tembusan kepada Tim Pelaksana SDGs. (Langkah 1).
2. Kelompok Kerja dibantu oleh Sekretariat SDGs menyusun laporan kompilasi untuk ditelaah dan selanjutnya disampaikan kepada Ketua Tim Pelaksana (Langkah 2).
3. Tim Pelaksana TPB mengkompilasi laporan yang diterima dari organisasi nonpemerintah dengan format yang ditetapkan, dan menyampaikan kepada Tim Pengarah (Langkah 3).
4. Ketua Tim Pelaksana kemudian menyampaikannya kepada Menteri PPN/Kepala BAPPENAS (Langkah 4).

Mekanisme evaluasi untuk organisasi nonpemerintah dilakukan melalui sebuah forum, tim atau kelembagaan khusus yang dibentuk secara ad hoc oleh Tim Pelaksana TPB yang merupakan panel independen dan nir kepentingan. Keorganisasian dari kelembagaan tersebut berisikan para anggota yang diakui kompetensi, pengalaman, dan integritasnya dari pemangku kepentingan.

4.2. Jadwal Pemantauan dan Evaluasi Pencapaian TPB

Jadwal waktu kegiatan pemantauan dan evaluasi sesuai dengan amanat Perpres 59/2017 khususnya pasal 20 dan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, Dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, sebagai berikut: Pemantauan dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu bila diperlukan. Evaluasi dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

Dengan periode pelaporan dan pemantauan enam bulanan, maka pemantauan RAD akan dilakukan pada bulan Januari. Laporan pemantauan dari Gubernur disampaikan kepada Menteri PPN/Kepala BAPPENAS dan Menteri Dalam Negeri 15 hari setelah akhir bulan berkenaan.

Tabel 65. Jadwal Pemantauan dan Pelaporan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

KEGIATAN	BULAN											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pemantauan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan												
Pelaporan Rencana Aksi Nasional Tujuan Pembangunan Berkelanjutan												
Pelaporan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan												

4.3. Publikasi Hasil Pemantauan dan Evaluasi

Tim Pelaksana TPB dibantu oleh Sekretariat TPB menempatkan RAD TPB, Kegiatan-kegiatan seputar TPB, Laporan TPB, serta informasi public lainnya di laman bappeda.kaltimprov.go.id sebagai media publik untuk melakukan diseminasi informasi terkait TPB. Laman ini akan terus dikembangkan sesuai muatan yang akan dihasilkan dari kegiatan pelaksanaan TPB Kaltim. Laporan dan publikasi juga dapat diakses di Sekretariat TPB.

BAB V. PENUTUP

5.1. Prinsip Pelaksanaan TPB

Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB disusun dan berisi aksi-aksi atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah dan nonpemerintah secara bersama-sama. Dalam pelaksanaannya berpegang atau mendasarkan pada prinsip-prinsip TPB, yaitu integrasi dan *no one left behind* (tidak ada satupun yang tertinggal). Aksi-aksi tersebut berkontribusi untuk pencapaian target setiap indikator TPB Provinsi. Prinsip integrasi dalam TPB menekankan bahwa pencapaian target setiap indikator berkaitan atau tidak akan terlepas dari upaya dan pencapaian dari target yang lain. Dengan demikian, pencapaian suatu Tujuan/Goal tertentu juga menentukan keberhasilan dari Tujuan/Goal yang lainnya. Keterkaitan antar tujuan tersebut menjadi salah satu penentu dalam pencapaian TPB.

Berdasarkan pada prinsip dan semangat inklusif dari TPB yang diterapkan pada setiap proses dan tahapan penyusunan RAD, maka pelaksanaan untuk setiap aksi agar dipastikan tidak meninggalkan pihak manapun yang akan menjadi target dari setiap indikator. Untuk itu, mekanisme pemantauan yang inklusif juga diterapkan baik untuk kegiatan atau aksi yang dilakukan oleh pemerintah maupun nonpemerintah.

5.2. Penguatan Pelaksanaan TPB

5.2.1. Pengembangan Penggunaan Teknologi Informasi

Penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan memerlukan penggunaan teknologi informasi yang mendukung pengelolaan data dan informasi atas target dan indikator TPB dari 17 Tujuan yang saling terkait satu sama lainnya. Selain itu, teknologi informasi ini juga berfungsi untuk mendukung sinkronisasi berbagai capaian pelaksanaan TPB di tingkat pusat dan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan organisasi nonpemerintah. Pemanfaatan teknologi informasi juga menjadi dasar untuk mendukung pengembangan data dasar, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pencapaian TPB.

Pemprov Kaltim merancang aplikasi pengelolaan data capaian TPB di mana dengan memanfaatkan teknologi informasi dapat memudahkan pelaksanaan pemantauan pelaksanaan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

5.2.2. Kemitraan Multipihak

Penerapan prinsip kemitraan yang telah menjadi komitmen di tingkat global, juga telah diterapkan Indonesia prinsip di tingkat nasional dan daerah. Kemitraan pelaksanaan pencapaian TPB di tingkat nasional dan daerah dibangun berdasarkan hubungan saling percaya antar Pemerintah, Filantropi dan Pelaku Usaha, Akademisi, serta Organisasi Kemasyarakatan. Hal ini diwujudkan dengan ditematkannya wakil-wakil dari setiap pihak dalam keanggotaan Kelompok Kerja TPB. Kemitraan ini memberikan ruang bagi para pihak untuk terlibat secara aktif dalam penentuan arah dan pelaksanaan TPB secara bersama, termasuk pelaksanaan konsultasi publik yang dilakukan secara daring (*online*) dan luring (*offline*).

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ini akan menjadi dasar kerangka kerjasama antar multi pihak dalam pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Provinsi Bengkulu dimana akan melibatkan setiap unsur baik pemangku kebijakan maupun non pemangku kebijakan.

5.2.3. Penguatan Koordinasi

Pelaksanaan pencapaian TPB mencakup berbagai macam aspek, yaitu kerangka hukum, kelembagaan, serta substansi program dan pendanaan. Keempat aspek tersebut merupakan satu kesatuan yang koheren dan saling melengkapi untuk pelaksanaan pencapaian TPB di tingkat nasional dan daerah. Kementerian PPN/BAPPENAS di tingkat pusat dan BAPPEDA di tingkat daerah mengkoordinasikan para pihak dalam berbagai proses perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan TPB.

Bappeda akan berencana melakukan penguatan kapasitas kesekretariatan SDGs Provinsi Bengkulu dimana akan dilakukan pelatihan dan peningkatan pengetahuan dalam pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

5.2.4. Peningkatan Kapasitas.

Untuk melaksanakan Rencana Aksi TPB di Provinsi Kaltim diperlukan peningkatan kapasitas perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, baik pada lingkup Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) maupun organisasi nonpemerintah. Peningkatan kapasitas dilakukan dengan cara memperkuat kesamaan pemahaman tentang TPB, pelatihan tenaga perencana, fasilitasi, bimbingan teknis, konsultasi, studi banding, seminar, workshop serta pertemuan tahunan. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas menjadi salah satu cara peningkatan kapasitas dari para pemangku kebijakan baik Kabupaten/Kota maupun Provinsi. Sehingga pencapaian TPB di Provinsi Kaltim dapat terlaksana dengan baik.

5.2.5. Pendanaan.

Dalam aspek substansi program, telah disusun berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah dan organisasi nonpemerintah untuk mencapai target pelaksanaan TPB. Dalam aspek pendanaan perlu dilakukan pengembangan mekanisme pembiayaan alternatif untuk pelaksanaan TPB, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, sehingga pembiayaan tidak hanya mengandalkan dari dana pemerintah (APBD) dan bantuan mitra pembangunan. Dalam hal ini, pembiayaan alternatif dapat berupa kerja sama dengan pihak swasta, filantropi, dan mitra pembangunan.

5.2.6. Pemberian Penghargaan Kepada Para Pihak.

TPB Award merupakan penghargaan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten/kota, organisasi kemasyarakatan, filantropi dan pelaku usaha, serta akademisi yang menunjukkan prestasi dalam melaksanakan TPB. Kriteria penilaian dan Tim Penilai akan dibentuk oleh Tim Pelaksana TPB sehingga dengan pemberian penghargaan ini dapat menimbulkan motivasi serta tanggung jawab dalam pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

5.2.7. Penguatan Strategi Komunikasi.

Agar TPB menjadi gerakan bersama seluruh masyarakat diperlukan strategi komunikasi yang kuat mencakup: isi pesan, cara penyampaian dan target yang akan disasar, media yang digunakan, serta pemantauan dan evaluasi untuk menilai efektivitas pelaksanaan komunikasi. Pemprov Kaltim, melalui Biro Humas dan Kerja sama Setprov Kaltim, melakukankerja sama dengan media massa untuk memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat mengenai TPB dan pencapaiannya sehingga seluruh masyarakat bisa memahami dan bisa bersama memantau pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan.

5.3. Pemutakhiran Dokumen

Dokumen RAD TPB ini merupakan dokumen yang secara terus menerus dapat dikaji ulang secara bersama antara pihak pemerintah dan nonpemerintah. Metode yang diterapkan adalah dengan konsultasi dan partisipasi publik, baik secara daring (*online*) dan luring (*offline*).

MATRIK 1 : PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH PROVINSI KALTIM

PROGRAM/ KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	BASELINE	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	INSTANSI PELAKSANA
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan										
INDIKATOR SDGs: 1.2.1* Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.										
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial										
Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak	Jumlah Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran terlantar, KDRT & Korban Trafficking yang mendapatkan penanganan/pelayanan	Orang	-	30	30	30	30	30	1.940.950.000	Dinas Sosial
Program pembinaan anak terlantar										
Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar	Jumlah Anak Terlantar, Anak Jalanan, Anak berhadapan dengan Hukum, Anak dengan Kecacatan dan Balita Terlantar yang mendapatkan bantuan sosial	Orang	-	55	95	95	95	95	8.721.6p50.000	UPTD Sosial Remaja Panti Bina
Pengembangan bakat dan ketrampilan anak terlantar	Jumlah Anak Terlantar, Anak Jalanan, Anak berhadapan dengan Hukum, Anak dengan Kecacatan dan Balita	Orang	-	200	200	200	200	200	1.323.000.000	Dinas Sosial

PROGRAM/ KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	BASELINE	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	INSTANSI PELAKSANA
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	Terlantar Luar Panti yang mendapatkan bantuan sosial									
Program pembinaan panti asuhan /panti jompo										
Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo	Jumlah kebutuhan dasar penghuni panti yang dilayani	Panti	-	1	1	1	1	1	14.903.500.000	UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri
Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo	Jumlah kebutuhan dasar penghuni panti yang dilayani	Panti	-	1	1	1	1	1	11.931.875.000	UPTD Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma
Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo	Jumlah kebutuhan dasar penghuni panti yang dilayani	Panti	-	1	1	1	1	1	12.287.225.000	UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Harapan
Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan/jompo	Jumlah penghuni panti yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan	Orang	-	80	80	80	80	80	390.000.000	UPTD Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma
Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan/jompo	Jumlah penghuni panti yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan	Orang	-	70	70	70	70	70	187.500.000	UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Harapan

PROGRAM/ KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	BASELINE	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	INSTANSI PELAKSANA
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Kesejahteraan Sosial										
Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi Keluarga Miskin dan PMKS Lainnya	Jumlah WRSE dan KUBE yang diberdayakan	Orang	-	200	500	500	500	500	7.523.350.000	Dinas Sosial
Pelaksanaan Program Keluarga Harapan	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapat bantuan sosial	KPM	-	50	75	75	75	75	3.241.135.000	Dinas Sosial
Peningkatan Kualitas Pelayanan Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS	Jumlah Lansia luar panti yang mendapat pelayanan	Orang	-	270	270	270	270	270	1.415.700.000	Dinas Sosial
INDIKATOR SDGs: 1.3.1.(c) Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.										
Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma										
Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma	Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan bantuan pelayanan	Orang	-	30	250	250	250	250	4.012.200.000	Dinas Sosial
INDIKATOR SDGs: 1.5.1* Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.										
Program Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana										
Kedaruratan, Peralatan dan Logistik	Jumlah Peserta Simulasi dan Peralatan Penanggulangan	Orang	-	120	-	-	-	-	355.020.000	Badan Penanggulangan Bencana

PROGRAM/ KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	BASELINE	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	INSTANSI PELAKSANA
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Penanggulangan Bencana	Bencana									Daerah
	Jumlah Peserta Pelatihan Radio Komunikasi	Orang	-	40	-	-	-	-		
	Jumlah peserta Rapat Koordinasi Penanganan Darurat Penanggulangan Bencana	Orang	-	55	-	-	-	-		
INDIKATOR SDGs: 1.5.1.(a) Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.										
Program Pencegahan dan kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Daerah										
Penanggulangan bencana berbasis masyarakat	Jumlah peserta Bimtek Relawan Desa Tangguh Bencana (Destana)	Orang	-	60	60	60	60	60	1.428.500.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Jumlah peserta Bimtek Relawan Penanggulangan Bencana	Orang		30						
	Jumlah peserta Sosialisasi Desa Tangguh Bencana	Orang	-	240	240	240	240	240		
	Jumlah peserta penyegaran Fasilitator Desa Tangguh Bencana	Orang	-	30	30	30	30	30		

PROGRAM/ KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	BASELINE	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	INSTANSI PELAKSANA
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	Jumlah peserta Fasilitasi Pembentukan Relawan Penanggulangan Bencana dan Forum PRB Desa Tangguh Bencana	Orang	-	180	180	180	180	180		
	Jumlah dokumen Kajian dan Pemetaan Risiko Bencana Desa Tangguh Bencana	Dokumen	-	6	6	6	6	6		
	Jumlah dokumen Rencana Kontinjensi Penanggulangan Bencana Desa Tangguh Bencana	Dokumen	-	8	8	8	8	8		
	Jumlah peserta Pembekalan Teknis Penanggulangan Bencana Relawan Desa Tangguh Bencana	Orang	-	240	240	240	240	240		
	Jumlah Peserta Seminar Hasil Desa Tangguh Bencana	Orang	-	210	210	210	210	210		
	Jumlah Peserta Simulasi Penanggulangan Bencana Desa Tangguh Bencana	Orang	-	120	120	120	120	120		

PROGRAM/ KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	BASELINE	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	INSTANSI PELAKSANA
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	Jumlah Peta Jalur evakuasi Destana	Peta	-	6	6	6	6	6		
	Jumlah Rambu-rambu Destana	Buah	-	90	90	90	90	90		
	Laporan perkembangan Desa Tangguh Bencana	Laporan	-	1	1	1	1	1		
	Jumlah orang yang mengikuti Kompetensi Desa Tangguh Bencana tingkat Provinsi dan Nasional	Orang	-	15	15	15	15	15		
INDIKATOR SDGs: 1.5.1.(b) Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.										
Program Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana										
Pengembangan Sistem Manajemen Logistik dan Peralatan	Jumlah Peralatan Penanggulangan Bencana yang Tersedia	Unit	-	75	75	75	75	75	2.160.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Jumlah Peserta Pelatihan Manajemen Pergudangan dan Peralatan Penanggulangan Bencana	Orang	-	70	70	70	75	75		
	Jumlah peserta Simulasi Peralatan Penanggulangan Bencana	Orang	-	-	120	120	120	120		
	Jumlah logistik penanggulangan	barang	-	-	100	100	100	100		

PROGRAM/ KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	BASELINE	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	INSTANSI PELAKSANA
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	bencana									
Program Penanganan dan Penanggulangan Korban Bencana										
Penguatan Kesiapsiagaan, Perlindungan Sosial Korban Bencana dan Pemulangan, Permakanan Orang Terlantar	Jumlah kegiatan penanganan Korban bencana dan orang terlantar yang mendapatkan bantuan sosial	Kegiatan	-	1.518	2.000	2.000	2.000	2.000	4.274.165.000	Dinas Sosial
INDIKATOR SDGs: 1.5.1.(d) Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus.										
Program Pencegahan dan kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Daerah										
Peningkatan Kapasitas dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengurangan Risiko Bencana (PRB)	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan untuk peningkatan kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam pengurangan risiko bencana	kegiatan	-	1	8	8	8	8	633.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
INDIKATOR SDGs: 1.5.3* Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.										
Program Pencegahan dan kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Daerah										
Penyusunan Data Base dan Pemetaan Rawan Bencana	Jumlah Peta Rawan Bencana	Peta	-	-	-	5	-	5	1.700.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

PROGRAM/ KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	BASELINE	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	INSTANSI PELAKSANA
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	Jumlah dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengurangan Risiko Bencana	Dokumen	-	-	1	-	1	-		
	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)/review	Dokumen	-	-	1	-	-	-		

PROGRAM/ KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	BASELINE	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	INSTANSI PELAKSANA
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Tujuan 2 Tanpa Kelaparan										
INDIKATOR SDGs: 2.1.1* Prevalensi ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernutrition)										
Program Peningkatan Ketahanan Pangan										
Peningkatan Ketersediaan dan Penanganan Daerah Rawan Pangan	Data ketersediaan dan kerawanan pangan	Laporan	4	4	4	4	4	4	3.890.000.000	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
INDIKATOR SDGs: 2.1.1.(a) Prevalensi Kekurangan Gizi (underweight) pada anak balita.										
Program Upaya Kesehatan Masyarakat										
Perbaikan Gizi Masyarakat	Jumlah kab/kota yang dibina untuk perbaikan gizi	kab/kota	10	10	10	10	10	10	4.670.280.000	Dinas Kesehatan
Pembinaan upaya kesehatan	Jumlah Kab/Kota yang dikonfirmasi kasus gizi buruk	Kab/Kota	10	10	10	10	10	10	2.693.360.000	Dinas Kesehatan

PROGRAM/ KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	BASELINE	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	INSTANSI PELAKSANA
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
masyarakat sekunder dan primer (DAK)										
	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan AMP	kab/kota	10	10	10	10	10	10		
Rakontek terpadu tingkat kabupaten dan kota (DAK)	Jumlah Kab/Kota yang dikonfirmasi kasus gizi buruk	Kab/Kota	10	10	10	10	10	10	2.749.773.800	Dinas Kesehatan
	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan AMP	kab/kota	10	10	10	10	10	10		
Pengelolaan Satker (DAK)	Jumlah Kab/Kota yang dikonfirmasi kasus gizi buruk	Kab/Kota	10	10	10	10	10	10	762.790.000	Dinas Kesehatan
	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan AMP	kab/kota	10	10	10	10	10	10		
INDIKATOR SDGs: 2.1.2* Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan pangan.										
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan										
Penguatan program Indonesia sehat melalui pendekatan Keluarga (DAK)	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan AMP	Kab/Kota	10	10	10	10	10	10	1.754.250.000	Dinas Kesehatan
	Jumlah Kab/Kota yang dikonfirmasi	Kab/Kota	10	10	10	10	10	10		

PROGRAM/ KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	BASELINE	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	INSTANSI PELAKSANA
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	kasus gizi buruk									
	Jumlah kab/kota yang menyelenggarakan program JKN menuju UHC	kab/kota	10	10	10	10	10	10		
Program Peningkatan Ketahanan Pangan										
Pengembangan Cadangan Pangan Daerah	Jumlah cadangan beras provinsi	Ton	184	285	325	350	375	415	8.349.991.656	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
Pengembangan Sistem Informasi Pasar	Informasi harga pangan yang tersedia	Laporan	3	3	3	3	3	3	1.750.000.000	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
INDIKATOR SDGs: 2.2.1* Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak balita.										
Program Upaya Kesehatan Masyarakat										
Penurunan Stunting (DAK)	Jumlah Kab/Kota yang didistribusikan PMT sesuai sasaran	Kab/Kota	2	2	2	2	2	2	14.950.315.000	Dinas Kesehatan
	Jumlah Kab/Kota yang dikonfirmasi kasus gizi buruk	Kab/Kota	10	10	10	10	10	10		
INDIKATOR SDGs: 2.2.2.(c) (i)Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH); dan (ii) tingkat konsumsi ikan perkapita										

PROGRAM/ KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	BASELINE	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	INSTANSI PELAKSANA
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Program Penganeekaragaman Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan										
Analisis Pola Pangan Harapan	Jumlah laporan analisis PPH Konsumsi	Laporan	1	1	1	1	1	1	1.650.000.000	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
Pengembangan Pangan Lokal	Jumlah produk olahan pangan lokal yang dikembangkan	Jenis	5	7	9	11	13	15	3.850.000.000	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
Pengawasan Mutu Pangan Segar	Jumlah Sertifikat mutu pangan segar asal tumbuhan	Sertifikat	3	5	7	9	11	13	4.000.000.000	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
INDIKATOR SDGs: 2.3.1* Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja)										
Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura										
Peningkatan Produksi Hortikultura	Produktivitas tanaman hortikultura	Ton/Ha	2.15	2.16	2.16	2.17	2.17	2.17	9.798.900.000	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
Penanganan Pasca Panen dan Promosi Atas Hasil Pertanian Hortikultura	Jumlah produksi tanaman hortikultura yang disertifikasi	Unit	5	10	15	17	20	25	4.121.700.000	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian	Jumlah kelompok tani yang mendapat bantuan	Kelompok Tani	103	135	135	150	150	165	4.150.000.000	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura

PROGRAM/ KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	BASELINE	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	INSTANSI PELAKSANA
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Hortikultura										
Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan										
Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Luas tanam padi	Ha	1.000	23.000	24.000	25.000	26.000	27.000	50.887.980.000	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
Penanganan Pasca Panen dan Promosi Atas Hasil Pertanian Tanaman Pangan	Rata-rata percepatan penanganan pasca panen padi	Hari/Ha	11	10	9	8	7	6	4.069.000.000	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Tanaman Pangan	Peningkatan indeks pertanaman	IP	1	1.2	1.4	1.6	1.8	2	13.314.600.000	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
INDIKATOR SDGs: 2.5.1* Jumlah varietas unggul tanaman dan hewan untuk pangan yang dilepas.										
Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Peternakan										
Pengembangan Perbibitan Ternak	Jumlah ternak sapi bibit yang memiliki SKLB (Surat Keterangan Layak Bibit)	Ekor	50	100	100	120	140	150	42.800.000.000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	Service per	Indeks	2.09	1.8	1.75	1.7	1.65	1.6		

PROGRAM/ KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	BASELINE	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	INSTANSI PELAKSANA
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	Conception									
INDIKATOR SDGs: 2.5.2* Proporsi hewan ternak dan sejenisnya, diklasifikasikan menurut tingkat risiko kepunahan: berisiko, tidak berisiko, dan risiko yang tidak diketahui.										
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan										
Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Hewan	Jumlah hewan yang divaksinasi	ekor	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	3.041.700.000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

PROGRAM/ KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	BASE LINE	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	INSTANSI PELAKSANA
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera										
INDIKATOR SDGs: 3.1.1* Angka Kematian Ibu (AKI).										
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat										
Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat	Jumlah kegiatan penguatan OPD/Lintas Sektor yang mengimplementasikan kebijakan publik berwawasan kesehatan	Kali	-	3	6	9	12	15	4.537.460.000	Dinas Kesehatan
	Jumlah penyebarluasan informasi kesehatan melalui berbagai saluran komunikasi pertahun	Kali	5	5	5	5	5	5		
	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan dan penilaian (posyandu dan PHBS) dalam setahun	Kab/Kota	10	10	10	10	10	10		
	Jumlah Rumah Sakit di Kalimantan Timur yang dilakukan pembinaan PKRS	Rumah Sakit	-	10	15	20	25	30		
Kampanye sosialisasi, advokasi perilaku hidup sehat di tingkat provinsi dan pemberdayaan masyarakat	Jumlah kab/ kota yang melaksanakan min 5 tema kampanye Germas hidup sehat	kab/kota	5	6	7	8	9	10	4.550.575.000	Dinas Kesehatan

PROGRAM/ KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	BASE LINE	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	INSTANSI PELAKSANA
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
(DAK)										
	Jumlah kegiatan penguatan OPD/Lintas Sektor yang mengimplementasikan kebijakan publik berwawasan kesehatan	Kali	-	3	6	9	12	15		
INDIKATOR SDGs: 3.2.2.(b) Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.										
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular										
Peningkatan surveillance epidemiologi dan penanggulangan wabah	Jumlah kab/kota yang dilakukan pembinaan dalam pencapaian IDL	Kab/Kota	6	7	8	9	10	10	2.735.110.000	Dinas Kesehatan
	Jumlah kab/kota yang dilakukan pembinaan dalam pencapaian persentase respon kewaspadaan kejadian luar biasa	Kab/Kota	7	8	9	10	10	10		
	Jumlah Kab/Kota yang melakukan sosialisasi dan membuat rencana kontijensi wabah/bencana	Kab/Kota	-	1	2	2	2	3		
Rujukan Spesimen (DAK)	Jumlah Kab/Kota yang memiliki desa/kelurahan yang cakupan IDL tercapai target (desa UCI)	Kab/Kota	3	4	5	6	7	8	175.000.000	Dinas Kesehatan

PROGRAM/ KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	BASE LINE	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	INSTANSI PELAKSANA
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
INDIKATOR SDGs: 3.3.2.(a) Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.										
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular										
Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	Jumlah kab/kota yang dilakukan pembinaan dalam program P2TB untuk mencapai CDR=>70% dan SR=>90%	kab/kota	-	2	4	6	8	10	2.924.905.000	Dinas Kesehatan
	Jumlah kab/kota yang dilakukan pembinaan dalam program P2HIV untuk mencapai presentase ODHA yang mendapatkan ARV => 55%	Kab/Kota	1	2	3	4	6	8		
	Jumlah kab/kota yang dilakukan pembinaan dalam program P2 Malaria untuk mencapai persentase pengobatan Malaria Positif sesuai standart =>95%	Kab/Kota	5	6	7	8	9	10		
	Jumlah kab/kota yang dilakukan pembinaan dalam program P2 DBD	Kab/Kota	1	3	5	7	9	10		
INDIKATOR SDGs: 3.5.1.(c) Jumlah korban penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti sesuai standar pelayanan.										

PROGRAM/ KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	BASE LINE	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	INSTANSI PELAKSANA
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)										
Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial	Jumlah Eks penyandang penyakit sosial yang diberdayakan	Orang	-	38	38	38	38	38	2.201.000.000	Dinas Sosial
INDIKATOR SDGs: 3.8.2.(a) Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).										
Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Kesehatan										
Kemitraan Bagi Pasien Kurang Mampu, Non BPJS	Jumlah Kab/Kota yang menyelenggarakan program JKN menuju UHC	Kab/Kota	3	10	10	10	10	10	180.640.020.000	Dinas Kesehatan
	Jumlah penduduk miskin dan tidak mampu yang memperoleh jaminan pelayanan kesehatan	orang	-	131.743	132.000	132.000	132.000	132.000		
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan										
Peningkatan pelayanan kesehatan rujukan	Jumlah Kab/kota yang memiliki Fasyankes telah mempersiapkan pelayanan telemedicine	kab/kota	-	-	2	2	2	2	6.254.725.000	Dinas Kesehatan
	Persentase kejadian bencana yang ditangani	%	-	100	100	100	100	100		
	Persentase KLB yang ditangani	%	-	100	100	100	100	100		
	Jumlah RSUD yang mendapatkan pembinaan dan pendampingan akreditasi SNARS edisi I	RSUD	-	3	7	11	15	21		
INDIKATOR SDGs: 3.a.1* Persentase merokok pada penduduk umur <15 tahun.										

PROGRAM/ KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	BASE LINE	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	INSTANSI PELAKSANA
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular										
Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular	Jumlah PD provinsi yang dilakukan pembinaan deteksi dini faktor resiko PTM dan implementasi KTR	OPD	-	3	6	9	12	15	4.081.225.000	Dinas Kesehatan
	Persentase Kab/Kota yang melaksanakan implementasi KTR minimal di 50% sekolah	%	-	30	50	70	90	100		
	Jumlah Kab/Kota yang mempunyai min 50% Puskesmas yang melaksanakan pelayanan terpadu PTM (kasus Hipertensi & DM)	Kab/Kota	-	2	3	5	7	10		
	Jumlah Kab/Kota yang min 50% Puskesmasnya melaksanakan deteksi dini kanker payudara pada perempuan usia 30-50 tahun	Kab/Kota	-	3	5	7	9	10		
INDIKATOR SDGs: 3.b.1.(a) Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.										
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan										
Pemenuhan Sarana/Prasana Instalasi Farmasi	Jumlah obat dan perbekalan kesehatan yang diadakan	Jenis	150	150	150	150	150	150	1.344.745.000	Dinas Kesehatan

PROGRAM/ KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	BASE LINE	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	INSTANSI PELAKSANA
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Provinsi (DAK)										
Program Upaya Kesehatan Masyarakat										
Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan	Jumlah fasyankes yang difasilitasi dan dilakukan kegiatan pemeliharaan alkes (RMC)	fasyanke s	-	28	80	119	180	187	2.842.576.760	Dinas Kesehatan
	Jumlah sarana produksi dan distribusi yg mendapatkan izin alat kesehatan	sarana	11	13	16	19	22	25		
	Jumlah Fasyankes yang dibina untuk mampu melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar	fasyanke s	38	72	150	160	170	187		
	Jumlah sarana produksi dan distribusi yg mendapatkan izin Kefarmasian	sarana	13	15	19	23	27	31		
INDIKATOR SDGs: 3.c.1* Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.										
Program Pengembangan Dan Pemberdayaan SDM Kesehatan										
Standarisasi Tenaga Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah puskesmas daerah DTPK/3T, sangat terpencil dan terpencil yang difasilitasi memiliki tenaga kesehatan sesuai standar	Puskes- mas	-	-	25	30	40	49	4.906.700.000	Dinas Kesehatan

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	BASELINE 2018	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	INSTANSI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023		
Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas										
INDIKATOR SDGs: 4.1.1.(f) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat.										
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur										
Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan pada skpd dan unit kerja internal SKPD	Unit	4	4	4	4	4	4	28.795.336.400	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
INDIKATOR SDGs: 4.3.1.(a) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat.										
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah										
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	jumlah aparatur yang dilatih	Orang	-	3	3	3	3	3	50.000.000	UPTD Taman Budaya
Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan										
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran (DAK)	Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Dokumen	-	1	1	1	1	1	5.000.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Program Pendidikan Luar Biasa										
Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional/BOSNAS (DAK)	jumlah penerima Bantuan Operasional Sekolah Daerah Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri	Orang	-	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220	5.000.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Rehabilitasi Prasarana Belajar SLB (DAK)	Jumlah Pembangunan	Sekolah	-	9	9	9	9	9	5.000.000.000	Dinas Pendidikan

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	BASELINE 2018	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	INSTANSI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023		
	dan Rehab Gedung Sekolah									dan Kebudayaan
Pembangunan Prasarana Belajar SLB (DAK)	jumlah penerima Bantuan Operasional Sekolah Daerah Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri	Orang	-	95	95	95	95	95	5.000.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan										
pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang ditingkatkan mutu dan kualitasnya	Orang	-	250	250	250	250	250	5.000.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pemenuhan Sarana & Prasarana Tenaga Pendidik	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang ditingkatkan mutu dan kualitasnya	Orang	-	200	200	200	200	200	5.000.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan										
Pelaksanaan Ujian Nasional/Ujian Sekolah	Jumlah laporan capaian kinerja yang disusun	Laporan	-	1	1	1	1	1	5.000.000.000	Dinas Pendidikan dan

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	BASELINE 2018	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	INSTANSI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023		
										Kebudayaan
Penerimaan Peserta Didik Baru	Jumlah laporan yang menerapkan sistem dan informasi manajemen pendidikan	Laporan	-	1	1	1	1	1	5.000.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Program Pendidikan Sekolah Menengah Atas										
Pembangunan Prasarana Belajar SMA	Jumlah Pembangunan dan Rehab Gedung Sekolah	Sekolah	-	15	15	15	15	15	5.000.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional/BOSNAS (DAK)	Bantuan Operasional Sekolah Daerah Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri	Kab/Kota	-	10	10	10	10	10	5.000.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Sekolah	Jumlah Pembangunan dan Rehab Gedung Sekolah	Sekolah	-	15	15	15	15	15	5.000.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pembangunan Pagar Sekolah	Jumlah Pembangunan dan Rehab Gedung Sekolah	Sekolah	-	15	15	15	15	15	5.000.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Rehabilitasi Prasarana Belajar SMA (DAK)	Jumlah Pembangunan dan Rehab Gedung Sekolah	Sekolah	-	15	15	15	15	15	5.000.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	BASELINE 2018	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	INSTANSI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023		
Pembangunan Prasarana Belajar SMA (DAK)	Jumlah Pembangunan dan Rehab Gedung Sekolah	Sekolah	-	15	15	15	15	15	5.000.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pengadaan Sarana Belajar SMA (DAK)	Jumlah Pembangunan dan Rehab Gedung Sekolah	Sekolah	-	15	15	15	15	15	5.000.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pembangunan Rumah Dinas Guru dan Asrama Siswa SMA (Afirmasi) (DAK)	Jumlah Pembangunan dan Rehab Gedung Sekolah	Sekolah	-	15	15	15	15	15	5.000.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Program Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan										
Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Nasional/BOSNAS (DAK)	jumlah penerima Bantuan Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri	Orang	-	42.998	42.998	42.998	42.998	42.998	5.000.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pendidikan Penguatan Karakter	Peningkatan mutu siswa dalam rangka SDM berkualitas	Siswa	-	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	5.000.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Beserta Perabotnya (DAK)	Jumlah Pembangunan dan Rehab Gedung Sekolah	Sekolah	-	15	15	15	15	15	5.000.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pengadaan Peralatan Praktik Utama/Praktik	Jumlah Pembangunan	Sekolah	-	15	15	15	15	15	5.000.000.000	Dinas Pendidikan

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	BASELINE 2018	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	INSTANSI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023		
Produksi (DAK)	dan Rehab Gedung Sekolah									dan Kebudayaan
Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Beserta Perabotnya (DAK)	Jumlah Pembangunan dan Rehab Gedung Sekolah	Sekolah	-	15	15	15	15	15	5.000.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pembangunan toilet (jamban) beserta sanitasinya (DAK)	Jumlah Pembangunan dan Rehab Gedung Sekolah	Sekolah	-	15	15	15	15	15	5.000.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Rehabilitasi ruang belajar dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya (DAK)	Jumlah Rehabilitasi ruang disekolah kab/kota jenjang SMA	sekolah	-	15	15	15	15	15	5.000.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Rehabilitasi toilet (jamban) dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta sanitasinya (DAK)	Jumlah Rehabilitasi ruang disekolah kab/kota jenjang SMA	sekolah	-	15	15	15	15	15	5.000.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Program Pengembangan Nilai-Nilai Keagamaan										
Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi Pendidikan Menengah	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penyebar luasan dan sosialisasi informasi pendidikan menengah	Kegiatan	-	10	10	10	10	10	5.000.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	BASELINE 2018	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	INSTANSI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023		
Program Pengembangan Sekolah Kejuruan										
Peningkatan Kerjasama Dengan Dunia Usaha dan Industri	Peningkatan mutu siswa dalam rangka SDM berkualitas	Siswa	-	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	5.000.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Program Pendidikan Jarak Jauh (Distance Learning System)										
Pengembangan Metode Belajar dan Mengajar Dengan Menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan untuk belajar mengajar menggunakan teknologi informasi dan komunikasi	Kegiatan	-	10	10	10	10	10	5.000.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
INDIKATOR SDGs: 4.3.1.(b) Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT).										
Program Pendidikan Luar Biasa										
Pengadaan Sarana Belajar SLB (DAK)	jumlah penerima Bantuan Operasional Sekolah Daerah Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri	Orang	-	95	95	95	95	95	5.000.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	BASELINE 2018	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	INSTANSI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023		
Tujuan 5 Kesetaraan Gender										
INDIKATOR SDGs: 5.1.1* Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.										
Program Kesetaraan Gender										
Kesetaraan Gender Bidang Sosial dan Budaya	Jumlah diklat yang diikuti pegawai	Diklat	-	-	-	125	150	175	800.000.000	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
INDIKATOR SDGs: 5.2.1* Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.										
Program Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak										
Perlindungan Perempuan	Jumlah Peserta yang mengikuti kegiatan perlindungan perempuan	orang/peserta	-	100	80	80	80	80	800.000.000	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
INDIKATOR SDGs: 5.2.1.(a) Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.										
Program Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak										
Perlindungan Anak	Jumlah Peserta yang mengikuti kegiatan Perlindungan anak	orang/peserta	-	110	80	80	80	80	800.000.000	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
INDIKATOR SDGs: 5.5.1* Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.										
Program Kesetaraan Gender										
Kesetaraan Gender Bidang Politik dan Hukum	meningkatnya ketersediaan kebijakan	kebijakan	-	-	-	-	-	-	800.000.000	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	BASELINE 2018	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	INSTANSI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023		
	keterlibatan perempuan dalam politik									Perempuan dan Perlindungan Anak
	jumlah peserta yang mengikuti kegiatan kesetaraan gender bidang politik dan hukum	orang/peserta	100	100	100	125	150	175		

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	BASELINE 2018	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	INSTANSI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023		
Tujuan 6 Air Kebersihan dan Sanitasi Layak										
INDIKATOR SDGs: 6.1.1.(a) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.										
Program Pembangunan Infrastruktur Keciptakarya										
Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi	Jumlah SPAM (unit)	Unit	6	1	7	4	3	2	415.737.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
	Jumlah IPAL yang dibangun (Unit)	Unit	-	-	-	-	1	1		
	Jumlah IPLT yang dibangun (Unit)	Unit	-	-	-	-	1	1		
	Jumlah TPA yang dibangun (Unit)	Unit	-	-	1	1	1	-		
INDIKATOR SDGs: 6.2.1.(c) Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).										
Program Upaya Kesehatan Masyarakat										
Penyelenggaraan penyehatan lingkungan	Persentase pembinaan Kab/Kota memenuhi Kualitas Kesehatan Lingkungan	%	-	20	40	60	80	100	2.446.000.000	Dinas Kesehatan
INDIKATOR SDGs: 6.3.2.(b) Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.										
Program Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup										
Pemantauan lingkungan	Frekuensi pemantauan kualitas lingkungan	Frekuensi	120	-	231	308	385	385	5.526.408.000	Dinas Lingkungan Hidup
INDIKATOR SDGs: 6.6.1.(d) Luas lahan kritis dalam KPH yang direhabilitasi.										

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	BASELINE 2018	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	INSTANSI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023		
Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBH DR)										
Perencanaan	Luas Rancangan Kegiatan Penanaman dan Luas Penanaman	Hektar	-	-	300	300	300	300	1.600.000.000	UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto
Perencanaan	Luas Rancangan Kegiatan Penanaman	Hektar	-	-	800	400	400	400	3.228.000.000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat
Perencanaan	Luas Rancangan Kegiatan Penanaman dan Luas Penanaman	Hektar	-	-	500	500	500	500	2.400.000.000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan
Perencanaan	Luas Rancangan Kegiatan Penanaman	Hektar	100	100	470	360	360	360	1.868.943.975	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus
Perencanaan	Luas Rancangan Kegiatan Penanaman	Hektar	-	100	300	500	500	500	8.488.751.775	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo
Perencanaan	Luas Rancangan Kegiatan Penanaman	Hektar	-	450	600	400	400	400	1.201.537.500	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan
Perencanaan	Luas Rancangan Kegiatan Penanaman dan Luas Penanaman	Hektar	-	-	400	400	350	300	2.521.877.685	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi DAS Belayan
Perencanaan	Luas Rancangan Kegiatan	Hektar	-	1.605	-	-	1.000	-	952.950.000	UPTD Kesatuan Pengelolaan

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	BASELINE 2018	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	INSTANSI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023		
	Penanaman dan Luas Penanaman									Hutan Produksi Bengalon
Perencanaan	Luas Rancangan Kegiatan Penanaman	Hektar	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000	4.700.000.000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau
Pelaksanaan	Luas Penanaman	Hektar	-	86	300	300	300	300	30.060.300.000	UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto
Pelaksanaan	Luas Penanaman	Hektar	-	200	600	1.000	1.400	1.800	50.529.066.775	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat
Pelaksanaan	Luas Penanaman	Hektar	100	100	100	100	100	100	51.209.333.875	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan
Pelaksanaan	Luas Penanaman	Hektar	-	100	470	360	360	360	41.612.738.400	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus
Pelaksanaan	Luas Penanaman	Hektar	2.000	200	300	500	500	500	33.668.433.550	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo
Pelaksanaan	Luas Penanaman	Hektar	-	350	350	350	350	350	51.626.292.500	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan
Pelaksanaan	Luas Penanaman	Hektar	720	340	340	340	340	340	42.577.732.806	UPTD Kesatuan Pengelolaan

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	BASELINE 2018	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	INSTANSI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023		
										Hutan Produksi DAS Belayan
Pelaksanaan	Luas Penanaman	Hektar	250	600	600	600	600	600	67.416.423.875	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon
Pelaksanaan	Luas Penanaman	Hektar	-	250	500	500	500	500	37.092.000.000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau
Monitoring dan Evaluasi	Jumlah Monev RHL	Laporan	-	-	7	8	7	7	1.875.000.000	UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto
Monitoring dan Evaluasi	Jumlah Monev RHL	Laporan	-	-	17	17	17	17	1.705.000.000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat
Monitoring dan Evaluasi	Jumlah Dokumen Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Dokumen	-	6	9	9	9	9	4.194.000.000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan
Monitoring dan Evaluasi	Jumlah Monev RHL	Laporan	-	-	5	7	7	7	1.319.164.800	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus
Monitoring dan Evaluasi	Jumlah monev deforestasi dan degradasi hutan dalam Rangka	Laporan	-	-	12	12	12	12	1.320.000.000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	BASELINE 2018	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	INSTANSI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023		
	Mitigasi Perubahan Iklim									
Monitoring dan Evaluasi	Jumlah Monev RHL	Laporan	-	8	10	15	15	15	4.800.000.000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan
Monitoring dan Evaluasi	Jumlah Monev RHL	Laporan	-	-	4	4	4	4	1.600.000.000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi DAS Belayan
Monitoring dan Evaluasi	jumlah kegiatan monev	laporan	-	1	5	5	5	5	1.000.000.000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon
Monitoring dan Evaluasi	Jumlah Monev RHL	Laporan	-	-	40	40	40	40	8.400.000.000	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau

PROGRAM/ KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	BASELINE 2018	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	INSTANSI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023		
Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau										
INDIKATOR SDGs: 7.1.1* Rasio elektrifikasi.										
Program Pengembangan Ketenagalistrikan										
Pembangunan Ketenagalistrikan	Penambahan Desa/Kelurahan berlistrik	Desa	2	2	2	2	2	2	39.400.000.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Perencanaan Pengembangan ketenagalistrikan daerah	Data Dasar untuk Basic Desain Renc Penyediaan Tenaga Listrik	Laporan	3	3	-	-	-	-	0.00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Survey, Monitoring dan Evaluasi dan Koordinasi Pengembangan Ketenagalistrikan	Jumlah monev pengembangan/pe mbangunan infrastruktur ketenagalistrikan	Lokasi	-	20	-	-	-	-	423.350.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
INDIKATOR SDGs: 7.2.1* Bauran energi terbarukan.										
Program Diversifikasi Energi										
Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan	Jumlah DED PLTS Terpusat	DED	3	4	-	-	-	-	1.540.000.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Pengembangan Bioenergi	Jumlah Potensi pengembangan instalasi biogas skala rumah tangga	rumah tangga	-	75	-	-	-	-	365.200.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	Jumlah Perusahaan dengan potensi energi berbasis POME	perusahaan	-	15	-	-	-	-		
	Jumlah penyalur BBM bersubsidi	penyalur	-	50	-	-	-	-		
	Jumlah penyalur	penyalur		50	-	-	-	-		

PROGRAM/ KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	BASELINE 2018	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	INSTANSI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023		
	LPG bersubsidi		-							
Monitoring Penggunaan energi Listrik dan Air	Jumlah OPD yang hemat listrik dan air	Laporan	-	2	-	-	-	-	295.500.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Program Pembinaan dan Evaluasi Bidang pertambangan										
Penggunaan Efisiensi biodiesel pada perusahaan tambang batubara	Jumlah perusahaan yang menggunakan biodiesel	Perusaha an	-	29	-	-	-	-	363.220.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	BASELINE 2018	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	INSTANSI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023		
Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi										
INDIKATOR SDGs: 8.2.1* Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun										
Program Kemudahan pelayanan dan percepatan proses perijinan										
Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan perizinan sektor primer	Jumlah izin investasi primer yang diterbitkan	Izin/ Non Izin	1.094	1.000	1.100	1.150	1.150	1.200	2.016.100.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan perizinan sektor sekunder dan tersier	Jumlah izin investasi sekunder dan tersier yang diterbitkan	Izin/ Non Izin	1.385	1.500	1.500	1.550	1.600	1.625	1.630.650.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal	Jumlah izin investasi sekunder dan tersier yang diterbitkan	Izin/ Non Izin	48	-	-	-	-	-	1.232.250.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Jumlah NIB (Nomor Induk Berusaha) yang diterbitkan	NIB	-	200	200	200	250	275		
INDIKATOR SDGs: 8.3.1.(c) Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan										
Program Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Koperasi dan UKM										
Produksi, Pembiayaan dan Pemasaran	Jumlah Koperasi dan UKM yang Meningkatkan Kapasitas	KUMK	-	-	500	525	550	575	8.892.520.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	BASELINE 2018	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	INSTANSI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023		
	Usahanya									Usaha Kecil Menengah
INDIKATOR SDGs: 8.9.1* Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB										
Program pengembangan destinasi pariwisata										
Peningkatan kualitas dan kuantitas pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	Jumlah infrastruktur yang dibangun di destinasi pariwisata	Unit	-	-	4	5	5	5	8.000.000.000	Dinas Pariwisata
Pengembangan destinasi unggulan alam dan buatan	Jumlah wisata alam dan buatan yang dikembangkan	Destinasi	-	-	4	4	4	4	2.050.000.000	Dinas Pariwisata
Pengembangan destinasi unggulan bahari dan minat khusus	Jumlah wisata bahari dan khusus yang dikembangkan	Destinasi	-	-	3	3	3	3	1.900.000.000	Dinas Pariwisata
Program Pengembangan Industri dan Kelembagaan Pariwisata										
Pemberdayaan masyarakat sadar wisata dan kampanye Sapta Pesona	Jumlah anggota kelompok sadar wisata (pokdarwis) yang dilatih	Orang	-	-	200	250	250	250	2.050.000.000	Dinas Pariwisata
Pengembangan pengendalian usaha sarana pariwisata	Jumlah pelaku usaha sarana pariwisata yang dibina	Orang	-	-	170	230	230	230	2.050.000.000	Dinas Pariwisata
Peningkatan SDM dan profesionalisme usaha jasa pariwisata	Jumlah pelaku usaha jasa pariwisata yang dibina	Orang	-	-	150	180	180	180	1.900.000.000	Dinas Pariwisata

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	BASELINE 2018	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	INSTANSI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023		
INDIKATOR SDGs: 8.9.1.(a) Jumlah wisatawan mancanegara										
Program Pengembangan Pemasaran dan Kerjasama Pariwisata										
Penguatan analisa pasar pariwisata	Jumlah laporan analisa pasar pariwisata	Laporan	-	-	2	2	2	2	1.900.000.000	Dinas Pariwisata
Penguatan data dan informasi pariwisata	Jumlah data dan informasi pariwisata yang di umumkan	Jenis	-	-	10	10	10	10	2.050.000.000	Dinas Pariwisata
Pengembangan promosi dan kerjasama pariwisata	Jumlah kerjasama dan promosi yang dilakukan	Kegiatan	-	-	8	9	9	9	1.900.000.000	Dinas Pariwisata
INDIKATOR SDGs: 8.9.1.(b) Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.										
Program Pengembangan Karya Seni Budaya dan Pelaku Ekonomi Kreatif										
Peningkatan kualitas dan kreatifitas seni budaya pertunjukan	Jumlah pelaku ekraf seni pertunjukan yang dilatih	Orang	-	-	70	100	100	100	1.900.000.000	Dinas Pariwisata
Pengembangan pengelolaan karya seni budaya	Jumlah pelaku seni budaya yang ditingkatkan karyanya	Orang	-	-	100	120	120	120	1.900.000.000	Dinas Pariwisata
Pengembangan wisata budaya	Jumlah fasilitasi kegiatan dan peningkatan SDM bagi pelaku ekraf wisata budaya	Kegiatan	-	-	100	130	130	130	2.050.000.000	Dinas Pariwisata

PROGRAM/ KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	BASE LINE 2018	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	INSTANSI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023		
Tujuan 9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur										
INDIKATOR SDGs: 9.1.1.(a) Kondisi mantap jalan nasional.										
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan										
Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	Km	29.6	7.75	74.33	70.99	78.82	114.99	6.521.582.581.128	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
INDIKATOR SDGs: 9.1.2.(a) Jumlah bandara.										
Program Pengembangan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan										
Pengembangan Sarana dan Prasarana Pemadu Moda	Jumlah perencanaan angkutan pemadu moda	Perencanaan	-	2	4	4	1	1	87.905.160.000	Dinas Perhubungan
INDIKATOR SDGs: 9.1.2.(c) Jumlah pelabuhan strategis.										
Program Pembangunan Prasarana Transportasi Laut dan SDP										
Pembinaan, Pembangunan dan Peningkatan Pelabuhan	Jumlah dan Progres Pelabuhan/Dermaga/Fasilitas yang dibangun	(Unit/%)	-	1	2	1	1	1	120.042.136.500	Dinas Perhubungan
Program Pengendalian Pelaksanaan Investasi										
Pemantauan dan evaluasi Penanaman Modal	Jumlah Pemantauan perusahaan PMA/ PMDN di Kaltim	Perusahaan	-	-	-	-	-	-	1.429.100.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Jumlah LKPM yang dilaporkan perusahaan secara daring (online)	LKPM	100	4	5	6	7	8		
Pembinaan	Jumlah pembinaan dan	Perusahaan	-	-	-	-	-	-	6.282.400.000	Dinas

PROGRAM/ KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	BASE LINE 2018	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	INSTANSI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023		
dan Pengawasan Pelaksanaan Investasi	pengawasan perusahaan PMA/ PMDN di Kaltim									Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Jumlah Perusahaan yang dibina dan diawasi	Perusahaan	121	10	5	6	7	8		
INDIKATOR SDGs: 9.2.1* Proporsi nilai tambah sektor industri pengolahan non migas terhadap PDB dan perkapita.										
Program Peningkatan dan Pengembangan Industri										
Pengembangan dan Pembinaan Indsutri	jumlah industri yg difasilitasi pengembangan	unit	-	-	28	32	35	38	12.633.240.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
INDIKATOR SDGs: 9.4.1.(a) Persentase Perubahan Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca.										
Program Tata Lingkungan										
Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	Persentase Jumlah Aksi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim di integrasikan dengan dokumen RAD GRK	%	69.57	-	82.61	89.13	95.65	100	7.400.000.000	Dinas Lingkungan Hidup

PROGRAM/ KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	BASEL NE 2018	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	INSTANSI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023		
Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan										
INDIKATOR SDGs: 10.1.1.(c) Jumlah desa tertinggal										
Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan										
Peningkatan Kemandirian Ekonomi Masyarakat	Jumlah Bumdesa yang Terbentuk	unit	15	15	25	30	35	45	3.052.045.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
	Persentase BUMDesa Aktif	Unit	302	15	25	30	35	45		
Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan										
Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Data aparaturnya Desa/kelurahan dan badan Permusyawaratan Desa yang belum dilakukan peningkatan Kapasitas	Kabupaten /Kota	-	10	10	10	10	10	2.240.300.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
Monitoring Penyaluran Keuangan Desa	Data penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD dan dari RKUD ke RKD dan pengelolaan keuangan Desa	Kabupaten	-	7	7	7	7	7	1.541.800.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
Peningkatan Penataan administrasi penyelenggaraan pemerintahan desa	Desa dan Kelurahan di Provinsi Kalimantan Timur yang mengikuti Perlombaan Desa/Kampung dan Kelurahan Tingkat Provinsi Tahun 2019	Kabupaten /Kota	-	10	10	10	10	10	2.659.900.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

PROGRAM/ KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	BASELINE NE 2018	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	INSTANSI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023		
Program Pembangunan Desa dan Kawasan										
Pengembangan dan Monitoring Pembangunan Desa	Kabupaten yang dibina	Kabupaten	-	5	7	-	-	-	2.135.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
	Pendampingan Desa yang dibina	Orang	-	50	50	-	-	-		
Pengembangan dan Monitoring Pembangunan Antar Desa	Laporan Penguatan Pengembangan dan Pembangunan Antar Desa	Laporan		1					1.350.000.000	DPMPD
Penguatan Informasi Pembangunan	Informasi Pembangunan Desa dan Antar Desa	kali	-	1	1	1	1	1	1.350.000.000	DPMPD
Program Kampung Iklim +										
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Emisi Rendah Desa / Village Low Emission Development / VLED	Jumlah Kampung/Desa/Kelurahan iklim	Kampung/Desa/Kelurahan	28	20	22	25	27	28	5.400.000.000	DPMPD

PROGRAM/ KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	BASELINE NE 2018	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	INSTANSI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023		
INDIKATOR SDGs: 10.3.1.(a) Aspek Kebebasan Sipil dalam Indeks Demokrasi Indonesia										
Program pendidikan politik masyarakat										
Penyusunan IDI	Terselenggaranya Kegiatan IDI bagi Aparatur	Orang		100	100	100	100	100	2.369.835.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Tujuan 11 Kota dan Pemukiman Yang Berkelanjutan										
INDIKATOR SDGs: 11.1.1.(a). Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.										
Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman										
Pembangunan Rumah Layak & Prasarana Sarana dan Utilitas	Jumlah perumahan yang mendapat bantuan PSU (unit)	Unit	6	5	9	8	6	8	503.899.618.332	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang ditangani	unit	39	200	600	600	600	500		
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Kumuh	Luas kawasan kumuh yang ditangani	ha	-	11	11	11	11	11	536.062.416.975	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan

PROGRAM/ KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	BASELI NE 2018	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	INSTANSI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023		
										Ruang dan Perumahan Rakyat
INDIKATOR SDGs: 11.2.1.(b). Jumlah sistem angkutan rel yang dikembangkan di kota besar.										
Program Pengembangan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan										
Pengembangan Prasarana dan Fasilitas Perkeretaapian	Jumlah lintasan/trase kereta api yang direncanakan	Lintasan	-	-	2	3	1	-	3.656.010.000	Dinas Perhubungan
INDIKATOR SDGs: 11.5.1*. Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.										
Program Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana										
Koordinasi, Evaluasi dan Monitoring Penanggulangan Bencana	Jumlah koordinasi penanggulangan bencana	kali	-	-	17	17	17	17	2.278.620.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Jumlah laporan monitoring evaluasi penanggulangan bencana	Laporan	-	-	2	2	2	2		
	Jumlah operasi penanganan kejadian bencana	kali	-	-	20	20	20	20		
Pusat Pengendalian Operasi	Jumlah Pendataan, Kaji Cepat PB dan Penyebaran Informasi	Kab/Kota	-	10	10	10	10	10	1.400.000.000	Badan Penanggulangan Bencana

PROGRAM/ KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	BASELI NE 2018	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	INSTANSI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023		
Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS-PB)	Kebencanaan									Daerah
	Jumlah Laporan Kegiatan Pusdalops PB	Laporan	-	-	12	12	12	12		
	Jumlah laporan pemantauan titik panas	Laporan	-	-	12	12	12	12		
	Jumlah laporan pemantauan early warning system	Laporan	-	-	12	12	12	12		
	Jumlah Laporan Kejadian Kebencanaan	Laporan	-	-	12	12	12	12		
INDIKATOR SDGs: 11.5.1.(c). Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.										
Program Pencegahan dan kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Daerah										
Pengembangan Sistem Peringatan Dini Kebencanaan	Jumlah Lokasi Monitoring Daerah Rawan Bencana	Kabupaten /Kota	8	10	10	10	10	10	562.500.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Pekan Pengurangan Risiko Bencana	Orang	5	5	-	-	-	-		

PROGRAM/ KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	BASELI NE 2018	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	INSTANSI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023		
	Jumlah peserta yang mengikuti Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional	Orang		100						
	Jumlah dokumen Kajian Teknis Bencana	Dokumen	-	1	1	-	-	-		
	Jumlah pemasangan peralatan Peringatan Dini (EWS)	Unit	-	2	3	3	3	1		
	Jumlah pemantauan peralatan Peringatan Dini (EWS)	Unit	-	7	9	12	15	18		
	Jumlah dokumen SOP peringatan dini/review	Dokumen	-	1	1	-	1	-		
	Jumlah media penyebaran informasi kebencanaan	Media	-	3	3	3	3	3		
	Jumlah Aplikasi Sistem Informasi Kebencanaan	Aplikasi	-	-	-	1	-	-		
INDIKATOR SDGs: 11.6.1.(a). Persentase sampah perkotaan yang tertangani.										
Program Pengelolaan Sampah dan Limbah B3										
Pengelolaan sampah	Persentase timbulan sampah yang dikelola	%	60	-	62	63	64	65	3.900.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
INDIKATOR SDGs: 11.b.1*. Proporsi pemerintah kota yang memiliki dokumen strategi pengurangan risiko bencana.										
Program Pencegahan dan kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Daerah										

PROGRAM/ KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	BASELINE 2018	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	INSTANSI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023		
Peningkatan Kapasitas dan Partisipasi Masyarakat dalam Kesiapsiagaan	Jumlah peserta Rapat Teknis Kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana	Orang	-	-	100	100	100	100	1.000.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Jumlah peserta Jambore Relawan Bencana	Orang	-	-	500	500	500	500		
	Jumlah peserta Peringatan Hari Kesiapsiagaan Nasional	Orang	-	-	250	250	250	250		
	Jumlah dokumen Rencana Kontijensi Bencana dan Simulasi Penanggulangan Bencana	Dokumen	-	-	1	1	1	1		
	Jumlah dokumen review Rencana Kontijensi Bencana dan Simulasi Penanggulangan Bencana	Dokumen	-	-	1	1	1	1		
	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan Apel Siaga	Orang	-	-	500	500	500	500		
	Jumlah lokasi pemasangan Peta dan Rambu Bencana	Kab/Kota	-	-	1	1	1	1		

PROGRAM/ KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	BASELI NE 2018	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	INSTANSI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023		
	Jumlah Kab/kota yang mendapat pelayanan informasi rawan bencana	Kab/Kota	-	-	10	10	10	10		
	Jumlah Satuan Tugas (Satgas) Kesiapsiagaan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla)	Orang	-	-	26	26	26	26		
	Jumlah dokumen Profil Kesiapsiagaan	Dokumen	-	-	-	-	1	-		

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	BASELINE 2018	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	INSTANSI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023		
Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi Yang Bertanggungjawab										
INDIKATOR SDGs: 12.4.1.(a) Jumlah peserta Proper yang mencapai minimal ranking BIRU.										
Program Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup										
Pengendalian pencemaran lingkungan	Penurunan beban pencemaran	%	10	-	10	10	10	10	4.650.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
INDIKATOR SDGs: 12.4.2.(a) Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).										
Program Pengelolaan Sampah dan Limbah B3										
Pengelolaan limbah B3	Jumlah limbah B3 yang dikelola sesuai peraturan	Ton	10.000	-	11.000	12.000	13.000	14.000	2.450.000.000	Dinas Lingkungan Hidup

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	BASELINE 2018	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	INSTANSI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023		
Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim										
INDIKATOR SDGs: 13.1.2* Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.										
Program Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana										
Pengembangan SDM dan Informasi Penanggulangan Bencana	Jumlah Peserta Peringatan Bulan PRB	Orang	-	-	10	10	10	10	1.305.060.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Jumlah peserta pelatihan SAR	Orang	-	-	30	30	30	30		
	Jumlah peserta pembekalan Tim Reaksi Cepat (TRC)	Orang	-	-	30	30	30	30		
INDIKATOR SDGs: 13.2.1.(a) Dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK).										
Program Mitigasi Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Perkebunan										
Pengembangan energi baru terbarukan di sektor perkebunan	Jumlah perusahaan yang memanfaatkan limbah POME	Perusahaan		1					142.400.000	Dinas Perkebunan
Penanaman Pada Wilayah Cadangan Karbon Rendah	Luas area yang ditanami	Ha Cadangan Carbon Rendah/tahun	-	10.000	-	-	-	-	133.400.000	Dinas Perkebunan
Pengembangan EBT pada sektor Perkebunan	Jumlah perusahaan yang mengembangkan	PMS	-	-	2	3	3	3	1.565.000.000	Dinas Perkebunan

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	BASELINE 2018	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	INSTANSI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023		
	bioenergi									
Program Kebijakan Pengembangan Produksi Daerah										
Koordinasi Kebijakan Peningkatan Daya Dukung Lingkungan Hidup Berkelanjutan	Jumlah koordinasi kebijakan peningkatan daya dukung lingkungan hidup	kali	-	1	1	1	1	1	523.500.000	Biro Perekonomian

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	BASELINE 2018	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	INSTANSI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023		
Tujuan 14 Ekosistem Lautan										
INDIKATOR SDGs: 14.5.1* Jumlah luas kawasan konservasi perairan.										
Program Pengelolaan Ruang Laut										
Kegiatan Konservasi Kelautan dan Perikanan	Jumlah Kawasan yang direhabilitasi	Hektare	20	4	4	4	4	4	4.810.820.000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
INDIKATOR SDGs: 14.6.1.(a) Persentase kepatuhan pelaku usaha.										
Program Pengawasan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan										
Kegiatan Pengawasan, Pembudidaya, Pengolahan dan Pemasaran Perikanan	Jumlah Pengawasan Pembudidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Operasi	10	10	10	10	10	10	6.613.145.000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
INDIKATOR SDGs: 14.b.1.(b) Jumlah nelayan yang terlindungi.										
Program pengembangan perikanan tangkap										
Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan dan Kenelayanan	Jumlah Kelompok Usaha Bersama (KUB) Perikanan Tangkap yang Dibina	KUB	1.224	60	60	60	60	60	19.684.500.000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
	Indeks Kesejahteraan Nelayan	NTN	115.2	100	100	100	100	100		

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	BASELINE 2018	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	INSTANSI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023		
Tujuan 15 Ekosistem Daratan										
INDIKATOR SDGs: 15.3.1.(a). Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.										
Program Pengelolaan DAS dan RHL										
Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Luas lahan kritis yang direhabilitasi	Ha	38.771	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500	1.100.000.000	Dinas Kehutanan
Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBH DR)										
Perencanaan	Luas Rancangan Kegiatan Penanaman dan Luas Penanaman	Hektar	-	-	500	500	500	500	635.280.000	Dinas Kehutanan
Pelaksanaan	Luas Penanaman	Hektar	-	350	350	350	350	350	30.794.314.750	Dinas Kehutanan
Monitoring dan Evaluasi	Jumlah Monev RHL	Laporan	-	-	25	25	25	25	14.335.040.000	Dinas Kehutanan

PROGRAM/ KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	SATU AN	BASELINE 2018	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	INSTANSI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023		
Tujuan 17 Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan										
INDIKATOR SDGs: 17.1.1* Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.										
Program Koordinasi Penerimaan Bukan Pajak										
Koordinasi Pendapatan Retribusi Daerah	Jumlah Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah	Rupiah	19.955.750.000	28.616.725.000	33.620.185.000	22.489.341.200	21.723.275.704	31.209.722.618	6.445.416.500	Badan Pendapatan Daerah
Koordinasi Penerimaan lain-lain	Jumlah realisasi Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	Rupiah	-	244.898.000.000	227.111.724.398	347.869.891.338	416.492.946.444	435.905.980.434	2.899.192.000	Badan Pendapatan Daerah
	Jumlah realisasi lain - lain pendapatan asli daerah yang sah	Rupiah	-	571.234.000.000	785.923.810.602	795.350.270.462	806.111.727.852	826.152.807.448		
	Jumlah realisasi lain - lain pendapatan daerah yang sah	Rupiah	-	9.335.897.000	12.420.000.000	12.607.000.000	12.798.000.000	12.992.000.000		
Peningkatan Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	Jumlah realisasi bagi hasil pajak dan bukan pajak	Rupiah	-						4.371.375.500	Badan Pendapatan Daerah
	Jumlah realisasi DAU	Rupiah	-	642.102.000.000	815.693.641.000	815.693.641.000	815.693.641.000	815.693.641.000		
INDIKATOR SDGs: 17.1.1.(a) Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.										
Program Koordinasi Pajak Daerah										
Peningkatan pendapatan PKB dan BBNKB	Jumlah realisasi penerimaan PKB	Rupiah	788.000.000.000	800.000.000.000	824.000.000.000	848.720.000.000	874.181.600.000	900.407.048.000	12.915.943.000	Badan Pendapatan Daerah

PROGRAM/ KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	SATU AN	BASELINE 2018	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	INSTANSI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023		
	Jumlah realisasi penerimaan BBNKB	Rupiah	000.000.000	800.000.000	856.000.000	907.360.000	952.728.000	990.837.120.000		
Peningkatan pendapatan Pajak Daerah Lainnya	Jumlah realisasi penerimaan PBBKB	Rupiah	2.300.000.000						10.300.756.000	Badan Pendapatan Daerah
	Jumlah realisasi penerimaan Pajak AP	Rupiah	7.200.000.000	10.000.000	12.000.000	14.400.000	17.280.000.000	20.736.000.000		
	Jumlah realisasi penerimaan Pajak Rokok	Rupiah	200.000.000	150.000.000	160.500.000	171.735.000	183.756.450.000	196.619.401.500		
INDIKATOR SDGs: 17.11.1.(a) Pertumbuhan ekspor produk non migas										
Program Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan										
Perdagangan Luar Negeri	Jumlah Eksportir yang mendapatkan fasilitasi	Eksportir	-	-	60	70	80	90	4.121.087.000	Dinas Perindagkop dan UKM
INDIKATOR SDGs: 17.13.1* Tersedianya Dashboard Makroekonomi.										
Program Peningkatan Sinergitas Bidang Industri dan Jasa										
Peningk Siner gi Kebijakan Perekonomian Daerah	Hasil Rapat Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi	Laporan	-	3	3	3	3	3	2.269.000.000	Biro Perekonomian
INDIKATOR SDGs: 17.17.1.(a) Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).										
Program Kebijakan Peningkatan Investasi Daerah, Tata Kelola dan Kinerja BUMD										
Koordinasi Kebijakan Peningkatan Tata Kelola dan Kinerja BUMD	Jumlah koordinasi perusda dan lembaga keuangan	kali	-	3	7	7	7	7	1.794.800.000	Biro Perekonomian

MATRIK 2. PROGRAM DAN KEGIATAN NON PEMERINTAH

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	
		2019	2020	2021	2022	2023				
TUJUAN 2 Tanpa Kelaparan										
INDIKATOR TPB/SDGs 2.3.1* : Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja)										
Program : Penerapan Praktek Budidaya Yang Baik, Berkelanjutan Dan Ramah Iklim Sebagai Upaya Peningkatan Produktivitas dan Pendapatan Bagi Petani Kelapa Sawit Mandiri										
Kegiatan : ToT Sekolah Lapang Bagi Petani Kelapa Sawit Mandiri	Indikator : Trainers untuk Sekolah Lapang Bagi Petani Kelapa Sawit Mandiri Tersedia	Petani	N/A	75	75	75	75	Hibah	Solidaridad	Kab. Paser, PPU, Berau
Kegiatan :Sekolah Lapang Bagi Petani Kelapa Sawit Mandiri	Indikator : Terdapat xx petani kelapa sawit mandiri yang meningkat kemampuan GAPnya	Petani	N/A	1,500	1,500	1,500	1,500	Hibah	Solidaridad	Kab. Paser, PPU, Berau
Kegiatan :Pembuatan Demplot	Indikator : Demplot kebun kelapa sawit yang menerapkan GAP sebagai tempat belajar bagi petani kelapa sawit mandiri tersedia	Unit	1	1	1	1	1	Hibah	Solidaridad	Kab. Paser, PPU, Berau
Kegiatan : Pemetaan Kebun Petani	Indikator : Terpetakannya xx ha kebun petani kelapa sawit mandiri sebagai bahan pengurusan STDB	Ha	N/A					Hibah	Solidaridad	Kab. Paser, PPU, Berau
Program 3: Pendampingan Program Replanting Bagi Petani Mandiri									Solidaridad	Kab. Paser, PPU, Berau

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi
			2019	2020	2021	2022	2023			
Kegiatan 1: Identifikasi Lokasi Program Replanting	Indikator : Teridentifikasinya lokasi pendampingan proses replanting	Lokasi	1					Hibah	Solidaridad	Kab. Paser, PPU, Berau
Kegiatan 2: Pendampingan Proses Replanting Bagi Petani Mandiri	Indikator : Terdapat xx petani mandiri (seluas xx Ha kebun) kelapa sawit yang didampingi dan menerapkan proses replanting dengan baik	Petani, Ha	N/A					Hibah	Solidaridad	Tbd
Program: Penguatan Petani sekitar hutan										
Kegiatan: Dukungan pada pembangunan 3500 ha sistem pangan lokal tangguh .	Indikator : Kembangkan plot demonstrasi kakao di 3 wilayah sasaran Indikator : Peningkatan kapasitas untuk kelompok perkebunan kakao, sekolah lapangan petani di 3 wilayah sasaran							WWF Networks & Alliance	WWF	Mahakam landscape

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi
			2019	2020	2021	2022	2023			
Kegiatan: Intensifikasi kelapa sawit oleh petani kecil (diluar Hutan primer)	Indikator 1. Melakukan serangkaian pengembangan kapasitas pada praktik pertanian yang baik untuk kelompok petani kecil Indikator 2. Mengarusutamakan Kebijakan Daerah tentang Perkebunan Berkelanjutan di perencanaan kabupaten Indikator 3. Memfasilitasi implementasi GAP pada karet di desa Linggang Melapeh							WWF Networks & Alliance	WWF	Mahakam landscape

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi
		2019	2020	2021	2022	2023			
Kegiatan: Pemerintah dan kelompok masyarakat sipil telah dilatih dalam pelaksanaan mekanisme keuangan untuk mereplikasi komunitas tambahan.	Indikator 1. Melakukan pelatihan untuk lokakarya pelatih / fasilitator (ToT) untuk pejabat pemerintah dan masyarakat sipil tentang pengembangan desa hijau termasuk distrik lain di mana FCPF dilaksanakan pada kelompok sasaran (50) Indikator 2. Paparkan hasil implementasi, pengembangan desa hijau dari desa ke desa lain (berbagi pengetahuan)						WWF Networks & Alliance	WWF	Mahakam landscape
Kegiatan: fasilitasi pengembangan rencana dan implementasi desa hijau (hutan desa, kegiatan mata pencaharian) di lima desa dengan fokus khusus pada pencairan subsidi, dan mengadakan 5 konsultasi masyarakat	Indikator 1. Pengembangan rencana desa hijau & rencana anggaran di 5 desa sasaran Indikator 2. Mengembangkan perjanjian hibah dan mencairkan USD 30.000 ke 5 desa menggunakan mekanisme keuangan lokal Indikator 3. Membantu desa melaporkan penggunaan dan dampak dana yang dicairkan di lima desa						WWF Networks & Alliance	WWF	Mahakam landscape
TUJUAN 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera									

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	
		2019	2020	2021	2022	2023				
INDIKATOR TPB: 3.1.2.* Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 Kelahiran Hidup. 3.2.2. (a) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup. 3.c1* Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan										
PROGRAM 1 : Kesehatan										
Kegiatan : Peningkatan Kehidupan Sehat & Sejahtera	Indikator Kegiatan: Peduli kasih Orang Tua Bankaltimtara (Peningkatan Literasi Keuangan dan Edukasi, serta kegiatan Pemeriksaan Kesehatan bagi para pensiunan setiap bulannya)	Jumlah Orang	1,200	1,320	1,452	1,597	1,757	CSR Bankaltimtara	Bankaltimtara	Seluruh Kabupaten dan Kota di Propinsi Kaltim dan Kaltara
Kegiatan : Peningkatan Kehidupan Sehat & Sejahtera	1.2. Khitan Bersama Bankaltimtara	Nominal	60,000,000	72,000,000	86,000,000	103,000,000	123,000,000	CSR Bankaltimtara	Bankaltimtara	Seluruh Kabupaten dan Kota di Propinsi Kaltim dan Kaltara
TUJUAN 4 Pendidikan Berkualitas										
INDIKATOR TPB/SDGs 4.a.1* : Proporsi sekolah dengan akses ke (c) komputer untuk tujuan pengajaran										
PROGRAM : Peningkatan sarana dan prasarana penunjang penelitian										
Kegiatan : Pembangunan dan pengembangan laboratorium atau balai reiset	Indikator: terbangunnya fasilitas riset untuk menunjang penelitian	%	20	20	20	20	20	30,000	APBD	Kalimantan Timur
	Indikator: peningkatan fungsi fasilitas riset yang sudah ada	%	20	20	20	20	20	5,000	APBD	Kalimantan Timur

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	
		2019	2020	2021	2022	2023				
Kegiatan : Pembinaan tenaga peneliti untuk melakukan riset	Indikator: meningkatnya jumlah minat masyarakat menjadi peneliti dalam berbagai bidang ilmu	%	20	20	20	20	20	5,000	APBD	Kalimantan Timur
	Indikator: meningkatnya publikasi ilmiah	%	20	20	20	20	20	5,000	APBD	Kalimantan Timur
	Indikator: meningkatnya hasil riset yang dimanfaatkan untuk pembangunan Kalimantan Timur	%	20	20	20	20	20	5,000	APBD	Kalimantan Timur
Kegiatan: Sosialisasi program Muhammadiyah bidang seni budaya dan olahraga	Indikator: Terbentuknya rumusan mengenai program Muhammadiyah di bidang seni budaya dan olahraga	Persen	20%	30%	50%	60%	80%	150.000.000,-	Kas PWM Kaltim	Kab/kota se-Kaltim
	Indikator: Dibentuknya tim sosialisasi di daerah untuk mengencarkan berbagai program Muhammadiyah di bidang seni budaya dan olahraga									
PROGRAM : Sekolah sehat										
Kegiatan : Audit Lingkungan Mandiri Muhammadiyah (ALiMM)	Indikator :Meningkatnya efisiensi penggunaan energi listrik dan penggunaan air bersih di gedung sekolah	Unit Sekolah (SD-SMP-SMK) Muhammadiyah						60.000.000	Amal Usaha Muhammadiyah	Kaltim

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi
			2019	2020	2021	2022	2023			
Kegiatan: Konservasi Lingkungan	Indikator : Meningkatnya tutupan lahan marjinal dengan tanaman penghijauan	5 Paket						100,000,000	Amal Usaha Muhammadiyah	Kaltim
Kegiatan: 3R (REDUCE-REUSE-RECYCLE) SAMPAH	Indikator : Berkurangnya penggunaan kemasan plastik dalam aktivitas harian di sekolah	Unit Sekolah (SD-SMP-SMK) Muhammadiyah						80.000.000	Amal Usaha Muhammadiyah	Kaltim

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	
		2019	2020	2021	2022	2023				
INDIKATOR TPB/SDGs :4.c.1.: Persentase guru (TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.										
PROGRAM : Peningkatan mutu pendidikan tinggi dan Tenaga kependidikan										
Kegiatan 1 : Pembinaan tenaga kependidikan di perguruan Tinggi (Dosen, Laboran)	Indikator: Dosen yang melanjutkan pendidikan pada strata 2 dan 3	%	20	20	20	20	20	APBD	LP3M Unmul	Kalimantan Timur
	Indikator: Tenaga Laboran dan pustakawan yang bersertifikasi	%	20	20	20	20	20	APBD	LP3M Unmul	Kalimantan Timur
Kegiatan 2 : Pembinaan minat siswa lanjut ke perguruan tinggi	2.1. Indikator Kegiatan : kemauan siswa lanjut ke pendidikan tinggi	%	20	20	20	20	20	APBD	LP3M Unmul	Kalimantan Timur
	2.2. Indikator Kegiatan : meningkatkan siswa asal kaltim yang masuk ke perguruan tinggi	%	20	20	20	20	20	APBD	LP3M Unmul	Kalimantan Timur
Kegiatan 3 : pembinaan penelitian di perguruan tinggi	3.1. Indikator Kegiatan : Hasil Penelitian yang terpublikasi	%	20	20	20	20	20	APBD	LP3M Unmul	Kalimantan Timur
	3.2. Indikator Kegiatan : Hasil penelitian yang dimanfaatkan untuk pembangunan Kalimantan Timur	%	20	20	20	20	20	APBD	LP3M Unmul	Kalimantan Timur

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi
			2019	2020	2021	2022	2023			
Kegiatan : Bantuan peningkatan kualitas pendidikan	Indikator: Beasiswa Prima Bankaltim tara	Nominal	1,200,000,000	1,584,000,000	1,728,000,000	1,872,000,000	#####	CSR Bankaltim tara	Bankaltim tara	Seluruh Universitas Kabupaten dan Kota di Propinsi Kaltim dan Kaltara yang bekerjasama dengan Bankaltim tara
Kegiatan : Bantuan peningkatan kualitas pendidikan	Indikator: Beasiswa Prima Bankaltim tara	Jumlah Orang	100	110	120	130	140	CSR Bankaltim tara	Bankaltim tara	Seluruh Universitas Kabupaten dan Kota di Propinsi Kaltim dan Kaltara yang bekerjasama dengan Bankaltim tara
PROGRAM : Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah dan Guru										
Kegiatan: Penguatan Kompetensi Kepala Sekolah	Indikator: Terselenggaranya Diklat Penguatan Kepala Sekolah sesuai dengan Peraturan Pemerintah (Kepmen. Mendikbud)	@ 5.000.000 x 80 orang = 400.000.000						400,000,000	APBD Kaltim	Samarinda, Kaltim

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi
			2019	2020	2021	2022	2023			
	Indikator: . Diikuti oleh Seluruh Kepala Sekolah Muhammadiyah sesuai dengan Peraturan Pemerintah									
Kegiatan: Diklat Calon Kepala Sekolah	Indikator: Terselenggaranya Diklat Calok Kepala Sekolah bagi Sekolah Muhammadiyah									
	Indikator: Tersedianya calon kepala sekolah khususnya dilingkungan pendidikan Muhammadiyah secara periodik sesuai peraturan pendidikan yang berlaku	@10.000.000 x 80 orang = 800.000.000						2,400,000,000	APBD Kaltim	Samarinda, Kaltim

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	
		2019	2020	2021	2022	2023				
Program: Pembinaan Olahraga										
Kegiatan: Program unggulan Cabang olahraga	Indikator: Terlaksananya forum untuk membahas tindaklanjut pengembangan pada cabang olahraga renang, panahan dan bela diri (Tapak Suci)	Kegiatan / Lomba	2	4	6	6	6	600.000.000,-	Kas PWM Kaltim, Kas Kepanitiaan	Kab/kota se-Kaltim
	Indikator: Adanya rumusan termutakhir dalam upaya pengembangan olahraga renang, panahan dan bela diri (Tapak Suci)									
Kegiatan: Tatakala kegiatan olahraga	Indikator: Pembentukan tim khusus pengawasan agar sesuai dengan tatakala kegiatan olahraga	persen	80%	100%	100%	100%	100%	50.000.000,-	Kas PWM Kaltim	Kab/kota se-Kaltim
	Indikator: Dibentuknya rancangan yang lebih rinci terkait tatakala kegiatan olahraga yang telah diatur									

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	
		2019	2020	2021	2022	2023				
Program : Pembinaan seni budaya di akar rumput melalui Pengabdian masyarakat										
Kegiatan: Pembinaan dan pengembangan seni, budaya, dan olahraga	Indikator: Kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa (KKN) diselenggarakan	Kegiatan	2	2	2	2	2	185.000.000,-	Kas PWM Kaltim	Lokus Pengabdian
Kegiatan: KKN, PPM, dan P3M yang dilaksanakan oleh Amal Usaha Muhammadiyah (AUM)	Indikator: sosialisasi pencahangan program pengabdian pada masyarakat	Kegiatan	4	6	12	18	18	150.000.000,-	Kas PWM Kaltim	Kab/kota se-Kaltim
	Indikator: nota kesepemahaman pada pihak terkait sebagai bentuk dukungan pada program pengabdian pada masyarakat.									

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	
		2019	2020	2021	2022	2023				
Program : Syiar Islam melalui pagelaran seni										
Kegiatan: Meneliti, membina mengembangkan, dan melestarikan seni budaya yang membawa pesan kerisalahan dan peradaban islam serta melakukan evaluasi	Indikator: tim kolaborasi dibentuk (tugas melakukan penelitian, pembinaan, pengembangan dan pelestarian seni budaya yang membawa pesan kerisalahan dan peradaban islam)	Kegiatan / Modul	2	4	6	6	6	150.000.000,-	Kas PWM Kaltim	Kab/kota se-Kaltim
Kegiatan:Perumusan dan strategi Muhammadiyah dalam memperingati HBI dan HBN	Indikator: perumusan dan kategorisasi Hari-hari Besar baik Hari Besar Islam ataupun Nasional	Kegiatan	4	6	12	18	18	70.000.000,-	Kas PWM Kaltim	Kab/kota se-Kaltim
	Indikator: perencanaan jangka panjang dalam bentuk kegiatan sebagai upaya mengisi atau memperingati Hari-Hari Besar Islam maupun Nasional									

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi
		2019	2020	2021	2022	2023			
Tujuan 5: Kesetaraan Gender									
Indikator 5.1.1. Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun									
Program : Pengembangan isu Gender di sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan									
Kegiatan 1: Dukungan peningkatan kapasitas bagi aparatur di KLHK mengenai pengarus-utamaan Gender	Indikator 1 : 2 peraturan Nasional dan 2 peraturan daerah yang baru/diperbaharui dalam pengembangan KPH yang merujuk pada UU 23/2014 mengadopsi pembelajaran dari Forclime TC.							GIZ FORCLIME	Kalimantan Timur dan Berau
Kegiatan 2: Dukungan kebijakan dan proses revisi modul serta sosialisasinya								GIZ FORCLIME	Kalimantan Timur dan Berau
Kegiatan 3 :Peningkatan kapasitas tentang pengarus-utamaan Gender bagi masyarakat di lokasi FORCLIME								GIZ FORCLIME	Kalimantan Timur dan Berau
Kegiatan 4: Penyediaan materi Komunikasi Edukasi dan Informasi ramah Gender.								GIZ FORCLIME	Kalimantan Timur dan Berau
Tujuan 6: Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua									
Indikator 6.5.1.(e) : Luas pengembangan hutan serta peningkatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) untuk pemulihan kawasan DAS.									

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi
			2019	2020	2021	2022	2023			
Kegiatan :(15.9) Pengembangan hasil hutan bukan kayu	Indikator :Rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati								UNMUL dan Balai Besar Penelitian dan pengembangan Ekosistem Hutan Dipterokarpa	Kalimantan Timur
INDIKATOR TPB/SDGs 6.5.1.(h):Jumlah DAS Prioritas yang meningkat jumlah mata airnya melalui konservasi sumber daya air di										
Kegiatan 1: (15.2) Restorasi hutan rawa air tawar	Indikator : Luasan kawasan KEE lahan basah yang dipulihkan kondisinya							20,200,000	Yasiwa	Lahan basah Suwi

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	
		2019	2020	2021	2022	2023				
Tujuan 7 : Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern untuk semua										
Indikator: 7.1.1* Rasio Elektrifikasi,										
Program: 1. Penerapan strategi Pertumbuhan										
Kegiatan 1. Bantuan Teknis Penyusunan Dokumen Rencana Umum Energi Daerah (RUED Kaltim)	Indikator Kegiatan 1: Dokumen Rencana Umum Energi Daerah Kaltim	1 Laporan	n/a	n/a	Review RUED	n/a	n/a		GGGI	Kalimantan Timur
Indikator: 7.2.1* Bauran Energi Terbarukan										
Program: Mendorong investasi hijau pada sektor utama/penting (energi)										
Kegiatan 1. Pra-FS Penyebaran Solar PV (2015)	Indikator Kegiatan 1: Pre-FS solar Photo Voltaik selesai dan maju ke tahap detil FS dan Implementasi	1 Laporan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a		GGGI	On-Grid: Kabupaten Kutai Kartanegara , Off-Grid: Kabupaten Berau (Long Gie, Merabu)
Kegiatan 4. Pra-FS Pemetaan Potensi Limbah Biomass di Kaltim	Indikator Kegiatan 4: Daftar Potensi Biomass di Kalimantan Timur	1 Laporan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a		GGGI	Kutai Barat, Kutai Timur, Mahakam Ulu dan Berau

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi
			2019	2020	2021	2022	2023			
Kegiatan 5. Market assesment BioCNG dari limbah cair kelapa sawit dan industri pengolahan singkong	Indikator Kegiatan 5: Pasar BioCNG teridentifikasi, dilanjutkan dengan analisis kelembagaan, regulasi, finansial.	1 Laporan	potensi pasar teridentifikasi	n/a	analisis financial & kelembagaan	n/a	n/a		GGGI	Kalimantan Timur
Indikator: 7.3.1*Intensitas energi Primer										
Program: Mendorong investasi hijau pada sektor utama/penting (energi) (2017)										
Kegiatan 1. Mempromosikan Audit Penggunaan Energi pada Industri untuk mengakses skema ESCO (Energy Services Company) (2017)	Indikator Kegiatan 1: Setidaknya 1 industri bersedia melaksanakan EE dengan skema ESCO	1 Laporan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a		GGGI	Kalimantan Timur
TUJUAN 8 Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi										
INDIKATOR TPB 8.3.1(b).Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian										
PROGRAM 1 : Peningkatan pendapatan										
Kegiatan: Pelatihan Kemampuan Pengelolaan Keuangan Rumah Tangga/Financial Capabilities	Indikator : peserta perempuan pelatihan mampu mengelola keuangan rumah tangganya secara lebih baik	Rumah Tangga	N/A	xx	xx	xx	xx	Hibah	Solidaridad Kerjasama Dengan Lembaga Keuangan	Kab. Paser, PPU, Berau

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi
			2019	2020	2021	2022	2023			
Kegiatan: Dukungan Akses Pembiayaan Untuk Kegiatan Produktif Rumah Tangga	Indikator : eserta perempuan pelatihan mendapatkan dukungan pembiayaan untuk kegiatan produktif Rumah Tangga	Rumah Tangga	N/A	xx	xx	xx	xx	Hibah	Solidaridad Kerjasama Dengan Lembaga Keuangan	Kab. Paser, PPU, Berau

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	
		2019	2020	2021	2022	2023				
INDIKATOR TPB/SDGs 8.3.1.(c) : Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan										
PROGRAM : Peningkatan Kapasitas Pelaku Ekonomi										
KKegiatan: Membangun / Mendirikan Lembaga Keuangan Mikro Berbasis Syariah Baik Berupa Koperasi / Baitut Tamwil (BTM)	Indikator: Disetiap Kota / Kabupaten dimana ada Pimpinan Daerah Muhammadiyah terdapat LKM / BTM / Koperasi Syariah Terjadi Akselerasi terhadap Akses Keuangan Sebagai Sumber Permodalan Bagi UMKM Pergeseran Kegiatan - Ekonomi dari Konvensional ke Syariah	10 Kab/Kota						3.500.000 .000	APBD Kaltim	Kaltim
Kegiatan: Pendidikan, Pelatihan & Bimtek Berjenjang Pengelolaan Keuangan Berbasis Syariah	Indikator: Memahami Pengelolaan Keuangan Memahami Risiko-risiko Pengelola Keuangan Kompetensi Pengelola Keuangan Semakin Baik Memahami Konsep Dasar Pembentukan Lembaga-lembaga Keuanagan BTM / Koperasi							2.500.000 .000	APBD Kaltim	Kaltim

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi
			2019	2020	2021	2022	2023			
Kegiatan: Study Banding Bench Marking	Indikator: Pengelolaan Kegiatan Usaha yang Lebih Profesional, Terjadi Tata Kelola Usaha yang lebih baik IT, Sistem Aplikasi dan SOP yang lebih baik	10 Kab/Kota						1.500.000.000	APBD Kaltim	Kaltim
Kegiatan: Pendidikan, Pelatihan Seminar, Bimtek, Sertifikasi bagi Masyarakat / Pelaku-pelaku Usaha	Indikator: Mengetahui & memahami konsep dengan Manajemen usaha yang baik (Pengembangan dan pemasaran Produk, Pemanfaatan IT dan Sistim Aplikasi Berbasis Online, Pengelolaan Keuangan yang Lebih Baik, Tercipta Instruktur Coaching, Mentoring dan Pendamping yang handal/TeT)	10 Kab/Kota						2.500.000.000	APBD Kaltim	Kaltim

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi
			2019	2020	2021	2022	2023			
Kegiatan: Membentuk Desa / RT Kreatif sebagai Mitra Binaan MEK, PW, Muhammadiyah Kaltim	Indikator: Disetiap Kota Kabupaten Minimal terdapat satu Desa Binaan Setiap Tahunnya, Terciptanya Lapangan Kerja Meminimalisasi Tingkat kemiskinan / Pengangguran, Pemberdayaan Masyarakat yang Lebih Produktif	10 Kab/Kota						3.500.000.000	APBD Kaltim	Kaltim
PROGRAM : Taspen										
Kegiatan : Optimalisasi Fungsi Smart Card	Indikator: Smart Card terdistribusi kepada seluruh peserta	Jumlah peserta	70%	100%	100%	100%	100%			Seluruh Kabupaten/ Kota
	Indikator: Peserta memahami fungsi Smart Card sebagai kartu diskon melalui sosialisasi dan publikasi yang berkelanjutan	Jumlah sosialisasi	24	24	24	24	24	48	PT TASPEN (PERSERO)	Seluruh Kabupaten/ Kota
Kegiatan : Advokasi Penguatan payung hukum PT TASPEN (PERSERO) sebagai BUMN Jaminan Sosial Khusus ASN	Indikator: Advokasi kepada seluruh Pemda/KPPN	Jlh advokasi/ sosialisasi	24	24	24	24	24	48	PT TASPEN (PERSERO)	Seluruh Kabupaten/ Kota

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi
			2019	2020	2021	2022	2023			
Kegiatan : Mengembangkan program Loyalty benefit bagi ASN	Indikator: Pemasaran produk BUMN/BUMD/Swasta kepada seluruh peserta	Jumlah peserta yang menggunakan Kartu TASPEN	1,090	1,090	1,090	1,090	1,090	24	PT TASPEN (PERSERO)	Seluruh Kabupaten/ Kota
Kegiatan : Pemasaran produk anak perusahaan	Indikator: Fee based income atas pemasaran produk Taspen Save, Taspen Dwiguna Sejahtera, dan Taspen Proteksi Beasiswa	Rupiah	7,000,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000	45	PT TASPEN LIFE	Seluruh Kabupaten/ Kota
Kegiatan : Penerimaan iuran Jaminan Kecelakaan Kerja & Jaminan Kematian bagi peg Non PNS dan Non Pegawai Pemerintah dgn Perianjian Kerja	Indikator: Data pegawai Non-ASN dan Non-PPPK yang diterima	orang	100%	100%	100%	100%	100%		PT TASPEN (PERSERO)	Seluruh Kabupaten/ Kota
	Indikator:Iuran pegawai Non-ASN dan Non-PPPK yang diterima	Rupiah	70%	80%	90%	100%	100%		PT TASPEN (PERSERO)	Seluruh Kabupaten/ Kota

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	
		2019	2020	2021	2022	2023				
INDIKATOR TPB/SDGs 8.3.1*: Proporsi lapangan kerja informal sektor nonpertanian, berdasarkan jenis kelamin										
INDIKATOR TPB/SDGs 8.9.1.(a)/(b): Jumlah wisatawan mancanegara / Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.										
Program : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan										
Kegiatan : Pengembangan produk dan pemasaran hasil hutan bukan kayu/ komoditas pertanian/perkebunan/ perikanan/jasa lingkungan	Indikator: jumlah jenis HHBK dan/atau Jasling dikembangkan dan menjadi sumber ekonomi masyarakat.	jumlah jenis	4 jenis HHBK dan/atau Jasling	6 jenis HHBK dan/atau Jasling	8 jenis HHBK dan/atau Jasling	10 jenis HHBK dan/atau Jasling	NDY	TFCA KALIMANTAN	TFCA KALIMANTAN	80 % (Kapuas Hulu, Kutai Barat, Mahalam Ulu, Berau) 20 % diluar 4 kabupaten sasaran di Kalimantan
	Indikator: jumlah KK yang meningkat & prosentase peningkatan pendapatan	jumlah & prosentase	400 KK meningkat pendapatannya sebesar 2%.	600 KK meningkat pendapatannya sebesar 3%	800 KK meningkat pendapatannya sebesar 4%.	1000 KK meningkat pendapatannya sebesar 5%.		TFCA KALIMANTAN	TFCA KALIMANTAN	80 % (Kapuas Hulu, Kutai Barat, Mahalam Ulu, Berau) 20 % diluar 4 kabupaten sasaran di Kalimantan

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	
		2019	2020	2021	2022	2023				
Tujuan 9: Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi										
INDIKATOR TPB 9.2.2* Proporsi tenaga kerja pada sektor industri pengolahan non migas. 9.3.1.*Proporsi nilai tambah industri kecil										
INDIKATOR TPB: 9.1.1.(a) Kondisi mantap jalan nasional										
Program: Pendekatan pemungkin secara										
Kegiatan 1: Penerapan extended cost benefit analysis dan model sistem dinamik pada kawasan strategis provinsi (Maloy)	Indikator Kegiatan 1: Laporan teknis model sistem dinamik KSP KIO Maloy (Rencana Aksi Percepatan Implementasi KEK Maloy)	Laporan							GGGI	Kalimantan Timur
INDIKATOR TPB/SDGs 9.3.1*: Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.										
INDIKATOR TPB/SDGs 9.3.2*: Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.										
Program: Dukungan Akses Pasar & Finansial										
Kegiatan 1: Pemetaan Aktor dan Rantai Nilai	Indikator Kegiatan 1: Pelaku usaha komoditas kelapa sawit, karet, dan kakao beserta dengan rantai nilai terpetakan	Dokumen	1	xx	N/A	N/A	N/A	Hibah	Kab. Paser, PPU, Berau	Solidaridad
Kegiatan 2: Peningkatan Kapasitas Koperasi/Bentuk Usaha Lainnya Bagi Petani Mandiri	Indikator Kegiatan 2: Lembaga pengelola unit usaha terbentuk/menguat, rencana usaha tersedia	Kegiatan	N/A	1	2	2	2	Hibah	Tbd	Solidaridad

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi
			2019	2020	2021	2022	2023			
Kegiatan 3: Dukungan Teknis Kerjasama	Indikator Kegiatan 3: Proses kerjasama antara unit usaha ekonomi milik petani mandiri terfasilitasi baik	Kegiatan	N/A	1	2	2	2	Hibah	Tbd	Solidaridad
Tujuan 11: Menjadikan kota dan pemukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan										
INDIKATOR TPB/SDGs 11.5.1.(b) : Jumlah kota tangguh bencana yang terbentuk.										
PROGRAM : Pencegahan, kesiapsiagaan, kedaruratan danrehalititasi rekontruksi										
Kegiatan: Meningkatkan sistem pemahaman dan kesadaran warga persyarikatan muhamadiyah dan masyarakat secara umum dalam penanggulangan dan mitigasi bencana yang berwawasan pengurangan risiko bencana dengan berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan dan keislaman sebagai bagian dari perwujudan gerakan	Inidikator : Menyusun basis data kapasitas, ranting, cabang, Daerah Muhamadiyah dalam penanggulangan bencana	5	1	1	1	1	1	100,000,000	Muhamadiyah	9 kab/kota se kaltim
	Inidikator: Pembuatan sistem informasi terpadu kapasitas ranting, cabang, daerah muhamadiyah	5	1	1	1	1	1	150,000,000	Muhamadiyah	9 kab/kota se kaltim
	Inidikator : Publikasi kampanye siaga bencana melalui media dan sekolah	15	3	3	3	3	3	150,000,000	Muhamadiyah	9 kab/kota se kaltim

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	
		2019	2020	2021	2022	2023				
islam berkemajuan	Inidikator : Rapat koordinasi penanggulangan bencana dan bantuan kemanusiaan di dalam jaringan muhamadiyah	5	1	1	1	1	1	50,000,000	Muhamadiyah	9 kab/kota se kaltim
Kegiatan: Meningkatkan kapasitas personil pimpinan dan kelembagaan perserikatan di seluruh tingkatan yang efektif sebagai penggerak ketangguhan menghadapi bencana	Indikator :Mengembangkan sistem administrasi kantor	5	1	1	1	1	1	50,000,000	Muhamadiyah	PWM Kaltim
	Inidikator : Rapat kerja Wilayah LPB Muhammadiyah Kaltim	5	1	1	1	1	1	200,000,000	Muhamadiyah	PWM Kaltim
	Inidikator : Workshop mitigasi bencana "kesepahaman pengarus utamaan PRB di muhamadiyah	10	2	2	2	2	2	200,000,000	Muhamadiyah	9 kab/kota se kaltim
Kegiatan: .Menguatkan dan menjaga simpul jaringan penanggulangan bencana antar pimpinan persyarikatan (Majlis,	Inidikator : Mewakili PW.Muhamadiyah Kaltim dalam koordinasi penanggulangan bencana dan penanganan masalah kemanusiaan	15	3	3	3	3	3	200,000,000	Muhamadiyah	Sesuai undangan tempat acara

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	
		2019	2020	2021	2022	2023				
lembaga, ortom amal usaha) dan dengan lembaga penanggulangan bencana tingkat kaltim dan nasional	Indikator: Membangun "gerakan pelajar Turun tangan"	5	1	1	1	1	1	50,000,000	Muhamadiyah	9 kab/kota se kaltim
	Bulan Donasi mdmc	10	2	2	2	2	2	50,000,000	Muhamadiyah	9 kab/kota se kaltim
Kegiatan: Meningkatkan kapasitas pimpinan, kader, anggota dan relawan dalam mengoptimalkan program muhamadiyah bidang penanggulangan bencana	Indikator: Pengadaan dan pengelolaan gudang LPB PWM Kaltim	5	1	1	1	1	1	50,000,000	Muhamadiyah	PWM Kaltim
	Indikator: Pengadaan peralatan dan kelengkapan pelaksana kegiatan	5	1	1	1	1	1	200,000,000	Muhamadiyah	PWM Kaltim
	Indikator: Pelatihan Tingkat wilayah : (a) Manajemen tanggap darurat, (b) SAR, © Medis, (d) Sekolah siaga bencana (e) jamaah tangguh	15	3	3	3	3	3	250,000,000	Muhamadiyah	PWM Kaltim
Kegiatan: Meningkatkan peran penanggulangan dan mitigasi bencana, meningkatkan fungsi advokasi pelayanan dan kebijakan	Indikator: Mensosialisasikan SOP tanggap darurat	10	2	2	2	2	2	100,000,000	Muhamadiyah	Kabupaten/ Kota
	Indikator : Pembentukan Pusdalop di tingkat PWM kaltim	5	1	1	1	1	1	50,000,000	Muhamadiyah	PWM Kaltim

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi
			2019	2020	2021	2022	2023			
publikberkaitan dengan penanggulangan bencana	Indikator : Pelaksanaan respon lokal yang berjalan efektif	10	2	2	2	2	2	200,000,000	Muhamadiyah	Kab/Kota
PROGRAM : Perencanaan Pembangunan										
Kegiatan 1 : Dukungan penyusunan rencana tata ruang desa	Indikator Kegiatan 1 : Tersedianya Peraturan Desa tentang rencana tata ruang desa-desa di Kecamatan Kombeng, yang disepakati oleh para pihak	Peraturan desa		3	7			BMU-ICI	GIZ SCPOP	Kutai Timur
Kegiatan 2 : Dukungan rencana detail tata ruang Kecamatan Kombeng	Indikator Kegiatan 2 : Tersedianya Rancangan Peraturan Daerah tentang RDTR Kecamatan Kombeng yang memperhatikan Rencana Tata Ruang desa-desa	Rancangan peraturan daerah			1			BMU-ICI	GIZ SCPOP	Kutai Timur
Dukungan kapasitas daerah dan desa dalam monitoring rencana tata ruang	Pengembangan kebun di Kecamatan Kombeng sesuai dengan rencana tata ruang desa dan RDTR	ha			1000	2000	3000	BMU-ICI	GIZ SCPOP	Kutai Timur
TUJUAN 12. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab										
INDIKATOR TPB/SDGs 12.7.1.(a) : Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.										
Program 2: Mendorong Proses Sertifikasi ISPO Bagi Petani Kelapa Sawit Mandiri										

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi
			2019	2020	2021	2022	2023			
Kegiatan : Pendampingan Kelompok	Indikator Kegiatan 1: Terdapat xx kelompok petani (xx Individu petani, seluas xx ha kebun) kelapa sawit mandiri yang didampingi guna persiapan proses sertifikasi	Poktan, Petani, Ha	N/A	N/A	xx	xx	xx	Hibah	Kab. Paser, PPU, Berau	Solidaridad
Kegiatan : Dukungan Proses Audit Sertifikasi	Indikator Kegiatan 2: Terdapat xx kelompok petani (xx individu petani, seluas xx ha kebun) kelapa sawit mandiri yang mengikuti sertifikasi	Poktan, Petani, Ha	N/A	N/A	N/A	xx	xx	Hibah	Tbd	Solidaridad
Kegiatan : Pelatihan penerapan standar perkebunan yang baik	Pelatihan tentang Praktik Perkebunan yang Baik telah diberikan kepada petani di Kecamatan Kombeng	Petani	100	400	600	600	600	BMU-ICI	GIZ SCPOP	Kutai Timur
Kegiatan : Dukungan pemetaan dan pengumpulan data kebun petani	Lahan kebun sawit milik pekebun anggota koperasi mitra telah memiliki STDB dan bukti kepemilikan lahan	ha (untuk STDB)		500	1000	2000		BMU-ICI	GIZ SCPOP	Kutai Timur

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi
			2019	2020	2021	2022	2023			
Kegiatan : Fasilitasi kesepakatan kemitraan untuk penyediaan insentif	Tersedianya insentif, terutama untuk pekebun, untuk menerapkan praktek pertanian yang berkelanjutan dan rendah emisi	Jumlah insentif		1				BMU-ICI	GIZ SCPOP	Kutai Timur
Kegiatan : Dukungan sertifikasi ISPO dan RSPO untuk pekebun	Para pekebun di koperasi-koperasi mitra di Kecamatan Kombeng terfasilitasi untuk mendapatkan ISPO dan RSPO	Petani dg sertifikat ISPO & RSPO					100	BMU-ICI	GIZ SCPOP	Kutai Timur
Kegiatan : Dukungan penyusunan rencana perkebunan daerah	Tersusunnya Rencana Perkebunan Berkelanjutan Kabupaten Kutai Timur oleh multi-pihak;	Rencana perkebuna				1		BMU-ICI	GIZ SCPOP	Kutai Timur
Kegiatan : Penguatan kapasitas pengelolaan data kabupaten	Beroperasinya portal data yang diperlukan untuk tata kelola lahan dan perkebunan	Portal data		1				BMU-ICI	GIZ SCPOP	Kutai Timur

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi
			2019	2020	2021	2022	2023			
Kegiatan : Penyusunan pedoman integrasi konsep ABKT ke dalam proses AMDAL	Tersedianya pedoman integrasi konsep “Area Bernilai Konservasi Tinggi” ke dalam Proses AMDAL dan Izin Lingkungan untuk Usaha Perkebunan	Pedoman		1				BMU-ICI	GIZ SCPOP	Kutai Timur

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi
		2019	2020	2021	2022	2023			
Program: Sertifikasi pengelolaan hutan									
Kegiatan : Implementasi BMP pada 300.000 ha produksi hutan baru berada di bawah sertifikasi yang kredibel	Indikator 1. Identifikasi & penilaian kesenjangan unit manajemen hutan Indikator 2. Mengembangkan rencana aksi sertifikasi (CAP) menuju FSC dan ditandatangani oleh UPH Indikator 3. Identifikasi HCV dan kembangkan rencana manajemen Indikator 4. Melakukan pelatihan tentang BMP dan SFM (FSC)						WWF Networks & Alliance	Mahakam landscape	WWF
Tujuan 13: Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya									
Indikator: 13.2.1(a): Dokumen pelaporan									
Program: Penerapan strategi Pertumbuhan									
Kegiatan: Bantuan teknis persiapan pelaksanaan ERPD	Indikator: rencana penurunan emisi tersusun		identifikasi	Pelaksanaan	Verifikasi I	Pembayaran I	Verifikasi II	GGGI	Kalimantan Timur
Kegiatan : Bantuan teknis untuk penyusunan RUED (pelaporan emisi dari sektor energi dan transportasi)	Indikator: Review target dalam rencana umum energi daerah	dokumen review	n/a	n/a	Review RUED Provinsi	n/a	n/a	GGGI	Kalimantan Timur

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi
			2019	2020	2021	2022	2023			
Kegiatan : Bantuan teknis penyusunan ERPD dan pelaporan mitigasi dan adaptasi	Indikator : Petunjuk pelaksanaan pelaporan (adaptasi)	guidance	tdb	tdb	tdb	tdb	tdb		GGGI	Kalimantan Timur
Kegiatan: Fasilitasi peningkatan kapasitas KPH dalam penyusunan strategi penurunan emisi terintegrasi	Indikator : Jumlah Rencana Bisnis KPH masuk ke tahap persiapan pelaksanaan	rencana bisnis	1	1	1	1	1		GGGI	
Kegiatan: Bantuan teknis persiapan pelaksanaan ERPD (sosialisasi dan dukungan pendampingan kampung iklim plus)	Indikator : Identifikasi lokasi/desa untuk intervensi Kampung Iklim Plus	jumlah desa							GGGI	150 Desa dengan indeks risiko emisi tinggi menurut analisis spasial

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	
		2019	2020	2021	2022	2023				
Program : Dukungan Penyelenggaraan Proklamasi Dalam Kerangka FCPF-CF Di Kaltim										
Kegiatan 1: Penyusunan Rencana Tataruang Desa	Indikator Kegiatan 1: Dokumen Rencana tataruang Desa yang mengakomodir upaya mitigasi & adaptasi perubahan iklim	Desa	N/A	3	3	N/A	N/A	Hibah	Solidaridad	Kab. Paser, PPU, Berau
Kegiatan 2: Penyusunan Rencana Kerja Proklamasi dan Integrasi ke Dalam RKP Desa	Indikator Kegiatan 2: Dokumen perencanaan desa yang selaras dengan upaya mitigasi & adaptasi perubahan iklim	Desa	N/A	3	3	6	6	Hibah	Solidaridad	Kab. Paser, PPU, Berau
Kegiatan 3: Pendampingan Implementasi	Indikator Kegiatan 3: Pelaksanaan program kampung iklim berjalan	Desa	N/A	3	3	6	6	Hibah	Solidaridad	Kab. Paser, PPU, Berau

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi
			2019	2020	2021	2022	2023			
Program : Menguatnya praktik mitigasi										
Kegiatan : Pencegahan penurunan cadangan karbon dan/atau peningkatan cadangan karbon	ha tutupan hutan dipertahankan.	ha	88.000 ha hutan.	92.000 ha hutan.	96.000 ha hutan.	100.000 ha hutan.	NDY	TFCA KALIMANTAN	80 % (Kapuas Hulu, Kutai Barat, Mahalam Ulu, Berau) 20 % diluar 4 kabupaten sasaran di Kalimantan	
	ha lahan direhabilitasi.	ha	760 ha lahan direhabilitasi.	790 ha lahan direhabilitasi.	800 ha lahan direhabilitasi.	850 ha lahan direhabilitasi.				
	Jumlah jenis aksi mitigasi dilaksanakan di kabupaten sasaran.	jumlah jenis	5 jenis aksi mitigasi	5 jenis aksi mitigasi.	5 jenis aksi mitigasi.	5 jenis aksi mitigasi.				
PROGRAM : Praktek perusahaan berkelanjutan - Hutan Produksi										
Kegiatan : Praktek manajemen yang lebih baik untuk hutan produksi	Indikator : Peningkatan pengelolaan hutan pada setidaknya 1,8 juta ha area hutan (potensi penurunan emisi 15 MtCO ₂ e / tahun).	luasan area hutan	360,000	360,000	360,000	360,000		TNC		
Kegiatan : Pengembalian keuangan yang lebih baik dari produksi kehutanan untuk menghindari konversi hutan alam	Indikator : Mencegah terjadinya konversi 400.000 ha hutan produksi (potensi pengurangan emisi sebesar 1,1 MtCO ₂ e / tahun).	hektar	80,000	80,000	80,000	80,000		TNC		

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi
			2019	2020	2021	2022	2023			
Kegiatan : Menunjukkan restorasi hutan	Indikator K : Upaya restorasi hutan di Kalimantan Timur dimulai setidaknya 500 ha (potensi penurunan emisi 1.100 tCO ₂ e / tahun).	hektar luasan hutan	100	100	100	100			TNC	
Kegiatan : Pengelolaan hutan rakyat yang ditingkatkan melalui tata kelola yang lebih baik, mata pencaharian, dan keamanan tenurial	Indikator Kegiatan 1 : Mencegah konversi 77.000 ha hutan lindung (potensi penurunan emisi 9.000 tCO ₂ e / tahun).	hektar hutan lindung	15,400	15,400	15,400	15,400			TNC	
	Indikator Kegiatan 1 : Peningkatan pengelolaan hutan 80.000 ha hutan produksi (potensi penurunan emisi 0,1 MtCO ₂ e / tahun).	hektar hutan produksi	16,000	16,000	16,000	16,000			TNC	
	Indikator Kegiatan 1 : Setidaknya 50% desa SIGAP mendapatkan Indeks Pembangunan Desa yang lebih tinggi mengikuti sistem penilaian Kementerian Desa.	Desa	9	9	9	9			TNC	
PROGRAM : Inisiatif yurisdiksi hutan dan iklim										

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi
			2019	2020	2021	2022	2023			
Kegiatan 1 : Peningkatan investasi menuju pengurangan emisi di sektor <i>land-based</i> , dan alat pendukung keputusan penggunaan lahan di tingkat provinsi	Indikator Kegiatan 1 : Dua inisiatif model: Pencegahan kebakaran 7.000 ha hutan dan menghindari deforestasi 5.000 hektar hutan bakau di Berau (potensi pengurangan emisi 1 MtCO ₂ e / tahun)	hektar hutan	1,000	1,000	1,000	1,000		TNC		
Kegiatan 2 : Menunjukkan Kepemimpinan Sistem Kolektif melalui implementasi Green Growth Compact di tingkat provinsi	Indikator Kegiatan 2 : Satu inisiatif model: Restorasi 1.000 ha Bentang Alam Kutai (potensi pengurangan emisi 11.000 tCO ₂ e / tahun)	hektar	200	200	200	200		TNC		
PROGRAM : Pengelolaan areal konservasi										
Kegiatan 1 : Peningkatan pengelolaan dan perlindungan bentang alam karst	Indikator Kegiatan 1 : Mencegah konversi hutan seluas 345 ha dalam kawasan lindung karst (potensi penurunan emisi 4.400 tCO ₂ e / tahun).	hektar hutan	69	69	69	69		TNC		
PROGRAM :Peningkatan kapasitas restorasi hutan dan lahan										

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	
			2019	2020	2021	2022	2023				
Kegiatan : Pelatihan kapasitas restorasi hutan bagi masyarakat	Indikator : Meningkatnya pengetahuan dan kapasitas masyarakat lokal dalam restorasi hutan	Orang	30		30			30	- Foundations - Private - Funding Agencies	Pusat Konservasi Mangrove, Bontang	Bontang
Kegiatan : Pelatihan pengukuran serapan dan cadangan karbon hutan oleh masyarakat	Indikator : Meningkatnya pengetahuan masyarakat mengenai penyerapan karbon Indikator : Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam pengukuran penyerapan dan cadangan karbon hutan	orang	15						- Foundations - Private - Funding Agencies - KLHK (FCPF)	Planete Urgence, BIOMA, DLH Prop dan DDPI	Delta Mahakam

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi
		2019	2020	2021	2022	2023			
Program:Tersedianya desain dan konsep kebijakan mengenai pencegahan kebakaran hutan dan lahan.									
Kegiatan: Konsolidasi informasi & dok pembelajaran terkait isu pencegahan kebakaran hutan & lahan termasuk Grand Desain Bappenas mengenai kebakaran hutan, perkebunan & lahan.	Indikator : Konsep Pencegahan kebakaran hutan berbasis KPH telah teruji di satu provinsi							GIZ FORCLIME	Kalimantan Timur dan Berau
Kegiatan: Pengkajian dan penyusunan konsepsi pengelolaan hutan KPH terkait isu pencegahan kebakaran hutan dan pembangunan jaringan para pihak terkait dalam kerangka proses adaptasi maupun								GIZ FORCLIME	Kalimantan Timur dan Berau

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi
		2019	2020	2021	2022	2023			
kegiatan: Menyediakan pedoman teknis, standar kompetensi dan prosedur operasional untuk pengelolaan hutan dan pencegahan kebakarannya								GIZ FORCLIME	Kalimantan Timur dan Berau
Kegiatan Fasilitasi pertukaran pengetahuan terkait pencegahan kebakaran hutan dan lahan maupun jaringannya.	Indikator 4. Konsep Pencegahan kebakaran hutan berbasis KPH telah teruji di satu provinsi							GIZ FORCLIME	Kalimantan Timur dan Berau
Kegiatan : Dukungan terhadap pengembangan pedoman teknis prosedur pencegahan kebakaran hutan dan lahan serta sosialisasinya pada tingkat nasional dan daerah.								GIZ FORCLIME	Kalimantan Timur dan Berau

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	
		2019	2020	2021	2022	2023				
kegiatan : Dukungan sosialisasi kepedulian pencegahan kebakaran hutan dan lahan melalui publikasi (pedoman penyuluhan, buku2, brosur, leaflets dsh)								GIZ FORCLIME	Kalimantan Timur dan Berau	
Kegiatan : Pemanfaatan POME	Indikator: Teralirinya Listrik ke Desa sekitar perusahaan beroperasi	Unit	4	-	-	-	-	Iuran/Donasi Keanggotaan GAPKI Kaltim	Anggota GAPKI Kaltim	Kaltim
Kegiatan : Pemanfaatan Janjang Kosong	Indikator : Pemanfaatan Janjang kosong di kebun	Paket	Semua Anggota GAPKI memiliki PKS	Semua Anggota GAPKI memiliki PKS	Semua Anggota GAPKI memiliki PKS	Semua Anggota GAPKI memiliki PKS	Semua Anggota GAPKI memiliki PKS	Iuran/Donasi Keanggotaan GAPKI Kaltim	Anggota GAPKI Kaltim	Kaltim
Kegiatan : Pencegahan Karhutlabun	Indikator: Mencegah terjadinya pembakaran lahan baik didalam izin maupun diluar izin	Program	Semua Anggota GAPKI	Semua Anggota GAPKI	Semua Anggota GAPKI	Semua Anggota GAPKI	Semua Anggota GAPKI	Iuran/Donasi Keanggotaan GAPKI Kaltim	Anggota GAPKI Kaltim	Kaltim

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi
		2019	2020	2021	2022	2023			
Tujuan 14: Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan									
Indikator: 14.2.1.(a): Tersedianya kerangka									
Kegiatan Pengelolaan sistem (Mahakam) di Kalimantan Timur secara efektif untuk meningkatkan kualitas dan aliran air, ketersediaan untuk kebutuhan masyarakat.	Satu sungai								
Indikator 1. Mendukung Revitalisasi Forum DAS Mahakam dan fungsinya dalam pengelolaan sungai									
Indikator 2. Studi untuk menentukan e-flow Sungai Mahakam dan penerapannya dalam pengelolaan sungai									
Indikator 3. Mempromosikan konsep Sungai Aliran Bebas (FFR) dan Aliran Lingkungan (e-flow) kepada pemerintah dan pemangku kepentingan lokal							WWF Networks & Alliance	WWF	Mahakam landscape
Indikator 4. Penggunaan lahan, tutupan hutan, dan pemetaan pemangku kepentingan (DAS Mahakam)									
Indikator 14.4.1* : Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman									
PROGRAM :Peningkatan pendapatan masyarakat nelayan									

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi
			2019	2020	2021	2022	2023			
Kegiatan : Penyediaan bantuan alat tangkap ikan	Indikator : Meningkatnya hasil tangkap ikan masyarakat	Unit	25	25	25	25	25	- Foundations - Private - Funding Agencies	BIOMA	Delta Mahakam
Kegiatan : Memfasilitasi pembangunan rumpon ikan bagi kelompok masyarakat nelayan	Indikator : Tersedianya rumpon ikan sebagai sarana peningkatan hasil tangkap masyarakat	Unit	1	1	1	1	1	- Foundations - Private - Funding Agencies	BIOMA	Delta Mahakam
PROGRAM :Peningkatan kapasitas pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dan hasil perikanan										
Kegiatan : Membangun demo-plot tambak ramah lingkungan	Indikator : Tersedianya demo-plot tambak ramah lingkungan sebagai ruang pembelajaran masyarakat nelayan	plot	1	0	0	0	0	- Foundations - Private - Funding Agencies	BIOMA	Delta Mahakam
Kegiatan : Pelatihan pengolahan hasil hutan bukan kayu dan hasil perikanan ekosistem mangrove	Indikator : Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam pengolahan hasil hutan bukan kayu dan hasil perikanan ekosistem mangrove	Orang	15	15	15	15	15	- Foundations - Private - Funding Agencies	BIOMA	Delta Mahakam

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi
			2019	2020	2021	2022	2023			
Kegiatan : Mengembangkan inkubator bisnis hasil hutan non kayu dan hasil perikanan	Indikator : Meningkatnya kapasitas dan jiwa entepreuner pada masyarakat nelayan sekitar hutan	paket	1	-	-	-	-	- Foundatio ns - Private - Funding Agencies	BIOMA	Delta Mahakam
Indikator 14.5.1.*: Jumlah luas kawasan konservasi perairan										
PROGRAM 1.3 : Pengelolaan data dan informasi restorasi hutan dan lahan										
Kegiatan : Mengembangkan tool pemantauan penanaman	Indikator : Tersedianya tool pemantauan penanaman	system pemantau an	-	1	-	-	-	- Foundatio ns - Private - Funding Agencies	TBD	Samarinda
Kegiatan: Analisis perubahan tutupan lahan	Indikator: Data dan informasi perubahan tutupan lahan	data	-	-	-	-	-	- Foundatio ns - Private - Funding Agencies	TBD	Samarinda

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi
			2019	2020	2021	2022	2023			
Kegiatan : Peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya ekosistem mangrove	Indikator : Meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya ekosistem mangrove	Orang	100	100	100	100	100	- Foundations - Private - Funding Agencies	Bioma	Delta Mahakam dan Samarinda
Kegiatan : Mengembangkan materi komunikasi dan kampanye konservasi ekosistem mangrove	Indikator : Tersedianya seperangkat materi komunikasi dan kampanye konservasi mangrove	paket	1	-	-	-	-	- Foundations - Private - Funding Agencies	TBD	Samarinda
PROGRAM 2.2 :Peningkatan kapasitas restorasi hutan dan lahan										
Kegiatan : Pelatihan kapasitas restorasi hutan bagi masyarakat	Indikator : Meningkatnya pengetahuan dan kapasitas masyarakat lokal dalam restorasi hutan	Orang	30	-	30	-	30	- Foundations - Private - Funding Agencies	Pusat Konservasi Mangrove, Bontang	Bontang

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi
			2019	2020	2021	2022	2023			
Kegiatan 2.2.2: Pelatihan pengukuran serapan dan cadangan karbon hutan oleh masyarakat	Indikator 2.2.2a: Meningkatnya pengetahuan masyarakat mengenai penyerapan karbon Indikator 2.1.2b: Meningkatnya kapasitas masyarakat daam pengukuran penyerapan dan cadangan karbon hutan	orang	15	-	-	-	-	- Foundations - Private - Funding Agencies - KLHK (FCPF)	Planete Urgence, BIOMA, DLH Prop dan DDPI	Delta Mahakam
Tujuan 15: Melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari,										
Indikator 15.1.1(a) : Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.										
Kegiatan : Fasilitasi pengusulan perhutanan sosial dengan skema hutan desa di wilayah gambut oleh lembaga pengelolaan hutan desa kepada kementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan	Indikator: Jumlah SK yang di terbitkan di KLHK	kebijakan di tingkatan desa	1						The Asia Foundation	Kutai Kartanegara

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi
			2019	2020	2021	2022	2023			
Kegiatan : Fasilitasi penyusunan rencana tata ruang di 5 desa di Kutai Kartanegara	Indikator: Jumlah kebijakan yang di terbitkan di tingkatan desa	kebijakan di tingkatan desa	1						The Asia Foundation	Kutai Kartanegara
Kegiatan : Fasilitasi pembuatan kalender musim di 6 desa di Kutai Kartanegara	Indikator: dokumen acuan untuk penyusunan rencana pengelolaan desa	dokumen rujukan di tingkatan desa	1						The Asia Foundation	Kutai Kartanegara
Kegiatan: Fasilitasi penyusunan peraturan gubernur terkait dengan penyelesaian konflik lintas sektor	Indikator: Jumlah kebijakan yang di terbitkan di tingkatan Provinsi	kebijakan di tingkatan provinsi		1					The Asia Foundation	Kalimantan Timur
Kegiatan: fasilitasi penyusunan SOP terkait penyelesaian konflik sektor kehutanan	Indikator: Jumlah Kebijakan terkait penyelesaian konflik sektor kehutanan	kebijakan di tingkatan perangat daerah							The Asia Foundation	Kutai Kartanegara

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi
		2019	2020	2021	2022	2023			
Program : Konsep MRV dan pendirian Kelembagaan MRV berjalan dengan baik dan mendapat pengakuan pemerintah provinsi.									
Kegiatan: Dukungan pada pembangunan sistem dan mekanisme untuk MRV subnasional dan kegiatannya dimasukkan ke dalam dan mendapat manfaat dari proses MRV nasional dengan partisipasi para pemangku kepentingan, termasuk masyarakat sasaran.							WWF Networks & Alliance	WWF	Mahakam landscape
Indikator 1. advokasi pengarusutamaan pengurangan emisi dlm dokumen perencanaan									
Indikator 2. peningkatan kapasitas pejabat pemerintah utk memungkinkan MRV emisi karbon hutan.									
Indikator 3. protokol komunikasi data di provinsi									
Indikator 4. penghitungan emisi karbon hutan									
Indikator 5. Melatih penduduk desa utk menggunakan alat kerumunan ttg pemantauan & pemulihan penggunaan lahan (RESTORE +)									
6. analisis partisipatif ttg perubahan tutupan hutan & penyebab deforestasi & kembangkan rencana									

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi
			2019	2020	2021	2022	2023			
Kegiatan 1: Mendukung proses pembentukan dan penguatan kelembagaan MRV di tingkat provin	Indikator 2: 2 Peraturan national dan 2 peraturan daerah terkait reformasi sektor kehutanan memasukan unsur mitigasi perubahan iklim sektor kehutanan								GIZ FORCLIME	Kalimantan Timur dan Berau
Program: FREL tingkat provinsi terbaru mendapat pengakuan.										
Kegiatan 1: Mendukung proses memperbarui FREL tingkat Provinsi termasuk referensi bagi pemetaan bekas kebakaran.	Indikator2: 2 Peraturan national dan 2 peraturan daerah terkait reformasi sektor kehutanan memasukan unsur mitigasi perubahan iklim sektor kehutanan								GIZ FORCLIME	Kalimantan Timur dan Berau
Kegiatan 2: Mendukung proses pengajuan FREL tingkat Provinsi.									GIZ FORCLIME	Kalimantan Timur dan Berau

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi
		2019	2020	2021	2022	2023			
<p>Kegiatan: Advokasi strategi pertumbuhan hijau secara efektif ke dalam rencana pembangunan kabupaten.</p> <p>mempromosikan perencanaan dan penganggaran yang berkelanjutan di tingkat kabupaten & provinsi</p> <p>Indikator 2. Identifikasi potensi kegiatan pengembangan REDD + (FCPF-CF) di pemerintah kabupaten & provinsi dari anggaran publik.</p> <p>Indikator 3. memasukkan elemen desain ERPD ke dalam rencana pembangunan kabupaten Kutai Barat & Mahakam Ulu</p> <p>Indikator 4. Mengarusutamakan ekonomi hijau ke dalam perencanaan kabupaten / provinsi</p> <p>5. Mempromosikan infrastruktur berkelanjutan & energi berkelanjutan</p>							WWF Networks & Alliance	WWF	Mahakam landscape

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi
		2019	2020	2021	2022	2023			
Kegiatan: Pemulihan 150 hektar ekosistem lahan gambut dan 150 hektar tanah mineral (ekosistem hutan) di Bentang Alam Mahakam.	Indikator 1. Memfasilitasi pertemuan para pemangku kepentingan dan konsultasi untuk mengidentifikasi dan memetakan lokasi restorasi (2 target) Indikator 2. Kegiatan komunikasi, sosialisasi, dan pelibatan di daerah sasaran lokal Indikator 3. Pemantauan demonstrasi plot identifikasi, pengembangan alat dan metodologi & indeks keanekaragaman hayati Indikator 4. Memperkuat hutan rakyat di area yang ditargetkan						WWF Networks & Alliance	Mahakam landscape	WWF

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	
		2019	2020	2021	2022	2023				
Program : Dukungan Sistem Pemantauan Kehutanan Nasional (Simontana) (termasuk FREL dan pemetaan areal bekas kebakaran) dan kegiatan :										
Mendukung data management dan monitoring degradasi hutan dan deforestasi di tingkat nasional dan provinsi (termasuk regulasi)	Indikator : 2 Peraturan national dan 2 peraturan daerah terkait reformasi sektor kehutanan memasukan unsur mitigasi perubahan iklim sektor kehutanan							GIZ FORCLIME	Kalimantan Timur dan Berau	
Program : Dukungan Penguatan Pengelolaan Perhutanan Sosial Sebagai Upaya Pengelolaan Lansekap Yang Berkelanjutan										
Kegiatan 1: Penyusunan Dokumen Rencana Kelola	Indikator Kegiatan 1: Dokumen rencana kelola tersedia	Dokumen	N/A	1	1	1	N/A	Hibah	Solidaridad	Kab. Paser, PPU, Berau
Kegiatan 2: Peningkatan Kapasitas Pengelola	Indikator Kegiatan 2: Managerial pengelola mampu melaksanakan rencana kelola	Dokumen	N/A	1	1	1	N/A	Hibah	Solidaridad	Kab. Paser, PPU, Berau
PROGRAM : Praktek perusahaan berkelanjutan - Kelapa Sawit										
Kegiatan 1 : Pengembangan kelapa sawit dan menunjukkan mitigasi dan kompensasi RSPO	Indikator Kegiatan 1 : Mencegah terjadinya konversi setidaknya 0,2 juta ha area HCV (potensi penurunan emisi 8 MtCO ₂ e / tahun).	hektar area HCV	40,000	40,000	40,000	40,000			Kutai Timur	GIZ SCPOP

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	
		2019	2020	2021	2022	2023				
PROGRAM :Restorasi hutan dan lahan										
Kegiatan: Penanaman pohon pada kawasan yang kritis dan rentan	Indikator : Terlaksananya penanaman sejumlah 1 juta pohon dalam 5 tahun	Pohon	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	- Foundations - Private - Funding Agencies	LSM	Pesisir
Kegiatan : Memfasilitasi pengembangan pusat pembibitan mangrove masyarakat	Indikator : Tersedianya pusat pembibitan dan sumber bibit mangrove masyarakat	Unit	1	-	-	-	-	- Foundations - Private - Funding Agencies	BIOMA	Ds. Muara Kembang
Kegiatan :Memfasilitasi desa dalam pemetaan lahan kritis dan perencanaan restorasi kawasan	Indikator : Tersedianya informasi mengenai lokasi dan luasan lahan kritis desa	Dokumen tata ruang	1	-	-	-	-	- Foundations - Private - Funding Agencies	BIOMA	Kel. Muara Kembang

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	
		2019	2020	2021	2022	2023				
PROGRAM : Fasilitasi Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Hutan di luar Kawasan Hutan di Tingkat Provinsi dan Kabupaten.										
Kegiatan : Mendukung fasilitasi penyusunan Peraturan Gubernur Kaltim tentang Pengelolaan HCV/ABKT Kaltim.	Indikator: Kebijakan terkait yang disahkan dan berdampak	Hektar luasan areal berhutan di APL yang terdampak	#####	15,000	25,000	30,000	40,000	GEF-UNDP	KLHK-PKTL	PROVINSI KALTIM & KABUPATEN KUTAI TIMUR
Kegiatan : Fasilitasi Penyusunan Kebijakan (SK/PerBup) di tingkat Kabupaten tentang Pengelolaan HCV/ABKT Kutai Timur.	Indikator: Kebijakan terkait yang disahkan dan berdampak									

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi
		2019	2020	2021	2022	2023			
Program : Indikator 1. Pengelolaan 150.000 ha hutan kemasyarakatan dan / atau hutan sosial dan hutan adat / adat secara berkelanjutan diamankan dan diakui. Indikator 2. Memfasilitasi proses penyerahan dan pemantauan penerbitan dokumen (Keputusan Bupati / pengakuan lokal) Indikator 3. Pemetaan hutan kemasyarakatan dan / atau sosial dan hutan adat / adat Indikator 4. Fasilitasi diskusi di tingkat desa untuk memastikan hutan adat dan kehutanan sosial lainnya ke dalam anggaran & rencana desa (diusulkan ke kabupaten)							WWF	Mahakam landscape	

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi
			2019	2020	2021	2022	2023			
Kegiatan Penguatan kapasitas pengelolaan data spasial	Indikator: Portal data untuk perencanaan dan pengawasan penggunaan lahan dan perkebunan tersedia dan terkelola (spasial & non-spasial)	Jumlah data yang dikelola	35	41	41			ICI-BMU	GIZ LEPOALD	Kutai Timur & Berau
Kegiatan: Bantuan teknis penyusunan rencana perkebunan kabupaten	Indikator: Rencana perkebunan sawit berkelanjutan Kab.Berau diresmikan	Jumlah rencanaa		1				ICI-BMU	GIZ LEPOALD	Kutai Timur & Berau
Kegiatan : Penguatan kapasitas sistem perizinan dalam menggunakan peta arahan pengembangan kebun	Indikator: Tersedianya SoP penggunaan peta arahan pengembangan kebun dalam proses perizinan	Jumlah SoP		1				ICI-BMU	GIZ LEPOALD	Kutai Timur & Berau

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi
		2019	2020	2021	2022	2023			
Program: Terbentuknya Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) di Provinsi pilot.									
Kegiatan 1: Supporting the consolidation of province's stakeholders on the Essential Ecosystem Area (KEE) of Berau Kalimantan Timur and Kapuas Hulu Kalimantan Barat	Indikator 3: Peraturan baru/diperbaharui terkait pengembangan pengelolaan hutan dan memasukan aspek keanekaragaman hayati berdasarkan Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP).							GIZ FORCLIME	Kalimantan Timur dan Berau
Kegiatan 2: Dukungan terhadap proses penetapan dan pengembangan kebijakan maupun peraturan terkait Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) di tingkat nasional.								GIZ FORCLIME	Kalimantan Timur dan Berau

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi
		2019	2020	2021	2022	2023			
Program: Dukungan proses meningkatkan efektifitas dalam pengelolaan Kawasan Konservasi dan KPHK di wilayah kerja FORCLIME.									
Kegiatan 1: Pelatihan Penilaian METT kepada staf teknis terkait di tingkat nasional.	Indikator 3: Peraturan baru/diperbaharui terkait pengembangan pengelolaan hutan dan memasukan aspek keanekaragaman hayati berdasarkan Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP).							GIZ FORCLIME	Kalimantan Timur dan Berau
Kegiatan 2: Mendukung proses penilaian METT sedikitnya 3 kawasan konservasi di tingkat provinsi.								GIZ FORCLIME	Kalimantan Timur dan Berau
kegiatan 3: Mendukung pengembangan pusat penelitian, konservasi jenis/spesies, dan pengembangan ekowisata di Taman Nasional								GIZ FORCLIME	Kalimantan Timur dan Berau

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi
		2019	2020	2021	2022	2023			
Indikator 15.2.1(d) : Jumlah Kesatuan									
Program: Penguatan Kapasitas KPH									
Kegiatan : Dukungan teknis penyusunan Rencana Strategis Bisnis/RSB, rencana bisnis/RB dan profile KPH	Indikator Kegiatan 1: Rencana Strategis Bisnis KPH; Rencana Bisnis, Profile KPH tersedia	Dokumen	RSB 10 KPH, RB 1 KPH	20+1 Profile KPH, 4 RB KPH	tdb	tdb	tdb	GGGI	20 + 1 KPH di Kalimantan Timur
Kegiatan : Penerapan strategi Pertumbuhan Hijau pada sektor berbasis lahan (renstra)								GGGI	
Kegiatan : Dukungan teknis penyusunan rencana strategis Dinas Kehutanan dan Review Renstra Dinas Kehutanan	Indikator Kegiatan 1: Dokumen Rencana Strategis Dinas Kehutanan	Dokumen	1	n/a	1	n/a	n/a	GGGI	Kalimantan Timur
Kegiatan : Penyusunan Baseline peluang penerapan skema PES/instrument ekonomi lingkungan lainnya di KPH Bongan	Indikator Kegiatan 2: Laporan Baseline	Dokumen	Laporan awal	Finalisasi laporan				GGGI	KPH Bongan

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi
		2019	2020	2021	2022	2023			
Program: Dukungan terhadap operasionalisasi KPH di tingkat nasional dan provinsi terwujud									
Kegiatan 1. Dukungan terhadap peningkatan kapasitas (pelatihan/lokakarya) dan proses perbaikan RPHJP (rencana jangka panjang pengelolaan KPH) dan rencana pengelolaan tahunan pada tingkat nasional dan tingkat provinsi.	Indikator 5. Rencana pengelolaan atau rencana tahunan KPH model memasukan unsur penanggulangan kebakaran hutan, penanganan konflik, target keanekaragaman hayati (seperti konsep konservasi untuk key species/ spesies kunci).							GIZ FORCLIME	Kalimantan Timur dan Berau
Kegiatan 2. Dukungan terhadap kegiatan Tim Penilai pencapaian operasionalisasi KPH, pengembangan dan peningkatan organisasi serta hubungan antar instansi di tingkat provinsi.								GIZ FORCLIME	Kalimantan Timur dan Berau

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi
		2019	2020	2021	2022	2023			
Kegiatan 3. Dukungan terhadap operasionalisasi dan penguatan KPHK								GIZ FORCLIME	Kalimantan Timur dan Berau
Kegiatan 4. Dukungan terhadap integrasi pengembangan usaha produk unggulan dan HHBK (bambu dlsb) kedalam proses pembangunan 4 pilot KPH (Berau, Malinau, Kapuas Hulu, Kutawaringin)								GIZ FORCLIME	Kalimantan Timur dan Berau
Kegiatan 5. Identifikasi peluang dan tantangan pengembangan energi baru terbarukan dan jasa lingkungan (PES) di sektor kehutanan tingkat provinsi.								GIZ FORCLIME	Kalimantan Timur dan Berau
Program: Target perhutanan social di tingkat provinsi sesuai RPHJP KPH tercapai.									
kegiatan 1. Mendukung operasionalisasi Pokja Percepatan Perhutanan Sosial tingkat provinsi	indikator 6. Dalam area intervensi Forclime area yang dikelola oleh masyarakat meningkat sekian persen, dan dalam proses							GIZ FORCLIME	Kalimantan Timur dan Berau

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi
			2019	2020	2021	2022	2023			
kegiatan 2. Penyesuaian dokumen pembaruan izin terkait perhutanan sosial dan peta PIAPS di tingkat provinsi.	perencanaannya selaras dengan perencanaan KPH setempat.								GIZ FORCLIME	Kalimantan Timur dan Berau
kegiatan 3. Mendukung aktivitas pengembangan agroforestry di tingkat lapangan.									GIZ FORCLIME	Kalimantan Timur dan Berau

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi
		2019	2020	2021	2022	2023			
Program: Penyempurnaan kebijakan dan peraturan kehutanan maupun keanekaragaman hayati untuk meningkatkan peran KPH									
Kegiatan 1: Dukungan penyempurnaan kebijakan dan peraturan dalam rangka peningkatan peran KPH dan kawasan konservasi dalam pembangunan sektor kehutanan dan keanekaragaman hayati pada tingkat nasional maupun tingkat provinsi.	Indikator 1 : at least 2 peraturan Nasional dan 2 peraturan daerah yang baru/diperbaharui dalam pengembangan KPH yang merujuk pada UU 23/2014 mengadopsi pembelajaran dari Forclime TC.							GIZ FORCLIME	Kalimantan Timur dan Berau
Kegiatan 2: Dukungan sosialisasi kebijakan yang telah disempurnakan dan peningkatan kapasitas managerial staf KPH di tingkat nasional maupun provinsi/daerah.		n/a	n/a	n/a	n/a	n/a		GIZ FORCLIME	Kalimantan Timur dan Berau

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi
		2019	2020	2021	2022	2023			
Kegiatan 3: Dukungan pada koordinasi kebijakan dalam pembangunan dan operasional KPH di tingkat nasional (operasional Setnas KPH, forum koordinasi KPH, pertemuan koordinasi perangkat pendukung pembangunan KPH								GIZ FORCLIME	Kalimantan Timur dan Berau

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi
		2019	2020	2021	2022	2023			
Kegiatan 4: Dukungan terhadap penyusunan dan penerbitan materi komunikasi, publikasi, himpunan peraturan terkait KPH terkait perbaikan kebijakan mengenai KPH termasuk pengembangan sistem informasi dan dokumentasi resmi di Kementerian Lingkungan Hidup								GIZ FORCLIME	Kalimantan Timur dan Berau
Kegiatan 5: Dukungan untuk penyebaran hasil pembelajaran dan pengetahuan, melalui studi tur dll.								GIZ FORCLIME	Kalimantan Timur dan Berau

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi
		2019	2020	2021	2022	2023			
Program: Dukungan untuk penyediaan panduan pengembangan bisnis di KPHP/L/K dalam rangka kemandirian pengelolaan KP									
Kegiatan 1: Dukungan kebijakan mengenai operasionalisasi KPH menuju kemandirian KPH (KPHL/KPHP/KPHK)	Indikator 2: 2 Peraturan national dan 2 peraturan daerah terkait reformasi sektor kehutanan memasukan unsur mitigasi perubahan iklim sektor kehutanan							GIZ FORCLIME	Kalimantan Timur dan Berau
Kegiatan 2: Dukungan terhadap usaha optimalisasi operasional KPH secara terintegrasi antara KPHL/KPHP dengan KPHK terdekat.								GIZ FORCLIME	Kalimantan Timur dan Berau
Kegiatan 3: Dukungan kebijakan terhadap penyusunan standar operasional KPHL/KPHP/KPHK.								GIZ FORCLIME	Kalimantan Timur dan Berau
Kegiatan 4: Dukungan proses ulasan NSPK dalam penetapan KPHK.								GIZ FORCLIME	Kalimantan Timur dan Berau

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi
		2019	2020	2021	2022	2023			
Kegiatan 5: Fasilitasi proses sertifikasi bagi pihak ketiga yang menyediakan jasa pelaksanaan kegiatan di KPH.								GIZ FORCLIME	Kalimantan Timur dan Berau
PROGRAM : Penyusunan Pengembangan Modul Modul Pelatihan Pengembangan Suksesi Agroforestri									
Kegiatan 1. Penyusunan Draft Modul Pelatihan Pengembangan Suksesi Agroforestri	Indikator 5. Peraturan dan dua instrumen pengembangan SDM dipergunakan oleh Pusdik, Balai Diklat dan SMK dan pelatihan lainnya termasuk pembelajaran KPH							GIZ FORCLIME	Kalimantan Timur dan Berau
Kegiatan 2. Pengujian lapangan Modul Pelatihan Pengembangan Suksesi Agroforestri di 4 lokasi.								GIZ FORCLIME	Kalimantan Timur dan Berau
Kegiatan 3. Finalisasi dan Publikasi Modul Pelatihan Pengembangan Suksesi Agroforestri.								GIZ FORCLIME	Kalimantan Timur dan Berau
Program: Dukungan Pengembangan dan pendampingan BLU/BLUD di KPH									

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi
		2019	2020	2021	2022	2023			
Kegiatan : Fasilitasi terhadap pengarusutamaan maupun jumlah implementasi BLU/BLUD dan penyiapan bisnis KPH di tingkat provinsi.	Indikator : Rencana pengelolaan atau rencana tahunan KPH model memasukan unsur penanggulangan kebakaran hutan, penanganan konflik, target keanekaragaman hayati (seperti konsep konservasi untuk key species/ spesies kunci).							GIZ FORCLIME	Kalimantan Timur dan Berau
Kegiatan : Fasilitasi peningkatan kapasitas teknis staf mengenai penerapan PPK BLUD di KPH tingkat provinsi.								GIZ FORCLIME	Kalimantan Timur dan Berau
Kegiatan : Dukungan identifikasi dalam rangka pengembangan bisnis KPH (termasuk REDD+).								GIZ FORCLIME	Kalimantan Timur dan Berau
Kegiatan : Pengembangan konsepsi dan implementasi Badan Layanan Umum (BLU) pada KPHK.	Indikator : 2 Peraturan national dan 2 peraturan daerah terkait reformasi sektor kehutanan memasukan unsur mitigasi perubahan iklim sektor							GIZ FORCLIME	Kalimantan Timur dan Berau

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi
		2019	2020	2021	2022	2023			
Kegiatan : Dukungan terhadap pengembangan peraturan dan pedoman teknis untuk pengarus-utamaan dan perluasan implementasi BLU/BLUD dalam pengelolaan KPH (KPHK/Tahura).	kehutanan							GIZ FORCLIME	Kalimantan Timur dan Berau

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi
		2019	2020	2021	2022	2023			
Program : Tersedianya konsep kebijakan dan dukungan bagi penerapan Pembayaran Jasa Lingkungan di KPH									
Kegiatan 1: Tindak lanjut draft akhir dari Peraturan tentang Jasa Lingkungan di hutan produksi yang pernah didukung oleh FORCLIME dan potensi pengembangannya.	Indikator 1 : at least 2 peraturan Nasional dan 2 peraturan daerah yang baru/diperbaharui dalam pengembangan KPH yang merujuk pada UU 23/2014 mengadopsi pembelajaran dari Forclime TC.							GIZ FORCLIME	Kalimantan Timur dan Berau
Kegiatan 2: Kajian dan penyediaan informasi, pembelajaran & konsep mengenai pengelolaan potensi jasa lingkungan di KPH & perkiraan nilainya.								GIZ FORCLIME	Kalimantan Timur dan Berau
Kegiatan 3: Penyusunan pedoman teknis mengenai pengelolaan potensi jasa lingkungan di KPH dan dukungan sosialisasinya di tingkat nasional								GIZ FORCLIME	Kalimantan Timur dan Berau

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi
		2019	2020	2021	2022	2023			
Indikator 15.5.1* Persentase populasi 25									
PROGRAM Penyelamatan Ekosistem Satwa									
Kegiatan: Pengamaman konektivitas habitat kritis untuk spesies kunci Badak Sumatera & 2 spesies yang menjadi perhatian lokal (Belalai monyet & lumba-lumba Irrawaddy)	Indikator 1. Survey potensi konektivitas badak sumatera di Kalimantan Timur Indikator 2. Survey populasi dan habitat Bekantan di Landscape Hulu Mahakam Indikator 3. Survey populasi dan sebaran Pesut Mahakam Indikator 4. Diseminasi Wilayah Habitat Species Kunci dan Koridor Satwa di Hulu Mahakam Indikator 5. Wildlife workshop (local & customary regulation to protect endangered animals)						WWF Networks & Alliance	WWF	Mahakam landscape

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi
		2019	2020	2021	2022	2023			
<p>Kegiatan: Badak Sumatera dikelola untuk memaksimalkan pemuliaan dan menumbuhkan populasi untuk membangun kembali badak Sumatera di alam liar di Kutai Barat dan Mahakam Ulu, Kalimantan Timur.</p>	<p>Indikator 1. Pengembangan satu tempat kudus dan area kantor paddock Indikator 2. Pengelolaan sanctuary badak sumatera di Kalimantan Indikator 3. Finalisasi survei okupansi habitat badak sumatera di kantong habitat di Kutai Barat dan Mahakam Ulu Indikator 4. Program pengembangbiakan badak di suaka Kelian Indikator 5. Translokasi badak dari habitat terdegradasi ke suaka Kelian</p>						WWF Networks & Alliance	WWF	Mahakam landscape

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi
		2019	2020	2021	2022	2023			
INDIKATOR TPB/SDGs: 15.6.1.Tersedianya kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan									
PROGRAM : transfer anggaran provinsi berbasis ekologi (TAPE)									
Kegiatan: Fasilitasi penyusunan Peraturan Gubernur Kaltim dengan memasukkan indikator ekologi dalam bantuan keuangan daerah	Indikator: Jumlah kebijakan terkait dengan transfer anggaran provinsi berbasis ekologi	Kebijakan Provinsi		1				The Asia Foundation	PROVINSI KALTIM
Indikator 15.7.1 (a): Persentase									
PROGRAM : Tersedianya Pedoman Teknis mengenai peningkatan peran KPH dalam fasilitasi pembinaan masyarakat dan resolusi konflik.									
Kegiatan: Penyempurnaan peraturan-peraturan dan pedoman di DJ PSKL mengenai resolusi konflik dan adaptasi penerapannya di tingkat lokal.	Indikator 1 : at least 2 peraturan Nasional dan 2 peraturan daerah yang baru/diperbaharui dalam pengembangan KPH yang merujuk pada UU 23/2014 mengadopsi pembelajaran dari Forclime TC.							GIZ FORCLIME	Kalimantan Timur dan Berau
Kegiatan: Fasilitasi pengembangan Perhutanan Sosial di tingkat nasional dan daerah.									GIZ FORCLIME

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi
		2019	2020	2021	2022	2023			
Kegiatan 3: Pengarus utamaan peraturan dan metoda resolusi konflik tenurial yang dikembangkan KemenLHK (sosialisasi, pengembangan modul TOT, fasilitasi TOT)								GIZ FORCLIME	Kalimantan Timur dan Berau
PROGRAM: Terfasilitasinya pembinaan masyarakat dan penyelesaian konflik tenurial masyarakat sekitar hutan.									
Kegiatan : Penguatan kapasitas tata kelola konflik	Indikator: Terbentuknya Tim Terpadu untuk Pencegahan dan Mediasi Konflik perkebunan Kabupaten Timur	Tim terpadu		1				Kutai Timur	GIZ SCPOP
Kegiatan : Fasilitasi pengembangan penanganan resolusi konflik (proyek utama) dan proses mediasi dan penyelesaian konflik tenurial serta batas desa di tingkat kabupaten.	Indikator : Rencana pengelolaan atau rencana tahunan KPH model memasukan unsur penenanggulangan kebakaran hutan, penanganan konflik, target keanekaragaman hayati (seperti konsep konservasi untuk kev							GIZ FORCLIME	Kalimantan Timur dan Berau

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi
		2019	2020	2021	2022	2023			
Kegiatan : Evaluasi dan dokumentasi pengalaman dan pembelajaran mengenai fasilitasi pemberdayaan masyarakat dan partisipasinya dalam penanganan konflik di pengelolaan hutan.	species/ spesies kunci).							GIZ FORCLIME	Kalimantan Timur dan Berau
Kegiatan : Pengembangan roadmap yang dinamis pembangunan masyarakat dan resolusi konflik tenurial dalam pengelolaan hutan.								GIZ FORCLIME	Kalimantan Timur dan Berau
Kegiatan : Penyediaan pedoman teknis mengenai pembangunan masyarakat dan resolusi konflik								GIZ FORCLIME	Kalimantan Timur dan Berau

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi
		2019	2020	2021	2022	2023			
Kegiatan : Fasilitasi proses pendampingan Hutan Adat, inventarisasi kearifan lokal, pengakuan Hutan Adat dan peningkatan kapasitas warga masyarakat dalam pemetaan								GIZ FORCLIME	Kalimantan Timur dan Berau
Kegiatan: Penguatan kapasitas mediasi konflik	Indikator : Panduan teknis mediasi konflik dan kemitraan perkebunan tersedia	Jumlah panduan		1				GIZ LEPOALD	
	Indikator: Kesepakatan penggunaan lahan atau penyelesaian kasus konflik antara perusahaan dan masyarakat	Jumlah kasus	2	5				GIZ LEPOALD	
PROGRAM : Tersedianya modul pelatihan pemetaan partisipatif dan mediasi penyelesaian konflik batas desa dan penggunaan lahan.									

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi
			2019	2020	2021	2022	2023			
Kegiatan 1. Penyusunan draft Modul Pelatihan Pemetaan Partisipatif dan Mediasi Penyelesaian Konflik Batas Desa dan Penggunaan Lahan.	Indikator 5. Peraturan dan dua instrumen pengembangan SDM dipergunakan oleh Pusdik, Balai Diklat dan SMK dan pelatihan lainnya termasuk pembelajaran KPH								GIZ FORCLIME	Kalimantan Timur dan Berau
Kegiatan 2. Pengujian lapangan Modul Pelatihan Pemetaan Partisipatif dan Mediasi Penyelesaian Konflik Batas Desa dan Penggunaan Lahan.									GIZ FORCLIME	Kalimantan Timur dan Berau

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi
		2019	2020	2021	2022	2023			
Kegiatan 3. Finalisasi dan Publikasi Modul Pelatihan Pemetaan Partisipatif dan Mediasi Penyelesaian Konflik Batas Desa dan Penggunaan Lahan.								GIZ FORCLIME	Kalimantan Timur dan Berau
Kegiatan :fasilitasi pengusulan perhutanan sosial dengan skema hutan desa di wilayah gambut oleh lembaga pengelolaan hutan desa kepada kementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan	Indikator: Jumlah SK yang di terbitkan di KLHK	kebijakan di tingkatan desa	1					The Asia Foundation Kutai Kartanegara	Yayasan BUMI, LPHD

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	
			2019	2020	2021	2022	2023				
Kegiatan : Fasilitasi penyusunan rencana tata ruang di 5 desa di Kutai Kartanegara	Indikator: Jumlah kebijakan yang di terbitkan di tingkatan desa	kebijakan di tingkatan desa	1						The Asia Foundation	Kutai Kartanegara	Yayasan BUMI, LPHD, Pemerintahan Desa
Kegiatan : Fasilitasi pembuatan kalendar musim di 6 desa di Kutai Kartanegara	Indikator: dokumen acuan untuk penyusunan rencana pengelolaan desa	dokumen rujukan di tingkatan desa	1						The Asia Foundation	Kutai Kartanegara	Yayasan BUMI, LPHD, Pemerintahan Desa
Kegiatan : fasilitasi penyusunan peraturan gubernur terkait dengan penyelesaian konflik lintas sektor	Indikator: Jumlah kebijakan yang di terbitkan di tingkatan Provinsi	kebijakan di tingkatan provinsi		1					The Asia Foundation	Kalimantan Timur	Yayasan BUMI, Dinas Kehutanan
Kegiatan : fasilitasi penyusunan SOP terkait penyelesaian konflik sektor kehutanan	Indikator: Jumlah Kebijakan terkait penyelesaian konflik sektor kehutanan	kebijakan di tingkatan perangkat daerah							The Asia Foundation	Kutai Kartanegara	Yayasan BUMI, Biro Ekonomi
INDIKATOR TPB/SDGs 15.3.1.(a): Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.											
INDIKATOR TPB/SDGs 15.5.1*: Persentase populasi 25 jenis satwa terancam punah prioritas.											
INDIKATOR TPB/SDGs 15.7.1.(b): Jumlah penambahan spesies satwa liar dan tumbuhan alam yang dikembangkan pada lembaga											

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	
		2019	2020	2021	2022	2023				
Program : Hutan, Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem Terlindungi										
Kegiatan 1: Pengembangan skema perhutanan sosial	Indikator Program 1 dan 2: ha luas hutan dan jumlah tipe ekosistem terlindungi dengan skema legalitas formal perlindungan (SK Menteri/SK	ha jumlah	88.000 ha 3 jenis	92.000 ha 3 jenis	96.000 ha 3 jenis	100.000 ha 3 jenis	NDY	TFCA KALIMANTAN		TBD
Kegiatan 2: Perlindungan hutan dan ekosistem penting di APL dengan berbagai skema legalitas SK Menteri, SK Bupati, Perdes dll	Bupati/Perdes dll), memiliki rencana kelola dan lembaga pengelola.							TFCA KALIMANTAN	80 % (Kapuas Hulu, Kutai Barat, Mahalam Ulu, Berau) 20 % diluar 4 kabupaten sasaran di Kalimantan	
Kegiatan 3: Konservasi tumbuhan dan satwa liar yang langka, endemik, dan/atau terancam punah	Indikator Program 3 dan 4: jumlah individu satwa liar (dan/atau jenis tumbuhan) berhasil diselamatkan dan/atau dilepasliarkan.	jumlah	30 Individu satwa liar 7 jenis	35 Individu satwa liar 8 jenis	40 Individu satwa liar 9 jenis	45 Individu satwa liar 10 jenis				

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi
			2019	2020	2021	2022	2023			
Kegiatan 4: Mitigasi dan/atau investigasi peredaran ilegal tumbuhan dan satwa liar yang langka, endemik, dan/atau terancam punah	Data hasil identifikasi, inventarisasi, investigasi peredaran ilegal, pemantauan, penyelamatan banyak jenis tumbuhan dan satwa liar yang langka, endemik, dan/atau	jumlah jenis prosentase	tumbuhan dan satwa liar peningkatan 2%	8 jenis tumbuhan dan satwa liar peningkatan 3%	9 jenis tumbuhan dan satwa liar peningkatan 4%	10 jenis tumbuhan dan satwa liar peningkatan 5%	NDY		TBD	

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	
		2019	2020	2021	2022	2023				
INDIKATOR TPB/SDGs 15.9.1.(a): Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.										
Program : Perbaikan tata kelola sektor kehutanan dan perlindungan keanekaragaman hayati										
Kegiatan : Workshop penulisan artikel dan buku pembelajaran proyek mitra	Indikator: Jumlah artikel terkait proyek dipublikasikan oleh media, dan jumlah buku pembelajaran terkait proyek terbit.	jumlah	30 artikel 6 buku	35 artikel 7 buku	40 artikel 8 buku	45 artikel 10 buku	NDY	TFCA KALIMANTAN	80 % (Kapuas Hulu, Kutai Barat, Mahalam Ulu, Berau) 20 % diluar 4 kabupaten sasaran di Kalimantan	TBD
Kegiatan : Pembuatan film pembelajaran proyek mitra	Indikator: Jumlah film terkait pembelajaran proyek diproduksi.	jumlah	10 film	12 film	14 film	17 film	NDY			

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	
		2019	2020	2021	2022	2023				
Kegiatan : Pelatihan terkait implementasi proyek (teknik survei tumbuhan dan satwa liar, pelatihan agroforestri, pelatihan penghitungan emisi karbon, pelatihan pembibitan dan rehabilitasi, pelatihan Sistem Informasi Desa, pelatihan pengelolaan ekowisata dst), dan terkait pengelolaan proyek (teknis dan keuangan).	Indikator: Jumlah orang dan kelompok masyarakat yang meningkat kapasitasnya dalam pengelolaan SDA.	jumlah	6600 orang dan 145 kelompok masyarakat	6900 orang dan 150 kelompok masyarakat	7200 orang dan 155 kelompok masyarakat	7500 orang dan 160 kelompok masyarakat	NDY	TFCA KALIMANTAN	80 % (Kapuas Hulu, Kutai Barat, Mahalam Ulu, Berau) 20 % diluar 4 kabupaten sasaran di Kalimantan	TBD
Kegiatan: Pendampingan dalam pemantauan dan evaluasi.	Indikator: Jumlah LSM/KSM mampu melakukan pengelolaan proyek konservasi dengan baik.	jumlah	55 LSM/KSM	65 LSM/KSM	75 LSM/KSM	85 LSM/KSM	NDY			

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi
		2019	2020	2021	2022	2023			
Kegiatan: Fasilitasi pertemuan penyusunan dan/atau diskusi para pihak terkait SRAK spesies/RPJM Kam/Perkam/Perkakam/Perda/Juknis/Naskah Akademik/Policy Paper/Masteplan Pengelolaan Spesies/Ekosistem dll.	jumlah	90 kebijakan	100 kebijakan	110 kebijakan	120 kebijakan	NDY			
kegiatan : Penyusunan Peraturan Daerah Pengelolaan Tahura (KPHK) pada 2017-2019.							GIZ FORCLIME	Kalimantan Timur dan Berau	

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi
		2019	2020	2021	2022	2023			
Program: Dukungan penetapan dan penguatan KPH di provinsi rawan kebakaran hutan dan lahan.									
Kegiatan 1. Penyediaan jasa klinis untuk identifikasi KPH yang berpotensi/rawan kebakaran, pemetaan areal bekas kebakaran, pemberian pendampingan dalam rangka memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan	Indikator 4: Konsep Pencegahan kebakaran hutan berbasis KPH telah teruji di satu provinsi							GIZ FORCLIME	Kalimantan Timur dan Berau
Kegiatan2. Dukungan analisis kebutuhan bagi pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi staf KPH yang rawan kebakaran hutan dan lahan.								GIZ FORCLIME	Kalimantan Timur dan Berau
Indikator 15.9.1(a) : Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.									

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi	
		2019	2020	2021	2022	2023				
PROGRAM : Pengelolaan HCV/Areal berhutan di pemegang ijin/pengelola dan perijinan di tingkat kabupaten.										
Kegiatan 2.1 : Fasilitasi penyusunan Peraturan Gubernur Kaltim tentang Insentif Bagi Pengelola HCV/ABKT Kaltim.	Indikator: Jumlah kebijakan terkait yang disahkan dan berdampak	Kebijakan Provinsi	1					GEF-UNDP	KLHK-PKTL	PROVINSI KALTIM & KABUPATEN KUTAI TIMUR
Kegiatan 2.2: Fasilitasi Penyusunan Kebijakan (SK/PerBup) di tingkat Kabupaten tentang Insentif Bagi Pengelola HCV/ABKT Kutai Timur.	Indikator: Jumlah kebijakan terkait yang disahkan dan berdampak	Kebijakan Kabupaten		1						
Kegiatan 2.3: Pilot Project pada Desa-Desa Potensial Pengelola Hutan di APL (Mekanisme Insentif)	Indikator: Jumlah kebijakan terkait yang disahkan dan berdampak pada pengelolaan hutan di tingkat desa	Peraturan Desa			2			GEF-	KLHK-PKTL	PROVINSI KALTIM & KABUPATEN KUTAI TIMUR

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi
			2019	2020	2021	2022	2023			
Kegiatan 2.4: Pilot Project pada pemegang ijin potensial pengelola hutan di APL (Mekanisme Insentif)	Indikator: Usulan Kebijakan terkait yang disahkan dan berdampak pada pengelolaan hutan di tingkat pemegang ijin	Dokumen Kajian			2			UNDP	KLHK-PKTL	KABUPATEN KUTAI TIMUR
PROGRAM Fasilitasi Integrasi Mekanisme Pengelolaan ABKT ke dalam kebijakan daerah										
Kegiatan 3.1: Fasilitasi Integrasi Penilaian Pengelolaan ABKT ke dalam sistem perijinan dan mekanisme reward di tingkat Kabupaten	Indikator: Terintegrasinya mekanisme penilaian pengelolaan ABKT ke dalam mekanisme penilaian dan perijinan pemanfaatan lahan	Kebijakan		1				GEF-UNDP	KLHK-PKTL	PROVINSI KALTIM & KABUPATEN KUTAI TIMUR
Kegiatan 3.2: Pilot Project pada Desa-Desa Potensial Pengelola Hutan di APL (Model Pengelolaan)	Indikator: Jumlah kebijakan terkait yang disahkan dan berdampak pada pengelolaan hutan di tingkat desa	Kebijakan		2		2		GEF-UNDP	KLHK-PKTL	PROVINSI KALTIM & KABUPATEN KUTAI TIMUR
Kegiatan 3.3: Pilot Project pada pemegang ijin potensial pengelola hutan di APL (Model Pengelolaan)	Indikator: Usulan Kebijakan terkait yang disahkan dan berdampak pada pengelolaan hutan di tingkat pemegang ijin	Kebijakan		2		2				

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi
			2019	2020	2021	2022	2023			
Kegiatan: Perlindungan HCV	Indikator: Terjaganya Area konservasi Hutan dari NKT1 sampai NKT5 dengan mengikuti Sertifikasi ISPO	Ha	10,000.00	-	-	-	-	Iuran/Donasi Keanggotaan GAPKI Kaltim	Anggota GAPKI Kaltim	Kaltim
Indikator 15.6.1. Tersedianya kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan										
PROGRAM 4 : Mengembangkan jaringan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten dan stakeholder di Kutai Timur										
Kegiatan 4.1 : Fasilitasi Forum multi stakeholder pengelolaan HCV/ABKT Prov. Kaltim.	Indikator: Pointers hasil forum di terima dan diintegrasikan dalam usulan penyempurnaan kebijakan	Paket usulan yang diintegrasikan	1	1	1	1	1	GEF-UNDP	PROVINSI KALTIM & KABUPATEN KUTAI TIMUR	KLHK-PKTL
Kegiatan 4.2 : Fasilitasi Forum multi stakeholder pengelolaan HCV/ABKT Kabupaten Kutim.	Indikator: Pointers hasil forum di terima dan diintegrasikan dalam usulan penyempurnaan kebijakan	Paket usulan yang diintegrasikan	1	1	1	1	1			
TUJUAN 16. PERDAMAIAN, KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH										
INDIKATOR TPB/SDGs: 16.10.2 (a) Tersedianya Badan Publik yang menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun										
PROGRAM 3 : Resolusi kelola hutan dan lahan yang transparan dan akuntabel										

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 tahun (Rp Juta)	Sumber Pendanaan	Lokasi
			2019	2020	2021	2022	2023			
Kegiatan: fasilitasi penyusunan SOP / Peraturan Gubernur terkait dengan standar layanan informasi publik	Indikator: keterbukaan informasi publik sektor sumber daya alam di Kalimantan Timur	Kebijakan		1					The Asia Foundation	PROVINSI KALTIM
Kegiatan : Fasilitasi penyusunan DIP dalam mendorong keterbukaan informasi di Kaltim	Indikator: Jumlah Daftar Informasi Publik yang disahkan di Kalimantan Timur	kebijakan di tingkatan perangkat daerah	1							
Kegiatan: diskusi anak muda dalam mendorong keterbukaan informasi sektor SDA di Kalimantan timur	Indikator: adanya anak muda yang kritis dalam melihat permasalahan terkait sumber daya alam di Kaltim		1	1	1	1	1		The Asia Foundation	PROVINSI KALTIM
Kegiatan : Republikasi data informasi publik terutama terkait sektor SDA	Indikator: Adanya data yang sudah di putuskan sebagai data publik yang bisa dipublikasi di pojok Lingkungan		1	1	1	1	1			

MATRIK 3 . PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA (SESUAI RPJMD)

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET TAHUNAN					ALOKASI ANGGARAN 5	INSTANSI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023		
Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan										
INDIKATOR SDGs: 1.2.1* Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.										
Program pemberdayaan fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	Jumlah Fakir Miskin yang dibina	%	95	98	98	98	98	98	4,117,092,588	Dinas Sosial
Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo	Jumlah Panti Asuhan yang dibina	%	93	95	95	95	95	95	161,850,000	Dinas Sosial
Program pembinaan anak terlantar	Jumlah orang terlantar yang dipulangkan	%	88	90	92	94	96	98	67,854,752	Dinas Sosial
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Menurunnya jumlah PMKS	%	92	92	95	95	95	95	1,755,412,500	Dinas Sosial
Program Bantuan dan Perlindungan Jaminan Sosial	Jumlah PMKS mendapatkan Bantuan	%	90	90	92	94	96	98	321,868,020	Dinas Sosial
INDIKATOR SDGs: 1.3.1.(c) Jumlah penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.										
Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Penyandang cacat yang dibina	%	93	95	95	95	95	95	902,080,000	Dinas Sosial
INDIKATOR SDGs: 1.5.1* Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.										
Program Peningkatan Kapasitas Kesiapsiagaan dan Pencegahan, Penyelamatan	tersusunnya dokumen pengamanan yang kondusif	dokumen	2	2	2	2	2	2	76,382,500	Dinas Sosial

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET TAHUNAN					ALOKASI ANGGARAN 5	INSTANSI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023		
INDIKATOR SDGs: 1.5.1.(a) Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.										
Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Tersusunnya dokumen pencegahan penanggulangan korban bencana alam yang akurat	dokumen	5	5	-	-	-	-	60,000,000	BPBD
Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Daerah	Terlaksananya kesiapsiagaan serta penyebaran informasi kepada masyarakat	%	25	25	27	28	29	30	96,461,000	BPBD
INDIKATOR SDGs: 1.5.1.(b) Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.										
Program Pengendalian Penanganan Bencana	Terpenuhinya persediaan peralatan kebencanaan	unit	35	35	35	40	40	40	3,850,296,436	BPBD
Tujuan 2 Tanpa Kelaparan										
INDIKATOR SDGs: 2.1.1* Prevalensi ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)										
Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan	Prosentase Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian	kelompok	30	30	30	30	30	30	703,199,020	Dinas Pertanian
INDIKATOR SDGs: 2.1.1.(a) Prevalensi Kekurangan Gizi (underweight) pada anak balita.										
Program Perbaikan gizi masyarakat	Meningkatnya capaian target Balita Kurang Gizi dan ibu hamil KEK mendapat PMT	balita gizi buruk	-	-	10	10	10	10	1,089,933,440	Dinas Kesehatan
		balita gizi kurang	-	-	470	470	470	470		
		Bumil KEK	-	-	400	400	400	400		
INDIKATOR SDGs: 2.3.1* Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja)										
Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Jumlah produksi pertanian	ton	64,414	69,325	70,956	72,682	74,308	75,962	6,383,994,000	Dinas Pertanian
INDIKATOR SDGs: 2.5.1* Jumlah varietas unggul tanaman dan hewan untuk pangan yang dilepas.										
Program produksi hasil peternakan	Peningkatan populasi ternak	ekor	12,956	17,411	17,911	18,111	18,375	18,644	1,745,725,000	Dinas Pertanian

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET TAHUNAN					ALOKASI ANGGARAN 5	INSTANSI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023		
INDIKATOR SDGs: 2.5.2* Proporsi hewan ternak dan sejenisnya, diklasifikasikan menurut tingkat risiko kepunahan: berisiko, tidak berisiko, dan risiko yang										
Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Peningkatan populasi ternak	ekor	12,956	17,411	17,911	18,111	18,375	18,644	2,325,818,677	Dinas Pertanian
Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera										
INDIKATOR SDGs: 3.1.1* Angka Kematian Ibu (AKI).										
Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Meningkatnya angka harapan hidup	%	70.82	71	71.5	71.75	72	72.5	3,143,984,708	Dinas Kesehatan
INDIKATOR SDGs: 3.3.2.(a) Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.										
Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melakukan skrining kesehatan	orang	21,440	21,440	21,440	21,440	21,440	21,440	7,905,141,761	Dinas Kesehatan
INDIKATOR SDGs: 3.5.1.(c) Jumlah korban penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti sesuai standar pelayanan.										
Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Jumlah Eks Penyandang penyakit Sosial yang dibina	%	95	95	98	98	98	98	1,900,000,000	Dinas Sosial
INDIKATOR SDGs: 3.b.1.(a) Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.										
Peningkatan Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Tersedianya obat dan perbekalan kesehatan bagi masyarakat kab. Penajam Paser Utara	%	85	85	90	95	100	100	11,026,882,327	Dinas Kesehatan
Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas										
INDIKATOR SDGs: 4.1.1.(d) Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.										
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	APM SD/MI	%	96.63%	91.80%	91.20%	90.70%	90.40%	90%	2,760,167,553	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	APK SD/MI	%	113.13%	100%	100%	100%	100%	100%		
	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	%	0.01%	0.02%	0.02%	0.01%	0.01%	0.01%		
	Angka Kelulusan SD/MI	%	99.98%	99.98%	100%	100%	100%	100%		
Program Manajemen	APM (SMP)N/MTs	%	86.03%	81.10%	80.70%	80.50%	80.20%	80%	2,760,167,553	Dinas

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET TAHUNAN					ALOKASI ANGGARAN 5	INSTANSI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023		
Pelayanan Pendidikan	APK (SMP)N/MTs	%	118.01%	100%	100%	100%	100%	100%		Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	Angka Putus Sekolah (APS) (SMP)N/MTs	%	0.04%	0.07%	0.07%	0.06%	0.06%	0.06%		
	Angka Kelulusan (SMP)N/MTs	%	99.95%	99.82%	99.85%	99.85%	99.90%	99.90%		
	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke (SMP)N/MTs	%	102.38%	100%	100%	100%	100%	100%		
	Rasio APM P/L SD/MI	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
	Rasio APM P/L (SMP)N/MTs	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
Tujuan 5 Kesetaraan Gender										
INDIKATOR SDGs: 5.2.1* Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh										
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Presentse kasus korban terhadap perempuan yang tertangani sesuai dengan standart	%	7.89	28	24	20	16	12	393,931,908	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
INDIKATOR SDGs: 5.2.1.(a) Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.										
Program Peningkatan Perlindungan Hak Perempuan	Presentse kasus korban terhadap perempuan yang tertangani sesuai dengan standart	%	24	24	25	26	27	28	704,567,191	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET TAHUNAN					ALOKASI ANGGARAN 5	INSTANSI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023		
INDIKATOR SDGs: 5.5.1* Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.										
Peningkatan kualitas hidup perempuan	Persentase kelompok perempuan yang memiliki usaha industri rumahan		49.90%	56.10%	62.40%	68.70%	74.90%	81.20%	586,501,156	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Peningkatan IPG		86.31	87.14	87.97	88.58	89.63	90.46		
	Peningkatan IDG		50.30	65.94	69.38	72.82	76.26	79.70		
	Rasio perempuan yang memiliki kapasitas sebagai tenaga manager, profesional, administrasi, teknisi		3.92	4.0	5.0	8.0	10	12		
	Penerapan Anggaran Responsif Gender pada OPD		21.21%	36.36%	51.52%	66.67%	81.82%	100%		
	Persentase legislatif perempuan yang terpilih		8%	30%	30%	30%	30%	30%		
Tujuan 6 Air Kebersihan dan Sanitasi Layak										
INDIKATOR SDGs: 6.1.1.(a) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.										
Program penyediaan dan pengolahan air baku	Persentase penduduk berakses air minum	%	31.22	32	50	65	70	75	81,849,121,052	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	Jumlah kelompok masyarakat pengelola SPAM Berbasis Masyarakat	%	0	10	15	20	25	30	62,060,987,800	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
INDIKATOR SDGs: 6.2.1.(c) Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).										
Program Lingkungan Sehat Perumahan	Persentase Cakupan Sanitasi (Septik Komunal) Pemukiman Terbangun (%)	%	20	1.6	0.8	0.8	0.8	0.8	1,929,950,000	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET TAHUNAN					ALOKASI ANGGARAN 5	INSTANSI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023		
Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Kecamatan/Desa/Kelurahan yang sehat	%	55	60	70	85	95	100	1,715,095,516	Dinas Kesehatan
INDIKATOR SDGs: 6.3.2.(b) Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.										
Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	IKLH		-	68.5	69.5	70.5	71.5	73.5	1,371,327,726	Dinas Lingkungan Hidup
Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau										
INDIKATOR SDGs: 7.1.1* Rasio elektrifikasi.										
Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	titik PJU terpasang	573	550	550	550	550	550	550	96,650,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi										
INDIKATOR SDGs: 8.3.1.(c) Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan										
Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	Peningkatan Jumlah UKM pertahun		2,400	50	50	50	50	50	567,957,582	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Peningkatan jumlah Kelompok yang mendapat fasilitas permodalan/peralatan		10	10	10	10	10	10	75,900,000	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
	Peningkatan Jenis Produk Unggulan		0	5	10	50	50	50	1,030,402,000	
INDIKATOR SDGs: 8.9.1* Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB										
Program Pengembangan Kemitraan	Hubungan Kemitraan dengan POKDARWIS	kelompok	2	10	11	12	14	16	3,221,612,800	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET TAHUNAN					ALOKASI ANGGARAN 5	INSTANSI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023		
INDIKATOR SDGs: 8.9.1.(a) Jumlah wisatawan mancanegara										
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Perkembangan Kunjungan Wisata (orang)	orang	72,328	72,328	75,944	80,501	86,136	93,027	912,788,000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
INDIKATOR SDGs: 8.9.1.(b) Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.										
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Perkembangan Kunjungan Wisata (orang)	orang	72,328	72,328	75,944	80,501	86,136	93,027	912,788,000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Tujuan 9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur										
INDIKATOR SDGs: 9.2.1* Proporsi nilai tambah sektor industri pengolahan non migas terhadap PDB dan perkapita.										
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Cakupan IKM terbina Tahunan		851	17	51	51	53	54	2,228,809,000	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan										
INDIKATOR SDGs: 10.1.1.(c) Jumlah desa tertinggal										
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Meningkatnya keberdayaan masyarakat pedesaan		Mandiri = 0 Maju = 4 Berkembang = 24 tertinggal = 2 Sangat Tertinggal = 0	Mandiri = 1 Maju = 7 Berkembang = 22 tertinggal = 0 Sangat Tertinggal = 0	Mandiri = 1 Maju = 9 Berkembang = 20 tertinggal = 0 Sangat Tertinggal = 0	Mandiri = 1 Maju = 11 Berkembang = 18 tertinggal = 0 Sangat Tertinggal = 0	Mandiri = 1 Maju = 13 Berkembang = 16 tertinggal = 0 Sangat Tertinggal = 0	Mandiri = 2 Maju = 14 Berkembang = 14 tertinggal = 0 Sangat Tertinggal = 0	638,865,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
INDIKATOR SDGs: 10.3.1.(a) Aspek Kebebasan Sipil dalam Indeks Demokrasi Indonesia										
Program pendidikan politik masyarakat	Tersajinya Data Ketahanan Ekososbud dan sda serta Rekomendasi Kebijakan	%	80	83	85	90	95	100	1,158,532,032	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET TAHUNAN					ALOKASI ANGGARAN 5	INSTANSI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023		
Tujuan 11 Kota dan Pemukiman Yang Berkelanjutan										
INDIKATOR SDGs: 11.1.1.(a). Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.										
Program Pengembangan Perumahan	Peningkatan Kualitas Rumah Layak Huni (unit)	Unit	920	300	300	300	300	300	2,211,576,080	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan
INDIKATOR SDGs: 11.5.1*. Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.										
Program Peningkatan Kapasitas Kesiapsiagaan dan Pencegahan, Penyelamatan	tersusunnya dokumen pengamanan yang kondusif	dokumen	2	2	2	2	2	2	76,382,500	Dinas Sosial
INDIKATOR SDGs: 11.5.1.(c). Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.										
Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Tersusunnya dokumen pencegahan penanggulangan korban bencana alam yang akurat	dokumen	5	5	-	-	-	-	60,000,000	BPBD
INDIKATOR SDGs: 11.6.1.(a). Persentase sampah perkotaan yang tertangani.										
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase Timbulan sampah yang tertangani	%	25.27	40	60	70	80	90	46,893,988,063	Dinas Lingkungan Hidup
Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim										
INDIKATOR SDGs: 13.1.2* Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.										
Program Peningkatan Kapasitas Kesiapsiagaan dan Pencegahan, Penyelamatan	tersusunnya dokumen pengamanan yang kondusif	dokumen	2	2	2	2	2	2	76,382,500	Dinas Sosial

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET TAHUNAN					ALOKASI ANGGARAN 5	INSTANSI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023		
Tujuan 14 Ekosistem Lautan										
INDIKATOR SDGs: 14.b.1.(b) Jumlah nelayan yang terlindungi.										
Program pengembangan sistem Penyuluhan perikanan	Cakupan Nelayan Yang Terbina	60	175	200	200	200	200	200	305,957,887	Dinas Perikanan dan Kelautan
Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan Yang Tangguh										
INDIKATOR SDGs: 16.1.4* Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya										
Program pemeliharaan ketentraman, ketertiban perlindungan masyarakat dan pencegahan tindak kriminal	Capaian Ketentraman dan Ketertiban masyarakat	%	100	95	96	97	98	99	911,210,000	Satpol PP
INDIKATOR SDGs: 16.6.1.(a) Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah										
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Opini BPK	dokumen	2	2	2	2	2	2	450,846,000	Badan Keuangan
INDIKATOR SDGs: 16.7.1.(a) Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).										
Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas perempuan (jabatan politik dan publik)	Rasio perempuan terhadap laki-laki pada lembaga legislatif		6 : 30	6 : 30	10 : 30	10 : 30			898,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET TAHUNAN					ALOKASI ANGGARAN 5	INSTANSI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023		
INDIKATOR SDGs: 16.7.1.(b) Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).										
Peningkatan kualitas hidup perempuan	Persentase kelompok perempuan yang memiliki usaha industri rumahan		49.90%	56.10%	62.40%	68.70%	74.90%	81.20%	586,501,156	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Peningkatan IPG		86.31	87.14	87.97	88.58	89.63	90.46		
	Peningkatan IDG		50.30	65.94	69.38	72.82	76.26	79.70		
	Rasio perempuan yang memiliki kapasitas sebagai tenaga manager, profesional, administrasi, teknisi		3.92	4.0	5.0	8.0	10	12		
	Penerapan Anggaran Responnsif Gender pada OPD		21.21%	36.36%	51.52%	66.67%	81.82%	100%		
	Persentase legislatif perempuan yang terpilih		8%	30%	30%	30%	30%	30%		
INDIKATOR SDGs: 16.9.1* Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.										
Penataan Administrasi Kependudukan	Prosentase dokumen kependudukan yang terlayani	%	79	85	89	93	96	98	7,812,188,876	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
INDIKATOR SDGs: 16.9.1.(a) Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.										
Penataan Administrasi Kependudukan	Prosentase dokumen kependudukan yang terlayani	%	79	85	89	93	96	98	7,812,188,876	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
INDIKATOR SDGs: 16.9.1.(b) Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.										
Penataan Administrasi Kependudukan	Prosentase dokumen kependudukan yang terlayani	%	79	85	89	93	96	98	7,812,188,876	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET TAHUNAN					ALOKASI ANGGARAN 5	INSTANSI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023		
Tujuan 17 Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan										
INDIKATOR SDGs: 17.1.1* Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.										
Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	PAD		134,191,044,743	*****	180,567,469,806	286,105,533,454	343,691,472,714	398,682,108,348	11,571,610,000	Badan Keuangan
	Sumbangan Reguler bagi Masyarakat (Penyertaan Modal PDAM Danum Taka) (SR)		8,200	500	3,000	3,000	3,000	3,000	36,000,000,000	
	Peningkatan PAD dari Usaha Daerah (Penyertaan Modal PERUMDA Benuo Taka)		451,895,358	*****	550,000,000	600,000,000	650,000,000	700,000,000	2,000,000,000	
	Peningkatan PAD dari Usaha Daerah Melalui PI 10% Wilayah Kerja Migas (Penyertaan Modal PERUMDA Benuo Taka Energy - PBTE)		-	-	*****	*****	10,000,000,000	*****	10,000,000,000	
	Sumbangan Jargas (Penyertaan Modal PERUMDA Benuo Taka Energy - PBTE)		4,260	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	800,000,000	
INDIKATOR SDGs: 17.6.2.(c) Proporsi penduduk terlayani mobile broadband										
Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Jumlah Layanan Publik yang berbasis Teknologi Informasi	aplikasi	43	43	43	43	43	43	5,200,000,000	Diskominfo
INDIKATOR SDGs: 17.8.1.(a) Persentase kabupaten 3T yang terjangkau layanan akses telekomunikasi universal dan internet.										
Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Jumlah Layanan Publik yang berbasis Teknologi Informasi	aplikasi	43	43	43	43	43	43	5,200,000,000	Diskominfo

MATRIK 3 . PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH KABUPATEN PASER (SESEUAI RPJMD)

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET TAHUNAN					ALOKASI ANGGARAN 5	INSTANSI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023		
Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan										
INDIKATOR SDGs: 1.2.1* Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.										
Program pemberdayaan fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	Persentase KK miskin yang menerima bantuan sosial	%	88	90	96	100			1,110,000,000	Dinas Sosial
	Persentase KK miskin yang menerima pelatihan ketrampilan berusaha		4	4	4	4			300,000,000	
	Persentase KAT yang mendapatkan pembinaan		100	100	100	75			300,000,000	
Program pembinaan panti jompo	Persentase warga panti jompo yang menerima pembinaan	%	100	100	100	100			1,395,000,000	Dinas Sosial
	Persentase lanjut usia terlantar yang telah menerima jaminan sosial		100	100	100	100				
	Persentase lanjut usia terlantar yang telah menerima pembinaan		100	100	100	100				
Program pembinaan anak terlantar	Persentase anak terlantar yang menerima pembinaan	%	100	100	100	100			178,459,515	Dinas Sosial
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Cakupan organisasi kesejahteraan sosial yang mendapatkan pembinaan	%	100	100	100	100			1,056,160,500	Dinas Sosial
INDIKATOR SDGs: 1.3.1.(c) Jumlah penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.										
Program Pembinaan para Penyandang Cacat dan Trauma	Persentase penyandang disabilitas yang telah menerima jaminan sosial	%	88	92	96	100			121,060,775	Dinas Sosial

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET TAHUNAN					ALOKASI ANGGARAN 5	INSTANSI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023		
INDIKATOR SDGs: 1.5.1* Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.										
Program penanggulangan korban bencana sosial	Persentase korban bencana sosial yang menerima bantuan sosial	%	100	100	100	100			262,500,000	Dinas Sosial
INDIKATOR SDGs: 1.5.1.(a) Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.										
Program pencegahan dini & penanggulangan korban bencana alam	Sistem pencegahan dini yang berfungsi (SPP dan SOP)	%	70	75	80	80			4,528,950,799	BPBD
INDIKATOR SDGs: 1.5.1.(b) Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.										
Program rehabilitasi dan rekonstruksi korban bencana sosial	Cakupan pelayanan rehabilitasi dan rekonstruksi korban bencana sosial		-	-	-	-			-	BPBD
Tujuan 2 Tanpa Kelaparan										
INDIKATOR SDGs: 2.1.1* Prevalensi ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)										
Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Ketersediaan pangan utama pertanian	%	40	45	50	55			17,650,569,125	Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian
INDIKATOR SDGs: 2.1.1.(a) Prevalensi Kekurangan Gizi (underweight) pada anak balita.										
Perbaikan Gizi Masyarakat	Presentase balita mendapat kapsul Vit A	%	76	77	78	80			7,994,766,950	Dinas Kesehatan
	Presentase ibu hamil mendapat Fe 90		78	80	90	100			3,018,717,300	
	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)		100	100	100	100			2,190,717,300	
INDIKATOR SDGs: 2.2.1* Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak balita.										
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Balita berat badan di bawah garis Merah (BGM)	Anak	-	-	-	-			4,456,470,000	Dinas Kesehatan
	Cakupan pelayanan kesehatan balita	%	65	70	75	80				
	Rasio Posyandu per 1000 balita		365	370	375	380				

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET TAHUNAN					ALOKASI ANGGARAN 5	INSTANSI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023		
INDIKATOR SDGs: 2.3.1* Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja)										
Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Luas lahan yang menghasilkan produksi pertanian (padi)	Hektar	9,800	10,000	10,200	10,400			13,665,109,909	Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian
	Luas lahan yang menghasilkan produksi pertanian (jagung)	Hektar	360	370	380	400				
	Luas lahan yang menghasilkan produksi pertanian (kedelai)	Hektar	100	110	120	130				
	Luas lahan yang menghasilkan produksi pertanian (bawang merah)	Hektar	30	35	40	45				
	Luas lahan yang menghasilkan produksi pertanian (jeruk)	Hektar	420	430	440	450				
INDIKATOR SDGs: 2.5.1* Jumlah varietas unggul tanaman dan hewan untuk pangan yang dilepas.										
Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Cakupan kelompok peternak yang diberdayakan	%	12	13	14	15			6,244,583,389	Dinas Pertanian
INDIKATOR SDGs: 2.5.2* Proporsi hewan ternak dan sejenisnya, diklasifikasikan menurut tingkat risiko kepunahan: berisiko, tidak berisiko, dan risiko yang tidak										
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Rasio populasi ternak yang sehat terhadap jumlah ternak	%	72	73	74	75			895,235,747	Dinas Pertanian
Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera										
INDIKATOR SDGs: 3.1.1* Angka Kematian Ibu (AKI).										
Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan rumah tangga yang mendapatkan promosi kesehatan	%	74	76	78	80			438,910,280	Dinas Kesehatan
INDIKATOR SDGs: 3.3.2.(a) Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.										
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Cakupan Penanganan Penderita Penyakit BC	%	74	76	78	80			6,684,000,000	Dinas Kesehatan

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET TAHUNAN					ALOKASI ANGGARAN 5	INSTANSI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023		
INDIKATOR SDGs: 3.5.1.(c) Jumlah korban penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti sesuai standar pelayanan.										
Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Cakupan eks peyandang penyakit sosial yang menerima pembinaan	Orang	330	325	320	320			305,534,755	Dinas Sosial
INDIKATOR SDGs: 3.8.2.(a) Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).										
Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Presentase peserta jaminan pemeliharaan kesehatan di unit layanan	%	92	94	96	98			2,250,000,000	Dinas Kesehatan
INDIKATOR SDGs: 3.a.1* Persentase merokok pada penduduk umur <15 tahun.										
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Prevalensi hipertensi	Kasus	19,000	18,000	16,000	15,000			3,100,000,000	Dinas Kesehatan
INDIKATOR SDGs: 3.b.1.(a) Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.										
Obat dan Perbekalan kesehatan	Cakupan ketersediaan obat esensial generic di faskes	%	100	100	100	100			12,628,190,198	Dinas Kesehatan
Upaya kesehatan masyarakat	Persentase masyarakat yang terlayani puskesmas	%	80	85	87	90			48,741,712,000	Dinas Kesehatan, RSUD, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
INDIKATOR SDGs: 3.c.1* Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.										
Pemerataan tenaga kesehatan	Rasio Dokter (per 100.000 penduduk)		28	32	37	40			38,634,465,600	Dinas Kesehatan
Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas										
INDIKATOR SDGs: 4.1.1.(d) Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.										
Wajib Belajar Sembilan tahun	Persentase unit pendidikan yang mengimplementasikan model unggulan mutu pendidikan	%	4	6	8	10			74,869,620,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET TAHUNAN					ALOKASI ANGGARAN 5	INSTANSI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023		
Pendidikan Non-formal	Angka putus sekolah masyarakat	%	0.702	0.47	0.23	0			1,020,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Jumlah lembaga pendidikan keterampilan	Unit	14	16	18	20			450,000,000	
	Jumlah keaksaraan mandiri	Orang	10,000	9,500	9,000	8,500			3,850,000,000	
	Persentase tenaga tutor yang memiliki kualifikasi	%	28	32	36	40			4,950,000,000	
Tujuan 5 Kesetaraan Gender										
INDIKATOR SDGs: 5.1.1* Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.										
Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Persentase perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor formal non-pertanian	%	54	54.50	55	55			935,800,000	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
INDIKATOR SDGs: 5.2.1* Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh										
Program Peningkatan kualitas Hidup perlindungan Perempuan (kekerasan perempuan)	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditangani	%	80	90	100	100			998,888,888	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
INDIKATOR SDGs: 5.2.1.(a) Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.										
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak (kekerasan anak)	Persentase kasus kekerasan anak yang ditangani	%	80	90	100	100			845,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
INDIKATOR SDGs: 5.5.1* Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.										
Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas perempuan (jabatan politik dan publik)	Rasio perempuan terhadap laki-laki pada lembaga legislatif		6 : 30	6 : 30	10 : 30	10 : 30			898,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Rasio PNS perempuan terhadap PNS laki-laki		2395 : 5582	2450 : 5582	2500 : 5582	2555 : 5582				
	Rasio pejabat struktural perempuan terhadap pejabat struktural laki-laki		250 : 787	265 : 787	285 : 787	300 : 787				
Tujuan 6 Air Kebersihan dan Sanitasi Layak										

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET TAHUNAN					ALOKASI ANGGARAN 5	INSTANSI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023		
INDIKATOR SDGs: 6.1.1.(a) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.										
Penyediaan dan pengelolaan air baku	Persentase desa yang masuk dalam cakupan pelayanan PDAM	%	53	63	73	83			2,259,160,350	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	Persentase sarana penampungan air baku dalam kondisi baik	%	50	65	70	85			20,853,787,500	
Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Persentase teknologi pengeloaahan air minum yang dimanfaatkan	%	15	17	19	21			17,250,000,000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Pengembangan, pengelolaan, dan konversi sungai, danau, dan sumber daya air lainnya	Jumlah desa yang memiliki sarana air baku	Desa	72	75	78	81			9,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Persentase kecamatan yang terinstalasi jaringan air bersih	%	75	85	95	100			8,341,515,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
INDIKATOR SDGs: 6.2.1.(c) Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).										
Lingkungan sehat perumahan	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas mum (PSU)	%	74	79	84	90			19,411,400,550	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Pengembangan Lingkungan Sehat	Rumah Tangga ber-PHBS	%	70	75	80	85			75,244,809	Dinas Kesehatan
INDIKATOR SDGs: 6.3.2.(b) Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.										
Pengendalian Pencemaran dan	Nilai status lingkungan hidup daerah		70.5	73.5	76.5	80			8,921,590,000	Dinas Lingkungan

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET TAHUNAN					ALOKASI ANGGARAN 5	INSTANSI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023		
Perusakan Lingkungan Hidup	Laju deforestasi	Ha/tahun	16,800	16,200	15,600	15,000			375,000,000	Hidup
INDIKATOR SDGs: 6.6.1.(d) Luas lahan kritis dalam KPH yang direhabilitasi.										
Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	Persentase peningkatan luas area DAS yang terkonservasi	%	6.8	7.2	7.6	8			1,000,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
	Persentase luas HCV dalam kawasan izin pemanfaatan lahan	%	7	8	9	10				
Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau										
INDIKATOR SDGs: 7.1.1* Rasio elektrifikasi.										
Peningkatan dan fasilitasi pengembangan sarana dan pra-sarana kelistrikan	Rasio elektrifikasi		0.8	0.85	0.9	0.9			9,703,988,396	Dinas Perindustrian dan Energi
Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi										
INDIKATOR SDGs: 8.3.1.(c) Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan										
Penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif	Persentase UMKM yang mendapatkan kredit perbankan	%	30	45	60	75			764,977,454	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
Pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM	Cakupan produk UMKM yang mendapatkan permodalan	Produk	75	100	125	150			85,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET TAHUNAN					ALOKASI ANGGARAN 5	INSTANSI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023		
INDIKATOR SDGs: 8.9.1* Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB										
Pengembangan kemitraan	Persentase lembaga mitra yang aktif berkerjasama	%	100	100	100	100			232,335,040	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
Pengembangan destinasi pariwisata	Jumlah destinasi wisata yang dikembangkan	Destinasi	12	13	14	15			1,405,038,483	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
INDIKATOR SDGs: 8.9.1.(a) Jumlah wisatawan mancanegara										
Pengembangan pemasaran pariwisata	Jumlah media pemasaran pariwisata Pemerintah Daerah	Jenis	5	5	5	5			540,000,000	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
INDIKATOR SDGs: 8.9.1.(b) Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.										
Pengembangan pemasaran pariwisata	Jumlah media pemasaran pariwisata Pemerintah Daerah	Jenis	5	5	5	5			540,000,000	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
Tujuan 9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur										
INDIKATOR SDGs: 9.2.1* Proporsi nilai tambah sektor industri pengolahan non migas terhadap PDB dan perkapita.										
Pengembangan sentra-sentra industri potensial	Kontribusi industri kecil menengah terhadap PDRB	%	60	70	80	90			3,745,712,500	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
INDIKATOR SDGs: 9.4.1.(a) Persentase Perubahan Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca.										
Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Emisi yang diturunkan dari Pemanfaatan Lahan di areal APL (juta ton CO2 eq)	Juta ton CO2 eq	2.29	2.01	1.77	1.58			1,995,000,000	Dinas Lingkungan Hidup

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET TAHUNAN					ALOKASI ANGGARAN 5	INSTANSI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023		
Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan										
INDIKATOR SDGs: 10.1.1.(c) Jumlah desa tertinggal										
Pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Persentase desa yang memiliki BUMDES	%	40	60	80	100			554,540,489	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Peningkatan pembinaan dan Pengembangan penyelenggaraan pemerintahan desa/Kelurahan	Persentase desa yang menyusun dan melaporkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa	%	75	100	100	100			1,060,428,296	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Penataan Lembaga Kemasyarakatan	Persentase Lembaga kemasyarakatan desa aktif	%	-	-	-	-			-	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
INDIKATOR SDGs: 10.3.1.(a) Aspek Kebebasan Sipil dalam Indeks Demokrasi Indonesia										
Pendidikan politik masyarakat (pilkada)	Partisipasi pemilih dalam pilkada	%	-	-	75	-			-	Kantor Kesbangpol; Satpol PP; Bagian Tata Pemerintahan
	Partisipasi pemilih dalam pilgub	%	-	-	-	-				
Pendidikan politik masyarakat (pileg & pilpres)	Partisipasi pemilih dalam pileg	%	-	75	-	-			1,331,506,000	Kantor Kesbangpol; Satpol PP; Bagian Tata Pemerintahan
	Partisipasi pemilih dalam pilpres	%	-	70	-	-				
Tujuan 11 Kota dan Pemukiman Yang Berkelanjutan										
INDIKATOR SDGs: 11.1.1.(a). Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.										
Pengembangan perumahan	Rasio rumah layak huni	Unit	70	95	120	145			6,082,354,700	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET TAHUNAN					ALOKASI ANGGARAN 5	INSTANSI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023		
INDIKATOR SDGs: 11.5.1*. Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.										
Program penanggulangan korban bencana sosial	Persentase korban bencana sosial yang menerima bantuan sosial	%	100	100	100	100			262,500,000	Dinas Sosial
INDIKATOR SDGs: 11.5.1.(c). Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.										
Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Sistem pencegahan dini yang berfungsi (SPP dan SOP)	%	70	75	80	80			4,528,950,799	BPBD
INDIKATOR SDGs: 11.6.1.(a). Persentase sampah perkotaan yang tertangani.										
Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	Cakupan ibukota kecamatan yang memiliki fasilitas pengelolaan sampah	IKK	2	2	1	1			20,481,924,726	Dinas Lingkungan Hidup
	Jumlah rumah tangga yang melakukan pengelolaan sampah secara mandiri	Rumah Tangga	7,200	8,700	10,200	11,700			4,200,000,000	
	Persentase kecamatan yang sudah terlayani pengelolaan pesampahan	%	38	52	66	80			23,685,969,246	
Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim										
INDIKATOR SDGs: 13.1.2* Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.										
Program penanggulangan korban bencana sosial	Persentase korban bencana sosial yang menerima bantuan sosial	%	100	100	100	100			262,500,000	Dinas Sosial
Tujuan 14 Ekosistem Lautan										
INDIKATOR SDGs: 14.b.1.(b) Jumlah nelayan yang terlindungi.										
Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Perikanan	Cakupan masyarakat perikanan yang diberdayakan	%	15	17.5	20	22.5			1,507,864,000	Dinas Perikanan

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET TAHUNAN					ALOKASI ANGGARAN 5	INSTANSI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023		
Tujuan 15 Ekosistem Daratan										
INDIKATOR SDGs: 15.3.1.(a). Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.										
Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Persentase luasan kawasan lindung terhadap luasan kabupaten	%	21.50	24.00	26.50	30.00			1,677,216,547	Dinas Lingkungan Hidup
Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan Yang Tangguh										
INDIKATOR SDGs: 16.1.4* Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya										
Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal (SDM dan sarana & prasarana)	Jumlah linmas per 10.000 penduduk	Orang	890	890	890	890			222,615,838	Kantor Kesbangpol; Satpol PP
	Jumlah aksi unjuk rasa anarkis	Kasus	118	108	108	100			3,300,106,952	
INDIKATOR SDGs: 16.2.1.(a) Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari										
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak (kekerasan anak)	Persentase kasus kekerasan anak yang ditangani	%	80	90	100	100			845,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan
INDIKATOR SDGs: 16.5.1.(a) Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).										
Pencegahan dan pemberantasan korupsi	Jumlah kasus korupsi yang telah diputus secara hukum		3	3	3	3			1,914,127,080	Inspektorat Kabupaten
	Persentase PD yang telah menerapkan zona WBK/WBM		2	2	3	3				
INDIKATOR SDGs: 16.6.1.(a) Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah										
Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah (BPKAD)	Persentase PD yang menyusun laporan keuangan sesuai standar		100	100	100	100			19,530,406,204	BPKAD
INDIKATOR SDGs: 16.7.1.(a) Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).										

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET TAHUNAN					ALOKASI ANGGARAN 5	INSTANSI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023		
Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas perempuan (jabatan politik dan publik)	Rasio perempuan terhadap laki-laki pada lembaga legislatif		6 : 30	6 : 30	10 : 30	10 : 30			898,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
INDIKATOR SDGs: 16.7.1.(b) Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).										
Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas perempuan (jabatan politik dan publik)	Rasio pejabat struktural perempuan terhadap pejabat struktural laki- laki		250 : 787	265 : 787	285 : 787	300 : 787			-	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
INDIKATOR SDGs: 16.9.1* Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.										
Program penataan administrasi kependudukan	Kepemilikan akte lahir per 1000 penduduk		107,438	114,487	121,352	128,726			-	Kantor kecamatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
INDIKATOR SDGs: 16.9.1.(a) Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.										
Program penataan administrasi kependudukan	Kepemilikan akte lahir per 1000 penduduk		107,438	114,487	121,352	128,726			-	Kantor kecamatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
INDIKATOR SDGs: 16.9.1.(b) Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.										
Program penataan administrasi kependudukan	Kepemilikan akte lahir per 1000 penduduk		107,438	114,487	121,352	128,726			-	Kantor kecamatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET TAHUNAN					ALOKASI ANGGARAN 5	INSTANSI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023		
Tujuan 17 Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan										
INDIKATOR SDGs: 17.1.1* Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.										
Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah (pendapatan)	Persentase kontribusi PAD terhadap total pendapatan	%	7	8	9	10			11,736,176,949	Bapenda
INDIKATOR SDGs: 17.6.2.(c) Proporsi penduduk terlayani mobile broadband										
Pengembangan komunikasi, informasi, dan media massa	Persentase desa yang bisa mengakses informasi digital	%	54	66	78	90			18,755,544,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
INDIKATOR SDGs: 17.8.1.(a) Persentase kabupaten 3T yang terjangkau layanan akses telekomunikasi universal dan internet.										
Pengembangan komunikasi, informasi, dan media massa	Persentase desa yang bisa mengakses informasi digital	%	54	66	78	90			18,755,544,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

MATRIK 3 . PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA (SESUAI RPJMD)

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET TAHUNAN					ALOKASI ANGGARAN 5	INSTANSI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023		
Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan										
INDIKATOR SDGs: 1.2.1* Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.										
Program Pembinaan Panti Asuhan Anak /Panti Jompo	Persentase Panti Sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial	%	100	100	100	100			3,045,000,000	Dinas Sosial
Fasilitasi Pelayanan anak pada UPT Panti Sosial Asuhan Anak Tenggarong	Jumlah anak asuh yang terfasilitasi	anak			40				1,015,000,000	
Program Rehabilitasi Sosial Bagi PMKS	1) Persentase PMKS yang tertangani 2) Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	%		1) 100 2) 100	1) 100 2) 100	1) 100 2) 100			6,120,000,000	Dinas Sosial
Fasilitasi Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak dan Lanjut Usia (adopsi, anak terlantar masuk panti, PSBR, Panti lansia)	Jumlah anak dan lanjut usia	orang			50				100,000,000	
Fasilitasi Alat Bantu Aksesibilitas bagi Lanjut Usia Non Potensial	Jumlah alat bantu aksesibilitas bagi lansia non potensial	orang			50				150,000,000	
Program Penanganan Fakir Miskin	Cakupan Fakir Miskin/ Orang Tidak Mampu yang tertangani	%		90	90	90			6,674,861,725	Dinas Sosial

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET TAHUNAN					ALOKASI ANGGARAN 5	INSTANSI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023		
Fasilitasi Ketrampilan Berusaha bagi Fakir Miskin	Jumlah Fakir Miskin yang memperoleh Pelatihan Ketrampilan	orang			50				125,000,000	Dinas Sosial
Fasilitasi Bantuan Pangan Non Tunai (Rastra)	Jumlah Fakir miskin yang penerima BPNT	keluarga			24,000				600,000,000	
Operasional Puskesmas Kelurahan	Jumlah Puskesmas di Kelurahan yang memperoleh bantuan operasional	kelurahan			50				600,000,000	
INDIKATOR SDGs: 1.3.1. (c) Jumlah penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.										
Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Presentase pembinaan sosial bagi penyandang cacat dan eks trauma	%	60						-	Dinas Sosial
Program Rehabilitasi Sosial Bagi PMKS	1) Persentase PMKS yang tertangani 2) Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	1) % 2) %		1) 100 2) 100	1) 100 2) 100	1) 100 2) 100			6,120,000,000	Dinas Sosial
Fasilitasi alat bantu aksesibilitas, bagi penyandang Disabilitas (dan Eks penyakit kronis -kusta,tb paru,)	jumlah penyandang disabilitas penerima alat bantu	orang			50				150,000,000	
Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Anak dengan Kecacatan melalui panti (SDLB)	jumlah anak dengan kecacatan penerima pelayanan	orang			40				200,000,000	

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET TAHUNAN					ALOKASI ANGGARAN 5	INSTANSI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023		
Rehabilitasi sosial dan medis bagi penyandang disabilitas dan eks trauma (psikotik dan pasung, kusta)	jumlah penyandang cacat dan eks trauma penerima rehabilitasi sosial dan medis	orang			25				100,000,000	Dinas Sosial
Fasilitasi Penerima Jaminan sosial bagi penyandang disabilitas berat dan lansia non potensial	Jumlah penerima Jaminan sosial bagi penyandang disabilitas berat dan lansia non potensial	orang			100				100,000,000	
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	1) Persentase Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar; 2) Persentase korban bencana dan kelompok rentan yang menerima bantuan dan jaminan pada masa tanggap darurat	1) % 2) %		1) 100 2) 100	1) 100 2) 100	1) 100 2) 100			7,412,846,000	Dinas Sosial
Penunjang Operasional Pendampingan Program Keluarga Harapan	Jumlah Pendamping Program Keluarga Harapan	orang			250				850,000,000	
Fasilitasi Pertemuan peningkatan Kemampuan KPM PKH	Jumlah KPM PKH yang mengikuti P2K2	keluarga			30				150,000,000	
Bantuan stimulan bagi KPM	Jumlah KPM PKH yang memperoleh bantuan stimulan	keluarga			100				200,000,000	

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET TAHUNAN					ALOKASI ANGGARAN 5	INSTANSI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023		
INDIKATOR SDGs: 1.5.1* Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.										
Program Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana	Cakupan layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100	100	100	100			5,113,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah peralatan perlindungan kesiapsiagaan	unit			100			200,000,000		
Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana					-			600,000,000		
INDIKATOR SDGs: 1.5.1. (a) Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.										
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	1) Jumlah Desa/Kelurahan Tangguh Bencana; 2) Cakupan Layanan Informasi Rawan Bencana	1) desa/kel; 2) persen	1) 2; 2) 100	1) 4; 2) 100	1) 6; 2) 100	1) 8; 2) 100			3,309,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Fasilitasi persiapan Desa Tangguh Bencana	Persentase Desa Tangguh Bencana	Desa/ Kelurahan			6			450,000,000		
INDIKATOR SDGs: 1.5.1. (b) Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial										
Program Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana	Cakupan layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100	100	100	100			5,113,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Pengerahan Peralatan/Logistik dan Pemenuhan Kebutuhan dasar					-			463,000,000		

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET TAHUNAN					ALOKASI ANGGARAN 5	INSTANSI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023		
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	1) Persentase Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar; 2) Persentase korban bencana dan kelompok rentan yang menerima bantuan dan jaminan pada masa tanggap darurat	1) % 2) %		1) 100 2) 100	1) 100 2) 100	1) 100 2) 100			7,412,846,000	Dinas Sosial
Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	Jumlah korban bencana yang menerima bantuan selama masa tanggap darurat	Jiwa			3,000				600,000,000	
INDIKATOR SDGs: 1.5.1.(c) Pendampingan psikososial korban bencana sosial										
Program Rehabilitasi Sosial Bagi PMKS	1) Persentase PMKS yang tertangani 2) Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	1) % 2) %		1) 100 2) 100	1) 100 2) 100	1) 100 2) 100			6,120,000,000	Dinas Sosial
Pelayanan rehabilitasi Psikososial di Rumah perlindungan dan Trauma Centre (RPTC) dan Penguatan Fungsi Sosial	Jumlah anak dan perempuan korban tindak kekerasan dan perlakuan salah yang menerima rehabilitasi psikososial	orang			70				350,000,000	

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET TAHUNAN					ALOKASI ANGGARAN 5	INSTANSI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023		
INDIKATOR SDGs: 1.5.1.(d) Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus.										
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	1) Jumlah Desa/Kelurahan Tangguh Bencana; 2) Cakupan Layanan Informasi Rawan Bencana	1) desa/kel; 2) persen	1) 2; 2) 100	1) 4; 2) 100	1) 6; 2) 100	1) 8; 2) 100			3,309,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sekolah Siaga Bencana	Jumlah Sekolah Siaga Bencana	sekolah			3				75,000,000	
Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	sarana dan prasarana berupa alat komunikasi dan sistem peringatan dini kebencanaan beerbabis keemasyarakatan	orang			20				140,000,000	
INDIKATOR SDGs: 1.5.3* Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.										
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	1) Jumlah Desa/Kelurahan Tangguh Bencana; 2) Cakupan Layanan Informasi Rawan Bencana	1) desa/kel; 2) persen	1) 2; 2) 100	1) 4; 2) 100	1) 6; 2) 100	1) 8; 2) 100			3,309,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Penyusunan Kajian Risiko Bencana (KRB)	Jumlah Dokumen KRB	dokumen			1				800,000,000	

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET TAHUNAN					ALOKASI ANGGARAN 5	INSTANSI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023		
Tujuan 2 Tanpa Kelaparan										
INDIKATOR SDGs: 2.1.1* Prevalensi ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernutrition)										
Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	1) Penguatan Kebijakan/ Program/Kegiatan Penyelenggaraan Ketahanan Pangan dan Gizi Lintas Sektor (Cakupan Regulasi Ketahanan Pangan); 2) Prosentase Ketersediaan pangan utama Beras; 3) Persentase desa berstatus swasembada pangan utama (beras); 4) Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita (Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan); 5) Penanganan Daerah Rawan Pangan (Penurunan jumlah penduduk rawan pangan (%/tahun); 6) Konsumsi Energi dan Protein Perkapita (PPH) Konsumsi (Cakupan nilai (score) Pola Pangan Harapan Konsumsi); 7) Cakupan Keamanan Pangan segar (%)	1) Regulasi; 2) persen; 3) persen; 4) skor; 5) persen; 6) skor; 7) persen	1) 1; 2) 131; 3) 22; 4) 94; 5) 1; 6) 92; 7) 85	1) 1; 2) 132; 3) 23; 4) 95; 5) 1; 6) 92; 7) 86					5,471,470,000	Dinas Ketahanan Pangan

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET TAHUNAN					ALOKASI ANGGARAN 5	INSTANSI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023		
INDIKATOR SDGs: 2.1.1.(a) Prevalensi Kekurangan Gizi (underweight) pada anak balita.										
Program Perbaikan Gizi Masyarakat	1) Prevalensi Balita Gizi Kurang; 2) Persentase balita Gizi Buruk mendapat perawatan; 3) Prevalensi Balita Stunting; 4) Prevalensi Balita Kurus; 5) Persentase Ibu Hamil KEK mendapat PMT ;	1) persen; 2) persen; 3) persen; 4) persen; 5) persen;	1) 16; 2) 100; 3) 0; 4) 0; 5) 97;	1) 17.44; 2) 100; 3) 28; 4) 10; 5) 92;	1) 17; 2) 100; 3) 28; 4) 9; 5) 95;	1) 16.56; 2) 100; 3) 27; 4) 9; 5) 97;			10,129,568,225	Dinas Kesehatan
Pencegahan dan Penanggulangan bumil KEK dan anak gizi buruk/KEP	Jumlah kasus gizi buruk yang mendapatkan perawatan, jumlah penderita TB KEP yang mendapat makanan tambahan, dan jumlah Bumik KEK yang mendapatkan makanan tambahan	orang			39				300,000,000	
INDIKATOR SDGs: 2.1.2* Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawananan pangan.										
Program Pengembangan Ketersediaan Pangan dan Sistem Distribusi Pangan	1) Prosentase Ketersediaan pangan (Beras); 2) Koefisien variasi pangan (beras) di tingkat konsumen (CV) <10%; 3) Penguatan Cadangan Pangan (beras); 4) Terbentuknya Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat	1) persen; 2) persen; 3) ton; 4) kelompok			1) 133; 2) <10; 3) 25; 4) 3;	1) 135; 2) <10; 3) 50; 4) 6;			3,550,000,000	Dinas Ketahanan Pangan

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET TAHUNAN					ALOKASI ANGGARAN 5	INSTANSI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023		
Pemantauan Daerah Rawan Pangan	Jumlah jiwa dalam desa/kelurahan yang mendapat penanganan rawan pangan	Desa/ Kelurahan			30				300,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
INDIKATOR SDGs: 2.2.1* Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak balita.										
Program Perbaikan Gizi Masyarakat	1) Prevalensi Balita Gizi Kurang; 2) Persentase balita Gizi Buruk mendapat perawatan; 3) Prevalensi Balita Stunting; 4) Prevalensi Balita Kurus; 5) Persentase Ibu Hamil	1) persen; 2) persen; 3) persen; 4) persen; 5) persen;	1) 16; 2) 100; 3) 0; 4) 0; 5) 97;	1) 17.44; 2) 100; 3) 28; 4) 10; 5) 92;	1) 17; 2) 100; 3) 28; 4) 9; 5) 95;	1) 16.56; 2) 100; 3) 27; 4) 9; 5) 97;			10,129,568,225	Dinas Kesehatan
INDIKATOR SDGs: 2.2.1.(a) Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.										
Program Perbaikan Gizi Masyarakat	1) Prevalensi Balita Gizi Kurang; 2) Persentase balita Gizi Buruk mendapat perawatan; 3) Prevalensi Balita Stunting; 4) Prevalensi Balita Kurus; 5) Persentase Ibu Hamil	1) persen; 2) persen; 3) persen; 4) persen; 5) persen;	1) 16; 2) 100; 3) 0; 4) 0; 5) 97;	1) 17.44; 2) 100; 3) 28; 4) 10; 5) 92;	1) 17; 2) 100; 3) 28; 4) 9; 5) 95;	1) 16.56; 2) 100; 3) 27; 4) 9; 5) 97;			10,129,568,225	Dinas Kesehatan
Peningkatan kapasitas tatalaksana Stunting/Kretin pada baduta	Jumlah petugas terlatih penanganan balita stunting/kretin	orang			25					

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET TAHUNAN					ALOKASI ANGGARAN 5	INSTANSI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023		
INDIKATOR SDGs: 2.2.2.(c) (i)Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH); dan (ii) tingkat konsumsi ikan perkapita										
Program Pengembangan Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan Masyarakat	1) Cakupan nilai (score) Pola Pangan Harapan Konsumsi; 2) Cakupan Keamanan Pangan segar	1) skor; 2) persen			1) 92,8; 2) 87	1) 93; 2) 88			2,739,997,200	Dinas Ketahanan Pangan
Analisis Situasi dan Kebutuhan Konsumsi Pangan Wilayah (Survey Pola Pangan Harapan (PPH)Konsumsi	Jumlah Responden/Rumah tangga	Responden/ Rumah Tangga			540			49,998,600		
Optimalisasi pemanfaatan pekarangan Masyarakat Berbasis Komoditi Pangan Lokal	Jumlah kelompok	kelompok			14			270,000,000		
INDIKATOR SDGs: 2.3.1* Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja)										
Program peningkatan produksi pertanian	1) Padi Sawah (Kwt/Ha) 2) Padi Ladang (Kwt/Ha) 3) Kedelai (Kwt/Ha) 4) Kacang Tanah (Kwt/Ha) 5) Ubi Kayu (Kwt/Ha) 6) Ubi Jalar (Kwt/Ha) 7) Padi Sawah (Ton) 8) Padi Ladang (Ton) 9) Kedelai (Ton) 10) Kacang Tanah (Ton) 11) Ubi Kayu (Ton) 12) Ubi Jalar (Ton) 13) Tanaman Buah (Ton) 14) Tanaman Sayuran Dataran Rendah (Ton)	1) Kwt / Ha 2) Kwt / Ha 3) Kwt / Ha 4) Kwt / Ha 5) Kwt / Ha 6) Kwt / Ha 7) Ton 8) Ton 9) Ton 10) Ton 11) Ton 12) Ton 13) Ton 14) Ton	1) 54.13 2) 35.48 3) 14.58 4) 12.95 5) 255.62 6) 118.47 7) 223.404 8) 16.321 9) 476 10) 662 11) 35.176 12) 6.042 13) 63.773 14) 33.636	1) 55.63 2) 36.76 3) 14.71 4) 12.98 5) 278.63 6) 118.49 7) 235.628 8) 17.645 9) 509 10) 665 11) 45.818 12) 6.043 13) 64.322 14) 34.931					9,458,346,000	Dinas Pertanian dan Peternakan
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pertanian								13,000,000,000		

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET TAHUNAN					ALOKASI ANGGARAN 5	INSTANSI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023		
Pengembangan Perbenihan / Pembibitan Tanaman Pangan									100,000,000	Dinas Pertanian dan Peternakan
Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani-Nelayan	Jumlah kelompok Tani-Nelayan	kelompok							1,000,000,000	
Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian	1) Cakupan Nilai Pemasaran Hasil Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura 2) Pertumbuhan Nilai pemasaran komoditi pertanian	1) Rp. 2) Persen	1) 3.812.299. 421.725 2) n.a	1) 4.284.9 51.069. 069 2) n.a	1) 0 2) 12.45	1) 0 2) 12.51			3,050,000,000	
Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah	Jumlah even/pameran yang diikuti	even/ pameran			6				200,000,000	
Peningkatan informasi pemasaran hasil pertanian tanaman pangan dan hortikultura	Jumlah Pertemuan antara Petani Tanaman Pangan dan Hortikultura dengan pelaku usaha	kali			2				250,000,000	
Pengembangan Kerjasama Kemitraan Usaha Agribisnis	Jumlah Kelompok Usaha yang Terbina/melakukan kerjasama kemitraan agribisnis	kelompok			9				200,000,000	

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET TAHUNAN					ALOKASI ANGGARAN 5	INSTANSI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023		
Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera										
INDIKATOR SDGs: 3.2.2.(b) Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.										
Program Pengendalian Penyakit dan Surveilans	1) Cakupan imunisasi dasar lengkap pada bayi > 80%; 2) Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) 100%;	1) persen; 2) persen;	1) 77.5; 2) 100;	1) 90; 2) 100;	1) 91; 2) 100;	1) 92; 2) 100;			6,734,248,000	Dinas Kesehatan
Fasilitasi Peningkatan Cakupan Imunisasi									567,500,000	
INDIKATOR SDGs: 3.3.1.(a) Prevalensi HIV pada populasi dewasa.										
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	1) Cakupan pelayanan kesehatan pada penderita TB; 2) Cakupan pelayanan kesehatan pada penderita HIV-AIDS;	1) persen; 2) persen;							4,711,085,000	Dinas Kesehatan
Fasilitasi Penanggulanga	Cakupan penanganan kasus HIV dan AIDs 100%	%			100				300,000,000	
INDIKATOR SDGs: 3.3.2.(a) Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.										
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	1) Cakupan pelayanan kesehatan pada penderita TB; 2) Cakupan pelayanan kesehatan pada penderita HIV-AIDS;	1) persen; 2) persen;							4,711,085,000	Dinas Kesehatan
Fasilitasi Penanggulanga	Case Detektion Rate (CDR) 399/100.000	kali/tahun			100				250,000,000	

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET TAHUNAN					ALOKASI ANGGARAN 5	INSTANSI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023		
INDIKATOR SDGs: 3.3.3* Kejadian Malaria per 1000 orang.										
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	1) Cakupan pelayanan kesehatan pada penderita TB; 2) Cakupan pelayanan kesehatan pada penderita HIV-AIDS;	1) persen; 2) persen;							4,711,085,000	Dinas Kesehatan
Fasilitasi Penanggulanga	API (Annual Parasite Incidence) < 1/1.000)				100				150,000,000	
INDIKATOR SDGs: 3.3.4. (a) Fasilitasi Penanggulangan Penyakit Hepatitis										
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	1) Cakupan pelayanan kesehatan pada penderita TB; 2) Cakupan pelayanan kesehatan pada penderita HIV-AIDS;	1) persen; 2) persen;							4,711,085,000	Dinas Kesehatan
Fasilitasi Penanggulanga	Cakupan penemuan deteksi dini Hepatitis	%			100					
INDIKATOR SDGs: 3.5.1. (c) Jumlah korban penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti sesuai standar pelayanan.										
Program Rehabilitasi Sosial Bagi PMKS	1) Persentase PMKS yang tertangani 2) Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	1) % 2) %		1) 100 2) 100	1) 100 2) 100	1) 100 2) 100			6,120,000,000	Dinas Sosial
Fasilitasi Rehabilitasi penderita ODHA (Orang dengan HIV AIDS) dan NAPZA (Narkotika dan Zat Adiktiv)	Jumlah penderita ODHA SKPD dan NAPZA	orang			25				100,000,000	

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET TAHUNAN					ALOKASI ANGGARAN 5	INSTANSI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023		
INDIKATOR SDGs: 3.7.1.(a) Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus l										
Program Keluarga Berencana	1) Angka pemakaian kontrasepsi CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 tahun; 2) Cakupan pelayanan KB baru;	1) Persen; 2) Persen;	1) 73.29; 2) 15.12;	1) 74.4; 2) 15.25;	1) 74.9; 2) 15.57;	1) 75.4; 2) 15.65;			2,506,535,680	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
INDIKATOR SDGs: 3.8.2.(a) Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).										
Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Persentase pembiayaan bagi penduduk yang dijamin kepesertaan BPJS oleh pemerintah daerah	persen	100	100	100	100			89,053,884,000	Dinas Kesehatan
Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat	Cakupan pelayanan jaminan kesehatan				100				29,684,628,000	
INDIKATOR SDGs: 3.b.1.(a) Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.										
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	1) Persentase penggunaan obat generik di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP); 2) Persentase ketersediaan perbekalan kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP);	1) persen; 2) persen;	1)96.66 2)0	1)100 2)75	1)100 2)80	1)100 2)85			20,983,205,000	Dinas Kesehatan
Pengadaan Obat	Paket obat yang diadakan	paket			1				4,500,000,000	
Pengadaan Perbekalan Kesehatan	Paket perbekalan Renja SKPD kesehatan yang diadakan	paket			1				1,000,000,000	

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET TAHUNAN					ALOKASI ANGGARAN 5	INSTANSI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023		
Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas										
INDIKATOR SDGs: 4.1.1.(d) Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.										
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	1) Angka Partisipasi Kasar SD/MI; 2) Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs; 3) Angka Partisipasi Murni SD/MI; 4) Angka Partisipasi Murni SMP/MTs; 5) Indeks Mutu Pendidikan SD; 6) Indeks Mutu Pendidikan SMP.	1) persen; 2) persen; 3) persen; 4) persen; 5) skor; 6) skor.	1) 100; 2) 95; 3) 99.96; 4) 93.92; 5) 4.8; 6) 4.6.	1) 100; 2) 95.5; 3) 99.69; 4) 92.25; 5) 5.2; 6) 5.	1) 100; 2) 96.75; 3) 99.7; 4) 92.5; 5) 5.5; 6) 5.4.	1) 100; 2) 96.8; 3) 99.71; 4) 92.75; 5) 5.8; 6) 5.6.			502,947,599,255	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Penyelenggaraan Pembinaan Siswa Jenjang SD	Jumlah siswa SD yang mengikuti lomba, festival dan olimpiade	siswa			2,040				825,000,000	
Penguatan Pendidikan Karakter Peserta Didik Tingkat SD	Jumlah peserta didik yang mengikuti Penguatan Pendidikan Karakter (PPK)	siswa			450				250,000,000	
Monitoring dan Evaluasi Program Indonesia Pintar	Jumlah Siswa yang menerima bantuan Program Indonesia Pintar (Bea Siswa Miskin) Jenjang Sekolah Dasar dengan menyeluruh	siswa			13,000				150,000,000	
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kabupaten SD	Jumlah Penerima Bantuan Bagi Sekolah Penerima Dana BOS Kabupaten	siswa			90,535				37,864,000,000	

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET TAHUNAN					ALOKASI ANGGARAN 5	INSTANSI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023		
INDIKATOR SDGs: 4.1.1.(e) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.										
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	1) Angka Partisipasi Kasar SD/MI; 2) Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs; 3) Angka Partisipasi Murni SD/MI; 4) Angka Partisipasi Murni SMP/MTs; 5) Indeks Mutu Pendidikan SD; 6) Indeks Mutu Pendidikan SMP.	1) persen; 2) persen; 3) persen; 4) persen; 5) skor; 6) skor.	1) 100; 2) 95; 3) 99.96; 4) 93.92; 5) 4.8; 6) 4.6.	1) 100; 2) 95.5; 3) 99.69; 4) 92.25; 5) 5.2; 6) 5.	1) 100; 2) 96.75; 3) 99.7; 4) 92.5; 5) 5.5; 6) 5.4.	1) 100; 2) 96.8; 3) 99.71; 4) 92.75; 5) 5.8; 6) 5.6.			502,947,599,255	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kabupaten SMP	Jumlah Penerima Bantuan Bagi Sekolah Penerima Dana BOS Kabupaten	siswa			30,149				30,837,600,000	
Penguatan Pendidikan Karakter Peserta Didik Tingkat Siswa SMP	Meningkatnya kemampuan siswa dalam mengembangkan dan membangun karakter diri	siswa			340				350,000,000	
INDIKATOR SDGs: 4.2.2.(a) Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).										
Program Pendidikan Anak Usia Dini	1) Angka Partisipasi Kasar PAUD; 2) Persentase sekolah PAUD terakreditasi; 3) Indeks Mutu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);	1) Persen; 2) persen; 3) skors;	1) 77.85; 2) 20; 3) 0;	1) 77.9; 2) 50; 3) 2.5;	1) 78; 2) 67; 3) 3;	1) 78.1; 2) 80; 3) 3.2;			39,877,928,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET TAHUNAN					ALOKASI ANGGARAN 5	INSTANSI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023		
Sosialisasi, Verifikasi dan Evaluasi Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah pendampingan penerima Bantuan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini	satuan PAUD			61				450,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kabupaten PAUD	Jumlah Penerima Bantuan Bagi Sekolah Penerima Dana BOS				24,221				6,055,250,000	
INDIKATOR SDGs: 4.6.1. (a) Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun										
Program Pendidikan Non Formal	1) Angka Melek Huruf; 2) Cakupan Penanganan Putus Sekolah; 3) Cakupan penyelenggara Pendidikan Kecakapan Hidup yang aktif;	1) persen; 2) persen; 3) persen;	1) 99.94; 2) 0; 3) 30.3;	1) 99.47; 2) 0; 3) 30.3;	1) 99.61; 2) 50; 3) 60.61;	1) 99.75; 2) 90; 3) 84.85;			18,388,758,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pemberantasan Buta Aksara	Jumlah penduduk bisa membaca dan menulis	orang			900				750,000,000	
Bimbingan Pendidikan Keaksaraan	Jumlah orang yang dibimbing Tutor	orang			60				250,000,000	
Tujuan 5 Kesenjangan Gender										
INDIKATOR SDGs: 5.2.1* Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan										
Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	1) Cakupan pelayanan terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk TPPO; 2) Persentase kelompok Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) yang aktif.	1) Persen; 2) Persen.	1) 100 2) 6,75	1) 100 2) 15,19	1) 100 2) 23,63	1) 100; 2) 32,07			3,704,714,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET TAHUNAN					ALOKASI ANGGARAN 5	INSTANSI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023		
Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan	Jumlah korban kekerasan yang difasilitasi	Korban Kekerasan			100				100,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Fasilitasi Pendampingan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak	Jumlah Korban Kekerasan Perempuan dan Anak yang dilayani	Korban			110				500,000,000	
INDIKATOR SDGs: 5.2.1. (a) Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.										
Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	1) Cakupan pelayanan terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk TPPO; 2) Persentase kelompok Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) yang aktif.	1) Persen; 2) Persen.	1) 100 2) 6,75	1) 100 2) 15,19	1) 100 2) 23,63	1) 100; 2) 32,07			3,704,714,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Fasilitasi Penanganan masalah kekerasan terhadap anak	Terlaksananya Fasilitasi penanganan masalah kekerasan terhadap anak	Korban Kekerasan			100				100,000,000	
INDIKATOR SDGs: 5.5.1* Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.										
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Persentase perempuan di lembaga legislatif dan Eksekutif	Persen	25.25	25.55	26.24	29.99			500,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Workshop Peningkatan Peran Perempuan dalam Pengambilan Keputusan	Jumlah Peserta	peserta			100				150,000,000	

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET TAHUNAN					ALOKASI ANGGARAN 5	INSTANSI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023		
Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak										
INDIKATOR SDGs: 6.1.1.(a) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.										
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	1) Persentase penduduk berakses air minum; 2) Rumah tangga bersanitasi	1) persen; 2) persen.	1) 84,88; 2) 86,49	1) 87,38; 2) 87,51	1) 89,88; 2) 89,2	1) 92,38; 2) 91,35			114,281,476,840	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Pendampingan DAK Air Minum	Jumlah kegiatan	kegiatan			1				300,000,000	
Pengadaan sarana dan p	Jumlah tandon	unit			700				500,000,000	
Pembangunan / Peningkatan SPAM Perkotaan dan Perdesaan	Jumlah SPAM beserta sarana pendukungnya	paket			14				20,500,000,000	
INDIKATOR SDGs: 6.2.1.(b) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.										
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	1) Persentase penduduk berakses air minum; 2) Rumah tangga bersanitasi	1) persen; 2) persen.	1) 84,88; 2) 86,49	1) 87,38; 2) 87,51	1) 89,88; 2) 89,2	1) 92,38; 2) 91,35			114,281,476,840	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Pendampingan DAK Sanitasi	Jumlah kegiatan	kegiatan			2				350,000,000	
Pembuatan prasarana sanitasi	Jumlah sapras sanitasi	unit			810				9,650,000,000	
INDIKATOR SDGs: 6.2.1.(c) Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).										
Program Pengembangan Lingkungan Sehat	1) Kualitas sanitasi dasar; 2) Jlh desa/kelurahan yang melakukan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	1) persen; 2) persen;	1) 58; 2) 26;	1) 75; 2) 28;	1) 100; 2) 79;	1) 100; 2) 79;			9,115,500,000	Dinas Kesehatan
Pendampingan Pasca Pemicuan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Jumlah Desa/ Kelurahan Yang Bebas Buang Air Besar Sembarangan	desa/ kelurahan			79				300,000,000	

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET TAHUNAN					ALOKASI ANGGARAN 5	INSTANSI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023		
Operasional Fasilitas Pencapaian Kabupaten Sehat	Jumlah Kecamatan Yang Menyelenggarakan Tatanan Kawasan Sehat	kec/bulan			18				250,000,000	Dinas Kesehatan
INDIKATOR SDGs: 6.6.1.(d) Luas lahan kritis dalam KPH yang direhabilitasi.										
Program Rehabilitasi Lahan Kritis	Jumlah luasan lahan kritis yang direhabilitasi	hektar	23	23	23	23			3,587,183,505	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Penanaman Rehab DAS	Jumlah luas lahan kritis yang terehabilitasi							500,000,000		
Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau										
INDIKATOR SDGs: 7.1.1* Rasio elektrifikasi.										
Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	Prosentase Rumah Tangga Berlistrik / Rasio Elektrifikasi	Persen	77	81	86	90			800,000,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Inventarisasi Data Rumah Tangga Berlistrik								100,000,000		
INDIKATOR SDGs: 7.2.1* Bauran energi terbarukan.										
Program Pengembangan Energi Baru Terbarukan	Persentase Rumah Tangga Yang menggunakan EBT	Persen	3.30	6.00	7.00	8.00			2,920,000,000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Penyediaan Data dan Potensi Energi Baru Terbarukan								100,000,000		
Fasilitasi Pemanfaatan Energi								100,000,000		
Penyusunan Dokumen Perencanaan /Kajian Pengembangan Energi baru Terbarukan	Jumlah Dokumen FS	dokumen			1			330,000,000		
Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi										
INDIKATOR SDGs: 8.3.1.(a) Persentase tenaga kerja formal										
Program Pembinaan Pemberdayaan dan Perluasan Kesempatan Kerja	Cakupan pencari kerja yang terdaftar ditempatkan	Persen		25.00	27.00	30.00			3,060,420,600	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET TAHUNAN					ALOKASI ANGGARAN 5	INSTANSI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023		
Pendataan Tenaga Kerja Formal	Jumlah Kecamatan yang terdata penyerapan Tenaga Kerjanya	Kecamatan			18				100,000,000	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
INDIKATOR SDGs: 8.9.1. (b) Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.										
Program pengembangan pemasaran pariwisata	1) Jumlah kunjungan wisatawan 2) Cakupan Layanan Data dan Informasi Pariwisata 3) Jumlah analisis pasar pariwisata	1) orang 2) data dan informasi 3) dokumen	1) 1961150 2) 5 3) 1	1) 201998 2) 4 3) 1	1) 2201783 2) 5 3) 1	1) 2511003 2) 3 3) 1			5,845,041,000	Dinas Pariwisata
Pelaksanaan Promosi Pariwisata	Jumlah media informasi	jenis			3				375,000,000	
Fasilitasi wisata mice	Jumlah peserta mice	orang/hari			150				500,000,000	
Penyusunan Branding Daerah Kutai Kartanegara	Jumlah dokumen	dokumen			1				700,000,000	
Tujuan 9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur										
INDIKATOR SDGs: 9.3.1* Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.										
Program pengembangan industri kecil dan menengah	1) Pertumbuhan IKM 2) Jumlah Sentra 3) Cakupan Sertifikasi Produk IKM 4) Pertumbuhan Omzet IKM	1) Persen; 2) Kawasan IKM; 3) Persen; 4) Persen.	1) 1,86 2) 0 3) 13 4) 1,21	1) 2,05 2) 0 3) 13 4) 3,22	1) 2,40 2) 1 3) 27 4) 4,89	1) 2,92 2) 1 3) 27 4) 5,36			12,795,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Pembangunan Sentra IKM	1) Jumlah kawasan 2) Pematangan lahan kawasan	1) Kawasan; 2) Meter			1) 1 2) 7000				3,900,000,000	
Pembinaan dan Pengembangan Produk IKM	IKM/KUB yang dapat sertifikat	IKM/KUB			20				150,000,000	

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET TAHUNAN					ALOKASI ANGGARAN 5	INSTANSI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023		
INDIKATOR SDGs: 9.4.1.(a) Persentase Perubahan Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca.										
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	1) Persentase pelaku usaha/kegiatan yang mempunyai dokumen lingkungan; 2) Indeks emisi GRK; 3) Jumlah rekomendasi izin; 4) Persentase kualitas air dan udara sesuai baku mutu; 5) Jumlah kerusakan tanah untuk produksi biomassa; 6) Persentase ketaatan pelaku usaha/kegiatan terhadap peraturan perundangan-undangan lingkungan hidup; 7) Jumlah masyarakat yang melaksanakan pelestarian lingkungan hidup. 8) Persentase Ruang Terbuka Hijau	1) Persen; 2) Persen; 3) Rekomendasi ; 4) Persen; 5) Ha; 6) Persen; 7) Orang; 8) Persen	1) 100; 2) 2; 3) 60; 4) 50; 5) 0; 6) 96; 7) 110; 8) n.a	1) 100; 2) 2; 3) 75; 4) 51; 5) 750; 6) 100; 7) 120; 8) n.a	1) 100; 2) 2; 3) 85; 4) 52; 5) 1500; 6) 100; 7) 125; 8) 20	1) 100; 2) 2; 3) 95; 4) 53; 5) 2250; 6) 100; 7) 130; 8) 20			11,620,000,680	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Penyusunan Dokumen Emisi Gas Rumah Kaca	Jumlah dokumen	dokumen			1				100,000,000	

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET TAHUNAN					ALOKASI ANGGARAN 5	INSTANSI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023		
Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan										
INDIKATOR SDGs: 10.1.1.(c) Jumlah desa tertinggal										
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	1) Persentase Perkembangan BUMDes aktif; 2) Jumlah Kelompok Usaha Ekonomi Masyarakat; 3) Jumlah Pengurus Pengelola Pasar Desa yang aktif;	1) Persen; 2) Kelompok; 3) Kelompok;	1) 36; 2) 57; 3) 40;	1) 52; 2) 120; 3) 60;	1) 75; 2) 160; 3) 65;	1) 85; 2) 200; 3) 155;			3,065,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Pelatihan Pengembangan Kewirausahaan bagi Kelompok Usaha Masyarakat di Pedesaan	Jumlah Peserta yang terlatih	orang			40				160,000,000	
Pelatihan kelompok kewirausahaan dan keterampilan kerja bagi rumah tangga miskin	Jumlah Kelompok yang mengikuti pelatihan	orang			50				175,000,000	
Pelatihan Manajemen BUM Desa	Jumlah Peserta Pelatihan	orang			120				350,000,000	
Fasilitasi Pembinaan Pembentukan BUM Desa	Jumlah Desa yang terfasilitasi	desa			22				165,000,000	
Fasilitasi pembentukan pengelola Pasar Desa	Jumlah desa yang difasilitasi	desa			45				157,500,000	

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET TAHUNAN					ALOKASI ANGGARAN 5	INSTANSI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023		
INDIKATOR SDGs: 10.3.1.(a) Aspek Kebebasan Sipil dalam Indeks Demokrasi Indonesia										
Program pendidikan politik masyarakat	1) Persentase Pemahaman Aparatur dan Masyarakat Terhadap Politik; 2) Persentase parpol yang tertib administrasi; 3) Persentase ormas yang tertib administrasi.	1) Persen; 2) Persen; 3) Persen.	1) 40 2) 100 3) 75	1) 60 2) 100 3) 80	1) 80 2) 100 3) 90	1) 100 2) 100 3) 100			5,000,337,800	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Masyarakat
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Umum	Jumlah peserta dan laporan	orang			1,800				1,780,000,000	
Fasilitasi Partai Politik	Jumlah parpol yang difasilitasi	parpol			16				50,000,000	
Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah ormas yang difasilitasi	ormas			20				30,000,000	
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Ormas dan Hibah	Jumlah peserta	orang			50				50,000,000	
Tujuan 11 Kota dan Permukiman Yang Berkelanjutan										
INDIKATOR SDGs: 11.1.1.(a). Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.										
Program Pengembangan Perumahan	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	persen	90.36	90.74	91.12	91.49			51,585,055,530	
Fasilitasi Pengelolaan Ru	Jumlah kegiatan	kegiatan			1				445,368,000	
Penyusunan Rencana Pembangunan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)	Jumlah dokumen	dokumen			2				500,000,000	
Fasilitasi pembinaan dan pengembangan kawasan permukiman	Jumlah kegiatan	kegiatan			1				200,000,000	
Penanganan Kumuh	Luasan kumuh yang tertangani	hektar			10				500,000,000	

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET TAHUNAN					ALOKASI ANGGARAN 5	INSTANSI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023		
INDIKATOR SDGs: 11.5.1.(c). Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.										
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	1) Jumlah Desa/Kelurahan Tangguh Bencana; 2) Cakupan Layanan Informasi Rawan Bencana	1) desa/kel; 2) persen	1) 2; 2) 100	1) 4; 2) 100	1) 6; 2) 100	1) 8; 2) 100			3,309,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Fasilitasi persiapan Desa Tangguh Bencana	Persentase Desa Tangguh Bencana	Desa/ Kelurahan			6				450,000,000	
INDIKATOR SDGs: 11.6.1.(a). Persentase sampah perkotaan yang tertangani.										
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	1) Persentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; 2) Persentase pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. 3) Persentase pelaku usaha yang memiliki izin pengelolaan limbah B3	1) Persen; 2) Persen; 3) Persen	1) 73; 2) 18; 3) 100	1) 80; 2) 20; 3) 100	1) 75; 2) 22; 3) 100	1) 74; 2) 24; 3) 100			26,453,768,050	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Pengadaan Alat Angkut Sampah Dump Truck									2,440,000,000	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengurangan dan Pengendalian Beban Pencemaran dari Limbah Cair dan Sampah									700,000,000	

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET TAHUNAN					ALOKASI ANGGARAN 5	INSTANSI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023		
INDIKATOR SDGs: 11.b.1*. Proporsi pemerintah kota yang memiliki dokumen strategi pengurangan risiko bencana.										
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	1) Jumlah Desa/Kelurahan Tangguh Bencana; 2) Cakupan Layanan Informasi Rawan Bencana	1) desa/kel; 2) persen	1) 2; 2) 100	1) 4; 2) 100	1) 6; 2) 100	1) 8; 2) 100			3,309,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Penyusunan Kajian Risiko Bencana (KRB)	Jumlah Dokumen KRB	dokumen			1				800,000,000	
Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi Yang Bertanggungjawab										
INDIKATOR SDGs: 12.4.2.(a) Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).										
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	1) Persentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; 2) Persentase pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. 3) Persentase pelaku usaha yang memiliki izin pengelolaan limbah B3	1) Persen; 2) Persen; 3) Persen	1) 73; 2) 18; 3) 100	1) 80; 2) 20; 3) 100	1) 75; 2) 22; 3) 100	1) 74; 2) 24; 3) 100			26,453,768,050	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim										
INDIKATOR SDGs: 13.1.2* Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.										
Program Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana	Cakupan layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100	100	100	100			5,113,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah peralatan perlindungan kesiapsiagaan				100				200,000,000	

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET TAHUNAN					ALOKASI ANGGARAN 5	INSTANSI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023		
Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana									600,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
INDIKATOR SDGs: 13.2.1.(a) Dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK).										
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	1) Persentase pelaku usaha/kegiatan yang mempunyai dokumen lingkungan; 2) Indeks emisi GRK; 3) Jumlah rekomendasi izin; 4) Persentase kualitas air dan udara sesuai baku mutu; 5) Jumlah kerusakan tanah untuk produksi biomassa; 6) Persentase ketaatan pelaku usaha/kegiatan terhadap peraturan perundangan-undangan lingkungan hidup; 7) Jumlah masyarakat yang melaksanakan pelestarian lingkungan hidup. 8) Persentase Ruang Terbuka Hijau	1) Persen; 2) Persen; 3) Rekomendasi; 4) Persen; 5) Ha; 6) Persen; 7) Orang; 8) Persen	1) 100; 2) 2; 3) 60; 4) 50; 5) 0; 6) 96; 7) 110; 8) n.a	1) 100; 2) 2; 3) 75; 4) 51; 5) 750; 6) 100; 7) 120; 8) n.a	1) 100; 2) 2; 3) 85; 4) 52; 5) 1500; 6) 100; 7) 125; 8) 20	1) 100; 2) 2; 3) 95; 4) 53; 5) 2250; 6) 100; 7) 130; 8) 20			11,620,000,680	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Penyusunan Dokumen Emisi Gas Rumah Kaca	Jumlah dokumen	dokumen			1				100,000,000	

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET TAHUNAN					ALOKASI ANGGARAN 5	INSTANSI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023		
Tujuan 14 Ekosistem Lautan										
INDIKATOR SDGs: 14.b.1.(b) Jumlah nelayan yang terlindungi.										
Program penanggulangan Kemiskinan Masyarakat Kelautan dan Perikanan	Jumlah Nelayan dan Pembudidaya Ikan Miskin Yang Mendapatkan Bantuan	orang	100	-	200	200			8,000,000,000	Dinas Kelautan dan Perikanan
Fasilitasi Sarana Prasarana Nelayan dan Pembudidaya Ikan Kategori Miskin dan Rentan Miskin	Jumlah Nelayan dan Pembudidaya Ikan Kategori Miskin dan Rentan Miskin Terfasilitasi	orang			200				4,000,000,000	
Program Pemberdayaan dan Pengembangan Sumberdaya Masyarakat Kelautan Perikanan (KP)	Peningkatan Kelas Kelompok Masyarakat Kelautan dan Perikanan	Kelompok			40	40			3,700,000,000	
Pelatihan Nelayan Kecil	Jumlah Peserta Pelatihan	orang			300				500,000,000	
Temu Kemitraan Nelayan	Jumlah Peserta Temu Kemitraan	orang			250				100,000,000	
Pembinaan KUB	Jumlah KUB Terbina	KUB			25				100,000,000	
Tujuan 15 Ekosistem Daratan										
INDIKATOR SDGs: 15.3.1.(a). Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.										
Program Rehabilitasi Lahan Kritis	Jumlah luasan lahan kritis yang direhabilitasi	hektar	23	23	23	23			3,587,183,505	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Penanaman Rehab DAS	Jumlah luas lahan kritis yang terehabilitasi								500,000,000	

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET TAHUNAN					ALOKASI ANGGARAN 5	INSTANSI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023		
Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan Yang Tangguh										
INDIKATOR SDGs: 16.2.1.(b) Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.										
Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	1) Cakupan pelayanan terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk TPPO; 2) Persentase kelompok Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) yang aktif.	1) Persen; 2) Persen.	1) 100 2) 6,75	1) 100 2) 15,19	1) 100 2) 23,63	1) 100; 2) 32,07			3,704,714,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Fasilitasi Penanganan masalah kekerasan terhadap anak	Terlaksananya Fasilitasi penanganan masalah kekerasan terhadap anak				100					
Fasilitasi Pendampingan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak	Jumlah Korban Kekerasan Perempuan dan Anak yang dilayani	Korban			110				500,000,000	
INDIKATOR SDGs: 16.7.1.(a) Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).										
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Persentase perempuan di lembaga legislatif dan Eksekutif	Persen	25.25	25.55	26.24	29.99			500,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Workshop Peningkatan Peran Perempuan dalam Pengambilan Keputusan	Jumlah Peserta	peserta			100				150,000,000	

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET TAHUNAN					ALOKASI ANGGARAN 5	INSTANSI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023		
INDIKATOR SDGs: 16.9.1.(a) Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.										
Program Penataan Administrasi Kependudukan	1) Cakupan KTP Elektronik; 2) Rasio Pasangan Non Muslim berAkta Nikah; 3) Persentase Pelayanan Akta Kematian; 4) Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran;	1) Persen; 2) Persen; 3) Persen; 4) Persen;	1) 94; 2) 78; 3) 100; 4) 95;	1) 96; 2) 83; 3) 100; 4) 97;	1) 98; 2) 86; 3) 100; 4) 98;	1) 99; 2) 88; 3) 100; 4) 99;			7,210,660,202	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Pelayanan Langsung Administrasi Pencatatan Akta Kelahiran	Jumlah akta	kutipan akta kelahiran							194,063,100	
INDIKATOR SDGs: 16.10.2.(c) Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.										
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	1) Cakupan Layanan Sistem Informasi yang terintegrasi; 2) Cakupan Layanan Internet di Kecamatan, Desa dan Kelurahan; 3) Cakupan Sistem Informasi E-Government yang aktif; 4) Penerapan e-Procurement dalam Pengadaan Barang dan Jasa; 5) Cakupan Pengelolaan	1) Persen; 2) Persen; 3) Persen; 4) Persen; 5) Persen;	1) 10.67; 2) 72.55; 3) 94.67; 4) 56.9; 5) 0;	1) 23.68; 2) 74.51; 3) 97.37; 4) 100; 5) 37.93;	1) 46.05; 2) 90.2; 3) 100; 4) 100; 5) 62;	1) 64.1; 2) 100; 3) 100; 4) 100; 5) 100;			20,700,494,053	Dinas Komunikasi dan Informatika
Pengelolaan Kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	Jumlah PPID / PPID Pembantu	unit			58				200,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
Tujuan 17 Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan										

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET TAHUNAN					ALOKASI ANGGARAN 5	INSTANSI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023		
INDIKATOR SDGs: 17.1.1.(a) Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.										
Program Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	1) Pertumbuhan pajak	1) Persen	1) 50	1) 50	1) 50	1) 50			18,921,307,300	Badan Pendapatan Daerah
	2) Pertumbuhan retribusi	2) Persen	2) 8	2) 8	2) 8	2) 8				
	3) Pertumbuhan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	3) Persen	3) 32	3) 32	3) 32	3) 32				
Optimalisasi pendaftaran dan pendataan pajak daerah	Jumlah Objek Pajak	WP			1,000				800,000,000	

MATRIK 3 . PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT (SESUAI RPJMD)

PROGRAM KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	BASELINE 2018	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	SKPD Penanggung Jawab							
				2019	2020	2021	2022	2023									
Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan																	
INDIKATOR SDGs: 1.2.1* Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.																	
Program Pemberdayaan Fakir Miskin	Persentase penduduk di atas garis kemiskinan			92.60%	92.80%	93.20%			4,207,609,719.52	Dinas Sosial							
Prog Komunitas Adat Terpencil									693,075,672.05	Dinas Sosial							
Program Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya									488,081,459.19	Dinas Sosial							
Program Pembinaan dan Pengembangan TKSK dan TKSM									2,904,662,732.95	Dinas Sosial							
Program Penyuluhan Sosial dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Sosial									4,140,012,956.53	Dinas Sosial							
Program Pelayanan Pemberdayaan Kelembagaan Sosial									5,482,870,194.15	Dinas Sosial							
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial									9,291,527,846.52	Dinas Sosial							
Prog Pembinaan Balita Terlantar									7,420,369,476.71	Dinas Sosial							
Program Pembinaan Anak penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Korban Tindak Kekeras-an, Bermasalah dengan Hukum, Terlantar dan Anak Yang memerlukan Perlindungan Khusus)									6,310,237,611.10	Dinas Sosial							
Program Pembinaan Panti Asuhan									3,590,633,482.38	Dinas Sosial							
Program Pembinaan Lanjut Usia Terlantar									1,423,351,890.22	Dinas Sosial							
Program Bantuan Dan Jaminan Sosial																6,207,836,992.94	Dinas Sosial

PROGRAM KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	BASELINE 2018	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	SKPD Penanggung Jawab
				2019	2020	2021	2022	2023		
Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Pemberdayaan Perempuan										Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
INDIKATOR SDGs: 1.3.1.(c) Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.										
Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma										
Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	Persentase penduduk di atas garis kemiskinan			92.60%	92.80%	93.20%			3,556,883,440.16	
INDIKATOR SDGs: 1.5.1.(a) Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.										
Program Pencegahan dini dan Program Perencana Pembangunan Daerah rawan Bencana	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan			± 35 Menit	± 30 Menit	± 25 Menit			2,070,000,000.00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK).									3,000,000,000.00
INDIKATOR SDGs: 1.5.1.(b) Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.										
Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana									7,950,000,000.00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

PROGRAM KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	BASELINE 2018	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	SKPD Penanggung Jawab		
				2019	2020	2021	2022	2023				
Tujuan 2 Tanpa Kelaparan												
INDIKATOR SDGs: 2.1.1* Prevalensi ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)												
Program Peningkatan Ketersediaan dan Cadangan Pangan	Jumlah Ketersediaan dan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten(ton beras) tercapai 100 Ton/Tahun			100	100	100			5,223,166,436.76	Dinas Ketahanan Pangan		
INDIKATOR SDGs: 2.1.1.(a) Prevalensi Kekurangan Gizi (underweight) pada anak balita.												
Program Pelayanan Penduduk Miskin	a) Angka Kelangsungan Hidup Bayi			3,80 per 1000 kel hidup 73,6 Tahun 4,10%	3,50per 1000 kel hidup 73,8 Tahun 3,90%	3,10 per 1000 kel hidup 74 Tahun 3,70%			27,994,734,836.02	Dinas Kesehatan		
Program Upaya Kesehatan Masyarakat	b) Angka usia harapan hidup										3,951,363,872.56	Dinas Kesehatan
Program Perbaikan Gizi Masyarakat	c) Persentase Balita Gizi Buruk										2,702,626,737.29	Dinas Kesehatan
INDIKATOR SDGs: 2.2.1* Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak balita.												
Program Upaya Kesehatan Masyarakat	a) Angka Kelangsungan Hidup Bayi b) Angka usia harapan hidup c) Persentase Balita Gizi Buruk			3,80 per 1000 kel hidup 73,6 Tahun 4,10%	3,50per 1000 kel hidup 73,8 Tahun 3,90%	3,10 per 1000 kel hidup 74 Tahun 3,70%				Dinas Kesehatan		
INDIKATOR SDGs: 2.3.1* Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja)												

PROGRAM KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	BASELINE 2018	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	SKPD Penanggung Jawab
				2019	2020	2021	2022	2023		
Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	meningkatnya jumlah produksi tanaman perkebunan (Karet meningkat 5% pertahun; produksi sawit meningkat 3% pertahun (ton);produksi Kakao meningkat 2% pertahun (ton))			58842,65 29577,24 16,23	61784,79 30464,56 16,56	64874,02 31378,5 16,89			36,599,748,631.53	Dinas Pertanian
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian / Perkebunan	Jumlah produksi padi sawah dan padi ladang meningkat (ton)			4838,5 (padi Sawah) 9209,3 (padi ladang)	4935,2 (padi Sawah) 9393,5 (padi ladang)	5033,9 (padi Sawah) 9581,4 (padi ladang)			3,384,864,592.05	Dinas Pertanian
Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak										

PROGRAM KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	BASELINE 2018	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	SKPD Penanggung Jawab
				2019	2020	2021	2022	2023		
Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera										
INDIKATOR SDGs: 3.1.1* Angka Kematian Ibu (AKI).										
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak										Dinas Kesehatan
INDIKATOR SDGs: 3.b.1.(a) Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.										
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan										Dinas Kesehatan
Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas										
INDIKATOR SDGs: 4.1.1.(f) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat.										
Program Pendidikan Menengah Atas	88.62%			88.05%	88.27%	88.47%				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
INDIKATOR SDGs: 4.5.1* Rasio APM SD/MI/ sederajat										
INDIKATOR SDGs: 4.5.1* Rasio APM SMP/MTs/ sederajat										
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun	8,7 Tahun			7,2Tahun	7 tahun	7 Tahun				
Program Pendidikan Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	9.87%			10.50%	11.00%	11.00%				
4.2.2.(a) Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).										
Program Pendidikan Anak Usia Dini	97.15%			97.75 %	97.90%	98.20%				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

PROGRAM KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	BASELINE 2018	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	SKPD Penanggung Jawab
				2019	2020	2021	2022	2023		
Tujuan 5 Kesetaraan Gender										
INDIKATOR SDGs: 5.1.1* Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.										
Program Peningkatan Peran serta dan kesetaraan Jender dalam Pembangunan	30% 2% 4% 71,69 % 65%			45% 45% 1% 1% 74,50 % 85%	50% 50% 1% 0,5% 75,70 % 100%	55% 55% 1% 0,1% 76,50 % 100%				Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program Pengutan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak										
Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau										
INDIKATOR SDGs: 7.1.1* Rasio elektrifikasi.										
program pembinaan, pengembangan dan pemanfaatan energi baru terbarukan										
Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi										
INDIKATOR SDGs: 8.3.1.(c) Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan										
Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah										Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM
Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah										Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah										
Program Pengembangan Industri dan Kelembagaan Pariwisata										

PROGRAM KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	BASELINE 2018	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	SKPD Penanggung Jawab
				2019	2020	2021	2022	2023		
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	160 Orang 19.000 Orang			310 orang 23.500 orang	360 orang 25.000 orang	410 orang 26.500 orang		16		Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
INDIKATOR SDGs: 8.9.1.(a) Jumlah wisatawan mancanegara										
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	4 malam			4 malam	4 malam	4 malam		6 Kali 2 Kali		Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
INDIKATOR SDGs: 8.9.1.(b) Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.										
Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata	1			10	14	16		4 malam		Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif	2 Kali 0 Kali			4 Kali 2 Kali	5 Kali 2 Kali	6 Kali 2 Kali				
Tujuan 9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur										
INDIKATOR SDGs: 9.1.1.(a) Kondisi mantap jalan										
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	85%			88%	89%	90%				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
INDIKATOR SDGs: 9.2.1* Proporsi nilai tambah sektor industri pengolahan non migas terhadap PDB dan perkapita.										
Program Penataan Struktur Industri										Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM
INDIKATOR SDGs: 9.4.1.(a) Persentase Perubahan Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca.										

PROGRAM KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	BASELINE 2018	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	SKPD Penanggung Jawab
				2019	2020	2021	2022	2023		
Program peningkatan pengendalian polusi	C0 (kurang dari 15ppm) dan HC(kurang dari 150Mg/m2)			C0 (kurang dari 15ppm) dan HC(kurang dari 150Mg/m2)	C0 (kurang dari 15ppm) dan HC(kurang dari 150Mg/m2)	C0 (kurang dari 15ppm) dan HC(kurang dari 150Mg/m2)		100%		Dinas Lingkungan hidup
Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan										
INDIKATOR SDGs: 10.1.1.(c) Jumlah desa tertinggal										
Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan										Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan dan Program Pemberdayaan Masyarakat										
Program Peningkatan Pendapatan Masyarakat Kampung Melalui Penerapan TTG dan Optimalisasi Pengelolaan SDA										Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
Program Pengembangan Prasarana dan Sarana Perdesaan										Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung

PROGRAM KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	BASELINE 2018	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	SKPD Penanggung Jawab
				2019	2020	2021	2022	2023		
INDIKATOR SDGs: 10.3.1.(a) Aspek Kebebasan Sipil dalam Indeks Demokrasi Indonesia										
Program Pendidikan Politik Masyarakat										Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Tujuan 11 Kota dan Pemukiman Yang Berkelanjutan										
INDIKATOR SDGs: 11.5.1*. Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.										
Program Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana.										Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi Yang Bertanggungjawab										
INDIKATOR SDGs: 12.4.1.(a) Jumlah peserta Proper yang mencapai minimal ranking BIRU.										
Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	92% 150 ppm ug/Nm2			94% 230 ppm ug/Nm2	96% 230 ppm ug/Nm2	98% 230 ppm ug/Nm2		39		Dinas Lingkungan hidup
Tujuan 15 Ekosistem Daratan										
INDIKATOR SDGs: 15.3.1.(a). Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.										
Program penataan kawasan Hutan										Sekretariat Daerah
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)										

MATRIK 3. PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH KABUPATEN BERAU (SESUAI RKPD)

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	BASE LINE	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	INSTANSI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023		
Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan										
INDIKATOR SDGs: 1.2.1* Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.										
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial										
Penanganan Masalah-Masalah Strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan KLB	Jumlah KLB yang ditangani	Kali			22 Kali					Dinas Sosial
Fasilitasi Penyaluran Raskin/Rastra	Jumlah Masyarakat Miskin yang difasilitasi	Jiwa			6.020 Jiwa					Dinas Sosial
Pelayanan dan Perlindungan Sosial bagi Anak Nakal	Jumlah Anak Nakal yang diberikan pelayanan dan diberikan perlindungan sosial	Klien/Orang			7 Klien/Orang					Dinas Sosial
Penanggulangan bencana	Jumlah KSB. Yang dibentuk	KSB			4 KSB					Dinas Sosial
Fasilitasi Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT)	Jumlah Petugas SLRT yang difasilitasi	Puskessos			75 Puskessos					Dinas Sosial
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya										
Pelatihan Keterampilan Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Jumlah PMKS/keluarga miskin yang diberikan pelatihan ketrampilan	orang			15 orang					Dinas Sosial
Pembinaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSM)	Jumlah TKSK dan TKSM yang dilakukan pembinaan	Orang			24 Orang					Dinas Sosial

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	BASE LINE	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	INSTANSI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023		
Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Usaha Ekonomis Produktif bagi Lansia	Jumlah Lansia yang terpenuhi kebutuhan dasar dan Usaha Ekonomis Produktif	Orang			450 Orang					Dinas Sosial
Fasilitasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)	Jumlah Masyarakat miskin (PKH) yang difasilitasi	KPM			4.000 KPM					Dinas Sosial
	HP untuk pendamping PKH melakukan Pemutakhiran data	org / bh x Rp.3.200.000			26 org / bh x Rp.3.200.000					Dinas Sosial
Pendayagunaan Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Jumlah warga KAT yang diberikan pemberdayaan	orang			75 orang					Dinas Sosial
Verifikasi dan validasi data PMKS, Lansia terlantar, Anak terlantar dan Disabilitas terlantar.	Jumlah PMKS, Lansia terlantar, Anak terlantar & Disabilitas terlantar yang terdata	orang			6020 orang					Dinas Sosial
INDIKATOR SDGs: 1.3.1.(c) Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.										
Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma										
Pendidikan dan Pelatihan bagi Penyandang Cacat dan Eks Trauma	Jumlah Paca/eks. Trauma yang diberikan Diklat	orang			8 Orang					Dinas Sosial
Pengiriman orang sakit jiwa ke RSJ dan rehab penyandang cacat	Jumlah ODGJ / penyandang Cacat yang direhabilitasi	orang			7 Orang					Dinas Sosial

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	BASE LINE	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	INSTANSI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023		
INDIKATOR SDGs: 1.5.1* Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.										
PROGRAM PERBAIKAN PERUMAHAN AKIBAT BENCANA ALAM/SOSIAL/KEBAKARAN										
Fasilitasi dan Stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana alam/Sosial/Kebakaran	Jumlah laporan				1					
INDIKATOR SDGs: 1.5.1.(a) Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.										
PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA ALAM										
Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam	Jumlah Kecamatan yang dilakukan Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi				13					Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Tanggap Darurat Operasioanl Penanggulangan Bencana	Persentase Penanganan Kejadian Bencana / Tanggap Darurat				100					Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Pelatihan Penanggulangan Bencana	Jumlah orang yang mengikuti pelatihan				10					Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bencana	Jumlah orang yang mengikuti pelatihan				10					Badan Penanggulangan Bencana Daerah
INDIKATOR SDGs: 1.5.1.(b) Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.										
PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA ALAM										
Pelatihan Penanggulangan Bencana	Jumlah orang yang mengikuti pelatihan				10					Badan Penanggulangan Bencana Daerah

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	BASE LINE	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	INSTANSI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023		
Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bencana	Jumlah orang yang mengikutiti pelatihan				10					Badan Penanggulangan Bencana Daerah
INDIKATOR SDGs: 1.5.3* Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.										
PROGRAM PENINGKATAN KESIAPSIAGAAN DAN PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN										
Sosialisasi Norma Standar, Prosedur dan Manual Pencegahan Bahaya Kebakaran	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi	Kali	-		30	-	-	-		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Pendidikan dan Pelatihan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Jumlah orang yang mengikutiti pelatihan	Orang	-		0	-	-	-		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	Persentase pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran	Orang	-		100	-	-	-		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
PROGRAM PENYUSUNAN STANDAR TEKNIS PENANGGULANGAN BENCANA										
Penyusunan Pemetaan Daerah Rawan Bencana	Jumlah Dokumen				1					Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Penyusunan Peraturan Daerah Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen				1					Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Penyusunan dan Pembuatan Standar Teknis Pasca Bencana	Jumlah Dokumen				1					Badan Penanggulangan Bencana Daerah

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	BASE LINE	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	INSTANSI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023		
Tujuan 2 Tanpa Kelaparan										
INDIKATOR SDGs: 2.1.1* Prevalensi ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernutrition)										
Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/ Perkebunan)										
Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan	Jumlah Analisis pola konsumsi pangan dan Suplai pangan	Analisis			1					DINAS PANGAN
Analisis Rasio Jumlah Penduduk Terhadap Jumlah Kebutuhan Pangan	Jumlah analisis rasio kebutuhan pangan	Analisis			1					DINAS PANGAN
Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan	Jumlah Kelompok Rumah Pangan Lestari	KRPL.			8					DINAS PANGAN
Pemantauan dan Analisis Akses Pangan Masyarakat	Jumlah analisis akses pangan daerah	Analisis			1					DINAS PANGAN
Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok	Jumlah analisis harga pangan pokok daerah	Analisis			1					DINAS PANGAN
Pengembangan cadangan pangan daerah	Jumlah Cadangan Pangan Daerah	Ton			20					DINAS PANGAN
Pengembangan Desa Mandiri Pangan	Jumlah pendampingan Desa Mandiri Pangan	Desa			2					DINAS PANGAN
Pengembangan Lumbung Pangan Desa	Jumlah Lumbung Pangan Masyarakat yang dibangun dan dikembangkan	Kampung			2					DINAS PANGAN
Koordinasi Kebijakan Perberasan	Jumlah koordinasi kebijakan pengamanan stok pangan	Lokasi			3					DINAS PANGAN

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	BASE LINE	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	INSTANSI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023		
Diversifikasi Pangan Lokal	Jumlah diversifikasi pangan yang dikembangkan	Jenis			3					DINAS PANGAN
Penanganan Daerah Rawan Pangan	Jumlah daerah rawan pangan yang teridentifikasi	Kec			12					DINAS PANGAN
Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	Jumlah pengujian sampel pangan segar	Sampel			52					DINAS PANGAN
Pengadaan bangunan Laboratorium Sampel Pangan Segar	Jumlah bangunan yang dibangun	unit			1					DINAS PANGAN
Peningkatan peran dewan ketahanan pangan	Jumlah pertemuan dewan ketahanan pangan	Kali			4					DINAS PANGAN
Pengembangan Sumberdaya Pangan Lokal	Jumlah Kelompok yang didampingi	kali			5					DINAS PANGAN
Pembinaan dan Pengawasan Produksi Pangan, Penggunaan Pupuk dan Pestisida	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan	kali			14					DINAS PANGAN
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan										
Promosi hasil olahan pangan dan produksi unggulan daerah	Jumlah pelaksanaan Promosi produk unggulan daerah	kali			5					DINAS PANGAN
Fasilitasi Pengembangan Produk Olahan Pangan dan Sertifikasi	Jumlah fasilitasi produk olahan yang bersertifikasi	Kel			10					DINAS PANGAN
Program peningkatan produksi pertanian										
Pengembangan intensifikasi dan ekstensifikasi tanaman pangan dan hortikultura	Bantuan Bibit Padi, Jagung, Kedelai, Bawang Merah dan Cabe	Kecamatan			se Kabupaten Berau					DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	BASE LINE	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	INSTANSI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023		
Pengendalian organisme pengganggu tanaman dan fasilitasi sarana produksi pertanian	Terlaksananya Pelayanan Aktif Pengamatan/Pengendalian OPT, Terdistribusinya pupuk bersubsidi dan Pengadaan Pestisida	kali/ton/liter			12 kali/2.500 ton/3.00 liter					DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
Pembinaan usaha pertanian	Terbentuknya lembaga ekonomi petani	lembaga			3 lembaga					DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
Pengembangan penangkar dan benih hortikultura	Tersedianya bibit unggul hortikultura dan terbinanya penangkar benih, Fasilitasi Siswa Prakerin	Benih			Bibit Unggul Buah Buahhan 4.000, Penangkar 10 Org Penangkar Benih, 50 org Siswa/Mahasiswa					DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
Pengembangan penangkar dan benih padi	Tersedianya benih unggul padi dan terbinanya penangkar benih, Fasilitasi Siswa Prakerin	Ton			15 Ton Benih Padi Unggul dan 15 Org Penangkar benih, 30 org siswa					DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
Program peningkatan produksi peternakan										
Peningkatan Mutu Genetika Bibit	Terlaksananya Inseminasi Buatan (IB) pada ternak sapi dan Terlaksananya Bimtek	ekor/org			700 ekor/6 org					DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	BASE LINE	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	INSTANSI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023		
Pengadaan Mobil Operasional Khusus (SIWAB)	Pengadaan Mobil Operasional Khusus (SIWAB)	Unit			1 Unit					DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
Pembinaan agribisnis peternakan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Produksi dan Managemen usaha peternakan	klpk			15 klpk					DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
Pengembangan teknologi peternakan tepat guna	Terlaksananya penerapan teknologi HPT dan pengolahan pupuk organik	kelompok			15 kelompok					DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
Pengembangan bibit ternak dan hijauan pakan ternak	Tersedianya HPT di lokasi UPTD Pembibitan Ternak Labanan, Gudang Alsin									DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
Program Pengembangan Budidaya Perikanan										
Pengembangan Budidaya Perikanan Air Tawar	Jumlah pokdakan yang menerima bantuan	pokdakan			4 pokdakan					DINAS PERIKANAN
Paket Bantuan Saprasi Budidaya Kolam	Jumlah pokdakan yang menerima bantuan	pokdakan			5 pokdakan					DINAS PERIKANAN
Pengembangan Balai Benih Ikan Air Tawar	Jumlah sapsras operasional BBI	jenis			5 jenis					DINAS PERIKANAN
Pengembangan Pembenuhan Rakyat	Jumlah UPR yang mendapat bantuan/pembinaan	unit			1 unit					DINAS PERIKANAN

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	BASE LINE	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	INSTANSI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023		
INDIKATOR SDGs: 2.1.1.(a) Prevalensi Kekurangan Gizi (underweight) pada anak balita.										
Program Perbaikan Gizi Masyarakat										
Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya (Pemberian Tambahan Makanan dan Vit) /Pemberian Makanan Tambahan	Jumlah PMT Bumil KEK				300					DINAS KESEHATAN
	Jumlah PMT Balita Gizi Buruk				25					
Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi	Jumlah Kelompok Pemberdayaan Masyarakat Sadar Gizi (Pos Gizi, KP-Asi, LBSI)				1					DINAS KESEHATAN
Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah Pelaporan Pelaksanaan kegiatan program gizi di puskesmas dan jaringannya				21					DINAS KESEHATAN
Peningkatan SDM petugas gizi	Jumlah Petugas Gizi yang dilatih				21					DINAS KESEHATAN
Program pelayanan kesehatan penduduk miskin										
Jaminan Kesehatan Penduduk Miskin/ Tidak Mampu Kab. Berau	Jumlah Penduduk Miskin/tidak mampu yang memiliki Jaminan Kesehatan oleh Daerah				5712					DINAS KESEHATAN

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	BASE LINE	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	INSTANSI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023		
INDIKATOR SDGs: 2.1.2* Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan pangan.										
Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/ Perkebunan)										
Penanganan Daerah Rawan Pangan	Jumlah daerah rawan pangan yang teridentifikasi	Kecamatan			12					DINAS PANGAN
INDIKATOR SDGs: 2.2.1* Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak balita.										
Program Perbaikan Gizi Masyarakat										
Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya (Pemberian Tambahan Makanan dan Vit)/Pemberian Makanan Tambahan	Jumlah PMT Bumil KEK				300					DINAS KESEHATAN
	Jumlah PMT Balita Gizi Buruk				25					
Pengadaan Obat Gizi (DAK)	Jumlah PMT Balita (Kurus, Stunting)				600					DINAS KESEHATAN
Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi	Jumlah Kelompok Pemberdayaan Masyarakat Sadar Gizi (Pos Gizi, KP-Asi, LBSI)				1					DINAS KESEHATAN
Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah Pelaporan Pelaksanaan kegiatan program gizi di puskesmas dan jaringannya				21					DINAS KESEHATAN
Peningkatan SDM petugas gizi	Jumlah Petugas Gizi yang dilatih				21					DINAS KESEHATAN

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	BASE LINE	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	INSTANSI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023		
INDIKATOR SDGs: 2.2.2.(c) (i)Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH); dan (ii) tingkat konsumsi ikan perkapita										
Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/ Perkebunan)										
Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan	Jumlah Analisis pola konsumsi pangan dan Suplai pangan	Analisis			1					Dinas Pangan
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan										
Promosi hasil olahan pangan dan produksi unggulan daerah	Jumlah pelaksanaan Promosi produk unggulan daerah	Kali			5					Dinas Pangan
INDIKATOR SDGs: 2.3.1* Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja)										
Program peningkatan produksi pertanian										
Pembinaan usaha pertanian	Terbentuknya lembaga ekonomi petani	lembaga			3					DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
Program peningkatan produksi peternakan										
Pembinaan agribisnis peternakan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Produksi dan Managemen usaha peternakan	Kelompok			15					DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan										
Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi pertanian/perkebunan masyarakat	Periodesasi informasi pasar komoditi perkebunan	bulan			12					DINAS PERKEBUNAN

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	BASE LINE	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	INSTANSI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023		
Pendampingan pekebun dan pelaku agribisnis (Pekan nasional kontak tani pekebun andalan)	Jumlah petani/pekebun dan pelaku agribisnis yang bertambah wawasannya	petani mengikuti			30					DINAS PERKEBUNAN
Pelatihan penerapan teknologi perkebunan modern bercocok tanam	Jumlah petani yang menerapkan teknologi perkebunan modern bercocok tanam	petani/pekebun			30					DINAS PERKEBUNAN
Program Peningkatan Mutu Hasil Perkebunan										
Pembinaan Pasca Panen	Jumlah produk turunan komoditas perkebunan	Produk			2					DINAS PERKEBUNAN
Pembinaan dan pengendalian pengembangan perkebunan rakyat	Jumlah pekebun rakyat yang memiliki STD-B	STDB			200					DINAS PERKEBUNAN
Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi perkebunan tepat guna	Jumlah sarana prasarana teknologi perkebunan tepat guna terpelihara	unit			5					DINAS PERKEBUNAN
Pelatihan dan bimbingan pengoperasian alat dan mesin teknologi perkebunan	Jumlah petugas/petani/operator yang dilatih	orang			9					DINAS PERKEBUNAN
Penilaian Usaha Perkebunan	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Usaha Perkebunan	dokumen			10					DINAS PERKEBUNAN
Program Pemberdayaan Masyarakat Perikanan										
Pengembangan SDM Perikanan	Jumlah peserta penyuluhan dan pelatihan/bimtek	orang			102					DINAS PERKEBUNAN

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	BASE LINE	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	INSTANSI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023		
Pengembangan Masyarakat Perikanan	Usaha perikanan yang mendapatkan bimbingan manajemen usaha	orang			25					DINAS PERKEBUNAN
Pembinaan Masyarakat Perikanan	Kelompok Nelayan/Pembudidaya Yang Dibina	Kelompok			50					DINAS PERKEBUNAN
INDIKATOR SDGs: 2.5.1* Jumlah varietas unggul tanaman dan hewan untuk pangan yang dilepas.										
Program peningkatan produksi pertanian										
Pengembangan penangkar dan benih hortikultura	Tersedianya bibit unggul hortikultura dan terbinanya penangkar benih, Fasilitasi Siswa Prakerin	Bibit Unggul			Bibit Unggul Buah Buahan 4.000, Penangkar 10 Org Penangkar Benih, 50 org Siswa/ Mahasiswa					DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
Pengembangan penangkar dan benih padi	Tersedianya benih unggul padi dan terbinanya penangkar benih, Fasilitasi Siswa Prakerin	Ton			15 Ton Benih Padi Unggul dan 15 Org Penangkar benih, 30 org siswa					DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
Program peningkatan produksi peternakan										

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	BASE LINE	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	INSTANSI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023		
Peningkatan Mutu Genetika Bibit Ternak	Terlaksananya Inseminasi Buatan (IB) pada ternak sapi dan Terlaksananya Bimtek Teknis Reproduksi	ekor / orang			700 ekor/6 org					DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
Pengembangan bibit ternak dan hijauan pakan ternak	Tersedianya HPT di lokasi UPTD Pembibitan Ternak Labanan, Gudang Alsin				15 kelompok					DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
INDIKATOR SDGs: 2.5.2* Proporsi hewan ternak dan sejenisnya, diklasifikasikan menurut tingkat risiko kepunahan: berisiko, tidak berisiko, dan risiko yang tidak diketahui.										
Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak										
Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak	Terlaksananya Vaksinasi dan Survelence	ekor ternak, HPR			2000 ekor ternak, 750 HPR					DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
Pelayanan Kesehatan Hewan	Pemberdayaan Unit - Unit pelayanan Keswan dan Petugas Medic/Paramedic Veteriner	Puskesmas ; orang Petugas Medic/Paramedic Veteriner			5 Unit Puskesmas dan 13 orang Petugas Medic/Paramedic Veteriner					DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
Pelayanan kesehatan masyarakat veteriner	Termonitornya pemotongan hewan kurban, pengujian sampel produk asal ternak	ekor sampel			1.000 ekor / 120 sampel					DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	BASE LINE	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	INSTANSI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023		
Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera										
INDIKATOR SDGs: 3.1.1* Angka Kematian Ibu (AKI).										
Program Peningkatan Keselamatan ibu melahirkan dan anak										
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Kegiatan Pembelajaran AMP, Rapat Tim Pengkaji AMP				2					Dinas Kesehatan
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Sarana Pelayanan Kesehatan yang dimonev pelayanan Ibu dan Anak				18					Dinas Kesehatan
INDIKATOR SDGs: 3.2.2.(b) Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.										
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular										
Peningkatan Imunisasi	Terlaksananya Imunisasi pada puskesmas dan jaringannya				21					Dinas Kesehatan
INDIKATOR SDGs: 3.3.2.(a) Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.										
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular										
Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Terlaksananya Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular, pertemuan Peningkatan kapasitas petugas puskesmas program kusta, HIV, Hepatitis dan TB				21					Dinas Kesehatan

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	BASE LINE	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	INSTANSI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023		
INDIKATOR SDGs: 3.5.1.(c) Jumlah korban penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti sesuai standar pelayanan.										
Program Pembinaan eks Penyandang Penyakit Sosial (eks Napi,PSK,Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)										
Pelayanan dan pemulangan orang terlantar (OT),eks napi, eks rehabilitasi PSK, gelandangan pengemis dan penyakit sosial lainnya	Jumlah Orang terlantar,eks napi, gepeng dan penyakit sosial lainnya yang diberikan pelayanan	Orang	-		37					Dinas Sosial
INDIKATOR SDGs: 3.8.2.(a) Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).										
Program pelayanan kesehatan penduduk miskin										
Jaminan Kesehatan Penduduk Miskin/ Tidak Mampu Kab. Berau	Jumlah Penduduk Miskin/tidak mampu yang memiliki Jaminan Kesehatan oleh Daerah	Jiwa			5712					Dinas Kesehatan
Program Pelayanan Kesehatan bersumber Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)										
Pelayanan Kesehatan Bersumber Dana Kapitasi JKN di FKTP Puskesmas Bugis	Jumlah Peserta JKN di wilayah Puskesmas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Jiwa			4874					Dinas Kesehatan
Pelayanan Kesehatan Bersumber Dana Kapitasi JKN di FKTP Puskesmas Tanjung Redeb	Jumlah Peserta JKN di wilayah Puskesmas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Jiwa			8554					Dinas Kesehatan
Pelayanan Kesehatan Bersumber Dana Kapitasi JKN di FKTP Puskesmas Teluk Bayur	Jumlah Peserta JKN di wilayah Puskesmas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Jiwa			1746					Dinas Kesehatan

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	BASE LINE	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	INSTANSI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023		
Pelayanan Kesehatan Bersumber Dana Kapitasi JKN di FKTP Puskesmas Labanan	Jumlah Peserta JKN di wilayah Puskesmas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Jiwa			4994					Dinas Kesehatan
Pelayanan Kesehatan Bersumber Dana Kapitasi JKN di FKTP Puskesmas Sambaliung	Jumlah Peserta JKN di wilayah Puskesmas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Jiwa			8921					Dinas Kesehatan
Pelayanan Kesehatan Bersumber Dana Kapitasi JKN di FKTP Puskesmas Suaran	Jumlah Peserta JKN di wilayah Puskesmas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Jiwa			2249					Dinas Kesehatan
Pelayanan Kesehatan Bersumber Dana Kapitasi JKN di FKTP Puskesmas Gunung Tabur	Jumlah Peserta JKN di wilayah Puskesmas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Jiwa			8365					Dinas Kesehatan
Pelayanan Kesehatan Bersumber Dana Kapitasi JKN di FKTP Puskesmas Merancang Ulu	Jumlah Peserta JKN di wilayah Puskesmas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Jiwa			3970					Dinas Kesehatan
Pelayanan Kesehatan Bersumber Dana Kapitasi JKN di FKTP Puskesmas Tanjung Batu	Jumlah Peserta JKN di wilayah Puskesmas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Jiwa			4006					Dinas Kesehatan

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	BASE LINE	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	INSTANSI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023		
Pelayanan Kesehatan Bersumber Dana Kapitasi JKN di FKTP Puskesmas Derawan	Jumlah Peserta JKN di wilayah Puskesmas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Jiwa			1283					Dinas Kesehatan
Pelayanan Kesehatan Bersumber Dana Kapitasi JKN di FKTP Puskesmas Maratua	Jumlah Peserta JKN di wilayah Puskesmas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Jiwa			2678					Dinas Kesehatan
Pelayanan Kesehatan Bersumber Dana Kapitasi JKN di FKTP Puskesmas Tubaan	Jumlah Peserta JKN di wilayah Puskesmas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Jiwa			2097					Dinas Kesehatan
Pelayanan Kesehatan Bersumber Dana Kapitasi JKN di FKTP Puskesmas Biatan Lempake	Jumlah Peserta JKN di wilayah Puskesmas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Jiwa			954					Dinas Kesehatan
Pelayanan Kesehatan Bersumber Dana Kapitasi JKN di FKTP Puskesmas Talisayan	Jumlah Peserta JKN di wilayah Puskesmas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Jiwa			4181					Dinas Kesehatan
Pelayanan Kesehatan Bersumber Dana Kapitasi JKN di FKTP Puskesmas Batu Putih	Jumlah Peserta JKN di wilayah Puskesmas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Jiwa			3487					Dinas Kesehatan

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	BASE LINE	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	INSTANSI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023		
Pelayanan Kesehatan Bersumber Dana Kapitasi JKN di FKTP Puskesmas Biduk Biduk	Jumlah Peserta JKN di wilayah Puskesmas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Jiwa			5100					Dinas Kesehatan
Pelayanan Kesehatan Bersumber Dana Kapitasi JKN di FKTP Puskesmas Kelay	Jumlah Peserta JKN di wilayah Puskesmas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Jiwa			4709					Dinas Kesehatan
Pelayanan Kesehatan Bersumber Dana Kapitasi JKN di FKTP Puskesmas Tepian Buah	Jumlah Peserta JKN di wilayah Puskesmas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Jiwa			5597					Dinas Kesehatan
Pelayanan Kesehatan Bersumber Dana Kapitasi JKN di FKTP Puskesmas Long Laai	Jumlah Peserta JKN di wilayah Puskesmas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Jiwa			759					Dinas Kesehatan
Pelayanan Kesehatan Bersumber Dana Kapitasi JKN di FKTP Puskesmas Merapun	Jumlah Peserta JKN di wilayah Puskesmas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Jiwa			2053					Dinas Kesehatan

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	BASE LINE	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	INSTANSI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023		
INDIKATOR SDGs: 3.a.1* Persentase merokok pada penduduk umur <15 tahun.										
Program Upaya Kesehatan Masyarakat										
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Terhadap Dampak Bahaya Rokok dan Upaya Penegakan Hukum Bahaya Rokok	Terfasilitasinya pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum terhadap dampak bahaya rokok serta pembentukan/pembuatan regulasi, sosialisasi regulasi, media Promosi, Pencanangan (Deklarasi) KTR,Data penyakit akibat rokok, penyuluhan,kegiatan upaya pemberdayaan Masyarakat (perorangan, kelompok, dan masyarakat), Kemitraan				6				Dinas Kesehatan	
INDIKATOR SDGs: 3.b.1.(a) Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.										
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan										
Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Jenis obat dan bahan medis habis pakai di puskesmas				419				Dinas Kesehatan	

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	BASE LINE	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	INSTANSI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023		
Peningkatan mutu penggunaan obat & perbekalan kesehatan	Jumlah Puskesmas dengan penggunaan obat rasional di Puskesmas				21					Dinas Kesehatan
Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah Puskesmas dan jaringannya yang di MONEV				13					Dinas Kesehatan
Program Upaya Kesehatan Masyarakat										
Pengadaan peralatan dan perbekalan kesehatan termasuk obat generik esensial	Jumlah Puskesmas/Pustu/Pos kesdes dengan peralatan medis sesuai standar									Dinas Kesehatan
Program Pengawasan Obat dan Makanan										
Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya	Jumlah TPM (Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran, PIRT) yang memiliki Sertifikat Laik Sehat				335					Dinas Kesehatan

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	BASE LINE	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	INSTANSI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023		
Peningkatan Kapasitas Laboratorium Pengawasan obat dan makanan	Jumlah pelayanan pemeriksaan laboratorium bakteriologi dan kimiawii air, makanan dan minuman Jumlah pelayanan pemeriksaan laboratorium bakteriologi dan kimiawii air, makanan dan minuman				560					Dinas Kesehatan
Peningkatan Kesehatan Tradisional	Jumlah puskesmas yang melaksanakan kesehatan tradisional				21					Dinas Kesehatan
INDIKATOR SDGs: 3.c.1* Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.										
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia										
Peningkatan Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan Lansia	Jumlah Tenaga Kesehatan yang mendapatkan pelatihan Pelayanan Lansia				21					Dinas Kesehatan

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	BASE LINE	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	INSTANSI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023		
Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya										
Pembangunan Rumah Dokter/ Tenaga Kesehatan Lainnya	Jumlah Unit Rumah Dokter/Rumah paramedis yang dibangun				4					DINKES-FISIK
Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas										
INDIKATOR SDGs: 4.1.1.(d) Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.										
PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN										
Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Jumlah Sekolah Yang Mendapatkan Alat Praktik Dan Peraga Siswa				5					
Pengadaan mebeluerr sekolah Jejang SD	Jumlah Sekolah Yang Mendapatkann Mebeuler Sekolah				32					
Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Sekolah Yang Mendapatkan Perlengkapan Sekolah				28					
Pelatihan kompetensi siswa berprestasi	Jumlah Siswa yang mengikuti Pelatihan Kompetensi				593					
Pelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi (Lomba OSN Tingkat SMP)	Jumlah Tenaga Pendidik Yang Mengikuti Pelatihan Implementasi kurikulum				288					
Penyelenggaraan Paket A, B dan C	Jumlah Siswa Yang mengikuti Ujian Paket A, B, C				173					

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	BASE LINE	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	INSTANSI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023		
Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar	Jumlah Sekolah Yang Memiliki Akreditasi				24					
Penyediaan Beasiswa Bagi Keluarga Yang Tidak Mampu Dan Siswa Berprestasi Jenjang SMP	Jumlah Siswa Yang menerima Beasiswa				2450					
Penyediaan Beasiswa Bagi Keluarga Yang Tidak Mampu dan Siswa Berprestasi Jenjang SD Tahun Anggaran 2018	Jumlah Siswa Yang menerima Beasiswa				1500					
INDIKATOR SDGs: 4.1.1.(e) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.										
PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN										
Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Jumlah Sekolah Yang Mendapatkan Alat Praktik Dan Peraga Siswa				5					
Pengadaan mebeluerr sekolah Jejang SD	Jumlah Sekolah Yang Mendapatkann Mebeuler Sekolah				32					
Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Sekolah Yang Mendapatkan Perlengkapan Sekolah				28					
Pelatihan kompetensi siswa berprestasi	Jumlah Siswa yang mengikuti Pelatihan Kompetensi				593					
Pelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi (Lomba OSN Tingkat SMP)	Jumlah Tenaga Pendidik Yang Mengikuti Pelatihan Implementasi kurikulum				288					

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	BASE LINE	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	INSTANSI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023		
Penyelenggaraan Paket A, B dan C	Jumlah Siswa Yang mengikuti Ujian Paket A, B, C				173					
Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar	Jumlah Sekolah Yang Memiliki Akreditasi				24					
Penyediaan Beasiswa Bagi Keluarga Yang Tidak Mampu Dan Siswa Berprestasi Jenjang SMP	Jumlah Siswa Yang menerima Beasiswa				2450					
Penyediaan Beasiswa Bagi Keluarga Yang Tidak Mampu dan Siswa Berprestasi Jenjang SD Tahun Anggaran 2018	Jumlah Siswa Yang menerima Beasiswa				1500					
INDIKATOR SDGs: 4.2.2.(a) Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).										
Program Pendidikan Anak Usia Dini										
Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Penyelenggaraan Pendidikan anak Usia Dini				173					Disdik
Pengembangan Wawasan Bagi Pendidik PAUD	Jumlah Orang yang mengikuti pengembangan wawasan bagi Pendidik PAUD				250					Disdik
Verifikasi Lembaga PAUD dan Akreditasi PAUD	Jumlah Lembaga PAUD Yang Di Verifikasi				3					Disdik

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	BASE LINE	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	INSTANSI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023		
Akreditasi Lembaga PAUD, LKP dan PKBM	Jumlah Kecamatan Yang Akan Di Adakan Sosialisasi Tentang Akreditasi				13					Disdik
Bantuan Tambahan Penghasilan Tutor PAUD (Guru Non PNS) di Sekolah Negeri dan Swasta	Jumlah Tutor PAUD (Guru Non PNS) Di Sekolah Negeri Dan Swasta				518					Disdik
Pembangunan Gedung Sekolah	Jumlah sekolah Tingkat TKN yang dibangun				7					Disdik
Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah	Jumlah Unit rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah yang dibangun untuk Tingkat TKN				4					Disdik
Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Sekolah yang Ditambah Ruang Kelasnya untuk Sekolah Tingkat TKN				6					Disdik
Penambahan Ruang Guru Sekolah	Jumlah Ruang Guru yang dibangun untuk Tingkat TKN				1					Disdik
Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir	Jumlah Unit Pembangunan Taman, lapangan Upacara dan fasilitas parkir				3					Disdik

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	BASE LINE	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	INSTANSI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023		
Pembangunan Sarana Air Bersih Dan Sanitary	Jumlah Unit Sarana Air Bersih yang dibangun untuk Tingkat TK				1					Disdik
Rehabilitasi Sedang / Berat Ruang Kelas	Jumlah Unit Ruang Kelas yang direhab				6					Disdik
INDIKATOR SDGs: 4.5.1* Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/SMK/MA/ sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.										
PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN										
Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Jumlah Sekolah Yang Mendapatkan Alat Praktik Dan Peraga Siswa				5					DISDIK
Pengadaan mebeluerr sekolah Jejang SD	Jumlah Sekolah Yang Mendapatkann Mebeuler Sekolah				32					DISDIK
Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Sekolah Yang Mendapatkan Perlengkapan Sekolah				28					DISDIK
Pelatihan kompetensi siswa berprestasi	Jumlah Siswa yang mengikuti Pelatihan Kompetensi				593					DISDIK
Pelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi (Lomba OSN Tingkat SMP)	Jumlah Tenaga Pendidik Yang Mengikuti Pelatihan Implementasi kurikulum				288					DISDIK
Penyelenggaraan Paket A, B dan C	Jumlah Siswa Yang mengikuti Ujian Paket A, B, C				173					DISDIK

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	BASE LINE	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	INSTANSI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023		
Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar	Jumlah Sekolah Yang Memiliki Akreditasi				24					DISDIK
Penyediaan Beasiswa Bagi Keluarga Yang Tidak Mampu Dan Siswa Berprestasi Jenjang SMP	Jumlah Siswa Yang menerima Beasiswa				2450					DISDIK
Penyediaan Beasiswa Bagi Keluarga Yang Tidak Mampu dan Siswa Berprestasi Jenjang SD Tahun Anggaran 2018	Jumlah Siswa Yang menerima Beasiswa				1500					DISDIK

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	BASE LINE	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	INSTANSI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023		
INDIKATOR SDGs: 4.6.1.(a) Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.										
PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN										
Penyelenggaraan Paket A, B dan C	Jumlah Siswa Yang mengikuti Ujian Paket A, B, C	Siswa			173					DISDIK
INDIKATOR SDGs: 4.6.1.(b) Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.										
Penyelenggaraan Paket B Setara SMP	Jumlah Kelompok Belajar Paket B Setara SMP dan Paket C Setara SMU	Kelompok Belajar			34 Kelompok Belajar					DISDIK
INDIKATOR SDGs: 4.a.1* Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).										
PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN										
Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan	Jumlah Sekolah Yang Di terapkan Sistem Dan Informasi Manajemen Pendidikan	Sekolah			217					DISDIK
PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN										
Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Jumlah Sekolah Yang Mendapatkan Alat Praktik Dan Peraga Siswa				5					DISDIK
Pengadaan mebeluerr sekolah Jejang SD	Jumlah Sekolah Yang Mendapatkann Mebeuler Sekolah				32					DISDIK
Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Sekolah Yang Mendapatkan Perlengkapan Sekolah				28					DISDIK

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	BASE LINE	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	INSTANSI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023		
Pelatihan kompetensi siswa berprestasi	Jumlah Siswa yang mengikuti Pelatihan Kompetensi				593					DISDIK
INDIKATOR SDGs: 4.c.1* Persentase guru (TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang)bersertifikat pendidik										
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan										
Pelaksanaan Sertifikasi pendidik	Jumlah Pendidik Yang Sudah Sertifikasi	Orang			406					
Tujuan 5 Kesetaraan Gender										
INDIKATOR SDGs: 5.1.1* Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.										
Program Penguatan kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak										
Peningkatan Kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak					100					DP2KBP3A
Fasilitasi UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	Penanganan Kasus Kekerasan terhadap perempuan dan anak yang datang di UPTD				100					DP2KBP3A
Pelatihan dan Road Show PUG Melalui PPRG	Jumlah peserta yang mengikuti Pelatihan PPRG (Perencanaan Penganggaran Responsip Gender)				25					DP2KBP3A
Kabupaten Layak Anak	Peningkatan dalam KLA				600					DP2KBP3A

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	BASE LINE	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	INSTANSI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023		
Fasilitasi Penguatan kelembagaan PUSPAGA Berbasis Hak Anak	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan PUSPAGA dan Tenaga pendampingan ABK dan Deteksi dini yang mendapatkan pelatihan				50					DP2KBP3A
Pemenuhan Hak Anak	Pembentukan, pembinaan dan evaluasi Forum anak di Kecamatan				20					DP2KBP3A
Program Peningkatan Peran Serta dan Kestetaran gender dalam Pembangunan										
Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan	Jumlah Organisasi Perempuan yang terbina dan terevaluasi				23					DP2KBP3A
Expose Peningkatan Kualitas Perempuan dalam pembangunan	Terlaksananya Expose Peningkatan kreatifitas ibu dalam pembangunan				2					DP2KBP3A
Pembinaan dan Evaluasi Model Desa Prima	Terbina dan terevaluasi Kel Desa Prima di kecamatan				5					DP2KBP3A
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak										
Operasional Pemberdayaan Perempuan Kecamatan	Tersedianya Operasional PKK dan Kelurahan	Bln			12					DP2KBP3A
INDIKATOR SDGs: 5.2.1* Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.										

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	BASE LINE	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	INSTANSI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023		
Program Penguatan kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak										
Fasilitasi UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	Penanganan Kasus Kekerasan terhadap perempuan dan anak yang datang di UPTD				100					DP2KBP3A
INDIKATOR SDGs: 5.2.1.(a) Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.										
Program Penguatan kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak										
Fasilitasi UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	Penanganan Kasus Kekerasan terhadap perempuan dan anak yang datang di UPTD				100					DP2KBP3A

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	BASE LINE	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	INSTANSI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023		
INDIKATOR SDGs: 5.5.1* Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.										
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan gender dalam Pembangunan										
Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan	Jumlah Organisasi Perempuan yang terbina dan terevaluasi		-	-	23	-	-	-		DP2KBP3A
Expose Peningkatan Kualitas Perempuan dalam pembangunan	Terlaksananya Expose Peningkatan kreatifitas ibu dalam pembangunan				2					DP2KBP3A
Pembinaan dan Evaluasi Model Desa Prima	Terbina dan terevaluasi Kel Desa Prima di kecamatan				5					DP2KBP3A
Tujuan 6 Air Kebersihan dan Sanitasi Layak										
INDIKATOR SDGs: 6.1.1.(a) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.										
Program Pengembangan Lingkungan Sehat										
Pengawasan Kualitas Air dan Pengambilan Sampel Air Bersih dan Air Minum	Jumlah Penyelenggara Air Minum yang Memenuhi Syarat Kesehatan				80					DINAS KESEHATAN
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah										
Pengembangan sistem distribusi air minum Pedesaan 1	Pembangunan Sarana Air Bersih Pedesaan	Kampung			20					DPUPR
Pengembangan sistem distribusi air minum Pedesaan 2	Pembangunan Sarana Air Bersih Pedesaan	Kampung			23					DPUPR

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	BASE LINE	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	INSTANSI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023		
Lanjutan Pengembangan sistem distribusi air minum Perkotaan	Lanjutan Pembangunan Sarana Air Bersih Perkotaan	KK			0					DPUPR
Operasional dan Pemeliharaan Sarana Air Minum Pedesaan & Sanitasi	Jumlah kampung yang di Revitalisasi Sarana Air Bersihnya	Kampung			10					DPUPR
Program Perencanaan Prasarana dan Pengembangan Wilayah										
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL)	Penyusunan Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL)	Dokumen			1					Baplitbang
INDIKATOR SDGs: 6.2.1.(c) Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).										
Program Pengembangan Lingkungan Sehat										
Peningkatan Lingkungan	Penyehatan Terlatih Sanitasi, Limbah, TTU, STBM	Petugas Klinik Pengelolaan Pengawasan Orang	Org, Puskesmas, Orang		21 org, 2 pusk, 21 Pusk					Dinas Kesehatan
INDIKATOR SDGs: 6.3.2.(b) Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.										
Program pengendalian pencemaran dan perusakan LH										
Pemantauan Kualitas air sungai	terlaksananya pemantauan air sungai	Sungai			3					DLHK
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan										

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	BASE LINE	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	INSTANSI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023		
Penanganan Sampah pada Alur Sungai/DAS/Pesisir pantai	Frekwensi penanganan sampah pada alur sungai/DAS/Pesisir pantai	kali			10					DLHK
INDIKATOR SDGs: 6.6.1.(d) Luas lahan kritis dalam KPH yang direhabilitasi.										
Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau										
INDIKATOR SDGs: 7.2.1* Bauran energi terbarukan.										
Program Pembinaan Perkebunan Ramah Lingkungan										
Fasilitasi biomassa sebagai energi terbarukan dari perkebunan	Jumlah PBS yang menghasilkan energi biomassa	PBS			7					DINAS PERKEBUNAN

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	BASE LINE	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	INSTANSI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023		
Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi										
INDIKATOR SDGs: 8.3.1.(c) Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan										
PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PEDESAAN										
Fasilitasi Permodalan bagi UMKM Pedesaan Menengah Pedesaan	Jumlah UMKM yang terfasilitasi permodalan di pedesaan/kampung	UMKM	-	-	70					DPMK
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah										
Pemantauan Pengelolaan Penggunaan Dana Pemerintah Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Melaksanakan pemantauan dana pemerintah kepada para debitur UKM agar penyetoran tepat waktu	Debitur UKM	-	-	42900000					Sekretariat Daerah
Program Pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM										
Pemantauan, Pengelolaan penggunaan dana bergulir Pemerintah bagi UMKM	Terlaksananya pemantauan UMK	Debitur UKM	-	-						Diskoperindag
INDIKATOR SDGs: 8.9.1* Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB										
Program pengembangan destinasi pariwisata										
Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	Jumlah pembangunan sarana dan prasarana obyek wisata	Daya Tarik Wisata	-		5 Daya Tarik Wisata					Disbudpar
Pengembangan daerah tujuan wisata	Jumlah studi potensi dan tata ruang kawasan wisata	Dokumen			2 Dokumen					Disbudpar

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	BASE LINE	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	INSTANSI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023		
Pengembangan, sosialisasi dan penerapan serta pengawasan standarisasi	Jumlah kegiatan standarisasi dalam bidang kepariwisataan	Bidang Usaha			5 Bidang Usaha					Disbudpar
Pembentukan dan Pembinaan Pokdarwis	Meningkatnya Kualitas SDM Pokdarwis di 13 Kecamatan	Kecamatan			3 Kecamatan					Disbudpar
Inventarisasi dan Identifikasi Sarana dan Prasarana Penunjang destinasi Pariwisata Alam, Budaya dan Buatan	Terdatanya Sarana dan Prasarana Penunjang di Destinasi Pariwisata	Dokumen			1 Dokumen					Disbudpar
Program Pengembangan Kemitraan										
Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata	Jumlah pelatihan pengembangan SDM pariwisata	Org	-	-	-Diver 30 Org -Cindramata 20 Org -3 Desa Wisata -Kuliner 20 Org -Pemandu Wisata 20 Org -Pengelola Museum, Pelatihan Batik 30 Org					Disbudpar

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	BASE LINE	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	INSTANSI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023		
Membangaun Kemitraan Pengelolaan Kebudayaan Antar Daerah	Jalinan Kemitraan Dalam rangka Pengelolaan Kebudayaan Daerah	Kemitraan			3 Kemitraan					Disbudpar
Fasilitasi kemitraan bidang pariwisata	Jumlah kegiatan Fasilitasi kemitraan bidang pariwisata	Mitra			1 Mitra					Disbudpar
Fasilitasi Pembentukan Badan Pengelola Obyek Wisata di Kabupaten Berau	Jumlah Badan Pengelola Obyek Wisata yang terbentuk di Kabupaten Berau	Badan Pengelola			5 Badan Pengelola					Disbudpar
Kerjasama Kajian Potensi Wisata (Kajian Ilmiah Dalam Rangka	Jumlah Kerjasama Kajian Obyek Wisata	Dokumen			1 Dokumen					Disbudpar
Fsetival Kuliner Kabupaten Berau	Meningkatnya Jenis Wisata Berbasis Kuliner Khas Derawan	Event			1 Event					Disbudpar
Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap usaha jasa pariwisata	Data usaha jasa pariwisata, data kunjungan, pelaku usaha jasa pariwisata	Dokumen			2 Dokumen					Disbudpar
INDIKATOR SDGs: 8.9.1.(a) Jumlah wisatawan mancanegara										
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata										
Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran objek pariwisata	Tersedianya hasil analisa promosi dan pemasaran	Dokumen			1 Dokumen					Disbudpar

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	BASE LINE	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	INSTANSI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023		
Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata	Jumlah pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata	Media			5 Media					Disbudpar
Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata	Jumlah pembentukan jaringan kerjasama promosi	Kerjasama			2 Kerjasama					Disbudpar
Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri	Jumlah promosi pariwisata	Event			3 Event					Disbudpar

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	BASE LINE	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	INSTANSI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023		
INDIKATOR SDGs: 8.9.1.(b) Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.										
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Daerah										
Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya	Jumlah event/peristiwa seni budaya masyarakat	Event		-	5 Event					Disbudpar
Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air	Jumlah pengelolaan dan pengembangan Situs dan BCB	Situs			4 Situs					Disbudpar
Pengembangan kebudayaan dan pariwisata	Jumlah event/peristiwa seni budaya dalam rangka HUT Kabupaten Berau	Event			1 Event					Disbudpar
Pendukung pengelolaan museum dan taman budaya di daerah	Jumlah kegiatan Pendukung pengelolaan museum daerah	Museum dan Keraton			3 Museum dan Keraton					Disbudpar
Penyusunan Buku Sejarah Berau dan Identitas laporan hasil identifikasi dan potensi (Budaya)	Tersedianya Buku Sejarah Kabupaten Berau	Dokumen Buku Sejarah Budaya			1 Dokumen Buku Sejarah Budaya					Disbudpar
Tujuan 9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur										
INDIKATOR SDGs: 9.1.1.(a) Kondisi mantap jalan nasional.										
Program Peningkatan Jalan & Jembatan										
Peningkatan Jalan Dalam Kota	Panjang Jalan Dalam Kota Yang ditingkatkan	Paket			5					DPUPR

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	BASE LINE	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	INSTANSI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023		
Program pembangunan jalan dan jembatan										
Perencanaan pembangunan jalan	Panjang Jalan Dalam Kota Yang ditingkatkan	Paket								DPUPR
Pembangunan Jalan	Jumlah paket/panjang jalan yang dibangun	Paket			18					DPUPR
Peningkatan Jalan Lingkungan	Panjang Jalan Lingkungan IKK Kec. Sambaliung, Teluk Bayur dan Gunung Tabur	Kecamatan			3					DPUPR
Program Peningkatan Jalan Dan Penggantian Jembatan										
Peningkatan Jalan Perdesaan	Panjang Jalan Perdesaan yang ditingkatkan penunjang distribusi pertanian dan perekonomian masyarakat perdesaan	Km			10					DPUPR
Program Preservasi Jalan dan Jembatan										
Perencanaan Preservasi Jalan	jumlah dokumen perencanaan preservasi jalan	Dok			2					DPUPR
Preservasi Jalan	Jumlah Paket/panjang jalan yang dibangun	Paket / ... km			36 Paket/ KM					DPUPR

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	BASE LINE	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	INSTANSI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023		
Preservasi Infrastruktur Jalan dan Jembatan (Swakelola)	Jumlah titik perbaikan kerusakan jalan dalam kota yang diadakan masyarakat	Titik			250 Titik					DPUPR

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	BASE LINE	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	INSTANSI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023		
INDIKATOR SDGs: 9.1.2.(c) Jumlah pelabuhan strategis.										
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan										
Pembangunan Sarana dan Fasilitas Pelabuhan/ Dermaga	Jumlah Dokumen pendukung dalam pembangunan sarpras Dermaga	Dok			1157130000					Dinas Perhubungan
Pembangunan Pelabuhan / Dermaga Teluk Sulaiman	Jumlah dermaga yang dibangun	unit			10816650000					Dinas Perhubungan
INDIKATOR SDGs: 9.4.1.(a) Persentase Perubahan Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca.										
Program pengendalian pencemaran dan perusakan LH										
Pemantauan evaluasi laporan emisi gas rumah kaca (GRK)	data emisi gas rumah kaca (GRK) berbasis lahan	ton Co2 eq			414.000 ton Co2 eq					DLHK
Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan										
INDIKATOR SDGs: 10.1.1.(c) Jumlah desa tertinggal										
Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan										
Pendampingan dan Penguatan Kapasitas Manajemen BUMK	Jumlah BUMK/Bumdes yang terfasilitasi dengan baik				50					DPMK
Pendataan Potensi Pasar Desa dan Peningkatan Pengelolaan Pasar Desa	Tersedianya data potensi pasar kampung yang akurat				8					DPMK
Partisipasi Pameran Produksi Unggulan dan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa	Terlaksananya kegiatan pameran produk unggulan masyarakat				40					DPMK
Pendampingan Kawasan Perdesaan melalui Prukades	Jumlah BUMK/Bumdes Bersama yang dibina				5					DPMK

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	BASE LINE	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	INSTANSI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023		
Pelaksanaan KKN Mahasiswa	Jumlah kampung yang terfasilitasi KKN				83					DPMK
Peningkatan Kualitas SDM Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna (Posyantek)	Jumlah Posyantek yang dibina/dibentuk				7					DPMK
PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN										
Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa	Jumlah kampung yang menerima informasi hasil program pemberdayaan masyarakat desa				12					DPMK
Pencanangan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat	Terselenggaranya Bulbak				12					DPMK
Pengembangan dan pengelolaan data profil kampung/desa dan Kelurahan	Jumlah kampung yang menyampaikan data profil akurat				12					DPMK
Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga Adat Kampung/Desa	Meningkatnya kampung/desa yang berbasis Adat Istiadat dan Budaya				5					DPMK
Pembinaan LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat)	Jumlah LPM nya dibina				35					DPMK
Pengembangan dan Penetapan Kampung Mandiri	Jumlah data perkembangan kampung mandiri				45					DPMK
Inventarisasi Sarana dan Prasarana kampung	Jumlah kampung yang sarprasnya terinventarisir				20					DPMK
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA										

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	BASE LINE	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	INSTANSI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023		
Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Pengelolaan Keuangan	Jumlah aparatur kampung yang dilatih				100					DPMK
Pelatihan Manajemen Pemerintah Desa bagi Badan Perwakilan Kampung	Jumlah aparat BPK yang dilatih				100					DPMK
Pembinaan dan Fasilitasi Alokasi Dana Kampung (ADK)	Jumlah kampung yang dibina ADK				100					DPMK
Penyusunan dan Sosialisasi Regulasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung	Jumlah regulasi yang disusun dan disosialisasikan				8					DPMK
Pelatihan Pengelolaan Asset Pemerintahan Desa/Kampung	Jumlah aparatur kampung yang mengikuti pelatihan				100					DPMK
Fasilitasi Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa	Jumlah kecamatan yang di fasilitasi penggunaan aplikasi siskeudes				12					DPMK
Pelatihan Manajemen Pemerintah Desa dan PTPD bagi Aparatur Kecamatan dan DPMK	Jumlah aparatur kampung yang dilatih				100					DPMK
Pelatihan Manajemen Pemerintah Desa bagi Aparat Pemerintah Kampung	Jumlah tenaga kampung yang terlatih				30					DPMK
Pelaksanaan Lomba Cerdas Cermat Desa	Jumlah kampung yang mengikuti lomba cerdas cermat				12					DPMK
Tujuan 11 Kota dan Pemukiman Yang Berkelanjutan										
INDIKATOR SDGs: 11.1.1.(a). Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.										

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	BASE LINE	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	INSTANSI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023		
Program Pengembangan Perumahan										
Review Data Base Perumahan	Jumlah dokumen review database perumahan	Dokumen			1 Dokumen					DISPERKIM
Perencanaan Rumah Layak Huni	Jumlah Dokumen Perencanaan RLH	Dokumen			5 Dokumen					DISPERKIM
Pembangunan Rumah Layak Huni	Jumlah Rumah Layak Huni yang di bangun	unit			50 unit					DISPERKIM
Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya										
Peningkatan kualitas BPS	Jumlah RTLH yang di Rehab	unit			50					DISPERKIM
INDIKATOR SDGs: 11.5.1.(c). Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.										
PROGRAM PENINGKATAN KESIAPSIAGAAN DAN PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN										
Sosialisasi Norma Standar, Prosedur dan Manual Pencegahan Bahaya Kebakaran	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi		-		30					BPBD
Pendidikan dan Pelatihan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Jumlah orang yang mengikutiti pelatihan				0					BPBD
Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	Persentase pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran				100					BPBD
PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA ALAM										
Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam	Jumlah Kecamatan yang dilakukan Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi		-		13					BPBD

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	BASE LINE	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	INSTANSI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023		
Tanggap Darurat Operasioanl Penanggulangan Bencana	Persentase Penanganan Kejadian Bencana / Tanggap Darurat				100					BPBD
Pelatihan Penanggulangan Bencana	Jumlah orang yang mengikuti pelatihan				10					BPBD
Pelatihan dan Pendidikan Petugas TRC	Jumlah orang yang mengikuti pelatihan				0					BPBD
Pelatihan dan Pendidikan Petugas Rescue	Jumlah orang yang mengikuti pelatihan									BPBD
Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bencana	Jumlah orang yang mengikuti pelatihan				10					BPBD
INDIKATOR SDGs: 11.6.1.(a). Persentase sampah perkotaan yang tertangani.										
Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan										
Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Tersediannya sarana dan prasarana pengelola persampahan	unit			5 unit					DLHK
Pengembangan masterlan persampahan	Tersusunnya dokumen masterplen persampahan	dokumen			1 dokumen					DLHK
Pengembangan teknologi pengelolaan persampahan	tersedianya mesin teknologi persampahan	unit			6 unit					DLHK

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	BASE LINE	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	INSTANSI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023		
Penanganan sampah pada permukaan jalan dan saluran drainase kota	Tertanganinya sampah pada permukaan jalan dan saluran drainase kota	orang			100 orang					DLHK
Peningkatan kemiteraan dan penyediaan informasi publik	Jumlah kemiteraan	kemiteraan			2 kemiteraan					DLHK
Penanganan sampah pada alur sungai/daerah aliran sungai	Tertanganinya sampah pada alur sungai/daerah aliran sungai	KM			10 KM					DLHK
pengelolaan dan pengembangan bank sampah	bangunan bank sampah	bank sampah			6 bank sampah					DLHK
INDIKATOR SDGs: 11.b.1*. Proporsi pemerintah kota yang memiliki dokumen strategi pengurangan risiko bencana.										
PROGRAM PENYUSUNAN STANDAR TEKNIS PENANGGULANGAN BENCANA										
Penyusunan Pemetaan Daerah Rawan Bencana	Jumlah Dokumen				1					
Penyusunan Peraturan Daerah Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen				1					
Penyusunan dan Pembuatan Standar Teknis Pasca Bencana	Jumlah Dokumen				1					
Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi Yang Bertanggungjawab										
INDIKATOR SDGs: 12.4.1.(a) Jumlah peserta Proper yang mencapai minimal ranking BIRU.										
Program pengendalian pencemaran dan perusakan LH										
Pemantauan Kerusakan LH	jumlah usaha/kegiatan dilakukan pengawasan	perusahaan			27					DLHK
INDIKATOR SDGs: 12.4.2.(a) Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).										
Program pengendalian pencemaran dan perusakan LH										

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	BASE LINE	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	INSTANSI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023		
Pengawasan pengelolaan limbah B3	Terkendalinya pengelolaan LB3 oleh pelaku usaha	Pelaku Usaha			24					DLHK
Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim										
INDIKATOR SDGs: 13.1.2* Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.										
PROGRAM PENYUSUNAN STANDAR TEKNIS PENANGGULANGAN BENCANA										
Penyusunan Pemetaan Daerah Rawan Bencana	Jumlah Dokumen	Dokumen	-	-	1					BPBD
Penyusunan Peraturan Daerah Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen	Dokumen	-	-	1					BPBD
Penyusunan dan Pembuatan Standar Teknis Pasca Bencana	Jumlah Dokumen	Dokumen	-	-	1					BPBD
INDIKATOR SDGs: 13.2.1.(a) Dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK).										
Program pengendalian pencemaran dan perusakan LH										
Pemantauan evaluasi laporan emisi gas rumah kaca (GRK)	data emisi gas rumah kaca (GRK) berbasis lahan	ton Co2 eq			414.000 ton Co2 eq					Dinas Perkebunan
Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan Yang Tangguh										
Indikator 16.1.1.(a) Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.										
Program Pemeliharaan Kamtramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal										
Monitoring Analisa Singkronisasi Pelaporan Penanganan Konflik / Kewaspadaan Dini dan Deteksi Dini										KESBANGPOL
Indikator 16.1.3.(a) Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.										
Program Penguatan kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak										
Fasilitasi UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	Penanganan Kasus Kekerasan terhadap perempuan dan anak yang datang di UPTD	Kegiatan			100					DP2KBP3A

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	BASE LINE	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	INSTANSI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023		
Fasilitasi UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	Penanganan Kasus Kekerasan terhadap perempuan dan anak yang datang di UPTD	Kegiatan			100					DP2KBP3A
Fasilitasi UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	Penanganan Kasus Kekerasan terhadap perempuan dan anak yang datang di UPTD	Kegiatan			100					DP2KBP3A
Fasilitasi UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	Penanganan Kasus Kekerasan terhadap perempuan dan anak yang datang di UPTD	Kegiatan			100					DP2KBP3A
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan										
Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin	Terpenuhi hak konstitusional masyarakat miskin	kasus hukum			30					Sekretariat Daerah
Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin	Terpenuhi hak konstitusional masyarakat miskin	kasus hukum			30					Sekretariat Daerah

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	BASE LINE	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	INSTANSI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023		
Program Pendidikan Politik Masyarakat										
Pengembangan Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi di Kalangan Masyarakat Tahun 2020	Jumlah laporan hasil pemantauan RAD PPK Terintegrasi Kota Bontang	Laporan								Kesbangpol
Rekonsiliasi Realisasi Pengeluaran OPD	Jumlah Berita Acara Pengeluaran perbulan	Berita Acara OPD			30 Berita Acara OPD					BPKAD
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Pelaporan Kinerja Kabupaten berau yang Tersedia	Dokumen			4 Dokumen					Sekretariat Daerah
16.6.1.(b) Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).										
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan										
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Pelaporan Kinerja Kabupaten berau yang Tersedia	Dokumen								Sekretariat Daerah
16.6.1.(c) Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.										
PROGRAM PENGEMBANGAN LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA										
Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)	Jumlah bulan operasional layanan pengadaan elrktronik	Jumlah bulan operasional layanan pengadaan secara elektronik	Bln		12 Bln					Sekretariat Daerah
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaran gender dalam Pembangunan										
Expose Peningkatan Kualitas Perempuan dalam pembangunan	Terlaksananya Expose Peningkatan kreatifitas ibu dalam pembangunan				2					

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	BASE LINE	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	INSTANSI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023		
Progran Peningkatan Peran Serta dan Kesetaran gender dalam Pembangunan										
Expose Peningkatan Kualitas Perempuan dalam pembangunan	Terlaksananya Expose Peningkatan kreatifitas ibu dalam pembangunan				2					
Fasilitasi dan Sosialisasi Pilkada Bupati Berau Tahun 2020										Kesbangpol
Fasilitasi UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	Penanganan Kasus Kekerasan terhadap perempuan dan anak yang datang di UPTD	Kegiatan			100					DP2KBP3A
Optimalisasi Keterbukaan Informasi Publik (PPID)	jumlah dokumen informasi publik seluruh perangkat daerah yang harus di informasikan	Dokumen			1081 Dokumen					DISKOMINFO
Optimalisasi Keterbukaan Informasi Publik (PPID)	jumlah dokumen informasi publik seluruh perangkat daerah yang harus di informasikan	Dokumen			1081 Dokumen					DISKOMINFO

MATRIK 3. PROGRAM/KEGIATAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR (SESUAI RPJMD/RKPD)

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	BASELIN E	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	INSTANSI PELAKSANA
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan										
INDIKATOR SDGs: 1.2.1* Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.										
Program Penanggulangan Bidang Kemiskinan Bidang Kesejahteraan Sosial Untuk Mengukur Indeks Kedalaman Kemiskinan										
Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH)	Peningkatan Koordinasi dan Kinerja antar Koordinator, Oprator (Sekretariat UPPKH Kutai Timur) dan Pendamping PKH dan KUBE PKH	orang			86 orang	86 orang				Dinas Sosial
Pembentukan dan Bimbingan KUBE PKH	Bimtek dan Pembinaan KUBE PKH	Kecamatan			4 Kecamatan	4 Kecamatan				
Beras Sejahtera (RASTRA) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	Sosialisasi dan Monitoring Bantuan Sosial Beras Sejahtera (RASTRA)	Kecamatan			18 Kecamatan	18 Kecamatan				Dinas Sosial
Pemberian Bantuan Usaha UEP (Usaha Ekonomi Produktif)	Terlaksananya Pemberian Bantuan Guna PeningkatanUsaha KPM (Keluarga Penerima Manfaat) dalam Pengembangan Usahanya	Kecamatan			5 Kecamatan	5 Kecamatan				Dinas Sosial

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	BASELIN E	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	INSTANSI PELAKSANA
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Pembuatan Plang PKH di Rumah Peserta PKH	Pembuatan Plang PKH Bagi Peserta yang Telah Menerima Bantuan PKH	KK			709 KK	709				Dinas Sosial

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	BASELIN E	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	INSTANSI PELAKSANA
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
INDIKATOR SDGs: 1.3.1.(c) Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.										
Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma										
Pendayagunaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma	Terlaksananya Pemberian Bantuan Untuk Masyarakat Penyandang Disabilitas	orang			150	150				Dinas Sosial
INDIKATOR SDGs: 1.5.1* Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.										
Program Kedaruratan Logistik dan Peralatan										
Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Kebencanaan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Penanganan Kebencanaan	%			100%	100%				Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Fasilitasi Pusat Pengendali dan Operasional (Pusdalops) Penanggulangan Bencana	Tersedianya Fasilitasi Pusat Pengendali dan Operasional (Pusdalops) Penanggulangan Bencana	%			100%	100%				Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Peningkatan SDM Kedaruratan, Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana	Terpenuhinya Peningkatan SDM Kedaruratan, Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana	%			100%	100%				Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Pelatihan Posko/Bimtek TRC/Bimtek SKPDB	Tersedianya Pelatihan Posko/Bimtek TRC/Bimtek SKPDB	%			100%	100%				Badan Penanggulangan Bencana Daerah

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	BASELIN E	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	INSTANSI PELAKSANA
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Pengadaan dan Distribusi Peralatan Kebencanaan	Tersedianya Pengadaan dan Distribusi Peralatan Kebencanaan	%			100%	100%				Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sarana dan Prasarana Penanggulangan Kebencanaan	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Penanggulangan Kebencanaan	%			100%	100%				Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Penyediaan Bantuan Peralatan dan Logistik Bencana	Tersedianya Penyediaan Bantuan Peralatan dan Logistik Bencana	%			100%	100%				Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Penanggulangan Kebencanaan	Terlaksananya Tindakan Penanggulangan Bencana di Lokasi Bencana	%			100%	100%				Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Pengadaan Logistik Kebencanaan	Tersedianya Logistik	%			100%	100%				Badan Penanggulangan Bencana Daerah
INDIKATOR SDGs: 1.5.1.(a) Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.										
PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA ALAM										
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana Daerah	Terpenuhinya Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana Daerah	%			100%	100%				Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Simulasi Penanggulangan Bencana Alam	Terpenuhinya Simulasi Penanggulangan Bencana Alam	Desa			8 Desa	8 Desa				Badan Penanggulangan Bencana Daerah

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	BASELIN E	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	INSTANSI PELAKSANA
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Pencegahan dan Penyebarluasan Informasi Peringatan Dini Bencana	Tercapainya Pencegahan dan Penyebarluasan Informasi Peringatan Dini Bencana	Paket			1 Paket	1 Paket				Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Evaluasi dan Monitoring Pasca Bencana Penanggulangan Bencana Daerah	Terpenuhinya Evaluasi dan Monitoring Pasca Bencana Penanggulangan Bencana Daerah	%			100%	100%				Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Penyusunan Pedoman Manajemen Bencana	Terpenuhinya Dokumen KRB dan RPB	Dokumen			2 Dokumen	2 Dokumen				Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Pemasangan EWS di KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan	Terpenuhinya Pemasangan EWS di KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan	%			100%	100%				Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Penyusunan Rencana Kontijensi Bencana di Kawasan KEK Maloy Batuta	Terpenuhinya Penyusunan Rencana Kontijensi Bencana di Kawasan KEK Maloy Batuta	%			100%	100%				Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Pemasangan Rambu dan Papan Informasi Kebencanaan di KEK Maloy Batuta	Terpenuhinya Pemasangan Rambu dan Papan Informasi Kebencanaan di KEK Maloy Batuta	%			100%	100%				Badan Penanggulangan Bencana Daerah

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	BASELINE	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	INSTANSI PELAKSANA
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Pelatihan Penyusunan Base Line dan Kerugian Akibat Bencana	Terpenuhinya Pelatihan Penyusunan Base Line dan Kerugian Akibat Bencana	%			100%	100%				Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	%			100%	100%				Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Penyusunan Pedoman Manajemen Bencana	Terpenuhinya Dokumen KRB dan RPB	Dokumen			2 Dokumen	2 Dokumen				Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Pencegahan dan Penyebarluasan informasi Peringatan Dini Bencana (Fasilitasi Informasi Bencana Daerah)	Terpenuhinya Pencegahan dan Penyebarluasan informasi Peringatan Dini Bencana (Fasilitasi Informasi Bencana Daerah)	%			100%	100%				Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Dokumen Kontigensi Bencana Kabupaten	Terpenuhinya Dokumen Kontigensi Bencana Kabupaten	Dokumen			1 Dokumen	1 Dokumen				Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Penguatan Kelembagaan BPBD Kabupaten Kutai Timur	Terlaksananya Kerjasama Antara Pemerintah, Dunia Usaha dan Masyarakat	%			100%	100%				Badan Penanggulangan Bencana Daerah

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	BASELIN E	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	INSTANSI PELAKSANA
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Penyiapan Posko Penanganan Bencana	Tersedianya Penyiapan Posko Penanganan Bencana	Kecamatan			6 Kecamatan	6 Kecamatan				Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Peningkatan Sarana dan Prasarana Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Terpenuhinya Peningkatan Sarana dan Prasarana Rehabilitasi dan Rekonstruksi	%			100%	100%				Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sosialisasi Pengurangan Risiko Bencana	Terpenuhinya Sosialisasi Pengurangan Risiko Bencana	%			100%	100%				Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Fasilitasi dan Pengembangan Desa Tangguh Bencana	Terpenuhinya Fasilitasi dan Pengembangan Desa Tangguh Bencana	Desa			6 Desa	6 Desa				Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Pembentukan dan Pengembangan Relawan	Terpenuhinya Pembentukan dan Pengembangan Relawan	Desa			6 Desa	6 Desa				Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Banjir	Terlaksananya Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Banjir	%			100%	100%				Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Pelatihan Kader Desa Siaga	Terpenuhinya Pelatihan Kader Desa Siaga	Paket			1 Paket	1 Paket				Badan Penanggulangan Bencana Daerah

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	BASELIN E	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	INSTANSI PELAKSANA
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Bantuan Penanggulangan Bencana dan Musibah	Tersedianya Bantuan Penanggulangan Bencana dan Musibah	Paket			1 Paket	1 Paket				Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Pembentukan Kelompok Penanggulangan Bencana di Tingkat Desa dan Kecamatan	Terpenuhinya Pembentukan Kelompok Penanggulangan Bencana di Tingkat Desa dan Kecamatan	Desa			4 Desa	4 Desa				Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Fasilitasi Pusat Pengendalian dan Operasional (Pusdalops) Penanggulangan Bencana	Terpenuhinya Fasilitasi Pusat Pengendalian dan Operasional (Pusdalops) Penanggulangan Bencana	%			100%	100%				Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Peringatan Dini dan Aplikasi Sistem Peringatan Bahaya Kebakaran atau Sejenisnya	Terpenuhinya Peringatan Dini dan Aplikasi Sistem Peringatan Bahaya Kebakaran atau Sejenisnya	%			100%	100%				Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Peningkatan SDM Bidang Kedaruratan, Logistik dan Peralatan	Terpenuhinya Peningkatan SDM Bidang Kedaruratan, Logistik dan Peralatan	%			100%	100%				Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Pengadaan Logistik Kebencanaan	Terpenuhinya Pengadaan Logistik Kebencanaan	Paket			1 Paket	1 Paket				Badan Penanggulangan Bencana Daerah

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	BASELINE	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	INSTANSI PELAKSANA
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Rehabilitasi dan Peningkatan Sosial Ekonomi Pasca Bencana	Jumlah Penduduk/Masyarakat Yang Terdampak Sosial Ekonomi Pasca Bencana	%			100%	100%				Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Bantuan Rekonstruksi Pasca Bencana	Terpenuhinya Bantuan Rekonstruksi Pasca Bencana	%			100%	100%				Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Pemulihan Psiko Sosial Korban Bencana	Terpenuhinya Pemulihan Psiko Sosial Korban Bencana	%			100%	100%				Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Monitoring, Evaluasi Pelaksanaan Rekonstruksi Daerah Terkena Bencana	Terpenuhinya Monitoring, Evaluasi Pelaksanaan Rekonstruksi Daerah Terkena Bencana	%			100%	100%				Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Rehab/Rekon Sosial Ekonomi Pasca Bencana	Terpenuhinya Rehab/Rekon Sosial Ekonomi Pasca Bencana	%			100%	100%				Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)	Terpenuhinya Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)	Dokumen			1 Dokumen	1 Dokumen				Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Penyusunan dan Inventarisir Resiko Bencana Daerah, Peta Rawan Bencana Termasuk Prosedur Tetap Penanganan	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Kajian Resiko Bencana	Dokumen			1 Dokumen	1 Dokumen				Badan Penanggulangan Bencana Daerah

INDIKATOR SDGs: 1.5.1.(b) Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	BASELIN E	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	INSTANSI PELAKSANA
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Program Kedaruratan Logistik dan Peralatan										
Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Kebencanaan	Tersedianya Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Kebencanaan	%			100%	100%				Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Fasilitasi Pusat Pengendali dan Operasional (Pusdalops) Penanggulangan Bencana	Tersedianya Fasilitas Pusat Pengendali dan Operasional (Pusdalops) Penanggulangan Bencana	%			100%	100%				Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Peningkatan SDM Kedaruratan, Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana	Terpenuhinya Peningkatan SDM Kedaruratan, Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana	%			100%	100%				Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Pelatihan Posko/Bimtek TRC/Bimtek SKPDB	Tersedianya Pelatihan Posko/Bimtek TRC/Bimtek SKPDB	%			100%	100%				Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Pengadaan dan Distribusi Peralatan Kebencanaan	Tersedianya Pengadaan dan Distribusi Peralatan Kebencanaan	%			100%	100%				Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sarana dan Prasarana Penanggulangan Kebencanaan	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Penanggulangan Kebencanaan	%			100%	100%				Badan Penanggulangan Bencana Daerah

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	BASELIN E	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	INSTANSI PELAKSANA
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Penyediaan Bantuan Peralatan dan Logistik Bencana	Tersedianya Penyediaan Bantuan Peralatan dan Logistik Bencana	%			100%	100%				Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Penanggulangan Kebencanaan	Terlaksananya Tindakan Penanggulangan Bencana di Lokasi Bencana	%			100%	100%				Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Pengadaan Logistik Kebencanaan	Tersedianya Logistik	%			100%	100%				Badan Penanggulangan Bencana Daerah
INDIKATOR SDGs: 1.5.1.(d) Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus.										
PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA ALAM										
Simulasi Penanggulangan Bencana Alam	Terpenuhinya Simulasi Penanggulangan Bencana Alam	Desa			8 Desa	8 Desa				Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Pencegahan dan Penyebarluasan Informasi Peringatan Dini Bencana	Tercapainya Pencegahan dan Penyebarluasan Informasi Peringatan Dini Bencana	Paket			1 Paket	1 Paket				Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Penyusunan Pedoman Manajemen Bencana	Terpenuhinya Dokumen KRB dan RPB	Dokumen			2 Dokumen	2 Dokumen				Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Pemasangan EWS di KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan	Terpenuhinya Pemasangan EWS di KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan	%			100%	100%				Badan Penanggulangan Bencana Daerah

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	BASELIN E	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	INSTANSI PELAKSANA
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Penyusunan Rencana Kontijensi Bencana di Kawasan KEK Maloy Batuta	Terpenuhinya Penyusunan Rencana Kontijensi Bencana di Kawasan KEK Maloy Batuta	%			100%	100%				Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Pemasangan Rambu dan Papan Informasi Kebencanaan di KEK Maloy Batuta	Terpenuhinya Pemasangan Rambu dan Papan Informasi Kebencanaan di KEK Maloy Batuta	%			100%	100%				Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Penyusunan Pedoman Manajemen Bencana	Terpenuhinya Dokumen KRB dan RPB	Dokumen			2 Dokumen	2 Dokumen				Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Pencegahan dan Penyebarluasan informasi Peringatan Dini Bencana (Fasilitasi Informasi Bencana Daerah)	Terpenuhinya Pencegahan dan Penyebarluasan informasi Peringatan Dini Bencana (Fasilitasi Informasi Bencana Daerah)	%			100%	100%				Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Penyiapan Posko Penanganan Bencana	Tersedianya Penyiapan Posko Penanganan Bencana	Kecamatan			6 Kecamatan	6 Kecamatan				Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Pelatihan Kader Desa Siaga	Terpenuhinya Pelatihan Kader Desa Siaga	Paket			1 Paket	1 Paket				Badan Penanggulangan Bencana Daerah

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	BASELIN E	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	INSTANSI PELAKSANA
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Pembentukan Kelompok Penanggulangan Bencana di Tingkat Desa dan Kecamatan	Terpenuhinya Pembentukan Kelompok Penanggulangan Bencana di Tingkat Desa dan Kecamatan	Desa			4 Desa	4 Desa				Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Peringatan Dini dan Aplikasi Sistem Peringatan Bahaya Kebakaran atau Sejenisnya	Terpenuhinya Peringatan Dini dan Aplikasi Sistem Peringatan Bahaya Kebakaran atau Sejenisnya	%			100%	100%				Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Peningkatan SDM Bidang Kedaruratan, Logistik dan Peralatan	Terpenuhinya Peningkatan SDM Bidang Kedaruratan, Logistik dan Peralatan	%			100%	100%				Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Pengadaan Logistik Kebencanaan	Terpenuhinya Pengadaan Logistik Kebencanaan	Paket			1 Paket	1 Paket				Badan Penanggulangan Bencana Daerah
INDIKATOR SDGs: 1.5.3* Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.										
PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA ALAM										
Penyusunan Pedoman Manajemen Bencana	Terpenuhinya Dokumen KRB dan RPB	Dokumen			2 Dokumen	2 Dokumen				Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Penyusunan Rencana Kontijensi Bencana di Kawasan KEK Maloy Batuta	Terpenuhinya Penyusunan Rencana Kontijensi Bencana di Kawasan KEK Maloy Batuta	%			100%	100%				Badan Penanggulangan Bencana Daerah

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	BASELIN E	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	INSTANSI PELAKSANA
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Penyusunan Pedoman Manajemen Bencana	Terpenuhinya Dokumen KRB dan RPB	Dokumen			2 Dokumen	2 Dokumen				Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)	Terpenuhinya Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)	Dokumen			1 Dokumen	1 Dokumen				Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Penyusunan dan Inventarisir Resiko Bencana Daerah, Peta Rawan Bencana Termasuk Prosedur Tetap Penanganan	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Kajian Resiko Bencana	Dokumen			1 Dokumen	1 Dokumen				Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Tujuan 2 Tanpa Kelaparan										
INDIKATOR SDGs: 2.1.1* Prevalensi ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernutrition)										
PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN										
Pengembangan Cadangan Pangan	Tersedianya cadangan pangan pemerintah				20 ton	20 ton				Dinas Ketahanan Pangan
Pemantauan dan Analisa Akses Harga Pangan Pokok	Terlaksananya pemantauan dan analisis akses harga pangan pokok				17 Komoditi	17 Komoditi				Dinas Ketahanan Pangan
Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan	Dokumen analisis pola konsumsi dan suplai pangan				1 Dokumen	1 Dokumen				Dinas Ketahanan Pangan
Pengembangan dan Pemantapan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)	Tersusunnya laporan SKPG				1 Dokumen	1 Dokumen				Dinas Ketahanan Pangan

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	BASELIN E	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	INSTANSI PELAKSANA
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan	Meningkatnya optimalisasi pemanfaatan pekarangan dengan konsep KRPL				18 kelompok	18 kelompok				Dinas Ketahanan Pangan
Pengembangan lumbung pangan	Berkembangnya lumbung pangan desa				10 Unit	10 Unit				Dinas Ketahanan Pangan
Analisis ketersediaan pangan kabupaten kutai timur	Tersedianya informasi ketersediaan pangan kutim				1 Dokumen	1 Dokumen				Dinas Ketahanan Pangan
Penyusunan database dan peta sumber daya pangan	Tersusunnya peta sumberdaya pangan				1 Dokumen	1 Dokumen				Dinas Ketahanan Pangan
Model pengembangan pangan pokok lokal (MP3L)	Berkembangnya model pangan pokok lokal				2 Unit	2 Unit				Dinas Ketahanan Pangan
Promosi dan sosialisasi penganekaragaman konsumsi pangan (B2SA)	Jumlah promosi dan sosialisasi				10 kali	10 kali				Dinas Ketahanan Pangan
Pembinaan Mutu dan Keamanan Pangan	Terbinanya mutu dan keamanan pangan kelompok tani				10 kelompok	10 kelompok				Dinas Ketahanan Pangan
Peningkatan Kemandirian dan Penanganan Kerentanan Pangan di Masyarakat	Terwujudnya Kawasan Mandiri Pangan				1 kawasan	1 kawasan				Dinas Ketahanan Pangan

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	BASELIN E	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	INSTANSI PELAKSANA
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
INDIKATOR SDGs: 2.1.1.(a) Prevalensi Kekurangan Gizi (underweight) pada anak balita.										
Program Perbaikan Gizi Masyarakat										
Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin	Terlaksananya Pemberian PMT pada Ibu Hamil KEK dan Balita Gizi Kurang	%			100%	100%				Dinas Kesehatan
Pemantauan Pertumbuhan Balita, Balita Bawah Garis Merah (BGM) dan Perawatan Balita Gizi Buruk (Dana Pajak Rokok)	Terlaksananya Pelacakan Kasus Gizi Buruk	%			100%	100%				Dinas Kesehatan
INDIKATOR SDGs: 2.1.2* Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawananan pangan.										
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan										
Pengembangan Cadangan Pangan	Tersedianya cadangan pangan pemerintah				20 ton	20 ton				Dinas Ketahanan Pangan
Pemantauan dan Analisa Akses Harga Pangan Pokok	Terlaksananya pemantauan dan analisis akses harga pangan pokok				17 Komoditi	17 Komoditi				Dinas Ketahanan Pangan
Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan	Dokumen analisis pola konsumsi dan suplai pangan				1 Dokumen	1 Dokumen				Dinas Ketahanan Pangan
Pengembangan dan Pemantapan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)	Tersusunnya laporan SKPG				1 Dokumen	1 Dokumen				Dinas Ketahanan Pangan
Pengembangan Model Distribusi Pangan yang Efisien	Berkembangnya model distribusi pangan				3 Unit	3 Unit				Dinas Ketahanan Pangan

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	BASELIN E	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	INSTANSI PELAKSANA
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan	Meningkatnya optimalisasi pemanfaatan pekarangan dengan konsep KRPL				18 kelompok	18 kelompok				Dinas Ketahanan Pangan
Pengembangan lumbung pangan	Berkembangnya lumbung pangan desa				10 Unit	10 Unit				Dinas Ketahanan Pangan
Analisis ketersediaan pangan kabupaten kutai timur	Tersedianya informasi ketersediaan pangan kutim				1 Dokumen	1 Dokumen				Dinas Ketahanan Pangan
Penyusunan database dan peta sumber daya pangan	Tersusunnya peta sumberdaya pangan				1 Dokumen	1 Dokumen				Dinas Ketahanan Pangan
Fasilitasi dewan ketahanan pangan	Terfasilitasinya dewan ketahanan pangan				2 kali	2 kali				Dinas Ketahanan Pangan
Pemantauan dan pengawasan keamanan pangan	Tersedianya informasi keamanan pangan segar				1 Dokumen	1 Dokumen				Dinas Ketahanan Pangan
Pengembangan sertifikasi pengawasan batas maksimum residu (BMR) pada produksi pangan segar	Produk pangan yang tersertifikasi				2 Komoditi	2 Komoditi				Dinas Ketahanan Pangan
Model pengembangan pangan pokok lokal (MP3L)	Berkembangnya model pangan pokok lokal				2 Unit	2 Unit				Dinas Ketahanan Pangan
Promosi dan sosialisasi panganekaragaman konsumsi pangan (B2SA)	Jumlah promosi dan sosialisasi				10 kali	10 kali				Dinas Ketahanan Pangan

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	BASELIN E	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	INSTANSI PELAKSANA
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Pembinaan Mutu dan Keamanan Pangan	Terbinanya mutu dan keamanan pangan kelompok tani				10 kelompok	10 kelompok				Dinas Ketahanan Pangan
Peningkatan Kemandirian dan Penanganan Kerentanan Pangan di Masyarakat	Terwujudnya Kawasan Mandiri Pangan				1 kawasan	1 kawasan				Dinas Ketahanan Pangan
Panel Harga Pangan dalam Rangka HBKN	Tersedianya informasi panel harga pangan				18 Kecamatan	18 Kecamatan				Dinas Ketahanan Pangan
Lomba Cipta Menu B2SA	Terselenggaranya LCM				2 kali	2 kali				Dinas Ketahanan Pangan
Partisipasi Pameran Pangan	Ikut berpartisipasi pameran pangan				3 kali	3 kali				Dinas Ketahanan Pangan
Pengembangan Korporasi Usaha Tani	Berkembangnya Korporasi Usaha Tani				1 kelompok	1 kelompok				Dinas Ketahanan Pangan
INDIKATOR SDGs: 2.2.1* Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak balita.										
Program Perencanaan Sosial dan Budaya										
Penyusunan RAD Pencegahan Stunting	Tersusunnya Dokumen RAD Stunting Kab. Kutai Timur	Dokumen			2 Dokumen					Bappeda
Program Perbaikan Gizi Masyarakat										
Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin	Terlaksananya Pemberian PMT pada Ibu Hamil KEK dan Balita Gizi Kurang	%			100%					Dinas Kesehatan

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	BASELINE	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	INSTANSI PELAKSANA
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Pemantauan Pertumbuhan Balita, Balita Bawah Garis Merah (BGM) dan Perawatan Balita Gizi Buruk (Dana Pajak Rokok)	Terlaksananya Pelacakan Kasus Gizi Buruk	%			100%					Dinas Kesehatan
INDIKATOR SDGs: 2.2.2.(c) (i) Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH); dan (ii) tingkat konsumsi ikan perkapita										

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	BASELIN E	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	INSTANSI PELAKSANA
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Program Peningkatan Ketahanan Pangan										
Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan	Dokumen analisis pola konsumsi dan suplai pangan	Dokumen			1	1				Dinas Ketahanan Pangan
Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan										
Memasyarakatkan Makan Ikan	Terselenggaranya Kegiatan Memasyarakatkan Makan Ikan	%			100	100				Dinas Kelautan dan Perikanan
INDIKATOR SDGs: 2.3.1* Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja)										
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan										
Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian	Jumlah Terpal dan Karung yang diadakan	Paket			5	5				Dinas Pertanian
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan										
Pengadaan alat mesin pertanian dan peternakan	Tersedianya alat dan mesin pertanian	Paket			1	1				Dinas Pertanian
Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan										
Penyediaan Sarana Produksi Pertanian Tanaman Pangan	Jumlah Sarana Produksi Pertanian yang di salurkan	Ha			1,000	1,000				Dinas Pertanian
Pengembangan Tanaman Hortikultura	Terlaksananya Pengembangan Hortikultura	Ha			1,000	1,000				Dinas Pertanian
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan										
Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat	Terlaksananya Pengadaan Ternak Besar	Ekor			50	50				Dinas Pertanian
Peningkatan Produksi ternak kecil dan unggas	Terlaksananya Pengadaan Ternak Kecil dan unggas	Ekor			1,500	1,500				Dinas Pertanian

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	BASELINE	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	INSTANSI PELAKSANA
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Program Pengembangan Agribisnis										
Pengembangan Usaha Pertanian dan Peternakan	Penyediaan sarana produksi pertranian dan peternakan	Paket			1	1				Dinas Pertanian
Program Pengembangan Budidaya Perikanan										
Bimbingan Teknis Budidaya Perikanan	Pelatihan Budidaya Kelautan dan Perikanan	%			100%	100%				Dinas Kelautan dan Perikanan
Pembangunan Balai Benih Ikan Air Tawar (BBI)	Tersedianya Kebutuhan Bibit Ikan bagi pembudidaya	%			100%	100%				Dinas Kelautan dan Perikanan
Pengembangan Sarana dan Prasarana Budidaya	Diharapkan Terealisasinya Pengadaan Paket Bantuan kepada Kelompok Pembudidaya	Kelompok			7 kelompok	7 kelompok				Dinas Kelautan dan Perikanan
Pengumpulan dan Pengolahan Data Statistik Budidaya	Tersedianya Data Statistik budidaya	%			100%	100%				Dinas Kelautan dan Perikanan
Fungsionalisasi UPT. Balai Benih Ikan Air Laut (BBIAL) Sangakima	Terlaksananya Operasional dan Fasilitas BBIL Sangkima	%			100%	100%				Dinas Kelautan dan Perikanan
Pengembangan Balai Benih Udang (BBU) Teluk Lombok	Ketersediaan Program Kegiatan UPT. BBU Teluk Lombok	%			100%	100%				Dinas Kelautan dan Perikanan
Program Pengembangan Perikanan Tangkap										

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	BASELIN E	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	INSTANSI PELAKSANA
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Pengadaan Sarana dan Prasarana Alat Tangkap Ikan	Terealisasinya Pengadaan Sarana dan Prasarana Alat Tangkap Ikan	%			100%	100%				Dinas Kelautan dan Perikanan
Pengumpulan dan Pengolahan data Statistik Perikanan Tangkap	Terdatanya sumber daya ikan dan perikanan tangkap	%			100%	100%				Dinas Kelautan dan Perikanan
Pengembangan UPT. Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kenyamukan	Tersedianya fasilitas kegiatan UPT. TPI	%			100%	100%				Dinas Kelautan dan Perikanan
Pengembangan UPT. Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Sangkulirang	Tersedianya fasilitas kegiatan UPT. TPI	%			100%	100%				Dinas Kelautan dan Perikanan
Sosialisasi dan Pelayanan Kartu Nelayan	Teregistrasinya nelayan tangkap yang ada di Kabupaten kutai Timur	%			100%	100%				Dinas Kelautan dan Perikanan
Fasilitas dan Pendampingan Asuransi Nelayan	Tersedianya Jaminan Keselamatan Nelayan	%			100%	100%				Dinas Kelautan dan Perikanan
Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan										
Pengembangan Bibit Unggul Pertanian / Perkebunan	Bertambahnya jumlah bibit perkebunan	Ha			130 Ha	130 Ha				Dinas Perkebunan

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	BASELINE	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	INSTANSI PELAKSANA
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Pengawasan Sarana Produksi	Terawasinya peredaran jumlah jenis, daya guna saprodi	Distributor, Agen/Kios Resmi, Pengecer, Petani Pengguna, Penangkaran dan Perusahaan.			31 Distributor, Agen/Kios Resmi, Pengecer, Petani Pengguna, Penangkaran dan Perusahaan.	31 Distributor, Agen/Kios Resmi, Pengecer, Petani Pengguna, Penangkaran dan Perusahaan.				Dinas Perkebunan
Pemeliharaan Kebun Induk Aren Genjah Kutim	Ditetapkannya kebun induk aren genjah kutim	Pohon			1,050 Pohon	1,050 Pohon				Dinas Perkebunan

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	BASELIN E	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	INSTANSI PELAKSANA
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
INDIKATOR SDGs: 2.5.1* Jumlah varietas unggul tanaman dan hewan untuk pangan yang dilepas.										
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan										
Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat	Terlaksananya Pengadaan Ternak Besar	Ekor			50	50				Dinas Pertanian
INDIKATOR SDGs: 2.5.2* Proporsi hewan ternak dan sejenisnya, diklasifikasikan menurut tingkat risiko kepunahan: berisiko, tidak berisiko, dan risiko yang tidak diketahui.										
Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera										
INDIKATOR SDGs: 3.1.1* Angka Kematian Ibu (AKI).										
Program Perbaikan Gizi Masyarakat										
Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin	Tertanganinya Kasus Ibu Hamil KEK dan Balita Gizi Kurang	Seluruh Kecamatan			100%	100%				Dinas Kesehatan
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak										
Peningkatan Kesehatan Ibu Hamil (Dana Pajak Rokok)	Terlaksananya pertemuan peningkatan kapasitas petugas dalam penanganan ibu hamil dan melahirkan	Orang			110 Orang	120 Orang				Dinas Kesehatan
Program Upaya Kesehatan Masyarakat										
Pengembangan Perinatologi/Rumah Sakit Sayang Ibu	Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Perinatologi/Rumah Sakit Sayang Ibu	%			100%	100%				RSU Kudungga Sangatta
INDIKATOR SDGs: 3.2.2.(b) Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.										
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular										
Peningkatan Imunisasi (Dana Pajak Rokok)	Terlaksananya Peningkatan Program Imunisasi				95%					Dinas Kesehatan

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	BASELIN E	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	INSTANSI PELAKSANA	
			2018	2019	2020	2021	2022	2023			
INDIKATOR SDGs: 3.3.2.(a) Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.											
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular											
Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular (HIV/AIDS, TBC, Hepatitis, Diare, Penemonia, Kusta, Malaria, DBD, Filariasis, Rabies dan Kecacingan)	%	-			90					Dinas Kesehatan
Peningkatan Pengendalian Penyakit Menular Langsung (Dana Pajak Rokok)	Terlaksananya kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit menular Langsung (HIV/AIDS, TBC, Hepatitis, Diare, Penemonia)	%	-			90					Dinas Kesehatan
INDIKATOR SDGs: 3.5.1.(c) Jumlah korban penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti sesuai standar pelayanan.											
Pembangunan Infrastruktur Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah											
Kegiatan Sosialisasi untuk Meminimalisir pengaruh buruk Narkoba dan Kenakalan Remaja						296 SD dan SMP	296 SD dan SMP				Dinas Pendidikan

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	BASELIN E	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	INSTANSI PELAKSANA
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
INDIKATOR SDGs: 3.8.2.(a) Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).										
Program Peningkatan Sistem Jaminan Pemeliharaan Kesehatan										
Penyediaan Biaya JKN (Dana Pajak Rokok)	Tersedia biaya iuran JKN bagi masyarakat miskin	Orang			8000 orang	10000 orang				Dinas Kesehatan
Program Utama Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial										
Jaminan Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Bagi Masyarakat Miskin	Sosialisasi Kepesertaan BPJS Fakir Miskin	Orang			150 orang	150 orang				Dinas Kesehatan
Program Upaya Kesehatan Masyarakat										
Penyediaan Biaya Operasioanl Dana Kapitasi JKN FKTP Sangatta Selatan	Tersedianya Jasa Pelayanan Medis dan Non Medis	Bulan			12	12				Dinas Kesehatan
Penyediaan Biaya Operasioanl Dana Kapitasi JKN FKTP Sangatta Utara	Tersedianya Jasa Pelayanan Medis dan Non Medis	Bulan			12	12				Dinas Kesehatan
Penyediaan Biaya Operasioanl Dana Kapitasi JKN FKTP Karangan	Tersedianya Jasa Pelayanan Medis dan Non Medis	Bulan			12	12				Dinas Kesehatan
Penyediaan Biaya Operasioanl Dana Kapitasi JKN FKTP Muara Bengkal	Tersedianya Jasa Pelayanan Medis dan Non Medis	Bulan			12	12				Dinas Kesehatan
Penyediaan Biaya Operasioanl Dana Kapitasi JKN FKTP Batu Ampar	Tersedianya Jasa Pelayanan Medis dan Non Medis	Bulan			12	12				Dinas Kesehatan
Penyediaan Biaya Operasioanl Dana Kapitasi JKN FKTP Kaubun	Tersedianya Jasa Pelayanan Medis dan Non Medis	Bulan			12	12				Dinas Kesehatan
Penyediaan Biaya Operasioanl Dana Kapitasi JKN FKTP Kongbeng	Tersedianya Jasa Pelayanan Medis dan Non Medis	Bulan			12	12				Dinas Kesehatan

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	BASELIN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	INSTANSI PELAKSANA
			E	2018	2019	2020	2021	2022		
Penyediaan Biaya Operasioanl Dana Kapitasi JKN FKTP Sepaso	Tersedianya Jasa Pelayanan Medis dan Non Medis	Bulan			12	12				Dinas Kesehatan
Penyediaan Biaya Operasioanl Dana Kapitasi JKN FKTP Muara Ancalong	Tersedianya Jasa Pelayanan Medis dan Non Medis	Bulan			12	12				Dinas Kesehatan
Penyediaan Biaya Operasioanl Dana Kapitasi JKN FKTP Long Mesangat	Tersedianya Jasa Pelayanan Medis dan Non Medis	Bulan			12	12				Dinas Kesehatan
Penyediaan Biaya Operasioanl Dana Kapitasi JKN FKTP Busang	Tersedianya Jasa Pelayanan Medis dan Non Medis	Bulan			12	12				Dinas Kesehatan
Penyediaan Biaya Operasioanl Dana Kapitasi JKN FKTP Telen	Tersedianya Jasa Pelayanan Medis dan Non Medis	Bulan			12	12				Dinas Kesehatan
Penyediaan Biaya Operasioanl Dana Kapitasi JKN FKTP Muara Wahau I	Tersedianya Jasa Pelayanan Medis dan Non Medis	Bulan			12	12				Dinas Kesehatan
Penyediaan Biaya Operasioanl Dana Kapitasi JKN FKTP Muara Wahau II	Tersedianya Jasa Pelayanan Medis dan Non Medis	Bulan			12	12				Dinas Kesehatan
Penyediaan Biaya Operasioanl Dana Kapitasi JKN FKTP Sangkulirang	Tersedianya Jasa Pelayanan Medis dan Non Medis	Bulan			12	12				Dinas Kesehatan
Penyediaan Biaya Operasioanl Dana Kapitasi JKN FKTP Sandaran	Tersedianya Jasa Pelayanan Medis dan Non Medis	Bulan			12	12				Dinas Kesehatan
Penyediaan Biaya Operasioanl Dana Kapitasi JKN FKTP Teluk Pandan	Tersedianya Jasa Pelayanan Medis dan Non Medis	Bulan			12	12				Dinas Kesehatan

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	BASELIN E	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	INSTANSI PELAKSANA
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Penyediaan Biaya Operasioanl Dana Kapitasi JKN FKTP Teluk Lingga	Tersedianya Jasa Pelayanan Medis dan Non Medis	Bulan			12	12				Dinas Kesehatan
Penyediaan Biaya Operasioanl Dana Kapitasi JKN FKTP Rantau Pulung	Tersedianya Jasa Pelayanan Medis dan Non Medis	Bulan			12	12				Dinas Kesehatan
Penyediaan Biaya Operasioanl Dana Kapitasi JKN FKTP Kaliorang	Tersedianya Jasa Pelayanan Medis dan Non Medis	Bulan			12	12				Dinas Kesehatan
Penyediaan Biaya Operasioanl Dana Kapitasi JKN FKTP Tepian Baru	Tersedianya Jasa Pelayanan Medis dan Non Medis	Bulan			12	12				Dinas Kesehatan
INDIKATOR SDGs: 3.a.1* Persentase merokok pada penduduk umur <15 tahun.										
Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular										
Penegakan Hukum Dalam Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) (Dana Pajak Rokok)	Seleksi Duta KTR Tingkat SLTP dan SLTA	Sekolah			40 Sekolah	45 Sekolah				Dinas Kesehatan
INDIKATOR SDGs: 3.b.1.(a) Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.										
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan										
Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Belanja Obat obatan dan Bahan Medis Habis Pakai	Paket			1 Paket	1 Paket				Dinas Kesehatan
Program Upaya Kesehatan Masyarakat										
Biaya Operasional dan Pemeliharaan UPTD Instalasi Farmasi Kabupaten	Terlaksananya pengadministrasi dan pengelolaan obat dan alkes habis pakai di instalasi farmasi	Bulan			12	12				Dinas Kesehatan

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	BASELIN E	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	INSTANSI PELAKSANA
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
INDIKATOR SDGs: 3.c.1* Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.										
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan										
Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional Bidang Pengembangan Sumber Daya Kesehatan	Terlaksananya BTCLS untuk Perawat Kesehatan	Orang			26 orang	32 orang				Dinas Kesehatan
Advokasi pemenuhan tenaga kesehatan (Dana Pajak Rokok)	Terlaksananya Advokasi Pemenuhan Tenaga Kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit	Paket			1 Paket	1 Paket				Dinas Kesehatan
Peningkatan SDM kesehatan (Dana Pajak Rokok)	Terlaksananya Diklat PONE, APN, PPGD, Jabfung dan CMHN	Orang			75 orang	85 orang				Dinas Kesehatan
Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas										
INDIKATOR SDGs: 4.1.1.(a) Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.										
Pembangunan Infrastruktur Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah										
Akreditasi Sekolah Dasar (SD)		Sekolah			15	15				Dinas Pendidikan
INDIKATOR SDGs: 4.1.1.(b) Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.										
Pembangunan Infrastruktur Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah										
Akreditasi Sekolah Menengah Pertama (SMP)		Sekolah			15	15				Dinas Pendidikan
INDIKATOR SDGs: 4.1.1.(d) Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.										
PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN										
Kegiatan Pra UNAS dan UNAS SD/MI					220 Sekolah	220 Sekolah				Dinas Pendidikan
Sosialisasi Penerimaan Siswa Baru pada Sekolah Dasar (SD)					188 Sekolah	188 Sekolah				Dinas Pendidikan

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	BASELIN E	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	INSTANSI PELAKSANA
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Peningkatan Kualitas Sekolah dan Pemanfaatan BOSDA Pada Sekolah Dasar					214 Sekolah Dasar	214 Sekolah Dasar				Dinas Pendidikan
Kegiatan Pembinaan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan					214 SD	214 SD				Dinas Pendidikan
INDIKATOR SDGs: 4.1.1.(e) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.										
PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN										
Kegiatan Analisis dan evaluasi pendirian sekolah Baru/Filial (Ijin Operasional Sekolah)	Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Paket B	SD dan SMP								Dinas Pendidikan
PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN										
Kegiatan Pra UNAS dan UNAS SMP/MTs					92 Sekolah	92 Sekolah				Dinas Pendidikan
Peningkatan Kualitas Sekolah dan Pemanfaatan BOSDA Pada Sekolah Menengah Pertama (SMP)					82 Sekolah SMP	82 Sekolah SMP				Dinas Pendidikan
INDIKATOR SDGs: 4.2.2.(a) Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).										
Program Pendidikan Anak Usia Dini										
Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar dan Model Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini	Tersalurnya Bantuan Pendidikan bagi PAUD	Lembaga			43	43				DISDIK

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	BASELIN E	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	INSTANSI PELAKSANA
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
INDIKATOR SDGs: 4.5.1* Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/SMK/MA/ sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.										
Pembangunan Infrastruktur Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah										
Kegiatan Pra UNAS dan UNAS SD/MI						220 Sekolah	220 Sekolah			Dinas Pendidikan
Kegiatan Pra UNAS dan UNAS SMP/MTs						92 Sekolah	92 Sekolah			Dinas Pendidikan
Sosialisasi Penerimaan Siswa Baru pada Sekolah Dasar (SD)						188 Sekolah	188 Sekolah			Dinas Pendidikan
Peningkatan Kualitas Sekolah dan Pemanfaatan BOSDA Pada Sekolah Menengah Pertama (SMP)						82 Sekolah SMP	82 Sekolah SMP			Dinas Pendidikan
Peningkatan Kualitas Sekolah dan Pemanfaatan BOSDA Pada Sekolah Dasar						214 Sekolah Dasar	214 Sekolah Dasar			Dinas Pendidikan
Kegiatan Pembinaan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan						214 SD	214 SD			Dinas Pendidikan
INDIKATOR SDGs: 4.6.1.(a) Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.										
Pembangunan Infrastruktur Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah										
Wajib Belajar Pendidikan Dasar Paket A (Setara SD), Paket B (Setara SMP) dan Paket C (Setara SMA)						239 Tutor	239 Tutor			Dinas Pendidikan

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	BASELIN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	INSTANSI PELAKSANA	
			E	2018	2019	2020	2021	2022			2023
INDIKATOR SDGs: 4.6.1.(b) Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.											
Pembangunan Infrastruktur Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah											
Wajib Belajar Pendidikan Dasar Paket A (Setara SD), Paket B (Setara SMP) dan Paket C (Setara SMA)						239 Tutor	239 Tutor				Dinas Pendidikan
INDIKATOR SDGs: 4.a.1* Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).											
Program Peningkatan Sarana dan Prasaran Aparatur											
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor						12 Bulan					Dinas Pendidikan
Digital Learning						2 Sekolah					Dinas Pendidikan
Pengelolaan Dapodik						695 Sekolah TK, SD dan SMP					Dinas Pendidikan
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						250 Motor Dinas, 3 Unit Mobil					Dinas Pendidikan
Pengadaan Komputer Client dan Server UNBK (Ujian Nasional Berbasis Komputer) SMPN 1											Dinas Pendidikan
Pengadaan Komputer Client dan Server UNBK (Ujian Nasional Berbasis Komputer) SMPN 2											Dinas Pendidikan
Pengadaan Komputer Client dan Server UNBK (Ujian Nasional Berbasis Komputer) SMPN 1											Dinas Pendidikan

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	BASELIN E	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	INSTANSI PELAKSANA
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Pengadaan Komputer Client dan Server UNBK (Ujian Nasional Berbasis Komputer) SMPN 2										Dinas Pendidikan
Pengadaan Komputer Client dan Server UNBK (Ujian Nasional Berbasis Komputer) MTSN 2										Dinas Pendidikan
Pengadaan Komputer Client dan Server UNBK (Ujian Nasional Berbasis Komputer) SMPN 1										Dinas Pendidikan
Pengadaan Komputer Client dan Server UNBK (Ujian Nasional Berbasis Komputer) SMPN 1										Dinas Pendidikan
Pengadaan Komputer Client dan Server UNBK (Ujian Nasional Berbasis Komputer) SMPN 1										Dinas Pendidikan
Pengadaan Komputer Client dan Server UNBK (Ujian Nasional Berbasis Komputer) SMPN 4										Dinas Pendidikan
Pengadaan Komputer Client dan Server UNBK (Ujian Nasional Berbasis Komputer) SMPN 1										Dinas Pendidikan
Pengadaan Komputer Client dan Server UNBK (Ujian Nasional Berbasis Komputer) SMPN 1										Dinas Pendidikan

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	BASELINE	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	INSTANSI PELAKSANA
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Pengadaan Komputer Client dan Server UNBK (Ujian Nasional Berbasis Komputer) SMPN 1										Dinas Pendidikan
Pengadaan Komputer Client dan Server UNBK (Ujian Nasional Berbasis Komputer) SMPN 1										Dinas Pendidikan
Pengadaan Komputer Client dan Server UNBK (Ujian Nasional Berbasis Komputer) SMPN 1										Dinas Pendidikan
Pengadaan Komputer Client dan Server UNBK (Ujian Nasional Berbasis Komputer) SMPN 1										Dinas Pendidikan
Pengadaan Komputer Client dan Server UNBK (Ujian Nasional Berbasis Komputer) SMPN 1										Dinas Pendidikan
INDIKATOR SDGs: 4.c.1* Persentase guru (TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang)bersertifikat pendidik										
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan										
Pendampingan Sertifikasi Guru	Terlaksananya Data Calon Penerima Tunjangan Profesi	Laporan			1	1				Dinas Pendidikan
Rekonsiliasi Sertifikasi Guru		Laporan			1	1				Dinas Pendidikan

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	BASELIN E	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	INSTANSI PELAKSANA
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Tujuan 5 Kesetaraan Gender										
INDIKATOR SDGs: 5.1.1* Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.										
Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan										
Workshop peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan	Meningkatkan wawasan akan pentingnya peran perempuan dalam pengambilan keputusan di lembaga pemerintah	OPD/ASN			OPD/ASN	OPD/ASN				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Pendidikan politik bagi perempuan	Meningkatnya wawasan partai politik tentang keterlibatan perempuan dalam politik	Parpol			Parpol	Parpol				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Sosialisasi pelebagaan Pengarusutamaan Gender dan pemberdayaan perempuan bidang sosial, politik, budaya dan hukum	Meningkatnya wawasan masyarakat akan pentingnya keterlibatan perempuan dalam bidang sosial, politik, budaya dan hukum	Masyarakat			Masyarakat	Masyarakat				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Sosialisasi UU Parpol dan kaitannya dengan 30% keterwakilan perempuan	Meningkatkan kesadaran parpol untuk meningkatkan jumlah keterwakilan perempuan	Parpol			Parpol	Parpol				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	BASELIN E	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	INSTANSI PELAKSANA
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Sosialisasi dan advokasi kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan	Meningkatkan pemahaman para pekerja tentang pentingnya perlindungan bagi tenaga kerja perempuan	Pekerja Perempuan			50 Pekerja Perempuan	50 Pekerja Perempuan				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Pengembangan KIE pencegahan kekerasan terhadap perempuan melalui TV, Media cetak, pemasangan baliho dan layanan masyarakat	Pelayanan informasi tentang kesetaraan gender	Buah			10 Buah	10 Buah				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Penanganan kasus korban kekerasan terhadap perempuan dan anak	Persentase penyelesaian penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	%			100%	100%				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Penyediaan layanan sarana dan prasarana penunjang pelayanan pengaduan rujukan lanjutan (layanan kesehatan, rehabilitasi sosial, bantuan hukum, serta reintegrasi sosial dan pemulangan) bagi korban kekerasan	Pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak	%			100%	100%				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	BASELIN E	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	INSTANSI PELAKSANA
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Perlindungan hak perempuan dari tindak kekerasan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	Terpenuhinya hak perempuan						100%			Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Penyusunan Perda Pengarusutamaan Gender	Tersusunnya Perda Pengarusutamaan Gender	Kebijakan			Kebijakan	Kebijakan				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Advokasi pembangunan fasilitas difabel di tempat umum										Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Pembinaan dan pembentukan model desa prima	Terbentuknya desa prima	desa			10 desa	10 desa				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Evaluasi dan monitoring desa prima	Monev desa prima	desa			10 desa	10 desa				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	BASELIN E	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	INSTANSI PELAKSANA
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Pameran hasil karya perempuan bidang pembangunan	Partisipasi perempuan dalam pembangunan	kali			2 kali	2 kali				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Pelatihan perempuan di pedesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif	Partisipasi perempuan dalam pembangunan	kali			1 kali	1 kali				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
INDIKATOR SDGs: 5.2.1* Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.										
Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan										
Pengembangan KIE pencegahan kekerasan terhadap perempuan melalui TV, Media cetak, pemasangan baliho dan layanan masyarakat	Pelayanan informasi tentang kesetaraan gender	Buah			10 Buah	10 Buah				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Penanganan kasus korban kekerasan terhadap perempuan dan anak	Persentase penyelesaian penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	%			100%	100%				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	BASELIN E	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	INSTANSI PELAKSANA
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Penyediaan layanan sarana dan prasarana penunjang pelayanan pengaduan rujukan lanjutan (layanan kesehatan, rehabilitasi sosial, bantuan hukum, serta reintegrasi sosial dan pemulangan) bagi korban kekerasan	Pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak	%			100%	100%				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Perlindungan hak perempuan dari tindak kekerasan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	Terpenuhinya hak perempuan	%				100%				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program Perlindungan Anak										
Pendampingan anak korban kekerasan	Penanganan anak korban kekerasan	%			100	100				Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
INDIKATOR SDGs: 5.2.1.(a) Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.										
Program Perlindungan Anak										

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	BASELIN E	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	INSTANSI PELAKSANA
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Pendampingan anak korban kekerasan	Penanganan anak korban kekerasan	%			100	100				Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
INDIKATOR SDGs: 5.5.1* Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.										
Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan										
Pendidikan politik bagi perempuan	Meningkatnya wawasan partai politik tentang keterlibatan perempuan dalam politik	Parpol								Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Sosialisasi pelebagaan Pengarusutamaan Gender dan pemberdayaan perempuan bidang sosial, politik, budaya dan hukum	Meningkatnya wawasan masyarakat akan pentingnya keterlibatan perempuan dalam bidang sosial, politik, budaya dan hukum	Masyarakat								Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	BASELINE	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	INSTANSI PELAKSANA
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Sosialisasi UU Parpol dan kaitannya dengan keterwakilan perempuan	Meningkatkan kesadaran parpol untuk meningkatkan jumlah keterwakilan perempuan 30%	Parpol								Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Tujuan 6 Air Kebersihan dan Sanitasi Layak										
INDIKATOR SDGs: 6.1.1.(a) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.										
Program Pembangunan Infrastruktur Keciaptakaryaan										
Pembangunan Peningkatan dan Perbaikan Sistem Penyediaan Air Minum Perdesaan	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan sarana prasarana air bersih	Kecamatan			13	13				DPMPD
Program Penyediaan Air Bersih dan Air Minum										
Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih (PAMSIMAS)										Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih (PASCA PAMSIMAS)										Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	BASELIN E	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	INSTANSI PELAKSANA
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
INDIKATOR SDGs: 6.2.1.(c) Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).										
Program Pengembangan Lingkungan Sehat										
Peningkatan Lingkungan	Pengawasan Terlaksananya Pemicuan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dalam rangka dukungan PAM - STBM, Terlaksananya Study EHRA dalam rangka dukungan kegiatan PPSP, Tersedianya Alat Sanitary Kit	%			70	70				Dinas Kesehatan
INDIKATOR SDGs: 6.3.2.(b) Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.										
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup										
Penghijauan di area sempadan sungai (DBH-DR)	Terkonservasinya sempadan sungai	Ha			100	100				Dinas Lingkungan Hidup
Pemantauan kualitas air sungai	Tersedianya data kualitas air sungai	Dokumen			1	1				Dinas Lingkungan Hidup
Program Peningkatan Pengendalian Polusi										
Penetapan kelas air	Tersedianya penetapan kelas air	Dokumen			1	1				Dinas Lingkungan Hidup
Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau										
INDIKATOR SDGs: 7.1.1* Rasio elektrifikasi.										
Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana, dan Prasarana Daerah										

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	BASELIN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	INSTANSI PELAKSANA
			E	2018	2019	2020	2021	2022		
Penyusunan Laporan Rasio Elektrifikasi di Kutai Timur	Penggunaan Listrik PLN dan Non PLN Dri Desa	Se - Kecamatan Kutim								Dinas Penanaman Modal dan PTSP

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	BASELIN E	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	INSTANSI PELAKSANA
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
INDIKATOR SDGs: 7.2.1* Bauran energi terbarukan.										
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi										
Pengembangan Energi Alternatif	Terpenuhinya Kebutuhan Listrik Desa Terpencil dan Data Potensi Daerah Energi Baru Terbuka									Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana, dan Prasarana Daerah										
Sosialisasi Perijinan dan Penghematan Energi Bidang Kelistrikan	Pemahaman peraturan/regulasi yang berlaku bidang kelistrikan dan terlaksananya penghemat energi				20 desa					Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Program Pengembangan Data / Informasi										
Pemetaan Sumber Energi Listrik Alternatif/Terbuka	Terpetakannya Potensi Sumber Energi Listrik Alternatif									Sekretariat Daerah
Identifikasi Koordinasi Energi Alternatif Kab. Kutim	Teridentifikasi Energi Alternatif Kab.Kutai Timur				1 Dokumen	1 Dokumen				Sekretariat Daerah
Identifikasi Koordinasi Energi Alternatif Kab. Kutim	Teridentifikasi Energi Alternatif Kab.Kutai Timur				1 Dokumen	1 Dokumen				Sekretariat Daerah
Program Perencanaan Pembangunan Daerah										
Perencanaan Energi Alternatif dan Energi Baru Terbarukan	Tersedianya Data Perencanaan Pengembangan Potensi Listrik Energi Baru Terbarukan				6 Paket	6 Paket				Sekretariat Daerah

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	BASELIN E	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	INSTANSI PELAKSANA
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi										
INDIKATOR SDGs: 8.2.1* Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun										
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi										
Kajian Pertumbuhan Ekonomi	Penyusunan Dokumen Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kutai timur	Dokumen			1					Bappeda
INDIKATOR SDGs: 8.3.1.(c) Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan										
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah										
Bantuan Sarana UMKM	Tersedianya bantuan sarana UMKM dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas produk UMKM	Paket			1 Paket	1 Paket				Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
INDIKATOR SDGs: 8.9.1* Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB										
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata										
Pemetaan Destinasi Wisata	Terlaksananya Pemetaan Destinasi Wisata Kabupaten Kutai Timur	Dokumen			1 Dokumen	1 Dokumen				Dinas Pariwisata
Perencanaan Pengembangan Wisata	Terlaksananya Perencanaan Wisata	Dokumen			1 Dokumen	1 Dokumen				Dinas Pariwisata
Perencanaan dan Pengembangan Wisata di Pembangkit Listrik Tenaga Hidro Jiwata	Terlaksananya Perencanaan Wisata	Dokumen			1 Dokumen	1 Dokumen				Dinas Pariwisata
Pembenahan, Pembangunan dan Pemeliharaan Obyek-Obyek Wisata Dalam Kawasan Wisata Unggulan Daerah	Jumlah Obyek Wisata yang Dikembangkan	Kegiatan			3 Kegiatan	3 Kegiatan				Dinas Pariwisata

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	BASELIN E	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	INSTANSI PELAKSANA
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	Dibangunnya Fasilitas Umum dan Terpeliharanya fasilitas dalam kawasan Wisata	5			5	5				Dinas Pariwisata
Pembuatan Kolam Pemandian Air Panas	Dibangunnya Fasilitas Umum dan Terpeliharanya fasilitas dalam kawasan Wisata	Paket			1 Paket	1 Paket				Dinas Pariwisata
Pembenahan Obyek-obyek Wisata Daerah	Diharapkan Terbenahnya Obyek Wisata di Kutai Timur	Gajebo			9 Gajebo	9 Gajebo				Dinas Pariwisata
Program Pengembangan Usaha Produk Pariwisata										
Workshop Pengembangan dan Pengemasan Produk Pariwisata	Terlaksananya pelatihan bagi masyarakat dan kelompok usaha produk kerajinan (Workshop Pengemasan Produk)	Paket			1 Paket	1 Paket				Dinas Pariwisata

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	BASELIN E	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	INSTANSI PELAKSANA
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
INDIKATOR SDGs: 8.9.1.(a) Jumlah wisatawan mancanegara										
Program Pengembangan Usaha Jasa Pariwisata										
Sosialisasi Tanda Daftar Usaha Pariwisata	Terlaksananya sosialisasi TDUP sebagai bahan informasi bagi masyarakat pelaku usaha jasa pariwisata untuk mengetahui persyaratan dalam mendirikan usaha jasa pariwisata di Kabupaten Kutai Timur				50 Orang	50 Orang				Dinas Pariwisata
Pemutakhiran data usaha Jasa Pariwisata	Terlaksananya Pendataan usaha jasa pariwisata yang ada di Kabupaten Kutai Timur dan untuk mendapatkan laporan yang dapat dipertanggung jawabkan ke atasan				18 Kecamatan	18 Kecamatan				Dinas Pariwisata
Pemuktahiran Data Laporan Perkembangan kunjungan konsumen di bidang usaha jasa pariwisata	Terlaksananya pendataan kunjungan konsumen usaha jasa pariwisata dan untuk mendapatkan laporan yang dapat dipertanggung jawabkan				18 Kecamatan	18 Kecamatan				Dinas Pariwisata

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	BASELIN E	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	INSTANSI PELAKSANA
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Pelatihan Table Manner	Meningkatkan Pengetahuan Pejabat dilingkungan pemerintah Kabupaten Kutai Timur tentang tata cara makan formal dalam jamuan makan				50 Orang	50 Orang				Dinas Pariwisata
Pemuktahiran Data Base Produk Produk Kerajinan dan Produk Olahan yang ada di KUTIM	Tersedianya data Produk Kerajinan dan Produk olahan yang ada di KUTIM				1 Paket	1 Paket				Dinas Pariwisata
	Terlaksananya Pelatihan pembuatan Produk Pariwisata Terpadu (Obyek dan day tarik wisata, jasa travel agent, jasa perusahaan angkutan, jasa pelayanan akomodasi, restaurant, rekreasi dan Hiburan, jasa souvenir (cenderamata) dan jasa perusahaan pendukung				1 Paket	1 Paket				Dinas Pariwisata
INDIKATOR SDGs: 8.9.1.(b) Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.										
Program Pengembangan Kemitraan										

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	BASELIN E	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	INSTANSI PELAKSANA
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Peningkatan Masyarakat Pengembangan Pariwisata	Peranserta dalam Kemitraan	Sosialisasi / Seminar / Lokalkarya / pelatihan			100	100				Dinas Pariwisata
Pelaksanaan Pembangunan Pariwisata	Koordinasi Kemitraan	Rapat dan Koordinasi			100	100				Dinas Pariwisata
Pelaksanaan Lomba POKDARWIS (Kelompok Sadar Wisata) tingkat Kabupaten Kutai Timur		Pelaksanaan Lomba POKDARWIS di tingkat Kabupaten			15 Pokdarwis	15 Pokdarwis				Dinas Pariwisata
Sosialisasi Sadar Wisata dan Aksi Penerapan Sapta Pesona di Kutai Timur		Terlaksananya Sosialisasi Sadar Wisata dan aksi Sapta Pesona bagi Pelajar, Masyarakat dan Komunitas Pecinta Pariwisata di Kutai Timur			200 Peserta	200 Peserta				Dinas Pariwisata
Sosialisasi Kelompok Sadar Wisata		Terlaksananya Sosialisasi Sadar Wisata dan aksi Sapta Pesona bagi Pelajar, Masyarakat dan Komunitas Pecinta Pariwisata di Kutai Timur			1 Paket	1 Paket				Dinas Pariwisata

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	BASELIN E	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	INSTANSI PELAKSANA
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Sosialisasi Pokdarwis	Terlaksananya Sosialisasi Sadar Wisata dan aksi Sapta Pesona bagi Pelajar, Masyarakat dan Komunitas Pecinta Pariwisata di Kutai Timur				1 Paket	1 Paket				Dinas Pariwisata
Sosialisasi Pokdarwis	Terlaksananya Sosialisasi Sadar Wisata dan aksi Sapta Pesona bagi Pelajar, Masyarakat dan Komunitas Pecinta Pariwisata di Kutai Timur				1 Paket	1 Paket				Dinas Pariwisata
Pembinaan Potensi Masyarakat POKDARWIS (Kelompok Sadar Wisata) yang ada di Kutai Timur	Bimbingan terhadap tugas dan fungsi Kelompok sadar Wisata				15 Pokdarwis	15 Pokdarwis				Dinas Pariwisata
Pelatihan Pokdarwis	Bimbingan terhadap tugas dan fungsi Kelompok sadar Wisata				1 Paket	1 Paket				Dinas Pariwisata
Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Wisata	Rapat dan Koordinasi				100	100				Dinas Pariwisata
Peningkatan SDM POKDARWIS dengan Lembaga Lainnya	Tersedianya SDM Pokdarwis yang Berhasil				15 Pokdarwis	15 Pokdarwis				Dinas Pariwisata
Pelatihan Keterampilan Pembuatan Souvenir Pokdarwis Rt. 06	Tersedianya SDM Pokdarwis yang Berhasil				1 Pokdarwis	1 Pokdarwis				Dinas Pariwisata

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	BASELIN	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	INSTANSI PELAKSANA
			E	2018	2019	2020	2021	2022		
Pelatihan Keterampilan Pembuatan Souvenir dan Penerima Tamu Pokdarwis	Tersedianya SDM Pokdarwis yang Berhasil				1 Pokdarwis	1 Pokdarwis				Dinas Pariwisata
Pelatihan Guide Lokal Pokdarwis	Tersedianya SDM Pokdarwis yang Berhasil				1 Pokdarwis	1 Pokdarwis				Dinas Pariwisata
Pelatihan Kelompok Sadar Wista	Tersedianya SDM Pokdarwis yang Berhasil				1 Pokdarwis	1 Pokdarwis				Dinas Pariwisata
Pembinaan Keterampilan Anggota Satuan Karya Pramuka Pariwisata	Terbentuknya Forum-Forum komunikasi antar pelaku industri Pariwisata									
Tujuan 9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur										
INDIKATOR SDGs: 9.1.1.(a) Kondisi mantap jalan Provinsi										
Program Pembangunan Jalan										
INDIKATOR SDGs: 9.1.2.(a) Jumlah bandara.										
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan										
Pembangunan Bandara Sangkima (Multiyears)										Dinas Perhubungan
INDIKATOR SDGs: 9.1.2.(c) Jumlah pelabuhan strategis.										
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan										
Pembangunan Pelabuhan Sangatta (Multiyears)	Jumlah fasilitas penunjang pelabuhan yang akan dibangun									Dinas Perhubungan
INDIKATOR SDGs: 9.2.1* Proporsi nilai tambah sektor industri pengolahan non migas terhadap PDB dan perkapita.										
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM										

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	BASELIN E	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	INSTANSI PELAKSANA
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Penyelenggaraan pelatihan Kewirausahaan	Terselenggaranya pelatihan kewirausahaan dibidang industri, jasa, perdagangan dan kerajinan	Orang			30	30				Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri										
Penyediaan Sarana dan Prasarana Klinik Kemasan	Tersedianya Klinik Kemasan	Sarana			1	1				Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Penyediaan Sarana Prasarana dan Pengadaan Mesin/Peralatan Industri Kecil Menengah	Jumlah pelaku IKM yang mendapatkan fasilitas peralatan dan mesin yang memadai	IKM			80	80				Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Program Peningkatan dan Pengembangan Industri Olahan Non Migas										
Monitoring dan Evaluasi terhadap Produk Olahan Non Migas, Migas Dan Tambang	Dokumen hasil monitoring produk olahan non migas, migas dan tambang	Dokumen Laporan			2	2				Dinas Perindustrian dan Perdagangan
INDIKATOR SDGs: 9.4.1.(a) Persentase Perubahan Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca.										
Program Peningkatan Pengendalian Polusi										
Pemantauan evaluasi dan pelaporan penurunan emisi GRK	Tersedianya dokumen penurunan emisi	Dokumen			1	1				Dinas Lingkungan Hidup
Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan										
INDIKATOR SDGs: 10.1.1.(c) Jumlah desa tertinggal										
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa										

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	BASELIN E	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	INSTANSI PELAKSANA
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Fasilitasi pencahangan BBGRM dan HKG PKK	Terlaksananya fasilitasi pencahangan BBGRM dan HKG PKK				1 kegiatan	1 kegiatan				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
Rapat koordinasi para pemangku kepentingan	Terlaksananya kegiatan rapat koordinasi				1 kegiatan	1 kegiatan				
Fasilitasi Tentara Manunggal Masuk Desa (TMMD).	Terfasilitasinya kegiatan TMMD.				1 kegiatan	1 kegiatan				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	BASELIN E	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	INSTANSI PELAKSANA
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa										
Fasilitasi pencaangan BBGRM dan HKG PKK	Terlaksananya fasilitasi pencaangan BBGRM dan HKG PKK				1 kegiatan	1 kegiatan				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
Rapat koordinasi para pemangku kepentingan	Terlaksananya kegiatan rapat koordinasi				1 kegiatan	1 kegiatan				
Fasilitasi Tentara Manunggal Masuk Desa (TMMD).	Terfasilitasinya kegiatan TMMD.				1 kegiatan	1 kegiatan				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
Program Peduli Desa Gerakan Pembangunan Desa Mandiri Terpadu (GERBANG MADU)										
Pembangunan Peningkatan dan Perbaikan Sistem Penyediaan Air Minum Perdesaan	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan sarana prasarana air bersih	Kecamatab			13 Kec	13 Kec				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
Kemandirian Air Bersih Perdesaan		Kecamatab			18 kecamatan	18 kecamatan				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	BASELIN E	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	INSTANSI PELAKSANA
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Fasilitasi pengelolaan listrik desa	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan sarana prasarana listrik desa	Desa			5 desa	5 desa				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
Fasilitasi sarana dan prasarana kesehatan dasar	Tersedianya sarana dan prasarana kesehatan dasar	Kegiatan			1 kegiatan	1 kegiatan				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
INDIKATOR SDGs: 10.3.1.(a) Aspek Kebebasan Sipil dalam Indeks Demokrasi Indonesia										
Program Penguatan Peraturan Perundang-undangan dan Kapasitas Kelembagaan										
Pemutakhiran data ormas, LSM, OKP paguyuban										Badan Kesatuan Bangsa dan
Tujuan 11 Kota dan Pemukiman Yang Berkelanjutan										
INDIKATOR SDGs: 11.1.1.(a). Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.										
Program Perencanaan Perumahan dan Kawasan Pemukiman										
Operasional Tim Pendamping Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Kutai Timur										Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Perencanaan Bidang Perumahan										Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Perencanaan Bidang Kawasan Permukiman										Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	BASELINE	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	INSTANSI PELAKSANA
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
INDIKATOR SDGs: 11.5.1*. Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.										
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam										
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana Daerah	Terpenuhinya Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana Daerah				100%	100%				Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Simulasi Penanggulangan Bencana Alam	Terpenuhinya Simulasi Penanggulangan Bencana Alam				8 Desa	8 Desa				Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Pencegahan dan Penyebarluasan Informasi Peringatan Dini Bencana	Tercapainya Pencegahan dan Penyebarluasan Informasi Peringatan Dini Bencana				1 Paket	1 Paket				Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Evaluasi dan Monitoring Pasca Bencana Penanggulangan Bencana Daerah	Terpenuhinya Evaluasi dan Monitoring Pasca Bencana Penanggulangan Bencana Daerah				100%	100%				Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Penyusunan Pedoman Manajemen Bencana	Terpenuhinya Dokumen KRB dan RPB				2 Dokumen	2 Dokumen				Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Pemasangan EWS di KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan	Terpenuhinya Pemasangan EWS di KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan				100%	100%				Badan Penanggulangan Bencana Daerah

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	BASELIN E	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	INSTANSI PELAKSANA
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Penyusunan Rencana Kontijensi Bencana di Kawasan KEK Maloy Batuta	Terpenuhinya Penyusunan Rencana Kontijensi Bencana di Kawasan KEK Maloy Batuta				100%	100%				Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Pemasangan Rambu dan Papan Informasi Kebencanaan di KEK Maloy Batuta	Terpenuhinya Pemasangan Rambu dan Papan Informasi Kebencanaan di KEK Maloy Batuta				100%	100%				Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Pelatihan Penyusunan Base Line dan Kerugian Akibat Bencana	Terpenuhinya Pelatihan Penyusunan Base Line dan Kerugian Akibat Bencana				100%	100%				Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan				100%	100%				Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Penyusunan Pedoman Manajemen Bencana	Terpenuhinya Dokumen KRB dan RPB				2 Dokumen	2 Dokumen				Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Pencegahan dan Penyebarluasan informasi Peringatan Dini Bencana (Fasilitasi Informasi Bencana Daerah)	Terpenuhinya Pencegahan dan Penyebarluasan informasi Peringatan Dini Bencana (Fasilitasi Informasi Bencana Daerah)				100%	100%				Badan Penanggulangan Bencana Daerah

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	BASELIN E	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	INSTANSI PELAKSANA
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Dokumen Kontigensi Bencana Kabupaten	Terpenuhinya Dokumen Kontigensi Bencana Kabupaten				1 Dokumen	1 Dokumen				Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Penguatan Kelembagaan BPBD Kabupaten Kutai Timur	Terlaksananya Kerjasama Antara Pemerintah, Dunia Usaha dan Masyarakat				100%	100%				Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Penyiapan Posko Penanganan Bencana	Tersedianya Penyiapan Posko Penanganan Bencana				6 Kecamatan	6 Kecamatan				Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Peningkatan Sarana dan Prasarana Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Terpenuhinya Peningkatan Sarana dan Prasarana Rehabilitasi dan Rekonstruksi				100%	100%				Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sosialisasi Pengurangan Risiko Bencana	Terpenuhinya Sosialisasi Pengurangan Risiko Bencana				100%	100%				Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Fasilitasi dan Pengembangan Desa Tangguh Bencana	Terpenuhinya Fasilitasi dan Pengembangan Desa Tangguh Bencana				6 Desa	6 Desa				Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Pembentukan dan Pengembangan Relawan	Terpenuhinya Pembentukan dan Pengembangan Relawan				6 Desa	6 Desa				Badan Penanggulangan Bencana Daerah

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	BASELIN E	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	INSTANSI PELAKSANA
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Banjir	Terlaksananya Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Banjir				100%	100%				Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Pelatihan Kader Desa Siaga	Terpenuhinya Pelatihan Kader Desa Siaga				1 Paket	1 Paket				Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Bantuan Penanggulangan Bencana dan Musibah	Tersedianya Bantuan Penanggulangan Bencana dan Musibah				1 Paket	1 Paket				Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Pembentukan Kelompok Penanggulangan Bencana di Tingkat Desa dan Kecamatan	Terpenuhinya Pembentukan Kelompok Penanggulangan Bencana di Tingkat Desa dan Kecamatan				4 Desa	4 Desa				Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Fasilitasi Pusat Pengendalian dan Operasional (Pusdalops) Penanggulangan Bencana	Terpenuhinya Fasilitasi Pusat Pengendalian dan Operasional (Pusdalops) Penanggulangan Bencana				100%	100%				Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Peringatan Dini dan Aplikasi Sistem Peringatan Bahaya Kebakaran atau Sejenisnya	Terpenuhinya Peringatan Dini dan Aplikasi Sistem Peringatan Bahaya Kebakaran atau Sejenisnya				100%	100%				Badan Penanggulangan Bencana Daerah

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	BASELINE	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	INSTANSI PELAKSANA
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Peningkatan SDM Bidang Kedaruratan, Logistik dan Peralatan	Terpenuhinya Peningkatan SDM Bidang Kedaruratan, Logistik dan Peralatan				100%	100%				Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Pengadaan Logistik Kebencanaan	Terpenuhinya Pengadaan Logistik Kebencanaan				1 Paket	1 Paket				Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Rehabilitasi dan Peningkatan Sosial Ekonomi Pasca Bencana	Jumlah Penduduk/Masyarakat Yang Terdampak Sosial Ekonomi Pasca Bencana				100%	100%				Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Bantuan Rekonstruksi Pasca Bencana	Terpenuhinya Bantuan Rekonstruksi Pasca Bencana				100%	100%				Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Pemulihan Psiko Sosial Korban Bencana	Terpenuhinya Pemulihan Psiko Sosial Korban Bencana				100%	100%				Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Monitoring, Pelaksanaan Evaluasi Rekonstruksi Daerah Terkena Bencana	Terpenuhinya Monitoring, Evaluasi Pelaksanaan Rekonstruksi Daerah Terkena Bencana				100%	100%				Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Rehab/Rekon Sosial Ekonomi Pasca Bencana	Terpenuhinya Rehab/Rekon Sosial Ekonomi Pasca Bencana				100%	100%				Badan Penanggulangan Bencana Daerah

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	BASELIN E	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	INSTANSI PELAKSANA
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)	Terpenuhinya Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)				1 Dokumen	1 Dokumen				Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Penyusunan dan Inventarisir Resiko Bencana Daerah, Peta Rawan Bencana Termasuk Prosedur Tetap Penanganan	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Kajian Resiko Bencana				1 Dokumen	1 Dokumen				Badan Penanggulangan Bencana Daerah
INDIKATOR SDGs: 11.5.1.(c). Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.										
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam										
Simulasi Penanggulangan Bencana Alam	Terpenuhinya Simulasi Penanggulangan Bencana Alam				8 Desa	8 Desa				Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Pencegahan dan Penyebarluasan Informasi Peringatan Dini Bencana	Tercapainya Pencegahan dan Penyebarluasan Informasi Peringatan Dini Bencana				1 Paket	1 Paket				Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Penyusunan Pedoman Manajemen Bencana	Terpenuhinya Dokumen KRB dan RPB				2 Dokumen	2 Dokumen				Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Pemasangan EWS di KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan	Terpenuhinya Pemasangan EWS di KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan				100%	100%				Badan Penanggulangan Bencana Daerah

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	BASELIN E	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	INSTANSI PELAKSANA
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Penyusunan Rencana Kontijensi Bencana di Kawasan KEK Maloy Batuta	Terpenuhinya Penyusunan Rencana Kontijensi Bencana di Kawasan KEK Maloy Batuta				100%	100%				Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Pemasangan Rambu dan Papan Informasi Kebencanaan di KEK Maloy Batuta	Terpenuhinya Pemasangan Rambu dan Papan Informasi Kebencanaan di KEK Maloy Batuta				100%	100%				Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Pelatihan Penyusunan Base Line dan Kerugian Akibat Bencana	Terpenuhinya Pelatihan Penyusunan Base Line dan Kerugian Akibat Bencana				100%	100%				Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan				100%	100%				Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Penyusunan Pedoman Manajemen Bencana	Terpenuhinya Dokumen KRB dan RPB				2 Dokumen	2 Dokumen				Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Pencegahan dan Penyebarluasan informasi Peringatan Dini Bencana (Fasilitasi Informasi Bencana Daerah)	Terpenuhinya Pencegahan dan Penyebarluasan informasi Peringatan Dini Bencana (Fasilitasi Informasi Bencana Daerah)				100%	100%				Badan Penanggulangan Bencana Daerah

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	BASELIN E	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	INSTANSI PELAKSANA
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Dokumen Kontigensi Bencana Kabupaten	Terpenuhinya Dokumen Kontigensi Bencana Kabupaten				1 Dokumen	1 Dokumen				Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Penyiapan Posko Penanganan Bencana	Tersedianya Penyiapan Posko Penanganan Bencana				6 Kecamatan	6 Kecamatan				Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Peningkatan Sarana dan Prasarana Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Terpenuhinya Peningkatan Sarana dan Prasarana Rehabilitasi dan Rekonstruksi				100%	100%				Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sosialisasi Pengurangan Risiko Bencana	Terpenuhinya Sosialisasi Pengurangan Risiko Bencana				100%	100%				Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Fasilitasi dan Pengembangan Desa Tangguh Bencana	Terpenuhinya Fasilitasi dan Pengembangan Desa Tangguh Bencana				6 Desa	6 Desa				Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Pembentukan dan Pengembangan Relawan	Terpenuhinya dan Pembentukan dan Pengembangan Relawan				6 Desa	6 Desa				Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Banjir	Terlaksananya Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Banjir				100%	100%				Badan Penanggulangan Bencana Daerah

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	BASELINE	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	INSTANSI PELAKSANA
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Pelatihan Kader Desa Siaga	Terpenuhinya Pelatihan Kader Desa Siaga				1 Paket	1 Paket				Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Bantuan Penanggulangan Bencana dan Musibah	Tersedianya Bantuan Penanggulangan Bencana dan Musibah				1 Paket	1 Paket				Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Pembentukan Kelompok Penanggulangan Bencana di Tingkat Desa dan Kecamatan	Terpenuhinya Pembentukan Kelompok Penanggulangan Bencana di Tingkat Desa dan Kecamatan				4 Desa	4 Desa				Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Fasilitasi Pusat Pengendalian dan Operasional (Pusdalops) Penanggulangan Bencana	Terpenuhinya Fasilitasi Pusat Pengendalian dan Operasional (Pusdalops) Penanggulangan Bencana				100%	100%				Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Peringatan Dini dan Aplikasi Sistem Peringatan Bahaya Kebakaran atau Sejenisnya	Terpenuhinya Peringatan Dini dan Aplikasi Sistem Peringatan Bahaya Kebakaran atau Sejenisnya				100%	100%				Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Peningkatan SDM Bidang Kedaruratan, Logistik dan Peralatan	Terpenuhinya Peningkatan SDM Bidang Kedaruratan, Logistik dan Peralatan				100%	100%				Badan Penanggulangan Bencana Daerah

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	BASELINE	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	INSTANSI PELAKSANA
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)	Terpenuhinya Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)				1 Dokumen	1 Dokumen				Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Penyusunan dan Inventarisir Resiko Bencana Daerah, Peta Rawan Bencana Termasuk Prosedur Tetap Penanganan	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Kajian Resiko Bencana				1 Dokumen	1 Dokumen				Badan Penanggulangan Bencana Daerah
INDIKATOR SDGs: 11.6.1.(a). Persentase sampah perkotaan yang tertangani.										
Program Pengelolaan Sampah dan Limbah B3										
Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Tersedianya sapras persampahan				30 Unit	30 Unit				Dinas Lingkungan Hidup
Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan	Menurunnya volume sampah				20 RT	20 RT				Dinas Lingkungan Hidup
Operasional TPA, pengelolaan limbah domestic dan lumpur tinja	Terpenuhinya SKP TPA				100%	100%				Dinas Lingkungan Hidup
Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan Sangatta Utara	Terpeliharanya sapras persampahan				5 Unit	5 Unit				Dinas Lingkungan Hidup
Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan Sangatta Selatan	Terpeliharanya sapras persampahan				2 Unit	2 Unit				Dinas Lingkungan Hidup
Operasional UPT Kebersihan Sangatta Utara	Terpenuhinya SKP				100%	100%				Dinas Lingkungan Hidup

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	BASELINE	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	INSTANSI PELAKSANA
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Operasional UPT Kebersihan Sangatta Selatan	Terpenuhinya SKP				100%	100%				Dinas Lingkungan Hidup
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Terwujudnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan				10 RT	10 RT				Dinas Lingkungan Hidup
Persiapan dan evaluasi Kota Adipura	Tersedianya dokumen Adipura				1 Dokumen	1 Dokumen				Dinas Lingkungan Hidup
Pengadaan Bank Sampah	Tersedianya Bank Sampah				8 Lokasi	8 Lokasi				Dinas Lingkungan Hidup
Pengadaan Kendaraan Operasional (DAK)	Tersedianya peralatan operasional UPT				9 Unit	9 Unit				Dinas Lingkungan Hidup
Pengadaan peralatan operasional UPT kebersihan	Tersedianya sapras untuk UPT				14 Unit	14 Unit				Dinas Lingkungan Hidup
INDIKATOR SDGs: 11.b.1*. Proporsi pemerintah kota yang memiliki dokumen strategi pengurangan risiko bencana.										
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam										
Penyusunan Pedoman Manajemen Bencana	Terpenuhinya Dokumen KRB dan RPB				2 Dokumen	2 Dokumen				Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Dokumen Kontigensi Bencana Kabupaten	Terpenuhinya Dokumen Kontigensi Bencana Kabupaten				1 Dokumen	1 Dokumen				Badan Penanggulangan Bencana Daerah

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	BASELIN E	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	INSTANSI PELAKSANA
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)	Terpenuhinya Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)				1 Dokumen	1 Dokumen				Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Penyusunan dan Inventarisir Resiko Bencana Daerah, Peta Rawan Bencana Termasuk Prosedur Tetap Penanganan	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Kajian Resiko Bencana				1 Dokumen	1 Dokumen				Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi Yang Bertanggungjawab										
INDIKATOR SDGs: 12.4.2.(a) Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).										
Program Pengelolaan Sampah dan Limbah B3										
Penyusunan Neraca Limbah B3 Kabupaten	Tersedianya data neraca limbah	Dokumen			1	1				Dinas Lingkungan Hidup
Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim										
INDIKATOR SDGs: 13.1.2* Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.										
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam										
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana Daerah	Terpenuhinya Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana Daerah				100%	100%				Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Simulasi Penanggulangan Bencana Alam	Terpenuhinya Simulasi Penanggulangan Bencana Alam				8 Desa	8 Desa				Badan Penanggulangan Bencana Daerah

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	BASELIN E	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	INSTANSI PELAKSANA
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Pencegahan dan Penyebarluasan Informasi Peringatan Dini Bencana	Tercapainya Pencegahan dan Penyebarluasan Informasi Peringatan Dini Bencana				1 Paket	1 Paket				Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Evaluasi dan Monitoring Pasca Bencana Penanggulangan Bencana Daerah	Terpenuhinya Evaluasi dan Monitoring Pasca Bencana Penanggulangan Bencana Daerah				100%	100%				Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Penyusunan Pedoman Manajemen Bencana	Terpenuhinya Dokumen KRB dan RPB				2 Dokumen	2 Dokumen				Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Pemasangan EWS di KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan	Terpenuhinya Pemasangan EWS di KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan				100%	100%				Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Penyusunan Rencana Kontijensi Bencana di Kawasan KEK Maloy Batuta	Terpenuhinya Penyusunan Rencana Kontijensi Bencana di Kawasan KEK Maloy Batuta				100%	100%				Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Pemasangan Rambu dan Papan Informasi Kebencanaan di KEK Maloy Batuta	Terpenuhinya Pemasangan Rambu dan Papan Informasi Kebencanaan di KEK Maloy Batuta				100%	100%				Badan Penanggulangan Bencana Daerah

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	BASELINE	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	INSTANSI PELAKSANA
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Pelatihan Penyusunan Base Line dan Kerugian Akibat Bencana	Terpenuhinya Pelatihan Penyusunan Base Line dan Kerugian Akibat Bencana				100%	100%				Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan				100%	100%				Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Penyusunan Pedoman Manajemen Bencana	Terpenuhinya Dokumen KRB dan RPB				2 Dokumen	2 Dokumen				Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Pencegahan dan Penyebarluasan informasi Peringatan Dini Bencana (Fasilitasi Informasi Bencana Daerah)	Terpenuhinya Pencegahan dan Penyebarluasan informasi Peringatan Dini Bencana (Fasilitasi Informasi Bencana Daerah)				100%	100%				Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Dokumen Kontigensi Bencana Kabupaten	Terpenuhinya Dokumen Kontigensi Bencana Kabupaten				1 Dokumen	1 Dokumen				Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Penguatan Kelembagaan BPBD Kabupaten Kutai Timur	Terlaksananya Kerjasama Antara Pemerintah, Dunia Usaha dan Masyarakat				100%	100%				Badan Penanggulangan Bencana Daerah

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	BASELINE	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	INSTANSI PELAKSANA
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Penyiapan Posko Penanganan Bencana	Tersedianya Penyiapan Posko Penanganan Bencana				6 Kecamatan	6 Kecamatan				Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Peningkatan Sarana dan Prasarana Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Terpenuhiya Peningkatan Sarana dan Prasarana Rehabilitasi dan Rekonstruksi				100%	100%				Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sosialisasi Pengurangan Risiko Bencana	Terpenuhiya Sosialisasi Pengurangan Risiko Bencana				100%	100%				Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Fasilitasi dan Pengembangan Desa Tangguh Bencana	Terpenuhiya Fasilitasi dan Pengembangan Desa Tangguh Bencana				6 Desa	6 Desa				Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Pembentukan dan Pengembangan Relawan	Terpenuhiya Pembentukan dan Pengembangan Relawan				6 Desa	6 Desa				Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Banjir	Terlaksananya Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Banjir				100%	100%				Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Pelatihan Kader Desa Siaga	Terpenuhiya Pelatihan Kader Desa Siaga				1 Paket	1 Paket				Badan Penanggulangan Bencana Daerah

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	BASELIN E	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	INSTANSI PELAKSANA
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Bantuan Penanggulangan Bencana dan Musibah	Tersedianya Bantuan Penanggulangan Bencana dan Musibah				1 Paket	1 Paket				Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Pembentukan Kelompok Penanggulangan Bencana di Tingkat Desa dan Kecamatan	Terpenuhinya Pembentukan Kelompok Penanggulangan Bencana di Tingkat Desa dan Kecamatan				4 Desa	4 Desa				Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Fasilitasi Pusat Pengendalian dan Operasional (Pusdalops) Penanggulangan Bencana	Terpenuhinya Fasilitasi Pusat Pengendalian dan Operasional (Pusdalops) Penanggulangan Bencana				100%	100%				Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Peringatan Dini dan Aplikasi Sistem Peringatan Bahaya Kebakaran atau Sejenisnya	Terpenuhinya Peringatan Dini dan Aplikasi Sistem Peringatan Bahaya Kebakaran atau Sejenisnya				100%	100%				Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Peningkatan SDM Bidang Kedaruratan, Logistik dan Peralatan	Terpenuhinya Peningkatan SDM Bidang Kedaruratan, Logistik dan Peralatan				100%	100%				Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Pengadaan Logistik Kebencanaan	Terpenuhinya Pengadaan Logistik Kebencanaan				1 Paket	1 Paket				Badan Penanggulangan Bencana Daerah

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	BASELIN E	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	INSTANSI PELAKSANA
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Rehabilitasi dan Peningkatan Sosial Ekonomi Pasca Bencana	Jumlah Penduduk/Masyarakat Yang Terdampak Sosial Ekonomi Pasca Bencana				100%	100%				Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Bantuan Rekonstruksi Pasca Bencana	Terpenuhinya Bantuan Rekonstruksi Pasca Bencana				100%	100%				Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Pemulihan Psiko Sosial Korban Bencana	Terpenuhinya Pemulihan Psiko Sosial Korban Bencana				100%	100%				Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Monitoring, Evaluasi Pelaksanaan Rekonstruksi Daerah Terkena Bencana	Terpenuhinya Monitoring, Evaluasi Pelaksanaan Rekonstruksi Daerah Terkena Bencana				100%	100%				Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Rehab/Rekon Sosial Ekonomi Pasca Bencana	Terpenuhinya Rehab/Rekon Sosial Ekonomi Pasca Bencana				100%	100%				Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)	Terpenuhinya Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)				1 Dokumen	1 Dokumen				Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Penyusunan dan Inventarisir Resiko Bencana Daerah, Peta Rawan Bencana Termasuk Prosedur Tetap Penanganan	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Kajian Resiko Bencana				1 Dokumen	1 Dokumen				Badan Penanggulangan Bencana Daerah

INDIKATOR SDGs: 13.2.1.(a) Dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK).

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	BASELIN E	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	INSTANSI PELAKSANA
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Program Peningkatan Pengendalian Polusi										
Pemantauan evaluasi dan pelaporan penurunan emisi GRK	Tersedianya dokumen penurunan emisi	Dokumen			1	1				Dinas Lingkungan Hidup

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	BASELIN E	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	INSTANSI PELAKSANA
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Tujuan 14 Ekosistem Lautan										
INDIKATOR SDGs: 14.5.1* Jumlah luas kawasan konservasi perairan.										
Program Perlindungan dan Konservasi SDA										
Penyusunan Area Konservasi SDA	Adanya lokasi konservasi SDA dan agrowisata	Paket			1	1				Sekretariat Daerah
Koservasi Kawasan Ekosistem Esential	Adanya Perlindungan Thp Habitat dikawasan Ekosistem Esential	Kecamatan			1	18				Sekretariat Daerah
INDIKATOR SDGs: 14.6.1.(a) Persentase kepatuhan pelaku usaha.										
Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan										
Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Pesisir dan Perairan Umum	Terlaksananya kegiatan pengawasan dan pengendalian perikanan	%			100	100				Dinas Kelautan Dan Perikanan
INDIKATOR SDGs: 14.b.1.(b) Jumlah nelayan yang terlindungi.										
Program pengembangan perikanan tangkap										
Sosialisasi dan Pelayanan Kartu Nelayan	Teregistrasinya nelayan tangkap yang ada di Kabupaten kutai Timur	%			100%	100%				Dinas Kelautan Dan Perikanan
Fasilitas dan Pendampingan Asuransi Nelayan	Tersedianya Jaminan Keselamatan Nelayan	%			100%	100%				

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	BASELIN E	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	INSTANSI PELAKSANA
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Tujuan 15										
INDIKATOR SDGs: 15.2.1.(a). Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya.										
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam										
Pendataan keanekaragaman hayati	Tersedianya database kehati				1 Buku	1 Buku				Dinas Lingkungan Hidup
Identifikasi masyarakat hukum adat dan kearifan lokal	Tersedianya dokumen MHA				1 Dokumen	1 Dokumen				Dinas Lingkungan Hidup
INDIKATOR SDGs: 15.2.1.(c). Jumlah kawasan konservasi yang memperoleh nilai indeks METT minimal 70%.										
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup										
Peningkatan konservasi daerah tangkapan air dan sumber-sumber air (DBH-DR)	Terkonservasinya DTA dan sumber-sumber air	Ha			100	100				Dinas Lingkungan Hidup
Penghijauan di area sempadan sungai (DBH-DR)	Terkonservasinya sempadan sungai	Ha			100	100				Dinas Lingkungan Hidup
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam										
Pendataan keanekaragaman hayati	Tersedianya database kehati	Buku			1 Buku	1 Buku				Dinas Lingkungan Hidup
Identifikasi masyarakat hukum adat dan kearifan lokal	Tersedianya dokumen MHA	Dokumen			1 Dokumen	1 Dokumen				Dinas Lingkungan Hidup

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	BASELIN E	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	INSTANSI PELAKSANA
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Program Peningkatan Perlindungan Tanaman										
Peningkatan Pembinaan Konservasi Lahan dan Air	Terdatanya Luasan Konservasi (HCV) di wilayah perkebunan, Terlaksananya Pencegahan, Pengendalian dan Monitoring OPD dan Pemahaman Masyarakat Tentang Bahaya Kebakaran Lahan	Ha			8.200 Ha	8.200 Ha				Dinas Lingkungan Hidup
INDIKATOR SDGs: 15.3.1.(a). Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.										
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya										
Peningkatan Kanal I Menuju Sungai Kenyamukan (Tahap III)	luas kawasan lahan kritis tangkapan sungai dan danau yang ditingkatkan				2000 m1					
Peningkatan Kanal II Menuju Sungai Kenyamukan	luas kawasan lahan kritis tangkapan sungai dan danau yang ditingkatkan				5000 m1					
INDIKATOR SDGs: 15.6.1.* Tersedianya kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata.										
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup										
Penyusunan Raperda/Perda di Bidang Lingkungan Hidup	Tersedianya Perda/Raperda/RPPLH	PP			1	1				

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	BASELIN E	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	INSTANSI PELAKSANA
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Indikator 16.1.3.(a) Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.										
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial										
Pelayana Penderita Penyakit Kejiwaan dan/atau Pekerja Migran Bermasalah Sosial	Tersedianya Pelayanan Penderita Kejiwaan, Pekerja Migran Bermasalah Sosial dan Korban Tindak Kekerasan Sosial	orang			60	60				Dinas Sosial
Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan										
Penanganan kasus korban kekerasan terhadap perempuan dan anak	Persentase penyelesaian penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	orang	%		100	100				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Penyediaan layanan sarana dan prasarana penunjang pelayanan pengaduan rujukan lanjutan (layanan kesehatan, rehabilitasi sosial, bantuan hukum, serta reintegrasi sosial dan pemulangan) bagi korban kekerasan	Pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak		%		100	100				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Perlindungan hak perempuan dari tindak kekerasan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	Terpenuhinya hak perempuan		%		100	100				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	BASELIN E	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	INSTANSI PELAKSANA	
			2018	2019	2020	2021	2022	2023			
Program Perlindungan Anak											
Pendampingan anak korban kekerasan	Penanganan anak korban kekerasan		%			100	100				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Indikator 16.2.1.(b) Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.											
Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan											
Penanganan kasus korban kekerasan terhadap perempuan dan anak	Persentase penyelesaian penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	orang	%			100	100				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Penyediaan layanan sarana dan prasarana penunjang pelayanan pengaduan rujukan lanjutan (layanan kesehatan, rehabilitasi sosial, bantuan hukum, serta reintegrasi sosial dan pemulangan) bagi korban kekerasan	Pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak		%			100	100				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Perlindungan hak perempuan dari tindak kekerasan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	Terpenuhinya hak perempuan		%			100	100				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	BASELIN E	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	INSTANSI PELAKSANA	
			2018	2019	2020	2021	2022	2023			
Program Perlindungan Anak											
Pendampingan anak korban kekerasan	Penanganan anak korban kekerasan		%			100	100				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Indikator 16.2.3.(a) Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.											
Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan											
Penanganan kasus korban kekerasan terhadap perempuan dan anak	Persentase penyelesaian penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	orang	%			100	100				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Penyediaan layanan sarana dan prasarana penunjang pelayanan pengaduan rujukan lanjutan (layanan kesehatan, rehabilitasi sosial, bantuan hukum, serta reintegrasi sosial dan pemulangan) bagi korban kekerasan	Pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak		%			100	100				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Perlindungan hak perempuan dari tindak kekerasan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	Terpenuhinya hak perempuan		%			100	100				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	BASELIN E	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	INSTANSI PELAKSANA
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Program Perlindungan Anak										
Pendampingan anak korban kekerasan	Penanganan anak korban kekerasan	%			100	100				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Indikator 16.3.1.(b) Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi dan non litigasi.										
Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia										
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Tim Bantuan Hukum/ Kuasa Hukum	Jumlah Kasus yang ditangani	Kasus			12	0				Sekretariat Daerah
16.5.1.(a) Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).										
Program Kampanye Bebas Korupsi dan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi bagi Penyelenggara Pemerintahan										
Sapu Bersih Pungutan Liar	Bertambahnya Kesadaran Pegawai ASN dan Masyarakat tentang Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	Laporan			12	12				Inspektorat Daerah
Program Penetapan dan Implementasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)										
Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM	Terbentuknya WBK/WBBM di Lingkungan Pemda	Laporan			1	1				Inspektorat Daerah
Program Upaya Pencegahan Korupsi serta Penguatan Sistem Integritas										
Survei Penilaian Integritas	Mencegah korupsi Institusi	Laporan			1	1				Inspektorat Daerah
Program Perencanaan Sosial dan Budaya										
Penyusunan Dokumen Survey Index Persepsi Korupsi	Tersusunnya Dokumen Survey index Persepsi Korupsi	Dokumen			1	0				Bappeda

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	BASELIN E	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	INSTANSI PELAKSANA
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
16.6.1* Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.										
Program Peningkatan Evaluasi Dalam Pengesahan APBD Kabupaten Kutai Timur										
Peningkatan Pengendalian dan Evaluasi Dalam Pengesahan APBD Kabupaten Kutai Timur	Tersedianya Pengendalian dan Evaluasi Dalam Pengesahan APBD Kabupaten Kutai Timur	Bulan			12	12				BPKAD
16.6.1.(a) Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota)										
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH										
Pembinaan dan peningkatan pengelolaan keuangan daerah	Meningkatnya sumber daya aparatur dalam pengelolaan keuangan daerah	orang / %			50 orang / 100%	50 orang / 100%				BPKAD
16.6.1.(b) Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).										
PROGRAM PENINGKATAN PEMBINAAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN										
Penyusunan LAKIP	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	SKPD			1					SEKDA
Penyusunan Perjanjian Kinerja Instansi di Lingkungan Pemerintah	Terciptanya Penetapan Perjanjian Kinerja Sekretat Kabupaten dan SKPD	SKPD			19	19				SEKDA
Monitoring Pelaksanaan SOP, SP dan SPM										SEKDA
16.6.1.(c) Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.										
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH										

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	BASELIN E	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	INSTANSI PELAKSANA
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Pengembangan pengelolaan sistem administrasi pengadaan barang dan jasa melalui LPSE	Pengadaan secara elektronik 100 %	Paket			500	600				Sekretariat Daerah
16.6.1.(d) Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).										
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik										
Penyusunan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutim	Tersusunya Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kabupaten kutim									Sekretariat Daerah
Implementasi Peraturan Menpan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 13 Thn 2009	Implementasi Peraturan Menpan Aparatur Negara tentang peningkatan kualitas pelayanan publik dengan partisipasi masyarakat									Sekretariat Daerah
16.7.1.(a) Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).										
Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan										
Pendidikan bagi perempuan	Meningkatnya wawasan partai politik tentang keterlibatan perempuan dalam politik	Parpol								Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	BASELINE	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	INSTANSI PELAKSANA
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Sosialisasi pelebagaan Pengarusutamaan Gender dan pemberdayaan perempuan bidang sosial, politik, budaya dan hukum	Meningkatnya wawasan masyarakat akan pentingnya keterlibatan perempuan dalam bidang sosial, politik, budaya dan hukum	Masyarakat								Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	BASELIN E	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	INSTANSI PELAKSANA
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
16.7.2.(c) Indeks Hak-hak Politik.										
Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan										
Pendidikan bagi perempuan	Meningkatnya wawasan partai politik tentang keterlibatan perempuan dalam politik	Parpol								Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Sosialisasi pelebagaan Pengarusutamaan Gender dan pemberdayaan perempuan bidang sosial, politik, budaya dan hukum	Meningkatnya wawasan masyarakat akan pentingnya keterlibatan perempuan dalam bidang sosial, politik, budaya dan hukum	Masyarakat								Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
16.9.1* Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.										
Program Pelayanan Administrasi Kependudukan										
Peningkatan Pelayanan Publik dan Sistem Jemput Bola Tentang Akta Kelahiran	Terlaksananya Penerbitan Akta Kelahiran	%			100	100				Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
16.9.1.(a) Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.										
Program Pelayanan Administrasi Kependudukan										
Peningkatan Pelayanan Publik dan Sistem Jemput Bola Tentang Akta Kelahiran	Terlaksananya Penerbitan Akta Kelahiran	%			100	100				Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
16.9.1.(b) Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.										
Program Pelayanan Administrasi Kependudukan										

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	BASELIN E	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	INSTANSI PELAKSANA
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Peningkatan Pelayanan Publik dan Sistem Jemput Bola Tentang Akta Kelahiran	Terlaksananya Penerbitan Akta Kelahiran	%			100	100				Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	BASELIN E	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	INSTANSI PELAKSANA
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
16.10.1.(a) Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).										
Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia										
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Tim Bantuan Hukum/ Kuasa Hukum	Jumlah Kasus yang ditangani	kasus			12 kasus					Sekretariat Daerah
Penyuluhan Hukum Terpadu	Penyuluhan Hukum di Kecamatan	Kecamatan			6 Kecamatan					Sekretariat Daerah
Pembinaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)	Keakuratan Data dan Pelaporan HAM	SKPD			52 SKPD					Sekretariat Daerah
Peningkatan Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM)	Penyelesaian Kasus Sengketa yang terjadi di Kab. Kutim	0			0					Sekretariat Daerah
Peningkatan Pustaka Hukum	Tercapainya Penataan Produk-produk Hukum Daerah	Lembaran Daerah (LD) dan Berita Daerah (BD) serta salinan SK			30 Lembaran Daerah (LD) dan Berita Daerah (BD) serta 950 salinan SK					Sekretariat Daerah
Peningkatan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	Terlaksananya Updating Website dan Sosialisasi JDIH Melalui Media Informasi	media informasi			1 media informasi					Sekretariat Daerah
16.10.1.(b) Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan.										
Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan										

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	BASELIN E	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	INSTANSI PELAKSANA	
			2018	2019	2020	2021	2022	2023			
Penanganan kasus korban kekerasan terhadap perempuan dan anak	Persentase penyelesaian penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	orang	%			100	100				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Penyediaan layanan sarana dan prasarana penunjang pelayanan pengaduan rujukan lanjutan (layanan kesehatan, rehabilitasi sosial, bantuan hukum, serta reintegrasi sosial dan pemulangan) bagi korban kekerasan	Pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak		%			100	100				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Perlindungan hak perempuan dari tindak kekerasan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	Terpenuhinya hak perempuan		%			100	100				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program Perlindungan Anak											
Pendampingan anak korban kekerasan	Penanganan anak korban kekerasan		%			100	100				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
16.10.2.(a) Tersedianya Badan Publik yang menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.											
Program Publikasi dan Kemitraan Media											

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	BASELIN E	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	INSTANSI PELAKSANA
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Penyebaran Informasi Publik Kab. Kutai Timur	Jumlah Penyebaran Informasi Pembangunan Kabupaten Kutai Timur				365 kali	365 kali				DISKOMINFO
Pengembangan dan Pemberdayaan KIM (Kelompok Informasi Masyarakat)	Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat yang dibentuk				8 kelompok	8 kelompok				DISKOMINFO
Penyediaan Media Center dan Perlengkapannya	Tersedianya Media Center beserta Peralatan dan Perlengkapannya				1 Paket	1 Paket				DISKOMINFO
Pengelolaan Media Komunikasi dan Informasi	Jumlah Informasi Publik Kabupaten Kutai Timur yang disediakan				12 jenis	12 jenis				DISKOMINFO
Publikasi dan Dokumentasi	Tersedianya Publikasi dan Dokumentasi Informasi Publik				1 Dok	1 Dok				DISKOMINFO
Sosialisasi Program Pemerintah Daerah	Tersediannya Data Informasi dan Dokumentasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur				1 Tahun	1 Tahun				DISKOMINFO
Pengembangan Kemitraan Media	Tersedianya Informasi ke Masyarakat melalui Media				1 Tahun	1 Tahun				DISKOMINFO

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	BASELIN E	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	INSTANSI PELAKSANA
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik	Tersedianya Media Luar ruang (Videotron / Megatron) dan Peralatan Media Informasi dan Komunikasi				1 Paket	1 Paket				DISKOMINFO
16.10.2.(c) Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.										
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan										
Penyusunan LPPD Diskominfo Persandian dan Statistik	Jumlah Dokumen LPPD yang disusun				1 Dok	1 Dok				DISKOMINFO
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	Jumlah Dokumen LKJI P yang disusun				1 Dok	1 Dok				
16.b.1.(a) Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelanggaran diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.										
Tujuan 17 Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan										
INDIKATOR SDGs: 17.1.1* Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.										
Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan daerah										
Intensifikasi dan Ektensifikasi Sumber Pendapatan Daerah	Intensifikasi dan Ektensifikasi Sumber Pendapatan Daerah				1500 Wp	2000 wp				Badan Pendapatan Daerah
Pengolahan Data PBB-P2	jumlah data PBB-P2 dan BPHTB yang diolah				300 wp	700 wp				Badan Pendapatan Daerah
Pemutakhiran PBB-P2	Jumlah Data data PBB-P2 dan BPHTB yang Baru				300 wp	2000 wp				Badan Pendapatan Daerah
INDIKATOR SDGs: 17.1.1.(a) Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.										
Program Koordinasi Pajak Daerah										

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	BASELIN E	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	INSTANSI PELAKSANA
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Monitoring Produksi dan Penjualan Sumber daya Mineral dan Batu Bara	Meningkatnya Penerimaan Negara Non Pajak Sektor Pertambangan Umum dan Dana Bagi Hasil Penjualan									Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota										
Penyusunan SISMIOP Jumlah Data Wajib Pajak yang masuk dalam sistem	Jumlah Data Wajib Pajak yang masuk dalam sistem				10000 wp	10000 wp				Badan Pendapatan Daerah
Sosialisasi paket regulasi pajak dan retribusi daerah	Jumlah WP yang mengikuti Sosialisasi paket regulasi pajak dan retribusi daerah				6000 wp	320 wp				Badan Pendapatan Daerah
Intensifikasi pajak dan retribusi daerah	Tersedianya Data Potensi penerimaan daerah				10000 SPTPD	500 wp				Badan Pendapatan Daerah
Penagihan pajak dan retribusi daerah	Jumlah pajak dan retribusi daerah yang ditagih				2000 wp	2000 wp				Badan Pendapatan Daerah
Pengawasan dan Pengendalian Potensi Pajak dan Retribusi Daerah	jumlah potensi Pajak dan Retribusi Daerah yang dalam pengawasan dan pengendalian				11 jenis	11 jenis				Badan Pendapatan Daerah
Inebtifikasi, Verifikasi keberatan dan banding Pajak Daerah	Jumlah Identifikasi, Verifikasi keberatan dan banding pajak				300 wp	200 wp				Badan Pendapatan Daerah
Pendampingan Optimalisasi SIMDA	Jumlah Pegawai yang mengikuti Pendampingan Optimalisasi SIMDA				30 org	30 org				Badan Pendapatan Daerah

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	BASELIN E	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	INSTANSI PELAKSANA
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Verifikasi dan Validasi Pajak Daerah	Jumlah Pajak Daerah yang diverifikasi dan divalidasi				300 wp	300 wp				Badan Pendapatan Daerah
Identifikasi dan Penilaian PBB	Jumlah WP/OP PBB yang diidentifikasi Penilaian				300 wp	300 wp				Badan Pendapatan Daerah
Penagihan PBB-P2	Jumlah wajib Pajak Bumi dan Bangunan P2 yang ditagih				20,500,000,000	215,000,000,000				Badan Pendapatan Daerah
INDIKATOR SDGs: 17.11.1.(a) Pertumbuhan ekspor produk non migas										
Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor										
Koordinasi dan Pengolahan Data Ekspor dan Impor	Jumlah Koordinasi antara Ekspor dan Import	Pertemuan	-	-	2 Pertemuan	2 Pertemuan				Dinas Perindustrian, dan Perdagangan
Pengembangan Ekspor dan Peningkatan Investasi Daerah	Jumlah Kerjasama Ekspor	Eksportir	-	-	5 Eksortir	5 Eksortir				Dinas Perindustrian, dan Perdagangan
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri										
Koordinasi dan Evaluasi Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi Daerah (PEPIDA)	Jumlah instansi yang terlibat dalam koordinasi dan evaluasi	Instansi	-	-	6 Instansi	6 Instansi				Dinas Perindustrian, dan Perdagangan
Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah										
Rakor PEPIDA Provinsi Kalimantan Timur	Terjalannya kerjasama antar kabupaten di Kaltim mengenai produk ekspor non migas	kali	-	-	4	0				Sekretariat Daerah
INDIKATOR SDGs: 17.13.1* Tersedianya Dashboard Makroekonomi.										
Program Peningkatan Sinegritas Bidang Industri dan Jasa										

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	BASELIN E	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	INSTANSI PELAKSANA
			2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Pengembangan Sistem Informasi Potensi Ekonomi Daerah	Kemudahan mengakses data-data potensi ekonomi daerah	Unit	-		1	0				Sekretariat Daerah

MATRIK 3. PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH KOTA BONTANG (SESUAI RPJMD/ RKPD)

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	BASE LINE	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	INSTANSI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023		
Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan										
INDIKATOR SDGs: 1.2.1* Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.										
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL										
Fasilitasi Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin	Jumlah KUBE yang dibina	KUBE			30 KUBE					DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	Lomba Kube Berprestasi	KUBE			3 KUBE					DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	Lomba Pendamping KUBE Berprestasi	Pendamping			3 Pendamping					DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Verivali Data Terpadu Program Kemiskinan	Jumlah data terpadu program penanganan fakir miskin yang di verifikasi dan validasi	KPM			5098 KPM					DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Pemberdayaan Fakir Miskin melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Pemberian bantuan usaha ekonomi produktif	Keluarga penerima manfaat (KPM)			100 keluarga penerima manfaat (KPM)					DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
INDIKATOR SDGs: 1.3.1.(c) Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.										
PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL										
Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas	Cakupan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	%			100%					DPMS

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	BASE LINE	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	INSTANSI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023		
Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas	Jumlah penyandang disabilitas fisik mental, sensorik dan intelektual yang mendapatkan alat bantu	Jiwa			75 Jiwa					
	Jumlah Literasi khusus bagi penyandang disabilitas netra	Jiwa			51 Jiwa					
INDIKATOR SDGs: 1.5.1* Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.										
PROGRAM PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN PENANGGULANGAN BENCANA										
Rapat Koordinasi Kebencanaan	jumlah peserta	Orang			200 orang					BPBD
Penyuluhan Antisipasi Bencana	Jumlah peserta penyuluhan	Orang			1350 orang					BPBD
	pakaian olah raga	pasang			43 pasang					BPBD
	Baju Kaos	buah			43 buah					BPBD
	Sepatu Olahraga	pasang			43 pasang					BPBD
	Jumlah peserta pelatihan	orang			1000 orang					BPBD
Pemantauan Daerah Rawan Bencana	jumlah pemantauan daerah rawan bencana	Dokumen			3 Dokumen					BPBD
Pengadaan Sarana Prasarana Penanggulangan Bencana	Jumlah Peralatan SAR	Jenis			13 Jenis					BPBD
INDIKATOR SDGs: 1.5.1.(a) Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.										
PROGRAM PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN PENANGGULANGAN BENCANA										
Rapat Koordinasi Kebencanaan	jumlah peserta	Orang			200 orang					BPBD
Penyuluhan Antisipasi Bencana	Jumlah peserta penyuluhan	Orang			1350 orang					BPBD
	pakaian olah raga	pasang			43 pasang					
	Baju Kaos	buah			43 buah					
	Sepatu Olahraga	pasang			43 pasang					

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	BASE LINE	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	INSTANSI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023		
	Jumlah peserta pelatihan	orang			1000 orang					
INDIKATOR SDGs: 1.5.1.(b) Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.										
PROGRAM PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN PENANGGULANGAN BENCANA										
Pengadaan Sarana Prasarana Penanggulangan Bencana	Jumlah Peralatan SAR	Jenis			13					BPBD
INDIKATOR SDGs: 1.5.1.(d) Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus.										
PROGRAM PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN PENANGGULANGAN BENCANA										
Penyuluhan Antisipasi Bencana	Jumlah peserta penyuluhan	Orang			1350 orang					BPBD
	pakaian olah raga	pasang			43 pasang					
	Baju Kaos	buah			43 buah					
	Sepatu Olahraga	pasang			43 pasang					
	Jumlah peserta pelatihan	orang			1000 orang					
INDIKATOR SDGs: 1.5.3* Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.										
PROGRAM PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN PENANGGULANGAN BENCANA										
Pemantauan Daerah Rawan Bencana	jumlah pemantauan daerah rawan bencana	Dokumen			3					BPBD
Tujuan 2 Tanpa Kelaparan										
INDIKATOR SDGs: 2.1.1* Prevalensi ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernutrition)										
Program Peningkatan Ketahanan Pangan										
Penganekaragaman Konsumsi Pangan	Terlaksananya Lomba B2SA dan sosialisasi diversifikasi pangan	Kelurahan			1 kelurahan					DKPP
Penyusunan Database Potensi Produksi Pangan	Jumlah Dokumen Pola Pangan Harapan (PPH)	Dokumen			1 Dokumen					DKPP

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	BASE LINE	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	INSTANSI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023		
Ketersediaan dan Cadangan Pangan	Data SKPG, Data Survey Panel Harga dan Data Ketersediaan Bahan Pangan Utama	Dokumen			3 dokumen					DKPP
Pengawasan Keamanan Pangan	Jumlah jenis uji sampel pangan segar	Jenis			2 jenis					
INDIKATOR SDGs: 2.1.1.(a) Prevalensi Kekurangan Gizi (underweight) pada anak balita.										
PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT										
Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Gizi Mikro Lainnya	Jumlah Anak Balita yang mendapatkan Pemberian Makanan Tambahan Balita	Balita			38					DINKES
INDIKATOR SDGs: 2.1.2* Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan pangan.										
Program Peningkatan Ketahanan Pangan										
Penyusunan Database Potensi Produksi Pangan	Jumlah Dokumen Pola Pangan Harapan (PPH)	Dokumen			1 Dokumen					DKPP
Ketersediaan dan Cadangan Pangan	Data SKPG, Data Survey Panel Harga dan Data Ketersediaan Bahan Pangan Utama	Dokumen			3 dokumen					DKPP
INDIKATOR SDGs: 2.2.1* Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak balita.										
Program Upaya Kesehatan Masyarakat										

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	BASE LINE	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	INSTANSI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023		
Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Gizi Mikro Lainnya	Jumlah Anak Balita yang mendapatkan Pemberian Makanan Tambahan Balita	Balita			38 balita					DINKES
Perbaikan Gizi Masyarakat Puskesmas Bontang Selatan 1	Jumlah Balita yang mendapatkan Pemberian Makanan Tambahan	Balita			10 balita					DINKES
Perbaikan Gizi Masyarakat Puskesmas Bontang Selatan 2	Jumlah masyarakat mendapat pelayanan intervensi gizi	Jiwa			... Jiwa					DINKES
Perbaikan Gizi Masyarakat Puskesmas Bontang Lestari	Surveilans pelacakan gizi buruk, balita 2T, gizi buruk	Kelurahan			1 Kelurahan					DINKES
Perbaikan Gizi Masyarakat Puskesmas Bontang Utara 1	terlaksananya distribusi & sweeping vitamin A	Kali			kali					DINKES
Perbaikan Gizi Masyarakat Puskesmas Bontang Utara 2	Sweeping Vit.A	Posyandu Kali	..		20 Posyandu 2 kali					DINKES
Perbaikan Gizi Masyarakat Puskesmas Bontang Barat	Souvenir Balita Aktif Ke Posyandu	Buah			23 buah					DINKES
Pembinaan Pelayanan Gizi Institusi dan Gizi Masyarakat	Jumlah peserta pendampingan	Orang								DINKES
Movev Pelaksanaan IMD dan ASI Eksklusif	Jumlah Peserta Evaluasi Pelaksanaan IMD & Penanganan Balita Gizi Buruk	Orang								DINKES
Peningkatan Surveilans dan Kewaspadaan Gizi	Jumlah peserta evaluasi E-PPGBM	Orang			25 Orang					DINKES
INDIKATOR SDGs: 2.2.2.(c) (i)Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH); dan (ii) tingkat konsumsi ikan perkapita										

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	BASE LINE	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	INSTANSI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023		
Program Peningkatan Ketahanan Pangan										
Penganekaragaman Konsumsi Pangan	Terlaksananya Lomba B2SA dan sosialisasi diversifikasi pangan	Kelurahan			1 kelurahan					DKPP
Penyusunan Database Potensi Produksi Pangan	Jumlah Dokumen Pola Pangan Harapan (PPH)	Dokumen			1 Dokumen					DKPP
INDIKATOR SDGs: 2.3.1* Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja)										
PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN										
Penyuluhan Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Jumlah kelompok peserta penyuluhan	petani			30 petani					DKPP
Penyediaan Sarana Produksi Pertanian dan Perkebunan	Jumlah jenis bahan obat-obatan dan pupuk pertanian	jenis			2 jenis					DKPP
Pengembangan Bibit Unggul Pertanian dan Perkebunan	Jumlah jenis bibit Unggul Pertanian/Perkebunan	jenis			6 jenis					DKPP
Pengendalian, Perencanaan dan Pengawasan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) pada Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah peserta sosialisasi pengendalian hama terpadu	petani			60 petani					DKPP
PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN/PERKEBUNAN										
Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna	Tersedianya Sarana dan prasarana pertanian	unit			1					DKPP
PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN										
Pendistribusian Bibit Ternak Kepada masyarakat	jumlah Kelompok yang mendapat bantuan	kelompok			3 kelompok					DKPP

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	BASE LINE	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	INSTANSI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023		
Pengembangan Agribisnis Peternakan	Tersedianya pakan ternak dan bibit unggas	kelompok			5 kelompok					DKPP

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	BASE LINE	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	INSTANSI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023		
PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PETERNAKAN										
Pembangunan Sarana dan Prasarana Pasar Produksi Hasil Peternakan	Tersedianya pagar RPH, drainase RPH dan kanopi Puskesmas	jenis			4 jenis					DKPP
Peningkatan Kualitas dan Teknis Kemasan Hasil Produksi Peternakan	Peningkatan produk hewan yang aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH)	%			100%					DKPP
Operasional Rumah Potong Hewan	Tersedianya operasional RPH	Tahun			1 Tahun					DKPP
Pendampingan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pasar Produksi Hasil Peternakan	Tersedianya perencanaan dan pengawasan penunjang Rumah Potong Hewan (RPH)	dokumen			6 dokumen					DKPP
PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN										
Pembinaan dan Pengembangan Perikanan	Jumlah peserta sosialisasi, penerima bantuan pakan dan benih ikan	Kelompok			30 klp Budidaya rumput laut, 5 klp ikan air tawar					DKPP
Pengoperasian Balai Benih Ikan Pantai	Jumlah jenis pakan ikan yang dibutuhkan	jenis			jenis					DKPP
Pembangunan Balai Benih Ikan Pantai (BBIP)	Tersedianya pembangunan BBIP	gedung			2 gedung					DKPP
Pengumpulan dan Pengolahan Data Perikanan Budidaya	Jumlah dokumen statistik perikanan budidaya	dokumen			1 dokumen					DKPP
Penyediaan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya	Bantuan kepada nelayan budidaya	kelompok			20 kelompok					DKPP

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	BASE LINE	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	INSTANSI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023		
PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP										
Pembinaan dan Pengembangan Perikanan	Jumlah peserta sosialisasi, penerima bantuan pakan dan benih ikan	Kelompok			30 klp Budidaya rumput laut, 5 klp ikan air tawar					DKPP
Pengoperasian Balai Benih Ikan Pantai	Jumlah jenis pakan ikan yang dibutuhkan	jenis			jenis					DKPP
Pembangunan Balai Benih Ikan Pantai (BBIP)	Tersedianya pembangunan BBIP	gedung			2 gedung					DKPP
INDIKATOR SDGs: 2.5.1* Jumlah varietas unggul tanaman dan hewan untuk pangan yang dilepas.										
PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN										
Penyediaan Sarana Produksi Pertanian dan Perkebunan	Jumlah jenis bahan obat-obatan dan pupuk pertanian	jenis			2 jenis					DKPP
Pengembangan Bibit Unggul Pertanian dan Perkebunan	Jumlah jenis bibit Unggul Pertanian/Perkebunan	jenis			6 jenis					DKPP
PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN										
Pendistribusian Bibit Ternak Kepada masyarakat	jumlah Kelompok yang mendapat bantuan	kelompok			3 kelompok					DKPP
INDIKATOR SDGs: 2.5.2* Proporsi hewan ternak dan sejenisnya, diklasifikasikan menurut tingkat risiko kepunahan: berisiko, tidak berisiko, dan risiko yang tidak diketahui.										
Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera										
INDIKATOR SDGs: 3.1.1* Angka Kematian Ibu (AKI).										
PROGRAM PENINGKATAN KESEHATAN IBU DAN ANAK										
Pelayanan Kesehatan Bagi Ibu Hamil, Ibu Melahirkan, Bayi dan Balita Dengan Resiko Tinggi	jumlah balita sehat	Balita		balita					

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	BASE LINE	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	INSTANSI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023		
Peningkatan dan Pengembangan Program Kesehatan Keluarga	Jumlah sarkes yang dipantau pelayanan KIA	Sarkes			17 sarkes					
Upaya Kesehatan Ibu dan Anak Puskesmas Bontang Selatan 1	Tercapainya cakupan K1,K4,Persalinan nakes, Komplikasi maternal & neonatal yang ditangani, kunjungan nifas & neonatal lengkap, Pelayanan SDDITK anak pra sekolah	%			95%					
Upaya Kesehatan Ibu dan Anak Puskesmas Bontang Selatan 2	Terlaksananya Upaya Kesehatan Ibu dan Anak di Wilayah Kerja Puskesmas	Tahun			1 Tahun					
Upaya Kesehatan Ibu dan Anak Puskesmas Bontang Lestari	Terlaksananya Upaya Kesehatan Ibu dan Anak di Wilayah Kerja Puskesmas	Kelurahan			1 Kelurahan					
Upaya Kesehatan Ibu dan Anak Puskesmas Bontang Utara 1	pelacakan AMP, DDTKA di TK,PAUD & TPA, DDTKA di posyandu, pembinaan guru paud/TK	Tahun			1 tahun					
Upaya Kesehatan Ibu dan Anak Puskesmas Bontang Utara 2	Terlaksananya Upaya Kesehatan Ibu dan Anak di Wilayah Kerja Puskesmas	Kasus								

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	BASE LINE	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	INSTANSI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023		
Upaya Kesehatan Ibu dan Anak Puskesmas Bontang Barat	Terlaksananya Upaya Kesehatan Ibu dan Anak di Wilayah Kerja Puskesmas dengan Pemantauan Ibu hamil dan Ibu Nifas Oleh Tenaga Kesehatan				400 kasus					
INDIKATOR SDGs: 3.2.2.(b) Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.										
PROGRAM PENINGKATAN SURVEILANS PENYAKIT, IMUNISASI DAN PENANGGULANGAN WABAH BENCANA										
Peningkatan Imunisasi	Pertemuan Imunisasi	Kelurahan			15					Dinkes
INDIKATOR SDGs: 3.3.2.(a) Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.										
PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA										
Pelayanan Kesehatan bagi Penderita Penyakit TBC	Pelayanan Penyakit TB	Tahun	-		1					Dinkes
INDIKATOR SDGs: 3.5.1.(c) Jumlah korban penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti sesuai standar pelayanan.										
PROGRAM PENINGKATAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT (PEKAT)										
Fasilitasi Kegiatan Badan Narkotika Kota	Jumlah Kegiatan Badan Narkotika Kota yang difasilitasi	Kegiatan			1					Kesbangpol
PROGRAM FASILITASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KECAMATAN/KELURAHAN										
Pembinaan Ketertarikan dan Ketertiban Masyarakat Tingkat Kecamatan	Terlaksananya penyuluhan bahaya narkoba, patroli wilayah dan pengamanan pemilu	Kegiatan			3					Kec. BB
INDIKATOR SDGs: 3.8.2.(a) Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).										
PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT										
Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM)	Jumlah penduduk yang dibayarkan premi kesehatannya	Ribu Jiwa			54					Dinkes

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	BASE LINE	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	INSTANSI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023		
Penyediaan Dana Operasional Jamkesda	Operasional Jamkesda	Bulan			12					Dinkes
INDIKATOR SDGs: 3.a.1* Persentase merokok pada penduduk umur <15 tahun.										
PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT										
Promosi Kesehatan dan Penegakan Hukum Perda KTR (Bagi Hasil Pajak Rokok)	Jumlah peserta sosialisasi penegakan perda kawasan terbatas merokok	Orang	-		500					Dinkes
INDIKATOR SDGs: 3.b.1.(a) Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.										
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan										
Pengadaan Obat Dan Perbekalan Kesehatan	Jumlah jenis Obat dan perbekalan kesehatan	Jenis								Dinkes
INDIKATOR SDGs: 3.c.1* Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.										
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA KESEHATAN										
Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Uji Kompetensi Jabatan Fungsional		-	-						Dinkes
Pembinaan Tenaga Kesehatan	Pemilihan dan pelatihan tenaga kesehatan teladan	Kali / org / Th	-	-	4 kali per org setahun					Dinkes
Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas										
INDIKATOR SDGs: 4.1.1.(a) Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.										
PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN										
Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah	Terakreditasinya sekolah di Kota Bontang	Sekolah			20					Disdikbud
INDIKATOR SDGs: 4.1.1.(b) Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.										
PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN										
Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah	Terakreditasinya sekolah di Kota Bontang	Sekolah			20					Disdikbud

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	BASE LINE	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	INSTANSI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023		
INDIKATOR SDGs: 4.1.1.(c) Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B.										
PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN										
Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah	Terakreditasinya sekolah di Kota Bontang	Sekolah			20					Disdikbud
INDIKATOR SDGs: 4.1.1.(d) Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.										
PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN										
Pembangunan Gedung Sekolah	Jumlah Gedung Sekolah Yang terbangun	Gedung sekolah			1 Gedung sekolah					Disdikbud
Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Terbangunnya Ruang Kelas Baru (RKB) SDN 010 BU, Terbangunnya RKB SDN 009 BU Perencanaan Pembangunan RKB 005 BS, dan Pembangunan RKB AL-Ikhlas	Ruang Kelas Baru (RKB) ; dokumen Perencanaan RKB			8 Ruang Kelas Baru (RKB) SDN 010 BU, 8 RKB SDN 009 BU, 1 dokumen Perencanaan RKB SDN 005 BS, dan 3 RKB AL-Ikhlas					Disdikbud
Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir	Jumlah Area Lapangan Upacara yang Dibangun	sekolah			1 sekolah					Disdikbud
Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Sekolah	Jumlah luasan lahan yang dibebaskan	m2			10.000 m2					Disdikbud
Pengadaan Meubelair Sekolah	Jumlah Pengadaan Meubelair SD dan SMP Sekolah Negeri	set			1000 set					Disdikbud
Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik	Jumlah Tenaga Pendidik yang Mengikuti Pelatihan	org			1000 org					Disdikbud

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	BASE LINE	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	INSTANSI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023		
Pelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi	Penyelenggaraan Try out, UN/USBN, Bimbel 19-21 dan Prodikau	kegiatan			4 kegiatan					Disdikbud
Penyelenggaraan Paket A Setara SD	Jumlah Kelompok Belajar Paket A Setara SD	kelompok belajar			16 kelompok belajar					Disdikbud
Pembinaan Minat, Bakat, Dan Kreativitas Siswa	Jumlah pelaksanaan kegiatan Lomba Bidang Pendidikan Dasar	lomba			4 lomba					Disdikbud
Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah	Terakreditasinya sekolah di Kota Bontang	sekolah			20 sekolah					Disdikbud
Pembangunan Kelengkapan Sarana Gedung Sekolah	Jumlah sarana dan prasarana sekolah yang Dibangun	sekolah			2 sekolah					Disdikbud
PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN PENDIDIKAN										
Penyediaan Pakaian Seragam Sekolah dan Kelengkapannya	Jumlah siswa yang mendapatkan pakaian seragam beserta kelengkapannya	Siswa			38.962 siswa					Disdikbud
INDIKATOR SDGs: 4.1.1.(e) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.										
PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN										
Pembangunan Gedung Sekolah	Jumlah Gedung Sekolah Yang terbangun	Gedung sekolah			1 Gedung sekolah					Disdikbud
Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir	Jumlah Area Lapangan Upacara yang Dibangun	sekolah			1 sekolah					Disdikbud
Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Sekolah	Jumlah luasan lahan yang dibebaskan	m2			10.000 m2					Disdikbud

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	BASE LINE	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	INSTANSI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023		
Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah	Jumlah SMP Yang Mendapat Rehabilitasi Sedang dan Berat	Sekolah			1 Sekolah					Disdikbud
Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik	Jumlah Tenaga Pendidik yang Mengikuti Pelatihan	org			1000 org					Disdikbud
Pelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi	Penyelenggaraan Try out, UN/USBN, Bimbel 19-21 dan Prodikau	kegiatan			4 kegiatan					Disdikbud
Penyelenggaraan Paket B Setara SMP	Jumlah Kelompok Belajar Paket B Setara SMP dan Paket C Setara SMU	Kelompok Belajar			34 Kelompok Belajar					Disdikbud
Pembinaan Minat, Bakat, Dan Kreativitas Siswa	Jumlah pelaksanaan kegiatan Lomba Bidang Pendidikan Dasar	lomba			4 lomba					Disdikbud
Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah	Terakritisinya sekolah di Kota Bontang	sekolah			20 sekolah					Disdikbud
Pembangunan Kelengkapan Sarana Gedung Sekolah	Jumlah sarana dan prasarana sekolah yang Dibangun	sekolah			2 sekolah					Disdikbud
INDIKATOR SDGs: 4.2.2.(a) Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).										
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI										
Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Gedung serbaguna/Aula yang terbangun	sekolah			1 sekolah					Disdikbud
Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik	Jumlah Tenaga Pendidik Yang Mengikuti Pelatihan	orang			200 orang					Disdikbud

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	BASE LINE	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	INSTANSI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023		
Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini	Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan publikasi Kegiatan PAUD	kali			2 kali					Disdikbud
Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring	Laporan			4 Laporan					Disdikbud
Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD yang terlatih	Orang			200 Orang					Disdikbud
Pembangunan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah	Jumlah pagar TK negeri yang terbangun	sekolah			1 sekolah					Disdikbud
Apresiasi GTK PAUD dan Dikmas Berprestasi dan Berdedikasi	Jumlah penerima apresiasi GTK PAUD dan DIKMAS berprestasi dan berdedikasi	orang			25 orang					Disdikbud
INDIKATOR SDGs: 4.5.1* Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/SMK/MA/ sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.										
PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN										
Pembangunan Gedung Sekolah	Jumlah Gedung Sekolah Yang terbangun	Gedung sekolah			1 Gedung sekolah					Disdikbud
Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Terbangunnya Ruang Kelas Baru (RKB) SDN 010 BU, Terbangunnya RKB SDN 009 BU Perencanaan Pembangunan RKB 005 BS, dan Pembangunan RKB Al-Ikhlas	Ruang Kelas Baru (RKB) ; dokumen Perencanaan RKB			8 Ruang Kelas Baru (RKB) SDN 010 BU, 8 RKB SDN 009 BU, 1 dokumen Perencanaan RKB SDN 005 BS, dan 3 RKB AL-Ikhlas					Disdikbud

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	BASE LINE	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	INSTANSI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023		
Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir	Jumlah Area Lapangan Upacara yang Dibangun	sekolah			1 sekolah					Disdikbud
Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Sekolah	Jumlah luasan lahan yang dibebaskan	m2			10.000 m2					Disdikbud
Pengadaan Meubelair Sekolah	Jumlah Pengadaan Meubelair SD dan SMP Sekolah Negeri	set			1000 set					Disdikbud
Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah	Jumlah SMP Yang Mendapat Rehabilitasi Sedang dan Berat	Sekolah			1 Sekolah					Disdikbud
Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik	Jumlah Tenaga Pendidik yang Mengikuti Pelatihan	org			1000 org					Disdikbud
Pelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi	Penyelenggaraan Try out, UN/USBN, Bimbel 19-21 dan Prodikau	kegiatan			4 kegiatan					Disdikbud
Penyelenggaraan Paket A Setara SD	Jumlah Kelompok Belajar Paket A Setara SD	kelompok belajar			16 kelompok belajar					Disdikbud
Penyelenggaraan Paket B Setara SMP	Jumlah Kelompok Belajar Paket B Setara SMP dan Paket C Setara SMU	Kelompok Belajar			34 Kelompok Belajar					Disdikbud
Pembinaan Minat, Bakat, Dan Kreativitas Siswa	Jumlah pelaksanaan kegiatan Lomba Bidang Pendidikan Dasar	lomba			4 lomba					Disdikbud
Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah	Terakreditasinya sekolah di Kota Bontang	sekolah			20 sekolah					Disdikbud

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	BASE LINE	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	INSTANSI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023		
Pembangunan Kelengkapan Sarana Gedung Sekolah	Jumlah sarana dan prasarana sekolah yang Dibangun	sekolah			2 sekolah					Disdikbud
PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN PENDIDIKAN										
Penyediaan Pakaian Seragam Sekolah dan Kelengkapannya	Jumlah siswa yang mendapatkan pakaian seragam beserta kelengkapannya	Siswa			38.962 siswa					Disdikbud
INDIKATOR SDGs: 4.6.1.(a) Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.										
PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN										
Penyelenggaraan Paket A Setara SD	Jumlah Kelompok Belajar Paket A Setara SD	kelompok belajar			16 kelompok belajar					Disdikbud
Penyelenggaraan Paket B Setara SMP	Jumlah Kelompok Belajar Paket B Setara SMP dan Paket C Setara SMU	Kelompok Belajar			34 Kelompok Belajar					Disdikbud
INDIKATOR SDGs: 4.6.1.(b) Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.										
PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN										
Penyelenggaraan Paket A Setara SD	Jumlah Kelompok Belajar Paket A Setara SD	kelompok belajar			16 kelompok belajar					Disdikbud
Penyelenggaraan Paket B Setara SMP	Jumlah Kelompok Belajar Paket B Setara SMP dan Paket C Setara SMU	Kelompok Belajar			34 Kelompok Belajar					Disdikbud
INDIKATOR SDGs: 4.a.1* Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)).										
PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN										

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	BASE LINE	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	INSTANSI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023		
Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan	Tersedianya System Manajemen yang Terintegrasi Teknologi informasi	jenis			3 jenis					
PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN										
Pembangunan Gedung Sekolah	Jumlah Gedung Sekolah Yang terbangun	Gedung sekolah			1 Gedung sekolah					Disdikbud
Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Terbangunnya Ruang Kelas Baru (RKB) SDN 010 BU, Terbangunnya RKB SDN 009 BU Perencanaan Pembangunan RKB 005 BS, dan Pembangunan RKB Al-Ikhlas	Ruang Kelas Baru (RKB) ; dokumen Perencanaan RKB			8 Ruang Kelas Baru (RKB) SDN 010 BU, 8 RKB SDN 009 BU, 1 dokumen Perencanaan RKB SDN 005 BS, dan 3 RKB AL-Ikhlas					Disdikbud
Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir	Jumlah Area Lapangan Upacara yang Dibangun	sekolah			1 sekolah					Disdikbud
Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Sekolah	Jumlah luasan lahan yang dibebaskan	m2			10.000 m2					Disdikbud
Pengadaan Meubelair Sekolah	Jumlah Pengadaan Meubelair SD dan SMP Sekolah Negeri	set			1000 set					Disdikbud
Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah	Jumlah SMP Yang Mendapat Rehabilitasi Sedang dan Berat	Sekolah			1 Sekolah					Disdikbud

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	BASE LINE	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	INSTANSI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023		
Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik	Jumlah Tenaga Pendidik yang Mengikuti Pelatihan	org			1000 org					Disdikbud
Pelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi	Penyelenggaraan Try out, UN/USBN, Bimbel 19-21 dan Prodikau	kegiatan			4 kegiatan					Disdikbud
Penyelenggaraan Paket A Setara SD	Jumlah Kelompok Belajar Paket A Setara SD	kelompok belajar			16 kelompok belajar					Disdikbud
Penyelenggaraan Paket B Setara SMP	Jumlah Kelompok Belajar Paket B Setara SMP dan Paket C Setara SMU	Kelompok Belajar			34 Kelompok Belajar					Disdikbud
Pembinaan Minat, Bakat, Dan Kreativitas Siswa	Jumlah pelaksanaan kegiatan Lomba Bidang Pendidikan Dasar	lomba			4 lomba					Disdikbud
Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah	Terakreditasinya sekolah di Kota Bontang	sekolah			20 sekolah					Disdikbud
Pembangunan Kelengkapan Sarana Gedung Sekolah	Jumlah sarana dan prasarana sekolah yang Dibangun	sekolah			2 sekolah					Disdikbud
PROGRAM PENDIDIKAN INKLUSIF										
Pembangunan Sarana dan Prasarana Sekolah Autis Centre	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Autis Center	jenis			4 jenis					
Penyediaan Biaya Operasional Lembaga Autis Centre	Tersedianya biaya operasional Lembaga Autis Center	bulan			12 bulan					
INDIKATOR SDGs: 4.c.1* Persentase guru (TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang)bersertifikat pendidik										
PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN PENDIDIKAN										

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	BASE LINE	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	INSTANSI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023		
Penyelenggaraan Pengelolaan dan Penataan Aset Bidang Pendidikan	Jumlah peserta yang ikut pelatihan pengelolaan dan penataan aset	org			50 org					
Pemberian Penghargaan Bagi Siswa/Siswi, Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Berprestasi	Jumlah penerima penghargaan guru dan siswa berprestasi	orang			418 orang					
Penyediaan Pakaian Seragam Sekolah dan Kelengkapannya	Jumlah siswa yang mendapatkan pakaian seragam beserta kelengkapannya	siswa			38.962 siswa					
PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN										
Pendidikan Lanjutan Bagi Pendidik Untuk Memenuhi Standar Kualifikasi	Jumlah Pendidik yang melanjutkan untuk memenuhi standar kualifikasi	orang			10 orang					
Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Pendidikan Dan Pelatihan Bagi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Jumlah peserta Peningkatan Mutu Pendidik	orang			250 orang					
Pengembangan Sistem Penghargaan Dan Perlindungan Terhadap Profesi Pendidik	Jumlah Penerima Tunjangan Pendidik dan Tenaga Pendidik Non PNS	orang			1900 orang					
Penilaian Angka Kredit	Jumlah dokumen PAK Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang dinilai	berkas			2000 berkas					
Tujuan 5 Kesetaraan Gender										
INDIKATOR SDGs: 5.1.1* Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.										
PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT										

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	BASE LINE	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	INSTANSI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023		
Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan / Gender	Jumlah peserta yang mengikuti dialog	Peserta	-	-	200					KESBANGPOL
PROGRAM Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak										
Advokasi dan Fasilitas PUG Bagi Perempuan	Jumlah kajian akademis tentang pengarusutamaan gender dan anak	Dokumen	-	-	1					DPPKB

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	BASE LINE	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	INSTANSI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023		
PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETARAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN										
Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Peran Serta dan Keselarasan Gender	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan	orang	-	-	45 orang					DPPKB
Pembinaan Gabungan Organisasi Wanita Kota Bontang	Jumlah Anggota GOW	OW	-	-	65 OW					DPPKB
INDIKATOR SDGs: 5.2.1* Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.										
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN										
Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak Terhadap Tindak Kekerasan	Jumlah pendampingan yang dilakukan	Kasus	-							DPPKB
INDIKATOR SDGs: 5.2.1.(a) Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.										
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN										
Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak Terhadap Tindak Kekerasan	Jumlah pendampingan yang dilakukan	Kasus	-							DPPKB
INDIKATOR SDGs: 5.5.1* Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.										
PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT										
Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan /Gender	Jumlah peserta yang mengikuti dialog	kebijakan	-	-	200	-	-	-		Kesbangpol
Tujuan 6 Air Kebersihan dan Sanitasi Layak										
INDIKATOR SDGs: 6.1.1.(a) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.										
PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM										
Koordinasi Pembangunan Sanitasi dan Air Minum	Laporan koordinasi pembangunan sanitasi dan air minum; Kick Off Meeting Program AMPL Tahun 2019 Provinsi Kaltim	Dokumen / Event			1 dokumen; 1 event					BAPELITBANG

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	BASE LINE	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	INSTANSI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023		
PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT										
Pengawasan Sarana Air Bersih	Sarana/Depo air minum yang diperiksa memenuhi syarat (%)	%			96					Dinkes
PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH										
Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kota Bontang	Jaringan air minum	Meter			100					DPUPR
INDIKATOR SDGs: 6.2.1.(c) Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).										
PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT										
Penyehatan Lingkungan Pemukiman	Workshop Pelatihan Klinik Sanitasi Puskesmas	kali			1					Dinkes
Pengawasan Sarana Air Bersih	Sarana/Depo air minum yang diperiksa memenuhi syarat (%)	%			98					Dinkes
Upaya Penyehatan Lingkungan Puskesmas Bontang Lestari	Pemeriksaan Sampel Air (Kimia dan bakteri)	sampel			6 sampel					Dinkes
Upaya Penyehatan Lingkungan Puskesmas Bontang Utara 2	Pemeliharaan IPAL Puskesmas	kali			12 kali					Dinkes
INDIKATOR SDGs: 6.3.2.(b) Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.										
PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR										
Normalisasi Sungai Bontang	Panjang Normalisasi Sungai Bontang	meter			1000 meter					DPUPR
Rehabilitasi/Pemeliharaan Normalisasi Saluran Drainase/Sungai Tersebar di Kecamatan Bontang Utara	Saluran-saluran yang terpelihara	meter			1000 meter					DPUPR

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	BASE LINE	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	INSTANSI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023		
Rehabilitasi/Pemeliharaan Normalisasi Saluran Drainase/Sungai tersebar di Kecamatan Bontang Selatan	Saluran-saluran yang terpelihara	1100 meter			1100 meter					DPUPR
Rehabilitasi/Pemeliharaan Normalisasi Saluran Drainase/Sungai Tersebar di Kecamatan Bontang Barat	Saluran-saluran yang terpelihara	500 meter			500 meter					DPUPR
Pembangunan Polder Kelurahan Tanjung Laut	Tersedianya Studi Larap dan Dokumen Lingkungan Polder Kelurahan Tanjung Laut	2 dokumen			2 dokumen					DPUPR
Normalisasi Danau Kanaan	Tersedianya Studi Larap Deperesi Danau Kanaan	1 Dokumen			1 Dokumen					DPUPR
Pembangunan Polder Kelurahan Bontang Kuala	Tersedianya Studi Larap dan Dokumen Lingkungan Polder Kelurahan Bontang Kuala	2 dokumen			2 dokumen					DPUPR
Penyusunan FS Polder Kelurahan Satimpo	Tersedianya Studi Larap dan Dokumen Lingkungan Polder Kelurahan Satimpo	-			-					DPUPR
Pengadaan Lahan RTH RT. 07 Kelurahan Bontang Baru	-	-			-					DPUPR
Pengadaan Lahan RTH Kelurahan Bontang Kuala	-	-			-					DPUPR
Pembangunan Polder Kelurahan Gunung Telihan	Tersedianya Dokumen DED Polder Kelurahan Gunung Telihan	1 dokumen DED			1 dokumen DED					DPUPR

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	BASE LINE	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	INSTANSI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023		
Pembangunan Estuary DAM Nyerakat	Study Larap Pembangunan Estuary DAM Nyerakat	1 Dokumen			1 Dokumen					DPUPR
Sistem Informasi Data Sungai dan Saluran Drainase Kota Bontang	Data Sungai dan Saluran Drainase Kota Bontang	1 paket			1 paket					DPUPR
Pembangunan Danau Kawasan Pusat Pemerintahan Kota Bontang	Tersedianya Dokumen Lingkungan Danau Kawasan Pusat Pemerintahan Kota Bontang	1 Dokumen			1 Dokumen					DPUPR
Pembangunan Polder Kelurahan Satimpo	DED Polder Kelurahan Satimpo	1 Dokumen			1 Dokumen					DPUPR
PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN POLUSI										
Pembangunan Tempat Pembuangan Benda Padat/Cair yang Menimbulkan Polusi	Jumlah IPAL yang dibangun	paket			1					DPUPR
Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi										
INDIKATOR SDGs: 8.2.1* Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun										
PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI DAN STATISTIK										
Analisis Pertumbuhan Ekonomi Kota Bontang	Jumlah Dokumen tentang Analisis Pertumbuhan Ekonomi Kota Bontang	Dokumen			1					DIKSOMINFO
INDIKATOR SDGs: 8.3.1.(c) Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan										
PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH										
Fasilitasi Pengembangan Dewan Kerajinan Kota Bontang	Jumlah Pelaku Usaha Industri Kecil dan Menengah Yang Terfasilitasi	Pelaku Usaha	-	-	56					DKUKMP

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	BASE LINE	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	INSTANSI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023		
INDIKATOR SDGs: 8.9.1* Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB										
PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA										
Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan	Rencana Induk Pengembangan Objek Wisata (RIPOW)	Dokumen			3	-				DISPOPAR
Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata	Jumlah fasilitas pendukung yang dibangun	fasilitas			7					DISPOPAR
PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA										
Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata	Jumlah event pariwisata yang diikuti	event			329,490,000	555,964,500				DISPOPAR
Koordinasi Dengan Sektor Pendukung Pariwisata	Jumlah Kelompok Sadar Wisata dan Ekonomi Kreatif Yang Dibina	kelompok			230,895,000	242,439,750				DISPOPAR
INDIKATOR SDGs: 8.9.1.(a) Jumlah wisatawan mancanegara										
PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA										
Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan	Rencana Induk Pengembangan Objek Wisata (RIPOW)	Dokumen			3	-				DISPOPAR
Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata	Jumlah fasilitas pendukung yang dibangun	fasilitas			7					DISPOPAR
PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA										
Koordinasi Dengan Sektor Pendukung Pariwisata	Jumlah Kelompok Sadar Wisata dan Ekonomi Kreatif Yang Dibina	kelompok			10					DISPOPAR
INDIKATOR SDGs: 8.9.1.(b) Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.										
PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA										
Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan	Rencana Induk Pengembangan Objek Wisata (RIPOW)	Dokumen			3	-				DISPOPAR

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	BASE LINE	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	INSTANSI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023		
Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata	Pembangunan Jumlah fasilitas pendukung yang dibangun	fasilitas			7					DISPOPAPAR

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	BASE LINE	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	INSTANSI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023		
PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA										
Koordinasi Dengan Sektor Pendukung Pariwisata	Jumlah Kelompok Sadar Wisata dan Ekonomi Kreatif Yang Dibina	kelompok			10					DISPOPAR
Tujuan 9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur										
INDIKATOR SDGs: 9.1.1.(a) Kondisi mantap jalan nasional.										
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan										
Pembangunan Jalan Satya Lencana	Jalan yang dibangun	meter			500					DPUPR
Pembangunan Jalan Lingkar Pesisir Kota Bontang	Jalan yang dibangun	Meter			25					DPUPR
INDIKATOR SDGs: 9.1.2.(c) Jumlah pelabuhan strategis.										
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN										
Pengadaan Alat Penunjang Pelayanan Angkutan Laut	Life Jacket dan Life Buoy	unit			550 unit					DISHUB
Pengamanan dan Pengendalian embarkasi dan Debarkasi Kapal Penumpang Pelabuhan Umum Loktuan	Pengamanan dan pengendalian embarkasi dan debarkasi	kegiatan			2 kegiatan					DISHUB
Monitoring, Analisis dan Evaluasi Angkutan Lebaran	Analisis dan evaluasi angkutan lebaran	dokumen			1 dokumen					DISHUB
Pengamanan dan Pengendalian Angkutan Laut Natal 2017 dan Tahun Baru 2018	Pengamanan dan pengendalian angkutan natal dan tahun baru	kegiatan			1 kegiatan					DISHUB
Sosialisasi Kespel Kapal Angkutan Penyebrangan	Jumlah peserta	orang			200 orang					DISHUB
Pengawasan Fasilitas dan Kelayakan Pelabuhan Lokal Kota Bontang	Inspeksi dan pendataan pelabuhan lokal Kota Bontang	dermaga			20 dermaga					DISHUB
Koordinasi Pengawasan Keselamatan Pelayaran	Pengawasan kapal lokal bontang	kapal			600 kapal	-				DISHUB

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	BASE LINE	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	INSTANSI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023		
PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH										
Penyusunan Master Plan Kawasan Pelabuhan Kota Bontang	Dokumen Master Plan Kawasan Pelabuhan Kota Bontang	Dokumen			1					BAPELITBANG
INDIKATOR SDGs: 9.2.1* Proporsi nilai tambah sektor industri pengolahan non migas terhadap PDB dan perkapita.										
PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI INDUSTRI										
Fasilitas Pengembangan Industri Rumpun Laut	Jumlah Peserta Pelatihan	org			50					DKUKMP
PROGRAM PENATAAN STRUKTUR INDUSTRI										
Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Industri Kota Bontang	Jumlah Orang Yang Tersosialisasi	org			90					DKUKMP
INDIKATOR SDGs: 9.4.1.(a) Persentase Perubahan Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca.										
PROGRAM PERLINDUNGAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM										
Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	Jumlah peserta sosialisasi emisi GRK	Peserta			70					DLH
PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN POLUSI										
Pengujian Emisi Kendaraan Bermotor	Jumlah kendaraan yang diuji emisinya	unit			55 unit					DLH
Pengujian Emisi/Polusi Udara Akibat Aktivitas Industri	Laporan pengujian emisi udara	dokumen			1 dokumen					DLH
Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan										
INDIKATOR SDGs: 10.1.1.(c) Jumlah desa tertinggal										
PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT										
Pembinaan dan Pelatihan PKK	Jumlah Pembinaan dan Pelatihan	Kegiatan			5					DSPM
PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN										
Pendampingan Pelaksanaan Kegiatan PRODUTA (Program 200 Juta Per-RT)	Jumlah RT yang didampingi	RT			499 RT					DSPM

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	BASE LINE	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	INSTANSI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023		
Pendataan dan Pembinaan Usaha Ekonomi Masyarakat Kelurahan	Jumlah pendataan dan pembinaan usaha ekonomi kelurahan	Kelurahan			15 Kelurahan					DSPM

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	BASE LINE	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	INSTANSI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023		
PROGRAM PENINGKATAN PENDAYAGUNAAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA										
Pemasyarakatan dan Pengembangan Penerapan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Kelompok Masyarakat TTG yang Berhasil	Posyantek			3 Posyantek (3 Kecamatan)					DSPM
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA DAN ORGANISASI MASYARAKAT										
Pembinaan dan Pelatihan Posyandu	Jumlah kader posyandu dan Jumlah posyandu berprestasi	kader dan posyandu			60 kader dan 1 posyandu					DSPM
Pembinaan dan Pelatihan LPM	Jumlah LPM	LPM			19 LPM					DSPM
INDIKATOR SDGs: 10.3.1.(a) Aspek Kebebasan Sipil dalam Indeks Demokrasi Indonesia										
PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT										
Tim Peneliti Administrasi Kelengkapan Partai Politik	Jumlah proposal bantuan partai politik yang diverifikasi	proposal			16 proposal					DSPM
Verifikasi Data Orkemas	Jumlah verifikasi data Orkemas	kali			6 kali					DSPM
Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan / Gender	Jumlah peserta yang mengikuti dialog	peserta			200 peserta					DSPM
Sosialisasi Peraturan Tentang Organisasi Masyarakat	Jumlah peserta sosialisasi	peserta			200 peserta					DSPM
Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	Jumlah kegiatan dukungan pemilu yang diselenggarakan	...kegiatan			...kegiatan					DSPM
Tujuan 11 Kota dan Pemukiman Yang Berkelanjutan										
INDIKATOR SDGs: 11.1.1.(a). Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.										
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN										
Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung Rusunawa	Pagar Rusunawa	m			100m					DPKPP
Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung Rusunawa	Pagar Loktuan Rusunawa	m			100m					DPKPP

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	BASE LINE	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	INSTANSI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023		
Pemeliharaan dan Operasional Rusunawa	Jumlah rusunawa yang dirawat	lokasi			3 lokasi					DPKPP
Penyusunan Sistem Informasi/Database Perumahan dan Kawasan Permukiman	Data Perumahan dan Kawasan Permukiman	Sistem			1 Sistem					DPKPP
INDIKATOR SDGs: 11.5.1*. Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.										
PROGRAM PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN PENANGGULANGAN BENCANA										
Rapat Koordinasi Kebencanaan	jumlah peserta	Orang			200 orang					BPBD
Penyuluhan Antisipasi Bencana	Jumlah peserta penyuluhan	Orang			1350 orang					BPBD
	pakaian olah raga	pasang			43 pasang					
	Baju Kaos	buah			43 buah					
	Sepatu Olahraga	pasang			43 pasang					
	Jumlah peserta pelatihan	orang			1000 orang					
Pemantauan Daerah Rawan Bencana	jumlah pemantauan daerah rawan bencana	Dokumen			3 Dokumen					BPBD
Pengadaan Sarana Prasarana Penanggulangan Bencana	Jumlah Peralatan SAR	Jenis			13 Jenis					BPBD
INDIKATOR SDGs: 11.5.1.(c). Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.										
PROGRAM PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN PENANGGULANGAN BENCANA										
Penyuluhan Antisipasi Bencana	Jumlah peserta penyuluhan	Orang			1350 orang					BPBD
	pakaian olah raga	pasang			43 pasang					
	Baju Kaos	buah			43 buah					
	Sepatu Olahraga	pasang			43 pasang					
	Jumlah peserta pelatihan	orang			1000 orang					
Pemantauan Daerah Rawan Bencana	jumlah pemantauan daerah rawan bencana	Dokumen			350,470,000.00					BPBD

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	BASE LINE	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	INSTANSI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023		
INDIKATOR SDGs: 11.6.1.(a). Persentase sampah perkotaan yang tertangani.										
PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGOLAHAN SAMPAH										
Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Pemeliharaan kontainer	Tahun			1 tahun					DLH
	Jumlah kontainer sampah	Unit			5 unit					
	Jumlah perlengkapan dan peralatan kerja petugas	Jenis			4 jenis					
	Jumlah dump truck	Unit			1 unit					
	Jumlah motor roda 3	Unit			2 unit					
Penyusunan Kebijakan Kerjasama Persampahan	Dokumen naskah akademik Rencana Pengawasan dan Pengelolaan LH	dokumen			1 dokumen					DLH
Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan	Jumlah perlengkapan dan peralatan kerja petugas	jenis			3 jenis					DLH
Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan	Premi Asuransi	orang			275 orang					DLH
Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan	Jumlah PHL yang tersedia	orang			275 orang					DLH
Bimbingan Teknis Persampahan	Jumlah peserta pelatihan manajemen pengolahan persampahan	orang			35 orang					DLH
Bimbingan Teknis Persampahan	Jumlah peserta pelatihan KSM 3R/Bank Sampah	orang			50 orang					DLH

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	BASE LINE	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	INSTANSI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023		
Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah tumbler yang disediakan	unit			3960 unit					DLH
Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan	Promosi dan kampanye 3 R	paket			1 paket					DLH
Pengembangan Kinerja Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah	jumlah Cell Area yang tertutupi	Cell Area			2 Cell Area					DLH
Pengembangan Kinerja Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah	Sewa dump truck untuk penimbunan di area zone aktif	rit	60	-	1.250 rit					DLH
PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN SARANA/PRASARANA DAN LINGKUNGAN										
Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah kelurahan yang dibina	kelurahan	-	-	3960 unit					Kec. BU
	Promosi dan kampanye 3 R	paket			1 paket					
INDIKATOR SDGs: 11.b.1*. Proporsi pemerintah kota yang memiliki dokumen strategi pengurangan risiko bencana.										
PROGRAM PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN PENANGGULANGAN BENCANA										
Pemantauan Daerah Rawan Bencana	jumlah pemantauan daerah rawan bencana	Dokumen			3.00					BPBD
Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi Yang Bertanggungjawab										
INDIKATOR SDGs: 12.4.1.(a) Jumlah peserta Proper yang mencapai minimal ranking BIRU.										
INDIKATOR SDGs: 12.4.2.(a) Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).										
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP										
Pengelolaan B3 Dan Limbah B3	Jumlah usaha yang diawasi	badan usaha			120 badan usaha					DLH
	Laporan Pengelolaan Limbah B3	dokumen			1 dokumen					

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	BASE LINE	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	INSTANSI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023		
Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim										
INDIKATOR SDGs: 13.1.2* Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.										
PROGRAM PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN PENANGGULANGAN BENCANA										
Rapat Koordinasi Kebencanaan	jumlah peserta	Orang			200 orang					BPBD
Penyuluhan Antisipasi Bencana	Jumlah peserta penyuluhan	Orang			1350 orang					BPBD
	pakaian olah raga	pasang			43 pasang					
	Baju Kaos	buah			43 buah					
	Sepatu Olahraga	pasang			43 pasang					
	Jumlah peserta pelatihan	orang			1000 orang					
Pemantauan Daerah Rawan Bencana	jumlah pemantauan daerah rawan bencana	Dokumen			3 Dokumen					BPBD
Pengadaan Sarana Prasarana Penanggulangan Bencana	Jumlah Peralatan SAR	Jenis			13 Jenis					BPBD
INDIKATOR SDGs: 13.2.1.(a) Dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK).										
PROGRAM PERLINDUNGAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM										
Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	Jumlah peserta sosialisasi emisi GRK	peserta			70	-				DLH
Tujuan 14 Ekosistem Lautan										
INDIKATOR SDGs: 14.5.1* Jumlah luas kawasan konservasi perairan.										
PROGRAM PERLINDUNGAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM										
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem	Jumlah laporan pendataan keanekaragaman hayati	dokumen			1					DLH
INDIKATOR SDGs: 14.6.1.(a) Persentase kepatuhan pelaku usaha.										
PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP										
Pelayanan Usaha Perikanan Tangkap	Perizinan nelayan tangkap	dokumen								DKPPP

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	BASE LINE	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	INSTANSI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023		
INDIKATOR SDGs: 14.b.1.(b) Jumlah nelayan yang terlindungi.										
PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP										
Pendampingan pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap	Jumlah OPD yang mengikuti Rakor perikanan									DKPPP
Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan Yang Tangguh										
Indikator 16.1.2.(a) Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.										
PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN										
Fasilitasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial	Jumlah kegiatan Tim Kewaspadaan Dini .. kegiatan yang difasilitasi			0						KESBANGPOL
Indikator 16.1.3.(a) Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.										
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN										
Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak Terhadap Tindak Kekerasan	Jumlah pendampingan yang dilakukan	... Kasus								DPPKB
	Jumlah peserta sosialisasi	...Orang								DPPKB
	JumlahPesertaBimtek									DPPKB
Kegiatan Dharma Wanita Persatuan Kota Bontang	Jumlah kegiatan pembinaan yang dilaksanakan	.. kegiatan								DPPKB
Indikator 16.2.1.(b) Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.										
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN										
Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak Terhadap Tindak Kekerasan	Jumlah pendampingan yang dilakukan	... Kasus								DPPKB
	Jumlah peserta sosialisasi	...Orang								DPPKB
	JumlahPesertaBimtek									DPPKB

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	BASE LINE	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	INSTANSI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023		
Indikator 16.3.1.(a) Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.										
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN										
Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak Terhadap Tindak Kekerasan	Jumlah pendampingan yang dilakukan	... Kasus								DPPKB
Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak Terhadap Tindak Kekerasan	Jumlah peserta sosialisasi	...Orang								DPPKB
	Jumlah Peserta Bimtek									DPPKB
Indikator 16.3.1.(b) Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi dan non litigasi.										
PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN										
Pelayanan dan Bantuan Hukum	Jumlah perkara yang ditangani	Perkara			3					Sekda
Indikator 16.3.1.(c) Jumlah pelayanan peradilan bagi masyarakat miskin melalui sidang di luar gedung pengadilan; pembebasan biaya perkara; dan Pos Layanan Hukum.										
PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN										
Pelayanan dan Bantuan Hukum	Jumlah perkara yang ditangani	Perkara			3					Sekda
Indikator 16.3.2. (a) Proporsi tahanan yang melebihi masa penahanan terhadap seluruh jumlah tahanan.										
16.5.1.(a) Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).										
PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN										
Monitoring dan Implementasi Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD PK)	Jumlah laporan hasil pemantauan RAD PPK Terintegrasi Kota Bontang	Laporan			4					Sekda
16.6.1* Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.										
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH										
Rekonsiliasi Realisasi Pengeluaran OPD	Jumlah Berita Acara Pengeluaran perbulan	Berita Acara OPD			30 Berita Acara OPD					BPKAD
Penetapan Bendaharan Penerimaan dan Pengeluaran SKPD serta SKPKD	Jumlah bendahara penerima dan pengeluaran serta SKPKD	OPD			29 OPD					BPKAD

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	BASE LINE	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	INSTANSI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023		
16.6.1.(a) Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota)										
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH										
Review atas Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bontang	Dokumen Revisi Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bontang	Dokumen			1 Dokumen					BPKAD
Fasilitasi Pendampingan Pengelolaan Keuangan Berbasis Akrual	Berita Acara Rekonsiliasi Laporan Keuangan	Dokumen			58 Dokumen					BPKAD
16.6.1.(b) Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).										
PROGRAM PENINGKATAN PEMBINAAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN										
Koordinasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Dokumen LPPD Tahun 2019 dan Peserta Workshop Penyusunan LPPD 2019	dokumen; orang								SEKDA
Fasilitasi Pembinaan Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Laporan Monitoring Evaluasi	Laporan								SEKDA
16.6.1.(c) Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.										
PROGRAM PENGEMBANGAN LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA										
Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa Kota Bontang	Jumlah bimtek pengadaan barang dan jasa	kali			3 kali					SEKDA
Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa Kota Bontang	Jumlah monitoring evaluasi pengadaan barang dan jasa	kali			2 kali					SEKDA
Fasilitasi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kota Bontang	fasilitasi unit kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)	bulan			12 bulan					SEKDA

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	BASE LINE	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	INSTANSI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023		
Pelaksanaan e-Procurement	Presentase Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa secara elektronik	tahun			1 tahun					SEKDA
16.6.1.(d) Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).										
PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN										
Sosialisasi dan Evaluasi Hasil Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Bontang	Penyempurnaan hasil evaluasi Road Map Reformasi Birokrasi	dokumen			1 dokumen					
16.7.1.(a) Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).										
PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT										
Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan / Gender	Jumlah peserta yang mengikuti dialog	peserta			200 peserta					KESBANGPOL
16.7.1.(b) Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).										
PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT										
Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan / Gender	Jumlah peserta yang mengikuti dialog	peserta			200 peserta					KESBANGPOL
16.7.2.(c) Indeks Hak-hak Politik.										
PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT										
Tim Peneliti Administrasi Kelengkapan Partai Politik	Jumlah proposal bantuan partai politik yang diverifikasi	proposal			16 proposal					KESBANGPOL
Verifikasi Data Orkemas	Jumlah verifikasi data Orkemas	kali			6 kali					KESBANGPOL
Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan / Gender	Jumlah peserta yang mengikuti dialog	peserta			200 peserta					KESBANGPOL
Sosialisasi Peraturan Tentang Organisasi Masyarakat	Jumlah peserta sosialisasi	peserta			200 peserta					KESBANGPOL
Dukungan Penyelenggaraan Pemilu	Jumlah kegiatan dukungan pemilukada yang diselenggarakan	kegiatan			...kegiatan					KESBANGPOL

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	BASE LINE	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	INSTANSI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023		
16.10.1.(b) Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan.										
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN										
Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak Terhadap Tindak Kekerasan	Jumlah pendampingan yang dilakukan	Kasus								
	Jumlah peserta sosialisasi	Orang								
16.10.2.(c) Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.										
PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASA										
Penguatan Kapasitas Pengelola PPID	Jumlah Aparat Masing-masing OPD yang Memahami UU KIP	Orang			100 Orang				DISKOMINFO	
	Tersedianya Website PPID yang terupdate	Website			1 Website				DISKOMINFO	
Tujuan 17 Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan										
INDIKATOR SDGs: 17.1.1* Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.										
PROGRAM PENINGKATAN PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH										
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah	Persentase pajak daerah terhadap pendapatan asli Daerah	%			49,93%				Bapenda	
Jasa Penyampaian SPPT PBB oleh RT melalui Kelurahan	Jumlah SPPDT PBB kepada wajib pajak PBB Sektor Perkotaan secara optimal	lbr			38.000 lbr				Bapenda	
Pemeliharaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah (SIMPATDA)	Jumlah aplikasi yang dipelihara	Aplikasi			1 Aplikasi				Bapenda	
Asosiasi Daerah Penghasil Migas	Keikutsertaan kota Bontang dalam Asosiasi Daerah Penghasil Migas	Tahun			1 Tahun				Bapenda	

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	BASE LINE	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	INSTANSI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023		
Pemeliharaan SISMIOP PBB	Terawatnya SISMIOP PBB	Aplikasi			1 Aplikasi					Bapenda
Validasi Data Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan	Validasi Data Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan	tahun			1 tahun					Bapenda
Pelaksanaan Pemungutan dan Monitoring Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan	Jumlah Objek PBB yang telah dipungut dan dimonitoring	Objek								Bapenda
INDIKATOR SDGs: 17.1.1.(a) Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.										
PROGRAM PENINGKATAN PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH										
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah	Persentase pajak daerah terhadap pendapatan asli Daerah	%			49,93%					Bapenda
Asosiasi Daerah Penghasil Migas	Keikutsertaan kota Bontang dalam Asosiasi Daerah Penghasil Migas	Tahun			1					Bapenda
Validasi Data Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan	Validasi Data Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan	tahun			1					Bapenda
Pelaksanaan Pemungutan dan Monitoring Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan	Jumlah Objek PBB yang telah dipungut dan dimonitoring	Objek								Bapenda
INDIKATOR SDGs: 17.11.1.(a) Pertumbuhan ekspor produk non migas										
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN EKSPOR										
Fasilitasi Pengembangan SDM Bidang Perdagangan	Jumlah PKL Yang Mengikuti Pelatihan	PKL			20 PKL					DKUKMP
Pameran Dagang Komoditi Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha Yang Mengikuti Pameran Dagang	masyarakat			2 masyarakat					DKUKMP

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	BASE LINE	TARGET TAHUNAN					INDIKATIF ALOKASI ANGGARAN 5 TAHUN	INSTANSI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023		
INDIKATOR SDGs: 17.13.1* Tersedianya Dashboard Makroekonomi.										
PROGRAM KOORDINASI PERUMUSAN DAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN EKONOMI										
Peningkatan Jaring Kerjasama Antar Lembaga	Laporan Kerjasama antar Lembaga Bidang Perekonomian	laporan	-		1 laporan					SEKDA
Penyusunan Dan Evaluasi Kebijakan Perekonomian Daerah Kota Bontang	Dokumen kajian peningkatan PAD Kota Bontang	Dokumen			1 Dokumen					SEKDA
Pemantauan dan Analisis Akses Harga Pangan Pokok (Pengendalian Inflasi Daerah)	Jumlah pemantauan yang dilaksanakan	kali			2 kali					SEKDA
Pembinaan Dan Pengawasan BUMD Kota Bontang	Jumlah Pengawasan dan Pembinaan terhadap BUMD Kota Bontang	kali			4 kali					SEKDA
Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama di Bidang Penanaman Modal Instansi Pemerintah dan Dunia Usaha	Pelaksanaan Rakor PEPIDA TA 2020	dokumen			1 dokumen	-				SEKDA
INDIKATOR SDGs: 17.17.1.(a) Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).										
PROGRAM KOORDINASI PERUMUSAN DAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN EKONOMI										
Pembinaan Dan Pengawasan BUMD Kota Bontang	Jumlah Pengawasan dan Pembinaan terhadap BUMD Kota Bontang	kali			4 kali					SEKDA
Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama di Bidang Penanaman Modal Instansi Pemerintah dan Dunia Usaha	Pelaksanaan Rakor PEPIDA TA 2020	dokumen			1 dokumen	-				SEKDA

MATRIK 3. PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline (2018)	Target			Indikatif Alokasi Anggaran (3 Tahun)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			2019	2020	2021			
TUJUAN 1. Mengakhiri Kemiskinan Dalam Segala Bentuk Dimanapun								
Target 1.4. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.								
INDIKATOR: 1.4.1 (f). Persentase rumah tangga kumuh perkotaan								
Program 1 : Program pencegahan kawasan kumuh perkotaan								
Kegiatan 1 :	Rehabilitasi Permukiman Kumuh di Kota Samarinda (Kotaku)	Ha			5	3	12,000,000,000.00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kegiatan 2 :	Penunjang Kegiatan Rehabilitasi Permukiman Kumuh di Kota Samarinda (Kotaku)	Dok			5	3	200,000,000.00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Target 1.3. Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai substansial bagi kelompok miskin dan rentan								
INDIKATOR: 1.3.1 (b) Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan								
Program 1 : Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan								
Kegiatan 1 : Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang difasilitasi	Kasus	-	-	45 Kasus	40 Kasus	250,000,000.00	APBD DISNAKER
Target 1.5. Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.								
Program 1 : Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan								

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline (2018)	Target			Indikatif Alokasi Anggaran (3 Tahun)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2019	2020	2021			
Kegiatan 1 :	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Menghadapi Bencana	Kelurahan	4 Kelurahan	-	2 Kelurahan		300,000,000.00	APBD	BPBD
Kegiatan 2 :	Revisi Regulasi Terkait Kebencanaan Pengurangan Risiko Bencana	Dokumen	-	1 Dokumen	4 Dokumen	5 Dokumen	1,150,000,000.00	APBD	BPBD
Program 2 : Kedaruratan dan Logistik									
Kegiatan 3 :	Peningkatan dan Pengadaan sarana dan Prasarana Penanggulangan bencana	Unit		100 Unit	100 Unit		1,200,000,000.00	APBD	BPBD
Program 3 : Rehabilitasi dan Rekonstruksi									
Kegiatan 4 :	Kaji Kebutuhan Pasca Bencana	Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen		300,000,000.00	APBD	BPBD
TUJUAN 2. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan.									
PROGRAM PEMERINTAH									
Target 2.5 Pada tahun 2020, mengelola keragaman genetik benih, tanaman budidaya dan hewan ternak dan peliharaan dan spesies liar terkait, termasuk melalui bank benih dan tanaman yang dikelola dan dianekaragamkan dengan baik di tingkat nasional, regional dan internasional, serta meningkatkan akses terhadap pembagian keuntungan yang adil dan merata, hasil dari pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional terkait, sebagaimana yang disepakati secara internasional.									
Target 2.a Meningkatkan investasi, termasuk melalui kerjasama internasional yang kuat, dalam infrastruktur perdesaan, layanan kajian dan perluasan pertanian, pengembangan teknologi dan bank gen untuk tanaman dan ternak, untuk meningkatkan kapasitas produktif pertanian di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang.									
Target 2.b. Memperbaiki dan mencegah pembatasan dan distorsi dalam pasar pertanian dunia, termasuk melalui penghapusan secara bersamaan segala bentuk subsidi ekspor pertanian dan semua tindakan ekspor dengan efek setara, sesuai dengan amanat the Doha Development Round.									

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline (2018)	Target			Indikatif Alokasi Anggaran (3 Tahun)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
			2019	2020	2021				
Target 2.c. Mengadopsi langkah- langkah untuk menjamin berfungsinya pasar komoditas pangan serta turunannya dengan tepat, dan memfasilitasi pada waktu yang tepat akses terhadap informasi pasar, termasuk informasi cadangan pangan, untuk membantu membatasi volatilitas harga pangan yang ekstrim.									
INDIKATOR: 2.4.1. Penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan									
Program 1 : Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan									
Kegiatan 1 : Pemetaan Lahan dan Air	Pemetaan wilayah irigasi pertanian	kecamatan	-	2	2	2	1,050,000.00	APBD	Dinas Pertanian
	Tersedianya dikumen SID	dokumen	-	1	1	1			
INDIKATOR: 2.5.1. Jumlah varietas unggul tanaman dan hewan untuk pangan yang dilepas									
Program 1 : Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan									
Kegiatan 1 : Peningkatan Intensifikasi, Ekstensifikasi Hortikultura	Tersedianya bibit unggul hortikultura	pohon	-	10000	12000	12000	1,050,000.00	APBD	Dinas Pertanian
	Perluasan areal hortikultura	ha	-	22	35	35			
	Tersedianya aneka tanaman hortikultura	jenis	-	4	4	4			
TUJUAN 5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan.									
Target 5.a. Melakukan reformasi untuk memberi hak yang sama kepada perempuan terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, jasa keuangan, warisan dan sumber daya alam, sesuai dengan hukum nasional.									
INDIKATOR: 5.a.2. Proporsi negara dengan kerangka hukum (termasuk hukum adat) yang menjamin persamaan hak perempuan untuk kepemilikan tanah dan/atau hak kontrol									
Program 1 : Program Pengembangan Kawasan Perkotaan									
Kegiatan 1 :	Penunjang Penerbitan IMTN	Dokumen/Srt	0	20	25	35	900,000,000.00	APBD	DINAS PERTANAHAN

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline (2018)	Target			Indikatif Alokasi Anggaran (3 Tahun)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
			2019	2020	2021				
Target 5.3. Menghilangkan semua praktek berbahaya, seperti pernikahan anak, pernikahan dini dan paksa, serta sunat perempuan.									
Target 5.6. Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen dokumen hasil revidi dari konferensi konferensi tersebut.									
Program Keluarga Berencana									
Sinkronisasi data pengintegrasian pendidikan kependudukan	Perda atau Perkada tentang Pengendalian Penduduk	Perda atau Perkada		5/1	5	5	2,140,000,000.00		
Belajar Mengajar dan Pojok Kependudukan	pojok kependudukan di sekolah	Unit		10/1	10	10	1,000,000,000.00		
Pengembangan dan Pemanfaatan Sistem Informasi KB dan Keluarga (SIDUGA)	Kelurahan yang memanfaatkan SIK KB	Kelurahan		10	20	30	1,700,000,000.00		
Sarasehan Pemanfaatan Hasil Pendataan Keluarga	Pelaksanaan Saresehan	Kali		1/0	1	1	2,140,000,000.00		
Monitoring dan Evaluasi Capaian Program KBKS	Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Capaian Program KBKS	Dokumen		1	1	1	450,000,000.00		
Pembangunan/ Alih Fungsi/ Pengembangan Balai Penyuluhan KB (DAK)	Balai Penyuluh KB yang dibangun	Unit		3	4		2,283,000,000.00		
Pengadaan Mobil Jemput Antar Akseptor KB	Mobil Jemput Antar Akseptor KB	Unit	1/1			1	800,000,000.00		

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline (2018)	Target			Indikatif Alokasi Anggaran (3 Tahun)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2019	2020	2021			
Bantuan operasional Keluarga Berencana (BOKB) (DAK Non Fisik)	Laporan pelaksanaan Bantuan operasional Keluarga Berencana (BOKB) (DAK Non Fisik)	Dokumen		1	1	1	10,130,331,000.00		
Pengadaan Sarana Prasarana Klinik Pelayanan KB (DAK)	Sarana Prasarana Klinik Pelayanan KB	Set		60	60	60	600,000,000.00		
Pembangunan/ Alih Fungsi Gudang Alat dan Obat Kontrasepsi (DAK)	Gudang Alat dan Obat Kontrasepsi yang dibangun.	unit	10/3	10/3	10/2	10/2	3,200,000,000.00		
Pengadaan Sarana Transportasi Pelayanan KB (DAK)	Sarana dan Transportasi Pelayanan KB	unit				1	2,000,000,000.00		
Pengadaan Sarana Transportasi Distribusi Alkon KB (DAK)	Sarana dan Transportasi distribusi alkon KB	Unit			1		800,000,000.00		
Pengadaan Sarana Transportasi Roda 2 Pelayanan KB (DAK)	Sarana dan Transportasi Roda 2 Pelayanan KB	Unit				59	2,655,000,000.00		
Pengadaan Mobil Unit Penerangan (MUPEN) KB (DAK)	Mobil Unit Penerangan (MUPEN) KB	unit			1		900,000,000.00		
Pengadaan Sarana KIE Kit dan Media Lini Lapangan (DAK)	Sarana KIE KIT dan Media Lini Lapangan	unit			59		354,000,000.00		
Pengadaan Media/ Alat Pengolah Data (DAK)	Media/ Alat Pengolah Data	unit			10		200,000,000.00		
Pengadaan Sarana Petugas Lapangan KB (DAK)	Sarana Petugas Lapangan KB	set				2,059	1,329,500,000.00		

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline (2018)	Target			Indikatif Alokasi Anggaran (3 Tahun)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2019	2020	2021			
Pemukhtahiran dan pengolahan data kependudukan.	Laporan Pemukhtahiran dan pengolahan data kependudukan.	Dokumen		1	1	1	220,000,000.00		
Pemutakhiran Data Keluarga	Persentase pemutakhiran data keluarga	%		100	100	100	160,000,000.00		
Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk Kota Samarinda	Wilayah Kelurahan pelaksanaan Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk	%		50	75	100	120,000,000.00		
Analisis Data	Laporan hasil Analisis Data	Dokumen		1	1	1	120,000,000.00		
Pemetaan Keluarga Pra Sejahtera	Laporan hasil Pemetaan Keluarga Pra Sejahtera.	Dokumen		1	1	1	100,000,000.00		
Pendataan Keluarga	Laporan hasil Pendataan Keluarga.	Dokumen		1	1	1	100,000,000.00		
Pembinaan Keluarga	Persentase Kepala Keluarga yg dibina	%		50	75	75	100,000,000.00		
Pengembangan Infrastruktur Jaringan Internet	Jaringan Internet (Indihome) 10 MBPs	Unit		1	1	1	100,000,000.00		
Pengelolaan analisa data dan informasi program KB	Dokumen informasi data mikro keluarga	Dokumen		59	59	59	1,870,000,000.00		
Pemetaan Data Mikro	Dokumen data mikro	Dokumen		59	59	59	210,000,000.00		
Program Pelayanan Kontrasepsi									
Akseptor KB Aktif	Akseptor KB Aktif	Akseptor		97,474	102,974	107,974	2,000,000,000.00		
Akseptor KB Baru	Akseptor KB baru	Akseptor		28,912	29,912	30,912	5,154,400,000.00		
Akseptor KB yg menggunakan MKJP Aktif	Akseptor KB yg menggunakan MKJP Aktif	Akseptor		64.33	64.33	64.33	700,000,000.00		

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline (2018)	Target			Indikatif Alokasi Anggaran (3 Tahun)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2019	2020	2021			
	Akseptor KB yg menggunakan Non MKJP Aktif	Akseptor		64.33	64.33	64.33	0.00		
Pelayanan MOP Pria	Akseptor KB Pria	Akseptor		4	4	4	600,000,000.00		
Pelayanan MKJP di DAS dan KUMISAN	Persentase Akseptor MKJP DAS dan kumisan	%		75	80	85	1,400,000,000.00		
Pasangan Usia subur yang istrinya dibawah usia 20 tahun	Persentase kelahiran remaja (perempuan usia 15-19 tahun) perempuan usia 15-19 tahun	%		35	35	35	150,000,000.00		
Penyediaan Pelayanan KB dan alat kontrasepsi	Persentase alat kontrasepsi yang tersedia.	%		100	100	100	2,130,000,000.00		
Pendataan Klinik KB Pemerintah dan Swasta	Klinik KB yang bekerjasama dengan Pemerintah.	Unit		113	118	120	1,400,000,000.00		
	Pertemuan dan Pelatihan Pengelola Data Faskes	kali		4	4	4	0.00		
Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri									
	Kegiatan								
Penyuluhan dan KIE	Peserta Penyuluhan dan KIE	Orang		59	59	59	4,044,000,000.00		
Pengadaan sarana Mobilitas tim KB keliling	Mobil Unit Penerangan KB	Unit			1		2,000,000,000.00		
	Mobil Unit Pelayanan KB	Unit			1		0.00		
Pembinaan Keluarga Berencana	Pembinaan Pelayanan Komunikasi Informas Edukasi (KIE) Program KB	kali		59	59	59	500,000,000.00		

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline (2018)	Target			Indikatif Alokasi Anggaran (3 Tahun)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2019	2020	2021			
Pelayanan konseling KB	Kegiatan Pelayanan konseling KB	kali		5	5	5	1,800,000,000.00		
Pembentukan dan Pembinaan Kampung KB Baru	Kampung KB yang dibentuk dan dibina	kampung KB		59/26	35	35	2,200,000,000.00		
Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat	Sosialisasi dan pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	Kali		59	59	59	4,768,320,000.00		
Komunikasi informasi dan edukasi Keluarga berencana dan keluarga sejahtera	Rasio petugas (PLKB/PKB) per kelurahan	rasio		59	59	59	1,600,000,000.00		
	Pertemuan pembinaan KB oleh PLKB/ PKB di kelurahan	Kali		59	59	59	0.00		
	Pembinaan PKB	Kali		59	59	59	0.00		
	Pertemuan dan Pelatihan PKB/ PLKB	kali		4	4	4	0.00		
Peningkatan Peran Serta Masyarakat	Rasio petugas (PPKBD dan Sub PPKBD) per kelurahan	rasio		59	59	59	3,114,680,000.00		
	PPKBD/ Sub PPKBD yang mendapatkan dana operasional (Rp 20.000,- per bulan)	Orang		2,059	2,059	2,059	0.00		
	Pembinaan dan Pelatihan PPKBD	kali		4	4	4	0.00		
Penyampaian Informasi KB	penyampaian informasi melalui berbagai media	Media		5	5	5	1,700,000,000.00		

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline (2018)	Target			Indikatif Alokasi Anggaran (3 Tahun)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2019	2020	2021			
advokasi dan Penggerakan	MOU dengan Institusi dan Organisasi Massa tentang Pengendalian Penduduk dan KB	MOU		80	80	90	1,480,000,000.00		
UPTD Kecamatan	UPT PLKB Kecamatan yang mendapatkan biaya operasional	UPT PLKB			10	10	500,000,000.00		
Program Penyiapan tenaga pendamping kelompok Bina Keluarga									
Peningkatan Ketahanan Keluarga	Kelompok Ketahanan Keluarga	Kelompok		70	74	74	400,000,000.00		
Pembinaan UPPKS	UPPKS Aktif	Kelompok		60	70	70	1,340,440,000.00		
	Kelompok Tri Bina yang dilatih	Kelompok			80	80			
	Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) yg Aktif	Kelompok		0	80	80			
	Kelompok (Bina Keluarga Lansia) BKL yang aktif	Kelompok		0	84	84			
Program promosi kesehatan ibu,bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat									
Penyuluhan kesehatan ibu,bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat	Pembinaan Anggota Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	Kali		12	12	12	100,000,000.00		
Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU									
Sosialisasi Kebijakan dan strategi KIE dalam pembangunan KB KS di Samarinda	Jumlah Sosialisasi	kali		90	90	90	1,100,000,000.00		
Penyusunan Analisa data Keluarga balita	Laporan Penyusunan Analisa data Keluarga balita	Dokumen		80	80	85	1,100,000,000.00		

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline (2018)	Target			Indikatif Alokasi Anggaran (3 Tahun)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2019	2020	2021			
Pelatihan Kader BKB	Pelatihan Kader BKB	kali		12	12	12	1,600,000,000.00		
Pertemuan Pembinaan Kader BKB	Pertemuan Pembinaan Kader BKB	kali		12	12	12	1,600,000,000.00		
Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak									
Jumlah BKB KIT	Kelompok bina Keluarga Balita (BKB) yang memiliki BKB KIT	Kelompok		80	80	85	1,500,000,000.00		
Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR									
Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	Remaja yang mendapatkan pelayanan informasi dan konseling KRR	Orang		1800	1800	1800	1,682,950,000.00		
Program Kegiatan Reproduksi Remaja									
Persentase pusat Informasi dan Konseling (PIK) aktif	Pusat Informasi dan Konseling (PIK) aktif	Kelompok		80	80	80	200,000,000.00		
Sosialisasi kesehatan Reproduksi Remaja	Peserta sosialisasi kesehatan Reproduksi Remaja	Orang		1800	1800	1800	1,591,610,000.00		
Program peningkatan penanggulangan narkoba,PMS termasuk HIV/ AIDS									
Fasilitasi Penanggulangan HIV / AIDS (KPA)	Sosialisasi Fasilitasi Penanggulangan HIV / AIDS (KPA)	kali		10	10	10	2,500,000,000.00		
	Pembentukan Warga Peduli AIDS (KPA)	Kelompok		10	10	10			
	Screening Kasus HIV/ AIDS	Orang		3000	4000	5000			
	Pertemuan Rutin HIV/ AIDS	Kali		12	12	12			
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran									
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tagihan rekening yang dibayarkan	Bukti pembayaran		36	36	36	694,950,000.00		

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline (2018)	Target			Indikatif Alokasi Anggaran (3 Tahun)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2019	2020	2021			
Penyediaan alat tulis kantor	Jenis alat tulis kantor	jenis		5	5	5	72,000,000.00		
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	laporan realisasi anggaran yang dicetak atau digandakan	Dokumen		4	4	4	79,157,500.00		
Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	jenis komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor yang disediakan	jenis		2	2	2	6,000,000.00		
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	jenis komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	jenis		2	2	2	129,000,000.00		
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Persentase rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dihadiri	persen		100	100	100	1,904,000,000.00		
Penyediaan jasa administrasi perkantoran	PTTB serta Pengelola Keuangan dan Barang yang dibayarkan honorariumnya.	orang		40	40	40	2,685,004,600.00		
Penyediaan Makanan dan Minuman	Persentase penyediaan makanan dan minuman	persen			100	100	150,000,000.00		
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur									
Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Persentase gedung milik sendiri/sewa yang dipelihara	persen		100	100	100	255,000,000.00		
Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	Persentase kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	persen		100	100	100	1,130,658,000.00		

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline (2018)	Target			Indikatif Alokasi Anggaran (3 Tahun)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2019	2020	2021			
Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan peralatan kantor	Persentase perlengkapan dan peralatan kantor yang dipelihara	persen		100	100	100	94,840,000.00		
Program Peningkatan Disiplin Aparatur									
Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapan	Aparatur yang memperoleh pakaian dinas beserta kelengkapannya	orang			130	130	117,000,000.00		
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan									
Peningkatan pengembangan sistem laporan	Dokumen SAKIP	Dokumen		7	7	7	750,000,000.00		
Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur									
Peningkatan SDM dan Penataan pengelolaan administrasi	Aparatur yang diikutsertakan bimtek/pelatihan	orang			2	2	260,000,000.00		
TUJUAN 6. AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK									
Indikator : 6.1.1. (c) Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan									
Program 1 : Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum									
Kegiatan 1 :									
Pembangunan Jaringan Pipa Distribusi Utama	Tersedianya Jaringan Pipa Distribusi Utama	%	100						Dinas PUPR
Kegiatan 2 :									
Perluasan SPAM melalui Pemanfaatan Idle Capacity SPAM Terbangun dari Sistem IKK/PDAM/Komunal (DAK Tahun 2018)									Dinas PUPR

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline (2018)	Target			Indikatif Alokasi Anggaran (3 Tahun)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2019	2020	2021			
Kegiatan 3 :									
Perluasan SPAM Perpipaan Melalui Pemanfaatan Idle Capacity Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Terbangun (DAK Tahun 2019)	Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Gunung Lipan Kelurahan Sengkotek Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda	meter	428				1,366,380,000.00	DAK	Dinas PUPR
Kegiatan 4 :									
Peningkatan Cakupan SPAM Kelurahan Sungai Siring Kecamatan Samarinda Utara, Pipa Distribusi PVC, GIP, HDPE Diameter 400 (DAK Infrastruktur Publik Daerah IPD) (DAK 2016)							174,651,863.00		Dinas PUPR
Program 2 : Program Penyehatan Lingkungan									
Kegiatan 5 :									
Peningkatan Lingkungan Sehat Kota Samarinda	Persentase rumah tangga dengan akses air bersih yang layak	%	92.15	98	100		642,000,000.00		Dinas Kesehatan
Program 3 : Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah									
Kegiatan 6 :									
Penyediaan Sambungan Rumah (SR) bagi MBR	Tersedianya sambungan rumah (SR) bagi MBR	SR		3138			250,000,000.00		Dinas Perkim

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline (2018)	Target			Indikatif Alokasi Anggaran (3 Tahun)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2019	2020	2021			
Kegiatan 8 :									
Penyediaan Sambungan Rumah (SR) Perumahan SKM di Handil Kopi	Tersedianya Sambungan Rumah (SR) Perumahan SKM di Handil Kopi	SR		1			500,000,000.00	Dinas Perkim	
Kegiatan 9 :									
Pengadaan dan Pemasangan Pipa HDPE, Jalan Poros Samarinda - Bontang	Panjang Jaringan Pipa	meter		3500	0		7,000,000,000.00	Dinas PUPR	
Target 6.2: Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan mengentaskan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan									
Indikator : 6.2.1. Proporsi populasi yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun									
Indikator : 6.2.1.(a) Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air									
Indikator : 6.2.1.(b) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak									
Indikator : 6.2.1.(c) Jumlah desa/kecamatan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)									
Indikator : 6.2.1.(d) Jumlah desa/kecamatan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)									
Indikator : 6.2.1.(e) Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal									
Indikator : 6.2.1.(f) Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat									
Program 1 : Program Penyehatan Lingkungan									
Kegiatan 1 :									
Pengembangan Kota Sehat Kota Samarinda	Prosentase Pembinaan Tatanan Kawasan Sehat Di kota Samarinda	%	88.89	100	100	100	1,123,500,000.00	Dinas Kesehatan	
Program 2 : Program Pengembangan Lingkungan Sehat dan persampahan Kota Samarinda									
Kegiatan 2 :									
Pembangunan Instalasi Pengolah Air Limbah Komunal Kawasan	Tersedianya Instalasi Pengolah Air Limbah Komunal Kawasan		100%		5 unit	5 unit	5,000,000,000.00	Dinas PUPR	

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline (2018)	Target			Indikatif Alokasi Anggaran (3 Tahun)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2019	2020	2021			
Kegiatan 3 : Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)		Tersedianya Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)	%	100	10 unit	10 unit	5,000,000,000.00		Dinas PUPR
Kegiatan 4 : Peningkatan dan Pembangunan Prasarana Sanitasi (DAK Tahun 2018)		Terbangunnya Prasarana Sanitasi	%	99.41	100		45,314,600.00		Dinas PUPR
Kegiatan 5 : Pembuatan Prasarana Sanitasi (DAK Tahun 2018)		Tersedianya Prasarana Sanitasi	%	100					Dinas PUPR
Target 6.3. Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, mengimprovisasi pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang serta penggunaan kembali.									
Indikator : 6.3.1. Proporsi limbah cair yang diolah secara aman									
Program 1 : Program Pengendalian pencemaran dan perusakan Lingkungan Hidup									
Kegiatan 1 : Pengendalian limbah B3		usaha/kegiatan yang mengelola limbah B3 yang dibina	Usaha /Kegiatan		60	50	75	417,450,000.00	Dinas Lingkungan Hidup
Kegiatan 2 : Penilaian Dokumen Kajian Lingkungan Hidup (Amdal, UKL dan UPL serta SPPL)		Dokumen AMDAL, UKL dan UPL serta SPPL yang berkualitas	Dokumen		25	250	370	380,000,000.00	Dinas Lingkungan Hidup
Indikator : 6.3.1.(a) Jumlah kabupaten/kota yang meningkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan melakukan pembangunan instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)									
Indikator : 6.3.1.(b) Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.									
Program 2 : Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum									
Kegiatan 3 : Operasional Kendaraan Sedot Lumpur Tinja		Persentase pengelolaan air limbah domestik	persen		100			500,000,000.00	Dinas PUPR

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline (2018)	Target			Indikatif Alokasi Anggaran (3 Tahun)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			2019	2020	2021			
Kegiatan 4 : Operasional UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik	Persentase pengelolaan air limbah domestik	persen	100			1,900,000,000.00		Dinas PUPR
Kegiatan 5 : Revitalisasi IPLT Bukit Pinang Kel. Bukit Pinang Kec. Samarinda Ulu	Persentase pengelolaan air limbah domestik	persen	100			990,507,500.00		Dinas PUPR
Program 3 : Program Pengembangan Lingkungan Sehat dan persampahan Kota Samarinda								
Kegiatan 6 : Revitalisasi IPLT Bukit Pinang Kel. Bukit Pinang Kec. Samarinda Ulu	Tersedianya IPLT Komunal	unit		1	1	6,000,000,000.00		Dinas PUPR
Kegiatan 7 : Pelayanan L2T2 (Layanan Lumpur Tinja Terjadwal)	Persentase Pelayanan L2T2	%		100	100	1,000,000,000.00		Dinas PUPR
Kegiatan 8 : Pelayanan L2T3 (Layanan Lumpur Tinja Tidak Terjadwal)	Persentase Pelayanan L2T3	%		100	100	1,000,000,000.00		Dinas PUPR
Kegiatan 9 : Pengelolaan Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT)	Jumlah IPLT	unit		1	1	3,000,000,000.00		Dinas PUPR
Kegiatan 10 : Revitalisasi Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT)	Jumlah IPLT	unit		1	1	2,000,000,000.00		Dinas PUPR
Indikator : 6.3.2. Proporsi badan air dengan kualitas air ambien yang baik								

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline (2018)	Target			Indikatif Alokasi Anggaran (3 Tahun)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			2019	2020	2021			
Indikator : 6.3.2.(a) Kualitas air danau								
Indikator : 6.3.2.(b) Kualitas air sungai sebagai sumber air baku								
Program 1 : Program Pengendalian pencemaran dan perusakan Lingkungan Hidup								
Kegiatan 3 :								
Pemantauan Kualitas Air Badan Air, Mata Air, Situ, Embung dan Bendung	Jumlah Titik Pemantauan	Titik Pemantauan	15	15		90,000,000.00		Dinas Lingkungan Hidup
Kegiatan 4 :								
Pengendalian Pencemaran Air, Tanah dan Udara	Usaha dan/atau Kegiatan yang Berpotensi Pencemaran Air, tanah dan udara yang dibina	Usaha /Kegiatan		60		95,000,000.00		Dinas Lingkungan Hidup
Target 6.6. Pada tahun 2020, melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau								
Indikator : 6.6.1. (d) Luas lahan kritis dalam KPH yang direhabilitasi								
Program 3 : Program perlindungan konservasi dan sumber daya alam								
Kegiatan 5 :								
Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	Terbentuknya Kampung Iklim Di Kota Samarinda	lokasi		1	2	3	1,361,209,000.00	Dinas Lingkungan Hidup
Kegiatan 6 :								
Inventarisasi Kerusakan Lahan	Laporan Inventarisasi Kerusakan Lahan di Kota Samarinda	Dokumen		3			75,000,000.00	Dinas Lingkungan Hidup
Program 4 : Peningkatan Kualitas Dan Akses Informasi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup								
Kegiatan 7 :								
Kajian Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kota Samarinda	Dokumen Kajian daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup Kota Samarinda	Dokumen	1				0.00	Dinas Lingkungan Hidup

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline (2018)	Target			Indikatif Alokasi Anggaran (3 Tahun)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2019	2020	2021			
Kegiatan 8 : Penyusunan Profil dan RIP (Rencana Induk Pengelolaan) Keanekaragaman Hayati (KEHATI)		Dokumen Rencana Induk Pengelolaan (RIP) KEHATI	1	1	1	1	991,930,000.00		Dinas Lingkungan Hidup
Kegiatan 9 : Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Perlindungan LH Kota Samarinda							Dokumen Rencana Pengelolaan dan Perlindungan LH Kota Samarinda		
Kegiatan 10 : Penetapan Daya Tampung Beban Pencemaran Sungai		Dokumen Daya Tampung Beban Pencemaran Sungai	1			350,000,000.00			Dinas Lingkungan Hidup
Kegiatan 11 : Penyusunan Dokumen Pengelolaan Sumber Daya Alam							Dokumen Pengelolaan Sumber Daya Alam		
Kegiatan 12 : Penyusunan Dokumen IKLH (Indeks IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup))		Dokumen IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup)	1	1	1	385,050,000.00			Dinas Lingkungan Hidup
Kegiatan 13 : Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)							Dokumen kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kota Samarinda		
Kegiatan 14 : Pengembangan akses informasi lingkungan hidup nasional		laporan pengembangan informasi akses informasi lingkungan	2	2	2	631,580,000.00			Dinas Lingkungan Hidup

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline (2018)	Target			Indikatif Alokasi Anggaran (3 Tahun)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2019	2020	2021			
Kegiatan 15 :									
Penyusunan Instrument ekonomi lingkungan hidup	Dokumen Instrument ekonomi lingkungan hidup	Dokumen			1	0	173,040,000.00		Dinas Lingkungan Hidup
Kegiatan 16 :									
Penyusunan Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) Kota Samarinda	Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) Kota Samarinda	Dokumen			1	1	176,000,000.00		Dinas Lingkungan Hidup
TUJUAN 11. Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan									
PROGRAM PEMERINTAH									
Target 11.1. Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, termasuk penataan kawasan kumuh, serta akses terhadap pelayanan dasar perkotaan									
Indikator : 11.1.1. Proporsi populasi penduduk perkotaan yang tinggal di daerah kumuh, permukiman liar atau rumah yang tidak layak.									
Indikator : 11.1.1.(a) Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.									
Indikator : 11.1.1.(b) Jumlah kawasan perkotaan metropolitan yang terpenuhi standar pelayanan perkotaan (SPP)									
Indikator : 11.1.1.(c) Jumlah kota sedang dan kota baru yang terpenuhi SPP									
Program 1 : Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman									
Kegiatan 1 :									
Peningkatan Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan di Kota Samarinda	Persentase meningkatnya kualitas Prasarana Sarana dan Utilitas Perumahan di Kota Samarinda	%	45	65	100	100	4,958,430,000.00		Dinas Perkim
Kegiatan 2 :									
Pembangunan Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) Kawasan Permukiman di Kota Samarinda	Persentase pembangunan Prasarana Sarana dan Utilitas Kawasan Permukiman di Kota Samarinda	%	45	65			12,302,000,000.00		Dinas Perkim

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline (2018)	Target			Indikatif Alokasi Anggaran (3 Tahun)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			2019	2020	2021			
Kegiatan 3 : Peningkatan Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) Kawasan Permukiman di Kota Samarinda	%	45	65	65	65	3,500,000,000.00		Dinas Perkim
Kegiatan 4 : Rehabilitasi dan / Peremajaan Permukiman Kumuh di Kota Samarinda (Kotaku)		327,70 ha	43%			2,650,000,000.00		Dinas Perkim
Kegiatan 5 : Penunjang Rehabilitasi dan/ Peremajaan Permukiman Kumuh di Kota Samarinda (KOTAKU)	dokumen		1			850,000,000.00		Dinas Perkim
Kegiatan 6 : Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah di Kota Samarinda (DAK 2019)	unit		116			97,312,000.00		Dinas Perkim
Program 2 : Program Pencegahan Kawasan Kumuh Perkotaan								
Kegiatan 7 : Rehabilitasi Permukiman Kumuh di Kota Samarinda (Kotaku)	hektar			5	3	5,000,000,000.00		Dinas Perkim

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline (2018)	Target			Indikatif Alokasi Anggaran (3 Tahun)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2019	2020	2021			
Kegiatan 8 : Penunjang Kegiatan Rehabilitasi Peremukiman Kumuh di Kota Samarinda (Kotaku)	Terselenggaranya Program KOTAKU	dokumen		5	3		600,000,000.00	Dinas Perkim	
Kegiatan 9 : Pembangunan PSU Peremukiman di Kota Samarinda	Terbangunnya PSU Peremukiman	ha		75	100		5,000,000,000.00	Dinas Perkim	
Kegiatan 10 : Peningkatan PSU Peremukiman di Kota Samarinda	PSU Kawasan Peremukiman yang ditingkatkan	ha		75	100		5,000,000,000.00	Dinas Perkim	
Target 11.2. Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka penyandang difabilitas									
Indikator : 11.2.1.(a) Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan									
Indikator : 11.2.1.(b) Jumlah sistem angkutan rel yang dikembangkan di kota besar.									
Program 1 : Program Peningkatan Pelayanan Angkutan									
Kegiatan 1 : Uji Kelayakan Sarana Transportasi Keselamatan Penumpang	Proses pelayanan operasional dan administrasi yang maksimal serta tercapainya target PAD		12 Bulan	43600 unit	44500 Unit	44898 Unit	2,600,000,000.00	Dinas Perhubungan	
Kegiatan 2 : Pengendalian dan Operasional Lalulintas angkutan sungai	Terlaksananya pengendalian dan operasional lalulintas angkutan sungai	kali	30					Dinas Perhubungan	

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline (2018)	Target			Indikatif Alokasi Anggaran (3 Tahun)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2019	2020	2021			
Kegiatan 3 : Pemilihan awak kendaran teladan dan pelajar pelopor	Jumlah peserta pemilihan awak kendaran umum teladan dan pelajar pelopor	peserta	5	10	10	10	675,000,000.00		Dinas Perhubungan
Kegiatan 4 : Peningkatan Pelayanan Angkutan Sungai	Peningkatan pelayanan angkutan didermaga angkutan sungai	dermaga		5	5	5	940,000,000.00		Dinas Perhubungan
Kegiatan 5 : Peningkatan pelayanan publik pada pelayanan proses perijinan angkutan	Proses pelayanan perijinan terhadap angkutan kota/umum		1524 Armada & 36 Taxi Argo		36 Taxi Argo	36 Taxi Argo	550,000,000.00		Dinas Perhubungan
Kegiatan 6 : Pengadaan Keselamatan dan Sosialisasi Keselamatan Pelayaran (bankeu)	Alat keselamatan dan sosialisasi keselamatan pelayaran	unit			500	500	1,000,000,000.00		Dinas Perhubungan
Program 2 : Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Fasilitas LLAJ									
Kegiatan 7 : Pemeliharaan Traffic Light dan Jaringan Area Traffic Control System (ATCS)	Terpeliharanya Prasarana Fasilitas LLAJ kota samarinda	simpang Traffic light dan jaringan ATCS	34	34	34	34	1,674,916,000		Dinas Perhubungan
Kegiatan 8 : Pemeliharaan Penerangan Umum (LPJU)	Berfungsinya Fasilitas Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)		12 Bulan	12 Bulan	12 Unit		3,000,000,000		Dinas Perhubungan

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline (2018)	Target			Indikatif Alokasi Anggaran (3 Tahun)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			2019	2020	2021			
Kegiatan 9 : Rehabilitasi Halte dan Gapura Penyebrangan	Terpeliharanya Prasarana Fasilitas LLAJ Kota Samarinda	unit		6	4	4	1,500,000,000	Dinas Perhubungan
Kegiatan 10 : Pemeliharaan Dermaga Kota Samarinda	Terpeliharanya fasilitas dermaga	unit		5	5	5	2,500,000,000	Dinas Perhubungan
Kegiatan 11 : Rehabilitasi Pemeliharaan terminal dalam kota	Terminal dalam kota yang dipelihara	unit			4	4	3,000,000,000	Dinas Perhubungan
Kegiatan 12 : Pemeliharaan Kendaraan Operasional Sungai	Kendaraan Operasional Sungai yang dipelihara	unit			1	1	400,000,000	Dinas Perhubungan
Program 3 : Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas								
Kegiatan 13 : Peningkatan pelayanan publik pada pelayanan parkir	Terlaksananya kawasan tertib parkir	titik	100	100				Dinas Perhubungan
Kegiatan 14 : Peningkatan Pelayanan Perparkiran	Pelayanan perparkiran	titik			100	100	2,000,000,000	Dinas Perhubungan
Kegiatan 15: Pengadaan dan Pemasangan Jaringan dan Lampu LED Jalan Protokol Kota Samarinda	Jaringan dan lampu LED jalan protokol Kota Samarinda	lokasi jaringan	3	5	4	4	40,200,000,000	Dinas Perhubungan

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline (2018)	Target			Indikatif Alokasi Anggaran (3 Tahun)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			2019	2020	2021			
Kegiatan 16 : Pengawasan dan Penindakan Terhadap Kegiatan Lalu Lintas Jalan Dalam Wilayah Hukum Kota Samarinda	Terwujudnya Penertiban Kendaraan Bersama Pihak Terkait	kali	40					Dinas Perhubungan
Kegiatan 17 : Penunjang Kegiatan Forum Lalu Lintas & Angkutan Jalan Kota Samarinda	Koordinasi antar elemen dibidang lalulintas dan angkutan jalan Kota Samarinda	10 bulan	10 kali	10 kali	10 kali	1,000,000,000		Dinas Perhubungan
Kegiatan 18 : Penunjang operasional ruang kendali Area Traffic Control System (ATCS)	Laporan Pengendalian lalu lintas persimpangan melalui ruang kendali ATCS	12 Bulan	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	1,066,408,000		Dinas Perhubungan
Kegiatan 19 : Pengawasan dan Pembinaan Lalu Lintas Jalan	Terwujudnya Penertiban dan pengendalian arus lalu lintas jalan	kali	45	30	30	1,450,000,000		Dinas Perhubungan
Kegiatan 20 : Pengadaan marka jalan	Marka jalan sebagai fasilitas keselamatan jalan	m2	8500	3000	3000	1,350,000,000		Dinas Perhubungan
Kegiatan 21 : Pengadaan Rambu-rambu lalu lintas	rambu-rambu lalu lintas sebagai fasilitas keselamatan	buah	400					Dinas Perhubungan

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline (2018)	Target			Indikatif Alokasi Anggaran (3 Tahun)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			2019	2020	2021			
Kegiatan 22 : Pengadaan dan Pemasangan rambu - rambu Lalulintas Jalan	Rambu - rambu Lalu lintas Jalan	buah		300	300	2,000,000,000		Dinas Perhubungan
Kegiatan 23 : Pengadaan dan pemasangan rambu lalu lintas sungai	Rambu - rambu lalu lintas sungai	buah		200	200	600,000,000		Dinas Perhubungan
Kegiatan 24 : Peningkatan Penataan Parkir Kota Samarinda	penataan parkir kota samarinda	titik		270	270	500,000,000		Dinas Perhubungan
Kegiatan 25 : Pembuatan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	Zona selamat sekolah (ZOSS) sebagai fasilitas keselamatan jalan	titik	14	5	5	1,483,459,000		Dinas Perhubungan
Kegiatan 26 : Pengadaan dan Pemasangan Traffic Light dan Area Traffic Control System (ATCS)	Traffic light dan area traffic control system (ATCS)	titik	2	2	2	3,500,000,000		Dinas Perhubungan
Kegiatan 27 : Pengadaan dan Pemasangan Traffic Light (bankeu)	Traffic light terpasang	titik		4	4	5,000,000,000		Dinas Perhubungan
Kegiatan 28 : Pembuatan trotoar line (bankeu)	Trotoar line	titik		10	10	3,000,000,000		Dinas Perhubungan
Kegiatan 29 : Pengadaan dan pemasangan rambu jalan (bankeu)	Rambu jalan terpasang	buah		100	100	1,800,000,000		Dinas Perhubungan

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline (2018)	Target			Indikatif Alokasi Anggaran (3 Tahun)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
			2019	2020	2021				
Target 11.3. Pada tahun 2030, memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan, serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganannya yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara									
Indikator : 11.3.1. Rasio laju peningkatan konsumsi tanah dengan laju pertumbuhan penduduk									
Program 1 : Program penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah									
Kegiatan 1 :									
Dampak Sosial Pengadaan Tanah Tersebar	Persil	Persil yang dibutuhkan untuk Kepentingan Umum yang dilunasi.	Persil	101	41	20	0	22,035,647,095	Dinas Pertanian
Kegiatan 2 :									
Optimalisasi Pemanfaatan Tanah Kosong	Tanah	Laporan triwulan inspeksi lahan kosong guna optimalisasi pemanfaatan.	dokumen		4			100,000,000	Dinas Pertanian
Kegiatan 3 :									
Pensertifikatan Masyarakat Samarinda	Tanah Kota	Permohonan sertifikasi tanah Warga yang ditindaklanjuti .	sertifikat		500	300	350	1,350,000,000	Dinas Pertanian
Program 2 : Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanian									
Kegiatan 4 :									
Penyusunan Informasi Pertanian	Sistem	Informasi yang diupdate pada website sesuai UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	persen		100	100	100	650,000,000	Dinas Pertanian
Program 3 : Program Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Perkotaan									
Kegiatan 5 :									
Pelaksanaan,Pemantauan,Pengawasan dan Pengendalian Pertanian		Laporan Pelaksanaan, Pemantauan, Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Pertanian	dokumen		4	4	4	1,450,000,000	Dinas Pertanian

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline (2018)	Target			Indikatif Alokasi Anggaran (3 Tahun)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2019	2020	2021			
Kegiatan 6 :									
Pemetaan Pertanahan Samarinda	Bidang Kota Wilayah Kecamatan Yang Dibuatkan Peta Fakta dan Analisa Bidang Tanah Untuk Bahan Review Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)	kecamatan			3	3	500,000,000		Dinas Pertanahan
Kegiatan 7 :									
Penunjang Penerbitan IMTN	Dokumen Hak Kepemilikan Tanah Di Wilayah Kota Samarinda	dokumen			25	35	700,000,000		Dinas Pertanahan
Target 11.4. Memperkuat upaya untuk melindungi dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia.									
Indikator : 11.4.1. Jumlah belanja (publik dan swasta) per kapita yang diperuntukkan untuk preservasi, perlindungan, konservasi pada semua warisan budaya dan alam menurut jenis warisan (budaya alam terpadu destinasi pusat warisan dunia) tingkat pemerintahan (nasional dan sub nasional) jenis belanja (belanja									
Indikator : 11.4.1. (a) Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil.									
Program 1 : Program Pengelolaan Keragaman Budaya									
Kegiatan 1 :									
Pengelolaan Museum Kota samarinda	Operasional Museum Kota Samarinda		1 Paket	5 Jumlah	5 Jumlah	5 Jumlah	1,890,000,000		Dinas Kebudayaan
Kegiatan 2 :									
Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	kali		7	8	9	1,068,660,000		Dinas Kebudayaan
Kegiatan 3 :									
Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku seni	Jumlah pelaku seni	orang		30	8	30	527,739,000		Dinas Kebudayaan

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline (2018)	Target			Indikatif Alokasi Anggaran (3 Tahun)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			2019	2020	2021			
Kegiatan 4 : Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	Jumlah Grup/kelompok kesenian dan / atau paguyuban daerah yang dibina	kelompok		5	5	850,000,000		Dinas Kebudayaan
Kegiatan 5 : Penyusunan Sistem Informasi Manajemen Kebudayaan Kota Samarinda	Tersedianya Sistem Informasi Manajemen kebudayaan Kota Samarinda	paket		1	4	500,000,000		Dinas Kebudayaan
Kegiatan 6 : Muhibah Seni Budaya Kota Samarinda	Jumlah misi kesenian	kali		1	1	600,000,000		Dinas Kebudayaan
Kegiatan 7 : Seminar dalam rangka revitalisasi dan reaktualisasi budaya lokal	Jumlah seminar lokal dan nasional	kali		1	1	320,000,000		Dinas Kebudayaan
Program 2 : Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya								
Kegiatan 8 : Fasilitasi pengembangan kemitraan kebudayaan daerah	Jumlah kelompok kesenian/budaya daerah	kelompok	10	14	5	5	500,000,000	Dinas Kebudayaan
Kegiatan 9 : Fasilitas Festival Kebudayaan Daerah	Jumlah event kebudayaan yang diikuti	event		1	1	400,000,000		Dinas Kebudayaan

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline (2018)	Target			Indikatif Alokasi Anggaran (3 Tahun)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			2019	2020	2021			
Program 3 : Program pengembangan Nilai Budaya								
Kegiatan 10 : Apresiasi seni budaya daerah	Jumlah kelompok pelestari seni budaya yang diberikan apresiasi	kelompok	2	2	4	774,000,000		Dinas Kebudayaan
Kegiatan 11 : Inventarisasi Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya	Dokumen Inventarisasi Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan	dokumen	1	1	1	600,000,000		Dinas Kebudayaan
Kegiatan 12 : Pelestarian dan Aktualisasi adat budaya daerah	Kegiatan atau perayaan ritual adat	kali	4	1	4	1,000,000,000		Dinas Kebudayaan
Kegiatan 13 : Penyusunan Kebijakan tentang budaya lokal daerah	Jumlah perda/ perwali terkait pelestarian/ pengelolaan budaya lokal daerah	perda/perwali		1		75,000,000		Dinas Kebudayaan
Target 11.5. Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, termasuk bencana yang berhubungan dengan air, dengan fokus melindungi orang miskin dan								
Indikator : 11.5.1.* Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang								
Indikator : 11.5.1.(a) Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)								
Indikator : 11.5.1.(b) Jumlah kota tangguh bencana yang terbentuk								
Indikator : 11.5.1.(c) Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan								
Indikator : 11.5.2. Kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap GDP, termasuk kerusakan bencana terhadap infrastruktur yang kritis dan gangguan terhadap pelayanan dasar								
Indikator : 11.5.2.(a) Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana								

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline (2018)	Target			Indikatif Alokasi Anggaran (3 Tahun)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			2019	2020	2021			
Program 1 : Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan								
Kegiatan 1 : Pencegahan dan mitigasi bencana	Jenis media publikasi Pencegahan dan mitigasi bencana	Jenis	2	2	4	4	1,030,000,000	BPBD
Kegiatan 2 : Pengurangan risiko bencana	Kegiatan workshop/sosialisasi PRB dan forum PRB		1 Laporan	3 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	955,145,000	BPBD
Kegiatan 3 : Pelatihan dan bimbingan teknis terkait kebencanaan	Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek dan pelatihan bidang kebencanaan	orang					150,000,000	BPBD
Kegiatan 4 : Pemberdayaan masyarakat dalam menghadapi bencana	Kelurahan tangguh bencana yang dibentuk	Kelurahan		4	2	2	996,550,000	BPBD
Kegiatan 5 : Review Regulasi Terkait Rancangan Pengurangan Resiko Bencana	Regulasi yang di review	Dokumen		7			800,000,000	BPBD
Kegiatan 6 : Kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana	Kegiatan pawai, pameran, kontijensi dan peringatan dini bencana	kegiatan			4	4	830,000,000	BPBD

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline (2018)	Target			Indikatif Alokasi Anggaran (3 Tahun)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			2019	2020	2021			
Program 2 : Program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana								
Kegiatan 7 : Pemulihan kesehatan dan kondisi psikologis korban bencana	Jumlah laporan pemulihan kesehatan dan kondisi psikologis korban bencana		100%	1 Dokumen			170,000,000	BPBD
Kegiatan 8 : Kaji kebutuhan pasca bencana	Dokumen kaji kebutuhan pasca bencana		100%	1 Dokumen	1 00 Dokumen		200,000,000	BPBD
Kegiatan 9 : Tim pemulihan pasca bencana	Jumlah personel tim operasi pemulihan pasca bencana	orang			100	100	640,000,000	BPBD
Program 3 : Program kedaruratan dan logistik								
Kegiatan 10 : Peningkatan dan pengadaan sarana prasarana penanggulangan bencana	Sarana prasarana penanggulangan bencana yang di tingkatkan	unit		100	100	100	3,214,145,000	BPBD
Kegiatan 11 : Dukungan operasional pusat pengendali operasi dan penanggulangan bencana (PUSDALOPS PB)	Sarana prasarana Pusat Pengendali Operasi dan Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS PB)	unit		85	95	100	1,281,145,000	BPBD
Target 11.6. Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.								
Indikator : 11.6.1. Proporsi limbah padat perkotaan yang dikumpulkan secara teratur dengan pemrosesan akhir yang baik terhadap total limbah padat perkotaan yang dihasilkan oleh suatu kota.								
Indikator : 11.6.1.(a) Persentase sampah perkotaan yang tertangani								
Indikator : 11.6.2. Rata-rata tahunan materi partikulat halus (PM 2,5 dan PM 10) di Perkotaan (dibobotkan jumlah penduduk)								

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline (2018)	Target			Indikatif Alokasi Anggaran (3 Tahun)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			2019	2020	2021			
Program 1 : Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan								
Kegiatan 1 : Pengadaan sarana operasional persampahan	unit	20	17	17	17	30,890,987,000		Dinas Lingkungan Hidup
Kegiatan 2 : Pengawasan Pengelolaan Persampahan se Kota Samarinda		32 kali	10 Kec	10 Kec	10 Kec	1,630,000,000		Dinas Lingkungan Hidup
Kegiatan 3 : Prasarana dan sarana Penunjang TPA di Kota Samarinda	lokasi	1	2	2	2	20,419,072,500		Dinas Lingkungan Hidup
Target 11.7. Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak-anak, manula dan penyandang difabilitas.								
Indikator : 11.7.1. Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua, menurut kelompok usia, jenis kelamin dan penyandang disabilitas.								
Indikator : 11.7.1.(a) Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang.								
Program 1 : Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau								
Kegiatan 1 : Pembangunan Taman Sejati di Kota Samarinda (Lanjutan)	Persentase tersedianya kawasan Taman Sejati di Kota Samarinda	persen	100					Dinas Perkim
Kegiatan 2 : Pembangunan Taman Kota di Kota Samarinda.	Terbangunnya Taman dan PSU	persen		6		68,000,000		Dinas Perkim
Kegiatan 3 : Pembangunan Taman Kota di Kota Samarinda.	Terbangunnya Taman dan PSU	lokasi		3		3,885,000,000		Dinas Lingkungan Hidup

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline (2018)	Target			Indikatif Alokasi Anggaran (3 Tahun)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			2019	2020	2021			
Kegiatan 4 : Rehabilitasi Taman di Kota Samarinda	Taman yang direhabilitasi	lokasi		1	1	1,229,125,000		Dinas Lingkungan Hidup
Kegiatan 5 : Pembangunan Taman Sejati di Kota Samarinda (Lanjutan)	Terbangunnya Taman Sejati di Kota Samarinda (Lanjutan)	lokasi		1	1	800,000,000		Dinas Lingkungan Hidup
Kegiatan 6 : Pembangunan Taman dan PSU di Kota Samarinda	Terbangunnya Taman dan PSU	lokasi		2	2	41,407,250,000		Dinas Lingkungan Hidup
Kegiatan 7 : Landscape Museum Taman Samarendah Kota Samarinda	Terbangunnya landscape museum Taman Samarendah	kegiatan		1	1	2,000,000,000		Dinas Perkim
Indikator : 11.7.2. Proporsi orang yang menjadi korban kekerasan atau pelecehan seksual menurut jenis kelamin, usia, status disabilitas, dan tempat kejadian (12 bulan terakhir)								
Indikator : 11.7.2.(a) Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.								
Program 1 : Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan								
Kegiatan 1 :								
Sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT	Jumlah petugas yang terlatih dalam mengelola data pilah korban kekerasan terhadap perempuan dan anak	orang	30	25		450,000,000		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Jumlah pelatihan pendampingan bagi petugas yang menangani korban kekerasan perempuan dan anak	kegiatan		1	2			

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline (2018)	Target			Indikatif Alokasi Anggaran (3 Tahun)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			2019	2020	2021			
Program 2 : Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan								
Kegiatan 2 : Perlindungan Khusus anak	Persentase Penanganan kasus kekerasan terhadap anak	persen	100	100	100	100	650,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Target 11.b Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang pemerataan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta								
Indikator : 11.b.1.* Proporsi pemerintah kota yang memiliki dokumen strategi pengurangan risiko bencana.								
Indikator : 11.b.2.* Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.								
Program 1 :								
Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline (2018)	Target			Indikatif Alokasi Anggaran (3 Tahun)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			2019	2020	2021			
TUJUAN 12. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.								
PROGRAM PEMERINTAH								
Target 12.4. Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk								
Indikator : 12.4.2. Timbulan limbah berbahaya per kapita, proporsi limbah berbahaya yang terkelola menurut jenis penanganannya.								
Indikator : 12.4.2.(a) Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).								
Program 1 : Program Pengendalian pencemaran dan perusakan Lingkungan Hidup								
Kegiatan 1 :	usaha/kegiatan yang mengelola limbah B3 yang dibina	Usaha /Kegiatan		60	50	75	417,450,000	Dinas Lingkungan Hidup
Kegiatan 2 :	Penilaian Dokumen Kajian Lingkungan Hidup (Amdal, UKL dan UPL serta SPPL)	Dokumen		25	250	370	380,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
Target 12.5. Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.								
Indikator : 12.5.1.(a) Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.								
Program 1 : Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan								

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline (2018)	Target			Indikatif Alokasi Anggaran (3 Tahun)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			2019	2020	2021			
Kegiatan 1 : Pengadaan Mesin Pencacah Sampah Organik	Mesin Sampah Organik	Mesin Pencacah Sampah Organik	unit	4			80,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
Target 12.6. Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktek-praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka								
Indikator : 12.6.1. Jumlah perusahaan yang mempublikasi laporan keberlanjutannya.								
Indikator : 12.6.1.(a) Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.								
Target 12.6. Mengembangkan dan menerapkan perangkat untuk memantau dampak pembangunan berkelanjutan terhadap pariwisata berkelanjutan yang mencirikan 12.6.1. Jumlah strategi atau kebijakan pariwisata berkelanjutan dan pelaksanaan rencana aksi, dengan perangkat monitoring dan evaluasi yang disepakati								
Program 1 : Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata								
Kegiatan 1 : Festival Mahakam	Agenda Kegiatan Festival Mahakam		kali	1	1	1	2,900,000,000	Dinas Pariwisata
Program 2 : Program Pengembangan Destinasi Pariwisata								
Kegiatan 2 : Rencana Pengembangan Pariwisata (RIPPDA)	Induk Daerah	Tersedianya Dokumen RIPPDA	dokumen	1				Dinas Pariwisata
Kegiatan 3 : Pengembangan Wisata	Objek	Obyek Wisata Unggulan di Kota Samarinda	objek wisata	8	12	17	2,000,000,000	Dinas Pariwisata
Kegiatan 4 : Pengembangan Wisata Pampang	Obyek Budaya	Perlengkapan Penunjang Obyek Wisata Budaya Pampang	unit	5	6	5	1,730,000,000	Dinas Pariwisata

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline (2018)	Target			Indikatif Alokasi Anggaran (3 Tahun)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			2019	2020	2021			
Kegiatan 5 : Pengembangan Sarana dan Prasarana Obyek Wisata Unggulan di Kota Samarinda	Sarana dan Prasarana di Kawasan Obyek Wisata Unggulan unit		6	6	8	1,846,000,000		Dinas Pariwisata
Program 3 : Program Pengembangan Kemitraan								
Kegiatan 6 : Pembinaan Sadar Wisata	Jumlah Kelompok sadar wisata yang dibina kelompok	5	7	9	11	800,000,000		Dinas Pariwisata
Kegiatan 7 : Rembuk Pariwisata	Kesepakatan antar pelaku usaha jasa pariwisata dokumen		200	90	300	400,000,000		Dinas Pariwisata
Kegiatan 8 : Pembinaan & Standarisasi Usaha Jasa Pariwisata	Usaha Jasa Pariwisata yg sudah terstandarisasi jenis jasa usaha jasa pariwisata		8	8	13	500,000,000		Dinas Pariwisata
Kegiatan 9 : Peningkatan Kualitas Tata Kelola Destinasi Pariwisata dan Kapasitas Masyarakat Pelaku Usaha Kepariwisataan (DAK 2019)	Tersedianya tenaga sumber daya pariwisata yang terlatih orang		280			621,736,000		Dinas Pariwisata
	Terlaksananya kemitraan antara pemerintah dengan pelaku usaha pariwisata destinasi		8					

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline (2018)	Target			Indikatif Alokasi Anggaran (3 Tahun)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			2019	2020	2021			
Program 4 : Program Pengembangan Ekonomi Kreatif								
Kegiatan 10 : Pengembangan Produk Ekonomi Kreatif	Jumlah Produk Ekonomi Kreatif yang dikembangkan	buah	16	19				Dinas Pariwisata
Kegiatan 11 : Pengembangan Ekonomi Kreatif Bidang Seni Budaya, Kriya dan Kuliner	Kategori Ekonomi Kreatif yang dikembangkan	bidang			6	7	1,150,000,000	Dinas Pariwisata
Kegiatan 12 : Workshop Koreografi Ekonomi Kreatif	Terlaksananya Workshop	kali		1			100,000,000	Dinas Pariwisata
Kegiatan 13 : Kemilau Sarung Samarinda (KiSS)	Promosi kain sarung samarinda	kali		1	1	1	400,000,000	Dinas Pariwisata
TUJUAN 13. Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya.								
PROGRAM PEMERINTAH								
Target 13.1. Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.								
Indikator : 13.1.1. Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah								
Indikator : 13.1.2. Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.								
Program 1 : Program Kedaruratan dan logistik								
Kegiatan 1 : Pengadaan sarana prasarana PUSDALOP	Persentase sarana prasarana PUSDALOP	%	43	0	0	0		APBD

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline (2018)	Target			Indikatif Alokasi Anggaran (3 Tahun)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
			2019	2020	2021				
Program 2 : Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan									
Kegiatan 2 : Pencegahan dan mitigasi bencana	Pembuatan brosur dan baliho	Jenis	2	2	4	4	1,030,000,000	APBD	BPBD
Kegiatan 4 : Pelatihan dan bimbingan teknis terkait kebencanaan	Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek dan pelatihan bidang kebencanaan	Orang	0	-	0	0	150,000,000	APBD	
Kegiatan 5 : Pemberdayaan masyarakat dalam menghadapi bencana	Kelurahan tangguh bencana yang dibentuk	Kelurahan	0	4	2	2	946,550,000	APBD	
Kegiatan 6 : Review Regulasi Terkait Rancangan Pengurangan Risiko Bencana	Regulasi yang di review	Dokumen	0	7	8	8	1,900,000,000	APBD	
Kegiatan 7 : Penyusunan regulasi terkait rancangan Pengurangan Risiko Bencana	Regulasi yang disusun	Dokumen	0	1	3	3	1,030,000,000	APBD	
Kegiatan 8 : Penerapan sekolah/madrasah aman dari bencana	sekolah/madrasah tangguh bencana yang dibentuk	Sekolah	0	2	2	2	940,000,000	APBD	

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline (2018)	Target			Indikatif Alokasi Anggaran (3 Tahun)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
			2019	2020	2021				
Program 1 : Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup									
Kegiatan 1 : Pemantauan Kualitas Udara Perkotaan (EKUP)	Jumlah titik pantau (Laporan)	Laporan	1	0	1	1	1,061,136,000	APBD	Dinas Lingkungan Hidup
Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Perlindungan LH Kota Samarinda	Dokumen Rencana Pengelolaan dan Perlindungan LH Kota Samarinda	Dokumen	0	1	1	0	700,000,000	APBD	
Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kota Samarinda	Dokumen	0	1	1	0	3,400,000,000	APBD	
Pengembangan akses informasi lingkungan hidup nasional	Laporan pengembangan informasi akses informasi lingkungan	laporan	0	2	2	2	631,580,000	APBD	
Program 2 : Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup									
Kegiatan 5 : Penanganan Kasus dan Sengketa Lingkungan	Persentase Pengaduan/Kasus dan Sengketa Lingkungan	%	100	100	50	100	459,525,000	APBD	
Kegiatan 6 : Penilaian Dokumen Kajian Lingkungan Hidup (Amdal, UKL dan UPL serta SPPL)	Dokumen AMDAL, UKL dan UPL serta SPPL yang berkualitas	Dokumen	0	25	250	370	380,000,000	APBD	
Kegiatan 7 : Pemantauan Udara Ambien	Titik Pemantauan Udara Ambien	Titik Pemantauan	0	10	10	10	760,910,000	APBD	

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline (2018)	Target			Indikatif Alokasi Anggaran (3 Tahun)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
			2019	2020	2021				
Kegiatan 8: Pengawasan Penuaan Lingkungan Hidup	Usaha dan/atau Kegiatan Penerima Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang taat terhadap ketentuan perizinan	Usaha / Kegiatan	0	100	100	110	946,225,000	APBD	Dinas Lingkungan Hidup
Kegiatan 9 : Pengendalian Pencemaran Air, Tanah dan Udara	Usaha dan/atau Kegiatan yang Berpotensi Pencemaran Air, tanah dan udara yang dibina.	Usaha / Kegiatan	0	60	50	75	697,300,000	APBD	
Kegiatan 10 : Pembinaan dan Penilaian Adiwiyata	Sekolah yang mendapatkan penghargaan Adiwiyata	Sekolah	0	0	50	50	485,575,000	APBD	
Kegiatan 11 : Koordinasi Penilaian dan Pemantauan Adipura	Laporan Koordinasi Penilaian dan Pemantauan Adipura	Dokumen	0	0	1	74	728,700,000	APBD	
Kegiatan 12 : Pemantauan Kualitas Air Badan Air, Mata Air, Situ, Embung dan Bendung	Titik Pemantauan Kualitas Air Badan Air, Mata Air, Situ, Embung dan Bendung	Titik Pemantauan	0	0	50	60	597,053,000	APBD	
Kegiatan 13 : Pemantauan Kualitas Udara Perkotaan (EKUP)	Laporan Pemantauan Kualitas Udara Perkotaan (EKUP)	Dokumen	0	0	1	1	761,136,000	APBD	

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline (2018)	Target			Indikatif Alokasi Anggaran (3 Tahun)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
			2019	2020	2021				
Kegiatan 14 : Monitoring usaha dan/atau kegiatan yang belum berizin	Laporan Monitoring usaha dan/atau kegiatan yang belum berizin	Dokumen	0	0	25	60		APBD	
Kegiatan 15 : Peningkatan Kapasitas pejabat pengawas lingkungan hidup (PPLHD) dan Pengendali dampak lingkungan (PEDAL)	Pejabat pengawas lingkungan hidup (PPLHD) dan Pengendali dampak lingkungan (PEDAL) yang meningkatkan kapasitasnya	Orang	0	0	6	9	346,240,000	APBD	
Kegiatan 16 : Pencegahan Kerusakan Lingkungan	Pembinaan Kegiatan usaha / kegiatan berpotensi terhadap kerusakan ekosistem dan kerusakan akibat perubahan iklim	Kegiatan usaha / kegiatan	0	0	20	25	388,337,000	APBD	
Kegiatan 17 : Penanggulangan dan Pemulihan Kerusakan Lingkungan	Dokumen Pemetaan Bukaan Lahan	Dokumen	0	0	1	1	546,480,000	APBD	
Program 3 : Program perlindungan konservasi dan sumber daya alam									
Kegiatan 18 : Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	Terbentuknya Kampung Iklim Di Kota Samarinda	Lokasi	0	1	2	3	1,361,209,000	APBD	Dinas Lingkungan

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline (2018)	Target			Indikatif Alokasi Anggaran (3 Tahun)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
			2019	2020	2021				
Kegiatan 19 : Inventarisasi Kerusakan Lahan	Laporan Inventarisasi Kerusakan Lahan di Kota Samarinda	Dokumen	0	3	0	0	75,000,000	APBD	Lingkungan Hidup
TUJUAN 14. Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan.									
Indikator : 14.2.1.(b) Terkelolanya 11 wilayah pengelolaan perikanan (WPP) secara berkelanjutan.									
Program 1 : Program Pengembangan Budidaya Perikanan									
Kegiatan 1 :									
Penyediaan sarana dan prasarana produksi perikanan budidaya	Persentase Sarana dan Prasarana produksi perikanan budidaya yang terpenuhi	Persen	100	100	50	100	1,148,553,000	APBD	Dinas Perikanan
Kegiatan 2 :									
Pengembangan budidaya perikanan	Jumlah budidaya perikanan yang dikembangkan	Usaha Budidaya	400	500	50	710	512,500,000	APBD	
Kegiatan 3 :									
Pengembangan pembenihan ikan	Jumlah UPR (Unit Pembenihan Rakyat) yang dibina	UPR	28	29	0	0	110,000,000	APBD	
Kegiatan 4 :									
Pengelolaan sistem perbenihan ikan	Produksi Benih Ikan	Ekor	-	12,734,000	2,597,800	13,249,000	1,788,100,000	APBD	
Kegiatan 5 :									
Pengelolaan Pengembangan Balai Benih Ikan	Laporan Semester Pengelolaan Pengembangan Balai Benih Ikan	Dokumen	0	0	2	2	909,000,000	APBD	

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline (2018)	Target			Indikatif Alokasi Anggaran (3 Tahun)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
			2019	2020	2021				
Kegiatan 6 : Pembangunan Gedung dan Pengadaan Mesin Unit Pengolahan Tepung Ikan Di Kota Samarinda	Terlaksananya pembangunan Gedung (Indoor) dan Pengadaan Mesin Unit Pengelolaan Tepung Ikan Di Kota Samarinda Unit	0	0	1	0	217,000,000	APBD		
Target 14.4. Pada tahun 2020, secara efektif mengatur pemanenan dan menghentikan penangkapan ikan yang berlebihan, penangkapan ikan ilegal dan praktek penangkapan ikan yang merusak, serta melaksanakan rencana pengelolaan berbasis ilmu pengetahuan, untuk memulihkan persediaan ikan secara layak dalam									
Indikator : 14.4.1.* Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman.									
Program 1 : Program Pengembangan Perikanan Tangkap									
Kegiatan 1 : Pengembangan Peningkatan Produksi Perikanan tangkap.	Jumlah Peningkatan produksi perikanan tangkap	Ton	1,700	19199.1	0	0	571,154,600	APBD	Dinas Perikanan
Kegiatan 2 : Operasional TPI Selili	Pelaksanaan operasional TPI Selili yang terpenuhi	Bulan	12	2	0	0	200,000,000	APBD	
Kegiatan 3 : Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Skala Kecil Masyarakat KP (Nelayan) (DAK Tahun 2018)		Unit	-	8	-	-	1,023,653,000	APBN	
Kegiatan 4 : Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap	Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap	Unit	0	19199.1	30	1697	1,191,000,000	APBD	
Target 14.5. Pada tahun 2020, melestarikan setidaknya 10% dari wilayah pesisir dan laut, konsisten dengan hukum nasional dan internasional dan berdasarkan informasi ilmiah terbaik yang tersedia.									

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline (2018)	Target			Indikatif Alokasi Anggaran (3 Tahun)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
			2019	2020	2021				
Indikator : 14.5.1.* Jumlah luas kawasan konservasi perairan.									
Program 1 : Program Pengembangan Budidaya Perikanan									
Kegiatan 1 : Identifikasi Kawasan Budidaya Perikanan	Kawasan di identifikasi	Kecamatan	0	0	3	5	501,000,000	APBD	Dinas Perikanan
Kegiatan 2 : Pengembangan Usaha Budidaya Perikanan	Kawasan binaan	Kecamatan	0	0	10	10	450,500,000	APBD	
Target 14.6. Pada tahun 2020, melarang bentuk-bentuk subsidi perikanan tertentu yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebihan, menghilangkan subsidi yang berkontribusi terhadap penangkapan ikan ilegal, yang tidak dilaporkan dan tidak diatur dan menahan jenis subsidi baru, dengan mengakui bahwa perlakuan khusus dan berbeda yang tepat dan efektif untuk negara berkembang dan negara kurang berkembang harus menjadi bagian integral dari negosiasi subsidi perikanan pada the World Trade Organization.									
Indikator : 14.6.1.(a) Persentase kepatuhan pelaku usaha.									
Program 1 : Program Pengembangan Budidaya Perikanan									
Kegiatan 1 : Pengembangan usaha mina mandiri	Jumlah kelompok yang dibina	Kelompok	1895	72	40	76	415,000,000	APBD	Dinas Perikanan
Kegiatan 2 : Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pembudidaya Ikan	Pokdakan yang dibina	Kelompok	0	0	60	76	462,000,000	APBD	
Kegiatan 3 : Penas KTNA	Nelayan dan pembudidaya yang mengikuti Penas KTNA	Orang	0	0	18	0	344,500,000	APBD	
Program 2 : Program pengembangan Perikanan Tangkap									
Kegiatan 4 : Pengembangan SDM perikanan tangkap	nelayan terlatih dan nelayan yang mendapat perlindungan asuransi	Orang	0	260	280	300	802,500,000	APBD	

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline (2018)	Target			Indikatif Alokasi Anggaran (3 Tahun)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
			2019	2020	2021				
Kegiatan 5 : Pengembangan usaha mina mandiri perikanan tangkap	Kelompok nelayan yang dibina	Kelompok	0	38	0	0	100,000,000	APBD	Dinas Perikanan
Kegiatan 6 : Pengelolaan dan Pengembangan TPI	Pelaku Usaha di TPI yang terlayani	Orang	0	0	876	885	703,500,000	APBD	
Target 14.7. Pada tahun 2030, meningkatkan manfaat ekonomi bagi negara berkembang kepulauan kecil dan negara kurang berkembang dari pemanfaatan berkelanjutan sumber daya laut, termasuk melalui pengelolaan perikanan, budidaya air dan pariwisata yang berkelanjutan.									
Indikator : 14.7.1. Perikanan berkelanjutan sebagai presentase dari PDB pada negara-negara berkembang kepulauan kecil, negara-negara kurang berkembang dan semua negara.									
Target 14.a. Meningkatkan pengetahuan ilmiah, mengembangkan kapasitas penelitian dan alih teknologi kelautan, dengan mempertimbangkan the Intergovernmental Oceanographic Commission Criteria and Guidelines tentang Alih Teknologi Kelautan, untuk meningkatkan kesehatan laut dan meningkatkan kontribusi keanekaragaman hayati laut untuk pembangunan negara berkembang, khususnya negara berkembang kepulauan kecil dan negara kurang berkembang.									
Indikator : 14.a.1. Proporsi dari total anggaran penelitian yang dialokasikan untuk penelitian di bidang teknologi kelautan.									
Program 1 : Program Pengembangan Budidaya Perikanan									
Target 14.b. Meningkatkan pengetahuan ilmiah, mengembangkan kapasitas penelitian dan alih teknologi kelautan, dengan mempertimbangkan the Intergovernmental Oceanographic Commission Criteria and Guidelines tentang Alih Teknologi Kelautan, untuk meningkatkan kesehatan laut dan meningkatkan kontribusi keanekaragaman hayati laut untuk pembangunan negara berkembang, khususnya negara berkembang kepulauan kecil dan negara kurang berkembang.									
Indikator : 14.b.1. Ketersediaan kerangka hukum/ regulasi/ kebijakan/ kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil.									
Indikator : 14.b.1.(a) Jumlah provinsi dengan peningkatan akses pendanaan usaha nelayan.									
Indikator : 14.a.1.(b) Jumlah nelayan yang terlindungi.									
Target 14.c. Meningkatkan pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan lautan dan sumber dayanya dengan menerapkan hukum internasional yang tercermin dalam the United Nations Convention on the Law of the Sea, yang menyediakan kerangka hukum untuk pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan lautan dan sumber dayanya, seperti yang tercantum dalam ayat 158 dari "The future we want".									
TUJUAN 16. Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan.									

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline (2018)	Target			Indikatif Alokasi Anggaran (3 Tahun)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
			2019	2020	2021				
TUJUAN 16. Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan.									
PROGRAM PEMERINTAH									
16.1 Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.									
INDIKATOR: 6.1.1. Angka korban kejahatan pembunuhan per 100.000 penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin.									
Program 1 : Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan									
Kegiatan 1 : Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Kota Samarinda (Inpres No. 1 Tahun 2014)	Indikator : Peserta sosialisasi PEKAT & Peningkatan Kapasitas SDA di Bid. Kewaspadaan Nasional	orang	750	750	750	750	3,025,600,000.00	APBD	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Kegiatan 2 : Pemantapan Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Kota Samarinda (UU No. 7 Tahun 2002 dan Inpres No. 2 Tahun 2013)	Indikator : Laporan hasil kerja Tim Kominda dan Tim Pengawasan Orang Asing Dan Lembaga Asing di kota Samarinda	orang	100	100	400	400	3,409,600,000.00	APBD	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline (2018)	Target			Indikatif Alokasi Anggaran (3 Tahun)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			2019	2020	2021			
INDIKATOR: 16.1.1.(a) Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.								
Program 2 : Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan								
Kegiatan 3 : Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Kota Samarinda (Inpres No. 1 Tahun 2014)	Indikator : Peserta sosialisasi PEKAT & Peningkatan Kapasitas SDA di Bid. Kewaspadaan Nasional	orang	750	750		3,025,600,000.00	APBD	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Kegiatan 4 : Pemantapan Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Kota Samarinda (UU No. 7 Tahun 2002 dan Inpres No. 2 Tahun 2013)	Indikator : Laporan hasil kerja Tim Kominda dan Tim Pengawasan Orang Asing Dan Lembaga Asing di kota Samarinda	orang	100	100		3,409,600,000.00	APBD	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
INDIKATOR : 16.1.2. Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk terpilah berdasarkan jenis kelamin, umur dan penyebab kematian.								
INDIKATOR : 16.1.2.(a) Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.								
INDIKATOR : 16.1.3. Proporsi penduduk yang mengalami kekerasan secara fisik, psikologi atau seksual dalam 12 bulan terakhir.								
Program 3 : peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan								
Kegiatan 5 : Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Kota Samarinda (Inpres No. 1 Tahun 2014)	Indikator : Peserta sosialisasi PEKAT & Peningkatan Kapasitas SDA di Bid. Kewaspadaan Nasional	orang	750	750		3,025,600,000.00	APBD	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
INDIKATOR : 16.1.3.(a) Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.								
Program 4 : peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan								
Kegiatan 6: Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Kota Samarinda (Inpres No. 1 Tahun 2014)	Indikator : Peserta sosialisasi PEKAT & Peningkatan Kapasitas SDA di Bid. Kewaspadaan Nasional	orang	750	750		3,369,600,000.00	APBD	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
16.2. Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan peniksaan terhadap anak.								

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline (2018)	Target			Indikatif Alokasi Anggaran (3 Tahun)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			2019	2020	2021			
INDIKATOR : 16.2.1. Proporsi anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam sebulan terakhir								
Program 1 : keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan								
Kegiatan 1 : Perlindungan Khusus anak	Persentase pencegahan kasus kekerasan pada anak	Persen	100	100	100	100	800,000,000.00	DP2PA
Kegiatan 2 : Peningkatan Kesejahteraan Anak	Fasilitasi Pendampingan anak melalui KPAD	Persen	100	100	100	100	650,000,000.00	DP2PA
Kegiatan 3 : Penunjang pelaksanaan kegiatan kota layak anak	Terselenggaranya Advokasi, Koordinasi, dan FGD kepada Perangkat Daerah, Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha, dan Media Massa yang terlibat dalam Gugus Tugas KLA	Kegiatan	8	8	8	8	907,975,000.00	DP2PA
Program 2 : Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender Dan Anak								
Kegiatan 4 : Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan & Anak (P2TP2A)	Memfasilitasi P2TP2A	Persen	100	100	100	100	1,275,000,000.00	DP2PA

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline (2018)	Target			Indikatif Alokasi Anggaran (3 Tahun)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			2019	2020	2021			
Program 3 : Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan								
Kegiatan 5 : Sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT	Jumlah pelatihan pendampingan bagi petugas yang menangani korban kekerasan perempuan dan anak	Kegiatan	1	1	2	3	550,000,000.00	DP2PA
pengasuh dalam setahun terakhir.								
Program 4 : keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan								
Kegiatan 6 : Perlindungan Khusus anak	Persentase pencegahan kasus kekerasan pada anak	Persen	100	100	100	100	800,000,000.00	DP2PA
Program 5 : Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan								
Kegiatan 7 : Sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT	Jumlah pelatihan pendampingan bagi petugas yang menangani korban kekerasan perempuan dan anak	Kegiatan	1	1	2	3	550,000,000.00	DP2PA
INDIKATOR : 16.2.1.(b) Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.terakhir.								
Program 6 : keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan								
Kegiatan 8 : Perlindungan Khusus anak	Persentase pencegahan kasus kekerasan pada anak	Persen	100	100	100	100	800,000,000.00	DP2PA
Program 7 : Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender Dan Anak								
Kegiatan 9 : Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan & Anak (P2TP2A)	Memfasilitasi P2TP2A	Persen	100	100	100	100	1,275,000,000.00	DP2PA
Program 8 : Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan								

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline (2018)	Target			Indikatif Alokasi Anggaran (3 Tahun)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2019	2020	2021			
Kegiatan 10 : Sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT	Jumlah pelatihan pendampingan bagi petugas yang menangani korban kekerasan perempuan dan anak	Kegiatan	1	1	2	3	550,000,000.00		DP2PA
INDIKATOR : 16.2.2 Angka korban perdagangan manusia per 100.000 penduduk menurut jenis kelamin, kelompok umur dan jenis eksploitasi.									
Program 9 : Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender Dan Anak									
Kegiatan 11 : Fasilitas Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan & Anak (P2TP2A)	Memfasilitasi P2TP2A	Persen	100	100	100	100	1,275,000,000.00		DP2PA
Program 10 : Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan									
Kegiatan 12 : Peningkatan kualitas dan kapasitas pokja PUG Kota Samarinda	Fasilitasi pembentukan focal point kota dan peningkatan kapasitas Pokja PUG Kota	Dokumen	1	1	1	1	1,347,615,000.00		DP2PA
INDIKATOR : 16.2.3 Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-29 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.									
Program 11 : Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender Dan Anak									
Kegiatan 13 : Fasilitas Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan & Anak (P2TP2A)	Memfasilitasi P2TP2A	Persen	100	100	100	100	1,275,000,000.00		DP2PA

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline (2018)	Target			Indikatif Alokasi Anggaran (3 Tahun)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			2019	2020	2021			
Program 12 : Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan								
Kegiatan 14 : Sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT	Jumlah pelatihan pendampingan bagi petugas yang menangani korban kekerasan perempuan dan anak	Kegiatan	1	1	2	3	550,000,000.00	DP2PA
Program 13 : Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan								
Kegiatan 15 : Peningkatan kualitas dan kapasitas pokja PUG Kota Samarinda	Fasilitasi pembentukan focal point kota dan peningkatan kapasitas Pokja PUG Kota	Dokumen	1	1	1	1	1,347,615,000.00	DP2PA
INDIKATOR : 16.2.2 Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.								
Program 14 : Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender Dan Anak								
Kegiatan 16 : Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan & Anak (P2TP2A)	Memfasilitasi P2TP2A	Persen	100	100	100	100	1,275,000,000.00	DP2PA
Program 15 : Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan								
Kegiatan 17 : Sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT	Jumlah pelatihan pendampingan bagi petugas yang menangani korban kekerasan perempuan dan anak	Kegiatan	1	1	2	3	550,000,000.00	DP2PA

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline (2018)	Target			Indikatif Alokasi Anggaran (3 Tahun)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			2019	2020	2021			
Program 16 : Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan								
Kegiatan 1 8 : Peningkatan kualitas dan kapasitas pokja PUG Kota Samarinda	Fasilitasi pembentukan focal point kota dan peningkatan kapasitas Pokja PUG Kota	Dokumen	1	1	1	1	1,347,615,000.00	DP2PA
Target 16.3. Menggalakkan kedaulatan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua.								
INDIKATOR : 16.3.1. Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan lalu yang melaporkan kepada pihak berwajib atau pihak berwenang yang diakui								
Program 1 : Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan								
Kegiatan 1 : Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Kota Samarinda (Inpres No. 1 Tahun 2014)	Indikator : Peserta sosialisasi PEKAT & Peningkatan Kapasitas SDA di Bid. Kewaspadaan Nasional	orang	750	750	750	750	3,025,600,000.00	APBD BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Kegiatan 2 : Pemantapan Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Kota Samarinda (UU No. 7 Tahun 2002 dan Inpres No. 2 Tahun 2013)	Indikator : Laporan hasil kerja Tim Kominda dan Tim Pengawasan Orang Asing Dan Lembaga Asing di kota Samarinda	orang	100	100	400	400	3,409,600,000.00	APBD BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
INDIKATOR : 16.3.1. (a) Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.								
Program 2 : Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan								
Kegiatan 3 : Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Kota Samarinda (Inpres No. 1 Tahun 2014)	Indikator : Peserta sosialisasi PEKAT & Peningkatan Kapasitas SDA di Bid. Kewaspadaan Nasional	orang	750	750	750	750	3,025,600,000.00	APBD BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline (2018)	Target			Indikatif Alokasi Anggaran (3 Tahun)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			2019	2020	2021			
Kegiatan 4 : Indikator : Laporan hasil Pemantapan Stabilitas dan Keamanan dan Ketertiban Kota Samarinda (UU No. 7 Tahun 2002 dan Inpres No. 2 Tahun 2013)	orang	100	100	400	400	3,409,600,000.00	APBD	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
INDIKATOR : 16.3.1.(b) Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi dan non litigasi								
Program 3 : Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan								
Kegiatan 5 : Pembinaan Hukum	Pembentukan Kelompok Kadarkum	Kelompok	10	10	15	15	3,800,000,000.00	Bagian Hukum
Kegiatan 6 : Penyebarluasan Informasi Produk Hukum dan Publikasi	Persentase produk hukum daerah yang disosialisasikan	Persen	100	100	100	100	2,500,000,000.00	Bagian Hukum
Target 16.5. Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya.								
INDIKATOR : 16.5.1. Proporsi penduduk yang memiliki paling tidak satu kontak hubungan dengan petugas, yang membayar suap kepada petugas atau diminta untuk menyuap petugas tersebut dalam 12 bulan terakhir.								
INDIKATOR : 16.5.1.(a) Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).								
Program 1 : Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH								

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline (2018)	Target			Indikatif Alokasi Anggaran (3 Tahun)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2019	2020	2021			
Kegiatan 1 : Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	Presentase Capaian Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK)	Dokumen	9	9	9	9	12,000,000,000.00	APBD	ITDA
	OPD yang memenuhi syarat untuk di Usulkan mendapat Predikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)	OPD	47	47	47	47			
	Pengaduan masyarakat yang di tindak lanjuti	OPD	47	47	47	47			
Kegiatan 2 : Tata Kelola Pemerintahan	Sosialisasi saber Pungli	Dokumen	1	1	1	1	12,000,000,000.00	APBD	ITDA
	OPD yang melakukan Pengendalian Gratifikasi	OPD	47	47	47	47			
	Pengaduan masyarakat yang di tindak lanjuti	Dokumen	1	1	1	1			

Target 16.6. Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.

INDIKATOR : 16.6.1 Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.

Program 1 : Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Kegiatan 1 : Penyusunan Laporan Keuangan Daerah dan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD	Tersedianya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Akurat dan Akuntabel	Dokumen	1	1	1	1	12,000,000,000.00	APBD	BPKAD
	Tersedianya Laporan Pertanggungjawaban APBD Kota Samarinda								

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline (2018)	Target			Indikatif Alokasi Anggaran (3 Tahun)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2019	2020	2021			
Kegiatan 2 : Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan serta Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD Kota Samarinda	Tersedianya Perda APBDP Tahun n Kota Samarinda serta Perwali Penjabaran APBDP Tahun n Kota Samarinda yang tersedia	Dokumen	2	2	2	2	4,866,028,000.00	APBD	BPKAD

INDIKATOR : 16.6.1 (a) Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).

Program 2 : Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Kegiatan 3 : Penyusunan Laporan Keuangan Daerah dan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD	Tersedianya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Akurat dan Akuntabel	Dokumen	1	1	1	1	10,333,000,000.00	APBD	BPKAD
	Tersedianya Laporan Pertanggungjawaban APBD Kota Samarinda								
Kegiatan 4 : Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	Presentase Capaian Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK)	Dokumen	9	9	9	9	12,000,000,000.00	APBD	ITDA
	OPD yang memenuhi syarat untuk di Usulkan mendapat Predikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)	OPD	47	47	47	47			
	Pengaduan masyarakat yang di tindak lanjuti	OPD	47	47	47	47			

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline (2018)	Target			Indikatif Alokasi Anggaran (3 Tahun)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			2019	2020	2021			
INDIKATOR : 16.6.1 (b) Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah								
Program 3 : Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH								
Kegiatan 5 : Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	Presentase Capaian Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK)	Dokumen	9	9	9	12,000,000,000.00	APBD	ITDA
	OPD yang memenuhi syarat untuk di Usulkan mendapat Predikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)	OPD	47	47	47			
	Pengaduan masyarakat yang di tindak lanjuti	OPD	47	47	47			
INDIKATOR : 16.6.1 ©Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.								
Program 4 : Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH								
Kegiatan 6 : Peningkatan Pelayanan Pengadaan Barang/ Jasa	Persentase paket pengadaan barang dan jasa yang terlaksana dengan baik.	Persen	100	100	100	3,220,000,000.00	APBD	BPBJ & Bag. Admin Pembangunan
Program 5 : Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi								
Kegiatan 7 : Penunjang Optimalisasi Informasi Pengadaan Barang/Jasa	Pelaksanaan sistem informasi untuk memudahkan proses pengadaan barang/jasa	Dokumen	0	4	4	1,915,000,000.00	APBD	BPBJ & Bag. Admin Pembangunan
Kegiatan 8 : Optimalisasi Pemilihan Penyedia Barang/Jasa	Laporan Triwulan Optimalisasi Pemilihan Penyedia Barang/Jasa	Dokumen	0	4	4	1,235,000,000.00	APBD	BPBJ & Bag. Admin Pembangunan
Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).								
Program 6 : Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH								

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline (2018)	Target			Indikatif Alokasi Anggaran (3 Tahun)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2019	2020	2021			
Kegiatan 9 : Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	Presentase Capaian Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK)	Dokumen	9	9	9	9	12,000,000,000.00	APBD	ITDA
	OPD yang memenuhi syarat untuk di Usulkan mendapat Predikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)	OPD	47	47	47	47			
	Pengaduan masyarakat yang di tindak lanjuti	OPD	47	47	47	47			
INDIKATOR : 16.6.2 Proporsi penduduk yang puas terhadap pengalaman terakhir atas layanan publik.									
Program 7 : Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik									
Kegiatan 10 : Evaluasi Hasil Penerapan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan	OPD yang telah menerapkan Standar Pelayanan dan Malumat Pelayanan	OPD	20	25	30	100	1,375,000,000.00	APBD	BAGOR
(Provinsi/Kabupaten/Kota).									
Program 8 : Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik									
Kegiatan 11 : Evaluasi Hasil Penerapan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan	OPD yang telah menerapkan Standar Pelayanan dan Malumat Pelayanan	OPD	20	25	30	100	1,375,000,000.00	APBD	BAGOR
INDIKATOR : 16.7.1. Proporsi jabatan (menurut kelompok umur, jenis kelamin, disabilitas dan kelompok masyarakat) di lembaga publik (DPR/DPRD, pelayanan									
INDIKATOR : 16.7.1.(a) Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).									
Program 9 : Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender Dan Anak									

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline (2018)	Target			Indikatif Alokasi Anggaran (3 Tahun)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2019	2020	2021			
Kegiatan 12 : Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan & Anak (P2TP2A)	Memfasilitasi P2TP2A	Persen	100	100	100	100	1,275,000,000.00	APBD	DP2PA
Program 10 : Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan									
Kegiatan 13 : Peningkatan kualitas dan kapasitas pokja PUG Kota Samarinda	Fasilitasi pembentukan focal point kota dan peningkatan kapasitas Pokja PUG Kota	Dokumen	1	1	1	1	1,347,615,000.00	APBD	DP2PA
INDIKATOR : 16.7.1.(b) Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).									
Program 11 : Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender Dan Anak									
Kegiatan 14 : Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan & Anak (P2TP2A)	Memfasilitasi P2TP2A	Persen	100	100	100	100	1,275,000,000.00	APBD	DP2PA
Program 12 : Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan									
Kegiatan 15 : Peningkatan kualitas dan kapasitas pokja PUG Kota Samarinda	Fasilitasi pembentukan focal point kota dan peningkatan kapasitas Pokja PUG Kota	Dokumen	1	1	1	1	1,347,615,000.00	APBD	DP2PA
INDIKATOR : 16.7.2. Proporsi penduduk yang percaya pada pengambilan keputusan yang inklusif dan responsif menurut jenis kelamin, umur, difabilitas dan									
INDIKATOR : 16.7.2.(a) Indeks Lembaga Demokrasi									
Program 13 : Program pengembangan wawasan kebangsaan									

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline (2018)	Target			Indikatif Alokasi Anggaran (3 Tahun)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2019	2020	2021			
Kegiatan 16 : Pembinaan Organisasi Masyarakat	Peserta anggota Ormas yang dibina	Orang	110	120	130	140	1,630,000,000.00	APBD	Badan Kesbangpol
Kegiatan 17 : Peningkatan Ketahanan Adat dan Culture Masyarakat	Pertunjukan/Pagelaran Kesenian Tradisional, Road Show, Pertunjukan Kesenian, dan Dialog Interaktif	Road Show	5	5	5	5	4,189,850,000.00	APBD	Badan Kesbangpol
INDIKATOR : 16.7.2.(b) Indeks Kebebasan Sipil.									
Program 14 : Program pengembangan wawasan kebangsaan									
Kegiatan 18 : Peningkatan Toleransi & Kerukunan dalam Kehidupan Beragama	Peserta Dialog Kerukunan Umat Beragama	Orang	600	600	650	700	1,345,850,000.00	APBD	Badan Kesbangpol
Kegiatan 19 : Pemantapan Wawasan Kebangsaan & Pembauran Kebangsaan	Peserta Sosialisasi Pemantapan Wasbang dan Pembauran Kebangsaan	Orang	700	800	900	1,000	2,617,105,000.00	APBD	Badan Kesbangpol
Kegiatan 20 : Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila, dan Peningkatan Kesadaran Bela Negara	Peserta Sosialisasi Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila, dan Peningkatan Kesadaran Bela Negara	Orang	900		900	1,000	2,290,650,000.00	APBD	Badan Kesbangpol
Kegiatan 21 : Gugus Tugas Gerakan Revolusi Mental (GNRM)	Peserta GNRM	Orang	-	100	500	600	3,100,000,000.00	APBD	Badan Kesbangpol

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline (2018)	Target			Indikatif Alokasi Anggaran (3 Tahun)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
			2019	2020	2021				
INDIKATOR : 16.7.2.(c) Indeks Hak-hak Politik.									
Program 15 : Program Pendidikan Politik Masyarakat									
Kegiatan 22 : Pemantauan Perkembangan Politik Daerah (TP3D) Kota Samarinda	Personal TP3D Kota Samarinda yang terbentuk	Orang	450	450	450	450	3,847,700,000.00	APBD	Badan Kesbangpol
Kegiatan 23 : Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan PEMILU Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Peserta Sosialisasi Penyelenggaraan PEMILU PILEG dan PILPRES	Orang	1500	1500	1500	1500	7,750,000,000.00	APBD	Badan Kesbangpol
Kegiatan 24 : Pembinaan dan Peningkatan pendidikan politik masyarakat	Pembentukan Tim Pokja Pembinaan dan Peningkatan Pendidikan Politik	Orang	3	1	1		2,989,000,000.00	APBD	Badan Kesbangpol
Kegiatan 25 : Desk Pilkada Gubernur/Wakil Gubernur	Masyarakat, Wanita dan Generasi Muda yang mengikuti sosialisasi Pilkada , PILEG & PILPRES (APBD Kota & Propinsi)	Orang	1400				3,000,001,600.00	APBD	Badan Kesbangpol
Target 16.9. Pada tahun 2030, memberikan identitas yang sah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.									
INDIKATOR : 16.9.1. Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.									
Program 1 : Program penataan Administrasi Kependudukan									

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline (2018)	Target			Indikatif Alokasi Anggaran (3 Tahun)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2019	2020	2021			
Kegiatan 1 : Pemeliharaan dan pengembangan teknologi informasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Terciptanya koneksi jaringan secara terpadu	Tower		18	18	18	4,340,000,000.00	APBD	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	data online	Data		40	50	70			
Kegiatan 2 : Peningkatan pelayanan gratis dokumen disdukcapil serta pengadaan sarana dan prasarana kegiatan	Pengesahan dokumen disdukcapil	Lembar		17,750	18000	18500	5,927,625,000.00	APBD	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Kegiatan 3 : Tertib administrasi dokumen dan akta-akta catatan sipil	Jumlah dokumen akta kelahiran yang diterbitkan	Lembar	17500	0	0	0	5,125,000,000.00	APBD	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Jumlah dokumen akta perkawinan yang diterbitkan	Kutipan	600	0	0	0			
	Jumlah dokumen akte kematian yang diterbitkan	Kutipan	400	0	0	0			
	Penataan, penertiban, dan penginputan arsip-arsip pencatatan sipil	Arsip	30000	30000	30000	30000			
Kegiatan 4 : Peningkatan Inovasi pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil	Inovasi pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Jenis Inovasi		3	3	3	1,425,000,000.00	APBD	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline (2018)	Target			Indikatif Alokasi Anggaran (3 Tahun)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2019	2020	2021			
Kegiatan 5 : Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK Non Fisik Pelayanan Administrasi Kependudukan Tahun 2018)	Perekaman e-KTP	Persen (%)		97	98	99	5,397,146,000.00	APBD	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Pendaftaran KIA	Persen (%)		65	70	75			
	Kerjasama dengan lembaga pengguna serta kerjasama dengan lembaga pengguna	Lembaga Pengguna (LP)		30	35	40			
	Akte kelahiran penduduk usia 0-18 tahun	Persen (%)		95	97	98			
INDIKATOR : 16.9.1.(a) Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.									
Program 2 : Program penataan Administrasi Kependudukan									
Kegiatan 6 : Tertib administrasi dokumen dan akta-akta catatan sipil	Jumlah dokumen akta kelahiran yang diterbitkan	Lembar	17500	0	0	0	5,125,000,000.00	APBD	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Jumlah dokumen akta perkawinan yang diterbitkan	Kutipan	600	0	0	0			
	Jumlah dokumen akte kematian yang diterbitkan	Kutipan	400	0	0	0			
	Penataan, penertiban, dan penginputan arsip-arsip pencatatan sipil	Arsip	30000	30000	30000	30000			
Kegiatan 7 : Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK Non Fisik Pelayanan Administrasi Kependudukan Tahun 2018)	Perekaman e-KTP	Persen (%)		97	98	99	5,397,146,000.00	APBD	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Pendaftaran KIA	Persen (%)		65	70	75			
	Kerjasama dengan lembaga pengguna serta kerjasama dengan lembaga pengguna	Lembaga Pengguna (LP)		30	35	40			

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline (2018)	Target			Indikatif Alokasi Anggaran (3 Tahun)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
			2019	2020	2021				
Akte kelahiran penduduk usia 0-18 tahun	Persen (%)		95	97	98				
INDIKATOR : 16.9.1.(b)Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.									
Program 3 : Program penataan Administrasi Kependudukan									
Kegiatan 8 : Tertib administrasi dokumen dan akta-akta catatan sipil	Jumlah dokumen akta kelahiran yang diterbitkan	Lembar	17500	0	0	0	5,125,000,000.00	APBD	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Jumlah dokumen akta perkawinan yang diterbitkan	Kutipan	600	0	0	0			
	Jumlah dokumen akte kematian yang diterbitkan	Kutipan	400	0	0	0			
	Penataan, penertiban, dan penginputan arsip-arsip pencatatan sipil	Arsip	30000	30000	30000	30000			
Kegiatan 9 : Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK Non Fisik Pelayanan Administrasi Kependudukan Tahun 2018)	Perekaman e-KTP	Persen (%)		97	98	99	5,397,146,000.00	APBD	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Pendaftaran KIA	Persen (%)		65	70	75			
	Kerjasama dengan lembaga pengguna serta kerjasama dengan lembaga pengguna	Lembaga Pengguna (LP)		30	35	40			
	Akte kelahiran penduduk usia 0-18 tahun	Persen (%)		95	97	98			
Target 16.10. Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.									
INDIKATOR : 16.10.1. Jumlah kasus terverifikasi atas pembunuhan, penculikan dan penghilangan secara paksa, penahanan sewenang-wenang dan penyiksaan									
INDIKATOR : 16.10.1.(a) Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).									
INDIKATOR : 16.10.1.(b) Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan.									

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline (2018)	Target			Indikatif Alokasi Anggaran (3 Tahun)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
			2019	2020	2021				
Program 1 : Program Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender Dan Anak									
Kegiatan 1 : Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan & Anak (P2TP2A)	Memfasilitasi P2TP2A	Persen	100	100	100	100	1,275,000,000	APBD	DP2PA
Program 2 : Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan									
Kegiatan 2 : Peningkatan kualitas dan kapasitas pokja PUG Kota Samarinda	Fasilitasi pembentukan focal point kota dan peningkatan kapasitas Pokja PUG Kota	Dokumen	1	1	1	1	1,347,615,000	APBD	DP2PA
INDIKATOR : 16.10.2. Jumlah negara yang mengadopsi dan melaksanakan konstitusi, statutori dan/atau jaminan kebijakan untuk akses publik pada informasi.									
INDIKATOR : 16.10.2.(a) Tersedianya Badan Publik yang menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi									
Program 3 : Program pengembangan Infrastruktur komunikasi,informasi dan media massa									
Kegiatan 4 : Peningkatan Kapasitas Sarana Prasarana Bidang Komunikasi dan Informasi	Tercukupinya sarana prasarana TIK di wilayah Kota Samarinda	Persen	30				-	APBD	Dinas Kominfo
Kegiatan 5 : Pengelolaan Konten dan Media Informasi Publik	Jumlah konten yang dikemas ke dalam media komunikasi publik	Konten		200			200,000,000	APBD	Dinas Kominfo

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline (2018)	Target			Indikatif Alokasi Anggaran (3 Tahun)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
			2019	2020	2021				
Program 4 : Program Kerjasama Informasi dan Media Massa									
Kegiatan 6 : Kemitraan Media dan Lembaga Komunikasi Publik	Program kerjasama dengan pihak media massa (cetak dan elektronik, media luar ruang, dan media online), serta bersatunya informasi melalui lembaga informasi publik	Persen	40	50			3,580,000,000	APBD	Dinas Kominfo
Kegiatan 7 : Desiminasi Informasi Publik dan Media Tradisional	Penyebarluasan Informasi Melalui Media Tradisional	Kali	4				-	APBD	Dinas Kominfo
Kegiatan 8 : Diseminasi dan Pendistribusian Informasi	Laporan penyebarluasan informasi publik melalui media massa, media tradisional, interpersonal dan luar ruang	Dokumen	6				250,000,000	APBD	Dinas Kominfo
INDIKATOR : 16.10.2.(c) Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam									
Program 5 : Program pengembangan komunikasi, Informasi Dan Media Massa									
Kegiatan 9 : Implementasi PPID Kota Samarinda	Terbentuknya PPID Pembantu dan Layanan Publik	Unit/Orang	9	0	0	0	-	APBD	Dinas Kominfo
Kegiatan 10 : Monitoring dan Evaluasi PPID Pembantu	Laporan kinerja PPID pembantu	Dokumen	0	1	0	0	300,000,000	APBD	Dinas Kominfo

MATRIK 3 . PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUNAN						ALOKASI ANGGARAN	INSTANSI PELAKSANA
			2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan										
INDIKATOR SDGs: 1.2.1* Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.										
Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu										
Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin (PBI)			4,130,000,000	5,651,963,000						
Pembinaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE)			22,125,000	25,550,000						
Pengelolaan Data PMKS Miskin Penerima Program Penanggulangan Kemiskinan			264,600,000	956,097,000						
Pelatihan Tenaga Kerja Bagi Gakin			269,680,000	260,700,000						
Pengelolaan Data Penerima Bantuan Iuran (PBI)			39,905,000	-						
Peningkatan Rumah Tidak Layak Huni (DAK Reguler TA)			1,657,000,000	1,528,000,000						
Pembinaan Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)			-	30,000,000						
INDIKATOR SDGs: 1.3.1.(c) Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.										
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial										
Fasilitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)										

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUNAN						ALOKASI ANGGARAN	INSTANSI PELAKSANA
			2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Pelayanan Korban Bencana										
INDIKATOR SDGs: 1.4.1 (b) Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.										
Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Ketahanan Pangan										
Operasional Penyaluran Rastra/BPNT										
Tujuan 2 Tanpa Kelaparan										
INDIKATOR SDGs: 2.1.1* Prevalensi ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernutrition)										
Program Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan										
Peningkatan Kelancaran Distribusi Ketahanan Pangan, Stabilitas Harga dan Pengembangan Produk Dalam Negeri			80,000,000	178,900,000						
Operasional TPI			291,900,000	40,250,000						
DAK Bidang Perikanan			1,720,000,000	1,394,685,000						
Pemeliharaan/Pearawatan/Peningkatan Fasilitas Pelayanan BBI Teritip Balikpapan			200,000,000	221,960,000						
Pengadaan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap			291,900,000	800,000,000						
Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera										
INDIKATOR SDGs: 3.1.1* Angka Kematian Ibu (AKI).										
Program Peningkatan Pelayanan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak										
Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak			372,805,000	264,266,400						

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUNAN						ALOKASI ANGGARAN	INSTANSI PELAKSANA
			2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus			300,000,000	240,000,000						
Jaminan Persalinan Bagi Masyarakat yang Tidak Mempunyai Jaminan Persalinan (DAK)			2,324,964,000	2,270,983,000						
INDIKATOR SDGs: 3.3.1. Angka infeksi baru HIV per 1000 populasi tidak terinfeksi HIV.										
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular										
Peningkatan Imunisasi			228,405,650	204,320,000						
Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah			36,003,200	46,348,000						
Pemberantasan Penyakit Kulit/Kelamin/IMS,HIV /AIDS			152,837,950	197,120,000						
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular (TBC,ISPA, Kecacinga dan Diare Dan Kusta)			162,845,550	183,040,000						
Pemberantasan Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) dan Zoonosis			755,255,525	1.178,000,000						

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUNAN						ALOKASI ANGGARAN	INSTANSI PELAKSANA
			2017	2018	2019	2020	2021	2022		
INDIKATOR SDGs: 3.5.1.(d) Jumlah lembaga rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA yang telah dikembangkan/dibantu.										
Program Upaya Kesehatan Masyarakat										
Pelayanan Kesehatan Gigi Anak Sekolah dan Masyarakat Balikpapan			60,000,000	48,000,000						
Peningkatan Gizi Masyarakat			214,100,000	178,480,000						
Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular (PTM)			149,862,335	179,020,000						
Pelaksanaan Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga			58,900,000	65,840,000						
Pembinaan Pemanfaatan Hasil Tanaman Obat Keluarga (TOGA)			11,938,130	47,200,000						
Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya Serta Pemberdayaan Masyarakat/ Konsumen di Bidang Obat dan Makanan			142,350,000	133,280,000						
Pelayanan Kesehatan Mata			107,800,000	86,240,000						
Pelayanan Kesehatan Jiwa			3,693,300	41,400,000						

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUNAN						ALOKASI ANGGARAN	INSTANSI PELAKSANA
			2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Penatalaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Calon Jemaah Haji			81,200,000	140,960,000						
Pembayaran Klaim Visum			200,000,000	160,000,000						
Operasional Kasus KDRT, KTP, KIA dan Trafficking di Puskesmas			36,000,000	58,640,000						
Peningkatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat			438,442,025	484,960,000						
Penyehatan Lingkungan			123,200,000	128,667,000						
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Dinas Kesehatan (BOK) DAK			637,289,000	645,789,000						
Distribusi Obat dan e-Logistik (BOK) DAK			176,676,000	166,164,000						
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia			103,800,000	100,240,000						
Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan			214,100,000	182,480,000						
Penanganan Pelayanan Pasien Ketergantungan NAPZA			7,544,790	40,480,000						

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUNAN						ALOKASI ANGGARAN	INSTANSI PELAKSANA
			2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Bencana			2,539,450	60,240,000						

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUNAN						ALOKASI ANGGARAN	INSTANSI PELAKSANA
			2017	2018	2019	2020	2021	2022		
INDIKATOR SDGs: 3.8.1.(a) Unmet need pelayanan kesehatan.										
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat										
Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas BLUD di Balikpapan			45,474,730,489	14,871,572,000						
INDIKATOR SDGs: 3.c.1* Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.										
Program Peningkatan Kualitas, Kuantitas Sumber Daya Manusia Serta Sarana Prasarana Kesehatan										
Peningkatan Kualitas, Kuantitas Sumber Daya Manusia Serta Sarana Prasarana Kesehatan			12,693,231,280	28,452,817,000						
Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Melalui Pengiriman Program Pelatihan			12,358,280	148,480,000						
Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas			291,996,200	14,319,731,000						
Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas (DAK)			1,915,395,000	6,516,978,000						
Pengelolaan Pengembangan dan Sumber Daya Kesehatan			100,000,000	109,700,000						
Penerapan Akreditasi Sarana Pelayanan Kesehatan			1,534,180,000	500,000,000						

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUNAN						ALOKASI ANGGARAN	INSTANSI PELAKSANA
			2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Pengawasan dan Peningkatan Kualitas Alat Kesehatan			247,350,000	1,000,000,000						
Pengadaan Obat dan BMHP (DAK)			3,500,000,000	3,495,909,000						
Pengadaan Obat dan BMHP			901,200,000	1,500,000,000						
Pemantapan Pelaksanaan Sistem Akuntansi dan Monitoring Evaluasi Puskesmas			13,050,000	23,440,000						
Pengembangan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah		-		40,000,000						
Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Daerah			84,270,000	83,600,000						
Peningkatan Kapasitas Kinerja Puskesmas Dalam Rangka Meningkatkan Kesehatan Masyarakat			153,900,000	75,220,000						
Manajemen Desentralisasi Kesehatan			34,901,800	60,320,000						
Pengadaan Alat Kesehatan (DAK)			1,030,400,000	378,439,000						
Penyediaan Sewa Gedung Puskesmas		-		200,000,000						

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUNAN						ALOKASI ANGGARAN	INSTANSI PELAKSANA
			2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas										
INDIKATOR SDGs: 4.1.1.(a) Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.										
Program Pendidikan Dasar										
Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah (SDN)			1,700,000,000	1,373,500,000						
Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah (SMPN)			13,000,000,000	1,650,000,000						
Dana Alokasi Khusus Sekolah Dasar (DAK)			2,315,000,000	4,110,000,000						
Dana Alokasi Khusus Sekolah Menengah Pertama (DAK)			1,904,000,000	4,351,000,000						
Pembinaan, Pengelolaan dan Pelayanan Manajemen dan Data Sekolah Dasar			50,000,000	125,000,000						
Pembinaan, Pegelolaan dan Pelayanan Manajemen dan Data Sekolah Menengah Pertama			47,003,825	175,000,000						
Penyelenggara Akreditasi Pendidikan Dasar			85,000,000	125,000,000						
Penyelenggara Akreditasi SMP			-	75,000,000						

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUNAN						ALOKASI ANGGARAN	INSTANSI PELAKSANA
			2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Pembangunan ruang kelas baru (RKS) Sekolah Dasar (SD)			-	5,932,000,000						
Pembangunan ruang kelas baru (RKS) Sekolah Menengah Pertama (SMP)			-	2,700,000,000						
Pembangunan Pagar Sekolah Dasar (SD)			-	980,000,000						
Pembangunan Pagar Sekolah Menengah Pertama (SMP)			-	1,000,000,000						
Olympiade Sains SD			29,832,000	100,000,000						
Olympiade Sains SMP			28,296,425	100,000,000						
Pembinaan Pemantapan Implementasi Kurikulum 2013 Jenjang SD Kota Balikpapan			-	200,000,000						
Pembinaan Pemantapan Implementasi Kurikulum 2013 Jenjang SMP Kota Balikpapan			-	150,000,000						
Pengadaan Meubelair Siswa (SD) dan (SMP)			4,000,000,000	7,000,000,000						
Peringatan Hari Pendidikan Nasional			150,000,000	200,000,000						
Pelaksanaan Kuis Ki Hajar Tingkat Kota			-	160,000,000						

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUNAN						ALOKASI ANGGARAN	INSTANSI PELAKSANA
			2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Pembangunan Jamban/Toilet Sekolah Dasar (SD)			-	800,000,000						
Pengadaan Perlengkapan Sekolah			-	6,000,000,000						
Pra Ujian Sekolah SD dan Ujian Sekolah SD Kota Balikpapan			238,720,000	400,000,000						
Pra Ujian Sekolah SMP dan Ujian Nasional SMP Kota Balikpapan			183,144,000	400,000,000						
Pembinaan Gugus SD			-	200,000,000						
Pembinaan siswa Berprestasi			-	462,500,000						
Pembangunan SD - SMP Terpadu Kelurahan Graha Indah			1,290,000	3,500,000,000						
Pembangunan Sarana Prasarana SD Negeri 001 Balikpapan (Bantuan Keuangan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018)			65,890,600	798,642,000						
Biaya Operasional Sekolah (BOS) Pusat Pendidikan Dasar			65,890,600,000	81,717,200,000						
Tujuan 5 Kesetaraan Gender										
INDIKATOR SDGs: 5.1.1* Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.										
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak										
Perlindungan Perempuan			77,500,000	614,200,000						

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUNAN						ALOKASI ANGGARAN	INSTANSI PELAKSANA
			2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) Perlindungan Perempuan			132,427,000	196,698,000						
Pemberdayaan Potensi Perempuan			134,621,000	275,000,000						
Fasilitas Pengembangan Kecamatan Layak Anak			345,598,000	42,280,000						
Perlindungan Anak			42,400,000	72,600,000						
Komunikasi, Informasi dan Edukasi Perlindungan Anak			217,448,000	259,298,000						
pendataan Evaluasi, Pelaporan dan penguatan sistem Perlindungan Anak			85,750,000	243,147,000						
Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi										
INDIKATOR SDGs: 8.3.1.(c) Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan										
Program Peningkatan Kesempatan Kerja										
Pelayanan Antar Kerja			90,266,000	104,572,000						
Perluasan Kesempatan Kerja			57,123,000	27,040,000						
INDIKATOR SDGs: 8.5.1* Upah rata-rata per jam pekerja										
Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan										
Pembinaan, Pencegahan dan Penyelesaian Perselisian Hubungan Industrial			57,123,000	30,640,000						

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUNAN						ALOKASI ANGGARAN	INSTANSI PELAKSANA
			2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Pengendalian dan Koordinasi Dewan Pengupahan Dalam Penetapan UMK			25,860,000	75,902,500						
Pembinaan Pengaturan Syarat Kerja			29,463,000	61,110,000						
Pemasyarakatan Hubungan Industrial			1,800,000	12,885,000						
INDIKATOR SDGs: 8.5.2* Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur										
Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan										
Pembinaan, Pencegahan dan Penyelesaian Perselisian Hubungan Industrial			57,123,000	30,640,000						
Pengendalian dan Koordinasi Dewan Pengupahan Dalam Penetapan UMK			25,860,000	75,902,500						
INDIKATOR SDGs: 8.6.1* Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET)										
Program Peningkatan Kesempatan Kerja										
Penyelenggaraan Pelatihan Kerja			561,400,000	648,055,000						
Penyelenggaraan Pemagangan			28,950,000	31,150,000						
Pembinaan LPK			34,950,600	17,700,000						
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata										
Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata			698,241,000	9,000,000,000						

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUNAN						ALOKASI ANGGARAN	INSTANSI PELAKSANA
			2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Program Pembinaan dan Pengembangan Obyek Wisata										
Pengumpulan Data Jumlah Wisatawan dan Kunjungan Obyek Wisata di Balikpapan			1,113,836,000	1,402,140,000						
Pemilihan dan Pembinaan Duta Wisata Kota Balikpapan			23,220,000	135,000,000						
Operasional UPT Pantai Manggar Segara Sari			956,616,000	1,043,920,000						
Pengamanan Pantai Manggar Pada Hari Besar/Libur Nasional			-	200,000,000						
INDIKATOR SDGs: 8.9.1.(b) Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.										
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata										
Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di Luar Negeri			63,200,000	1,069,485,500						
Operasional Balikpapan Tourism Board (BTB)			56,400,000	187,000,000						
Cetak Brosur Informasi dan souvenir			240,000,000	250,000,000						
Pengembangan Informasi Pariwisata Berbasis Aplikasi			-	54,000,000						

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUNAN						ALOKASI ANGGARAN	INSTANSI PELAKSANA
			2017	2018	2019	2020	2021	2022		
INDIKATOR SDGs: 9.3.1* Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri..										
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah										
Fasilitas Kepemilikan Sertifikat Merk hak cipta,dan label halal			29,730,000	50,000,000						
Penyertaan Promosi Dan Patisipasi Industri kecil Menengah (DEKRANASDA)			133,224,000	221,139,000						
Pelatihan Aneka Usaha IKM			50,000,000	50,000,000						
Pengembangan dan Pembinaan Industri Kreatif		-		293,002,000						
Pengawasan Pengendalian TDI & IUI		-		41,784,000						
Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan										
INDIKATOR SDGs: 10.1.1.(a) Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.										
Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu										
Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin (PBI)			4,130,000,000	5,651,963,000						
PEMBINAAN Kelompok Usaha Bersama (KUBE)			22,125,000	25,550,000						
Pengelolaan Data PMKS Miskin Penerimaan Program Penanggulangan Kemiskinan			264,600,000	750,000,000						

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUNAN						ALOKASI ANGGARAN	INSTANSI PELAKSANA
			2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Pelatihan Tenaga Kerja Bagi Gakin			269,680,000	260,700,000						
Pengelolaan Data Penerima Bantuan Iuran (PBI)			39,905,000							
Peningkatan Kualitas Rumah tidak Layak Huni (DAK Reguler TA)			1,657,000,000	1,528,000,000						
Pembinaan Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)			-	30,000,000						

MATRIK 3 . PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH KABUPATEN MAHULU (SESUAI RPJMD)

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2018	TARGET TAHUNAN					ALOKASI ANGGARAN 5	INSTANSI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023		
Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan										
INDIKATOR SDGs: 1.2.1* Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.										
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Teencil KAT) & Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Persentase PMKS yang tertangani	%	95	98	100	100			750,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Program Pengentasan Ke Pemberdayaan kelompok usaha bersama (KUBE)	Angka Kemiskinan Jumlah KUBE	% KUBE	23.7	22.9	22.1	21.3			1,050,000,000 300,000,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Program Bantuan Dan Jaminan Sosial	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	%	65	70	75	80			2,374,920,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Pendampingan dan penyaluran bantuan program keluarga harapan (PKH)	Jumlah PKH yang mendapatkan bantuan								348,000,000	
Fasilitasi penyaluran bantuan beras sejahtera (RASTRA)	Jumlah KK yang mendapatkan bantuan beras sejahtera (RASTRA)								502,875,000	
Validasi dan verifikasi data penduduk miskin	Persentase data penduduk miskin yang tervalidasi dan terverifikasi								224,400,000	
Pendampingan dan Pengiriman Panti Sosial Bina Remaja	Jumlah Panti Sosial Bina Remaja								200,000,000	
INDIKATOR SDGs: 1.3.1.(c) Jumlah penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.										

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2018	TARGET TAHUNAN					ALOKASI ANGGARAN 5	INSTANSI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023		
Program Bantuan Dan Jaminan Sosial	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	%	65	70	75	80			2,374,920,000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Bantuan Kaki Tangan Palsu untuk Penyandang Disabilitas	Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan bantuan								242,850,000	
INDIKATOR SDGs: 1.5.1* Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.										
Program Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana	Persentase Penanggulangan Tanggap Darurat Bencana	%		80	85	90			16,045,110,000	Dinas Ketentraman Dan Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat
INDIKATOR SDGs: 1.5.1.(a) Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.										
Program Kesiapsiagaan Bencana	% tingkat kesiapsiagaan bencana	%		100	100	100			14,999,474,700	Dinas Ketentraman Dan Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat
Program Pencegahan Dan Mitigasi Bencana	% cakupan pencegahan dan mitigasi bencana	%		100	100	100			8,345,160,000	Dinas Ketentraman Dan Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat
Tujuan 2 Tanpa Kelaparan										
INDIKATOR SDGs: 2.1.1* Prevalensi ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernutrition)										
Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Rasio Ketersediaan Pangan	%	80	100	100	100			14,600,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan pertanian
Pemetaan Daerah Rawan Pangan	Luas daerah rawan pangan yang dipetakan	hektar							247,258,000	
Identifikasi Ketersediaan Potensi Bahan Baku Pangan Lokal	Jumlah Potensi Bahan Baku Pangan Lokal yang tersedia								351,635,000	Dinas Ketahanan Pangan dan pertanian
INDIKATOR SDGs: 2.1.1.(a) Prevalensi Kekurangan Gizi (underweight) pada anak balita.										

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2018	TARGET TAHUNAN					ALOKASI ANGGARAN 5	INSTANSI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023		
Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Persentase Peningkatan Gizi Masyarakat	%								Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
Suervelains Gizi	Laporan Pelaksanaan Kegiatan Suervelains Gizi	laporan						92,795,000		
Penemuan Kasus gizi Buruk secara terselektif dan Intervensi	Jumlah Penemuan Kasus gizi Buruk secara terselektif dan Intervensi	kasus						137,500,000		
INDIKATOR SDGs: 2.2.1* Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak balita.										
Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Persentase Peningkatan Gizi Masyarakat	%								Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
Sosialisasi Pencegahan Stunting (Bayi dan Balita Pendek)	Jumlah Peserta Sosialisasi Pencegahan Stunting (Bayi dan Balita Pendek)	orang						96,220,000		
INDIKATOR SDGs: 2.3.1* Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja)										
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian Perkebunan	Jumlah komoditi perkebunan yang dipasarkan melalui kegiatan pameran dagang	komoditi	1	2	3	4			4,050,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan pertanian
Fasilitasi Pengadaan Sarana dan Prasarana Pasar Tani, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Pasar Tani, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian yang difasilitasi	unit							755,525,000	
Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Jumlah produksi padi	ton	88.48	89.98	90.48	90.48			6,425,268,000	Dinas Ketahanan Pangan dan pertanian
Pemberdayaan petani dalam rangka peremajaan tanaman kakao	Jumlah pelaksanaan pemberdayaan petani	orang							227,525,000	Dinas Ketahanan Pangan dan pertanian

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2018	TARGET TAHUNAN					ALOKASI ANGGARAN 5	INSTANSI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023		
Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera										
INDIKATOR SDGs: 3.8.2.(a) Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).										
Program Pembinaan dan Penguatan Sistem Jaminan Kesehatan Nasional	Persentase Peningkatan Kualitas Sistem Jaminan Kesehatan Nasional	%	60	70	80	90			34,636,284,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
Optimalisasi dan Evaluasi Kegiatan Jaminan Kesehatan Nasional	Jumlah Laporan Optimalisasi dan Evaluasi Kegiatan Jaminan Kesehatan Nasional	laporan							200,000,000	
Dukungan Pembiayaan Rujukan Pasien BPJS dan Non BPJS	Jumlah Pembiayaan Rujukan Pasien BPJS dan Non BPJS								598,845,000	
Dukungan Pembiayaan Klaim SKTM dan Iuran BPJS Kesehatan	Jumlah Pembiayaan Klaim SKTM dan Iuran BPJS Kesehatan								8,247,974,012	
INDIKATOR SDGs: 3.b.1.(a) Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.										
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Cakupan Ketersediaan Obat, Alat Kesehatan dan Sediaan Farmasi	%	85	90	95	100			22,200,000,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
Penyediaan Obat Pelayan	Jumlah Jenis Obat yang disediakan								-	
Pendistribusian Sediaan Farmasi	Jumlah Sediaan Farmasi yang terdistribusi								300,000,000	
Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas										
INDIKATOR SDGs: 4.5.1* Rasio APM SD/MI/ sederajat										
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	1) APM SD	%	65.6	65.8	66	67			84,400,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	2) APM SMP		63.1	63.5	64.5	65				

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2018	TARGET TAHUNAN					ALOKASI ANGGARAN 5	INSTANSI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023		
INDIKATOR SDGs: 4.5.1* Rasio APM SMP/MTs/ sederajat										
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	1) APM SD	%	65.6	65.8	66	67			84,400,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	2) APM SMP		63.1	63.5	64.5	65				
Tujuan 6 Air Kebersihan dan Sanitasi Layak										
INDIKATOR SDGs: 6.1.1.(a) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.										
Program Pembangunan Jaringan PDAM	% Tingkat cakupan pelayanan PDAM	%	75	100	terbangun	terbangun			110,379,588,000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Pemukiman
INDIKATOR SDGs: 6.2.1.(c) Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).										
Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Cakupan Penduduk Dengan Akses Sanitasi yang Layak	%	20	25	30	35			1,200,000,000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
Pelaksanaan STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) dan Sertifikat Desa ODF (Open Defecation Free)	Laporan Pelaksanaan STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) dan Sertifikat Desa ODF (Open Defecation Free)								72,540,000	
Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau										
INDIKATOR SDGs: 7.1.1* Rasio elektrifikasi.										
Program pembinaan dan pengembangan ketenagalistrikan	Jumlah desa yang memiliki distribusi listrik dan tenaga surya	desa	20	30	40	50			27,008,750,000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Pemukiman
Pengembangan Jaringan Distribusi Listrik Kawasan Perkotaan	Jumlah desa yang teraliri listrik	desa							1,500,000,000	

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2018	TARGET TAHUNAN					ALOKASI ANGGARAN 5	INSTANSI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023		
Pengadaan dan Pemasangan PLTS PJU Di Kawasan Permukiman Ibukota Kabupaten Mahakam Ulu	Jumlah desa yang teraliri listrik	desa							10,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Pemukiman
Penambahan Jaringan Pipa Distribusi Sambungan Rumah Kampung Ujoh Bilang KecLong Bagun	Panjang pipa distribusi	meter							3,500,000,000	
INDIKATOR SDGs: 7.2.1* Bauran energi terbarukan.										
Program Pengembangan Energi Listrik Terbarukan	Jumlah desa yang memiliki pembangkit listrik mandiri	desa	37	41	46	50			49,950,000,000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Pemukiman
Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi										
INDIKATOR SDGs: 8.3.1.(a) Persentase tenaga kerja formal										
Program Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang dilatih terserap didunia kerja	orang	10	20	25	10			750,000,000	Bagian Kesejahteraan Rakyat
INDIKATOR SDGs: 8.5.2* Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur										
Program Peningkatan Ke	Tingkat Pengangguran Tert	%	6.75	6.51	6.27	6.03			5,148,385,500	Bagian Kesejahteraan Rakyat
Fasilitasi pelatihan tenaga kerja	Jumlah pelatihan tenaga kerja	orang							200,000,000	
Pendataan lowongan kerja di perusahaan yang ada di Kabupaten Mahakam Ulu	Jumlah data lowongan kerja di perusahaan yang ada di Kabupaten Mahakam Ulu	data							121,375,000	
Pendataan Tenaga pengangguran terbuka	Jumlah Tenaga pengangguran terbuka	orang							137,710,000	Bagian Kesejahteraan Rakyat

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2018	TARGET TAHUNAN					ALOKASI ANGGARAN 5	INSTANSI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023		
INDIKATOR SDGs: 8.9.1.(b) Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.										
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	meningkatnya kunjungan wisatawan		4	4	8	9			1,575,075,000	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga
Pesta Rakyat Kabupaten Mahakam Ulu Dalam Rangka HUT Kabupaten Tahun 2019	Jumlah pelaksanaan pesta rakyat								1,126,974,000	
Syembara Melukis Batik Khas Mahakam Ulu	Jumlah pelaksanaan sayembara melukis								117,608,581	
Tujuan 9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur										
INDIKATOR SDGs: 9.1.2.(a) Jumlah bandara.										
Program Pembangunan dan Peningkatan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Tingkat cakupan pemenuhan sarana prasarana dan fasilitas transportasi dasar di Kab. Mahakam Ulu	%	70	75	80	90			31,351,995,600	Dinas Perhubungan
Pengadaan Tanah tahap II untuk Pembangunan Bandara Udara Ujoh Bilang di Kabupaten Mahakam Ulu	Luas tanah untuk pembangunan bandara								21,063,544,000	
Pembangunan Sisi Darat Bandar Udara Ujoh Bilang	Panjang Sisi Darat Bandar Udara Ujoh Bilang yang dibangun								15,063,544,000	
Land Cleaning Bandara Ujoh Bilang	Luas lahan yang dibebaskan								2,939,204,000	

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2018	TARGET TAHUNAN					ALOKASI ANGGARAN 5	INSTANSI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023		
Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan										
INDIKATOR SDGs: 10.1.1.(d) Jumlah desa mandiri										
Program Pembangunan Ekonomi Kampung	Meningkatnya Kapasitas Ekonomi Kampung	%		100	100	100			3,000,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kampung	Tingkat Capaian Pengembangan Ekonomi Masyarakat.	%	100	100	100	100			6,180,000,000	
INDIKATOR SDGs: 10.3.1.(a) Aspek Kebebasan Sipil dalam Indeks Demokrasi Indonesia										
Program Pendidikan Politik Masyarakat	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu dan meningkatkan Kualitas indeks demokrasi		5 kecamatan	5 kecamatan	5 kecamatan	5 kecamatan			4,297,308,000	Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik
Tim Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilu dan Monitoring Pelaksanaan Pemilu Presiden dan Legislatif Tahun 2019	Jumlah anggota tim Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilu								225,436,000	
Sosialisasi Persiapan Pemilu Presiden dan Legislatif Tahun 2019	Jumlah peserta sosialisasi								200,000,000	
Sosialisasi Pemungutan dan Perhitungan Suara Tingkat KPPS Pemilu 2019 (KPU)	Jumlah peserta sosialisasi								366,600,000	
Tujuan 11 Kota dan Pemukiman Yang Berkelanjutan										
INDIKATOR SDGs: 11.1.1.(a). Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.										
Program Pengembangan Kawasan Pemukiman	Persentase Rumah Layak Huni	%	65	70	75	80			155,932,821,294	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Pemukiman
AP Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah bangunan yang terbangun								500,000,000	

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2018	TARGET TAHUNAN					ALOKASI ANGGARAN 5	INSTANSI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023		
Bantuan Stimulan Pembangunan Baru (PB) Rumah Swadaya	Jumlah bantuan yang diberikan								22,100,000,000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Pemukiman
Pembangunan Kawasan	Luas kawasan permukiman								10,000,000,000	
INDIKATOR SDGs: 11.6.1.(a). Persentase sampah perkotaan yang tertangani.										
Program pengembangan kinerja pengelolaan Persampahan	Persentase jumlah sampah yang tertangani	%	21.67	28.85	33.34	34.64			7,500,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup		76.5	77.1	78.5	79.62			1,500,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
Optimalisasi penanganan sampah di Ibukota Kabupaten	Persentase ketersediaan penanganan sampah di Ibukota Kabupaten	%							1,150,000,000	
Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim										
INDIKATOR SDGs: 13.1.2* Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.										
Program Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana	Persentase Penanggulangan Tanggap Darurat Bencana	%		80	85	90			16,045,110,000	Dinas Ketentraman Dan Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat
Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan										
INDIKATOR SDGs: 1.2.1* Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.										
Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu										
Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin (PBI)			4,130,000,000	5,651,963,000						

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2018	TARGET TAHUNAN					ALOKASI ANGGARAN 5	INSTANSI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023		
Pembinaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE)			22,125,000	25,550,000						
Pengelolaan Data PMKS Miskin Penerima Program Penanggulangan Kemiskinan			264,600,000	956,097,000						
Pelatihan Tenaga Kerja Bagi Gakin			269,680,000	260,700,000						
Pengelolaan Data Penerima Bantuan luaran (PBI)			39,905,000	-						
Peningkatan Rumah Tidak Layak Huni (DAK Reguler TA)			1,657,000,000	1,528,000,000						
Pembinaan Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)			-	30,000,000						
INDIKATOR SDGs: 1.3.1.(c) Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.										
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial										
Fasilitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)										
Pelayanan Korban Bencana										
INDIKATOR SDGs: 1.4.1 (b) Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.										
Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Ketahanan Pangan										

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2018	TARGET TAHUNAN					ALOKASI ANGGARAN 5	INSTANSI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023		
Operasional Rastra/BPNT	Penyaluran									
INDIKATOR SDGs: 1.5.1* Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.										
INDIKATOR SDGs: 1.5.1.(a) Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.										
INDIKATOR SDGs: 1.5.1.(b) Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.										
INDIKATOR SDGs: 1.5.1.(d) Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus.										
INDIKATOR SDGs: 1.5.3* Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.										

Tujuan 2 Tanpa Kelaparan										
INDIKATOR SDGs: 2.1.1* Prevalensi ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernutrition)										
Program Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan										

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2018	TARGET TAHUNAN					ALOKASI ANGGARAN 5	INSTANSI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023		
Peningkatan Kelancaran Distribusi Ketahanan Pangan, Stabilitas Harga dan Pengembangan Produk Dalam Negeri			80,000,000	178,900,000						
Operasional TPI			291,900,000	40,250,000						
DAK Bidang Perikanan			1,720,000,000	1,394,685,000						
Pemeliharaan/Pearawatan/Peningkatan Fasilitas Pelayanan BBI Teritip Balikpapan			200,000,000	221,960,000						
Pengadaan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap			291,900,000	800,000,000						
INDIKATOR SDGs: 2.1.1.(a) Prevalensi Kekurangan Gizi (underweight) pada anak balita.										
INDIKATOR SDGs: 2.1.2* Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan pangan.										
INDIKATOR SDGs: 2.2.1* Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak balita.										
INDIKATOR SDGs: 2.2.2.(c) (i) Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH); dan (ii) tingkat konsumsi ikan perkapita										

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2018	TARGET TAHUNAN					ALOKASI ANGGARAN 5	INSTANSI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023		
INDIKATOR SDGs: 2.3.1* Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja)										
INDIKATOR SDGs: 2.5.1* Jumlah varietas unggul tanaman dan hewan untuk pangan yang dilepas.										
INDIKATOR SDGs: 2.5.2* Proporsi hewan ternak dan sejenisnya, diklasifikasikan menurut tingkat risiko kepunahan: berisiko, tidak berisiko, dan risiko yang tidak diketahui.										

Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera									
INDIKATOR SDGs: 3.1.1* Angka Kematian Ibu (AKI).									
Program Peningkatan Pelayanan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak									
Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak			372,805,000	264,266,400					
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus			300,000,000	240,000,000					
Jaminan Persalinan Bagi Masyarakat yang Tidak Mempunyai Jaminan Persalinan (DAK)			2,324,964,000	2,270,983,000					
INDIKATOR SDGs: 3.2.2.(b) Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.									
INDIKATOR SDGs: 3.3.1. Angka infeksi baru HIV per 1000 populasi tidak terinfeksi HIV.									
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular									

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2018	TARGET TAHUNAN					ALOKASI ANGGARAN 5	INSTANSI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023		
Peningkatan Imunisasi			228,405,650	204,320,000						
Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah			36,003,200	46,348,000						
Pemberantasan Penyakit Kulit/Kelamin/IMS,HIV/AIDS			152,837,950	197,120,000						
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular (TBC,ISPA, Kecacanga dan Diare Dan Kusta)			162,845,550	183,040,000						
Pemberantasan Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) dan Zoonosis			755,255,525	1.178,000,000						
INDIKATOR SDGs: 3.3.2.(a) Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.										
INDIKATOR SDGs: 3.5.1.(c) Jumlah korban penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti sesuai standar pelayanan.										
INDIKATOR SDGs: 3.5.1.(d) Jumlah lembaga rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA yang telah dikembangkan/dibantu.										
Program Upaya Kesehatan Masyarakat										
Pelayanan Kesehatan Gigi Anak Sekolah dan Masyarakat Balikpapan			60,000,000	48,000,000						
Peningkatan Gizi Masyarakat			214,100,000	178,480,000						

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2018	TARGET TAHUNAN					ALOKASI ANGGARAN 5	INSTANSI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023		
Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular (PTM)			149,862,335	179,020,000						
Pelaksanaan Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga			58,900,000	65,840,000						
Pembinaan Pemanfaatan Hasil Tanaman Obat Keluarga (TOGA)			11,938,130	47,200,000						
Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya Serta Pemberdayaan Masyarakat/ Konsumen di Bidang Obat dan Makanan			142,350,000	133,280,000						
Pelayanan Kesehatan Mata			107,800,000	86,240,000						
Pelayanan Kesehatan Jiwa			3,693,300	41,400,000						
Penatalaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Calon Jemaah Haji			81,200,000	140,960,000						
Pembayaran Klaim Visum			200,000,000	160,000,000						
Operasional Kasus KDRT, KTP, KIA dan Trafficking di Puskesmas			36,000,000	58,640,000						
Peningkatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat			438,442,025	484,960,000						

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2018	TARGET TAHUNAN					ALOKASI ANGGARAN 5	INSTANSI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023		
Penyehatan Lingkungan			123,200,000	128,667,000						
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Dinas Kesehatan (BOK) DAK			637,289,000	645,789,000						
Distribusi Obat dan e-Logistik (BOK) DAK			176,676,000	166,164,000						
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia			103,800,000	100,240,000						
Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan			214,100,000	182,480,000						
Penanganan Pelayanan Pasien Ketergantungan NAPZA			7,544,790	40,480,000						
Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Bencana			2,539,450	60,240,000						
INDIKATOR SDGs: 3.8.1.(a) Unmet need pelayanan kesehatan.										
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat										
Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas BLUD di Balikpapan			45,474,730,489	14,871,572,000						
INDIKATOR SDGs: 3.8.2.(a) Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).										
INDIKATOR SDGs: 3.a.1* Persentase merokok pada penduduk umur <15 tahun.										

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2018	TARGET TAHUNAN					ALOKASI ANGGARAN 5	INSTANSI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023		
INDIKATOR SDGs: 3.b.1.(a) Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.										
INDIKATOR SDGs: 3.c.1* Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.										
Program Peningkatan Kualitas, Kuantitas Sumber Daya Manusia Serta Sarana Prasarana Kesehatan										
Peningkatan Kualitas, Kuantitas Sumber Daya Manusia Serta Sarana Prasarana Kesehatan			12,693,231,280	28,452,817,000						
Peningkatan Kualitas Tenaga Pelayan Kesehatan Melalui Pengiriman Program Pelatihan			12,358,280	148,480,000						
Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas			291,996,200	14,319,731,000						
Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas (DAK)			1,915,395,000	6,516,978,000						
Pengelolaan Pengembangan dan Sumber Daya Kesehatan			100,000,000	109,700,000						
Penerapan Akreditasi Sarana Pelayan Kesehatan			1,534,180,000	500,000,000						
Pengawasan dan Peningkatan Kualitas Alat Kesehatan			247,350,000	1,000,000,000						

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2018	TARGET TAHUNAN					ALOKASI ANGGARAN 5	INSTANSI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023		
Pengadaan Obat dan BMHP (DAK)			3,500,000,000	3,495,909,000						
Pengadaan Obat dan BMHP			901,200,000	1,500,000,000						
Pemantapan Pelaksanaan Sistem Akuntansi dan Monitoring Evaluasi Puskesmas			13,050,000	23,440,000						
Pengembangan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah			-	40,000,000						
Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Daerah			84,270,000	83,600,000						
Peningkatan Kapasitas Kinerja Puskesmas Dalam Rangka Meningkatkan Kesehatan Masyarakat			153,900,000	75,220,000						
Manajemen Desentralisasi Kesehatan			34,901,800	60,320,000						
Pengadaan Alat Kesehatan (DAK)			1,030,400,000	378,439,000						
Penyediaan Sewa Gedung Puskesmas			-	200,000,000						

Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas
INDIKATOR SDGs: 4.1.1.(a) Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.
Program Pendidikan Dasar

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2018	TARGET TAHUNAN					ALOKASI ANGGARAN 5	INSTANSI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023		
Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah (SDN)			1,700,000,000	1,373,500,000						
Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah (SMPN)			13,000,000,000	1,650,000,000						
Dana Alokasi Khusus Sekolah Dasar (DAK)			2,315,000,000	4,110,000,000						
Dana Alokasi Khusus Sekolah Menengah Pertama (DAK)			1,904,000,000	4,351,000,000						
Pembinaan, Pengelolaan dan Pelayanan Manajemen dan Data Sekolah Dasar			50,000,000	125,000,000						
Pembinaan, Pegelolaan dan Pelayanan Manajemen dan Data Sekolah Menengah Pertama			47,003,825	175,000,000						
Penyelenggara Akreditasi Pendidikan Dasar			85,000,000	125,000,000						
Penyelenggara Akreditasi SMP			-	75,000,000						
Pembangunan ruang kelas baru (RKS) Sekolah Dasar (SD)			-	5,932,000,000						
Pembangunan ruang kelas baru (RKS) Sekolah Menengah Pertama (SMP)			-	2,700,000,000						

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2018	TARGET TAHUNAN					ALOKASI ANGGARAN 5	INSTANSI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023		
Pembangunan Pagar Sekolah Dasar (SD)			-	980,000,000						
Pembangunan Pagar Sekolah Menengah Pertama (SMP)			-	1,000,000,000						
Olympiade Sains SD			29,832,000	100,000,000						
Olympiade Sains SMP			28,296,425	100,000,000						
Pembinaan Pemantapan Implementasi Kurikulum 2013 Jenjang SD Kota Balikpapan			-	200,000,000						
Pembinaan Pemantapan Implementasi Kurikulum 2013 Jenjang SMP Kota Balikpapan			-	150,000,000						
Pengadaan Meubelair Siswa (SD) dan (SMP)			4,000,000,000	7,000,000,000						
Peringatan Hari Pendidikan Nasional			150,000,000	200,000,000						
Pelaksanaan Kuis Ki Hajar Tingkat Kota			-	160,000,000						
Pembangunan Jamban/Toilet Sekolah Dasar (SD)			-	800,000,000						
Pengadaan Perlengkapan Sekolah			-	6,000,000,000						
Pra Ujian Sekolah SD dan Ujian Sekolah SD Kota Balikpapan			238,720,000	400,000,000						
Pra Ujian Sekolah SMP dan Ujian Nasional SMP Kota Balikpapan			183,144,000	400,000,000						

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2018	TARGET TAHUNAN					ALOKASI ANGGARAN 5	INSTANSI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023		
Pembinaan Gugus SD			-	200,000,000						
Pembinaan siswa Berprestasi			-	462,500,000						
Pembangunan SD - SMP Terpadu Kelurahan Graha Indah			1,290,000	3,500,000,000						
Pembangunan Sarana Prasarana SD Negeri 001 Balikpapan (Bantuan Keuangan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018)			65,890,600	798,642,000						
Biaya Operasional Sekolah (BOS) Pusat Pendidikan Dasar			65,890,600,000	81,717,200,000						
INDIKATOR SDGs: 4.1.1.(b) Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.										
INDIKATOR SDGs: 4.1.1.(c) Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B.										
INDIKATOR SDGs: 4.1.1.(d) Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.										
INDIKATOR SDGs: 4.1.1.(e) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.										

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2018	TARGET TAHUNAN					ALOKASI ANGGARAN 5	INSTANSI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023		
	INDIKATOR SDGs: 4.2.2.(a) Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).									
	INDIKATOR SDGs: 4.4.1* Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).									
	INDIKATOR SDGs: 4.5.1* Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat, (2) SMP/MTs/ sederajat, (3) SMA/SMK/MA/ sederajat, dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.									
	INDIKATOR SDGs: 4.6.1.(a) Persentase angka melek aksara penduduk umur 15 tahun.									
	INDIKATOR SDGs: 4.6.1.(b) Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.									
	INDIKATOR SDGs: 4.a.1* Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).									
	INDIKATOR SDGs: 4.c.1* Persentase guru (TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang)bersertifikat pendidik									
	INDIKATOR SDGs: 4.1.1.(f) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat.									
	INDIKATOR SDGs: 4.3.1.(a) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat.									

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2018	TARGET TAHUNAN					ALOKASI ANGGARAN 5	INSTANSI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023		
INDIKATOR SDGs: 4.3.1.(b) Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT).										

Tujuan 5 Kesetaraan Gender										
INDIKATOR SDGs: 5.1.1* Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.										
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak										
Perlindungan Perempuan			77,500,000	614,200,000						
Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) Perlindungan Perempuan			132,427,000	196,698,000						
Pemberdayaan Potensi Perempuan			134,621,000	275,000,000						
Fasilitas Pengembangan Kecamatan Layak Anak			345,598,000	42,280,000						
Perlindungan Anak			42,400,000	72,600,000						
Komunikasi, Informasi dan Edukasi Perlindungan Anak			217,448,000	259,298,000						
pendataan Evaluasi, Pelaporan dan penguatan sistem Perlindungan Anak			85,750,000	243,147,000						
INDIKATOR SDGs: 5.2.1 Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.										

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2018	TARGET TAHUNAN					ALOKASI ANGGARAN 5	INSTANSI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023		
INDIKATOR SDGs: 5.2.1.(a) Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.										
INDIKATOR SDGs: 5.5.1* Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.										
Tujuan 6 Air Kebersihan dan Sanitasi Layak										
INDIKATOR SDGs: 6.1.1.(a) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.										
INDIKATOR SDGs: 6.2.1.(c) Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).										
INDIKATOR SDGs: 6.3.2.(b) Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.										
INDIKATOR SDGs: 6.6.1.(d) Luas lahan kritis dalam KPH yang direhabilitasi.										
Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau										
INDIKATOR SDGs: 7.1.1* Rasio elektrifikasi.										
INDIKATOR SDGs: 7.2.1* Bauran energi terbarukan.										

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2018	TARGET TAHUNAN					ALOKASI ANGGARAN 5	INSTANSI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023		

Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi										
INDIKATOR SDGs: 8.2.1* Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun										
INDIKATOR SDGs: 8.3.1.(c) Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan										
Program Peningkatan Kesempatan Kerja										
Pelayanan Antar Kerja			90,266,000	104,572,000						
Perluasan Kesempatan Kerja			57,123,000	27,040,000						
INDIKATOR SDGs: 8.5.1* Upah rata-rata per jam pekerja										
Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan										
Pembinaan, Pencegahan dan Penyelesaian Perselisian Hubungan Industrial			57,123,000	30,640,000						
Pengendalian dan Koordinasi Dewan Pengupahan Dalam Penetapan UMK			25,860,000	75,902,500						
Pembinaan Pengaturan Syarat Kerja			29,463,000	61,110,000						
Pemasyarakatan Hubungan Industrial			1,800,000	12,885,000						

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2018	TARGET TAHUNAN					ALOKASI ANGGARAN 5	INSTANSI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023		
INDIKATOR SDGs: 8.5.2* Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur										
Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan										
Pembinaan, Pencegahan dan Penyelesaian Perselisian Hubungan Industrial			57,123,000	30,640,000						
Pengendalian dan Koordinasi Dewan Pengupahan Dalam Penetapan UMK			25,860,000	75,902,500						
INDIKATOR SDGs: 8.6.1* Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET)										
Program Peningkatan Kesempatan Kerja										
Penyelenggaraan Pelatihan Kerja			561,400,000	648,055,000						
Penyelenggaraan Pemagangan			28,950,000	31,150,000						
Pembinaan LPK			34,950,600	17,700,000						
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata										
Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata			698,241,000	9,000,000,000						
Program Pembinaan dan Pengembangan Obyek Wisata										
Pengumpulan Data Jumlah Wisatawan dan Kunjungan Obyek Wisata di Balikpapan			1,113,836,000	1,402,140,000						
Pemilihan dan Pembinaan Duta Wisata Kota Balikpapan			23,220,000	135,000,000						
Operasional UPT Pantai Manggar Segara Sari			956,616,000	1,043,920,000						

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2018	TARGET TAHUNAN					ALOKASI ANGGARAN 5	INSTANSI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023		
Pengamanan Pantai Manggar Pada Hari Besar/Libur Nasional			-	200,000,000						
INDIKATOR SDGs: 8.9.1* Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB										
INDIKATOR SDGs: 8.9.1.(a) Jumlah wisatawan mancanegara										
INDIKATOR SDGs: 8.9.1.(b) Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.										
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata										
Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di Luar Negeri			63,200,000	1,069,485,500						
Operasional Balikpapan Tourism Board (BTB)			56,400,000	187,000,000						
Cetak Brosur Informasi dan souvenir			240,000,000	250,000,000						
Pengembangan Informasi Pariwisata Berbasis Aplikasi			-	54,000,000						
Tujuan 9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur										
INDIKATOR SDGs: 9.1.1.(a) Kondisi mantap jalan nasional.										
INDIKATOR SDGs: 9.1.2.(a) Jumlah bandara.										

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2018	TARGET TAHUNAN					ALOKASI ANGGARAN 5	INSTANSI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023		
INDIKATOR SDGs: 9.1.2.(c) Jumlah pelabuhan strategis.										
INDIKATOR SDGs: 9.2.1* Proporsi nilai tambah sektor industri pengolahan non migas terhadap PDB dan perkapita.										
INDIKATOR SDGs: 9.3.1* Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri..										
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah										
Fasilitas Kepemilikan Sertifikat Merk hak cipta, dan label halal			29,730,000	50,000,000						
Penyertaan Promosi Dan Partisipasi Industri kecil Menengah (DEKRANASDA)			133,224,000	221,139,000						
Pelatihan Aneka Usaha IKM			50,000,000	50,000,000						
Pengembangan dan Pembinaan Industri Kreatif			-	293,002,000						
Pengawasan Pengendalian TDI & IUI			-	41,784,000						
INDIKATOR SDGs: 9.4.1.(a) Persentase Perubahan Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca.										

PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2018	TARGET TAHUNAN					ALOKASI ANGGARAN 5	INSTANSI PELAKSANA
				2019	2020	2021	2022	2023		
Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan										
INDIKATOR SDGs: 10.1.1.(a) Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.										
Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu										
Pembayaran luran BPJS Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin (PBI)			4,130,000,000	5,651,963,000						
PEMBINAAN Kelompok Usaha Bersama (KUBE)			22,125,000	25,550,000						
Pengelolaan Data PMKS Miskin Penerimaan Program Penanggulangan Kemiskinan			264,600,000	750,000,000						
Pelatihan Tenaga Kerja Bagi Gakin			269,680,000	260,700,000						
Pengelolaan Data Penerima Bantuan luran (PBI)			39,905,000							
Peningkatan Kualitas Rumah tidak Layak Huni (DAK Reguler TA)			1,657,000,000	1,528,000,000						
Pembinaan Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)			-	30,000,000						

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya,
KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM

H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006



**BADAN
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
DAERAH**

PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR

Alamat Kantor :
Jl. Kesuma Bangsa No. 02 Samarinda 75123, Telp : 0541 - 741044